



**PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2021**



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 Tentang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
8. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari rangkaian pelaksanaan forum PD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karangasem.
- (2) Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja PD dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 38.

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	Bab I 1
1.1 Latar Belakang	Bab I 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Bab I 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	Bab I 6
1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2021	Bab I 7
1.3.2 RKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	Bab I 7
1.3.3 RKPD dan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021	Bab I 7
1.3.4 RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS	Bab I 7
1.4 Maksud dan Tujuan	Bab I 8
1.4.1 Maksud	Bab I 8
1.4.2 Tujuan	Bab I 8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	Bab I 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	Bab II 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	Bab II 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	Bab II 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Bab II 16
2.1.3 Aspek pelayanan Umum	Bab II 45
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	Bab II 126
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	Bab II 137
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	Bab II 137
2.2.2 Realisasi RPJMD	Bab II 287
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	Bab II 297

	2.3.1	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	Bab II	297
	2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Bab II	298
	2.4	Inovasi Daerah	Bab II	314
BAB	III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	Bab III	1
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	Bab III	1
	3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019	Bab III	2
	3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali	Bab III	3
	3.1.3	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019	Bab III	4
	3.1.4	Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021	Bab III	5
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	Bab III	9
	3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	Bab III	9
	3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	Bab III	14
	3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	Bab III	22
BAB	IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	Bab IV	1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Bab IV	2
	4.1.1	Visi dan Misi	Bab IV	2
	4.1.2	Tujuan , Sasaran dan Strategi	Bab IV	5
	4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Bab IV	14
	4.2.1	Isu Strategis	Bab IV	14
	4.2.2	Tema Pembangunan	Bab IV	16
	4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2021	Bab IV	17
	4.3	Kebijakan Daerah Dalam Rangka Penanganan Wabah Covid 19	Bab IV	25
BAB	V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	Bab V	1
BAB	VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bab VI	1

BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

..... Bab VII 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2019	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2019	II-1
Tabel 2.3	Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian Dirinci per Kecamatan, Tahun 2019	II-3
Tabel 2.4	Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Tekstur Tanah dan Kecamatan, Tahun 2019	II-3
Tabel 2.5	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Karangasem, Tahun 2019.....	II-5
Tabel 2.6	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Karangasem per Stasiun Tahun 2017	II-7
Tabel 2.7	Rata-Rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika di Karangasem Tahun 2017	II-7
Tabel 2.8	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018.....	II-8
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Per kecamatan Tahun 2014-2018	II-8
Tabel 2.10	Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karangasem Per kecamatan Tahun 2018	II-9
Tabel 2.11	Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Karangasem per kecamatan tahun 2018	II-9
Tabel 2.12	Penduduk Karangasem menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-10
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2019	II-19
Tabel 2.14	PDRB per kapita Kabupaten Karangasem atas dasar harga bruto dan konstan Tahun 2015-2019 (juta rupiah).....	II-21
Tabel 2.15	Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Karangasem, Tahun 2015-2019	II-21
Tabel 2.16	Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018	II-23
Tabel 2.17	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-24
Tabel 2.18	Angka Melek Huruf Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-28
Tabel 2.19	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018.....	II-29
Tabel 2.20	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Kabupaten Karangasem Tahun 2014- 2018.....	II-29
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Karangasem Tahun 2014- 2018.....	II-30
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014- 2018	II-30
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018	II-31
Tabel 2.24	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018.....	II-32

Tabel 2.25	Hasil Vaksinasi Bayi Umur 0-12 Bulan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018	II-32
Tabel 2.26	Hasil Vaksinasi Ibu Hamil di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018	II-33
Tabel 2.27	Hasil Vaksinasi Anak SD di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018.....	II-33
Tabel 2.28	Banyaknya Balita Yang Ditimbang, BB naik dan BMG serta Balita Gizi Buruk di Kabupaten Karangasem 2014-2018	II-34
Tabel 2.29	Banyaknya Kematian Bayi di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-34
Tabel 2.30	Banyaknya Kematian Ibu di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-35
Tabel 2.31	Upaya Pelayanan Imunisasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-39
Tabel 2.32	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-40
Tabel 2.33	Banyaknya Akseptor Aktif menurut metode kontrasepsi yang Digunakan Tahun 2014-2018.....	II-40
Tabel 2.34	Jumlah Klinik KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-40
Tabel 2.35	IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018	II-43
Tabel 2.36	Jenis, Jumlah Dan Situs Cagar Budaya Yang Ada Di Kabupaten Karangasem	II-44
Tabel 2.37	Jumlah Klub Olahraga Dan Sarana Prasarana Olahraga Di Kabupaten Karangasem.....	II-44
Tabel 2.38	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018/2019.....	II-45
Tabel 2.39	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015 -2018/2019.....	II-46
Tabel 2.40	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan Tahun 2018	II-46
Tabel 2.41	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019.....	II-47
Tabel 2.42	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019.....	II-47
Tabel 2.43	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidayah (MI) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015-2018/2019.....	II-48
Tabel 2.44	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidayah (MI) Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019.....	II-48
Tabel 2.45	Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.46	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015– 2018/2019	II-49
Tabel 2.47	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 - 2018/2019	II-50
Tabel 2.48	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019	II-50
Tabel 2.49	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiah (MTs) Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015 – 2018/2019	II-51
Tabel 2.50	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiah (MTs) Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019	II-51

Tabel 2.51	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019.....	II-52
Tabel 2.52	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019	II-52
Tabel 2.53	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014– 2018	II-53
Tabel 2.54	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum (SMU) Menurut Kecamatan Tahun 2018	II-53
Tabel 2.55	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Negeri Dan Swasta di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018 /2019	II-54
Tabel 2.56	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019	II-54
Tabel 2.57	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-54
Tabel 2.58	Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019	II-55
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pendidikan Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-55
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah Tempat Tidur yang Dimiliki RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-57
Tabel 2.61	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018.....	II-58
Tabel 2.62	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Tahun 2018.....	II-58
Tabel 2.63	Banyaknya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Menurut Status Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014–2018	II-59
Tabel 2.64	Banyaknya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Menurut Status Tenaga Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-59
Tabel 2.65	Jumlah Sarana Medis, Pasien, dan Tenaga Medis, Paramedis, Serta Prasarana RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-60
Tabel 2.66	Sepuluh Penyakit Terbanyak Yang Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-61
Tabel 2.67	Sepuluh Penyakit Terbanyak Yang Rawat Jalan Di RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-61
Tabel 2.68	Sepuluh Kasus Kematian Terbanyak Pasien Rawat Inap RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-62
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kesehatan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-62
Tabel 2.70	Panjang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Menurut Kondisi di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-65
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017	II-65
Tabel 2.72	Banyaknya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Jenisnya Tahun 2015-2018.....	II-66
Tabel 2.73	Perkembangan Jumlah Anak Asuh, Jumlah penghuni dan Kapasitas Tampung Panti Asuhan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018	II-67

Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Sosial Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-68
Tabel 2.80	Capaian Indikator SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2019 dan Target 2020-2021	II-69
Tabel 2.81	Banyaknya Angkutan Darat Bermotor Yang Wajib Uji di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018.....	II-83
Tabel 2.82	Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Menurut Jenis Sarana di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-83
Tabel 2.83	Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenis Sarana di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-84
Tabel 2.84	Banyaknya Kecelakaan Lalulintas Serta Kerugian Material di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018	II-84
Tabel 2.85	Arus Kunjungan kapal Laut Pada Pelabuhan Padangbai Tahun 2017	II-84
Tabel 2.86	Volume Bongkar Muat Barang dan Kendaraan di Pelabuhan Laut Padangbai Tahun 2017	II-85
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Perhubungan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-86
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Lingkungan Hidup Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-86
Tabel 2.89	Banyaknya Penerbitan Sertifikat Tanah di Kabupaten Karangasem	II-87
Tabel 2.90	Banyaknya Akta yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-87
Tabel 2.91	Banyaknya Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Diterbitkan oleh Catatan Sipil Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	II-88
Tabel 2.92	Banyaknya Klinik KB dan Peserta KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Persentase Peserta KB Terhadap PUS di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-90
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-90
Tabel 2.94	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-91
Tabel 2.95	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-92
Tabel 2.96	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-92
Tabel 2.97	Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2015 – 2017	II-93
Tabel 2.98	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018.....	II-95
Tabel 2.99	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017.....	II-95
Tabel 2.100	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kebudayaan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-95
Tabel 2.101	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....	II-97
Tabel 2.102	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Ketahanan Pangan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-98
Tabel 2.103	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2017-2021.....	II-99
Tabel 2.104	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-99
Tabel 2.105	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-100
Tabel 2.106	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-101

Tabel 2.107	Perkembangan Luas (hektar) Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015.....	II-102
Tabel 2.108	Perkembangan Produksi (Ton) Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015	II-102
Tabel 2.109	Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Karangasem Tahun 2011 - 2015	II-102
Tabel 2.110	Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Karangasem Per Kecamatan Tahun 2017-2018	II-103
Tabel 2.111	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pertanian Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-103
Tabel 2.112	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-105
Tabel 2.113	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-105
Tabel 2.114	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-106
Tabel 2.115	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-106
Tabel 2.116	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Coklat Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-107
Tabel 2.117	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Jambu Mete Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-107
Tabel 2.118	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kapuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-107
Tabel 2.119	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Panili Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	II-108
Tabel 2.120	Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Tembakau di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-108
Tabel 2.121	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2016.....	II-109
Tabel 2.122	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2016	II-109
Tabel 2.123	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2016	II-109
Tabel 2.124	Luas Lahan Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2016.....	II-110
Tabel 2.125	Luasan (Hektar) Kegiatan Konservasi Tanah (Pembuatan Hutan Rakyat) di Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2016	II-110
Tabel 2.126	Populasi Ternak di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018.....	II-111
Tabel 2.127	Populasi Ternak di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018	II-112
Tabel 2.128	Populasi Unggas di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018	II-112
Tabel 2.129	Perkembangan Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-113
Tabel 2.130	Perkembangan Benih Ikan yang Ditebar pada Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2014-2018.....	II-114
Tabel 2.131	Jumlah Perahu dan Motor Tempel di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018	II-114
Tabel 2.132	Jumlah Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018	II-114
Tabel 2.133	Jumlah Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan (P2HP) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-115

Tabel 2.134	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017.....	II-115
Tabel 2.135	Objek Wisata di Kabupaten Karangasem.....	II-116
Tabel 2.136	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018	II-117
Tabel 2.137	Jumlah Hotel di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-117
Tabel 2.138	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pariwisata Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-117
Tabel 2.139	Banyaknya SIUP Perdagangan Barang dan Jasa yang Dikeluarkan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan Tahun 2018	II-118
Tabel 2.140	Banyaknya SIUP Perdagangan Barang dan Jasa yang Dikeluarkan Berdasarkan Bentuk Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-119
Tabel 2.141	Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Golongan Industri, Tahun 2017	II-119
Tabel 2.142	Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-120
Tabel 2.143	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017.....	II-121
Tabel 2.144	Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-122
Tabel 2.145	Jumlah Formasi dan Jumlah CPNS Yang Diterima Dari Pelamar Umum atau Honorer Tahun 2014-2018.....	II-122
Tabel 2.146	Perkembangan Diklat Penjenjangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2017.....	II-123
Tabel 2.147	Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2018.....	II-123
Tabel 2.148	Perkembangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 - 2017	II-123
Tabel 2.149	Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Satya Lencana Karya Satya Tahun 2013 - 2017	II-123
Tabel 2.150	Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Tahun 2013-2017.....	II-124
Tabel 2.151	Rekap Data Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-124
Tabel 2.152	Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Otonomi Daerah , Administrasi pemerintahan dan Persandian Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017	II-126
Tabel 2.153	Perkembangan Rata –Rata Pengeluaran Per Kapita Selama Sebulan Serta Persentase Konsumsi Makanan Dan Non Makanan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-127
Tabel 2.154	Produktivitas Daerah/Rasio PDRB Atas dasar Harga Berlaku dengan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem Tahun 2017.....	II-128
Tabel 2.155	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Keadaan Tahun 2014-2018.....	II-128
Tabel 2.156	Panjang Jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-129
Tabel 2.157	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-129
Tabel 2.158	Arus Penumpang Pelayaran, Volume Bongkar Muat Barang dan Kendaraan Melalui Pelabuhan Padangbai Tahun 2014-2018	II-130

Tabel 2.159	Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk di Kabupaten Karangasem Tahun 2017.....	II-131
Tabel 2.160	Indikator Banking Penetration Tahun 2017	II-131
Tabel 2.161	Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang di Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2018.....	II-132
Tabel 2.162	Jumlah Restoran di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-132
Tabel 2.163	Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Listrik di Kabupaten Karangasem tahun 2014-2016	II-133
Tabel 2.164	Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air Minum di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018	II-133
Tabel 2.165	Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018	II-134
Tabel 2.166	Banyaknya Pelanggan Telepon Menurut Jenis Pemakai Tahun 2014-2018.....	II-134
Tabel 2.167	Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan Di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018.....	II-135
Tabel 2.168	Realisasi Investasi PMA Kabupaten/Kota se- Bali Menurut Lokasi Tahun 2013-2017.....	II-135
Tabel 2.169	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi Tahun 2013 -2017.....	II-136
Tabel 2.170	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2017.....	II-136
Tabel 2.171	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas menurut Status Pendidikan Tahun 2017	II-136
Tabel 2.172	Persentase Penduduk Berumur 7 -24 Tahun menurut Status Pendidikan Tahun 2017	II-137
Tabel 2.173	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019.....	II-138
Tabel 2.174	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019.....	II-285
Tabel 2.175	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Capaian Urusan Pemerintahan Daerah Sampai dengan Tahun 2019.....	II-288
Tabel 2.176	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-299
Tabel 2.177	Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.....	II-315
Tabel 2.178	Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat	II-316
Tabel 3.1	Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021	III-7
Tabel 3.2	Realisasi Dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Karangasem Tahun 2017 – 2021.....	III-11
Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019	III-13
Tabel 3.4	Realisasi Dan Proyeksi / Target Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 – 2021.....	III-19
Tabel 3.5	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019	III-21
Tabel 3.6	Realisasi Dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 – 2021.....	III-23
Tabel 3.7	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019.	III-24
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi RPJMD dengan Misi RPJPD	IV-2
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD	IV-4
Tabel 4.3	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	IV-5

Tabel 4.4	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional	IV-19
Tabel 4.5	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Bali.....	IV-20
Tabel 4.6	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD.....	IV-21
Tabel 5.1	Program Prioritas Kabupaten Karangasem Tahun 2021.....	V-2
Tabel 5.2	Alokasi Pendanaan Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 Dan Hasil Pemetaan (Mapping) Permendagri 90 Tahun 2019.....	V-11
Tabel 5.3	Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan Kebutuhan.....	V-17
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun 2021.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	Bab I	7
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Karangasem	Bab II	2
Gambar 2.2	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2019 (Trilyun Rupiah)	Bab II	16
Gambar 2.3	Kontribusi (Share) PDRB ADHB 2019 (%)	Bab II	17
Gambar 2.4	Perkembangan Share 3 Lapangan Usaha Utama	Bab II	17
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan 3 Lapangan Usaha Utama	Bab II	18
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen)	Bab II	19
Gambar 2.7	Share PDRB Kabupaten Karangasem (Persen)	Bab II	20
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota 2019 (Jt Rupiah)	Bab II	22
Gambar 2.9	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2010-2019 (Juta Rupiah)	Bab II	22
Gambar 2.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali Tahun 2010-2019	Bab II	25
Gambar 2.11	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2018-2019	Bab II	26
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2019	Bab II	27
Gambar 3.1	Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021	Bab III	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Dokumen dimaksud memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arah kebijakan tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan :

- a. Pendekatan Politis;
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- b. Pendekatan Teknokratik;
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
- c. Pendekatan Partisipatif;
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- d. Pendekatan Top down & Bottom Up;
(diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa) dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat,

Serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan prinsip Money follow Programme melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten Karangasem disusun berdasarkan tahapan, yaitu :

1. Persiapan penyusunan RKPD,
2. Penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD,
3. Penyusunan rancangan RKPD,
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD,
5. Perumusan rancangan akhir (Rankhir) RKPD, dan
6. Penetapan RKPD.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku, dimana program dan kegiatan yang digunakan mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada RPJMD dan Renstra perangkat daerah eksisting. Pemerintah daerah kemudian melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan pada RKPD 2021 berdasarkan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS. Kemudian, APBD tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional dan daerah. Wabah tersebut berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan khususnya pencapaian sasaran tahun 2020, diakibatkan berkurangnya pembiayaan pembangunan akibat pengalihan pembiayaan ke penanganan Covid-19. Dengan mempertimbangkan asumsi bahwa pandemik bisa berakhir dalam tahun 2020, pemerintah mengagendakan skenario pemulihan ekonomi setelah Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, ditetapkan tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan empat fokus yaitu Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana. Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial tersebut didukung oleh tujuh prioritas pembangunan Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan pemerintah tahun 2021 tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan perencanaan tahun 2021 dengan memperhatikan pencapaian target tahun 2020 dan 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 Tentang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;

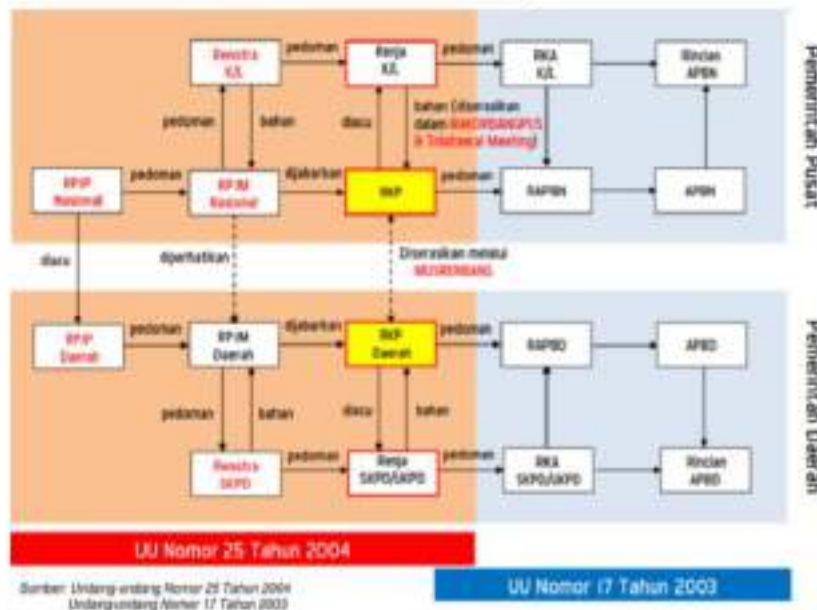
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.

Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 memperhatikan kebijakan tingkat nasional yang mengacu kepada RKP sebagai penjabaran RPJMN serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat, berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali yang merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat spasial seperti dokumen RTRW Nasional dan Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah pada level daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2021

Keterkaitan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan diwujudkan melalui penyelarasan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem dengan tema dan prioritas pembangunan nasional serta memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga.

1.3.2 RKPD dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten Karangasem dengan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 akan diwujudkan melalui penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing, sehingga tercipta keselarasan perencanaan di Kabupaten Karangasem dengan perencanaan di Provinsi Bali.

1.3.3 RKPD dan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

1.3.4 RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS

RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) karena memuat

arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Sebagai gambaran arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2021;
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2021 guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 sesuai RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah :

1. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 79 ayat (2), maka rancangan awal RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD yang menguraikan :

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen.

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang Fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan

permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.4. Inovasi Daerah

Menguraikan terobosan ataupun inovasi yang dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Karangasem, yang dilakukan perseorangan maupun kelompok masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang :

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dan proyeksi serta tantangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala daerah, isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan :

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD, serta menyajikan Tema RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021.

Menggambarkan prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2021 dengan pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan

tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2021 yaitu menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa adat yang meliputi 714 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 539 banjar dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km². Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,7	10.970	13,07
2	Sidemen	31,15	3.515	4,79
3	Manggis	69,83	6.983	8,32
4	Karangasem	94,23	9.423	11,22
5	Abang	134,05	13.405	15,97
6	Bebandem	81,51	8.151	9,71
7	Selat	80,36	8.035	9,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,95
	Jumlah	839,54	83.954	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	62	62	-
2	Sidemen	10	-	19	70	51	-
3	Manggis	12	-	20	80	59	-
4	Karangasem	8	3	23	172	72	52
5	Abang	14	-	20	96	96	-

6	Bebandem	8	-	15	67	70	-
7	Selat	8	-	27	92	66	-
8	Kubu	9	-	41	75	71	-
Jumlah		75	3	190	714	547	52

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Karangasem adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

B. Letak dan kondisi geografis

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8°00'00" – 8°41'37,8" Lintang Selatan dan 115°35'9,8" – 115°54'8,9" Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Karangasem



C. Topografi

Secara topografi hampir separuh luas wilayah atau sebesar 43,5 % memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74 % wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sedang, dan 26 % sisanya memiliki tekstur yang kasar. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian
Dirinci per Kecamatan, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ketinggian (m)				Jumlah
		0 – 50	50–100	100-500	> 500	
1.	Rendang	-	-	1.216	9.754	10.970
2.	Sidemen	-	60	3.135	320	3.515
3.	Manggis	2.368	1.920	2.439	256	6.983
4.	Karangasem	2.880	2.496	3.279	768	9.423
5.	Abang	1.752	1.344	6.813	3.496	13.405
6.	Bebandem	-	-	3.287	4.864	8.151
7.	Selat	-	-	2.240	5.795	8.035
8.	Kubu	4.032	2.048	6.128	11.264	23.472
	Jumlah	11.032	7.868	28.537	36.517	83.954

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Tekstur Tanah dan
Kecamatan, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kasar		Sedang		Halus	
		Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	231	-	10.739	13	-	-
2	Sidemen	462	1	3.053	3	-	-
3	Manggis	-	-	6.983	8	-	-
4	Karangasem	-	-	9.423	11	-	-
5	Abang	231	-	13.174	16	-	-
6	Bebandem	462	1	7.689	9	-	-
7	Selat	462	1	7.573	9	-	-
8	Kubu	19.312	23	4.160	5	-	-
	Jumlah	21.160	26	62.794	74	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

D. Geologi

Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari Formasi Kuarter, Kuarter Bawah, dan Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten. Formasi kuarter dengan Litologi Tufa Pasiran dan endapan lahar terdapat di pesisir utara yaitu di daerah Tianyar. Litologi berupa lahar, pasir, lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya di daerah Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran Tukad Buhu, dan Tukad Bangka. Di Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang daerah aliran sungai unda. Komposisi lahar terdiri dari batuan beku andesit dan batu apung dengan masa dasar tufa pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik, dan mineral hitam. Lapili dan Bom Komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit, umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat pada batuan ini terdapat lava dan breksi, kompak dank eras, pada lava sebagian berongga. Formasi kuarter bawah terdapat di ujung timur kabupaten yaitu di Kecamatan Karangasem bagian timur dan Kecamatan Abang bagian utara. Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava berwarna abu-abu kehitaman, Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan formasi Ulakan. Lava berwarna abu-abu kehitaman dan berwarna coklat kehitaman.

E. Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Karangasem meliputi:

1) Air Tanah

Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi Pulau Bali adalah sebagai berikut :

- a. Setempat kandungan air besar (10 Lt/det) lokasinya: pesisir utara Kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.
- b. Setempat kandungan air sedang (5 Lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.
- c. Setempat kandungan air sedikit (0,5 Lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.
- d. Setempat Kandungan air sangat sedikit sekali (0,1 Lt/det) umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yaitu di sekitar kaki Gunung Agung.
- e. Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 Lt/det) terdapat di gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen.

2) Air Permukaan

a. Air Sungai

Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20 sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan 03.01.17. Adapun nama dan panjang sungai di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Karangasem, Tahun 2019

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	Tukad Bumbung	14,1
2	Tukad Deling	6,6
3	Tukad Daya	16,3
4	Tukad Barak	5,2
5	Tukad Dalem	9
6	Tukad Musu	6
7	Tukad Galiran	4,6
8	Tukad Bakalan	6,5
9	Tukad Linggah	12
10	Tukad Sakta	7,5
11	Tukad Penanggungan	8
12	Tukad Lebah Celagi	6,8
13	Tukad Buluh	10
14	Tukad Maong	6
15	Tukad Lamben	8
16	Tukad Wanang	8,6
17	Tukad Kelontong	12
18	Tukad Kates	6,4
19	Tukad Base	4,5
20	Tukad Katumanak	3,5
21	Tukad Ilu	3,8
22	Tukad Bunut	4,9
23	Tukad Seraya	6,6
24	Tukad Nyuling	13
25	Tukad Luah	15,4
26	Tukad Bangka	10
27	Tukad Bubu	19

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Di antara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua

buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telaga Waja. Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3 jenis, yaitu:

- 1) Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke bagian selatan seperti: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Keckeruk, Tukad Buhu dan lainnya.
- 2) Mengalir hanya pada musim hujan (intermittent streams). Sungai jenis ini banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.
- 3) Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur).

b. Air Danau/ Waduk

Di Kabupaten Karangasem tidak terdapat satu pun danau alam sebagai sumber air. Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk yang dimaksud adalah Embung Seraya yang terdapat di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem.

F. Klimatologi

Kabupaten Karangasem memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dan terdapat musim kemarau dan hujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah hujan. Pada daerah pegunungan curah hujan terdapat pada setiap bulan atau sepanjang tahun hampir tidak terdapat bulan-bulan kering. Selama tahun 2017, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari hingga bulan Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari mencapai 534,0 mm dengan hari hujan sebanyak 22 hari, Sementara itu, kondisi curah hujan rendah, hanya terjadi selama bulan Juli hingga bulan September, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya, curah hujan kembali meningkat hingga akhir tahun. Selengkapnya hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Karangasem 2017 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Karangasem
per Stasiun Tahun 2017

No.	Stasiun	Banyak Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
1	Besakih	196	3.163,6
2	Singarata	201	3.804,5
3	Duda/Selat	230	4.050,0
4	Sidemen	130	3.336,0
5	Talibeng	20	307,3
6	Bebandem	122	2.999,0
7	Ulakan	147	2.372,2
8	Amlapura	-	-
9	Jasri Kelod	71	1.171,7
10	Seraya Barat	-	-
11	Seraya Tengah	-	-
12	Seraya Timur	-	-
13	Abang	166	3.167,0
14	Purwakerti	157	2.525,0
15	Kubu	61	1.569,9
16	Tianyar	-	0
	Jumlah	1.178	28.466,2

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kondisi meteorologi dan geofisika sepanjang tahun 2017, menunjukkan curah hujan maksimum terjadi pada bulan Januari dan minimum terjadi pada bulan Agustus, suhu udara berada pada 22,9-32,1 °C, dengan kelembaban 73-88%, dan kecepatan angin antara 4-8 knot, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rata-rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika di Karangasem
Tahun 2017

No.	Uraian	Minimum	Maksimum
1	Jumlah curah hujan (mm)	7,5 (Agustus)	534,0 (Januari)
2	Suhu Udara (°C)	22,9 (Agustus)	32,1 (Oktober)
3	Kelembaban udara (%)	73 (September)	88 (Januari)
4	Rata-rata penyinaran matahari (%)	29 (Januari)	96 (September)
5	Rata-rata kecepatan angin (knot)	4 (Maret)	8 (Oktober)
6	Rata-rata tekanan udara (milibar)	1.010,0 (Desember)	1.013,6 (Agustus-September)

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

G. Penggunaan Lahan

Luas lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Karangasem dikelompokkan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas lahan pertanian mencapai 74.697 ha, kalau dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Karangasem luas lahan pertanian mencapai 88,96% dan luas lahan bukan pertanian 9.271 ha atau 11,04%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 – 2018 (Ha)

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lahan Pertanian	74.748	74.720	75.451	74.697	74.697
a.	Lahan Sawah	7.166	7.151	7.137	7.122	7.118
b.	Lahan Bukan Sawah	67.582	67.569	68.314	67.575	67.566
2	Lahan Bukan Pertanian	9.206	9.234	8.503	9.257	9.271
	Jumlah	83.954	83.954	83.954	83.954	83.954

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

H. Demografi

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhannya, maka jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 sebanyak 414.800 jiwa dengan komposisi 207.600 jiwa penduduk laki-laki (50,05 persen) dan 207.200 jiwa penduduk perempuan (49,95 persen) dan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 0,96%. Adapun perkembangan jumlah penduduk disajikan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem
Per kecamatan Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2014-2018
1	Rendang	38.580	38.880	39.250	39.580	39.910	1,84
2	Sidemen	32.470	32.650	32.820	32.980	33.130	1,06
3	Manggis	44.990	45.200	45.430	45.560	45.750	0,78
4	Karangasem	85.570	86.210	86.780	87.500	88.020	1,48
5	Abang	61.980	62.150	62.350	62.560	62.790	0,54
6	Bebandem	45.760	45.940	46.070	46.160	46.30.00	0,43

7	Selat	39.030	39.190	39.380	39.510	39.680	0,86
8	Kubu	58.220	58.480	58.720	58.950	59.220	0,76
Jumlah/Total		406.600	408.700	410.800	412.800	414.800	0,96

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.10
Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Karangasem
Per kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Rendang	20.100	19.810	39.910	101,46
2	Sidemen	16.350	16.780	33.130	97,44
3	Manggis	22.650	23.100	45.750	98,05
4	Karangasem	43.960	44.060	88.020	99,77
5	Abang	31.570	31.220	62.790	101,12
6	Bebandem	22.980	23.320	46.300	98,54
7	Selat	19.620	20.060	39.680	97,81
8	Kubu	30.370	28.850	59.220	105,27
Jumlah/Total		207.600	207.200	414.800	100,19

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa sebaran penduduk sebagian besar penduduk bermukim di wilayah Karangasem bagian utara, yaitu Kecamatan Kubu dan Abang. Sedangkan untuk wilayah selatan, penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Karangasem terdapat ibukota kabupaten yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan luas wilayah 839,54 km², kepadatan di Kabupaten Karangasem mencapai 495 jiwa/km². Dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Karangasem merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 88.020 jiwa atau sekitar 21,22 persen. Kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Sidemen yaitu 943 jiwa per km². Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Karangasem per kecamatan tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karangasem
per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per-Km ²	Persentase Penduduk Kecamatan Terhadap Penduduk Kabupaten
1	Rendang	39.910	109,70	364	9,62
2	Sidemen	33.130	35,15	943	7,99
3	Manggis	45.750	69,83	656	11,03
4	Karangasem	88.020	94,23	935	21,22
5	Abang	62.790	134,05	469	15,14
6	Bebandem	46.300	81,51	569	11,16

7	Selat	39.680	80,35	494	9,57
8	Kubu	59.220	234,72	253	14,28
Jumlah/Total		414.800	839,54	495	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Penduduk menurut golongan umur di Kabupaten Karangasem tahun 2018, sebagian besar adalah golongan usia produktif yaitu umur 15-54 tahun dan usia di atas 75 tahun hanya tinggal 13.000 jiwa. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Penduduk Karangasem Menurut Golongan Umur
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Golongan Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	16.400	15.600	32.000
5-9	17.700	16.700	34.400
10- 14	19.900	18.600	38.500
15 -19	17.400	14.900	32.300
20 -24	13.500	12.700	26.200
25 -29	14.600	14.000	28.600
30 -34	13.900	13.500	27.400
35 -39	13.600	13.700	27.300
40 -44	12.600	13.600	26.200
45 -49	14.900	15.900	30.800
50 -54	14.100	15.000	29.100
55 -59	10.700	12.100	22.800
60 -64	9.800	10.000	19.800
65 -69	6.900	7.700	14.600
70 -74	5.600	6.200	11.800
75 +	6.000	7.000	13.000
Jumlah	207.600	207.200	414.800

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

I. Kerangka Pengembangan Wilayah

1) Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan tingkat resiko bencana tertinggi di Provinsi Bali (gunung meletus, tanah longsor dan kebakaran hutan). Dalam Perda nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem, ditetapkan Kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, Kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan badai angin;
- c. kawasan rawan banjir;

- d. kawasan rawan kekeringan; dan
- e. kawasan rawan kebakaran hutan.

Wilayah Rawan bencana di Kabupaten Karangasem terdiri atas :

1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat didesa-desa yang tersebar di Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang.
2. Kawasan rawan badai angin terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.
3. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Dan Kecamatan Kubu.
4. Kawasan rawan kekeringan terdapat di desa-desa yang tersebar Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Selat.
5. Kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di desa - desa di sekitar hutan Gunung Agung yang tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Kubu.
6. Kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung beserta alur - alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar kawasan rawan gempa bumi terdapat di kawasan sekitar pusat – pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada perairan di sebelah timur Pulau Bali.
7. Kawasan rawan gerakan tanah terdapat kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem.
8. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sebelah utara Kawasan Ababi.
9. Kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter di atas muka laut di sepanjang wilayah pantai kabupaten dengan luas kurang lebih 46.404 Ha.
10. Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Pantai Labuhan Amuk, Pantai Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Ujung, Pantai Yeh Kali, Pantai Bunutan, Pantai Jemeluk, Pantai Tulamben, Pantai Kubu, dan Pantai Baturinggih.
11. Kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Agung.
12. Kawasan rawan intrusi air laut terdapat di kawasan Candidasa dan Tulamben.

2) Daya Dukung, Daya Tampung, dan Potensi Pengembangan

Berdasarkan data hasil kajian Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan estimasi kebutuhan air sektor pertanian di Provinsi Bali tahun 2009 untuk irigasi diperkirakan mencapai 1.592,24 juta m³, sawah sekitar 2.080,60 juta m³ /tahun, kehutanan sebesar 1.031,20 juta m³/tahun; kebutuhan air domestik 107,65 juta m³/tahun; kegiatan industri sekitar 22,08 juta m³/tahun; kegiatan hotel dan restoran sekitar 16,58 juta m³/tahun; dan kebutuhan fasilitas pemerintahan dan umum sekitar 25,12 juta m³/tahun. Kebutuhan air di Provinsi Bali berdasarkan kebutuhan setiap sektor adalah sekitar 4.239,71 juta m³/tahun (Unud, 2009). Kebutuhan air domestik di atas meningkat dua kali lipat tahun 2014 menjadi sebesar 284.674.815 m³/tahun.

Kabupaten Karangasem termasuk kabupaten yang defisit air bahkan banyak wilayah dengan sumber air yang sangat terbatas. Kebutuhan air per tahun di kabupaten Karangasem diperkirakan mencapai 0,66 milyar m³/tahun. Sedangkan ketersediaan air per tahun di Kabupaten Karangasem diperkirakan berdasarkan ketersediaan air permukaan mencapai 0,21 milyar m³/tahun, ketersediaan air permukaan saat El Nino mencapai 0,14 milyar m³/tahun, ketersediaan air permukaan saat La Nina mencapai 0,31 milyar m³/tahun, ketersediaan air permukaan dan air dari CAT mencapai 0,44 milyar m³/tahun, ketersediaan air permukaan dan air dari CAT saat El Nino mencapai 0,38 milyar m³/tahun dan ketersediaan air permukaan dan air dari CAT saat La Nina mencapai 0,55 milyar m³/tahun.

Status dan daya dukung air di Kabupaten Karangasem di tahun 2013 mencapai 0,32 milyar m³/tahun dan di tahun 2014 sebesar 0,32 milyar m³/tahun serta di tahun 2015 ditambah El Nino mencapai 0,22 milyar m³/tahun sedangkan di tahun 2016 ditambah La Nina mencapai 0,47 milyar m³/tahun. Daya dukung air di Kabupaten Karangasem bila dihitung ditambah air dari CAT di tahun 2013 mencapai 0,68 milyar m³/tahun dan di tahun 2014 ditambah air dari CAT mencapai 0,68 milyar m³/tahun dan di tahun 2015 termasuk El Nino ditambah air dari CAT mencapai 0,57 milyar m³/tahun sedangkan di tahun 2016 termasuk La Nina ditambah air dari CAT mencapai 0,83 milyar m³/tahun.

Mengacu pada arahan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali untuk mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan, arahan peraturan zonasi kawasan resapan air mencakup: pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan penerapan prinsip 'tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai' atau disebut zero delta O policy' adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh

mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. Sehingga dengan penerapan zonasi tersebut akan bisa menabung air pada saat musim hujan dan memanen air pada saat musim kemarau.

Berdasarkan arahan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri dari: a. Wilayah sungai (WS), b. Cekungan Air Tanah (CAT), c. Jaringan Irigasi, d. Prasarana air baku untuk air bersih, e. Prasarana air bersih ke kelompok pengguna, f. sistem pengendali banjir, g. sistem pengendali erosi dan longsor, dan h. sistem pengamanan abrasi pantai. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Adapun kegiatan yang dilarang pada kawasan konservasi dan resapan air adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi :

- a. Radius kawasan sekitar mata air adalah 200 meter dari tepi mata air
- b. Kegiatan yang diizinkan, meliputi : (1). kegiatan pengembangan/ pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa; (2). kegiatan penataan dan pengembangan sempadan mata air; dan (3). kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi sempadan.
- c. Kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi : (1). kegiatan pengembangan hutan lindung; (2). kegiatan jasa pariwisata; dan (3). pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu; dan pengembangan mata air untuk kepentingan air minum kemasan (investasi swasta) harus melalui kajian teknis.

3) Kesesuaian Tata Ruang

Arah kebijakan Provinsi Bali dalam tata ruang di wilayah Kabupaten Karangasem adalah meningkatkan fungsi jalan kolektor primer ruas Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura–Angantelu untuk menumbuhkan kawasan di Bali Utara-Barat dan Timur. Selain itu juga meningkatkan fungsi penyeberangan Padangbai-Lombok juga memaksimalkan Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal cruise dan yacht. Disamping rencana pembangunan transportasi darat

tersebut juga alternatif mode transportasi yang akan direncanakan adalah perkeretaapian yang melingkari pulau Bali sebagai rencana Sistranas dan Sistrawil.

Sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa pengembangan jaringan transportasi laut meliputi : (a). Peningkatan pelayanan Pelabuhan Padangbai dengan penambahan dermaga; (b). Peningkatan dan pemeliharaan Labuhan Amuk sebagai pelabuhan bahan bakar di Kabupaten Karangasem; (c). Untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pariwisata di Tanah Ampo diperlukan rencana : (1). rencana pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan pariwisata termasuk Terminal penumpang dan parkir, pengisian bahan bakar, pengisian air minum bagi keperluan kapal pesiar (cruise); (2). rencana pembangunan akomodasi pariwisata dan pengembangan marina spot; (d). Untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Amed diperlukan beberapa arahan yaitu : (1). pengembangan Pelabuhan Amed harus disinergikan dengan kegiatan penyeberangan yang juga selama ini berlangsung di Pelabuhan Padangbai; (2). penanganan secara khusus terutama dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan untuk melindungi kegiatan wisata bahari (Jemeluk) di sekitar area pengembangan Pelabuhan Amed; (3). rencana pengembangan pelabuhan Amed harus sinergis dengan kegiatan perikanan berupa TPI dan pangkalan jukung nelayan; dan (4). pengembangan pelabuhan Amed harus terpadu dengan rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Tulamben secara keseluruhan.

Adapun kebijakan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, terdiri atas: (a). meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan wilayah Selatan Karangasem; (b). mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya; (c). meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan; (d). mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan Padangbai (f). mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten; (g). mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Amed dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas; (h). mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat

pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3; (i). mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian desa; (j). pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya; (k). melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep karang bengang; (l). meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang; (m). mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap; dan (n). menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu.

4) Arahan Provinsi Bali Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Karangasem

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Karangasem sesuai dengan pengembangan wilayah berdasarkan tema (Pariwisata, Pertanian, Ekonomi Produktif dan UMKM) meliputi kebijakan pengembangan:

a. Pariwisata

Kebijakan pengembangan pariwisata sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 yaitu Pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi antara lain : (a). Pembangunan destinasi pariwisata daerah; (b). Pembangunan pemasaran pariwisata daerah; (c). Pembangunan industri pariwisata daerah; dan (d). Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

b. Pertanian

Kebijakan sektor pertanian Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem meliputi pengembangan pertanian antara lain: padi, jagung, bawang merah, jambu mete, dan sapi potong.

c. Industri

Arahan kebijakan sektor Industri di Kabupaten Karangasem oleh Pemerintah Provinsi Bali sektor industri pangan adalah pengembangan industri olahan buah-buahan, pengolahan mete, dan pengolahan biji kakao. Sedangkan sektor industri lainnya dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem yang sesuai dengan kewenangan yang ada pada

Pemerintah Provinsi Bali.

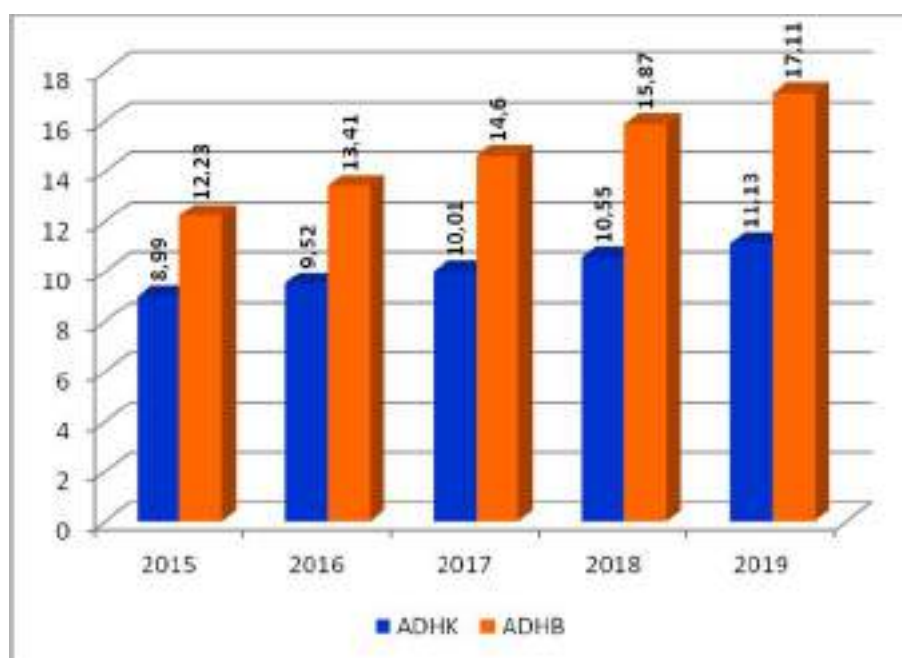
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (value added) dari seluruh sektor perekonomian.

Gambar 2.2
PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2019 (Trilyun Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar 12.233.229,09 juta rupiah dan meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 13.410.890,80 juta rupiah (9,63%). Demikian juga laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 tumbuh sebesar 17.106.634,90 juta rupiah (7,77%) dibandingkan tahun 2018. PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 8.991.745,71 juta rupiah pada tahun 2015, tumbuh menjadi 11.134.797,00 juta rupiah di tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 23,83% selama kurun waktu 5 tahun.

Jika dilihat besaran PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang besarnya 17.106.634,90 juta rupiah, kontribusi (share) lapangan usaha masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,61%,

disusul oleh transportasi dan pergudangan sebesar 17,71% dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kabupaten Karangasem sebesar 11,76%. Secara lebih detail, kontribusi per lapangan usaha tahun 2019 sebagaimana disajikan pada gambar 2.3, sedangkan perkembangan share 3 lapangan usaha utama serta laju pertumbuhannya sebagaimana gambar 2.4 dan gambar 2.5.

Gambar 2.3
Kontribusi (Share) PDRB ADHB 2019 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Gambar 2.4
Perkembangan Share 3 Lapangan Usaha Utama



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan 3 Lapangan Usaha Utama



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Dari gambar 2.4, perkembangan share 3 lapangan usaha utama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan khususnya pada transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan terutama pada lima tahun terakhir.

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama tahun 2016 – 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mencapai 5,92 % mengalami perlambatan di tahun 2017 menjadi 5,06 %, naik di tahun 2018 menjadi 5,48% dan tahun 2019 menjadi 5,50% seperti disajikan pada Gambar 2.6. Secara lebih rinci perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha disajikan pada tabel 2.13.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada Tahun 2019, Kabupaten Karangasem hanya mampu memberikan share 6,77% terhadap PDRB Provinsi Bali. Share ini mengalami penurunan dari tahun ketahun. (Gambar 2.7).

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

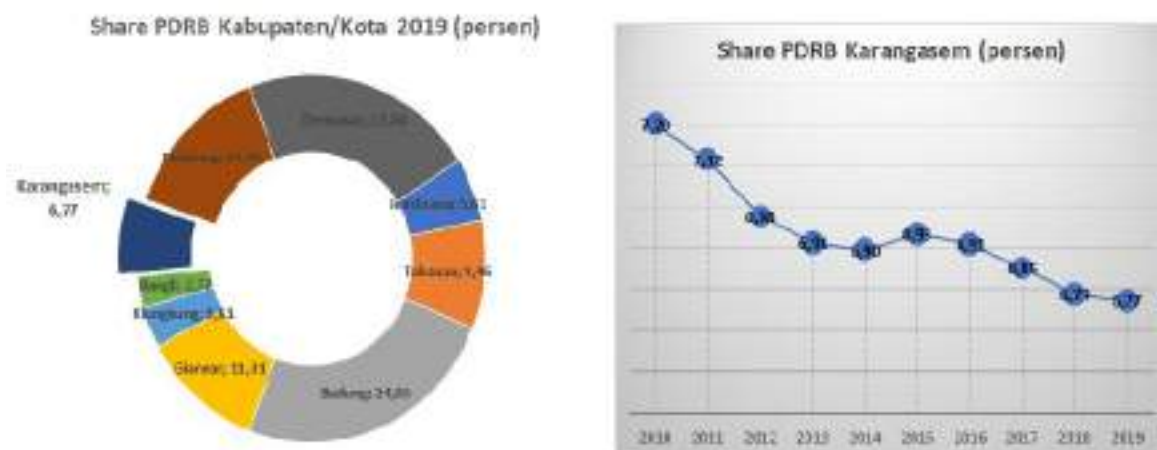
Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010
Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,412	2,8	2,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,51	-2,05	-2,05	5,19
C	Industri Pengolahan	4,14	2,39	5,97	5,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,05	7,30	3,97	6,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,78	6,85	5,76	7,52
F	Konstruksi	8,30	9,55	9,59	6,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	7,60	8,64	6,30

H	Transportasi dan Pergudangan	9,16	6,78	6,95	6,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	8,61	8,21	8,17
J	Informasi dan Komunikasi	9,40	9,37	7,96	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,53	2,53	2,34	7,41
L	Real Estat	4,91	6,33	4,74	4,72
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	9,78	6,56	5,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	-0,05	3,10	3,05
P	Jasa Pendidikan	8,59	8,60	8,08	8,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,59	13,87	8,74	7,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,13	8,90	9,98	8,39
Produk Domestik Regional Bruto		5,92	5,06	5,48	5,50

Sumber: SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Gambar 2.7
Share PDRB Kabupaten Karangasem (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2. PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus meningkat. Tahun 2015 mencapai Rp 29,93 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 29,93 juta selama tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, rata-rata pendapatan per Kapita penduduk Karangasem mencapai Rp 41,06 juta atau sebesar 3,42 juta per

bulan. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa dari waktu ke waktu, kesejahteraan penduduk Kabupaten Karangasem dari sisi perekonomian terlihat semakin membaik. Sementara itu, laju peningkatan PDRB per kapita kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2015 - 2019. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.14 dan Tabel 2.15.

Tabel 2.14
PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

PDRB Per Kapita	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	29,93	32,65	35,36	38,27	41,06
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	22,00	23,18	24,24	25,44	26,73

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem

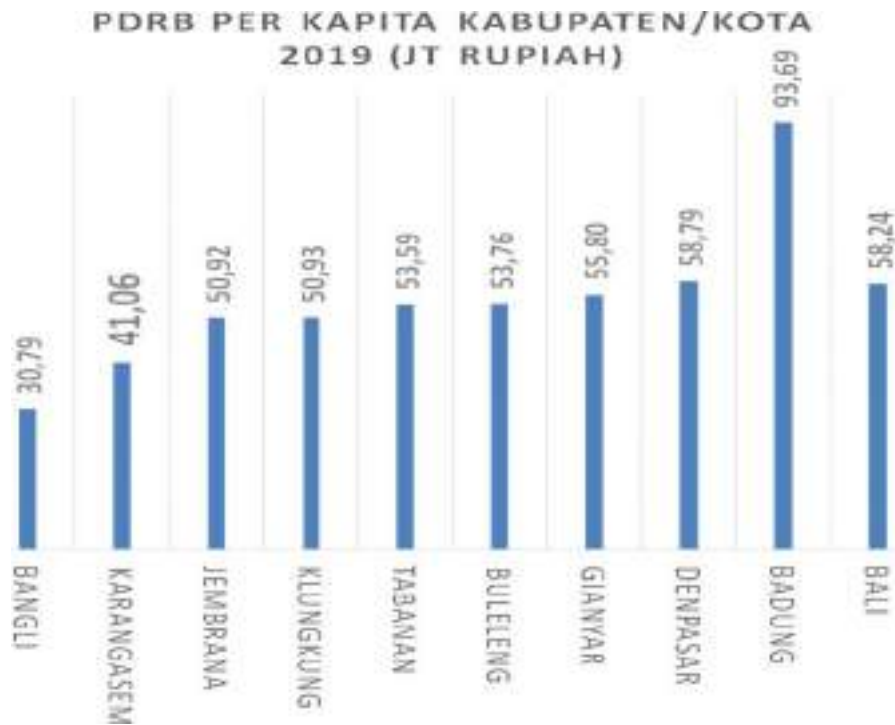
Tabel 2.15
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Karangasem, Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	12.233.229,08	13.410.890,81	14.598.384,60	15.872.897,60	17.106.634,90
2	PDRB Harga Konstan (Milyar Rupiah)	8.991.745,71	9.524.226,08	10.006.134,70	10.554.388,50	11.134.797,00
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	408,7	410,8	412,82	414,8	416,6
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	29,93	32,65	35,36	38,27	41,06
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rupiah)	22,00	23,18	24,24	25,44	26,73

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem

Kendatipun mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten Kota di Bali serta PDRB Perkapita Provinsi Bali, PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem menempati posisi no 2 terendah setelah Kabupaten Bangli. Seengkapnya sebagaimana gambar 2.8 dan gambar 2.9.

Gambar 2.8



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Gambar 2.9
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem dan Bali
Tahun 2010-2019 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

3. Laju Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka di atas 10 %. Laju

Inflasi Kabupaten Karangasem masih mengacu pada Provinsi Bali. Inflasi Bali selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan walaupun meningkat di tahun 2017 namun tidak signifikan. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018 inflasi Bali cenderung fluktuatif meningkat. Di tahun 2014 sebesar 8,03 persen dan menurun secara signifikan di tahun 2015 sebesar 2,70 persen dan meningkat lagi di tahun 2016 sebesar 2,94 persen dan tahun 2017 sebesar 3,31 persen, serta Tahun 2018 sebesar 3,13 persen. Pada triwulan II tahun 2019 inflasi Provinsi Bali tercatat sebesar 2,14 persen. Capaian ini berada dibawah capaian inflasi nasional yaitu 3,28%.

Diharapkan laju inflasi di Kabupaten Karangasem dapat terus dikendalikan sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Karangasem tetap stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

4. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari :

- GR 0,20 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah
- 0,20 < GR 0,39 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- 0,39 < GR 0,59 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- 0,59 < GR 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- GR > 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018

No.	Gini Rasio	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Karangasem	0,3371	0,3089	0,2930	0,3232	0,3393
2	Kota Denpasar	0,3809	0,3589	0,3307	0,3414	0,3422
3	Provinsi Bali	0,4150	0,3770	0,3660	0,3840	0,3774

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Ketidakmerataan (ketimpangan pendapatan) dapat disebabkan oleh keberagaman faktor faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu daerah/wilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, maka berkemungkinan besar ia akan memiliki pendapatan yang juga semakin besar. Apabila suatu daerah memiliki ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan yang besar, maka akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, kesenjangan sosial.

Distribusi Pendapatan menurut pendekatan Bank Dunia yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. Bila kelompok 40% penduduk termiskin pendapatannya lebih kecil daripada 12% dari keseluruhan penduduk daerah tersebut maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi. Bila kelompok 40% penduduk termiskin distribusi pendapatannya berada antara 12-17% dari keseluruhan pengeluaran pendapatan maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang moderat. Dan bila kelompok 40% penduduk termiskin pendapatannya lebih kecil daripada 17% dari keseluruhan pendapatan maka dikategorikan bahwa daerah tersebut berada pada tingkat ketimpangan yang rendah.

Menurut Data BPS Provinsi Bali, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem tahun 2018 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan kelompok 40% penduduk bawah menerima pendapatan sebesar 19,57. Kelompok 40% penduduk sedang menerima pendapatan sebesar 38,48, sedangkan kelompok 20% penduduk tinggi menerima penghasilan sebesar 41,94. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Distribusi Pendapatan		
	40% Bawah	40% Sedang	20% Tinggi
2014	20,67	35,95	43,38
2015	26,40	37,16	36,43
2016	21,93	39,57	38,50
2017	20,75	38,21	41,04
2018	19,57	38,48	41,94

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

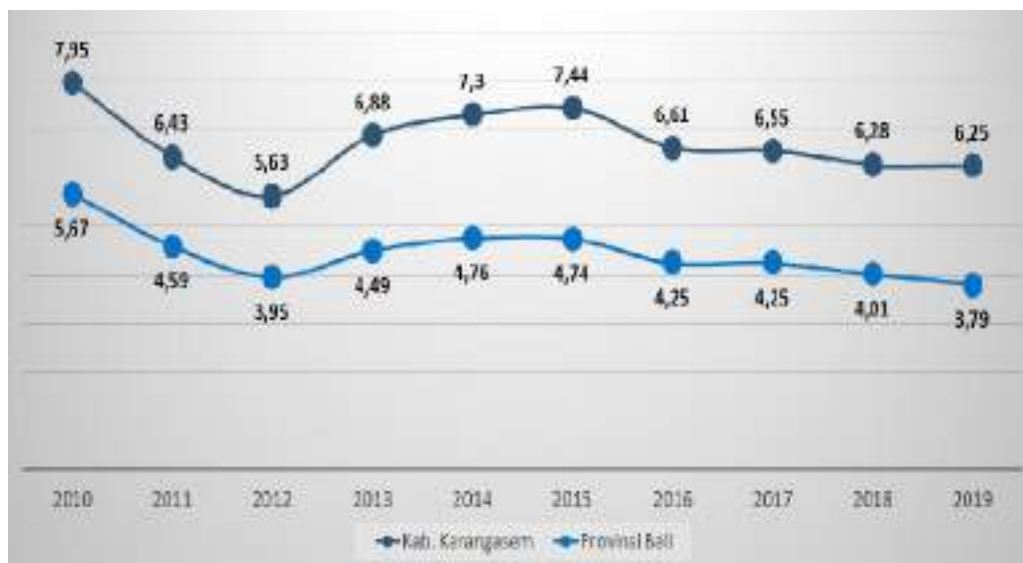
G. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dan Bali disajikan pada gambar 2.10 dan gambar 2.11.

Gambar 2.10

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali Tahun 2010-2019

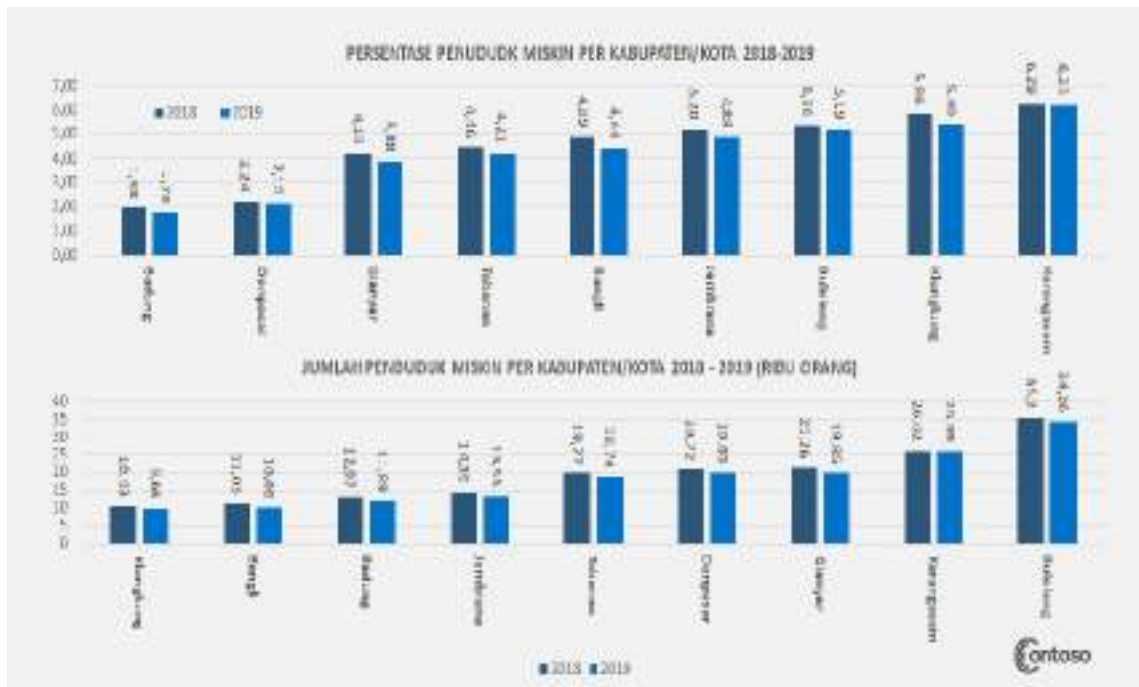


Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Dari gambar 2.10 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem cenderung mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem berada jauh diatas tingkat kemiskinan Provinsi Bali. Jika dilihat pada gambar 2.11 persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem merupakan persentase penduduk miskin tertinggi di

Bali walaupun secara jumlah penduduk miskin masih lebih rendah dari Kabupaten Buleleng.

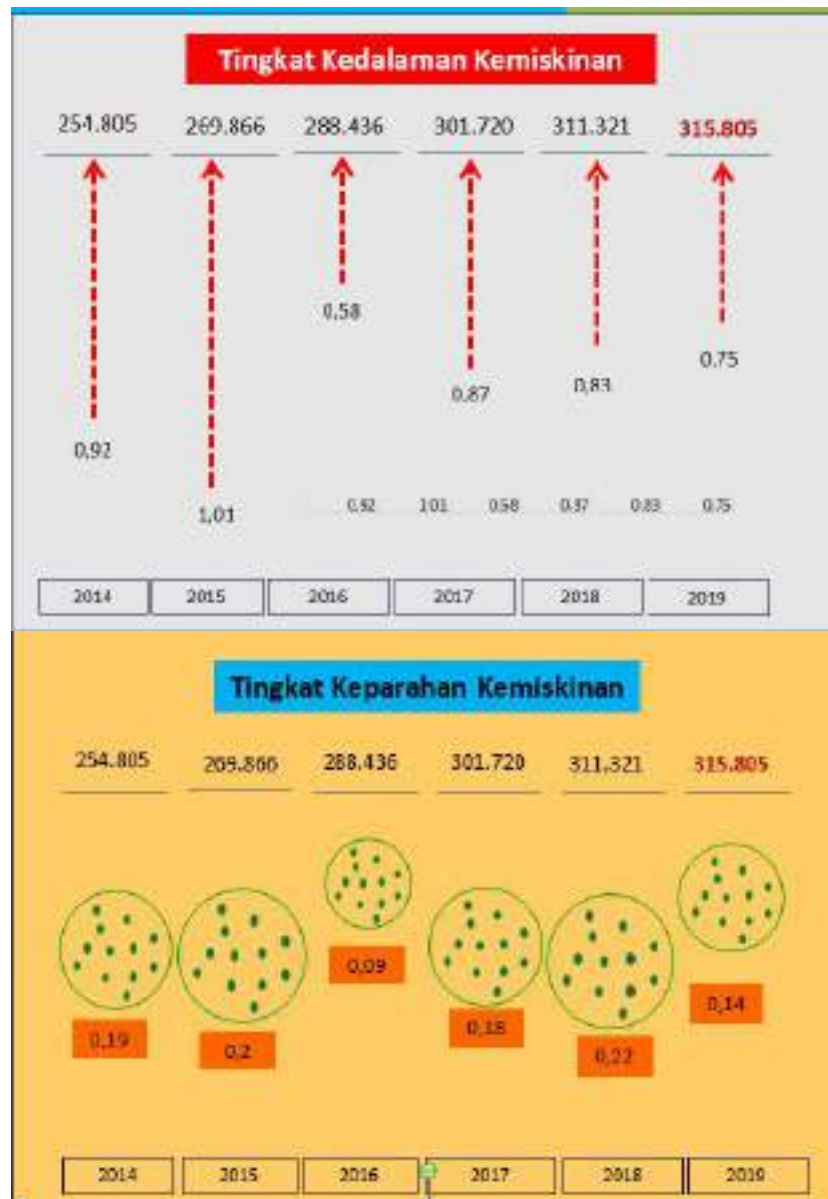
Gambar 2.11
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2018-2019



Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (distributionally sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) mencerminkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jarak yang semakin dekat menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) mencerminkan variasi pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin kecil menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik.

Gambar 2.12
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2019

H. Angka Kriminalitas

Kasus kriminalitas merupakan salah satu kondisi sosial yang dapat menggambarkan kondisi Karangasem secara umum. Berdasarkan data dari Polres Karangasem tentang banyaknya perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan pada tahun 2018, kasus kriminalitas di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dari 153 pelanggaran di tahun 2018 menjadi 60 pelanggaran di tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan, namun kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena jumlah pelanggaran yang terjadi selama lima tahun terakhir masih tergolong tinggi, selain dampak sosial dari mewabahnya covid 19 terutama terhadap banyaknya

pekerja yang dirumahkan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah yang cenderung berindikasi terhadap tindak kriminal.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis diketahui melek huruf yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya untuk tahun 2018, penduduk laki-laki mencapai 90,75 dan perempuan sebesar 79,16 dan gabungan laki dan perempuan sebesar 84,91 Angka buta huruf untuk laki-laki mencapai 9,25 dan perempuan mencapai 20,84 dan gabungan laki dan perempuan mencapai 15,09 Sedangkan dari tahun 2014-2018, selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Laki-Laki	88,94	88,71	87,92	88,95	90,75
2.	Perempuan	69,60	76,53	75,67	74,78	79,16
3	Laki dan Perempuan	79,11	82,52	81,74	81,80	84,91
4	Provinsi Bali Laki dan Perempuan	92,56	92,77	92,82	92,90	92,98

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah merupakan cerminan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Semakin lama seseorang bersekolah diasumsikan semakin handal orang tersebut/semakin tinggi kualitasnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 mencapai 5.39 tahun dan sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 rata-rata lama sekolah mencapai 5,97. Capaian angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yang telah mencapai 8,65 tahun. Kendati terjadi kenaikan, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Karangasem baru mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau dengan kata lain belum bisa menikmati WAJAR 9 tahun, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali
Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Rata-rata lama sekolah				
	2014	2015	2016	2017	2018
Karangasem	5,39	5,42	5,48	5,52	5,97
Provinsi Bali	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi, penduduk Kabupaten Karangasem usia 15 tahun ke atas menurut Karangasem Dalam Angka, tahun 2018, yang tidak memiliki ijazah mencapai 33,21%, dan ijazah SD sebanyak 27,24%, tamat SPP/MTs sebanyak 16,98%, sudah tamat SMU/MA/ sederajat sebanyak 16,74%. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi seperti Diploma I/II sebanyak 1,00%, diploma IV/S1/S2/S3 sebanyak 4,84%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan
Kabupaten Karangasem Tahun 2014- 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tidak Punya Ijasah	22,55	40,10	38,94	38,23	33,21
2	SD/MI/Sederajat	26,06	28,09	31,84	23,68	27,24
3	SLTP/MTs/Sederajat	15,01	14,31	9,40	17,96	16,98
4	SMU/MA/Sederajat	12,92	11,59	14,50	14,83	16,74
5	SMK/Sederajat	1,95	1,51			
6	Diploma I/II	0,43	0,71	0,89	1,07	1,00
7	Diploma III/Akademi	0,32	0,25			
8	Diploma IV/S1	2,42	2,85	4,42	4,24	4,84
9	S2/S3	0,22	0,59			

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 untuk tingkat kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,20% mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 99,75%, di tahun 2016 mengalami penurunan yaitu mencapai 99,71, dan di tahun 2018 yaitu 99,35% kalau dibandingkan dengan Provinsi Bali masih lebih rendah. APS kelompok umur 13-15 tahun, kelompok umur 16-18 tahun dan kelompok umur 19-24 tahun selengkapnya disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No.	Angka Partisipasi Sekolah (APS-%)	2014	2015	2016	2017	2018
1	7-12 tahun					
	Kabupaten Karangasem	99,20	99,75	99,71	99,47	99,35
	Provinsi Bali	99,36	99,41	99,35	99,44	99,56
2	13-15 tahun					
	Kabupaten Karangasem	98,09	92,61	96,24	96,17	96,48
	Provinsi Bali	97,23	97,41	97,55	97,72	97,92
3	16-18 tahun					
	Kabupaten Karangasem	77,23	72,88	66,74	71,61	80,11
	Provinsi Bali	81,59	81,69	81,98	82,16	82,35
4	19-24 tahun					
	Kabupaten Karangasem	14,50	8,86	10,61	13,82	8,54
	Provinsi Bali	23,59	23,75	25,36	26,56	27,24

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karangasem tahun 2014-2018 berfluktuatif, untuk tingkat SD/MI di tahun 2014 sebesar 113,14% menurun menjadi 99,17% di tahun 2015 dan di tahun 2018 mencapai 106,86 masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Bali yaitu sebesar 103,02. APK untuk tingkat SLTP di tahun 2014 sebesar 94,19% menurun menjadi 91,60% di tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu menjadi 91,60% dan meningkat 99,32% tahun 2018. APK tingkat SMA dari tahun 2014-2018 berfluktuatif, di tahun 2014 sebesar 79,29% dan menurun di tahun 2015 menjadi 75,60%, dan menurun lagi di tahun 2016 menjadi 64,06%, dan tahun 2018 mencapai 71,32%. APK perguruan tinggi di tahun 2018 mencapai 13,38%. Selengkapnya perkembangan APK tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

No.	Angka Partisipasi Kasar (APK -%)	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
	Kabupaten Karangasem	113,14	99,17	107,57	104,04	106,86
	Provinsi Bali	105,59	105,00	104,97	104,35	103,02
2	SMP/MTs					
	Kabupaten Karangasem	94,19	91,60	99,78	100,40	99,32
	Provinsi Bali	95,99	96,82	96,19	96,29	96,14
3	SMA/MA					
	Kabupaten Karangasem	79,29	75,60	64,06	77,55	71,32
	Provinsi Bali	85,27	86,61	86,41	90,04	87,74
4	Perguruan Tinggi					
	Kabupaten Karangasem	13,28	9,41	8,44	9,11	13,38
	Provinsi Bali	27,41	26,50	27,02	29,40	30,51

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

6. Angka Partisipasi Murni

Capaian target Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Karangasem tahun 2014 untuk tingkat SD/MI sebesar 98,78% menurun di tahun 2018 menjadi 95,55% dan masih di bawah Provinsi Bali yang mencapai 96,19%. Untuk tingkat SMP/MTs di tahun 2014 sebesar 83,82% juga menurun di tahun 2017 menjadi 82,87% dan masih lebih rendah dari Provinsi Bali yaitu 86,00. Pada tingkat SMA di tahun 2014 sebesar 65,40% juga menurun menjadi 59,30% di tahun 2018 dan masih lebih rendah dari Capaian Provinsi Bali yaitu 73,00%. Untuk tingkat perguruan tinggi di tahun 2014 hanya sebesar 8,79% menurun menjadi 6,16% di tahun 2018, dan juga masih lebih rendah dari capaian Provinsi Bali yaitu 24,06. Perkembangan capaian APM tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Perguruan Tinggi Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

No.	Angka Partisipasi Murni (APM - %)	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
	Kabupaten Karangasem	98,78	95,95	95,65	95,86	95,55
	Provinsi Bali	95,29	95,64	95,75	96,09	96,19
2	SMP/MTs					
	Kabupaten Karangasem	83,82	75,02	84,26	82,28	82,87
	Provinsi Bali	84,58	84,78	84,99	85,32	86,00
3	SMA/MA					
	Kabupaten Karangasem	65,40	61,34	56,39	58,00	59,30
	Provinsi Bali	70,83	71,53	71,71	72,40	73,00
4	Perguruan Tinggi					
	Kabupaten Karangasem	8,79	6,21	7,90	7,54	6,16
	Provinsi Bali	21,50	21,61	21,80	22,78	24,06

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Target Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional adalah 100% untuk semua jenjang pendidikan, sedangkan Kabupaten Karangasem untuk jenjang SD tahun 2017 sudah mencapai 95,86%, sedangkan rata-rata Provinsi Bali 96,09%. Untuk tingkat SMP/MTs APM tahun 2017 Kabupaten Karangasem baru mencapai 82,28%.

7. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi

penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Besaran harapan hidup tahun 2018 di Kabupaten Karangasem yaitu 70,05.

Tabel 2.24
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali
Tahun 2014-2018

No.	Usia Harapan Hidup	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Karangasem	69,18	69,48	69,66	69,85	70,05
2	Provinsi Bali	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

8. Pelayanan Vaksinasi

Pelayanan vaksinasi di Kabupaten Karangasem dilayani oleh puskesmas, rumah sakit maupun dokter praktik swasta di setiap kecamatan. Imunisasi meliputi BCG, DPT I sampai III dan Polio I sampai IV serta campak. Hasil vasinasi pada bayi umur 0 sampai 12 bulan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Hasil Vaksinasi Bayi Umur 0-12 Bulan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 – 2018

No.	Vaksinasi Bayi Umur 0-12 Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
1	BCG	7.501	7.528	7.074	6.304	6.441
2	DPT-HB I	7.609	7.534	7.121	6.248	3.155
3	DPT-HB II	7.619	7.572	7.056	6.200	6.360
4	DPT-HB III	7.646	7.603	7.101	6.184	6.432
5	Polio I	7.780	7.496	7.045	6.225	6.465
6	Polio II	7621	7.516	7.123	6.020	6.465
7	Polio III	8.626	7.535	7.004	5.828	6.390
8	Polio IV	7.659	7.599	7.080	5.832	6.452

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Selain pemberian vaksinasi terhadap bayi, juga dilakukan pemberian vaksinasi terhadap ibu hamil dan anak sekolah. Pemberian vaksinasi untuk ibu hamil yang berumur 0 – 3 bulan seperti pemberian vaksinasi TT I, TT II dan vaksinasi untuk anak-anak SD. Adapun capaian pemberian vaksinasi untuk ibu hamil yang berumur 0 – 3 bulan seperti pemberian vaksinasi TT I, TT II dan vaksinasi untuk anak-anak SD tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.26 dan Tabel 2.27.

Tabel 2.26
Hasil Vaksinasi Ibu Hamil di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018

No.	Tahun	TT I	TT II	TT III	TT IV	TT V
1	2014	52	81	1.464	1.679	2.470
2	2015	71	145	1.257	1.695	2.589
3	2016	74	118	1.154	1.436	2.207
4	2017	55	79	836	1.256	1.998
5	2018	27	45	860	1.610	2.367

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.27
Hasil Vaksinasi Anak SD di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018

No.	Tahun	Vaksinasi DT Kelas 1	Vaksinasi TD Kelas 2	Vaksinasi TD Kelas 3
1	2014	7.828	7.878	7.646
2	2015	7.521	7.815	7.741
3	2016	7.975	7.168	7.412
4	2017	7.718	7.449	6.878
5	2018	7.952	7.708	7.464

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

9. Balita Gizi Buruk

Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Berat badan anak balita ditimbang menggunakan timbangan digital yang memiliki presisi 0,1 kg, panjang atau tinggi badan diukur menggunakan alat ukur panjang/tinggi dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan dalam bentuk tiga indeks anthropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Untuk menilai status gizi anak balita, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Zscore) menggunakan baku anthropometri anak balita WHO 2005. Secara nasional, prevalensi berat-kurang pada tahun 2013 adalah 19,6 persen, terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %) terlihat meningkat. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4 persen tahun 2007, 4,9 persen pada tahun 2010, dan 5,7 persen tahun 2013. Sedangkan prevalensi gizi kurang naik sebesar 0,9 persen dari 2007 dan 2013. Untuk mencapai sasaran MDG tahun 2015 yaitu 15,5 persen maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan sebesar 4.1 persen dalam periode 2013 sampai 2017. (Bappenas, 2012). Atas dasar sasaran MDGs 2015, terdapat tiga provinsi yang memiliki prevalensi gizi buruk-kurang sudah mencapai sasaran yaitu: (1) Bali, (2)

DKI Jakarta, (3) Bangka Belitung. Perkembangan balita di Kabupaten Karangasem yang ditimbang berat badan (Bb) naik dan BMG serta Gizi buruk selengkapnya disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Banyaknya Balita Yang Ditimbang, BB naik dan BMG serta Balita Gizi Buruk di Kabupaten Karangasem 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Balita	Ditimbang	BB Naik	BMG	Gizi Buruk
1	2014	30680	22670	20178	172	29
2	2015	31.055	26.681	20.862	222	28
3	2016	31.165	27.001	20.833	105	30
4	2017	26.432	23.216	17.535	157	17
5	2018	29.724	25.233	25.183	50	18

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

10. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian (mortality rate) dalam suatu kelompok populasi dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu maternal. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun, sedangkan angka kematian balita menggambarkan kejadian kematian pada fase antara kelahiran sampai sebelum umur 5 tahun. Di Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 terjadi 8,79 kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup (KH) sedangkan di tahun 2018 menjadi 7,80 kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup (KH). Banyaknya kematian bayi di Kabupaten Karangasem tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Banyaknya Kematian Bayi di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018

No.	Tahun	Lahir Hidup	Sasaran/Jumlah Bayi	Jumlah Kematian	AKB/1000 KH
1	2014	7.965	8.082	70	8,79
2	2015	7.835	7.835	83	10,59
3	2016	7.505	7.505	73	9,70
4	2017	6.903	6.227	48	7,00
5	2018	6.893	6.893	54	7,80

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

11. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan masa nifas.

Di Kabupaten Karangasem angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2014 mencapai 200,88 kematian ibu dari setiap 100.000 KH dan di tahun 2018 sebanyak 58,03 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Banyaknya kematian ibu di Kabupaten Karangasem tahun 2014 -2018 disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Banyaknya Kematian Ibu di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 -2018

No.	Tahun	Lahir Hidup	Sasaran/Bumil	Jumlah Kematian	AKI/100.000 KH
1	2014	7965	8891	16	200,88
2	2015	7.835	8.626	7	89,34
3	2016	7.505	8.451	6	79,90
4	2017	6.903	7.140	6	86,9
5	2018	6.893	7.060	4	58,03

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

12. Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Meningkatnya status gizi masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu persentase balita yang ditimbang berat badannya ke Posyandu (D/S), persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium dan prevalensi balita gizi kurang.

a) Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Lebih

Pemantauan pertumbuhan balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pertumbuhan (growth faltering) secara dini. Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut, penimbangan balita setiap bulan sangat diperlukan. Penimbangan balita dapat dilakukan di berbagai tempat seperti Posyandu, Polindes, Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan yang lain. Pada Riskesdas 2013, informasi tentang pemantauan pertumbuhan anak diperoleh dari frekuensi penimbangan anak umur 6-59 bulan selama enam bulan terakhir. Idealnya dalam enam bulan anak balita ditimbang minimal enam kali. Sedangkan untuk status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB. Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dan juga

menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau karena menderita diare atau penyakit infeksi lainnya. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badannya dan pada akhirnya anak menjadi kurus.

Dalam lima tahun terakhir, situasi gizi Indonesia sesuai Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevalensi balita *underweight*, *stunting*, dan *overweight* mengalami penurunan prevalensi dibandingkan 2013. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan penurunan angka *stunting* di Indonesia, yakni dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen. Meski menurun, prevalensi *stunting* ini masih relatif cukup tinggi. *Stunting* pada anak masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia, selain obesitas. Meskipun menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 angka *stunting* menurun, tetapi persentasenya masih di atas 30 persen atau tiga dari 10 anak. Padahal, World Health Organization (WHO) hanya memperkenankan dua anak dari 10 yang menderita *stunting* (20 persen). Di Indonesia, angka anak yang *stunting* mencapai 30,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena masih di atas ambang batas 20 persen. Itulah sebabnya di tahun ini, Kementerian Kesehatan RI fokus memprioritaskan kesehatan ibu dan anak, serta menekan angka *stunting*. Perbaikan gizi masih perlu dioptimalkan, upaya Kementerian Kesehatan dalam Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga difokuskan pada empat prioritas, di antaranya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi khususnya penurunan prevalensi *stunting*, serta penurunan penyakit menular dan tidak menular. Berdasarkan WHO, *stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai.

Angka *stunting* di Provinsi Bali di tahun 2018 sebesar 19,8 persen sudah di bawah rata-rata nasional yakni 30,8 persen. Angka *stunting* di Provinsi Bali sudah masuk kriteria WHO, yakni di bawah 20 persen. Namun demikian, kondisi *stunting* di Kabupaten Karangasem, Jembrana, Bangli, Buleleng, dan Gianyar masih ada di atas 20 persen. Kondisi *stunting* yang menunjukkan di atas 20 persen yaitu Kabupaten Jembrana angka *stunting*nya pada 2015 sebesar 25,5 persen, pada 2016 yaitu 23,1 persen, dan pada 2017 kembali naik menjadi 25,2 persen. Kabupaten Buleleng menunjukkan angka *stunting* pada 2015 yaitu 25,3 persen, pada 2016 yaitu 24,2 persen, dan pada 2017 yaitu 29 persen. Kabupaten Bangli menunjukkan pada 2015 sebesar 28,6 persen, pada 2016 turun menjadi 25,7 persen, dan pada 2017 yaitu 20,4 persen. Kabupaten Gianyar pada 2017 angka *stunting*nya 22,5 persen. Sedangkan angka *stunting* di Karangasem pada tahun 2015 yaitu 27,5 persen, pada 2016 yaitu 26,1 persen, dan pada 2017 yaitu 23,6 persen. Angka *stunting* terendah dicapai Kota

Denpasar yang pada tahun 2015 sebesar 18,4 persen, pada 2016 sebanyak 16,1 persen, dan pada 2017 yaitu 9,5 persen.

b) Cakupan Penimbangan Balita (D/S) di Posyandu

Persentase balita yang ditimbang di posyandu merupakan jumlah balita yang datang dan ditimbang dibandingkan dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

c) Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapatkan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

d) Persentase Cakupan Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Garam Beryodium

Iodium adalah sejenis mineral yang terdapat di alam, baik tanah maupun air dan merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Iodium sangat esensial untuk membentuk hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mengatur perkembangan janin sampai dewasa dan amat diperlukan untuk perkembangan otak manusia. Dianjurkan untuk mengonsumsi garam beriodium 6-10 gram/orang/hari. Kebijakan garam beriodium di Indonesia dituangkan dalam bentuk regulasi antara lain dengan ditetapkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Beriodium sebagai SNI wajib.

e) Pemberian Tablet Tambah Darah (Fe)

Anemia gizi adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi dan kelompok yang paling rentan adalah wanita hamil. Persentase ibu hamil mendapat Fe3 90 tablet merupakan jumlah ibu hamil yang telah mendapat tablet tambah darah sebanyak 90 tablet dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang ada di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.

f) Pemberian Kapsul Vitamin A

Sasaran pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi adalah bayi (umur 6-11 bulan) diberikan kapsul vitamin A 100.000 SI, anak balita (umur 1-4 tahun) diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pada bayi (6-11 bulan)

diberikan setahun sekali pada bulan Februari atau Agustus; dan anak balita enam bulan sekali, yang diberikan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus. Sedangkan pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas diharapkan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu nifas atau dapat pula diberikan di luar pelayanan tersebut selama ibu nifas belum mendapatkan kapsul vitamin A.

13. Pelayanan Imunisasi

Bayi dan anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian, seperti difteri, tetanus, hepatitis B, typhus, radang selaput otak, radang paru-paru dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi.

Imunisasi ada dua macam, yaitu imunisasi aktif dan pasif, imunisasi aktif adalah pemberian kuman atau kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Contohnya adalah imunisasi polio atau campak. Sedangkan imunisasi pasif adalah penyuntikan sejumlah antibodi, sehingga kadar antibodi dalam tubuh meningkat. Contohnya penyuntikan ATS pada orang yang mengalami luka kecelakaan.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di antara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak adalah penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Oleh karena itu harus dipertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Target tersebut sejalan dengan target Renstra Kemenkes 2014 yang menetapkan target cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Persentase imunisasi dasar lengkap tahun 2014 per seluruh kabupaten/kota sudah mencapai target WHO dan Kemenkes RI karena pencapaiannya sudah berada di atas 90%.

b. Imunisasi pada Ibu Hamil

Tetanus disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri yang disebut *Clostridium tetani*. Tetanus juga bisa menyerang pada bayi baru lahir (Tetanus Neonatorum) pada saat persalinan dan perawatan tali pusat. Masih banyak calon ibu di masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil berada dalam kondisi yang masih jauh dari kondisi steril saat persalinan. Hal inilah yang bisa menimbulkan risiko ibu maupun bayinya terkena tetanus.

Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program eliminasi tetanus pada neonatal dan wanita usia subur termasuk ibu hamil. Strategi

yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan meternal adalah 1) pertolongan persalinan yang aman dan bersih; 2) cakupan imunisasi rutin TT yang tinggi dan merata; dan 3) penyelenggaraan surveilans.

Beberapa permasalahan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada wanita usia subur yaitu pelaksanaan skrining yang belum optimal, pencatatan yang dimulai dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS tidak hamil) belum seragam dan cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari cakupan K4.

Tabel 2.31
Upaya Pelayanan Imunisasi di Kabupaten Karangasem
Tahun 2015 – 2017

No.	Pelayanan Imunisasi	2015	2016	2017
1	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	100,4	95,8	97,2
2	Persentase batita yang mendapat imunisasi lanjutan (%)	49,3	44,4	61,4

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

14. Kesehatan Balita

1. Penolong Kelahiran.

Program pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan dapat mencegah tingginya angka kematian. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari siapa yang menjadi penolong proses kelahiran balita, yang biasa dijadikan pokok kajian adalah tentang siapa yang menangani/menolong ibu saat melahirkan bayi. Proses kelahiran dinyatakan aman dan memenuhi syarat kesehatan jika sejak awal hingga akhir proses melahirkan bayinya ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan) atau tenaga terlatih lainnya di bidang persalinan. Jika proses kelahiran tidak ditangani oleh tenaga terlatih di bidangnya dikhawatirkan tingkat keamanan dan kesehatan proses kelahiran tidak terjamin. Dan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus kematian bayi adalah penanganan atau penolong kelahiran yang ditangani oleh tenaga non medis (ditolong keluarga/famili, dan dukun tidak terlatih).

15. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita biasanya antara 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritas untuk menggunakan alat/cara KB. Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana salah satunya dapat dilihat dari cakupan peserta KB aktif dan jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor. Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Karangasem di tahun 2017 mencapai 85.933 orang

dengan persentase pasangan usia subur yang ber-KB mencapai 80,99%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	86.842	87.531	85.572	85.933	87.404
2.	Persentase Pasangan Usia Subur Ber KB	81,94	78,61	77,84	80,99	80,99

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Banyaknya akseptor aktif di Kabupaten Karangasem di tahun 2017 mencapai 99.598 orang, dengan metode kontrasepsi yang paling banyak adalah IUD yang mencapai 29.272 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Banyaknya Akseptor Aktif menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan
Tahun 2014-2018

No.	Metode Kontrasepsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	IUD	31.451	30.091	28.328	29.272	30.159
2	Pil	5.185	4.923	5.175	5.324	5.523
3	Kondom	2.344	2.013	2.098	2.133	2.222
4	Medis Operatif	452	3.230	3.022	3.172	3.662
5	Suntikan	25.966	25.461	24.719	26.211	26.930
6	Implant	2.967	3.092	3.264	3.486	3.681
Jumlah		68.365	68.810	65.611	69.598	71.177

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah fasilitas Klinik KB di Kabupaten Karangasem, tahun 2013 sebanyak 83 unit dan dari tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 21 klinik dan di tahun 2017 sebanyak 24 klinik. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Jumlah Klinik KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rendang	8	8	1	1	1
2.	Sidemen	9	9	1	1	1
3.	Selat	9	9	1	1	1
4.	Manggis	11	11	5	5	5
5.	Karangasem	11	11	5	5	6
6.	Bebandem	10	10	2	2	3
7.	Abang	16	16	2	2	2
8.	Kubu	9	9	4	4	5

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah	83	83	21	21	24

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

16. Penyakit Tidak Menular

Masalah Kesehatan Masyarakat yang dihadapi saat ini adalah makin meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis degeneratif, antara lain penyakit jantung, diabetes mellitus (DM), kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan. Upaya pengendalian PTM dibangun berdasarkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap ancaman PTM melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Pengembangan Posbindu PTM merupakan bagian internal dari sistem pelayanan kesehatan, diselenggarakan berdasarkan permasalahan PTM yang ada di masyarakat dan mencakup berbagai upaya promotif dan preventif serta pola rujukannya. Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantuan faktor resiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Data capaian program kegiatan Penyakit Tidak Menular di Tahun 2016 adalah Pembentukan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) dengan jumlah 43 Posbindu.

1. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadang-kadang disebut juga dengan hipertensi arteri, adalah kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung apakah otot jantung berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut (diastole). Tekanan darah normal pada saat istirahat adalah dalam kisaran sistolik (bacaan atas) 100–140 mmHg dan diastolik (bacaan bawah) 60–90 mmHg. Tekanan darah tinggi terjadi bila terus-menerus berada pada 140/90 mmHg atau lebih.

Perubahan pola makan dan gaya hidup dapat memperbaiki kontrol tekanan darah dan mengurangi resiko terkait komplikasi kesehatan. Oleh karena itu pengontrolan tekanan darah secara rutin mutlak dilakukan. Di Kabupaten Karangasem upaya pencegahan terhadap hipertensi melalui sosialisasi gaya hidup sehat dan melalui screening terhadap masyarakat yang berumur di atas 18 tahun. Dari 268.756 penduduk usia di atas 18 tahun dilakukan pengukuran tekanan darah pada 12.775 orang. Dari yang dilakukan pengukuran darah diketahui sebanyak 1047 orang yang mengalami hipertensi (8,2%).

2. Obesitas

Kegemukan atau obesitas adalah suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, yang kemudian menurunkan harapan hidup dan/atau meningkatkan masalah kesehatan. Seseorang dianggap menderita kegemukan (obese) bila indeks massa tubuh (IMT), yaitu ukuran yang diperoleh dari hasil pembagian berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter, lebih dari 30 kg/m

Kegemukan adalah penyebab kematian yang dapat dicegah paling utama di dunia, dengan prevalensi pada orang dewasa dan anak yang semakin meningkat, sehingga pihak berwenang menganggap kegemukan sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius pada abad 21. Di Kabupaten Karangasem upaya pencegahan terhadap obesitas melalui sosialisasi gaya hidup sehat dan melalui screening terhadap masyarakat yang berumur di atas 15 tahun. Dari 6.172 pengunjung ke puskesmas penduduk usia di atas 15 tahun, sebanyak 50 orang yang dilakukan pemeriksaan obesitas, dan sebanyak 6 orang yang masuk kategori obesitas.

3. Ca Serviks

Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker yang 99,7% disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) onkogenik, yang menyerang leher rahim (Sumber: <http://id.wikipedia.org>). Di Indonesia hanya 5 persen yang melakukan Penapisan Kanker Leher Rahim, sehingga 76,6 persen pasien ketika terdeteksi sudah memasuki Stadium Lanjut (IIIB ke atas), karena Kanker Leher Rahim biasanya tanpa gejala apapun pada stadium awalnya. Penapisan dapat dilakukan dengan melakukan tes Pap smear dan juga Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Di Kabupaten Karangasem upaya pencegahan terhadap kanker servik melalui sosialisasi gaya hidup sehat dan melalui screening terhadap masyarakat yang berumur 30-50 tahun 2016 sebanyak 55.121 orang. Dari yang diperiksa sebanyak 589 orang, ditemukan 32 orang (5,4%) dengan IVA positif.

17. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari

usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) diukur dari tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2014 -2019 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

IPM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Provinsi Bali	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	0,49	1,05	0,85	0,52	1,40	1,28

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Dari Tabel 2.35 terlihat bahwa IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2019 IPM Kabupaten Karangasem tumbuh 1,28 persen, merupakan pertumbuhan IPM Tertinggi di Provinsi Bali. Namun pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun 2018 yang besarnya mencapai 1,40 persen. IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2019 mencapai angka 67,34 berada pada kategori sedang.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Pelestarian budaya juga dilaksanakan melalui pelestarian cagar budaya serta situs-situs budaya yang memiliki nilai seni dan sejarah bagi Kabupaten Karangasem. Selain itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Jenis, jumlah dan situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Karangasem sebagaimana tabel 2.36.

Tabel 2.36
Jenis, Jumlah Dan Situs Cagar Budaya Yang Ada Di Kabupaten Karangasem

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jenis Cagar Budaya		
	- Jumlah benda cagar budaya	52 Unit	Milik swasta
	- Jumlah situs cagar budaya	10 Unit	Milik swasta
2	Penetapan Cagar Budaya		
	- Jumlah cagar budaya	286 unit	Ditetapkan 32 unit Belum ditetapkan 254 unit
3	Museum		
	- Jumlah Museum	1 unit	Milik swasta dan belum di registrasi

Sumber : SIPD Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sehat, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Perkembangan olahraga di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari jumlah klub olahraga, serta sarana dan prasarana olahraga yang tersedia baik yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Secara lebih rinci disajikan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Jumlah Klub Olahraga Dan Sarana Prasarana Olahraga Di Kabupaten Karangasem

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Klub Olahraga	145 Klub
	Bola Voli	29 Klub
	Bola Basket	5 Klub
	Sepak bola	21 Klub
	Futsal	20 Klub
	Sepak takraw	8 Klub
	Tenis	8 Klub
	Tenis Meja	15 Klub
	bulutangkis	25 Klub
	Biliard	2 Klub
	Bowling	-
	Renang	3 Klub
	Tinju/beladiri	2 Klub
	Sepeda	2 Klub
	Binaraga	3 Klub
	Panahan	2 Klub
	Olahraga lainnya	-
2	Sarana Prasarana Olahraga	
	Lapangan bola voli	6 unit

	Lapangan basket	6 unit
	Lapangan tenis	4 unit
	Stadion bola type A	1 unit
	Stadion bola type C	1 unit
	Stadion atletik type A	2 unit
	Stadion atletik type A	2 unit
	Lapangan bulutangkis	1 unit
	Gedung olahraga type B	1 unit
	Kolam renang	2 unit
	Lapangan olahraga terbuka	9 Unit
	Lapangan futsal	1 unit
	Lapangan Sepak bola type B	1 unit

Sumber : SIPD Tahun 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan disektor pendidikan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta sarana penunjang lainnya. Untuk tingkat TK jumlah sekolah TK yang ada di Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah 156 sekolah TK, dengan jumlah guru 476 orang, dengan jumlah murid mencapai 5.587 orang. Ditingkat SD jumlah sekolah SD yang ada di Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah 356 SD, dengan jumlah guru 3.541 orang, dengan jumlah murid mencapai 44.446 orang. Data selengkapnya jumlah sekolah, guru dan murid menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018/2019

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rata-rata Guru per Sekolah	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata murid per Guru
1	Taman Kanak-kanak	156	476	5.587	3	36	12
2	Sekolah Dasar	356	3.541	44.446	10	125	13
3	MI	7	88	1.249	13	178	14
4	SDLB	1	13	89	13	89	7
5	SLTP	35	1.179	19.689	34	563	17
6	MTs	3	52	657	17	219	13
7	SMPLB	1	3	24	3	24	8
8	SMP Satu Atap	12	168	1.085	14	90	6

9	SMP Terbuka	1	16	16	16	16	1
10	SLTA	18	555	9.294	31	516	17
11	MA	2	45	463	23	232	10
12	SMK	12	364	6.539	30	545	18
13	SMALB	1	9	21	9	21	2

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Adapun perkembangan jumlah sekolah TK, di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Tahun 2014 terdapat 129 TK tahun 2018 menjadi 156 TK. Perkembangan jumlah murid TK selama kurun waktu 2014 hingga 2018 terus meningkat, kecuali di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015 -2018/2019

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	129	430	4.751
2	2015/2016	137	462	5.567
3	2016/2017	139	794	5.615
4	2017/2018	154	516	6.250
5	2018/2019	156	476	5.587

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Karangasem tahun 2018 tersebar di 8 kecamatan, yaitu di Kecamatan Karangasem paling banyak terdapat 33 sekolah TK dan di Rendang paling sedikit dengan 12 sekolah TK. Adapun banyaknya sekolah di masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Tahun	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	12	51	422
2	Sidemen	14	34	433
3	Manggis	20	63	438
4	Karangasem	33	130	1 618
5	Abang	15	47	503
6	Bebandem	21	56	725
7	Selat	25	66	743
8	Kubu	16	29	705
	Jumlah	156	476	5 587

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah sekolah SD Negeri di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 mengalami penambahan yaitu dari tahun 2016-2017 yaitu 3 buah SD, sedangkan jumlah guru malah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah guru SD di Kabupaten Karangasem mencapai 3.654 orang, di tahun 2018 menurun menjadi 3.527 orang. Jumlah Murid SD Negeri mengalami fluktuatif dari tahun 2014-2018, tahun 2014 jumlah murid SD Negeri mencapai 45.323 orang dan di tahun 2019 menjadi 44.144 orang. Untuk SD Swasta di Kabupaten Karangasem hanya ada 1 sekolah SD swasta berada di Kecamatan Karangasem. Banyaknya sekolah, guru dan murid untuk jenjang SD dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.41 dan Tabel 2.42.

Tabel 2.41
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD)
di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	355	3.654	45.323	2	23	282
2	2015/2016	355	3.399	44.486	2	24	304
3	2016/2017	355	3.555	44.343	2	23	323
4	2017/2018	358	3.195	45.036	6	63	755
5	2018/2019	355	3.527	44.144	1	14	302

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.42
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD)
Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	33	293	3.847	-	-	-
2	Sidemen	29	264	3.245	-	-	-
3	Manggis	45	425	5.082	-	-	-
4	Karangasem	65	714	9.134	1	14	302
5	Abang	59	522	6.948	-	-	-
6	Bebandem	39	403	4.210	-	-	-
7	Selat	34	331	4.132	-	-	-
8	Kubu	51	575	7.546	-	-	-
	Jumlah	355	3.527	44.144	1	14	302

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Di Kabupaten Karangasem tahun 2018 terdapat 2 sekolah Madrasah Ibtidayah (MI) Negeri yaitu di Kecamatan Karangasem 1 buah dan di Kecamatan Bebandem 1 buah. Jumlah murid MI Negeri sebanyak 706 orang yang diasuh oleh 44 orang guru,

jumlah sekolah MI swasta sebanyak 5 sekolah dengan 475 orang murid yang diasuh oleh 41 orang guru. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.43 dan Tabel 2.44.

Tabel 2.43
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidayah (MI)
di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015-2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	2	46	652	4	42	405
2	2015/2016	2	38	673	4	41	415
3	2016/2017	2	38	689	4	39	429
4	2017/2018	2	43	708	4	38	464
5	2018/2019	2	44	706	5	41	475

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.44
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidayah (MI)
Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019

No	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	-	-	-	-	-	-
2	Sidemen	-	-	-	1	8	80
3	Manggis	-	-	-	-	-	-
4	Karangasem	1	19	301	3	25	342
5	Abang	-	-	-	-	-	-
6	Bebandem	1	25	405	1	8	53
7	Selat	-	-	-	-	-	-
8	Kubu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	44	706	5	41	475

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jika dilihat persentase siswa SD terhadap jumlah penduduk, di tahun 2014 sebesar 11,15% dan mengalami penurunan di tahun 2015-2016 dimana di tahun 2015 menjadi 10,88%, 2016 menjadi 10,79%, namun di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi dari tahun 2016 yaitu mencapai 10,91% di tahun 2017, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10,64%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
 Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Siswa Sekolah Dasar	
		Jumlah	Persentase terhadap jumlah penduduk (%)
2014	406.600	45.323	11,15
2015	408.700	44.486	10,88
2016	410.800	44.343	10,79
2017	412.800	45.036	10,91
2018	414.800	44.144	10,64

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kabupaten Karangasem hanya ada 1 sekolah, dengan jumlah guru 19 orang di tahun 2014, dengan jumlah murid 64 orang, Tahun 2015-2016 jumlah guru tetap sebanyak 19 orang dan justru jumlah murid menjadi 71 orang di tahun 2016. Perkembangan jumlah guru dan murid SDLB di Kabupaten Karangasem selengkapnya disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	1	19	64	-	-	-
2	2015/2016	1	19	64	-	-	-
3	2016/2017	1	19	71	-	-	-
4	2017/2018	1	14	74	-	-	-
5	2018/2019	1	13	89			

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah sekolah SLTP Negeri di Kabupaten Karangasem dari tahun - 2018/2019 tidak mengalami penambahan yaitu 32 SLTP, sedangkan jumlah guru malah cenderung berfluktuatif, pada tahun 2014 jumlah guru SLTP di Kabupaten Karangasem mencapai 1.134 orang, di tahun 2015 menurun menjadi 903 orang, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 1.159 orang dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 1.156 orang di tahun 2018 menurun menjadi 1.133 orang. Jumlah Murid SLTP Negeri dari tahun 2014-2017 terus meningkat, di tahun 2014 jumlah murid SLTP Negeri mencapai 18.731 orang, tahun 2015 meningkat menjadi 18.999 orang, tahun 2016 menjadi 19.263 orang, di tahun 2017 19.702 orang dan di tahun 2018 menurun menjadi 19.225 orang. Untuk SLTP Swasta di Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 terdapat 4 SLTP swasta dan

di tahun 2015 menjadi 4 SLTP Swasta dan di tahun 2017 meningkat menjadi 5 SLTP Swasta, di tahun 2018 menurun menjadi 3 SLTP. Banyaknya sekolah, guru dan murid untuk jenjang SLTP dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015- 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	32	1134	18.731	4	37	553
2	2015/2016	32	903	18.999	4	16	545
3	2016/2017	32	1.159	19.263	4	55	509
4	2017/2018	32	1.156	19.702	5	72	609
5	2018/2019	32	1.133	19.225	3	46	464

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), di Kabupaten Karangasem tahun 2018/2019, tersebar di semua kecamatan dengan Kecamatan Karangasem paling banyak terdapat SLTP yaitu sebanyak 6 buah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 4.435 orang yang diasuh oleh 274 orang guru. Selengkapnya sebaran sekolah SLTP disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	3	97	1 734	-	-	-
2	Sidemen	3	94	1 350	-	-	-
3	Manggis	3	116	2 235	1	10	247
4	Karangasem	6	274	4 435	2	36	217
5	Abang	5	157	2 930	-	-	-
6	Bebandem	4	144	1 962	-	-	-
7	Selat	3	118	1 926	-	-	-
8	Kubu	5	133	2 743	-	-	-
	Jumlah	32	1 133	19 225	3	46	464

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Di Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dengan jumlah murid 434 orang dengan jumlah guru 28 orang dan 2 MTs swasta dengan jumlah murid 192 orang dengan jumlah guru 28 orang. Perkembangan sekolah MTs, Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten

Karangasem dari tahun 2014/2015 - 2018/2019 disajikan pada Tabel 2.49 dan Tabel 2.50.

Tabel 2.49
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiah (MTs)
Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015 - 2018/2019

No	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	1	30	480	1	20	76
2	2015/2016	1	28	444	2	31	125
3	2016/2017	1	26	439	2	25	170
4	2017/2018	1	28	436	2	20	193
5	2018/2019	1	28	434	2	28	192

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.50
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiah (MTs)
Menurut Kecamatan Tahun 2018/2019

No.	Tahun	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	-	-	-	-	-	-
2	Sidemen	-	-	-	-	-	-
3	Manggis	-	-	-	-	-	-
4	Karangasem	1	28	434	1	14	84
5	Abang	-	-	-	1	14	108
6	Bebandem	-	-	-	-	-	-
7	Selat	-	-	-	-	-	-
8	Kubu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	28	434	2	28	192

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Terdapat satu buah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Kabupaten Karangasem hanya terdapat di Kecamatan Karangasem. Jumlah murid tahun 2018 sebanyak 24 orang dengan jumlah guru 3 orang. Perkembangan jumlah murid di sekolah ini dari tahun 2014-2018 terus mengalami meningkat, dan jumlah guru yang tersedia juga cenderung menurun., selengkapnya disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
di Kecamatan Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019

Tahun	Sekolah Negeri		
	Sekolah	Guru	Murid
2014/2015	1	5	18
2015/2016	1	4	19
2016/2017	1	4	19
2017/2018	1	3	26
2018/2019	1	3	24

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Di Kabupaten Karangasem terdapat Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Terbuka, yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, untuk sekolah SMP Satu Atap Negeri terdapat 12 sekolah dan SMP Terbuka terdapat 1 sekolah. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Menurut
Kecamatan Tahun 2018/2019

No.	Tahun	SMP Satu Atap Negeri			SMP Terbuka		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	1	13	42	-	-	-
2	Sidemen	1	32	281	-	-	-
3	Manggis	1	13	42	-	-	-
4	Karangasem	-	-	-	-	-	-
5	Abang	2	18	163	-	-	-
6	Bebandem	1	12	71	-	-	-
7	Selat	-	-	-	1	16	16
8	Kubu	6	80	486	-	-	-
	Jumlah	12	168	1 085	1	16	16

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Karangasem tahun 2014-2018 terdapat 9 sekolah SMU Negeri kecuali tahun 2015 terdapat 10 sekolah, dan 9 SMU Swasta kecuali tahun 2017 terdapat 10 sekolah. Di tahun 2018 jumlah murid di SMU negeri terdapat 6.758 orang dengan jumlah guru mencapai 341 orang, sedangkan di SMU swasta jumlah murid 2.536 orang dengan jumlah guru 214 orang. Perkembangan jumlah guru dan murid SMU di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum (SMU)
di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	SMU Negeri			SMU Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	9	459	5.467	9	245	2.351
2	2015/2016	10	376	5.595	9	245	2.336
3	2016/2017	9	451	5.799	9	214	1.975
4	2017/2018	9	440	6.280	10	273	2.597
5	2018/2019	9	341	6.758	9	214	2.536

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Karangasem, tersebar di 8 kecamatan kecuali Kecamatan Abang dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Karangasem dengan 3 buah sekolah negeri dan 5 buah sekolah swasta. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Karangasem Tahun 2018 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Umum (SMU)
Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Tahun	SMU Negeri			SMU Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	1	38	797	-	-	-
2	Sidemen	1	30	685	-	-	-
3	Manggis	1	31	640	1	27	181
4	Karangasem	3	130	2 555	5	132	1 328
5	Abang	-	-	-	2	49	604
6	Bebandem	1	42	708	-	-	-
7	Selat	1	41	682	1	6	413
8	Kubu	1	29	691	-	-	-
	Jumlah	9	341	6 758	9	214	2 536

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Selain SMU Negeri dan SMU Swasta, di Kabupaten Karangasem tahun 2018 terdapat 1 sekolah Madrasah Aliyah (MA) Negeri setingkat SMU yang berada di Kecamatan Karangasem, dengan jumlah murid sebanyak 386 orang yang diasuh oleh 35 orang guru. Perkembangan Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019

No.	Tahun	MA Negeri			MA Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	1	35	337	1	14	33
2	2015/2016	1	33	361	1	15	42
3	2016/2017	1	34	351	1	14	59
4	2017/2018	1	35	391	-	-	-
5	2018/2019	1	35	386	1	10	77

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 berjumlah 5 SMK negeri dengan jumlah murid mencapai 4.660 orang dengan jumlah guru 267 orang dan 7 SMK swasta dengan jumlah murid 1.879 orang dengan jumlah guru 97 orang. Perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru SMK di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014/2015 -2018/2019 disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 -2018/2019

No.	Tahun	SMK Negeri			SMK Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	4	224	2.706	8	185	1.702
2	2015/2016	4	114	3.321	8	169	1.722
3	2016/2017	5	288	4.306	7	164	2.027
4	2017/2018	5	281	4.560	8	215	2.042
5	2018/2019	5	267	4.660	7	97	1.879

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Karangasem tahun 2018 tersebar di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem dan Kubu. Sedangkan SMK Swasta hanya terdapat di Kecamatan Rendang, Karangasem dan Kubu. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	SMK Negeri			SMK Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	Rendang	-	-	-	1	38	457
2	Sidemen	-	-	-	-	-	-
3	Manggis	1	57	1 117	-	-	-

4	Karangasem	1	63	1 136	5	78	932
5	Abang	1	64	991	-	-	-
6	Bebandem	1	16	329	-	-	-
7	Selat	-	-	-	-	-	-
8	Kubu	1	67	1 087	1	19	490
	Jumlah	5	267	4 660	7	97	1 879

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Di Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 buah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang berada di Kecamatan Karangasem dengan jumlah murid 21 orang dengan jumlah guru 9 orang. Perkembangan Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karangasem 2013/2014 – 2017/2018 disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karangasem Tahun 2014/2015 – 2018/2019

No.	Tahun	SMALB Negeri			SMALB Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
1	2014/2015	1	3	10	-	-	-
2	2015/2016	1	3	10	-	-	-
3	2016/2017	1	10	12	-	-	-
4	2017/2018	1	27	16	-	-	-
5	2018/2019	1	9	21			

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Dari hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2017-2021 di bidang pendidikan untuk APK SD/MI dari tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan, sedangkan APM SD/MI justru mengalami peningkatan. Berbeda dengan APK SMP/MTs dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan dan APM SMP/MTs berfluktuatif. Capaian indikator kinerja dalam bidang pendidikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2017-2021 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pendidikan Kabupaten Karangasem 2015-2017

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017
1	APK SD/MI *	100,56	99,14	98,57
2	APM SD/MI *	79,47	87,32	93,40
3	APM SMP / MTs *	74,97	99,14	78,27
4	APK SMP/MTs *	97,38	78,09	103,90
5	Persentase Penduduk Buta Aksara *	21,78	18	16

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017
6	Persentase kelulusan SD/MI paket A	100	100	100
7	Persentase kelulusan SMP/MTs, Paket B	100	100	100
8	Nilai rata-rata ujian SD/MI paket A	7,50	7,50	7,50
9	Nilai rata-rata ujian SMP/MTs, Paket B	7,75	7,75	7,75
10	Jumlah medali/ prestasi siswa tingkat nasional	7	7	7
11	Jumlah kelompok sentra pemberdayaan pemuda	n/a	2	3
12	Jumlah wira usaha muda dilatih	n/a	50	50
13	Persentase Pendidik bersertifikat	80	80	80
14	Persentase satuan pendidikan formal tingkat TK terakreditasi minimal B	67,27	67,27	67,27
15	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	96,36	96,36	96,36
16	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	17,31	17,31	17,31
17	Jumlah sekolah SD yang melaksanakan kurikulum standar nasional	5	5	5
18	Jumlah sekolah SMP yang melaksanakan kurikulum standar nasional	5	5	5
19	Jumlah penambahan ruang kelas sekolah TK Negeri	4	4	4
20	Jumlah TK Ber APE lengkap	16	16	16
21	Jumlah Bangunan TK negeri yang dipelihara sesuai standar SPM	13	13	13
22	Jumlah SD/MI yang sarana dan prasarana sesuai SPM	n/a	1	1
23	Jumlah SMP/MTs yang sarana dan prasarana sesuai SPM	n/a	1	1
24	APK PAUD *	26,68	26,68	26,68
25	Jumlah PAUD	292	292	292
26	Jumlah satuan pendidikan non formal (LKP) yang dibina	12	12	12
27	Jumlah dana pendampingan biaya operasional (BOS) untuk siswa SD per orang per tahun (Rp)	n/a	800.000	800.000
28	Jumlah dana pendampingan biaya operasional (BOS) untuk SMP (Rp)	n/a	1000.0000	1000000
29	Jumlah dana beasiswa untuk siswa SD per orang per tahun (Rp)	620.000	620.000	620.000
30	Jumlah dana beasiswa untuk siswa SMP per orang per tahun (Rp)	900.000	900.000	900.000
31	Jumlah dana beasiswa untuk program	472 ribu	472 ribu	472 ribu

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017
	Indonesia Pintar (PIP) SD per orang per tahun			
32	Jumlah dana beasiswa untuk program Indonesia Pintar (PIP) SMP per orang per tahun	787 ribu	787 ribu	787 ribu
33	Jumlah beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SD & SMP/per tahun (siswa penerima Kartu Karangasem Cerdas)	25.342 orang	25.342 orang	25.342 orang
34	Persentase jumlah siswa SD dan SMP yang diterima lewat jalur prestasi	20	20	20
35	Jumlah kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait pendidikan	2	2	2

Sumber: Bappelitbangda Kab.Karangasem, 2019

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Selain itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Tabel 2.60.
Perkembangan Jumlah Tempat Tidur yang Dimiliki RSUD
Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Tempat Tidur
2014	218
2015	218
2016	317
2017	335
2018	334

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari tabel 2.60 dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten

Karangasem terdapat 3 buah Rumah Sakit Umum dengan kapasitas tempat tidur di tahun 2018 sebanyak 334 unit. Dilihat dari perkembangan jumlah tempat tidur yang dimiliki RSUD Karangasem dari tahun 2014-2018 terus meningkat. Sampai tahun 2018, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas berjumlah 12 puskesmas, puskesmas pembantu 71, klinik 7, puskesmas keliling 12, posyandu 682, pos kesehatan desa 80, praktek dokter mencapai 93 dan praktek bidan 135. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.61 dan Tabel 2.62.

Tabel 2.61
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 -2018

Tahun	Puskesmas	Pustu	Klinik	Pusling	Posyandu	Poskesdes	Tempat Dokter Praktek	Tempat Praktek Bidan
2014	12	71	5	12	673	80	161	120
2015	12	71	5	12	674	80	56	181
2016	12	71	5	12	678	80	131	130
2017	12	71	7	12	682	80	93	138
2018	12	71	7	12	682	80	93	135

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.62
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Puskesmas	Pustu	Klinik	Pusling	Posyandu	Poskesdes	Tempat Dokter Praktek	Tempat Praktek Bidan
1	Rendang	1	6	-	1	62	8	5	3
2	Sidemen	1	5	-	1	54	10	5	6
3	Manggis	2	9	2	2	66	12	10	34
4	Karangasem	2	9	1	2	142	11	55	50
5	Abang	2	14	-	2	105	14	3	5
6	Bebandem	1	7	2	1	72	8	5	12
7	Selat	1	9	-	1	66	8	6	3
8	Kubu	2	12	2	2	115	9	4	22
	Jumlah	12	71	7	12	682	80	93	135

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tenaga pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Di puskesmas-puskesmas yang tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem memiliki sumber daya medis seperti dokter, perawat, bidan, paramedis non perawat dan paramedis lainnya. Banyaknya Tenaga Pelayanan Kesehatan menurut Status Tenaga Kesehatan dari tahun 2014-2018 disajikan pada tabel 2.63 dan Tabel 2.64.

Tabel 2.63
Banyaknya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Menurut Status Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018

Tahun	Dokter*)	Perawat**)	Bidan	Paramedis Non Perawat
2014	67	154	124	71
2015	65	160	127	67
2016	59	244	137	71
2017	63	259	143	91
2018	65	252	142	95

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Keterangan:

*) : Mencakup dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi

**) Mencakup perawat umum dan perawat gigi

***) Termasuk tenaga kesehatan di RSUD, Dinkes Kabupaten dan UPT Labkes.

Tabel 2.64
Banyaknya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Menurut Status Tenaga Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Dokter *)	Perawat **)	Bidan	Paramedis Non Perawat
1	Rendang	8	12	24	15
2	Sidemen	7	7	18	8
3	Manggis	11	28	27	21
4	Karangasem	11	28	40	24
5	Abang	6	22	37	14
6	Bebandem	5	16	25	9
7	Selat	7	20	23	7
8	Kubu	12	21	38	7
	Jumlah	67	154	232	105

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Keterangan:

*) : Mencakup dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi

**) Mencakup perawat umum dan perawat gigi

***) Termasuk tenaga kesehatan di RSUD, Dinkes Kabupaten dan UPT Labkes.

Jumlah tenaga medis, paramedis, serta sarana dan prasarana RSUD Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan walaupun ada beberapa tenaga medis yang berkurang seperti dokter gigi, Ahli kesehatan lingkungan dan analisis kimia. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Jumlah Sarana Medis, Pasien, dan Tenaga Medis, Paramedis, Serta Prasarana RSUD
Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tempat tidur pasien (buah)	218	218	236	235	235
2	Pasien rawat inap (Orang)	49342	52.262	20.862	37.182	12.105
3	Pasien rawat jalan (Orang)	88056	103.103	101.498	94.474	107.567
4	Dokter Spesialis	17	22	27	28	31
5	Dokter Umum	29	23	29	33	32
6	Dokter Gigi	4	4	3	2	2
7	Perawat	175	224	234	249	243
8	Perawat Gigi	9	10	10	10	9
9	Bidan	100	123	137	143	142
10	Pengatur Analisis Kesehatan	2	2	2	0	2
11	Pengatur Gizi	1	1	1	0	14
12	Ahli Gizi	13	14	15	16	4
13	Apoteker	2	6	7	11	10
14	Asisten Apoteker	14	14	17	16	15
15	Ahli Anastesi	2	1	2	2	0
16	Ahli Kesehatan Lingkungan	7	8	1	1	1
17	Sanitarian	2	2	9	9	9
18	Prakarya Kesehatan	5	7	7	7	7
19	Tenaga Non Medik	284	322	325	317	325
20	Teknisi Elektromedis	3	3	3	3	12
21	Radiografer	10	11	12	12	4
22	Fisoterapis	2	4	4	4	1
23	Analisis Kesehatan	11	13	14	18	15
24	Analisis Kimia	2	2	2	1	1

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kasus penyakit terbanyak yang rawat inap di RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah penyakit anemia yang mencapai 721 kasus atau 19,08%, disusul oleh kasus pneumonia, unspecified yang mencapai 670 kasus atau 17,73%. Data selengkapnya tentang sepuluh penyakit terbanyak yang rawat inap di RSUD Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Sepuluh Penyakit Terbanyak Yang Rawat Inap
di RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Diagnosa Penyakit	Banyaknya Kasus	Presentase
1	Anemia	721	19,08
2	Pneumonia	670	17,73
3	Essential (primary) Hypertension	596	15,78
4	Dyspepsia	542	14,35
5	Urinary tract infaction, not spessified	334	8,84
6	Crebral infarction unspesified	254	6,72
7	Typoid fever	244	6,46
8	Chronic tuonuloinsitial nephristis, unspesified	202	5,35
9	Broncopneumonia, unspesified	124	3,28
10	Anemia in neoplasmatic disease	91	2,41

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kasus penyakit terbanyak yang rawat jalan di RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah penyakit low back pain yang mencapai 1.657 kasus atau 15,19%, Data selengkapnya tentang sepuluh penyakit terbanyak yang rawat jalan di RSUD Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Sepuluh Penyakit Terbanyak Yang Rawat Jalan
di RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Diagnosa Penyakit	Banyaknya Kasus	Persentase
1	Low back pain	1.657	15,19
2	Cerebral infaction, unspesified	1.478	13,55
3	Epilepsy, unspesified	1.467	13,45
4	Non insulin dependent diabetes melitus without complication	1.394	12,78
5	Chronic kidney disease, unspesified	1.164	10,67
6	Essential (primary) Hypertension	1.159	10,63
7	Unspesified human imunodeficiency visrus (HIV) disease	758	6,95
8	Unspesified diabetes melitus without complication	726	6,66
9	Cervikal root disorder, not elsewhere classified	616	5,65
10	Thotoxicosis, unspesified	488	4,48

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kasus kematian terbanyak pasien rawat inap di RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2018 disebabkan oleh penyakit gagal nafas yang mencapai 332 kasus atau 69,46%, Data selengkapnya tentang sepuluh penyakit terbanyak yang rawat jalan di RSUD Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Sepuluh Kasus Kematian Terbanyak Pasien Rawat Inap
di RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Diagnosa Penyakit	Banyaknya Kasus	Persentase
1	Gagal napas	332	69,46
2	Syock sepsis/septik	35	7,32
3	BBLR/SAR	29	6,07
4	KJDR	22	4,60
5	Gagal jantung	19	3,97
6	Cardiac arrest	16	3,35
7	Multi organ failure (MOF)	10	2,09
8	Respirasi arrest	8	1,67
9	Syock cardiogenik	4	0,84
10	ACKD/CKD	3	0,63

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kesehatan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten
Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu (AKI)	89,34	79,9	86,9
Angka Kematian Balita (AKBA)	12	10,8	7,5
Persentase bayi baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (KN3) (%)	94	95	97
Persentase pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (%)	65	70	80
Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil	25,60	20	18
Prevalensi BBLR	13,40	10	8
Persentase bayi usia kurang dari 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (%)	38	50	80
Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)	12,20	10	9
Prevalensi Wasting (kurus) anak balita (Bawah lima tahun)	10,00	8	7
Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah dua tahun)	27,70	25	23
Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium (%)	70	75	80
Persentase perbaikan gizi masyarakat yang terfasilitasi (%)	100	100	100
Persentase Rumah Sehat (%)	85	87	88
Persentase Tempat Umum Sehat (%)	94	93	95
Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat (%)	53	60	75
Jumlah Desa STBM (satuan indikator : Desa)	69	72	75
Persentase Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi Layak	73	70	80

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase TPM yang Memenuhi Syarat (%)	15	50	75
Persentase RS dan posyankes yang mengelola limbah medis (%)	10	20	30
Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) (%)	20	40	50
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	35	40	50
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	30	40	50
Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining penyakit tidak menular di Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) (%)	25	30	40
Persentase bayi (anak usia 0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)	95	96	96
Persentase baduta yang mendapat imunisasi lanjutan (%)	90	90	90
Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon (%)	75	76	77
Persentase KLB yang tertangani kurang dari 18 jam (%)	100	100	100
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	97	98	98
Persentase pasien TB mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	100	100	100
Persentase Pasien IMS mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	100	100	100
Persentase pasien Waria/transgender mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	25	30	40
Persentase Pengguna narkoba Napza mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	25	30	40
Persentase warga binaan mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	45	55	65
Persentase RT berperilaku hidup sehat (%)	69	75	80
Persentase pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi (%)	100	100	100
Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (%)	90	95	100
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer (%)	15	50	75
Persentase peningkatan pelayanan kesehatan aparat pemerintah (%)	100	100	100
Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun/direhabilitasi	15	15	15
Angka Kesakitan Malaria (per 100.000 pdd)	0,002	< 1	< 1
Angka Kesakitan Kusta (per 10.000 pdd)	0,2	< 1	< 1

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Penemuan dan Tatalaksana kasus pneumonia balita sesuai standar (%)	100	100	100
Persentase Penemuan dan Tatalaksana kasus diare sesuai standar (%)	100	100	100
Persentase Tatalaksana kasus GHPR sesuai standar (%)	100	100	100
Persentase pengobatan kecacingan secara massal (%)	97	100	100
Persentase pemeriksaan kesehatan jemaah haji (%)	100	100	100
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar (%)	70	75	80
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI	Belum terbentuk	1	1
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya (%)	80	85	90
Jumlah puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	12	12	12
Persentase pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di Puskesmas (%)	Belum ada	100	100
Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling) (%)	Belum ada	100	100
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)	100	100	100
Jumlah pemanfaat Kartu Karangasem Sehat (orang)	Belum ada	1235	1235
Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	65	75	80
Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas (%)	74	75	80
Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kab. Karangasem 2018.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang irigasi bertujuan untuk meningkatkan jaringan saluran irigasi untuk memberikan peningkatan kebutuhan akan air kepada masyarakat luas. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Karangasem program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi mempunyai dampak yang positif terhadap persawahan,

ladang, dan kehidupan masyarakat. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan di realisasikan dengan kegiatan utama yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dari data jaringan irigasi, luas daerah jaringan irigasi di Kabupaten Karangasem yakni 5.476 ha yang mengairi 116 subak. Keberhasilan dari program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan diukur dari terpenuhinya 53 paket pekerjaan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan atau sebanyak sebanyak 4,3% mencapai realisasi fisik 600% dari target yang ditetapkan.

Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Jalan yang ada di Kabupaten Karangasem terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten dan Jalan Desa dan kondisinya di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Panjang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	Panjang Jalan (Km)
1	Baik (Km)	657,26
2	Sedang (Km)	74,40
3	Rusak (Km)	88,35
4	Rusak Berat (Km)	382,53
	Jumlah	1.202,54

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten (%)	100	100	100
Menurunkan jumlah desa rawan air (Desa)	24	15	13
Persentase panjang pantai yang terjaga (%)	3,76	4,06	4,35
Jumlah tersusunnya kebijakan tentang rencana tata ruang	4	4	6
Persentase tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	100	100	100
Persentase sampah yang terkelola di kota	87	100	100

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Amlapura (%)			
Persentase terlaksananya Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100
Persentase teridentifikasinya Jaringan Jalan di Kabupaten Karangasem (%)	100	100	100
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	72	72,5	73
Persentase meningkatnya bantaran dan bangunan sungai yang terjaga (%)	0,18	0,028	0,028
Jumlah pengadaan tanah untuk menunjang pembangunan infrastruktur (Lokasi)	98	98	98
Persentase tingkat kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	65	67	68,0
Persentase meningkatnya pengaturan jasa konstruksi (%)	100	100	100
Persentase meningkatnya informasi bidang ke-PU-an (%)	20	20	25
Jumlah unit sarana dan prasarana ke bina margaan yang dibina	25 unit	25 unit	25 unit
Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur Pedesaan (%)	70	75	80

Sumber : Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

d. Sosial

Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS). Banyaknya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenisnya tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Banyaknya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Jenisnya Tahun 2015-2018

No.	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018
1	Anak Terlantar (AT)	277	232	232	232
2	Anak Nakal	-	-	-	-
3	Tuna Susila	-	-	-	-
4	Pengemis	21	21	21	21
5	Gelandangan	-	-	-	-

No.	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018
6	Korban Penyalahgunaan Narkotika	1	1	1	1
7	Korban Tidak Kekerasan	-	-	-	-
8	Penyandang Cacat	2.471	2.461	2.461	2.461
9	Keluarga Rentan	-	-	-	-
10	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	217	217	217	217
11	Lansia Terlantar	3.629	3.629	3.629	3.629
12	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	660	590	590	590
13	Keluarga Fakir Miskin	9.211	9.211	9.211	9.211
14	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	2.361	2.361	2.361	2.361
15	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	6	6	6	6
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	46	46	46	46
18	Korban Bencana Alam	26	26	26	26
19	Bencana Sosial	-	-	-	-
20	Komunitas Adat terpencil	-	-	-	-
21	Anak Balita Terlantar	72	52	51	51
22	Anak jalanan	-	-	-	-
Jumlah		18.998	18.853	18.852	18.852

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah Panti Asuhan sampai tahun 2018 sebanyak 3 buah, terdiri dari Panti Asuhan Yasa Kerti, Panti asuhan Yassika dan Panti Asuhan Widayasih VII. Jumlah anak asuh yang ada pada ketiga panti asuhan sebanyak 89 orang, penghuni 89 orang dan kapasitas tampung 102 orang. Perkembangan jumlah anak asuh, penghuni dan kapasitas tampung panti asuhan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Anak Asuh, Jumlah penghuni dan Kapasitas Tampung Panti Asuhan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Anak Asuh	Jumlah Penghuni	Kapasitas Tampung
2014	109	121	131
2015	83	83	96
2016	83	76	96
2017	67	73	83
2018	89	89	102

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.74
 Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Sosial Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten
 Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah rumah tinggal layak huni dibangun (Unit)	2509	134	338
Persentase Fakir Miskin yang terpenuhinya perlindungan sosial (%)	100	53,76	60,63
Persentase anak terlantar yang mendapatkan kebutuhan dasarnya, perlindungan dan jaminan sosial (%)	80	100	94,57

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

Adapun capaian SPM urusan pelayanan dasar di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 – 2019 dan target 2020 dan 2021 adalah sebagaimana tabel 2.80.

Tabel 2.80
Capaian Indikator SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2019 dan Target 2020-2021

No	Jenis SPM	2017		2018		2019		2020	2021	PERANGKAT DAERAH
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Target (%)	
BIDANG PENDIDIKAN										
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;									
	SD	100	31,65	100	96	100	96,1	100	100	Disdikpora
	MI	100	50	100	83,3	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	85,42	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	50	100	100	100	66,67	100	100	Disdikpora
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik									
	SMP	100	2,08	100	75	100	75	100	100	Disdikpora

	MTS	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;									
	SD	100	27,45	100	95,52	100	95,52	100	100	Disdikpora
	MI	100	83,33	100	83,33	100	83,33	100	100	Disdikpora
	SMP	100	12,5	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan									
	SD	100	95,52	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	83,33	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;									
	SMP	100	66,67	100	75	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik									
	SD	100	98,88	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%									
	SMP	100	98	100	98	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	50	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn									
	SMP	100	62,5	100	75	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	50	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
10	Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik									
	SD	100	93,28	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;									
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
13	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;									
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
14	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

15	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
16	Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
17	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
18	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;									
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
19	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;									
	SD	100	94,4	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	83,33	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

20	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;										
	SD	100	94,4	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	83,33	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	66,67	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	50	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
21	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;										
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
22	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu										
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
23	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku										
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
24	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
25	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
26	Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
27	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora

	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
28	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US / UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
29	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)									
	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MI	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
	MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikpora
BIDANG KESEHATAN										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	82,41	100	80,41	100	94,80	100	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100,97	100	95,80	100	100,00	100	100	Dinas Kesehatan

3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	108,51	100	99,64	100	100,00	100	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	100	79,87	100	84,59	100	97,43	100	100	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	97,53	100	100,00	100	99,99	100	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	4,89	100	11,55	100	58,91	100	100	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	66,68	100	65,45	100	92,16	100	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	15,28	100	44,54	100	30,75	100	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	21,14	100	57,32	100	100,00	100	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100	96,42	100	97,12	100	79,12	100	100	Dinas Kesehatan

11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	80,54	100	100,00	100	69,81	100	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	70,47	100	85,49	100	74,61	100	100	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM										
1	Rumah tangga bersanitasi	100	76,00	100	76,25	100	84,48	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN PERMUKIMAN										
1	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni	n/a	n/a	100	98,38	100	99,72	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS										
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100	85,00	100	90,00	100	100,00	100	100	BPBD

2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	90,00	100	95,00	100	100,00	100	100	BPBD
3	Pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100	BPBD
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	82,31	100	82,31	100	82,31	100	100	Damkar
5	Persentase tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	42,65	100	45,65	100	35,21	100	100	Damkar

6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	0	0	0	100	0,04	100	100	Damkar
7	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0	0	100	35,21	100	100	Damkar

8	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	0	0	0	0	100	0,00	100	100	Damkar
9	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	100	100	100	98,13	100	100,00	100	100	Satpol PP
10	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	90	100	90	100	90	95,00	95	100	Satpol PP

11	cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	90	90	90	90	90	90,00	95	100	Satpol PP
SOSIAL										
1	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang Cacat dan trauma	100	89,99	100	66,03	100	89,63	100	100	Dinas Sosial
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	100	95,28	100	82,68	100	95,17	100	100	Dinas Sosial
3	Pembinaan Anak Terlantar	100	95,06	100	93,82	100	92,09	100	100	Dinas Sosial
4	Pembinaan Panti Asuhan / Jompo	100	97,73	100	99,35	100	99,65	100	100	Dinas Sosial
5	Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	100	92,09	100	97,68	100	93,02	100	100	Dinas Sosial

6	Penanganan Gelandangan dan Pengemis	100	75,29	100	81,57	100	95,89	100	100	Dinas Sosial
7	Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut Tanggat Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	100	59,87	100	30,7	100	29,44	100	100	Dinas Sosial

Sumber : data Perangkat daerah 2019, diolah

2.5.2 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar

A. Perhubungan

Perhubungan merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan yang lainnya sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana perhubungan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Karangasem tahun 2018 banyaknya angkutan darat bermotor yang wajib uji berjumlah 6.582 buah, angkutan dinas sebanyak 44 buah, angkutan umum 5.993 dan bukan umum 945, selengkapnya disajikan pa

Tabel 2.81

Banyaknya Angkutan Darat Bermotor Yang Wajib Uji di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkutan Dinas (buah)	39	29	29	41	44
2	Angkutan Umum (buah)	1.130	1.823	2.196	2.539	5.993
3	Angkutan Bukan Umum (buah)	2.203	2.612	3.469	3.926	945
4	Jumlah (buah)	3.372	4.464	5.694	6.506	6.982

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Banyaknya angkutan darat bermotor dan tidak bermotor di Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2018 mencapai 197.903 buah, mobil penumpang 12.422 buah, mobil angkutan 89.372 buah, dan sepeda motor 176.109 buah. Perkembangan sarana angkutan di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 dari segi jumlah meningkat, pada tahun 2014 143.807 buah, tahun 2015 mencapai 147.967 buah, tahun 2016 164.724 buah dan di tahun 2017 mencapai 176.829 buah dan tahun 2018 mencapai 197.903 buah. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.82 dan Tabel 2.83.

Tabel 2.82

Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Menurut Jenis Sarana di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 – 2018

No.	Sarana Angkutan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mobil Penumpang	7.995	8.948	9.937	11.227	12.422
2	Mobil Barang	2.715	2.725	7.996	8.547	9.372
3	Sepeda Motor	133.097	136.294	146.791	157.055	176.109
4	Jumlah (buah)	143.807	147.967	164.724	176.829	197.903

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.83
Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenis Sarana
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Jenis Angkutan	Umum	Tidak Umum	Jumlah
1	Angkutan penumpang	411	541	952
2	Angkutan Barang	1.596	4.434	6.030
4	Angkutan Laut	59	-	59
Jumlah		2.066	4.975	7.041

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Banyaknya kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 jumlahnya berfluktuatif, pada tahun 2014 kecelakaan lalulintas yang terjadi 96 kasus, tahun 2015 111 kasus, tahun 2016 91 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 120 kasus dan tahun 2018 297 kasus, kecelakaan yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 91 kasus. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Banyaknya Kecelakaan Lalulintas Serta Kerugian Material di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Banyaknya Kecelakaan	96	111	91	120	297
2	Akibat Kecelakaan					
	Mati	32	34	31	34	32
	Luka Berat	40	21	40	23	18
	Luka Ringan	107	56	100	168	430
3	Kerugian Material (Rp)	206.835.000	379.970.000	271.700.000	239.800.000	645.400.000

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Arus kunjungan kapal laut pada Pelabuhan Padangbai yang berupa kedatangan dan keberangkatan disajikan pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Arus Kunjungan Kapal Laut Pada Pelabuhan Padangbai Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1. Kedatangan:		
1	Wisata Asing	22.893
2	Lokal	34.350
3	Sailing Craft	913

No	Uraian	Jumlah
4	Wisata Bahari	37.217
5	Non Pelayaran	31.164
2. Keberangkatan		
1	Wisata Asing	44.097
2	Lokal	25.007
3	Sailing Craft	2.310
4	Wisata Bahari	37.217
5	Non Pelayaran	35.824

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Pada tahun 2018 arus penumpang kapal laut pada pelabuhan laut Padangbai yang terdiri dari arus Padangbai-Lembar, arus penumpang yang tiba mencapai 669.983 orang dan yang berangkat sebanyak 676.411 orang. Arus penumpang Padangbai – Nusa Penida yang tiba sebanyak 50.118 orang dan yang berangkat 51.301 orang. Arus penumpang Padangbai – Gili Trawangan yang tiba sebanyak 254.697 orang dan yang berangkat 372.547 orang. Volume bongkar barang dan kendaraan di Pelabuhan Padangbai disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Volume Bongkar Muat Barang dan Kendaraan di Pelabuhan Laut Padangbai
Tahun 2017

Volume Bongkar Muat Barang	Padangbai-Lembar	Padangbai-Nusa Penida
Bongkar		
1. Roda 4 (Ton)	143.291	13.594
2. Roda 2 (Ton)	127.918	10.351
3. Bagasi (Ton)	914.840	51.270
Muat		
1. Roda 4 (Ton)	159.017	16.646
2. Roda 2 (Ton)	143.419	10.130
3. Bagasi (Ton)	1.097.460	85.029

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Perhubungan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Kondisi Baik (%)	100	100	100
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (kasus)	111	91	120
Persentase Terpeliharanya Prasarana Dan Fasilitas LLAJ (%)	75	75	80
Rata-rata Kecepatan Kendaraan Bermotor Dalam Kota (Km/Jam)	30	32	34
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	60	60	60
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun (unit)	19	20	21
Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	60	60	65
Pelanggaran angkutan umum di jalan (kasus)	200	192	182
Persentase Angkutan Darat Yang Beroperasi Dalam Keadaan Laik Jalan (%)	75	86,40	89

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

B. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar. Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktivitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Lingkungan Hidup Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase penanganan sampah (%)	82,03	83	85
Jumlah sumber-sumber air dan sungai yang dijaga kelestariannya	11	11	14
Jumlah tokoh masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga Pemerintah/ Lembaga Adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	84	84	17

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

C. Pertanahan

Banyaknya penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 355.958 sertifikat, yang terdiri dari hak milik 132.481 sertifikat, hak guna bangunan 222.250 sertifikat, hak guna usaha 17 sertifikat, hak pakai 1.193 sertifikat, hak pengelolaan 2 sertifikat, dan wakaf 15 sertifikat. Perkembangan penerbitan sertifikat di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 berfluktuatif di tahun 2014 telah diterbitkan 7.687 sertifikat, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6.737 sertifikat, di tahun 2016 mengalami peningkatan hingga mencapai 7.597 sertifikat, tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 128.272 sertifikat dan tahun 2018 355.958 sertifikat. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Banyaknya Penerbitan Sertifikat Tanah di Kabupaten Karangasem

Tahun	Banyaknya Sertifikat Yang Diterbitkan
2014	7.687
2015	6.737
2016	7.597
2017	128.272
2018	355.958

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

D. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Akta-akta yang diterbitkan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan yang lainnya. Perkembangan akta yang diterbitkan dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Banyaknya Akta yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No.	Jenis Akta	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kutipan Akta kelahiran	16 440	31 385	32 810	23 635	30 370
2	Kutipan Akta	4.150	8.437	7.896	3.260	6.399

No.	Jenis Akta	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	perkawinan					
3	Kutipan Akta perceraian	51	99	105	126	241
4	Kutipan Akta kematian	74	239	228	1.694	5.696
5	Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	2	5	-	6	2
6	Surat Keterangan	-	-	-	-	48
7	Kutipan II kelahiran	15	341	-	795	196
8	Kutipan II perkawinan	9	145	-	128	96
9	Pelaporan Kelahiran	2	-	-	-	3
10	Pelaporan Perkawinan	4	8	13	6	5
11	Pencatatan Pinggir Perubahan Nama	1	19	39	5	27
12	Pencatatan Pinggir Pengangkatan Anak	3	-	3	1	2
13	Catatan Pinggir Perceraian	3	-	-	-	-
	Jumlah	20.754	40.678	41.094	29.655	43.085

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah penerbitan KTP di 8 kecamatan se Kabupaten Karangasem selama tahun 2018 sebanyak 352.082 lembar KTP-EL. Secara terperinci disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Banyaknya Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Diterbitkan oleh Catatan Sipil Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2018

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Rendang	15 535	15 087	30 622
2	Sidemen	13 661	13 485	27 146
3	Manggis	19 845	19 517	39 362
4	Karangasem	35 395	35 063	70 458
5	Abang	29 413	28 337	57 750
6	Bebandem	20 527	20 123	40 650
7	Selat	16 261	16 235	32 496
8	Kubu	27 432	26 166	53 598
	Jumlah/Total	178 069	174 013	352.082

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

E. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminim baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini.

Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementerian yang sudah terbentuk ditingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan kemasyarakatan. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah *women indevelopment/WID* karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikuti sertakan dalam pembangunan.

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (*gender and development/GAD*). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.

Program KB merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Selain itu juga bertujuan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan mutu fisik SDM. Banyaknya klinik KB yang ada di Kabupaten Karangasem sampai tahun 2018 mencapai 24 klinik, dengan jumlah peserta KB 71.842 peserta, dan jumlah pasangan usia subur (PUS) mencapai 87.404, sehingga persentase peserta KB terhadap PUS sebesar 80,99%. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Banyaknya Klinik KB dan Peserta KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Persentase Peserta KB Terhadap PUS di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Klinik KB	83	83	21	24	24
2	Peserta KB	71.160	68.810	66.610	69.598	71.842
3	PUS	86.842	87.531	85.572	85.933	87.405
4	Persentase Peserta KB terhadap PUS	81,94	78,61	77,84	80,99	80,99

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	10	10,25	20,51
Persentase Perangkat Daerah yang Responsive Gender (%)	20	19,51	24,39
Persentase Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu (%)	89	100	100
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	49,29	90,53	77,36
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif (%)	78,65	78	80
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/Cpr) (%)	73,18	78	80
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif (%)	30,29	30	33
Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Yang Aktif (%)	25,64	25	28
Persentase Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina	29,83	29,83	35,00

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif (%)			
Persentase Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga (%)	95	95	97,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

F. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Jika ditinjau dari angkatan kerja, penduduk Kabupaten Karangasem yang berumur 15 Tahun ke atas menurut kegiatan seminggu yang lalu, sebanyak 82,50% termasuk dalam angkatan kerja dan 17,50% bukan angkatan kerja. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Kegiatan Seminggu yang Lalu	Banyaknya	Persentase (%)
A. Penduduk Usia Kerja	270.500	65,21
I. Angkatan Kerja	256.003	82,50
1. Bekerja	253.469	99,01
2. Mencari Pekerjaan	2.534	0,99
II. Bukan Angkatan Kerja	54.309	17,50
1. Sekolah	14.975	27,57
2. Mengurus Rumah Tangga	33.431	61,56
3. Lainnya	5.903	10,87
Jumlah	310.312	
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		94,64%
C. Pengangguran terbuka		1,00%

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah pencari kerja di tahun 2018 yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem sebanyak 1.140 orang yang terdiri dari 649 orang laki-laki dan 491 orang perempuan. Pencari kerja yang terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 647 orang, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai SD	5	42	47
2	SLTP	12	61	73
3	SLTA	397	250	647
4	Diploma	155	72	227
5	Sarjana	80	66	146
	Jumlah	649	491	1.140

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaannya, diketahui bahwa sektor lapangan kerja pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 34,17% atau sebanyak 86.605 orang di tahun 2018. Sektor berikutnya adalah perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dengan menyerap tenaga kerja mencapai 21,74% atau sekitar 55.111 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	86.605	34,17
2	Pertambangan dan Penggalian	2.404	0,95
3	Industri	49.155	19,39
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.588	0,63
5	Konstruksi	12.452	4,91
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Konstruksi	55.111	21,74
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.217	1,66
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.958	2,75
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan	34.979	13,80
	Jumlah	253.469	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Persentase pencari kerja ditempatkan dengan realisasi 64,01% dari target 45% di tahun 2018, dengan tingkat capaian 142%. Persentase keselamatan dan

perlindungan tenaga kerja sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%. Artinya semua kasus perselisihan hubungan industrial yang ada/terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dapat diselesaikan baik dengan perjanjian bersama atau dengan cara lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Persentase pekerja buruh yang ikut program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) mencapai 70,55% dari target 55% dengan tingkat capaian 128%. Data mengenai kepesertaan pekerja/buruh yang ikut bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karangasem Tahun 2018. Persentase tenaga kerja yang kompeten diperoleh dari jumlah peserta yang dilatih dibagi dengan jumlah peminat/pendaftar. Pada tahun 2018 ini peserta yang mendaftar ikut pelatihan ketrampilan sebanyak 233 orang yang terbagi dalam 7 paket pelatihan. Sedangkan yang dilatih sebanyak 112 orang. Sedangkan peserta yang mendaftar ikut pelatihan magang ke jepang sebanyak 20 orang dan dilatih sebanyak 20 orang. Dari kedua kegiatan tersebut, Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi terealisasi sebanyak 48,06% dari target 45% dengan tingkat capaian sebanyak 107%. Nilai Lakip yang diperoleh Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018 sebesar 65.85 dari target nilai 60.

Sedangkan untuk Kegiatan Transmigrasi Lokal, pada tahun 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tidak memberangkatkan transmigran karena ada surat permohonan penangguhan pengiriman dari calon transmigran yang disebabkan karena calon transmigran masih trauma dengan kondisi gempa dan tsunami yang terjadi di daerah tujuan transmigran.

Tabel 2.97
Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketenaga-Kerja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 - 2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)	64,15	42	58
Jumlah Transmigran yang Terkirim (KK)	0	5	9
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	100	100	100
Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	40,09	41	51
Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%)	46	42	54
Jumlah Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Yang Terdata	75	16	92
Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan K3 (%)	7,36	11,21	15,00
Persentase Pekerja Anak Sektor Informal yang	67	69	70

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Kembali Kedunia Pendidikan (%)			
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	358	578	1.062
Banyaknya Penganggur yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	134	60	40
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	-	-	20

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

G. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari ciri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa, kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktivitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan bisa berjalan dengan berkesinambungan. Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat di sekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka faktor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi masyarakat
2. Pengusaha
3. Lembaga perkreditan
4. Instansi terkait
5. Koperasi sebagai badan usaha

Banyaknya Koperasi yang berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tetap berjumlah 10 KUD dengan jumlah anggota di tahun 2018 mencapai 37.574 anggota, sedangkan Koperasi yang Non KUD sampai tahun 2018 mencapai 310 dengan jumlah anggota 54.711. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98
Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Koperasi (KUD)	Jumlah Anggota KUD	Jumlah Koperasi (Non KUD)	Jumlah Anggota Koperasi (Non KUD)
2014	10	37.680	311	39.575
2015	10	38.409	316	45.769
2016	10	35.622	323	65.135
2017	10	37.577	314	77.327
2018	10	37.574	310	54.711

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.99
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hasil
Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi yang Berprestasi	n/a	1	1
Persentase penguatan kualitas dan Pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan (%)	100	100	100
Cakupan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibantu kredit perbankan (%)	100	100	100

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

H. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat kabupaten maupun provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan seni dan budaya juga diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata.

Tabel 2.100
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kebudayaan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten
Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah desa pakraman, banjar adat, subak, dan subak abian yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	190 DP 716 BA 160 S 230 SA	190 DP 712 BA 159 S 228 SA	190 DP 716 BA 160 S 230 SA

Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi (%)	100	100	100
Jumlah kelompok seni/tradisi budaya yang hampir punah yang dilestarikan	n/a	1	2
Jumlah peninggalan sejarah yang di inventarisir (peninggalan)	n/a	84	59

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

Keterangan:

DP: Desa Pekraman

BA: Banjar Adat

S : Subak

SA: Subak Abian

I. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda juga diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportivitas, disiplin dan semangat juang, yang semuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Tabel 2.101
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2017-2021

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah pendataan organisasi pemuda dan potensi kepemudaan	n/a	1	1
Persentase Peningkatan Pola Kemitraan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga (%)	100	100	100
Jumlah Juara/Medali/Prestasi tingkat Provinsi	19	20	21
Persentase duta olahraga kecamatan yang berpartisipasi (%)	25	59	61

Sumber: Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

J. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (*good governance*), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketenteraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.

Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

K. Ketahanan pangan

Arah pembangunan ketahanan pangan berkorelasi positif dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Kemampuan penyediaan beras dari produksi sendiri yang dalam setiap tahunnya masih kekurangan, yang disebabkan oleh lahan persawahan yang sangat terbatas, ketersediaan air masih terbatas untuk mengairi sawah, sehingga prioritas pembangunan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Karangasem diarahkan pada:

1. Pengembangan ketersediaan pangan utama setara beras.
2. Pengembangan ketersediaan energi dan protein melalui analisa PPH Ketersediaan.
3. Penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan Desa Mandiri Pangan.
4. Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
5. Pengembangan penganeekaragaman konsumsi melalui analisa PPH Konsumsi.
6. Pengembangan mutu dan keamanan pangan melalui uji lab keamanan pangan segar.

Tabel 2.102
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Ketahanan Pangan Hasil Evaluasi RPJMD
Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Angka Konsumsi RT Per Kapita (Rp) Per bulan	578.017,82	800.546,00	1.487.883
Pengeluaran Makanan (Rp) Per bulan	306.465,05	445.543,00	645.751,00
Pengeluaran Non Makanan (Rp) Per bulan	271.552,77	355.003,00	842.131,00
Persentase peningkatan ketahanan pangan (%)	100	100	100
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Setara Beras (%)	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

L. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa maupun Kecamatan.

Tabel 2.103
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa Hasil Evaluasi
RPJMD Kabupaten Karangasem 2017-2021

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (Desa)	75	75	75
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (Desa)	75	75	75
Fasilitasi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa (Desa)	75	75	75

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

M. Kearsipan dan perpustakaan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperbaiki sistem administrasi kearsipan telah dilakukan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, serta meningkatkan kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan yang merupakan indikator utama pembangunan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Pada akhirnya peningkatan pada kedua indikator itu akan dapat meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan di Kabupaten Karangasem.

Keberadaan perpustakaan di suatu wilayah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Di Kabupaten Karangasem terdapat tiga jenis perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan umum sebanyak 24 buah, perpustakaan khusus 1 buah dan perpustakaan sekolah 430 buah. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Umum	24
	- Perpustakaan kabupaten/kota	1
	- Perpustakaan kecamatan	0
	- Perpustakaan desa	23
2	Perpustakaan Khusus	1
	- Perpustakaan OPD	1
3	Perpustakaan Sekolah	430
	- Perpustakaan SD/MI	358
	- Perpustakaan SMP/MTs.	38
	- Perpustakaan SMA/SMK/MA	34

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang Perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Karangasem diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan. Kedua, meningkatnya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.

Tabel 2.105
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase dokumen Arsip daerah (%)	100	100	100
Persentase terlaksananya pelayanan informasi kearsipan (%)	100	100	100
Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan pada perpustakaan sekolah dan desa (%)	100	100	100
Persentase penataan arsip dan data kepegawaian (%)	n/a	50	75
Jumlah ketersediaan sarana penyimpanan (unit)	2	1	1
Jumlah pendokumentasian tradisi-tradisi untuk yang menjadi ciri khas desa	n/a	4	4
Jumlah pendataan serta pelestarian fisik, kandungan dan digitalisasi bahan pustaka/naskah kuno	n/a	Belum ada	80 lontar

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

N. Komunikasi dan Informatika

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu supply and demand. Supply berkaitan erat dengan ketersediaan

infrastruktur telekomunikasi dan demand terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek.

Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, memperkuat sistem jaringan sistem informasi, penyusunan master plane pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi berbasis Web, peningkatan kecepatan akses internet. Desain informasi dalam web sangat efektif digunakan oleh pengguna informasi di seluruh tempat dengan bantuan akses internet. Sarana website pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah pula dikembangkan dengan sub domain-sub domain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase SKPD dan Fasilitas Umum yang Sudah Terkoneksi Jaringan Wifi (%)	100	95	100
Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Berbasis Web Pada Setiap SKPD (%)	20	48	48
Tingkat Kepatuhan Pengelola Menara Telekomunikasi Terhadap Regulasi Operasional Menara Telekomunikasi (%)	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

2.5.3 Urusan Pilihan

1. Pertanian

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Sebagai Penghasil pangan, (2) sebagai penyedia bahan baku untuk sektor industri dan jasa (3) menghasilkan devisa (4) merupakan Pasar yang Potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5) Transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri maka salah satu kebijakan yang di tempuh pemerintah menunjang pencapaian peningkatan sektor pertanian adalah peningkatan produktivitas di sektor pertanian dengan melakukan peningkatan investasi untuk riset (penelitian), perluasan pelayanan dan informasi pasar serta perbaikan infrastruktur. Permasalahan mendasar bidang pertanian adalah rendahnya daya saing hasil pertanian, karena keterbatasan petani dalam permodalan, penerapan teknologi dan akses pasar, serta konversi lahan yang semakin meningkat. Perkembangan luas

panen tanaman pangan di Kabupaten Karangasem dari tahun 2011 – 2015 berfluktuatif seperti disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107
Perkembangan Luas (hektar) Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi	11.915	11.842	12.606	12.183	11.082
2.	Jagung	7.935	7.418	7.769	6.601	6.253
3.	Ubi Kayu	6.979	5.746	5.920	5.394	5.605
4.	Ubi Jalar	1.853	1.625	1.812	1.539	1.345
5.	Kacang Tanah	4.425	3.710	3.753	3.680	3.240
6.	Kacang Kedelai	37	186	31	87	44
7.	Kacang Hijau	350	942	637	326	305

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.108
Perkembangan Produksi (Ton) Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi	78.405,23	71.615,58	75.679,23	66.398,89	71.077,84
2.	Jagung	15.223,99	15.386,50	18.030,77	11.125,00	10.362,52
3.	Ubi Kayu	117.962,80	80.100,02	99.616,39	87.427,74	55.150,56
4.	Ubi Jalar	19.984,55	19.955,82	21.941,02	13.800,25	14.453,64
5.	Kacang Tanah	4.973,11	4.429,58	7.426,23	4.151,30	3.052,26
6.	Kacang Kedelai	46,71	260,29	37,90	98,95	41,34
7.	Kacang Hijau	408,10	1.098,55	742,74	380,12	3.556,30

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Karangasem tahun 2017 mencapai 27.874 ha dengan jumlah produksi mencapai 157.694,46 ton. Luas panen tanaman padi di Kabupaten Karangasem tahun 2017 mencapai 11.082 ha dengan jumlah produksi mencapai 71.077,84 ton. Kecamatan Karangasem merupakan penghasil padi terbesar dibanding kecamatan lain yang ada di Kabupaten Karangasem dengan jumlah produksi 20.233,53 ton atau 28,47% padi diproduksi di Kecamatan Karangasem dari seluruh produksi padi yang ada di Kabupaten Karangasem. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.109 dan Tabel 2.110.

Tabel 2.109
Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Karangasem
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Hasil Panen (Kw/ha)	Produksi (Ton)
2011	11.915	65,80	78.405,23
2012	11.842	60,48	71.615,58
2013	12.606	60,03	75.679,23
2014	12.183	54,50	66.398,89
2015	10.082	64,14	71.077,84

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.110
Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Karangasem Per
Kecamatan Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017			2018		
		Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Hasil Panen (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Hasil Panen (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Rendang	1004,2	68,66	6894,55	1011	76,32	7653,2
2	Sidemen	1262,2	64,81	8180,65	1233,3	73,29	9786,8
3	Manggis	1004,9	60,82	6112,03	957,1	69,27	4779,47
4	Karangasem	2716	58,28	15828,6	2688,9	61,17	20233,53
5	Abang	1196,6	59,69	7142,92	1635,3	58,77	5855,31
6	Bebandem	2121,5	60,64	12863,9	1878,7	76,02	11895,81
7	Selat	1539,7	68,29	10514,94	1182,6	67,21	10873,72
8	Kubu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.845,10	55,15	67.537,59	10.586,90	60,26	71.077,84

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.111
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pertanian Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten
Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah produksi tanaman hortikultura/sayuran (sawi/petsai, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang) (ton)	24.351	28.525	22.578
Jumlah produksi tanaman perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapuk, vanili, tembakau) (ton)	14.319,38	17.797,60	18.111,41
Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang mempunyai izin produksi pangan industri rumah tangga/PIRT	3	3	4
Persentase produk tanaman pangan pangan yang laku dipasarkan (Kacang tanah) (%)	28,00	28	29,3
Persentase produk tanaman hortikultura/buah-buahan (salak) yang laku dipasarkan	80	80	81,2
Persentase produk tanaman hortikultura/buah-buahan (mangga) yang laku dipasarkan (%)	84,00	81,5	83
Jenis produk olahan tanaman hortikultura (buah-buahan) yang laku dipasarkan	5,00	4	5
Jumlah produk perkebunan (jambu mete) yang laku dipasarkan (ton)	600	600	650
Jumlah sertifikat prima/organik yang diperoleh petani/poktan/gapoktan	2	5	6
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pertanian (%)	100	71,3	80,70
Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu	95,00	73,3	70,22

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
tumbuhan/dampak perubahan iklim (%)			
Persentase jumlah serangan penyakit ternak (%)	4,00	4,5	2,32
Jumlah produksi tanaman hortikultura/ buah-buahan (dalam ton)	410,19	54.767	71.564
Jumlah produksi tanaman hortikultura/ sayur-sayuran (dalam ton)	24.351	28.525	22.578
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapuk, vanili, tembakau) (ton)	14319.38	17.797,60	18.111,41
Persentase teknologi pertanian terapan (TTG) (%)	60	62	65
Peningkatan kesejahteraan petani (NTP)	105,41	104,30	103,07
Jumlah anggota KTNA yang mengikuti pelatihan dan pembinaan , pekan daerah dan nasional per tahun	30	30	30
Jumlah peserta yang mengikuti pekan nasional (PENAS)	n/a	30	30
Jumlah peserta yang mengikuti pekan daerah (PEDA)	n/a	30	30
Persentase pembinaan SDM serta kelembagaan petani (%)	100	100	100
Persentase peningkatan ketahanan pangan (%)	100	100	100
Jumlah luasan Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan (Ha)	200	200	200
Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian (%)	100	75	80
Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan (Pasar Tani)	1x	1x	1x
Persentase terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah (%)	100	100	75,40
Persentase terlaksananya penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon (%)	100	100	100
Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	35	36	39
Persentase terlaksananya kenaikan produksi perkebunan dengan memanfaatkan TTG (%)	100	100	100
Persentase tersedianya prasarana pertanian/perkebunan (%)	100	89,13	99,25
Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (%)	100	100	100
Persentase terlaksananya Intensifikasi Tanaman Perkebunan (%)	100	100	100

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase terlaksananya Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan (%)	100	100	100
Jumlah pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan (orang)	40	30	30
Persentase terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan (%)	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

2. Perkebunan dan kehutanan

Di Kabupaten Karangasem terdapat beberapa hasil perkebunan yang meliputi kelapa, kopi, cengkeh, coklat, jambu mete, panili dan yang lainnya. Produksi hasil perkebunan yang paling besar tahun 2018 adalah kelapa mencapai 14.315,10 ton, jambu mete 3.145,42 ton, dan kopi sebanyak 294,42 ton. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Jenis Tanaman	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Kelapa	3.751,41	13.756,78	886,42	18.294,61	14.315,10
2.	Kopi	55,75	934,50	593,25	1.583,50	294,42
3.	Cengkeh	153,50	629,00	13,05	795,55	78,00
4.	Coklat	216,60	524,65	80,5	821,75	176,32
5.	Jambu Mete	1.020,00	8.068,67	391,83	9.480,00	3.145,42
6.	Kapuk	52,75	258,75	-	318,00	34,03
7.	Panili	2,05	2,55	0,05	4,65	0,12
8.	Tembakau	115,00	115,00	-	115,00	84,4

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.113
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	67,00	870,00	-	937,00	958,00
2.	Sidemen	156,08	991,50	-	1.147,58	1.063,39
3.	Manggis	338,73	2.667,50	37,02	3.043,25	2.674,91
4.	Karangasem	852,00	2.217,00	200	3.269,00	2.336,88
5.	Abang	811,90	3.275,73	148,9	4.236,53	4.236,37

6.	Bebandem	579,95	1.799,05	-	2.379,00	1.568,25
7.	Selat	51,25	820,00	2,00	873,25	879,03
8.	Kubu	895,50	1.116,00	498,50	2.509,00	598,27
	Jumlah	3.751,41	13.756,78	886,42	18.294,61	14.315,10

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.114
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kopi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	50,00	79,00	-	129,00	58,00
2.	Sidemen	0,50	51,65	5,00	57,15	17,10
3.	Manggis	-	48,00	-	48,00	8,85
4.	Karangasem	-	55,35	5,00	60,35	12,22
5.	Abang	3,00	65,50	3,50	72,00	27,65
6.	Bebandem	-	50,00	-	50,00	39,20
7.	Selat	-	317,00	-	317,00	115,40
8.	Kubu	2,25	268,00	579,75	850,00	16,00
	Jumlah	55,75	934,50	593,25	1.583,50	294,42

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.115
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Cengkeh Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	1,00	111,00	6,00	118,00	-
2.	Sidemen	7,00	118,25	6,75	132,00	31,90
3.	Manggis	-	43,00	-	43,00	5,97
4.	Karangasem	42,00	42,00	-	84,00	17,85
5.	Abang	30,50	34,00	0,30	64,80	8,35
6.	Bebandem	53,00	33,75	-	86,75	13,93
7.	Selat	20,00	247,00	-	267,00	-
8.	Kubu	-	-	-	-	-
	Jumlah	153,50	629,00	13,05	795,55	78,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.116
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Coklat Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	-	8,00	-	8,00	2,10
2.	Sidemen	-	48,25	25,00	73,25	11,82
3.	Manggis	75,50	146,00	-	221,50	94,70
4.	Karangasem	78,00	32,00	-	110,00	16,53
5.	Abang	63,10	144,90	46,00	254,00	15,80
6.	Bebandem	-	129,00	5,00	134,00	28,82
7.	Selat	-	16,50	4,50	21,00	6,55
8.	Kubu	-	-	-	-	-
	Jumlah	216,60	524,65	80,50	821,75	176,32

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.117
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Jambu Mete Menurut Kecamatan di
Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	-	-	-	-	-
2.	Sidemen	-	-	-	-	-
3.	Manggis	-	-	-	-	-
4.	Karangasem	40,00	240,00	50,00	330,00	18,19
5.	Abang	454,00	941,00	34,00	1.429,00	240,00
6.	Bebandem	-	-	-	-	-
7.	Selat	-	-	-	-	-
8.	Kubu	526,00	6.887,67	307,83	7.721,00	2.886,42
	Jumlah	1.020,00	8.068,67	391,83	9.480,00	3.145,42

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.118
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Kapuk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	-	-	-	-	-
2.	Sidemen	-	-	-	-	-
3.	Manggis	40,75	99,25	-	140,00	19,84
4.	Karangasem	-	8,00	6,00	14,50	2,39
5.	Abang	12,00	40,00	0,50	52,50	2,25

6.	Bebandem	-	8,50	-	8,50	1,99
7.	Selat	-	-	-	-	-
8.	Kubu	-	103,00	-	103,00	7,56
	Jumlah	52,75	258,75	-	318,00	34,03

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.119
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Panili Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Kecamatan	Belum Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1.	Rendang	-	-	-	-	-
2.	Sidemen	-	-	-	-	-
3.	Manggis	-	-	-	-	-
4.	Karangasem	2	2	-	4,00	0,11
5.	Abang	0,05	0,55	0,05	0,65	0,01
6.	Bebandem	-	-	-	-	-
7.	Selat	-	-	-	-	-
8.	Kubu	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,05	2,55	0,05	4,65	0,12

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Hasil perkebunan tanaman tembakau di Kabupaten Karangasem tahun 2018 hanya terdapat di Kecamatan Rendang dan Kecamatan Kubu dengan luas areal yang ditanam mencapai 115 hektar dengan produksi sebanyak 84,40 ton. Adapun perkembangan hasil produksi tanaman tembakau disajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Luas Area Produksi Tanaman Perkebunan Tembakau
di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Ditanam	Dipanen	Jumlah Luas Areal	Jumlah Produksi Total
1	2014	10,00	10,00	10,00	3,00
2	2015	125,00	125,00	125,00	55,75
3	2016	140,00	126,30	-	55,75
4	2017	110,00	110,00	110,00	37,63
5	2018	115,00	115,00	115,00	84,40

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Luas hutan yang ada di Kabupaten Karangasem mencapai 14.260,43 ha, yang terdiri dari hutan lindung 14.056,32 ha dan hutan produksi 204,11 ha. Luas kawasan hutan selengkapanya disajikan pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya
di Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Kawasan	14.260,43	14.260,43	14.260,43	14.260,43	14.260,43
2	Hutan Lindung	14.056,32	14.056,32	14.056,32	14.056,32	14.056,32
3	Hutan Produksi	204,11	204,11	204,11	204,11	204,11

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.122
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Per Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Areal (ha)		
		Luas Kawasan	Hutan Lindung	Hutan Produksi
1	Rendang	4.767,72	4.767,72	-
2	Sidemen	-	-	-
3	Manggis	-	-	-
4	Karangasem	468,56	468,56	-
5	Abang	1.376,26	1.376,26	-
6	Bebandem	1.055,14	1.055,14	-
7	Selat	1.024,31	1.024,31	-
8	Kubu	5.568,44	5.364,33	-
	Jumlah	14.260,43	14.056,32	204,11

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Luas lahan kritis dari tahun 2014-2016 belum mengalami perubahan baik lahan kritis dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.123 dan Tabel 2.124.

Tabel 2.123
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (Ha)	8.004,06	3.718,00	3.718,00	3.718,00
	Kritis	7.534,76	3.248,70	3.248,70	3.248,70
	Sangat Kritis	469,30	469,30	469,30	469,30
2	Lahan Kritis Luar Kawasan Hutan (Ha)	29.680,12	9.470,25	9.470,25	9.470,25
	Kritis	29.680,12	9.470,25	9.470,25	9.470,25

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
	Sangat Kritis	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Total Luas Lahan Kritis	37.684,18	13.188,25	13.188,25	13.188,25

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.124
Luas Lahan Kritis Per Kecamatan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2016

No.	Kecamatan	Dalam Kawasan Hutan(ha)		
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah
1	Rendang	29,02	-	29,02
2	Sidemen	-	-	-
3	Manggis	-	-	-
4	Karangasem	20,47	-	20,47
5	Abang	548,70	-	548,70
6	Bebandem	77,50	141,48	218,96
7	Selat	130,28	117,58	247,86
8	Kubu	2.442,73	210,26	2.652,99
	Jumlah	3.248,70	469,30	3.718,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kegiatan penghijauan atau konservasi tanah (pembuatan hutan rakyat) di Kabupaten Karangasem tahun 2012 dan 2013 masing-masing 400 hektar dan di tahun 2014 mencapai 675 hektar dan di tahun 2015 sampai saat ini kewenangan pengelolaan hutan diambil oleh pemerintah Provinsi Bali. Adapun perincian kegiatan penghijauan di Kabupaten Karangasem tahun 2010-2016 disajikan pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125
Luasan (Hektar) Kegiatan Konservasi Tanah (Pembuatan Hutan Rakyat)
di Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2016

Kecamatan	Desa	2012	2013	2014	2015	2016
Rendang	Menanga	-	-	50,00	-	-
	Pempatan	-	50,00	25,00	-	-
	Rendang	-	-	25,00	-	-
Sidemen	Lokasari	-	-	25,00	-	-
	Sinduwati	-	25,00	-	-	-
	Sangkan Gunung	-	25,00	-	-	-
Manggis	Gegelang	25,00	25,00	-	-	-
	Manggis	-	-	25,00	-	-
	Antiga	-	-	-	-	-
	Antiga Kelod	-	-	-	-	-
	Padangbai	-	25,00	-	-	-
Karangasem	Seraya Barat	-	-	-	-	-
	Seraya Timur	50,00	-	-	-	-

Kecamatan	Desa	2012	2013	2014	2015	2016
	Seraya	75,00	25,00	-	-	-
Abang	Purwakerti	25,00	25,00	25,00	-	-
	Nawakerti	25,00	-	-	-	-
	Tista	25,00	-	-	-	-
	Datah	-	25,00	25,00	-	-
	Pidpid	-	-	-	-	-
	Tiyung Tali	-	-	-	-	-
	Bunutan	25,00	25,00	-	-	-
	Culik	25,00	-	-	-	-
Bebandem	Jungutan	-	25,00	-	-	-
	Buana Giri	-	25,00	25,00	-	-
Selat	Sebudi	-	-	-	-	-
	Amerta Buana	-	-	-	-	-
Kubu	Tulamben	-	-	50,00	-	-
	Baturinggit	-	-	25,00	-	-
	Ban	125,00	25,00	50,00	-	-
	Dukuh	-	-	75,00	-	-
	Tianyar Tengah	-	25,00	125,00	-	-
	Tianyar Barat	-	25,00	50,00	-	-
	Tianyar	-	25,00	25,00	-	-
	Kubu	-	-	50,00	-	-
Jumlah		400,00	400,00	675,00	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Selain penghijauan juga dilaksanakan kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) tahun 2016 di Kecamatan Rendang, yaitu Desa Pempatan seluas 62,50 ha dan Desa Rendang 62,50 ha.

3. Peternakan, perikanan dan kelautan

Populasi ternak di Kabupaten Karangasem meliputi ternak besar dan ternak kecil, yang tergolong ternak besar yaitu sapi, kerbau dan kuda dan yang tergolong ternak kecil yaitu babi, kambing dan domba. Populasi sapi dari tahun 2014-2015 cenderung menurun, sedangkan di tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat yaitu populasi sapi di tahun 2017 mencapai 128.850 ekor. Tahun 2018 ternak sapi menjadi 123.760 ekor. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126
Populasi Ternak di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi	122.369	121.637	127.578	128.850	123.760
2	Kerbau	37	6	9	9	-
3	Kuda	31	-	-	-	-
4	Babi	142.997	143.959	142.147	142.147	142.757
5	Kambing	19.280	18.837	18.227	18.227	17.117

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Banyaknya ternak di rumah pemotongan hewan selama kurun waktu 2014-2017 mengalami peningkatan, tahun 2014 sebanyak 28.682 ekor menjadi 47.420 ekor di tahun 2017, namun di tahun 2018 menurun menjadi 12.678 ekor. Ternak tersebut terdiri dari sapi, babi dan kambing. Jumlah ternak yang paling banyak adalah babi yang mencapai 10.178 ekor di tahun 2018, sedangkan sapi sebanyak 1.790 ekor dan kambing sebanyak 710 ekor, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127
Populasi Ternak di Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 -2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi	2.373	9.463	10.125	10.223	1.790
2	Babi	24.452	30.859	33.019	33.346	10.178
3	Kambing	1.857	3.568	3.818	3.851	710
	Jumlah	28.682	43.890	46.962	47.420	12.678

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Populasi unggas di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 meliputi ayam petelur yang mencapai 1.034.585 ekor, ayam pedaging 837.690 ekor, ayam kampung 455.060 ekor dan itik 35.585 ekor. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128
Populasi Unggas di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 -2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ayam Kampung	517.768	547.441	521.762	532.246	455.060
2	Ayam Ras Petelur	1.030.547	1.052.192	1.110.231	1.121.332	1.034.585
3	Ayam Ras Pedaging	838.901	1.937.482	1.201.204	1.213.214	837.690
4	Itik	55.462	42.900	49.794	50.469	35.585

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Dilihat dari perkembangan populasi unggas dari tahun 2014-2018 untuk populasi ayam petelur terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 populasi ayam petelur 1.030.547 ekor dan di tahun 2018 menjadi 1.034.585 ekor meningkat 0,39% dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk populasi unggas yang lainnya seperti ayam kampung, ayam pedaging dan itik perkembangannya berfluktuatif.

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,48%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129
Perkembangan Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kakap Merah	-	1,90	0,80	10,90	4,90
2	Kurisi	2,39	3,10	2,60	4,00	5,00
3	Kerapu	-	0,50		5,70	5,60
4	Cucut	39,59	51,30	44,50	61,30	1.272,40
5	Alu-Alu			-	48,90	24.30
6	Layang	-	67,90	259,70	-	
7	Selar	3,19	17,70	10,90	-	
8	Kuwe/Languan	-	0,80	1,20	0,80	6.385,10
9	Sunglir	0,85	-	-	-	
10	Ikan Terbang	17,2	21,43	21,80	17,00	37,10
11	Teri	-	1,80	1,40	0,80	
12	Lemuru	-	0,70	0,50	-	
13	Kembung	6.028,27	58,56	8,40	-	6,70
14	Tuna	2.792,2	1.514,56	854,10	1.118,30	930,70
15	Cakalang	4.877,40	2.144,80	749,50	2.176,50	1.228,20
16	Tongkol	7.295,8	20.278,10	20.959,10	16.445,30	6.770,00
17	Pelagis kecil lainnya	-	7,80	6,00	2.072,60	3.373,30
18	Swangi/ Mata besar	1,33	1,70	17,00	13,60	28,50
19	Slengseng	-	8,40	35,90	673,40	23,80
20	Kerong Kerong	1,93	-	-	-	
21	Lemadang	79,63	384,80	450,70	434,70	298,80
22	Cendro	-	-	10,60	7,20	10,10
23	Layang Anggur	-	-	-	129,70	5.972,20
24	Terisi	-	-	-	0,60	1,80
25	Layang Biru	-	-	-	1,70	-
26	Maddihang	-	-	-	46,30	-
27	Cucut Tikus			-	514,20	-
28	Ikan lainnya	393,09	340,73	412,00	873,40	-
	Jumlah	21.532,82	24.907,18	23.839,70	24.656,90	26.390,10

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Perkembangan data benih ikan ditebar menurut jenis ikan dan usaha di Kabupaten Karangasem tahun 2018 terdiri dari benih ikan gurami sebanyak 22.300 ekor, ikan karper sebanyak 248.900 ekor, ikan nila sebanyak 71.420 ekor, udang galah 3.456.600 ekor, dan ikan Sidat 250 ekor, dengan jumlah benih ikan ditebar di tahun 2018 mencapai 3.579.970 ekor. Selengkapnya benih ikan ditebar dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130
Perkembangan Benih Ikan yang Ditebar pada Budidaya Ikan Air Tawar
Tahun 2014-2018

No	Benih Ikan Ditebar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Karper (Ekor)	26.000	12.000	-	2.200.000	48.900
2	Gurami (Ekor)	386.000	450.000	160.000	20.850.000	22.300
3	Nila/Mujair (Ekor)	730.000	2.844.000	330.000	33.600.000	71.420
4	Lele Dumbo	1.320.000	138.000	630.000	-	3.500
5	Udang Galah (Ekor)	1.730.000	3.120.000	2.100.000	16.000.000	3.456.600
6	Udang vaname	22.400.000	6.816.000	4.500.000	-	-
7	Sidat (Ekor)	-	-	-	3.760.000	250

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah sarana dan prasarana penangkap ikan di Kabupaten Karangasem cenderung menurun dari tahun 2014-2018, tahun 2014 terdapat 6.355 buah perahu dan di tahun 2018 menjadi 5.486 buah perahu yang terdiri dari jukung dan motor tempel. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131
Jumlah Perahu dan Motor Tempel di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Jukung	Motor Tempel	Jumlah
2014	198	6.157	6.355
2015	198	6.183	6.381
2016	-	5.486	5.486
2017	-	5.486	5.486
2018	-	5.486	5.486

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Alat penangkap ikan yang digunakan antara lain pancing, pancing ulur, jaring isap, pukot pantai, rawai hanjut, rawai dasar, bubu, purse seine, dan lainnya. Adapun perkembangan alat penangkap ikan menurut jenisnya tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132
Jumlah Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Pancing	Pc. Ulur/Pc.lain	Jaring Insang hanyut	Pukat Pantai	Rawai hanyut	Rawai Dasar	Bubu	Purse Seine	Jumlah
2014	5.812	3.345	6.174	17	78	69	346	18	15.759
2015	5.865	3.494	6.209	2	90	90	6	14	15.770
2016	4.390	1.408	4.165	2	32	-	6	8	10.011
2017	6.155	2.645	4.401	2	309	-	8	-	13.520
2018	6.185	2.620	4.428	2	284	-	8	-	13.527

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah kelompok nelayan tahun 2018 sebanyak 226 kelompok nelayan dan 44 kelompok petani ikan serta 68 kelompok pengolah, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133
Jumlah Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan (P2HP) di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Nelayan	Petani Ikan	Pengolah	Jumlah
2014	254	62	99	415
2015	253	62	99	414
2016	224	71	99	394
2017	223	53	99	375
2018	226	44	68	338

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.134
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah Kelahiran ternak Hasil IB (ekor)	8.789	10.000	10.895
Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	121.637	127.589	128.850
Jumlah Populasi ternak Babi (ekor)	145.149	142.147	143.565
Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	18.837	18.227	18.405
Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor)	3.536.179	2.882.921	2.917.261
Jumlah produksi daging (ton)	n/a	4.863.231	4.930.691
Jumlah produksi telur (ton)	n/a	14.915.804	15.064.958
Jumlah Kelompok yang siap menjalankan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	4	2	2
Jumlah kelompok tani ternak yang mengembangkan sarana dan prasarana peternakan	n/a	2	2
Persentase Kesakitan Ternak Sapi (%)	n/a	3,50	3,25
Persentase Kesakitan Ternak Kambing (%)	n/a	3,60	3,45
Persentase Kesakitan Ternak Babi (%)	n/a	5,50	5,45
Persentase Kesakitan Ternak Unggas	n/a	5,60	5,45
Persentase produk bahan pangan asal hewan segar yang tercemar (%)	n/a	5	5
Persentase jumlah kejadian penyakit zoonosis	n/a	0,045	0,049
Jumlah pemotongan hewan degan pengawasan kesmavet	n/a	2.132	1.579
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.907	23839,70	24656,90
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	461,00	409,00	261,50
Jumlah Kelompok yang siap menjalankan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	4	2	2
Jumlah kelompok tani ternak yang mengembangkan sarana dan prasarana peternakan	n/a	2	2
Tingkat Konsumsi Ikan (ton)	31	31	31

Sumber: Bapelitbangda Kab. Karangasem, 2019

4. Pariwisata

Bali adalah salah satu tempat tujuan wisata favorit di dunia. Setiap tahun banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung guna menikmati keindahan pulau dewata ini. Di Kabupaten Karangasem terdapat 15 objek wisata yang sangat menarik dengan jumlah kunjungan di tahun 2017 mencapai 559.332 wisatawan dimana wisatawan asing berjumlah 400.435 wisatawan dan wisatawan domestik 158.797 wisatawan. Adapun obyek wisata di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135
Objek Wisata di Kabupaten Karangasem

No	Nama Obyek Wisata	Daya Tarik	Lokasi
1	Bukit jambul	Wisata Alam	Desa Pesaban, Kec. Rendang
2	Putung	Wisata Alam	Desa Duda Timur, Kec. Selat
3	Iseh	Wisata Alam	Desa Sidemen, Kec. Sidemen
4	Yeh Malet	Wisata Alam	Desa Antiga, Kec. Manggis
5	Puri Agung Karangasem	Wisata Budaya	Kel. Karangasem, Kec. Karangasem
6	Taman Sukasada Ujung	Wisata Budaya	Ujung, Desa Tumbu Kec. Karangasem
7	Taman Tirtagangga	Wisata Budaya	Desa Ababi, Kec. Abang
8	Tenganan	Wisata Budaya	Desa Tenganan, Kec. Manggis
9	Candidasa	Wisata Tirta	Desa Bugbung, Kec,. Karangasem
10	Besakih	Wisata Budaya	Desa Besakih. Kec Rendang
11	Kebun Salak Sibetan	Wisata Agro	Desa Sibetan, Kec. Bebandem
12	Padangbai	Wisata Tirta	Desa Padangbai, kec. Manggis
13	Jemeluk-Amed	Wisata Tirta	Desa Purwakerti, Kec. Abang
14	Tulamben	Wisata Tirta	Desa Tulanbem, Kec Kubu
15	Telaga Waja	Wisata Tirta	Desa rendang, Kec. Rendang

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 terus meningkat, dimana jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karangasem tahun 2014 mencapai 464.054 wisatawan, tahun 2015 sebanyak 454.802 wisatawan, tahun 2016 sebanyak 507.796 wisatawan, di tahun 2017 sebanyak 559.232 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 1.005.825 wisatawan. Selengkapnya disajikan Tabel 2.136.

Tabel 2.136
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Karangasem
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Asing	301.985	317.201	343.274	400.435	727.574
2	Dalam negeri	162.069	137.601	164.522	158.797	278.251
	Jumlah	464.054	454.802	507.796	559.232	1.005.825

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Perkembangan pariwisata harus didukung oleh sarana dan prasarana pariwisata yang memadai. Sarana akomodasi yang ada di Kabupaten Karangasem tahun 2018 meliputi hotel berbintang 8 buah, hotel non berbintang 448 buah dengan jumlah kamar keseluruhan mencapai 3.744 kamar. Perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 untuk hotel berbintang dan non berbintang berfluktuatif. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137
Jumlah Hotel di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hotel Berbintang	6	8	8	8	8
2	Hotel Non Bintang	207	203	294	294	448
3	Jumlah Kamar	2.360	2.594	3.134	3.134	3.744
4	Kapasitas	5.047	3.377	4.192	4.192	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.138
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Pariwisata Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	Belum Terukur	3	4
Jumlah daya tarik wisata yang tertata	2	1	2
Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem (%)	Belum Terukur	10	10
Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alternatif	0	3	3
Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	3	3	3
Jumlah kawasan dan daya tarik wisata yang tertata sarana dan prasara pendukung pariwisatanya	2	2	3
Jumlah kajian/naskah daya tarik wisata yang terfasilitasi pengembangannya	Belum ada	Belum ada	3

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Jumlah kajian analisa pasar pariwisata	Belum ada	1	4
Jumlah promosi pariwisata	10	10	15
Jumlah kemasan event pariwisata yang dikembangkan	Belum ada	Belum ada	3
Persentase media promosi pariwisata yang dikembangkan (%)	80	100	100
Jumlah jenis data usaha pariwisata dan produk ekonomi kreatif	n/a	n/a	n/a
Jumlah desa wisata yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata alternatif	n/a	3	4
Jumlah generasi muda Karangasem yang diberdayakan sebagai duta pariwisata Karangasem	16	30	50
Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan berbasis pariwisata	n/a	3	3
Persentase peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata (%)	Belum ada	10	20
Jumlah DTW yang berbasis Desa yang mendapat pembinaan	Belum ada	Belum ada	3
Jumlah workshop pengelolaan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan Tri Hita Karana	Belum ada	Belum ada	12
Jumlah kelompok masyarakat yang sadar wisata yang menjalankan Sapta Pesona	3	3	6

Sumber: Bapelitbangda Kab. Karangasem, 2019

5. Perdagangan

Perkembangan perusahaan dagang barang dan jasa. Pada tahun 2018 perkembangan perusahaan dagang barang dan jasa di Kabupaten Karangasem dapat disajikan pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139
Banyaknya SIUP Perdagangan Barang dan Jasa yang Dikeluarkan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Golongan Usaha				Bidang Usaha		
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Barang	Jasa	Barang dan Jasa
1	Rendang	101	15	2	-	-	-	-
2	Sidemen	37	15	8	-	-	-	-
3	Manggis	61	10	1	-	-	-	-
4	Karangasem	10	30	16	-	-	-	-
5	Abang	14	10	1	-	-	-	-
6	Bebandem	14	19	7	-	-	-	-
7	Selat	27	9	-	-	-	-	-
8	Kubu	-	43	-	-	-	-	-
	Jumlah	264	151	35	-	-	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Berdasarkan golongan usahanya pada tahun 2018 jumlah usaha mikro mencapai 264 buah, usaha kecil 151 buah, usaha menengah 35 buah.

Tabel 2.140
Banyaknya SIUP Perdagangan Barang dan Jasa yang Dikeluarkan Berdasarkan Bentuk Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Bentuk Usaha				
		PT	CV	Koperasi	Perorangan	Lainnya
1	Rendang	-	-	-	52	4
2	Sidemen	-	-	-	-	-
3	Manggis	-	1	-	4	-
4	Karangasem	-	10	-	41	8
5	Abang	-	3	-	15	3
6	Bebandem	-	2	-	14	3
7	Selat	-	-	-	22	-
8	Kubu	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	16	-	148	18

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

6. Industri

Sektor industri diklasifikasikan menjadi industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Banyaknya perusahaan/ industri kecil dan industri rumah tangga di Kabupaten Karangasem tahun 2018 dapat digambarkan seperti Tabel 2.141.

Tabel 2.141
Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Golongan Industri, Tahun 2018

No	Golongan Industri	Jumlah Industri (buah)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Kimia	662	1.031
2	Agro	4.981	5.932
3	Kayu	369	490
4	Anyaman	3.932	4.026
5	Komik Lontar	140	112
6	Logam	125	138
7	Besi	282	468
8	Tekstil	3.017	3.333
9	Aneka	555	878
	Jumlah	14.442	15.530

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Dilihat dari perkembangan industri kecil dan Kerajinan Rumah Tangga dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Karangasem cenderung meningkat, namun di tahun 2017 jumlah industri kecil dan Kerajinan Rumah tangga justru menurun, dimana jumlah

industri tahun 2017 berjumlah 14.242 dan tahun 2016 mencapai 14.845, Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142
Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No	Golongan Industri	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kimia	766	764	772	677	662
2	Agro	3.789	3.957	3.997	5.279	4.981
3	Kayu	629	758	766	274	369
4	Anyaman	6.241	6.425	6.489	3.872	3.932
5	Komik Lontar	102	102	103	108	140
6	Logam	137	147	148	81	125
7	Besi	255	270	273	305	282
8	Tekstil	2.029	2.008	2.028	3.050	3.017
9	Aneka	206	268	269	291	555
	Jumlah	14.468	14.843	14.845	14.242	14.442

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2.5.4 Aspek Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan di dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.143
Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Hasil Evaluasi
RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100
Persentase pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100	100	100
Persentase responden yang puas dengan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan Bappeda (%)	90	95	100
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (%)	0	0	100
Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional (%)	100	100	100
Jumlah dokumen informasi penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Karangasem(Buku)	70	60	60
Jumlah dokumen inovasi masyarakat yang tersusun (Buku)	20	20	20
Luas lahan kritis berbasis masyarakat yang tertangani	11 Ha	11 Ha	11 Ha
Persentase target IKU yang ada di RKA-PD (%)	100	100	100
Persentase terlaksananya Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100
Persentase prioritas pembangunan daerah mendukung prioritas provinsi dan nasional (%)	100	100	100

Sumber : Balitbangda Kab. Karangasem, 2018

B. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya. Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur,

rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Dalam menjalankan pemerintahannya, tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 6.512 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada berbagai instansi. Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS di Kabupaten Karangasem didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana S1 dengan jumlah 4.020 orang dan yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan SD dengan jumlah 73 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.144.

Tabel 2.144
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai Dengan SD	64	9	73
2	SLTP	136	7	143
3	SLTA	531	154	685
4	SMK	277	157	434
5	D1	10	12	22
6	D2	186	124	310
7	D3	111	335	446
8	S1	2.202	1.818	4.020
9	S2	289	90	379
10	S3	-	-	-
	Jumlah	3.806	2.706	6.512

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pegawai, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima CPS selama kurun waktu 2014 hingga 2018 adapun selengkapnya disajikan pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145
Jumlah Formasi dan Jumlah CPNS Yang Diterima Dari Pelamar Umum
atau Honorer Tahun 2014-2018

No	Tahun	Formasi		Diterima		Jumlah Formasi	Jumlah Diterima
		Umum	Honor	Umum	Honor		
1	2014	145	42	138	42	189	180
2	2015	0	0	0	0	0	0
3	2016	0	0	0	0	0	0
4	2017	0	40	0	40	40	40
5	2018	202	1	199	1	203	200

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.146
Perkembangan Diklat Penjenjangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem
Tahun 2013-2017

Tingkatan	Tahun					Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	
Diklatpim IV (Adum)	40	-	72	30	60	202
Diklatpim III (Spama)	3	30	2	30	4	69
Diklatpim II (Spamen)	-	-	2	2	4	8
Jumlah	43	30	76	62	68	279

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.147
Perkembangan Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun
2013-2018

No.	Eselonering	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Eselon II.a	1	1	1	1	1	1
2	Eselon II.b	12	16	14	30	36	34
3	Eselon III.a	60	41	37	53	52	54
4	Eselon III.b	0	32	40	105	101	98
5	Eselon IV.a	158	203	207	411	437	423
6	Eselon IV.b	31	63	63	30	27	27
7	Eselon V.a	21	19	17	22	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.148
Perkembangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 - 2017

No.	Golongan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Apr	Okt	Apr	Okt	Apr	Okt	Apr	Okt	Apr	Okt
1	Golongan IV	38	70	32	37	50	98	179	449	181	108
2	Golongan III	425	487	112	724	470	444	275	652	286	493
3	Golongan II	276	295	289	69	309	290	192	33	198	51
4	Golongan I	29	3	18	2	33	30	6	3	70	4
Jumlah		768	855	451	832	862	862	652	1.137	735	656

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.149
Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Satya Lencana Karya Satya
Tahun 2013 - 2017

No.	Tanda Kehormatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Satya lencana Karya Satya XXX tahun	62	89	117	234	100
2.	Satya lencana Karya Satya XX Tahun	133	239	226	252	61

3.	Satyalencana Karya Satya X tahun	86	198	171	201	336
	Jumlah	281	526	514	687	497

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.150
Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Pensiun	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pensiun Batas Usia	124	92	93	149	170
2.	Pensiun Janda/Duda	24	17	30	22	3
	Jumlah	148	109	123	171	173

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.151
Rekap Data Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018

NO	SKPD	Jabatan Struktural				
		Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan yang terisi	Jumlah yang lulus Struktural		
				Pim II	PIM III	PIM IV
1	Sekretaris Daerah	1	1	1	-	-
2	Asisten	3	2	1	1	-
3	Staf Ahli Bupati	3	3	1	2	-
4	Bagian Kesra	4	3	-	1	-
5	Bagian Administrasi Pemerintahan	4	3	-	1	1
6	Bagian Hukum dan HAM	4	4	-	1	1
7	Bagian Pengendalian Pembangunan	4	4	-	1	1
8	Bagian Ekonomi	4	4	-	1	3
9	Bagian Organisasi	4	4	-	1	2
10	Bagian Humas Protokol	4	4	-	1	1
11	Bagian Umum	4	4	-	1	3
12	Bagian Pengadaan	4	4	-	1	1
13	Bagian Perlengkapan	4	3	-	-	2
14	Sekretariat DPRD	17	17	-	5	8
15	Inspektorat Daerah	9	9	-	6	2
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29	29	-	5	13
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	16	-	4	10
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	25	22	-	5	12
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	-	1	2

NO	SKPD	Jabatan Struktural				
		Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan yang terisi	Jumlah yang lulus Struktural		
				Pim II	PIM III	PIM IV
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	14	13	-	4	7
21	Satuan Polisi Pamong Praja	17	17	1	4	7
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21	19	-	5	8
23	Dinas Pertanian	38	27	1	2	15
24	Dinas Perikanan	20	8	1	1	4
25	Dinas Pariwisata	13	12	-	4	6
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	13	-	4	7
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	16	16	-	4	7
28	Dinas Kebudayaan	13	12	-	5	5
29	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	16	15	1	3	9
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	16	14	-	2	10
31	Dinas Perhubungan	15	13	1	2	5
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17	16	-	1	1
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	20	-	4	13
34	Dinas Lingkungan Hidup	16	12	1	2	6
35	Dinas Ketahanan Pangan	10	10	-	3	5
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	18	16	-	3	10
37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	12	-	4	7
38	Dinas Pemadam Kebakaran	10	7	-	3	3
39	Dinas Ketenagakerjaan	17	17	-	4	11
40	Dinas Sosial	17	15	1	3	10
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13	11	1	2	6
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25	25	1	3	11
43	Dinas Kesehatan	30	27	-	2	11
44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	34	32	-	1	14
45	Rumah Sakit Umum Daerah	14	14	-	1	7
46	Kecamatan Abang	9	8	-	2	3
47	Kecamatan Bebandem	9	8	-	2	2
48	Kecamatan Karangasem	9	9	-	2	4
49	Kecamatan Kubu	9	8	-	2	3
50	Kecamatan Manggis	9	9	-	1	4
51	Kecamatan Rendang	9	9	-	1	4
52	Kecamatan Selat	9	8	-	2	1
53	Kecamatan Sidemen	9	7	-	1	1

NO	SKPD	Jabatan Struktural				
		Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan yang terisi	Jumlah yang lulus Struktural		
				Pim II	PIM III	PIM IV
	Kelurahan Karangasem	5	5	-		2
	Kelurahan Padangkerta	5	5	-		1
	Kelurahan Subagan	5	5	-		1

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.152

Capaian Indikator Kinerja Dalam Bidang Otonomi Daerah , Administrasi pemerintahan dan Persandian Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem 2015-2017

Indikator Kinerja	2015	2016	2017
Persentase Terbentuknya Ranperda dan Ranperbup tentang pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	100	100
Persentase Tertatanya pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	100	100
Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas (%)	71,87	71	77
Nilai Evaluasi AKIP	C	B	B
Persentase Fasilitas peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi bagi perusahaan daerah yang belum mampu beroperasi dan atau yang akan dibentuk (%)	Belum Diukur	51	62
Tingkat cakupan pelayanan PDAM	40,2	40,8	50,2
Persentase terpenuhinya pengelolaan persandian sebagai media informasi dan komunikasi pemerintah daerah (%)	Belum Diukur	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kab.Karangasem, 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kabupaten Karangasem. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem dikatakan cukup baik. Perkembangan rata –rata pengeluaran per kapita selama sebulan serta persentase konsumsi makanan dan non makanan di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153
Perkembangan Rata –Rata Pengeluaran Per Kapita Selama Sebulan Serta Persentase Konsumsi Makanan Dan Non Makanan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (Rp)	578.017	628.603	677.704	726.561	772.965
2	Persentase Pengeluaran Makanan (%)	53,02	51,62	50,58	50,76	53,59
3	Persentase Pengeluaran Non Makanan (%)	46,98	48,38	49,15	49,24	46,41

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2. Produktivitas total daerah, nilai tukar petani

Pembangunan Kabupaten Karangasem yang berkelanjutan memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat ini diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat Kabupaten Karangasem yang dilandasi dengan kearifan yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Muara dari semua pemberdayaan ini adalah peningkatan produktivitas masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya investasi. Selama ini peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih relatif kecil dibandingkan dengan peran pemerintah dan sektor swasta.

Produktivitas daerah dapat diukur dari rasio jumlah tenaga kerja di sektor lapangan usaha tertentu dengan nilai tambah PDRB sektor yang bersangkutan. Adapun produktivitas daerah dilihat dari jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB disajikan pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154
 Produktivitas Daerah/Rasio PDRB Atas dasar Harga Berlaku dengan
 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem Tahun 2017

No	Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB (Juta Rupiah)	Produktivitas *)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	87.316	3.878.343,90	44,41
2	Pertambangan dan Pengecilan	2.374	469.936,70	197,95
3	Industri	39.938	583.590,90	14,61
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	902	34.269,20	37,99
5	Konstruksi	15.164	877.830,70	57,89
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	52.425	2.414.914,00	46,06
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.545	3.007.055,50	848,25
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.611	1.227.574,90	185,68
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	30.467	2.173.106,40	71,33
	Jumlah	238.742	14.666.622,20	61,43

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019; *) Hasil perhitungan

Tabel 2.154 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha diketahui sebanyak 238.742 orang dengan menghasilkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14.666.622,20 juta rupiah, sehingga produktivitasnya mencapai 61,43, angka ini lebih tinggi dari tahun 2014 dengan produktivitas sebesar 44,85.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang jalan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 mencapai 1.444,49 km yang terdiri dari jalan Kabupaten dan jalan Desa 1.202,54 km, jalan Propinsi 145,98 km dan jalan Negara 95,97 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan disajikan pada Tabel 2.155.

Tabel 2.155
 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Keadaan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan (km)	1.079,63	1.091,13	1.435.30	1.447,50	1.444,49
2	Jumlah Kendaraan	148.226	152.677	164.724	176.829	197.903
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00728	0,00710	0,00870	0,00820	0,00723

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2. Pelayanan Angkutan

Pelayanan angkutan di Kabupaten Karangasem terdiri dari pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang. Pelayanan angkutan merupakan salah satu sarana pendukung penting sistem transportasi terutama untuk menunjang pembangunan perekonomian penduduk. Sarana transportasi sangat penting untuk menunjang mobilitas penduduk dalam rangka kegiatan ekonomi wilayah. Selama tahun 2018, di Kabupaten Karangasem tidak terjadi penambahan panjang jalan kabupaten dan jalan desa. Panjang jalan kabupaten dan jalan desa pada tahun 2018 adalah 1.202,54 km. Dari ruas jalan yang ada, sebesar 81,20 persennya sudah dalam kondisi diaspal. Sementara sekitar 18,80 persen lebih masih berupa tanah atau kerikil. Jika dilihat kondisi jalannya, dari total 1.202,54 km jalan Kabupaten, 54,66 persen lebih dalam kondisi baik, lebih dari 6,19 persen dalam kondisi sedang. Sebaliknya sepanjang 39,16 persen panjang jalan mengalami kondisi rusak. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Karangasem dari tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.156.

Tabel 2.156
Panjang Jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No.	Panjang Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nasional	62,80	62,80	62,80	97,97	95,97
2	Provinsi	170,00	170,00	170,00	146,98	145,98
3	Kabupaten dan Desa	846,83	858,33	1.202,54	1.202,54	1.202,54
	Jumlah	1.079,64	1.091,13	1.435,34	1.447,50	1.444,49

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Bertambahnya panjang jalan juga diikuti oleh bertambahnya sarana transportasi kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor tahun 2018 sebanyak 197.903 yang didominasi oleh sepeda motor yang jumlahnya mencapai 176.109 unit, mobil penumpang 12.422 unit dan mobil angkutan 9.372 unit. Perkembangan banyaknya angkutan darat bermotor dan jenisnya tahun 2014-2018 disajikan pada tabel 2.157.

Tabel 2.157
Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor di Kab. Karangasem 2014-2018

No	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mobil Penumpang	7.785	8.854	9.937	11.227	12.422
3	Mobil Angkutan	-	-	7.996	8.547	9.372
4	Sepeda Motor	133.097	136.294	146.791	157.055	176.109
	Jumlah	143.807	147.967	164.724	176.829	197.903

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan P. Lombok, Kabupaten Karangasem memiliki dua pelabuhan laut yaitu Padangbai dan Tanah Ampo yang ditujukan untuk kepentingan pariwisata, yakni sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal pesiar. Pelabuhan Tanah Ampo sampai saat ini belum beroperasi sehingga hanya Pelabuhan Padangbai saja yang memiliki peranan sebagai pendukung sarana sistem transportasi laut sekaligus sebagai pendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan jalurnya, rute Padangbai Lembar mendominasi kegiatan mobilitas barang dan manusia yang menghubungkan P. Bali dengan P. Lombok. Jumlah barang maupun kendaraan yang melalui Pelabuhan Padangbai terlihat bahwa jumlah yang dimuat selalu lebih besar dari jumlah yang dibongkar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan Karangasem sebagai penghubung antar pulau dalam sistem distribusi barang dan mobilitas penduduk masih lebih besar ketimbang peranan Karangasem sebagai tujuan akhir dari distribusi barang dan mobilitas penduduk. Adapun perkembangan arus penumpang, volume bongkar muat barang dan kendaraan disajikan pada Tabel 2.158.

Tabel 2.158
Arus Penumpang Pelayaran, Volume Bongkar Muat Barang dan Kendaraan Melalui Pelabuhan Padangbai Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Arus Penumpang Padangbai-Lembar					
	Tiba	750.160	663.512	736.932	684.146	1.006.705
	Berangkat	800.586	801.470	784.736	725.793	1.581.028
2	Arus Penumpang Padangbai-Nusa Penida					
	Tiba	51.787	36.259	36.645	35.263	50.118
	Berangkat	63.427	38.724	35.122	27.317	51.301

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

3. Perbankan

Peranan perbankan di Kabupaten Karangasem cukup besar dalam perekonomian yakni sebagai pengumpul dana dari masyarakat dan menyalurkannya baik untuk keperluan produksi, konsumsi maupun investasi. Hingga tahun 2019 jumlah kantor bank di kabupaten Karangasem mencapai 117 buah yang meliputi kantor kas dan kas pembantu termasuk ATM yang tersebar diseluruh wilayah Karangasem.

Bila ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah kantor layanan bank per 1.000 km² di Bali pada triwulan III 2017 mencapai 181 layanan kantor dan rasio jumlah ATM mencapai 543. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap 1.000 km² wilayah di Bali dilayani sejumlah 181 kantor layanan bank dan 543 ATM. Apabila ditinjau secara

spasial, rasio jumlah kantor layanan dan ATM perbankan per 1.000 km² terendah berada di Kabupaten Tabanan. Dua kabupaten lainnya dengan nilai dimensi akses yang rendah adalah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Sementara itu, daerah tingkat II dengan nilai dimensi akses yang tinggi khususnya yang terkait luasan wilayah adalah Kota Denpasar (814 kantor layanan dan 1.096 ATM) dan Kabupaten Jembrana (308 kantor layanan dan 1.287 jaringan ATM).

Tabel 2.159
Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Karangasem Tahun 2017

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Per 100.000 penduduk	Rasio Jumlah ATM Per 100.000 penduduk
1	Denpasar	298	1199	44	176
2	Badung	259	1083	54	227
3	Bangli	26	27	15	16
4	Buleleng	83	144	17	29
5	Gianyar	128	288	34	76
6	Jembrana	41	63	20	30
7	Karangasem	49	76	16	24
8	Klungkung	34	41	25	31
9	Tabanan	104	140	31	42
10	Provinsi Bali	1.022	3061	32	96

Sumber: BI, 2017

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan III 2017, rasio jumlah rekening simpanan (tabungan, deposito dan giro) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali tercatat sebesar 1.392, meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan II 2017 (1.345) dan rasio triwulan III 2016 (1.374).

Tabel 2.160
Indikator Banking Penetration Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Rekening Kredit per Penduduk Desawa			Rasio Jumlah Rekening Simpanan per Penduduk Desawa		
		TW-III 2016	TW-II 2017	TW-III 2017	TW-III 2016	TW-II 2017	TW-III 2017
1	Denpasar	306	324	335	2.702	2.605	2.681
2	Badung	87	121	123	1.345	1.668	1.717
3	Bangli	118	65	66	610	329	348
4	Buleleng	106	264	291	795	1.867	1.968
5	Gianyar	111	325	306	782	2.192	2.279
6	Jembrana	178	118	113	2.339	1.441	1.499
7	Karangasem	133	87	91	639	399	416
8	Klungkung	155	128	131	938	733	758
9	Tabanan	152	105	102	888	593	615
10	Provinsi Bali	161	170	173	1.374	1.345	1.392

Sumber: BI, 2017

4. Hotel, Penginapan dan Restoran

Untuk mendukung sektor pariwisata yang merupakan penopang perekonomian terbesar ketiga di Karangasem, penyediaan sarana akomodasi merupakan satu hal yang mutlak diperhatikan. Namun mengingat Karangasem sudah relatif jenuh, maka upaya perbaikan perlu menitikberatkan pada kualitasnya, bukan sekedar kuantitasnya. Peningkatan jumlah hotel non bintang terjadi di tahun 2018 dimana di tahun 2018 terdapat 448 hotel non bintang, dimana sebelumnya di tahun 2015 baru mencapai 203 hotel non bintang. Untuk hotel berbintang relatif stabil dari tahun 2013-tahun 2015. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161
Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang di Kabupaten Karangasem
Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2017	2018
1	Hotel Berbintang	7	6	8	8	8
2	Hotel Non Bintang	200	207	203	294	448
3	Jumlah Kamar	2.211	2.360	2.594	3.134	3.744
4	Kapasitas	4.537	5.047	3.377	4.192	-

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Jumlah restoran di Kabupaten Karangasem tahun 2018 mencapai 124 buah yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Karangasem, kecuali di Kecamatan Selat tidak ada restoran. Jumlah restoran terbanyak ada di Kecamatan Abang yang mencapai 39 buah. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.162.

Tabel 2.162
Jumlah Restoran di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Restoran
1	Abang	39
2	Bebandem	3
3	Karangasem	36
4	Kubu	16
5	Manggis	17
6	Rendang	8
7	Selat	-
8	Sidemen	5
Total		124

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

5. Listrik Air, Bersih dan Komunikasi

Seiring meningkatnya jumlah penduduk maka besarnya pemakaian listrik dan air bersih meningkat. Data PT. PLN (Persero) ranting Karangasem menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik terus meningkat, dimana di tahun 2018 mencapai 109.727 pelanggan meningkat sebesar 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 104.301 pelanggan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.160. Pada pemakaian air minum, jumlah pelanggan PDAM di tahun 2018 mencapai 35.862 pelanggan dengan banyaknya pemakaian 7.202.437 m³ dan nilai pemakaian Rp. 26.481.944.800,-. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.163.

Tabel 2.163
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Listrik
di Kabupaten Karangasem tahun 2014-2018

Tahun	Banyaknya Pelanggan (Sambungan)	Banyaknya Pemakaian (Kwh)	Nilai Pemakaian (Juta Rupiah)
2014	83.037	90.157.667	116.588.434
2015	90.981	136.608.501	130.705.415
2016	97.771	151.706.610	142.873.716
2017	104.301	148.715.629	162.942.897
2018	109.727	157.944.991	180.360.137

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.164
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air Minum
di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

Tahun	Banyaknya Pelanggan (Sambungan)	Banyaknya Pemakaian (m3)	Nilai Pemakaian (Rupiah)
2014	28.131	6.258.986	22.388.547.025
2015	30.196	6.751.048	24.112.903.575
2016	32.526	6.861.542	24.456.557
2017	34.318	6.725.199	24.334.514.550
2018	35.862	7.202.437	26.481.944.800

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Pelanggan PDAM per kecamatan di Kabupaten Karangsem terbanyak terdapat di Kecamatan Karangasem yang mencapai 14.643 pelanggan dengan pemakaian sebanyak 3.055.730 m³ air dengan nilai pemakaian sebesar Rp. 10.708.893.100,-. selengkapnya pelanggan PDAM per kecamatan di tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165
Banyaknya Pelanggan, Pemakaian, dan Nilai Pemakaian Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Kecamatan	Banyaknya Pelanggan (Sambungan)	Banyaknya Pemakaian (m3)	Nilai Pemakaian (Rupiah)
1	Rendang	3.339	693.313	2.344.369.050
2	Sidemen	2.352	349.246	1.128.960.375
3	Manggis	5.464	1.150.862	5.207.543.225
4	Karangasem	14.643	3.055.730	10.708.893.100
5	Abang	4.445	886.020	3.014.797.575
6	Bebandem	1.309	241.537	815.547.650
7	Selat	2.241	362.758	1.284.388.300
8	Kubu	2.069	462.971	1.977.445.525
	Jumlah	35.862	7.202.437	26.481.944.800

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat Kabupaten Karangasem dilihat dari banyaknya pelanggan telpon dari tahun 2014-2018 cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 terdapat 4.279 pelanggan telepon perusahaan dan rumah tangga/kantor menurun menjadi 4.022 pelanggan di tahun 2018, hal ini disebabkan karena meningkatnya pemakaian telpon seluler. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166
Banyaknya Pelanggan Telepon Menurut Jenis Pemakai Tahun 2014-2018

Tahun	Perusahaan	Rumah Tangga/Kantor	Jumlah
2014	1.363	2.916	4.279
2015	1.363	2.916	4.279
2016	1.528	3.124	4.652
2017	1.756	2.528	4.284
2018	1.005	3.017	4.022

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berbagai kasus kriminal terjadi di Karangasem antara lain lakalantas, pencurian, penipuan, bunuh diri, hingga menggunakan narkoba. Namun melihat dari data kriminalitas yang ada, tingkat kriminalitas di Karangasem tergolong rendah. Adapun perkembangan banyaknya perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167
Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan
Di Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pencurian Berat	22	14	24	29	14
2	Pencurian Ringan	-	-	1	2	7
3	Pencurian Biasa	17	21	21	25	30
4	Penggelapan	16	14	11	-	9
5	Penipuan	13	10	23	7	7
6	Penadahan	-	-	-	-	-
7	Penganiayaan Berat	5	1	2	3	1
8	Penganiayaan Ringan	50	17	25	2	-
9	Kejahatan Lainnya	123	-	103	91	59
10	Kebakaran	32	33	26	26	26
	Jumlah	278	110	236	236	153

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2. Investasi

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Karangasem terus mengalami peningkatan dimana tahun 2013 sebesar 23.547 juta rupiah meningkat menjadi 60.142 juta rupiah di tahun 2014 dan di tahun 2017 mencapai 170.756 juta rupiah. Demikian juga investasi dalam negeri (PMDN) juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2013 sebesar 163.429 juta rupiah menurun menjadi 78.406 juta rupiah di tahun 2014 dan di tahun 2017 meningkat menjadi 223.119 juta rupiah. Selengkapnya perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem dan perbandingannya dengan kabupaten/kota di Bali disajikan pada Tabel 2.168 dan Tabel 2.169.

Tabel 2.168
Realisasi Investasi PMA Kabupaten/Kota se- Bali Menurut Lokasi
Tahun 2013-2017

NO.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi (juta rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jembrana	1.395	7.924	-	2.413.195	1.501
2	Tabanan	331.912	645.823	267.294	901.409	129.297
3	Badung	3.021.220	959.142	3.362.385	107.353	4.899.094
4	Gianyar	95.897	111.853	151.415	-	186.460
5	Klungkung	4.937	6.231	29.831	150.743	99.656
6	Bangli	140	1.284	-	-	-
7	Karangasem	23.547	60.142	77.609	70.835	170.756
8	Buleleng	60.483	3.100.222	1.273.715	207.068	3.429
9	Denpasar	95.443	184.215	1.702.645	139.373	700.163
	Jumlah	3.634.974	5.076.836	6.864.894	3.989.976	6.190.356

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.169
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi
Tahun 2013 -2017

NO	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jembrana	80.267	215.646	191.799	4.652.613	274.569
2	Tabanan	108.928	98.540	178.116	4.397.145	60.697
3	Badung	3.126.279	1.658.995	2.967.016	517.536	1.011.839
4	Gianyar	1.134.498	430.417	1.065.721	810.558	525
5	Klungkung	23.954	65.372	118.145	409.229	2.881.329
6	Bangli	21.252	23.128	30.780	15.652	26.451
7	Karangasem	163.429	78.406	92.344	1.015.270	223.119
8	Buleleng	201.727	259.707	337.596	212.579	1.122.983
9	Denpasar	2.932.781	1.016.228	1.905.505	27.058	5.666.227
	Jumlah	7.793.115	3.846.439	6.887.022	12.057.640	11.267.739

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di kabupaten Karangasem di tahun 2017 terdapat penduduk 15 tahun ke atas jenis kelamin perempuan yang masih buta huruf sebanyak 11,05% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 25,22%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Tahun 2017

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
Perempuan	87,38	4,56	56,41	11,05
Laki laki	72,21	n/a	40,38	25,22

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.171
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas menurut Status Pendidikan
Tahun 2017

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih SD	Masih SMP	Masih SMA	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
Perempuan	14,28	12,47	5,49	5,49	62,27	100
Laki laki	27,52	11,57	5,70	4,10	51,11	100

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

Tabel 2.172
Persentase Penduduk Berumur 7 -24 Tahun menurut Status Pendidikan Tahun 2017

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih SD	Masih SMP	Masih SMA	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
Perempuan	2,06	36,86	17,12	17,12	26,84	100
Laki laki	3,82	37,46	19,47	13,69	25,56	100

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2019

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Dalam rangka memastikan bahwa target program dan kegiatan prioritas tahunan pembangunan daerah tercapai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD. Hasil evaluasi RKPD ini dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan lebih lanjut selain mempertimbangkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Sampai dengan Desember 2019 capaian kinerja OPD secara akumulatif untuk realisasi keuangannya sebesar 94,28% dan capaian realisasi fisik sebesar 99,41%. Secara lebih lengkap disajikan per perangkat daerah pada tabel 2.173 dan tabel 2.174.

Tabel 2. 173
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terselenggaranya jasa surat menyurat selama 12 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100	100
2	Terbayarnya Listrik Air Telepon selama 12 Bulan	375.000.000,00	450.000.000,00	363.959.409,00	100	80,88
3	Tersedianya Alat Tulis Kantor	260.000.000,00	250.000.000,00	249.197.100,00	100	99,68
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan	125.196.900,00	320.196.900,00	314.850.800,00	100	98,33
5	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86.101.800,00	96.901.800,00	96.901.800,00	100	100
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.926.500,00	100	99,85
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	921.130.000,00	840.377.500,00	814.757.500,00	100	96,95
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	60.000.000,00	50.000.000,00	49.902.000,00	100	99,8
9	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor selama 12 bulan	370.700.000,00	262.876.000,00	258.491.500,00	100	98,33
10	Terselenggaranya Perjalanan dinas selama 12 bulan	287.016.000,00	287.016.000,00	280.622.149,00	100	97,77

11	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	35.000.000,00	40.000.000,00	39.800.000,00	100	99,5
12	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis/keamanan selama 12 bulan	10.796.400.000,00	10.627.717.516,00	10.463.700.000,00	100	98,46
13	Tersedianya canang, bebanten dan piodalan selama 12 bulan	311.200.000,00	321.200.000,00	319.547.000,00	100	99,49
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terlaksanannya pembangunan gedung dan tempat kerja lainnya	1.767.130.000,00	1.443.960.000,00	1.410.662.561,00	100	97,69
2	Terpeliharanya peralatan kantor disdikpora	150.000.000,00	134.349.200,00	134.261.000,00	100	99,93
3	Terlaksanannya pengadaan meubelair dan alat rumah tangga lainnya	227.460.000,00	153.460.000,00	145.965.000,00	100	95,12
4	Terlaksanannya Rehab gedung disdikpora dan gedung sekolah	1.115.114.200,00	874.635.000,00	858.332.900,00	100	98,14
5	Terselenggaranya pemeliharaan gedung disdikpora	553.140.000,00	299.780.000,00	285.889.160,00	100	95,37
6	Terpeliharanya 13 unit kendaraan dinas	268.065.506,00	323.065.506,00	312.333.547,00	100	96,68
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	107.127.500,00	77.597.500,00	77.523.951,00	100	99,91
2	Terselenggaranya penyusunan laporan aset disdikpora	122.461.069,00	162.461.069,00	156.741.515,00	100	96,48
3	Terselenggaranya penyusunan pelaporan akhir tahun	143.244.550,00	127.644.550,00	77.842.671,00	100	60,98
Pendidikan Anak Usia Dini						
1	Tersedianya buku-buku dan alat tulis untuk 634 orang siswa	193.205.000,00	190.605.000,00	176.822.150,00	100	92,77

2	Tersedianya alat praktik dan peraga untuk 634 orang	274.782.000,00	351.810.000,00	161.717.000,00	100	45,97
3	Tersedianya Meubelair sekolah untuk 1 lembaga TK Negeri	49.955.000,00	49.955.000,00	47.139.000,00	100	94,36
4	Terpeliharanya bangunan sekolah PAUD sebanyak 2 paket	270.429.000,00	267.389.000,00	261.504.051,00	100	97,8
5	Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di 4 TK Negeri	380.400.000,00	380.400.000,00	364.977.867,00	100	95,95
6	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini untuk 450 orang	3.341.370.000,00	3.519.570.000,00	3.486.647.400,00	100	99,06
7	Terselenggaranya pengembangan kurikulum untuk 450 orang	126.006.000,00	113.006.000,00	96.729.000,00	100	85,6
8	Terselenggaranya Koordinasi dan Kerjasama dengan 4 Lembaga Mitra PAUD	116.544.950,00	124.574.950,00	98.760.160,00	100	79,28
9	Terselenggaranya Monev kepada 7794 Orang	20.850.000,00	20.850.000,00	20.692.700,00	100	99,25
10	Terselenggaranya Lomba untuk 7794 Orang	162.300.000,00	160.050.000,00	155.501.650,00	100	97,16
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
1	Terseleksinya PASKIBRAKA sebanyak 79 orang	101.160.300,00	101.715.300,00	101.124.580,00	100	99,42
2	Terlaksananya Pelatihan untuk 84 orang PASKIBRAKA	1.194.283.200,00	1.194.633.200,00	1.182.292.400,00	100	98,97
3	Terselenggaranya Pertukaran Pemuda untuk 10 Orang	49.453.000,00	46.642.350,00	44.615.750,00	100	95,66
4	Terpeliharanya sarana gedung pemuda	17.070.000,00	17.070.000,00	17.009.800,00	100	99,65
5	Terfasilitasinya kegiatan Kepemudaan untuk 50 orang	162.290.000,00	128.447.200,00	124.414.287,00	100	96,86
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun						
1	Terlaksananya Penambahan ruang kelas sekolah untuk 1 SD	515.213.700,00	499.543.700,00	432.569.061,00	100	86,59

2	Terpeliharanya bangunan sekolah sebanyak 49 SD	6.954.201.000,00	8.137.731.000,00	7.989.696.180,00	100	98,18
3	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk 358 Sekolah Dasar	37.100.100.000,00	37.812.308.450,30	33.769.519.852,00	100	89,31
4	Terselenggaranya Paket A setara SD untuk 246 siswa	207.594.000,00	156.694.000,00	149.381.250,00	100	95,33
5	Terselenggaranya Paket B setara SMP untuk 15 Lembaga	766.750.000,00	643.700.000,00	643.395.450,00	100	99,95
6	Terselenggaranya pembinaan minat, bakat siswa SD di 15 Cabang Lomba	549.341.500,00	357.636.500,00	345.628.899,00	100	96,64
7	Terlaksananya monitoring kepada 358 Sekolah Dasar	78.106.000,00	77.256.000,00	60.368.214,00	100	78,14
8	Terlaksananya Ujian Akhir 54 SMP	216.687.750,00	191.375.500,00	165.908.067,00	100	86,69
9	Terealisasinya Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB sebanyak 7.475 siswa	223.900.000,00	213.900.000,00	206.447.205,00	100	96,52
10	Terselenggaranya lomba untuk 54 Sekolah SMPN/Swasta/MTs/Satap	634.026.800,00	619.194.800,00	617.026.869,00	100	99,65
11	Terlaksananya Pengadaan alat praktik bagi 2 sekolah SMP	1.043.282.500,00	1.029.272.500,00	943.063.896,00	100	91,62
12	Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 20 SD	5.869.902.300,00	6.048.232.300,00	5.902.898.250,00	100	97,6
13	Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 5 SD	953.205.000,00	935.905.000,00	889.386.126,00	100	95,03
14	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk 54 SMP/MTs/Satap?negeri/Swasta	19.756.286.000,00	21.890.870.956,15	19.190.471.308,00	100	87,66
15	Terlaksananya monitoring ke 54 SMP/MTs/Satap/Negeri/Swasta	12.929.600,00	12.929.600,00	9.036.450,00	100	69,89
16	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan kurikulum untuk 54 SMP/MTs/Satap/Negeri/Swasta	88.698.950,00	136.796.950,00	115.518.376,00	100	84,45

17	Terselenggaranya sosialisasi BOS dan BSM untuk 54 Sekolah SMP/MTs/Satap/Negeri/Swasta	167.378.650,00	95.938.500,00	49.510.004,00	100	51,61
18	Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB selama 19 bulan	1.084.675.000,00	1.069.005.000,00	964.914.200,00	100	90,26
19	Terselenggaranya pelatihan kurikulum SD untuk 150 orang guru	113.000.000,00	109.370.000,00	108.689.166,00	100	99,38
20	Terealisasinya pemberian Beasiswa kepada 15.591 orang siswa sekolah dasar	12.667.000.000,00	12.647.579.950,00	12.626.121.122,00	100	99,83
21	Terlaksananya pemberian beasiswa untuk 7399 siswa miskin SMP	7.506.671.600,00	7.546.071.600,00	7.535.805.645,00	100	99,86
22	Terselenggaranya persiapan akreditasi di 3 sekolah SMP	57.525.125,00	51.775.125,00	49.023.313,00	100	94,69
23	Terlaksananya penambahan ruang kelas di 3 sekolah SMP	752.112.500,00	734.812.500,00	703.399.479,00	100	95,73
24	Terpeliharanya bangunan di 17 sekolah SMP	2.563.870.000,00	3.176.870.000,00	3.131.358.049,00	100	98,57
Pendidikan Menengah						
1	Terselenggaranya pendidikan paket C setara SMU sebanyak 15 lembaga	1.362.600.000,00	835.200.000,00	832.019.950,00	100	99,62
Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional selama 12 bulan	261.982.500,00	205.482.500,00	204.788.520,00	100	99,66
Pendidikan Non Formal						
1	Terselenggaranya pembinaan pendidikan kursus selama 12 bulan	20.289.950,00	20.289.950,00	20.289.950,00	100	100
2	Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaran kepada 1500 orang	1.472.611.000,00	1.477.611.000,00	1.244.524.161,00	100	84,23
3	Terlaksananya monitoring di 42 lembaga	34.030.000,00	34.030.000,00	16.146.850,00	100	47,45

4	Terselenggaranya pendidikan luar sekolah d masyarakat selama 12 bulan	534.260.000,00	1.075.510.000,00	329.927.210,00	100	30,68
5	Terselenggaranya Jambore PTK selama 12 bulan	137.570.000,00	137.570.000,00	130.876.400,00	100	95,13
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						
1	Terselenggaranya pembinaan dan pemasarakatan kepad 100 orang	49.300.000,00	49.300.000,00	45.790.000,00	100	92,88
2	Terselenggaranya kompetisi olahraga untuk 393 orang	3.250.938.050,00	3.131.481.360,00	3.050.984.693,00	100	97,43
3	Terselenggaranya Kompetisi olahraga sebanyak 12 jenis lomba	684.621.950,00	676.101.950,00	662.083.553,00	100	97,93
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi untuk 700 orang	162.790.000,00	174.944.050,00	171.148.232,00	100	97,83
2	Terlaksananya pelatihan bagi bagi guru dan tenaga kependidikan sebanyak 400 orang	239.472.000,00	224.757.000,00	178.968.200,00	100	79,63
3	Terlaksananya pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi TK sebanyak 24 orang	71.299.300,00	59.849.300,00	58.223.860,00	100	97,28
4	Terlaksananya kenaikan pangkat bagi guru TK untuk 50 orang	17.175.000,00	8.730.000,00	7.075.000,00	100	81,04
5	Terlaksananya pelatihan calon kepala sekolah 40 guru TK,SD dan SMP	431.605.000,00	162.235.000,00	147.037.357,00	100	90,63
6	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi guru SD sebanyak 200 Orang	196.128.000,00	156.298.000,00	131.894.550,00	100	84,39
7	Terlaksananya pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas Berprestasi SD sebanyak 24 orang	111.874.000,00	99.040.000,00	97.187.900,00	100	98,13
8	Terlaksananya kenaikan pangkat bagi guru dan kepala SD sebanyak 500 orang	66.855.000,00	48.010.000,00	44.136.650,00	100	91,93

9	Terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan SMP sebanyak 128 orang	184.483.000,00	148.801.300,00	141.614.023,00	100	95,17
10	Terselenggaranya pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas SMP berprestasi sebanyak 9 orang	136.430.000,00	70.940.000,00	69.022.750,00	100	97,3
11	Terlaksananya penilaian angka kredit guru SMP sebanyak 200 orang	15.650.000,00	11.994.000,00	11.796.400,00	100	98,35
12	Terselenggaranya penilaian kinerja bagi guru dan kepala sekolah TK di 5 Sekolah	36.680.000,00	20.728.300,00	18.148.300,00	100	87,55
13	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah dan guru SD di 100 sekolah	69.794.800,00	68.166.800,00	64.166.800,00	100	94,13
14	Terselenggaranya penilaian kinerja bagi kepala sekolah dan guru SMP di 32 sekolah	69.150.000,00	36.340.543,00	36.340.543,00	100	100
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat						
1	Terselenggaranya Budaya Baca di masyarakat	85.120.000,00	83.230.000,00	82.285.700,00	100	98,87
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						
1	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi GOR dan Stadion sebanyak 2 paket	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.435.286.021,00	100	95,69
2	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi GOR dan Stadion Amlapura sebanyak 1 paket	368.395.000,00	368.395.000,00	360.694.262,00	100	97,91
3	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi GOR dan stadion sebanyak 2 paket	165.975.000,00	165.975.000,00	162.105.564,00	100	97,67
Manajemen Pelayanan Pendidikan						
1	Terlaksananya kerjasama dengan PT	484.500.000,00	510.340.200,00	446.350.050,00	100	87,46
2	Terlaksananya penerapan sistem dan informasi pendidikan	111.005.000,00	56.207.143,00	56.167.143,00	100	99,93

3	Terlaksananya pendataan pendidikan	422.162.000,00	510.862.000,00	482.501.790,00	100	94,45
4	Terlaksananya penyusunan rencana dan program pendidikan selama 12 bulan	282.057.500,00	194.375.000,00	176.695.524,00	100	90,9
5	Terlaksananya penyusunan profil pendidikan	132.115.000,00	122.115.000,00	121.124.500,00	100	99,19
Belanja Tidak Langsung						
1	Terbayarannya Gaji PNS dan Guru	457.879.486.155,01	448.548.422.621,70	445.619.571.334,00	100	99,35
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi seluruh pegawai disdikpora	143.700.000,00	99.100.000,00	71.003.835,00	100	71,65
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba						
1	Terselenggaranya penyuluhan tentang bahay narkoba bagi 50 orang	25.990.000,00	24.530.000,00	24.529.000,00	100	100
JUMLAH		595.700.139.155,01	589.179.689.490,15	576.460.798.864,00	100	97,84
Dinas Kesehatan						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terselenggaranya piodalan, canang dan bebanten di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	44.960.000,00	100	99,91
2	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	689.640.000,00	699.640.000,00	563.685.917,00	100	80,57
3	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	41.299.900,00	36.299.900,00	16.643.500,00	100	45,85

4	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	143.000.000,00	143.000.000,00	142.805.000,00	100	99,86
5	Tersedianya Jasa Sura	6.000.000,00	6.000.000,00	5.384.000,00	100	89,73
6	Tersedianya ATK yang memadai	72.900.000,00	87.900.000,00	87.543.800,00	100	99,59
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	271.138.640,00	381.138.640,00	368.525.000,00	100	96,69
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	27.980.100,00	100	99,93
9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	153.279.999,00	364.941.000,00	359.398.955,00	100	98,48
10	Tersedianya peralatan rumah tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100	100
11	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.000.000,00	31.000.000,00	25.480.000,00	100	82,19
12	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	99.878.899,00	100	99,88
13	Tersedianya makanan dan minuman	122.180.000,00	127.172.000,00	98.324.700,00	100	77,32
14	Tersedianya jasa tenaga di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan	5.051.254.000,00	5.053.754.000,00	4.525.345.000,00	100	89,54
15	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi di dalam daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	74.870.000,00	100	99,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan	480.659.000,00	955.029.000,00	928.860.555,93	100	97,26
2	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	407.023.000,00	449.118.999,00	435.128.937,00	100	96,88
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan K						

1	Tersusunnya perencanaan dan anggaran di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan	1.229.397.100,00	1.230.493.100,00	1.046.479.807,00	100	85,05
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
1	Terselenggaranya pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	4.596.799.150,00	6.709.478.932,00	6.283.809.137,40	100	93,66
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
1	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	881.239.363,00	2.072.258.609,21	1.073.246.190,00	100	51,79
2	Terselenggaranya P3K, pelayanan puskesmas keliling, rawat inap	9.421.436.500,00	9.058.785.008,23	6.899.975.653,00	100	76,17
3	Terselenggaranya pemeriksaan bakteriologi dan kimia	748.098.000,00	877.398.000,00	532.696.639,90	100	60,71
4	Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Jumlah Pemanfaat Kartu Karangasem Sehat (KKS)	69.977.858.840,80	76.250.622.900,00	67.256.756.850,00	100	88,2
5	terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di RS Pratama, masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pratama tanpa memberikan uang jaminan	1.992.972.270,00	3.278.216.270,00	2.771.876.918,00	100	84,55
6	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	354.832.937,00	1.047.556.546,56	454.254.801,00	95	43,36
7	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	388.894.695,00	1.547.584.838,23	1.144.688.350,00	97,22	73,97
8	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	141.334.817,00	437.356.677,72	179.371.500,00	98	41,01
9	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	802.380.214,00	1.991.627.079,03	1.210.341.015,00	100	60,77
10	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	607.910.176,00	1.674.177.216,78	1.149.866.402,00	94,4	68,68
11	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	679.644.209,00	1.890.790.089,14	503.894.475,90	95	26,65
12	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	971.884.385,00	2.493.929.621,98	638.702.746,00	99	25,61
13	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	824.899.135,00	1.934.407.366,01	796.711.149,00	97	41,19

14	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	854.512.691,00	2.027.300.461,97	1.048.157.714,00	90,35	51,7
15	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	731.041.193,00	1.880.559.812,55	1.049.516.328,00	98,22	55,81
16	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	912.938.516,00	2.328.055.041,65	1.316.593.792,00	97	56,55
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia						
1	Terlaksananya pengembangan obat asli Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	47.070.300,00	100	94,14
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
1	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	658.763.600,00	1.146.463.600,00	978.151.742,00	100	85,32
2	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	87.425.000,00	111.425.000,00	90.677.250,00	100	81,38
3	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10.890.000,00	13.290.000,00	11.509.400,00	100	86,6
4	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	47.050.000,00	44.570.000,00	41.399.150,00	100	92,89
Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
1	Meningkatnya status gizi masyarakat	227.025.000,00	252.225.000,00	236.627.400,00	100	93,82
Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	368.420.000,00	628.836.502,00	581.904.257,00	100	92,54
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
1	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	663.549.499,00	663.549.499,00	566.091.713,00	100	85,31
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	548.365.100,00	580.845.100,00	520.315.059,00	100	89,58
3	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	294.330.300,00	318.330.300,00	235.393.650,00	75	73,95
4	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	624.316.800,00	624.316.800,00	505.500.952,00	82,88	80,97

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
1	Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	17.307.000,00	26.746.450,00	22.372.050,00	100	83,64
2	Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	120.000.000,00	166.005.450,93	71.389.800,00	45	43
Program Pengadaan Peningkatan,Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaring						
1	Meningkatnya sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	6.495.970.501,00	5.849.944.000,00	4.707.599.595,57	100	80,47
2	Meningkatnya sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	366.080.000,00	476.225.000,00	462.841.950,00	100	97,19
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia						
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Lansia	82.260.000,00	110.760.000,00	94.979.750,00	100	85,75
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.051.580.000,00	1.063.010.000,00	589.960.750,00	100	55,5
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terlaksananya perayaan hari besar nasional 100	61.600.000,00	61.600.000,00	59.563.000,00	100	96,69
Program Belanja Tidak Langsung						
1	-	62.872.159.049,00	66.017.283.607,92	64.198.651.681,00	100	97,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						
1	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	190.951.687,00	183.162.237,00	161.398.500,00	100	88,12
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						
1	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	3.736.784.224,00	2.023.808.723,00	1.686.392.666,00	100	83,33
JUMLAH		182.410.276.490,80	207.740.988.379,91	179.046.544.447,70	99,54	86,19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Pegawai						
1	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang	7.990.414.285,50	7.426.410.396,15	7.400.692.598,00	100	99,65
2	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang	163.500.000,00	163.500.000,00	122.600.000,00	100	74,98
3	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang	2.877.086.000,00	3.131.700.000,00	3.122.700.000,00	100	99,71
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	44.482.000,00	44.482.000,00	44.468.500,00	100	99,97
2	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	44.538.200,00	44.538.200,00	32.410.900,00	100	72,77
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	19.903.900,00	19.903.900,00	19.722.600,00	100	99,09
4	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	7.448.800,00	7.448.800,00	7.402.500,00	100	99,38
5	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 1th	257.800.000,00	257.800.000,00	175.489.565,00	100	68,07
6	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	26.251.770,00	26.251.770,00	22.320.000,00	100	85,02
7	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	51.300.000,00	51.300.000,00	51.229.800,00	100	99,86
8	Meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran 1th	89.373.000,00	137.373.000,00	137.345.922,00	100	99,98

9	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	592.760.128,00	592.760.128,00	491.350.000,00	100	82,89
10	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	100.000.000,00	100.000.000,00	99.347.500,00	100	99,35
11	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 1 th	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100	100
12	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	60.000.000,00	60.000.000,00	59.628.250,00	100	99,38
13	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1th	20.000.000,00	20.000.000,00	19.970.000,00	100	99,85
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1th	382.755.600,00	382.755.600,00	360.926.218,00	100	94,3
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1th unit gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	198.391.615,00	100	99,2
3	Meningkatnya sarana dan prasana aparatur 1th	114.500.000,00	114.500.000,00	114.435.000,00	100	99,94
4	Meningkatnya sarana dana prasarana aparatur 1th	42.500.000,00	42.500.000,00	41.002.000,00	100	96,48
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan						
1	Tersusunnya pelaporan Dinas PU kab karangasem 1th	50.000.000,00	50.000.000,00	37.252.418,00	100	74,5
Pembangunan Jalan dan Jembatan						
1	Prosentase terbangunnya jalan dan jembatan 3persen	20.591.630.350,00	19.209.703.440,00	12.539.777.465,00	100	65,28
2	Prosentase terbangunnya jalan dan jembatan 3 persen	7.545.738.000,00	7.655.738.000,00	4.923.543.658,00	100	64,31
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
1	Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten 55persen	245.532.300,00	245.532.300,00	239.699.771,00	100	97,62

2	Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten 55persen	14.464.286.625,00	9.344.286.625,00	8.306.578.371,00	100	88,89
3	Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan 55persen	3.533.808.000,00	3.329.308.000,00	2.363.129.807,00	100	70,98
4	Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten 55persen	55.254.828.410,00	55.346.255.320,00	33.720.761.109,00	100	60,93
Pembangunan Sstem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan						
1	Terwujudnya data dan informasi infrastruktur ke puan (bidang bina marga)	101.417.300,00	171.417.300,00	165.719.871,00	100	96,68
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						
1	Persentase jumlah dan jenis alat berat yang tersedia	411.325.000,00	432.325.000,00	425.353.525,00	100	98,39
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						
1	Prosentase jaringan irigasi yg direhabilitasi dan ditingkatkan 1 persen	13.830.494.327,00	13.610.494.327,00	12.195.041.820,00	100	89,6
2	Presentase bantaran dan tanggul yag di tangani 0,06persen	834.533.000,00	894.728.000,00	879.417.582,00	100	98,29
3	Prosentase irigasi subak di 7 kecamatan	3.898.064.200,00	4.037.729.393,00	2.666.357.450,00	100	66,04
4	Prosentase data dan informasi infrastruktur kepu-an bdg sumber sda 100persen	772.935.800,00	756.935.800,00	641.214.495,00	100	84,71
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya						
1	Prosentse terpeliharanya prasarana/bangunan penyediaan air baku 1,50persen	821.943.228,00	825.018.228,00	818.372.950,00	100	99,19
2	Prostse terpeliharanya prasarana/bangunan penyedia air baku 1,50Persen	627.869.000,00	684.234.000,00	680.768.400,00	100	99,49
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						

1	Prosentase penduduk yang berakses air minum dan air limbah 81,82 persen	7.287.993.268,00	5.436.733.268,00	4.914.002.883,00	100	90,39
2	Presentase penduduk yang berakses air minum dan air limbah 81,82persen	3.782.847.000,00	3.897.847.000,00	3.688.829.582,00	100	94,64
Pengendalian Banjir						
1	Presentasi panjang pantai yg tertangani 0,23persen	237.322.600,00	307.687.600,00	300.972.850,00	100	97,82
Pengaturan Jasa Konstruksi						
1	Meningkatnya ketaatan BUJK dan pengguna BUJK thd perpu jakon 54persen	246.248.000,00	223.248.000,00	216.928.582,00	100	97,17
2	Meningkatnya ketaatan BUJK dan pengguna BUJK thd perpu jasa konstruksi 54persen	41.998.000,00	62.998.000,00	46.919.659,00	100	74,48
Pengembangan Informasi Bidang Ke-PU-an						
1	Meningkatkan pelayanan umum bidang ke puan 35 persen	154.171.984,00	190.171.984,00	187.153.359,00	100	98,41
Perencanaan Tata Ruang						
1	Persentase perencanaan tata ruang dan bang yg dpt diselesaikan dgn baik 100persen	455.288.000,00	505.288.000,00	493.610.579,00	100	97,69
2	Prosentase perencanaan tata ruang dan bangunan yg dpt diselesaikan dgn baik	143.562.000,00	143.562.000,00	131.552.242,00	100	91,63
Penataan Halaman dan Taman Kantor						
1	Terpeliharanya halaman dan taman kantor 1th	50.000.000,00	50.000.000,00	49.945.000,00	100	99,89
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						
1	Hak atas tanah milik pemerintah kab. Karangasem tertata secara adm dan memwnuhi aspek legalitas 42 sertifikat	493.650.000,00	493.650.000,00	2.577.600,00	12	0,52
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						

1	Prosentase pengelolaan limbah dan persampahan di kab karagasem	364.174.656,00	485.434.656,00	467.814.156,00	100	96,37
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Prosentase permasalahan tata ruang yg sd pt di selesaikan dg baik	408.819.000,00	475.025.281,00	459.173.809,00	100	96,66
Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
1	Prosentase pemanfaatan ruang dan bangunan yg dpt dikendalikan 85persen	111.264.619,00	97.094.800,00	86.177.783,00	100	88,76
2	Prostse pengawasan ruang dan bang.yg dr rekomendasi teknis IMB yg diterbitkan 70persen	166.825.000,00	147.876.600,00	133.765.587,00	100	90,46
Penataan bangunan dan lingkungan						
1	Prosentase bangunan dan lingkungan yang terencana dan tertata dengan baik 70%	297.955.000,00	297.955.000,00	290.313.038,00	100	97,44
JUMLAH		150.312.038.350,50	142.232.401.716,15	104.595.058.369,00	99,69	73,54
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat/ 12 bulan	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	100	100
2	Jumlah Telepon , air dan listrik yang terbayar / 36 bulan	60.000.000,00	62.000.000,00	49.182.564,00	100	79,33
3	Jumlah Alat Tulis kantor dan alat tulis kantor berbasis IT/12 bulan	20.825.700,00	20.825.700,00	20.509.000,00	100	98,48
4	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan foto copy / 12 bulan	12.610.000,00	12.610.000,00	12.102.600,00	100	95,98

5	Jumlah Alat/komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor / 12 Bulan	4.811.300,00	4.811.300,00	4.808.900,00	100	99,95
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia / 2 paket	5.772.000,00	10.772.000,00	10.772.000,00	100	100
7	Jumlah Bahan dan Buku Bacaan yang tersedia / 48 bh	4.500.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	100	93,33
8	Jumlah makanan dan minuman rapat / pertemuan / 200 kotak	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	100	100
9	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah / 12 bulan	130.000.000,00	139.860.000,00	130.830.230,00	100	93,54
10	Jumlah Tenaga administrasi Perkantoran / 31 orang	528.140.400,00	499.140.400,00	424.760.000,00	100	85,1
11	Terlaksananya penyelenggaraan Piodalan dan pengadaan canang/sesajen / 12 bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	38.484.000,00	100	85,52
12	Terlaksananya penataan dekorasi dan kegiatan hari-hari Nasional / 12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.189.300,00	100	86,38
13	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah / 12 bulan	30.000.000,00	34.294.250,00	22.880.000,00	100	66,72
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara / 12 bulan	188.532.900,00	217.532.900,00	205.419.754,00	100	94,43
2	Jumlah pelinggih dan penyengker yang terbangun pada DPKP Kab. Karangasem / 1unit	113.927.300,00	0	0	0	0
3	Jumlah geduyng kantor yang terpelihara / 1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	12.578.800,00	100	83,86
4	Pemeliharaan AC, Komputer dan Laptop / 12 bulan	21.000.000,00	21.000.000,00	20.611.500,00	100	98,15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						

1	Tewrsusun buku lakip dan Laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem / 12 Bulan	9.085.000,00	9.085.000,00	6.898.800,00	100	75,94
Pengembangan Perumahan						
1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program perumahan di Kabupaten Karangasem / 1 Tahun	116.458.600,00	112.458.600,00	78.595.090,00	100	69,89
2	Jumlah rumah tinggal layak huni yang dibangun / 1.063 unit	31.829.723.400,00	32.249.723.400,00	32.076.370.000,00	99,76	99,46
3	Tersusunnya data base rumah di Kabupaten Karangasem / 1 Tahun	564.287.600,00	136.082.600,00	126.601.400,00	100	93,03
4	Jumlah Rumah yang Dibangun / 500 unit	205.031.300,00	177.791.300,00	146.058.535,00	100	82,15
Lingkungan Sehat Perumahan						
1	Terlaksananya sosialisasi kawasan perumahan bersih dan sehat / 6 lokasi	241.931.400,00	241.931.400,00	203.680.845,00	100	84,19
2	Terlaksananya perencanaan dan kontruksi perbaikan lingkungan permukiman / 3 paket	1.840.169.600,00	2.191.169.600,00	1.572.840.250,00	100	71,78
3	Terlaksananya pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah / 12 bulan	53.728.100,00	53.728.100,00	26.046.650,00	100	48,48
Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						
1	Pengadaan Kontruksi Kanal Permukaan/Drainase / 2 paket	449.387.600,00	449.387.600,00	397.957.393,42	100	88,56
Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
1	Jumlah pemantauan Pengembangan Perumahan / 1 Tahun	123.461.000,00	123.461.000,00	92.131.742,00	100	74,62
Penataan Halaman dan Taman Kantor						

1	Tertatanya halaman dan taman pada kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem / 1 Tahun	10.000.000,00	0	0	0	0
Belanja Tidak Langsung						
1	Tunjangan Jabatan	177.946.350,00	141.376.350,00	141.210.000,00	100	99,88
2	Tunjangan Fungsional Umum	55.166.400,00	37.810.850,00	37.730.000,00	100	99,79
3	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.411.667.886,00	1.316.173.984,00	1.315.037.450,00	100	99,91
4	Terbayarnya tunjangan keluarga	135.315.216,00	127.986.550,74	127.770.192,00	100	99,83
5	Tunjangan Beras	82.300.631,00	66.212.330,02	65.974.620,00	100	99,64
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.141.802,00	6.566.173,16	6.496.797,00	100	98,94
7	Pembulatan Gaji	26.052,34	22.008,29	20.480,00	100	93,06
8	Iuran Asuransi Kesehatan	46.842.079,00	37.139.288,33	37.098.706,00	100	99,89
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.446.791,00	2.757.978,49	2.705.255,00	100	98,09
10	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.340.159,00	8.124.028,74	8.115.855,00	100	99,9
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	884.154.000,00	953.200.000,00	953.200.000,00	100	100
12	Retribusi Daerah	0	4.250.000,00	4.250.000,00	100	100
Pemberdayaan komunitas perumahan						
1	Terlaksananya sosialisasi kawasan perumahan bersih dan sehat / 6 lokasi	121.405.800,00	121.405.800,00	94.396.300,00	100	77,75
JUMLAH		39.630.006.366,34	39.718.060.491,77	38.534.385.008,42	99,81	97,02
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat						

NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terpenuhinya administrasi perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.000,00	100	99,9
2	Tersedianya keperluan kantor sehari-hari	50.000.000,00	50.000.000,00	26.832.766,00	100	53,67
3	Tertibnya administrasi kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	4.309.100,00	100	21,55
4	Terpilihnya sarana peralatan kerja	34.000.000,00	34.000.000,00	30.000.000,00	100	88,24
5	Terlaksananya pelayanan tugas-tugas kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	38.834.400,00	100	86,3
6	Terlaksananya Pelayanan tugas-tugas kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	29.968.300,00	100	99,89
7	Terciptanya suasana kerja yg nyaman	7.000.000,00	7.000.000,00	5.414.400,00	100	77,35
8	Terciptanya kebersihan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	19.231.300,00	100	96,16
9	Terpenuhinya makan dan minum pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	33.255.000,00	100	83,14
10	Lancarnya komunikasi keluar daerah	159.615.000,00	159.615.000,00	158.309.341,00	100	99,18
11	Terbayarnya upah tenaga harian (Gaji,TPK dan Waker)	378.072.000,00	378.072.000,00	368.472.000,00	100	97,46
12	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	45.000.000,00	45.000.000,00	43.644.000,00	100	96,99
13	Lancarnya komunikasi dalam daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	44.090.000,00	100	88,18
14	Tersedianya komunikasi kedinasan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.352.000,00	100	95,68

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	52.142.200,00	52.142.200,00	51.620.000,00	100	99
2	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	90.530.600,00	90.530.600,00	87.301.280,00	100	96,43
3	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	20.000.000,00	0	0	0	0
4	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	180.000.000,00	205.000.000,00	204.814.750,00	100	99,91
5	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan						
1	Meningkatnya Pemahaman tentang kewaspadaan nasional dan terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat	148.000.000,00	148.000.000,00	106.700.900,00	100	72,1
2	Terciptanya keamanan wilayah Kab. Karangasem	1.152.465.700,00	1.152.465.700,00	957.092.590,00	100	83,05
Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Meningkatnya kerjasama dan komunikasi di kalangan lembaga sosial	33.580.000,00	33.580.000,00	30.316.450,00	100	90,28
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembauran kebangsaan	260.000.000,00	260.000.000,00	192.894.650,00	100	74,19
3	Terlaksananya kegiatan pawai dan pameran pembangunan dalam rangka HUT RI	30.000.000,00	30.000.000,00	22.525.300,00	100	75,08
4	Terwujudnya pembinaan dan peningkatan toleransi umat beragama	110.000.000,00	60.600.000,00	49.284.187,00	100	81,33
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						
1	Terjalinnnya hubungan kerjasama pim[inan daerah untuk memperlancar tugas forkopimda	209.328.000,00	209.328.000,00	73.254.100,00	100	34,99

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)						
1	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan mikol	105.580.000,00	105.580.000,00	99.286.800,00	100	94,04
2	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya prakter prostitusi	85.205.000,00	85.205.000,00	78.130.550,00	100	91,7
3	Terlaksananya pelatihan kader penyuluh pekat	104.620.000,00	104.620.000,00	98.978.511,00	100	94,61
Belanja Pegawai						
1	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	2.189.314.269,64	1.991.507.925,12	1.987.773.585,00	100	99,81
2	terpenuhinya tambahan penghasilan PNS	904.758.000,00	955.200.000,00	955.200.000,00	100	100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja						
1	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	33.861.340,00	100	84,65
Pendidikan Politik Masyarakat						
1	Kelengkapan persyaratan administrasibantuan keuangan partai politik	40.000.000,00	40.000.000,00	34.539.500,00	100	86,35
2	Kelengkapan persyaratan administrasi npengajuan dana Hibah Ormas	25.000.000,00	0	0	0	0
3	Terlaksananya pendidikan Politik Masyarakat	190.000.000,00	41.223.605,00	0	0	0
4	Terlaksananya pendidikan Politik Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00	42.854.200,00	100	93,16
5	Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	29.178.400,00	100	91,18
6	Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat	106.000.000,00	106.000.000,00	94.333.900,00	100	88,99
7	Meningkatnya pemahaman wawasan politik masyarakat dam pemerintah/negara bagi kepala desa	48.000.400,00	48.000.400,00	44.015.100,00	100	91,7

8	Terlaksananya Tim koordinasi dukungan kelancaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif	160.000.000,00	160.000.000,00	98.191.093,00	100	61,37
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						
1	Terselenggaranya program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60.586.600,00	60.586.600,00	45.857.800,00	100	75,69
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terselenggaranya program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	60.498.500,00	60.498.500,00	10.938.100,00	100	18,08
JUMLAH		7.399.296.269,64	7.033.755.530,12	6.247.653.693,00	99,13	88,82
Dinas Sosial						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1		16.450.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100	100
2	Jumlah materai yang tersedia	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100	100
3	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berizin/bersamsat	17.000.000,00	17.000.000,00	15.256.400,00	100	89,74
4	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.871.100,00	71.000.000,00	58.012.964,00	100	81,71
5	Jumlah tenaga kontrak kebersihan kantor dan Monumen Perjuangan Tanah Aron	48.000.000,00	48.900.000,00	48.100.500,00	100	98,37
6	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi	15.000.000,00	21.725.600,00	14.267.700,00	66	65,67
7	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang terpenuhi	10.000.000,00	14.505.700,00	14.466.500,00	100	99,73
8	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dapat dipenuhi	4.000.000,00	6.191.300,00	5.982.500,00	100	96,63

9	Jumlah surat kabar yang mampu tersedia	4.000.000,00	4.000.000,00	3.960.000,00	100	99
10	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	172.939.500,00	171.172.360,00	100	98,98
11	Jumlah tenaga kontrak administrasi/teknis/keamanan yang terbayar gajinya	483.480.000,00	500.460.000,00	485.750.000,00	100	97,06
12	Jumlah canang, bebanten piodalan, tilem, sehari-hari yang mampu disediakan	35.000.000,00	50.000.000,00	49.877.500,00	100	99,76
13	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	30.000.000,00	25.090.000,00	100	83,63
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	45.728.900,00	124.481.200,00	114.500.000,00	100	91,98
2	Jumlah kebutuhan BBM, jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional yang tersedia	170.000.000,00	274.265.000,00	274.239.850,00	100	99,99
3	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara	54.735.000,00	54.735.000,00	54.084.000,00	100	98,81
4	Jumlah peralatan kantor yang dapat dipelihara sebanyak 10 AC, 14 komputer dan 11 laptop	15.000.000,00	15.000.000,00	14.427.350,00	100	96,18
5	Jumlah gedung kantor yang mendapat rehab	50.000.000,00	0	0	0	0
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1	Jumlah laporan (RKA, DPA, DPPA), laporan tahunan (LAKIP, LPPD, LKPJ dan sejenisnya)	7.500.000,00	22.682.600,00	17.674.500,00	100	77,92
PEMBERDAYAAN FM, KAT, PMKS LAINNYA						
1	Persentase pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi peningkatan pendamping KUBE	71.580.000,00	65.515.000,00	39.188.841,00	100	59,82

2	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	349.331.600,00	340.741.600,00	333.267.862,00	100	97,81
3	Persentase penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	144.395.000,00	620.295.000,00	570.692.708,00	100	92
PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Persentase korban trafficking, korban bencana dan perlindungan hukum fakir miskin yang ditangani	32.015.300,00	32.015.300,00	28.139.300,00	100	87,89
2	Persentase bantuan bagi korban bencana alam/sosial pada saat tanggap cepat darurat pasca bencana serta TAGANA yang mendapat bimbingan sosial	1.498.741.900,00	1.225.701.800,00	360.847.507,00	85,56	29,44
3	Persentase tersedianya data PBI JKN, PMKS dan PSKS yang akurat dan valid	223.706.000,00	188.821.000,00	181.813.198,00	100	96,29
4	Desa yang mendapatkan bantuan keserasian sosial	33.350.000,00	25.630.000,00	24.840.900,00	100	96,92
5	Jumlah orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan (dipulangkan ke daerah asal dan atau antar jemput ke RS)	29.051.500,00	28.671.500,00	27.440.200,00	100	95,71
PEMBINAAN ANAK TERLANTAR						
1	Jumlah anak terlantar yang masih sekolah di luar panti yang mendapat pakaian dan peralatan sekolah serta jaminan sosial	54.464.400,00	52.024.400,00	47.911.365,00	100	92,09
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN						
1	Persentase orang yang tertanam nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	269.956.500,00	265.410.700,00	257.822.448,00	100	97,14
2	Persentase perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	50.000.000,00	44.830.000,00	44.241.000,00	100	98,69
3	Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	491.937.500,00	482.707.500,00	481.773.329,00	100	99,81

4	Tersedianya monumen perjuangan/tonggak sejarah	28.935.000,00	24.345.000,00	23.381.850,00	100	96,04
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	-	16.835.000,00	12.375.000,00	12.008.500,00	100	97,04
2	Jumlah SDM kesos yang mendapat bimbingan teknis	306.018.000,00	294.718.000,00	286.361.214,00	100	97,16
3	Jumlah orsos yang dibina	36.580.000,00	36.580.000,00	35.640.755,00	100	97,43
4	Koordinasi penyelenggaraan kesos	55.446.000,00	55.446.000,00	52.860.059,00	100	95,34
5	Persentase kasus KDRT, pelecehan seksual dan pencurian	55.300.000,00	55.300.000,00	51.159.476,00	100	92,51
BELANJA PEGAWAI						
1	-	2.120.526.099,68	1.858.457.993,61	1.846.621.866,00	100	99,36
2	-	911.424.000,00	997.400.000,00	997.400.000,00	100	100
PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)						
1	Jumlah eks narapidana yang ditangani	36.220.300,00	33.065.300,00	31.648.890,00	100	95,72
2	Jumlah gepeng yang terjaring razia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kab. Karangasem diberikan pembinaan dan dipulangkan ketempat asalnya	87.057.500,00	76.667.500,00	73.516.400,00	100	95,89
PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA						
1	Jumlah penyandang cacat yang mendapat bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	125.784.500,00	113.184.500,00	101.449.985,00	100	89,63
2	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	39.885.000,00	36.745.000,00	36.432.150,00	100	99,15

3	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial dan diberikan jaminan sosial	143.535.000,00	147.135.000,00	140.023.562,00	100	95,17
PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO						
1	Jumlah penghuni panti yang mendapat bantuan permakanan dan bantuan operasional kepada panti asuhan/LKSA	173.277.000,00	171.457.000,00	170.860.350,00	100	99,65
PENINGKATAN PELAYANAN LANJUT USIA						
1	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan diberikan jaminan sosial	197.533.000,00	193.933.000,00	180.402.350,00	100	93,02
JUMLAH		8.759.601.099,68	8.932.508.993,61	7.830.058.189,00	97,94	87,66
Rumah Sakit Umum Daerah						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran						
1	Terbayarnya gaji tenaga kontrak	12.000.000,00	12.000.000,00	0	100	0
Program upaya Kesehatan Masyarakat						
1	Jumlah pasien yang dilayani baik rawat jalan dan rawat inap	60.000.000.000,00	65.900.735.375,50	61.623.572.560,72	100	93,51
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata						
1	Jumlah penunggu pasien rawat inap kelas III yang mendapatkan makanan.	600.000.000,00	600.000.000,00	297.057.600,00	100	49,51
2	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	2.981.999.000,00	2.981.999.000,00	2.779.584.720,00	100	93,21
Belanja Tidak Langsung						

1	Terbayarnya tambahan penghasilan bagi PNS di RSUD Karangasem	6.320.000.000,00	6.231.300.000,00	6.140.150.000,00	100	98,54
2	Terbayarnya Gaji pegawai RSUD Karangasem	20.034.009.880,50	19.915.094.088,49	19.884.327.984,00	100	99,85
3	Terbayarnya iuran jaminan kematian	137.961.077,00	96.840.873,00	96.596.200,00	100	99,75
4	Terbayarnya iuran jaminan kecelakaan kerja	52.190.400,00	32.280.238,00	32.198.685,00	100	99,75
5	Terbayarnya iuran asuransi kesehatan	458.841.949,00	438.903.417,00	437.790.607,00	100	99,75
JUMLAH		90.597.002.306,50	96.209.152.991,99	91.291.278.356,72	100	94,89
Satuan Polisi Pamong Praja						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Tersedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	954.520.000,00	945.520.000,00	943.320.000,00	100	99,77
2	Terlaksana Jasa Surat Menyurat	1.980.000,00	1.980.000,00	1.485.000,00	100	75
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000,00	50.460.000,00	47.853.327,00	100	94,83
4	Terlaksana Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100	100
5	Tersedianya Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	19.720.590,00	100	78,88
6	Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	100	62
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4.421.140,00	4.421.140,00	4.389.800,00	100	99,29

8	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undngan	12.000.000,00	12.000.000,00	11.304.000,00	100	94,2
9	Tersedia Bahan Logistik Kantor	720.000,00	720.000,00	504.000,00	100	70
10	Terlaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	68.723.899,00	100	98,18
11	Tersedia Makanan dan Minuman	29.960.000,00	29.960.000,00	29.400.000,00	100	98,13
12	Tersedia Biaya Canang,Bebanten Piodalan	75.000.000,00	75.000.000,00	74.945.000,00	100	99,93
13	Terlaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.000.000,00	36.980.000,00	36.960.000,00	100	99,95
14	Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	9.863.600,00	9.863.600,00	7.746.000,00	100	78,53
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Tersedia Peralatan Gedung Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	36.725.000,00	100	96,64
2	Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.769.060,00	213.769.060,00	212.890.073,00	100	99,59
3	Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	16.672.100,00	100	92,62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Terlaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12.500.000,00	19.050.000,00	18.484.600,00	100	97,03
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
1	Terlaksana Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	175.070.950,00	143.090.950,00	138.090.275,00	100	96,51
2	Terlaksana Pengamanan dan Pengawalan Tamu VVIP Pejabat Negara dan Tamu Negara	244.484.800,00	284.484.800,00	266.354.125,00	100	93,63

3	Terlaksana Hut Linmas	58.249.600,00	52.986.906,00	51.884.531,00	100	97,92
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terlaksana Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	54.465.700,00	50.915.700,00	42.178.000,00	100	82,84
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Terlaksana Penertiban KTP di Pelabuhan Padangbai	400.542.662,00	395.542.662,00	368.022.280,00	100	93,04
2	Terlaksana Patroli Wilayah dan Trantibum	410.238.850,00	330.238.850,00	324.130.200,00	100	98,15
3	Terlaksana Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda	92.188.918,00	84.188.918,00	81.470.300,00	100	96,77
4	Terlaksana Pengamanan HUT RI	131.334.800,00	97.384.800,00	91.897.500,00	100	94,37
5	Terlaksana Gelar Pasukan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	52.000.000,00	45.600.250,00	45.200.250,00	100	99,12
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						
1	Telaksana Operasi Yustisi Produk Hukum	185.335.000,00	172.335.000,00	167.334.640,00	100	97,1
Belanja Pegawai						
1	Tercapai Belanja Gaji dan Tunjangan	6.159.785.984,88	5.772.479.907,90	5.760.187.507,00	100	99,79
2	Tercapai Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.954.956.000,00	2.183.200.000,00	2.183.200.000,00	100	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						
1	Terlaksana Pembinaan Kesehatan Jasmani	78.758.000,00	58.828.000,00	51.234.470,00	100	87,09
2	Terlaksana Pembinaan dan Latihan Korsik	51.192.300,00	42.802.900,00	41.439.920,00	100	96,82

		JUMLAH	11.622.737.364,88	11.278.803.443,90	11.156.987.387,00	100	98,92
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)		
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	44.560.011,50	100	99,02	
2	terwujudnya kendaraan dinas/operasional dengan kondisi baik	59.582.150,00	85.582.150,00	82.514.826,00	100	96,42	
3	terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	16.000.000,00	16.000.000,00	15.441.550,00	100	96,51	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	24.450.000,00	24.450.000,00	13.521.550,00	100	55,3	
2	kinerja pelaporan capaian kinerja semakin baik	12.668.250,00	12.668.250,00	11.376.350,00	100	89,8	
Program Pengembangan Kemitraan							
1	terwujudnya kenyamanan masyarakat wisata tirta dari kebencanaan	35.045.000,00	35.045.000,00	29.085.850,00	100	83	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	terwujudnya penyelenggaraan hari-hari besar nasional dan daerah	33.980.000,00	25.980.000,00	22.400.000,00	100	86,22	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam							
1	tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	603.136.900,00	503.536.900,00	140.822.750,00	100	27,97	

2	terwujudnya penanganan kejadian kedaruratan darurat secara cepat dan profesional	797.872.600,00	4.186.031.376,87	1.021.053.468,00	90	24,39
3	meningkatnya rasa aman masyarakat	36.500.000,00	40.500.000,00	38.225.700,00	100	94,38
4	adanya peningkatan kesiapsiagaan di bidang kebencanaan	51.997.220,00	51.997.220,00	48.728.024,00	100	93,71
5	persentase peningkatan hasil monitoring dan evaluasi	21.900.000,00	21.900.000,00	19.569.270,00	100	89,36
6	terpasangnya rambu pencegahan bencana dini	261.000.000,00	251.400.400,00	248.697.321,40	100	98,92
7	meningkatnya kesiapsiagaan sekolah dalam mengantisipasi bencana	34.770.860,00	34.470.860,00	33.809.741,00	100	98,08
8	persentase peralatan dan logistik yang tersedia untuk penanggulangan bencana	313.000.000,00	159.539.834,50	63.721.680,00	100	39,94
Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana						
1	terorientasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah	332.660.000,00	343.959.600,00	342.273.973,00	100	99,51
2	terorientasinya relawan bencana di bidang management bencana	48.776.100,00	48.476.100,00	47.828.044,00	100	98,66
Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat						
1	terbentuknya masyarakat desa tangguh bencana	73.565.000,00	72.465.000,00	71.764.983,00	100	99,03
Program Peringatan Dini						
1	persentase peralatan peringatan dini pada daerah rawan bencana yang layak pakai dan berfungsi	114.727.800,00	114.727.800,00	112.028.463,00	100	97,65
Belanja Tidak Langsung						
1	jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	1.378.659.349,92	1.168.203.484,46	1.165.003.529,00	100	99,73
2	jumlah PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan	546.006.000,00	570.500.000,00	570.500.000,00	100	100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	terbacanya peraturan perundang -undangan untuk pengetahuan	7.460.000,00	7.460.000,00	6.360.000,00	100	85,25
2	terpeliharanya kebersihan kantor	31.307.300,00	31.307.300,00	30.568.600,00	100	97,64
3	tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.300.170,00	19.300.170,00	19.200.000,00	100	99,48
4	tewujudnya pelaksanaan upacara keagamaan	29.920.000,00	29.920.000,00	29.920.000,00	100	100
5	terwujudnya rapat-rapat koordinasi luar daerah	74.675.000,00	141.675.000,00	122.708.800,00	100	86,61
6	terselenggaranya pembayaran upah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	998.074.106,56	100	96,43
7	terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat dan jamuan tamu	19.209.200,00	19.209.200,00	19.179.400,00	100	99,84
8	terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan lengkap	7.400.000,00	4.400.000,00	4.391.000,00	100	99,8
9	terwujudnya penerangan kantor yang layak dan memadai	4.156.800,00	4.156.800,00	4.109.300,00	100	98,86
10	terbacanya berita-berita surat kabar/majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	4.960.000,00	100	99,2
11	terlaksananya kelancaran tugas administrasi kantor	13.485.900,00	13.485.900,00	13.364.550,00	100	99,1
12	persentase alat tulis kantor yang diadakan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.997.600,00	100	99,94
13	terwujudnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	66.541.510,00	100	69,31
JUMLAH		6.184.211.599,92	9.223.348.345,83	5.466.301.950,46	95,46	59,27
Dinas Pemadam Kebakaran						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)		

		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim / 12 Bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	915.000,00	100	91,5
2	Jumlah Bulan Rekening Telepon, Air dan Listrik Yang Dibayar / 12 Bulan	46.800.000,00	44.800.000,00	30.899.349,00	100	68,97
3	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor / 12 Bulan	9.971.600,00	9.971.600,00	9.958.000,00	100	99,86
4	Jumlah Item Alat Tulis Kantor Yang Dibeli / 43 Item	15.481.500,00	15.481.500,00	13.580.000,00	100	87,72
5	Jumlah Dokumen Yang Dicitak dan Digandakan / 1 Tahun	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	100	100
6	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik / 12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100	100
7	Jumlah Bulan Tersedianya Koran Bacaan Lain / 1 Tahun	7.140.000,00	7.140.000,00	6.970.000,00	100	97,62
8	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia / 530 Kotak	27.560.000,00	27.560.000,00	27.300.000,00	100	99,06
9	Jumlah Bulan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah / 12 Bulan	118.100.000,00	133.100.000,00	132.863.940,00	100	99,82
10	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan / 16 Orang	213.806.400,00	213.806.400,00	213.804.000,00	100	100
11	Terlaksananya Piodalan Di Dinas Pemadam Kebakaran / 1 Paket	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100	100
12	Jumlah Bulan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah / 12 Bulan	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100	100
13	Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS / 12 Bulan	61.200.000,00	50.000.000,00	43.835.440,00	100	87,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Diadakan / 2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100	100
2	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan / 2 Buah / Unit	23.000.000,00	21.945.000,00	21.945.000,00	100	100
3	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan / 6 Unit / Buah	26.000.000,00	24.665.000,00	24.665.000,00	100	100
4	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara / 1 Unit	20.000.000,00	18.980.000,00	18.979.000,00	100	99,99
5	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara / 12 Bulan	79.374.600,00	89.374.600,00	86.904.865,00	100	97,24
6	Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara / 12 Bulan	13.500.000,00	11.000.000,00	10.382.500,00	100	94,39
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Jumlah Jenis Laporan Yang Disusun / 3 Jenis Laporan	7.829.000,00	7.435.000,00	6.984.200,00	100	93,94
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Jumlah Peringatan Hari - hari Besar Nasional, Daerah dan HUT Damkar Yang Dilaksanakan / 3 Hari - hari Besar	97.571.500,00	88.082.100,00	86.329.000,00	100	98,01
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						
1	Persentase Kasus Kebakaran Yang Ditangani / 100 %	1.325.893.400,00	1.318.887.650,00	1.307.060.286,00	100	99,1
2	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Pencegahan Bencana Kebakaran Yang Dilaksanakan / 11 Lokasi	133.534.000,00	132.474.000,00	125.645.450,00	100	94,85
3	Jumlah Bulan Penyusunan Laporan / 12 Bulan	10.483.200,00	10.483.200,00	9.605.650,00	100	91,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1	Jumlah Aparatur / Petugas Operasional Di Daerah Yang Mengikuti Pelatihan / 10 Orang	147.066.800,00	125.224.600,00	108.043.700,00	100	86,28

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran						
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan / 47 Buah / Unit / Pasang	354.973.000,00	353.470.000,00	321.873.000,00	100	91,06
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Dipelihara / 6 Unit	199.107.000,00	195.001.610,70	193.721.250,00	100	99,34
Belanja Tidak Langsung						
1	Terbayarnya Gaji PNS / 12 Bulan	2.114.901.980,98	2.000.805.308,74	2.000.326.032,00	100	99,98
JUMLAH		5.168.293.980,98	5.014.687.569,44	4.916.590.662,00	100	98,04
Dinas Ketenagakerjaan						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
BELANJA TIDAKLANGSUNG						
1	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	3.180.339.801,12	2.951.541.928,57	2.948.245.444,00	100	99,89
2	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	1.382.892.000,00	1.655.400.000,00	1.655.400.000,00	100	100
3	Terbayarnya pemungutan redistribusi daerah	27.500.000,00	40.000.000,00	33.125.000,00	100	82,81
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100	100
2	Terselenggaranya surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100
3	Terselenggaranya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	80.000.000,00	71.500.000,00	64.764.207,00	100	90,58

4	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	107.000.000,00	115.500.000,00	114.134.500,00	100	98,82
5	Tersedianya alat tulis kantor	20.405.000,00	20.521.800,00	19.450.000,00	100	94,78
6	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8.430.000,00	7.215.000,00	7.208.900,00	100	99,92
7	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.499.950,00	100	100
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.250.000,00	5.250.000,00	4.392.000,00	100	83,66
9	Tersedianya makanan dan minuman	13.870.000,00	14.965.000,00	14.965.000,00	100	100
10	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	75.500.000,00	75.500.000,00	71.568.407,00	100	94,79
11	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis dan keamanan	291.800.000,00	291.800.000,00	281.700.000,00	100	96,54
12	Terlaksananya upacara keagamaan	26.000.000,00	26.000.000,00	25.980.000,00	100	99,92
13	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1	Terpeliharanya Gedung Kantor Rutin/Berkala	25.000.000,00	25.000.000,00	24.780.000,00	100	99,12
2	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	14.965.000,00	100	99,77
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
1	Pencari kerja mempunyai keterampilan sesuai dengan pelatihan yang diikuti	448.220.000,00	446.766.261,00	438.110.565,00	100	98,06
2	Terpeliharanya sarana/prasarana BLK	10.800.000,00	10.800.000,00	10.798.600,00	100	99,99
3	Dilatihnya peserta magang yang ada	341.950.000,00	289.950.000,00	289.089.683,00	100	99,7

4	Terlaksananya pembinaan LPKS dan lembaga kursus	19.000.000,00	19.000.000,00	18.953.999,00	100	99,76
5	Terlaksananya pembinaan kelompok-kelompok usaha di pedesaan/perkotaan	80.000.000,00	80.000.000,00	75.391.175,00	100	94,24
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA						
1	tersusunya informasi bursa kerja	31.000.000,00	31.000.000,00	30.954.050,00	100	99,85
2	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi penganggur	91.380.000,00	91.380.000,00	90.051.200,00	100	98,55
3	Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur	490.000.000,00	488.680.000,00	488.028.430,00	100	99,87
4	Teradatanya perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja asing	16.000.000,00	16.000.000,00	15.617.505,00	100	97,61
PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL						
1	Tersedianya data calon transmigrasi, Penyelesaian KSAD, dan Terkirimnya Transmigran	109.000.000,00	109.000.000,00	107.880.405,00	100	98,97
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN						
1	Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	50.000.000,00	50.000.000,00	49.991.050,00	100	99,98
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN						
1	Terlaksananya fasilitasi perselisihan hubungan industrial pada perusahaan	22.800.000,00	21.800.000,00	21.472.100,00	100	98,5
2	Terlaksananya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32.950.000,00	32.950.000,00	30.142.620,00	100	91,48
3	Tersusunnya Nilai KHL untuk penetapan UMK	65.200.000,00	65.200.000,00	63.575.900,00	100	97,51
4	Terbentuknya LKS Bipartit pada perusahaan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.510.090,00	100	98,37

5	Terbentuknya SP/SB pada perusahaan	39.550.000,00	39.550.000,00	39.291.850,00	100	99,35
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1	Tersusunnya laporan tepat waktu	10.000.000,00	10.000.000,00	9.319.970,00	100	93,2
JUMLAH		7.170.436.801,12	7.170.869.989,57	7.112.457.600,00	100	99,19
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Non Program						
1	Jumlah PNS yang terbayar gaji pokoknya 210 OB	967.176.003,00	995.626.974,58	994.548.801,00	100	99,89
2	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan keluarganya 168 OB	94.259.835,00	87.700.943,44	87.309.736,00	100	99,55
3	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan jabatannya 144 OB	142.000.640,00	141.730.820,00	141.690.000,00	100	99,97
4	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan Fungsional Umumnya 72 OB	15.613.565,00	14.136.025,00	13.920.000,00	100	98,47
5	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan berasnya 216 OB	43.215.588,00	41.172.218,40	40.917.300,00	100	99,38
6	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan PPh nya 216 OB	7.903.200,00	7.459.546,30	7.369.224,00	100	98,79
7	Jumlah PNS yang terbayar pembulatan gajinya 216 OB	16.757,50	15.014,00	14.085,00	100	93,81
8	Jumlah PNS yang terbayar iuran asuransi kesehatannya 216 OB	27.411.878,00	28.011.878,00	27.720.558,00	100	98,96
9	Jumlah PNS yang terbayar tunjangan JKK nya 216 OB	2.459.288,00	2.159.288,00	2.040.104,00	100	94,48

10	Jumlah PNS yang terbayar Tunjangan JKM nya 216 OB	7.877.757,00	6.377.757,00	6.120.392,00	100	95,96
11	Jumlah PNS yang terbayar Tambahan tunjangan peningkatan kinerjanya 216 OB	797.300.000,00	794.450.000,00	794.450.000,00	100	100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Jumlah surat yang terkirim tepat waktu 450 surat	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100	100
2	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar 40 rekening bulan	41.200.000,00	35.900.000,00	29.220.802,00	100	81,39
3	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbayar 64 unit dan jumlah orang bulan tenaga kebersihan yang terbayar gajinya 12 OB	12.823.800,00	12.823.800,00	12.324.400,00	100	96,11
4	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar 402 unit dan jumlah alat tulis kantor yang berbasis IT yang terbayar 31 unit	9.291.100,00	7.195.500,00	7.019.500,00	100	97,55
5	Jumlah barang cetakan yang terbayar 715 unit dan jumlah foto copy yang terbayar 9000 lembar	5.701.200,00	5.701.200,00	5.701.200,00	100	100
6	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang terbayar 72 unit	1.123.600,00	1.123.600,00	1.123.600,00	100	100
7	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar 12 rekening bulan	3.840.000,00	3.720.000,00	3.695.000,00	100	99,33
8	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terbayar 360 kotak	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100	100
9	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terfasilitasi 15 Kali	150.000.000,00	172.225.742,00	171.905.120,00	100	99,81
10	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya 132 OB	118.800.000,00	118.800.000,00	110.200.000,00	100	92,76
11	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar 30 paket bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	100

12	Jumlah perjalan dinas dalam daerah yang terfasilitasi 30 kali	30.000.000,00	25.000.000,00	21.810.000,00	100	87,24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli 5 paket	36.825.000,00	35.485.000,00	35.456.250,00	100	99,92
2	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit	128.000.000,00	126.155.000,00	121.705.000,00	100	96,47
3	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 9 unit dan samsat kendaraan dinas yang terbayar 9 unit	98.675.000,00	88.675.000,00	83.822.078,00	100	94,53
4	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 15 unit	5.000.000,00	8.000.000,00	7.975.000,00	100	99,69
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu 30 laporan	15.061.989,00	14.513.450,00	14.510.000,00	100	99,98
2	Jumlah monitoring kinerja yang terfasilitasi 24 kali	4.371.400,00	4.581.000,00	4.578.900,00	100	99,95
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan						
1	Jumlah lomba dalam rangka Hari Anak Nasional yang terfasilitasi 3 lomba	20.055.900,00	19.823.200,00	19.823.200,00	100	100
2	Jumlah kecamatan layak anak yang dikembangkan 4 kecamatan	166.597.600,00	165.031.350,00	165.024.600,00	100	100
3	Jumlah kegiatan yang berorientasi anak yang terfasilitasi 3 kegiatan	50.346.400,00	51.476.475,00	51.056.000,00	100	99,18
4	Jumlah peserta sosialisasi PHA yang terfasilitasi 240 peserta	24.970.100,00	14.505.250,00	14.444.800,00	100	99,58
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	Jumlah perangkat desa yang terbina 30 perangkat desa	94.173.487,00	78.148.027,00	73.297.877,00	100	93,79
2	Jumlah peserta sosialisasi yang terfasilitasi 320 peserta	49.028.400,00	40.823.100,00	35.459.950,00	100	86,86

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terfasilitasi 5 perayaan	50.000.000,00	40.080.000,00	39.873.600,00	100	99,49
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
1	Jumlah kegiatan yang berorientasi perempuan dan anak yang terfasilitasi 2 kegiatan	70.230.000,00	66.259.700,00	63.903.150,00	100	96,44
2	Jumlah peserta sosialisasi yang mampu memahami materi 200 peserta	25.215.500,00	21.729.050,00	21.723.219,00	100	99,97
3	Jumlah peserta yang terfasilitasi 245 peserta	65.571.700,00	62.394.350,00	62.113.950,00	100	99,55
4	Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani 60 kasus	124.228.624,00	122.739.776,00	119.502.750,00	100	97,36
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan						
1	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina 260 orang	57.175.600,00	50.855.450,00	29.528.750,00	100	58,06
2	Jumlah perempuan yang terbina dalam mengelola usahanya 280 orang	37.888.800,00	36.061.550,00	23.656.159,00	100	65,6
3	Jumlah perempuan yang berpartisipasi 700 orang	144.658.800,00	140.406.550,00	105.135.266,00	100	74,88
4	Jumlah ibu rumah tangga yang terbina 35 orang	15.000.000,00	13.523.500,00	10.492.550,00	100	77,59
JUMLAH		3.802.038.511,50	3.743.547.084,72	3.623.132.871,00	100	96,78

Dinas Ketahanan Pangan						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung						
1	Terbayarnya Gaji PNS di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem.	1.420.868.094,72	1.328.948.458,66	1.326.404.942,00	100	99,81
2	Terbayarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Karangasem.	656.904.000,00	764.000.000,00	764.000.000,00	100	100
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terealisasinya Jasa Surat Menyurat Dinas	6.000.000,00	4.200.000,00	3.450.000,00	100	82,14
2	Terwujudnya Komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Air, Listrik dan Internet	40.000.000,00	39.895.100,00	38.600.413,00	100	96,75
3	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	5.963.000,00	100	99,38
4	Tersedianya Alat Tulis Kantor	17.285.000,00	17.285.000,00	17.056.800,00	100	98,68
5	Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy	6.885.800,00	6.885.800,00	6.487.400,00	100	94,21
6	Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Instalasi Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100
7	Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Staf Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	5.280.000,00	100	88
8	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Peserta Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	17.400.000,00	100	99,43
9	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	46.000.000,00	44.140.300,00	44.140.300,00	100	100

10	Terbayarnya Upah Tenaga Kontrak	141.600.000,00	141.600.000,00	141.600.000,00	100	100
11	Terlaksananya Upacara Keagamaan di Lingkungan Kantor	28.000.000,00	24.000.000,00	23.940.000,00	100	99,75
12	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20.000.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terpeliharanya Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	39.954.500,00	100	99,89
2	Tersedianya Kendaraan Dinas Siap Pakai	79.900.000,00	83.900.000,00	81.795.685,00	100	97,49
3	Tersedianya Alat Peralatan Kantor Dalam Keadaan Siap Pakai	31.000.000,00	31.000.000,00	30.789.000,00	100	99,32
Peningkatan Ketahanan Pangan						
1	Terlaksananya Analisa Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan	111.042.000,00	105.392.000,00	101.104.500,00	100	95,93
2	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ketahanan Pangan, Terlaksananya Demplot Rumah Pangan Lestari, Terlaksananya Lomba Ketahanan Pangan dan Terlaksananya Pola Pangan Harapan (PPH)	183.370.600,00	173.370.600,00	167.457.650,00	100	96,59
3	Terlaksananya Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	270.256.600,00	249.959.800,00	241.232.714,00	100	96,51
4	Terlaksananya Pembinaan Sumber Pangan Alternatif dan Terlaksananya Bimtek Sumber Pengolahan Minyak VOC	56.472.000,00	54.072.000,00	51.144.300,00	100	94,59
5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Lumbung Pangan Desa	113.580.000,00	102.240.000,00	100.415.000,00	100	98,21
Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terselenggaranya Perayaan Hari - hari Besar Nasional	34.272.000,00	23.859.000,00	23.519.000,00	100	98,57

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Terealisasinya Laporan Capaian kinerja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.821.800,00	100	96,44
JUMLAH		3.341.936.094,72	3.288.098.058,66	3.255.407.004,00	100	99,01
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terkirimnya surat selama 12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.691.000,00	100	89,7
2	Terpenuhinya pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	78.673.649,00	100	87,42
3	Terpenuhinya jasa perpanjangan STNK R2, R4 dan KIR R2 selama 12 bulan	68.000.000,00	18.000.000,00	17.778.000,00	100	98,77
4	Tersedianya alat tulis kantor	40.348.100,00	20.348.100,00	13.950.500,00	100	68,56
5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 Pkt	25.762.000,00	20.762.000,00	18.860.600,00	100	90,84
6	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 7 Pkt	4.612.000,00	3.614.000,00	3.573.500,00	100	98,88
7	Tersedianya peralatan rumah tangga	6.264.900,00	5.264.900,00	5.185.600,00	100	98,49
8	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	7.692.000,00	100	96,15
9	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 700 Kotak	40.275.000,00	30.936.000,00	30.836.000,00	100	99,68

10	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	170.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100	100
11	Terbayarnya upah tenaga kontrak selama 12 bulan	452.552.000,00	452.552.000,00	441.936.000,00	100	97,65
12	Terlaksananya upacara keagamaan selama 12 bulan	30.000.000,00	35.000.000,00	34.870.000,00	100	99,63
13	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk 12 bulan	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 pkt	21.362.000,00	55.062.000,00	52.597.000,00	100	95,52
2	Terpeliharanya gedung kantor 1 paket dan rehab ringan 1 pkt	30.000.000,00	30.213.000,00	30.213.000,00	100	100
3	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional R2 dan R4 12 unit	203.613.000,00	168.199.835,00	167.823.504,00	100	99,78
4	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (AC, komputer, printer) 3 pkt	20.000.000,00	17.000.000,00	16.861.500,00	100	99,19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Terlaksananya monitoring/Evaluasi Kinerja DLH 12 bln	10.589.000,00	800.000,00	707.100,00	100	88,39
2	Tersusunnya perencanaan kegiatan DLH 8 pkt	29.077.000,00	58.439.500,00	57.832.400,00	100	98,96
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
1	Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan yang diadakan 1 pkt	1.047.847.000,00	959.887.500,00	730.418.500,00	100	76,09
2	Luas pelayanan persampahan 34 km2	6.314.714.800,00	6.283.771.744,00	6.278.784.900,00	100	99,92
3	Jumlah kelompok bank sampah yang terbina / terawasi 15 kelompok	47.107.600,00	12.085.800,00	12.085.800,00	100	100

4	Jumlah pengelolaan persampahan yang terbina dan terawasi 58 unit	63.860.600,00	11.514.789,00	11.514.789,00	100	100
5	Jumlah karcis retribusi persampahan yang terpungut 171492 lembar	89.953.800,00	77.631.460,00	76.834.550,00	100	98,97
6	Jumlah angkutan persampahan terpelihara 68 unit	1.220.000.000,00	1.400.000.000,00	1.399.294.600,00	100	99,95
7	Persentase pengelolaan limbah dan persampahan di Kab. Karangasem 100%	816.881.507,00	816.631.507,00	813.127.075,00	100	99,57
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
1	Terlaksananya penilaian kota sehat/ adipura 1 paket	138.591.100,00	251.939.800,00	250.912.910,00	100	99,59
2	Jumlah titik kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang terpantai 18 titik	233.078.800,00	233.078.800,00	179.198.850,00	90	76,88
3	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui perogram DSL 8 kelompok	138.904.100,00	138.904.100,00	135.682.966,00	100	97,68
4	Tersusunnya dokumen kerusakan lingkungan 1 dokumen	29.327.500,00	25.327.500,00	22.070.750,00	100	87,14
5	Jumlah pemeliharaan/ kalibrasi sarpras peralatan laboratorium lingkungan hidup dan reagen/bahan	87.458.400,00	47.458.400,00	46.553.600,00	100	98,09
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
1	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi program kampung iklim 2	130.254.000,00	87.644.000,00	87.282.450,00	100	99,59
2	Jumlah titik sumber mata air yang di rehabilitasi dengan menanam pohon 3 titik	216.055.600,00	51.732.600,00	51.300.050,00	100	99,16
3	Jumlah penanaman tanaman penghijauan dan pemungutan sampah 2 paket	59.318.500,00	47.318.500,00	46.776.250,00	100	98,85
Program Peningkatan Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						

1	Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun 3 dokumen	196.151.900,00	129.191.900,00	127.414.520,00	100	98,62
2	Persentase jumlah pemohon dokumen lingkungan terselesaikan 100%	45.097.600,00	40.095.600,00	39.129.940,00	100	97,59
3	Persentase jumlah dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang disampaikan / dilaporkan 100	33.981.300,00	32.926.000,00	32.442.700,00	100	98,53
4	Jumlah unit usaha dan / atau kegiatan terbina / terawasi dalam penataan penyusunan dokumen lingkungan 75 unit	58.181.000,00	54.973.000,00	53.636.200,00	100	97,57
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)						
1	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang mengelola B3 dan berpotensi menghasilkan limbah B3 yang terawasi dan terbina 25 unit	39.467.300,00	36.214.800,00	32.272.800,00	100	89,11
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup						
1	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata Tk kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri 27 sekolah	189.558.000,00	60.003.000,00	59.414.200,00	100	99,02
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Frekuensi pelaksanaan hari besar nasional dan hari besar lainnya 2 x	46.870.000,00	17.000.000,00	16.950.000,00	100	99,71
Belanja Pegawai						
1	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS 12 bulan	2.338.449.916,98	2.194.152.073,43	2.182.958.286,00	100	99,49
2	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS 12 bulan	996.264.000,00	1.187.900.000,00	1.181.300.000,00	100	99,44
3	Terbayarnya insentif pemungutan retribusi daerah	19.447.000,00	19.447.000,00	9.723.500,00	100	50
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
1	Jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian RTH 10 lokasi	19.858.600,00	9.300.000,00	8.872.500,00	100	95,4

2	Lokasi penataan dan pembangunan taman/ RTH 9 lokasi	1.636.946.500,00	1.842.858.356,00	402.428.550,00	22	21,84
3	Jumlah angkutan perindangan dan pertamanan terpelihara 5 unit	219.586.000,00	219.586.000,00	217.922.462,00	100	99,24
JUMLAH		17.761.667.423,98	17.420.765.564,43	15.603.385.051,00	91,61	89,57
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100	100
2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	155.000.000,00	125.899.979,00	79.891.391,00	100	63,46
3	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	43.931.000,00	43.931.000,00	43.680.000,00	100	99,43
4	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	30.366.500,00	30.366.500,00	25.385.300,00	100	83,6
5	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	14.852.150,00	16.327.300,00	15.777.500,00	100	96,63
6	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	8.238.000,00	8.238.000,00	8.233.500,00	100	99,95
7	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	8.088.000,00	100	80,88
8	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	53.700.000,00	43.765.500,00	43.725.000,00	100	99,91
9	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	83.500.000,00	93.500.000,00	92.056.290,00	100	98,46
10	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	1.304.400.000,00	1.134.000.000,00	1.123.200.000,00	100	99,05

11	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100
12	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dinas	30.600.000,00	32.600.000,00	32.565.303,00	100	99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100	100
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	171.861.800,00	181.861.800,00	181.323.938,00	100	99,7
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	22.999.750,00	26.500.000,00	23.692.500,00	100	89,41
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	13.109.000,00	10.506.500,00	10.485.250,00	100	99,8
Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	85.169.800,00	85.169.800,00	84.436.400,00	100	99,14
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	65.075.500,00	65.075.500,00	54.681.300,00	100	84,03
3	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	12.302.100,00	11.302.100,00	10.978.050,00	100	97,13
4	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	52.687.000,00	52.687.000,00	52.096.700,00	100	98,88

5	Meningkatnya kepemilikan dok administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	22.539.300,00	7.539.300,00	6.408.600,00	100	85
6	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	17.684.600,00	12.814.600,00	11.414.900,00	100	89,08
7	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.415.222.000,00	1.415.222.000,00	1.292.997.880,00	100	91,36
8	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	12.513.700,00	11.013.700,00	10.178.150,00	100	92,41
9	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	83.782.100,00	83.782.100,00	83.671.900,00	100	99,87
10	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	79.980.500,00	79.980.500,00	76.692.828,00	100	95,89
11	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	75.616.000,00	75.616.000,00	72.519.700,00	100	95,91

12	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	72.389.500,00	72.389.500,00	66.632.100,00	100	92,05
13	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka akurasi database kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	499.422.000,00	499.422.000,00	486.618.900,00	100	97,44
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Terpenuhinya perayaan hari-hari besar nasional	50.000.000,00	50.000.000,00	49.316.700,00	100	98,63
Belanja Tidak Langsung						
1	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	3.107.538.013,74	2.898.585.747,00	2.768.432.670,00	100	95,51
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.497.600,00	57.141.801,00	47.333.350,00	100	82,83
2	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.630.100,00	22.629.700,00	21.492.850,00	100	94,98
JUMLAH		7.718.608.013,74	7.312.867.927,00	6.939.006.950,00	100	94,89
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa						
NO	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
		DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	5.000.000,00	5.000.000,00	4.998.000,00	100	99,96

2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000,00	88.297.173,00	82.982.800,00	100	93,98
3	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	21.855.000,00	21.855.000,00	20.355.000,00	100	93,14
4	Tersedianya Alat Tulis Kantor	21.857.400,00	21.857.400,00	13.986.000,00	100	63,99
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	18.293.300,00	18.293.300,00	17.551.900,00	100	95,95
6	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.411.000,00	100	98,63
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.992.000,00	100	99,84
8	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	18.150.000,00	100	90,75
9	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	32.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	100	100
10	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	205.248.000,00	205.248.000,00	186.648.000,00	100	90,94
11	Terlaksananya Upacara Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100	100
12	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25.825.000,00	25.825.000,00	25.825.000,00	100	100
13	Jumlah Rekening Telpon, Air dan Listrik	58.500.000,00	58.500.000,00	43.257.576,00	100	73,94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terpeliharanya Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	4.784.889,00	100	95,7
2	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12.534.177,00	12.534.177,00	10.365.050,00	100	82,69

3	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	0	4.751.000,00	4.251.000,00	100	89,48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu	5.512.800,00	5.512.800,00	4.452.100,00	100	80,76
2	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	3.392.800,00	2.265.200,00	1.937.100,00	100	85,52
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan						
1	Jumlah Kelompok Perajin yang Dibina TTG	52.990.500,00	48.490.500,00	45.454.200,00	100	93,74
2	Jumlah Kelompok LPM yang Dibina	46.320.000,00	46.065.800,00	43.343.400,00	100	94,09
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	21.164.100,00	100	76,96
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa						
1	Jumlah Desa yang Dibina dan Dinilai dalam Lomba Desa	57.519.720,00	57.226.720,00	53.727.221,00	100	93,88
2	Jumlah Kelompok Yang Dimonitoring Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)	38.690.000,00	35.883.000,00	34.969.550,00	100	97,45
3	Jumlah Web Profil Desa yang Tersusun	11.437.100,00	10.657.100,00	10.502.090,00	100	98,55
4	Jumlah Desa yang Dimonev Gerbang Sadu	38.380.000,00	37.879.000,00	37.368.850,00	100	98,65
5	Jumlah Kelompok yang Dibina Pamsimas	34.776.744,00	33.276.744,00	32.911.400,00	100	98,9
6	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan BBGRM	65.701.450,00	36.163.450,00	34.771.650,00	100	96,15
7	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dibina	44.080.000,00	44.080.000,00	42.676.900,00	100	96,82
8	Jumlah Buku yang Dicitak Mengenai Data Swadaya Masyarakat	38.835.000,00	40.573.000,00	37.902.550,00	100	93,42
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa						

1	Jumlah Orang yang Dibintek dan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	357.076.200,00	300.116.200,00	260.250.372,00	100	86,72
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan						
1	Jumlah Pembinaan Administrasi Kelompok Posyandu	83.296.800,00	83.296.800,00	78.917.150,00	100	94,74
2	Terbinanya TP PKK Kab. Karangasem	34.083.600,00	30.019.500,00	26.146.250,00	100	87,1
3	Jumlah Kelompok PKK yang Melaksanakan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	134.260.175,00	127.260.175,00	123.805.350,00	100	97,29
4	Jumlah Kelompok PKK yang Dibina	140.336.450,00	178.336.450,00	155.857.250,00	100	87,4
5	Jumlah Kelompok PKK yang Ikut Berpartisipasi	129.434.075,00	116.978.800,00	106.739.250,00	100	91,25
6	Jumlah Kelompok PKK yang Dibina Administrasinya	154.050.200,00	171.591.675,00	158.544.817,00	100	92,4
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
1	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan ADD	50.178.500,00	46.899.200,00	46.200.250,00	100	98,51
2	Jumlah Desa yang Dibina Administrasi Keuangan Desa	83.053.350,00	78.157.639,00	77.176.872,00	100	98,75
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
1	Jumlah Perbekel yang Dipilih dan Dilantik	1.055.294.600,00	1.055.294.600,00	843.626.145,00	100	79,94
Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan						
1	Jumlah Kawasan Desa yang Dibentuk/Dibina	26.323.287,00	16.073.287,00	15.246.787,00	100	94,86
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						
1	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintahan Desa	19.083.000,00	18.303.000,00	18.185.766,00	100	99,36
Belanja Pegawai						
1	Terbayarnya Gaji Pegawai	2.398.598.907,04	2.354.869.762,79	2.267.080.629,00	100	96,27

2	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS	1.023.534.000,00	1.182.000.000,00	1.182.000.000,00	100	100
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						
1	Jumlah Kelompok Pasar Desa yang Dibina	26.893.000,00	24.051.350,00	23.355.400,00	100	97,11
Penataan Daerah Otonomi Baru						
1	Jumlah Kelurahan Menjadi Desa	63.604.772,00	53.856.000,00	44.934.216,00	100	83,43
JUMLAH		6.782.049.907,04	6.839.538.802,79	6.352.005.830,00	100	92,87

Dinas Pengendalian Penduduk dan Kel. Berencana							
NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Pegawai							
1	Gaji Pokok PNS	Terbayarnya gaji pokok PNS	1.521.580.000,00	1.038.205.071,84	1.037.677.605,00	100	99,95
2	Tunjangan Keluarga	Terbayarnya tunjangan Keluarga	169.395.000,00	108.483.658,00	108.458.922,00	100	99,98
3	Tunjangan Jabatan	Terbayarnya tunjangan jabatan	190.305.000,00	122.170.000,00	122.170.000,00	100	100
4	Tunjangan Fungsional Umum	Terbayarnya Tunjangan Fungsional Umum Pegawai	31.645.000,00	27.790.000,00	27.790.000,00	100	100
5	Tunjangan Beras	Terbayarnya Tunjangan Beras Pegawai	83.858.000,00	55.546.140,00	55.546.140,00	100	100

6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Terbayarnya tunjangan PPh / tunjangan Khusus pegawai	6.336.000,00	5.990.143,00	5.965.428,00	100	99,59
7	Pembulatan Gaji	Terbayarnya pembulatan gaji	50.892,98	16.197,00	15.701,00	100	96,94
8	Iuran Asuransi Kesehatan	Terbayarnya iuran asuransi kesehatan	43.475.000,00	29.588.297,00	29.586.683,00	100	99,99
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Terbayarnya iuran jaminan kecelakaan pegawai	3.901.648,00	2.901.648,00	2.142.233,00	100	73,83
10	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Terbayarnya iuran jaminan kematian pegawai	11.704.837,00	7.418.873,00	6.426.747,00	100	86,63
11	Tambahan Tunjangan Pegawai	Terbayarnya tambahan tunjangan pegawai	880.518.000,00	779.400.000,00	779.400.000,00	100	100
Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi/Teknis/Keamanan	Tersedianya jasa pendukung administrasi / Teknis /Keamanan	586.800.000,00	470.250.000,00	470.250.000,00	100	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	10.000.000,00	18.820.000,00	17.850.500,00	100	94,85
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.468.500,00	100	98,74

4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	11.760.000,00	100	98
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	4.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	100	95
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	3.720.000,00	100	93,94
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100	100
8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	30.000.000,00	21.980.000,00	21.552.350,00	100	98,05
9	Penyediaan Biaya Canang, Banten Piodalan	Terlaksananya upacara keagamaan	27.186.950,00	27.186.950,00	25.625.000,00	100	94,25
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100	100
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100

12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	116.722.362,00	116.139.066,00	100	99,5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	9.995.000,00	100	99,95
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	37.700.000,00	36.818.500,00	100	97,66
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	18.304.400,00	100	98,94
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	95.000.000,00	95.000.000,00	92.802.400,00	100	97,69
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.500.000,00	16.696.000,00	16.589.150,00	100	99,36
2	Kegiatan Monitoring/evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan monitoring / evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	4.958.900,00	100	99,18
Keluarga Berencana							
1	Pengadaan Sarana Prasarana Keluarga Berencana	Tercapainya peningkatan pelayanan KB ke Desa	911.667.000,00	911.667.000,00	672.820.434,00	100	73,8
2	Belanja Operasional Keluarga Berencana	Terlaksananya program KB di kabupaten karangasem	2.104.227.000,00	2.104.227.000,00	1.815.878.110,00	100	86,3
Pelayanan Kontrasepsi							
1	Pelayanan Kontrasepsi KB Melalui TMKK dan TKBK	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK	88.760.000,00	86.760.000,00	86.598.898,00	100	99,81
Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya perayaan hari - hari besar nasional	31.000.000,00	21.181.000,00	21.029.000,00	100	99,28

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan KR yang Mandiri							
1	Orientasi Bina Keluarga Balita di Kecamatan	Terlaksananya orientasi Bina Keluarga Balita	18.940.000,00	18.940.000,00	18.809.734,00	100	99,31
2	Penggarapan Calon Akseptor KB melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	Terlaksananya calon akseptor KB melalui mobil unit penerangan mupen KB	35.100.000,00	32.400.000,00	29.187.800,00	100	90,09
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR							
1	Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Terlaksananya pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R)	56.000.000,00	51.714.000,00	51.688.500,00	100	99,95
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga							
1	Kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	Terlaksananya pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	33.600.000,00	33.600.000,00	33.224.950,00	100	98,88
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu- Padu							
1	Pemutahiran Data Keluarga	Terlaksananya pemutahiran data keluarga	29.500.000,00	29.500.000,00	27.019.600,00	100	91,59
JUMLAH			7.203.510.327,98	6.348.314.339,84	5.804.570.251,00	100	91,43

Dinas Perhubungan							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	2.438.135.178,52	2.315.554.400,90	2.311.623.988,00	100	99,83
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS	1.027.172.000,00	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	100	100
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya	Terbayarnya Insentif pungutan pajak dan retribusi daerah	46.200.000,00	51.098.437,50	45.711.282,50	100	89,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	6.064.936.590,00	6.064.936.590,00	5.956.592.477,00	100	98,21
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	5.012.300,00	5.012.300,00	4.914.000,00	100	98,04

4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	17.509.100,00	17.509.100,00	14.718.000,00	100	84,06
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan	23.037.000,00	21.387.000,00	20.389.600,00	100	95,34
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Alat listrik dan elektronik yang tersedia	3.000.000,00	3.000.000,00	2.929.100,00	100	97,64
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan yang tersedia	6.000.000,00	6.000.000,00	5.532.000,00	100	92,2
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	68.960.000,00	68.960.000,00	64.410.500,00	100	93,4
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	113.400.000,00	163.400.000,00	149.567.310,00	100	91,53
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	624.600.000,00	576.600.000,00	576.600.000,00	100	100
11	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Jumlah Bulan Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	71.950.000,00	100	99,93

12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	26.000.000,00	31.000.000,00	30.840.000,00	100	99,48
13	Penyediaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.473.200,00	100	86,83
14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Terbayarnya BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	65.000.000,00	33.000.000,00	31.578.446,28	100	95,69
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	100	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	120.000.000,00	120.000.000,00	118.860.250,00	100	99,05
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	161.242.400,00	170.642.400,00	165.978.026,00	100	97,27
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	27.000.000,00	27.000.000,00	26.759.000,00	100	99,11
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	7.000.000,00	7.000.000,00	6.691.600,00	100	95,59
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5.378.710,00	5.378.710,00	3.751.800,00	100	69,75

3	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan yang disusun	12.580.800,00	12.580.800,00	11.073.920,00	100	88,02
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan							
1	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dipasang	4.609.770.000,00	4.781.310.000,00	4.557.665.117,88	100	95,32
2	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Meterisasi LPJU yang dipasang	207.030.000,00	215.610.000,00	214.208.425,00	100	99,35
3	Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Laporan yang disusun	18.644.900,00	18.644.900,00	18.268.250,00	100	97,98
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							
1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dipelihara	1.045.619.000,00	1.114.429.000,00	1.109.044.875,00	100	99,52
2	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan	jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	108.022.300,00	108.022.300,00	106.993.350,00	100	99,05
Program peningkatan pelayanan angkutan							
1	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)	jumlah Penilaian WTN dilaksanakan	52.698.600,00	28.533.100,00	23.400.950,00	100	82,01
2	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Awak Angkutan Umum Yang Meningkatkan Kemampuannya Tentang Tata Tertib Berlalu Lintas	114.877.600,00	114.877.600,00	105.857.250,00	100	92,15
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan yang disusun	20.960.800,00	20.960.800,00	19.478.600,00	100	92,93
4	Monitoring dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepelabuhan	Jumlah Laporan yang disusun	451.835.500,00	157.380.500,00	134.415.100,00	100	85,41

5	Peningkatan pemungutan retribusi parkir bidang perhubungan	Jumlah tempat parkir yang tertata	301.146.800,00	257.146.800,00	197.021.850,00	100	76,62
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar dan daerah yang dilaksanakan	31.000.000,00	31.000.000,00	29.755.000,00	100	95,98
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
1	Pembangunan Terminal dan Tempat Parkir	Jumlah terminal dan tempat parkir yang dibangun	3.100.000.000,00	2.956.540.000,00	1.560.656.500,00	100	52,79
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas							
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	209.200.000,00	209.200.000,00	207.078.950,00	100	98,99
2	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang dipasang	200.000.000,00	200.000.000,00	198.379.150,00	100	99,19
3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	200.000.000,00	200.000.000,00	197.419.900,00	100	98,71
4	Peningkatan pengawasan ketertiban lalu lintas	Jumlah pengawasan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	778.064.800,00	781.987.265,00	767.706.315,00	100	98,17
5	Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas	Jumlah pelajar yang memahami tentang keselamatan berlalu lintas	122.668.400,00	122.668.400,00	109.217.550,00	100	89,03
6	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Yang dihasilkan	45.484.900,00	47.124.900,00	37.140.175,00	100	78,81

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor							
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah paket Alat pengujian Kendaraan bermotor yang diadakan	224.868.300,00	224.868.300,00	215.739.200,00	100	95,94
2	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	149.133.200,00	149.133.200,00	139.894.050,00	100	93,8
JUMLAH			22.943.169.178,52	22.688.476.803,40	20.746.265.057,66	100	91,44
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai untuk administrasi surat-menyerurat/administrasi kegiatan, target 360 lembar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Sarana Kebersihan	Persentase terpenuhinya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih, target 100%	7.500.000,00	6.332.400,00	6.133.600,00	100	96,86

3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK untuk kebutuhan rutin kantor, target 100%	15.000.000,00	12.816.000,00	12.762.200,00	100	99,58
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan fotocopi untuk kebutuhan rutin kantor, target 100%	10.000.000,00	9.887.500,00	9.731.200,00	100	98,42
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan dan bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan, bangunan kantor, target 100%	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.300,00	100	99,93
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komputer PC, target 1 unit	13.500.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	100	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor, target 100%	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat rutin kantor, target 100%	15.000.000,00	15.000.000,00	14.160.000,00	100	94,4

9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase terpenuhinya kinerja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, target 100%	90.000.000,00	125.000.000,00	124.876.430,00	100	99,9
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Keamanan	Persentase terpenuhinya kinerja jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan kantor, target 100%	270.000.000,00	270.000.000,00	268.200.000,00	100	99,33
11	Penyediaan Biaya Canang Bebanen Piodalan	Persentase terpenuhinya canang dan bebanen piodalan, target 100%	30.000.000,00	30.000.000,00	29.995.000,00	100	99,98
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase terpenuhinya kinerja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, target 100%	10.000.000,00	14.000.000,00	13.750.000,00	100	98,21

13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan ISP 8 kecamatan, SPSE, hotspot, dan layanan jaringan di 42 OPD berbasis Fiber optik, target 100%	2.002.826.000,00	2.025.746.247,00	2.007.284.946,00	100	99,09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor, target 3 unit	45.000.000,00	37.286.000,00	37.286.000,00	100	100
2	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sepeda motor target 5 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	78.044.050,00	100	97,56
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya pemeliharaan komputer, laptop, AC, peralatan gedung kantor, target 100%	25.000.000,00	25.000.000,00	24.960.000,00	100	99,84
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase mebeleur terpelihara, target 100%	2.000.000,00	1.000.000,00	910.000,00	100	91

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terpeliharanya taman kantor, target 100%	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa							
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya pengembangan jaringan (ISP untuk puskesmas, obyek wisata desa adat), target 100%	1.531.680.000,00	1.907.900.000,00	1.108.382.597,00	90	58,09
2	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terfasilitasinya pelayanan mobil layanan internet keliling di 8 kecamatan menuju SDM yang memiliki daya saing dalam pasar global.	40.000.000,00	35.000.000,00	33.059.900,00	100	94,46
3	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi	Terfasilitasinya pelayanan mobil layanan internet keliling di 8 kecamatan menuju SDM yang memiliki daya saing dalam pasar global.	31.180.000,00	30.400.000,00	24.568.850,00	100	80,82

4	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Terpeliharanya website Pemkab Karangasem serta; target 1 unit, dan pengembangan subdomain website pemkab, target 51 sub domain	95.135.000,00	16.575.000,00	13.933.850,00	100	84,07
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi							
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase fasilitasi pemasukan dokumen pengadaan barang dan jasa secara elektronik, target 100%	175.550.000,00	168.770.000,00	159.796.706,00	100	94,68
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase penyediaan data/informasi statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Karangasem, target 100%	86.345.000,00	84.785.000,00	67.244.200,00	100	79,31
Kerjasama Informasi Dengan Mass Media							

1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, target 100 %	44.575.000,00	43.795.000,00	32.958.150,00	100	75,26
2	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Saraseha	Persentase pelaksanaan diseminasi informasi sesuai standar pelayanan minimal bidang kominfo, target 100%	1.176.610.000,00	1.210.369.500,00	1.139.361.673,00	100	94,13
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah majalah informasi yang tercetak, target 250 eksemplar	19.780.000,00	19.000.000,00	17.844.050,00	100	93,92
Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi							
1	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah pelaksanaan monitoring menara telekomunikasi di 8 kecamatan, target 100 kali monitoring	79.805.000,00	79.025.000,00	77.633.895,00	100	98,24
2	Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan persandian pemerintah daerah, target 100 %	81.220.000,00	78.970.000,00	78.471.625,00	100	99,37

3	Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	Jumlah repeater pemerintah Kabupaten Karangasem terpelihara, target 4 unit	87.245.000,00	79.865.000,00	79.501.850,00	100	99,55
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penyusunan laporan kinerja SKPD, target 100%	8.000.000,00	8.000.000,00	6.878.150,00	100	85,98
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi							
1	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih TIK (peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman TIK) target 78 orang	46.000.000,00	45.214.100,00	37.465.000,00	100	82,86
Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Tersedianya bahan dekorasi untuk hari-hari besar nasional dan daerah, target 1 paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.449.400,00	100	99,33
Belanja Tidak Langsung							

1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai, target 100%	2.104.776.381,24	1.925.219.435,14	1.924.033.788,00	100	99,94
2	Insentif Pemungutan Retribusii Daerah	Persentase terpenuhinya pembayaran insentif retribusi daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	27.500.000,00	100	91,67
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Persentase terpenuhinya pembayaran TPK PNS	895.062.000,00	1.058.000.000,00	1.056.200.000,00	100	99,83
JUMLAH			9.169.689.381,24	9.506.806.182,14	8.546.725.410,00	97,99	89,9
SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Adminisrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15.032.000,00	15.032.000,00	12.892.500,00	100	85,77
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.230.290,00	3.230.290,00	3.220.130,00	100	99,69
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	33.393.800,00	33.393.800,00	30.123.400,00	100	90,21

4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	120.400.000,00	98.400.000,00	68.648.005,00	100	69,76
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	13.495.400,00	13.495.400,00	13.353.200,00	100	98,95
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2.310.000,00	2.310.000,00	2.283.000,00	100	98,83
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar /majalah serta peraturan perundang - undangan	9.600.000,00	9.600.000,00	5.380.000,00	100	56,04
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat rutin dan tamu	36.165.000,00	36.165.000,00	34.751.700,00	100	96,09
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	89.000.000,00	86.701.840,00	100	97,42
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	492.000.000,00	468.000.000,00	466.800.000,00	100	99,74
11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	Tersedianya banten biaya canang sehari - hari , purnama, tilem, dan banten odalan	33.055.475,00	42.850.000,00	40.025.000,00	100	93,41
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	33.516.096,00	27.190.000,00	100	81,13

Biaya Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.985.643.155,24	2.023.691.317,00	2.019.870.987,00	100	99,81
2	Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.057.000.000,00	1.042.100.000,00	1.042.100.000,00	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	174.000.000,00	174.000.000,00	166.696.987,00	100	95,8
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	41.975.000,00	41.975.000,00	38.395.000,00	100	91,47
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja	10.025.900,00	10.025.900,00	9.668.900,00	100	96,44
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							
1	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terselenggaranya pengembangan sarana promosi hasil produksi	70.149.235,00	67.949.235,00	67.402.030,00	100	99,19
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pengusaha mikro yang terlatih kewirausahaanya	200.000.000,00	200.000.000,00	194.593.010,00	100	97,3

3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi/kelompok yang di bintek	202.500.000,00	202.500.000,00	192.669.710,00	100	95,15
4	Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Koperasi/Kelompok	Meningkatnya manajemen koperasi	80.698.000,00	73.398.000,00	71.823.000,00	100	97,85
5	Peningkatan Manajemen Usaha Bagi LPD/LKM	Terbinanya manajemen usaha bagi LPD/LKM	45.680.000,00	44.580.000,00	43.808.100,00	100	98,27
6	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola KSP/USP	Terlaksananya bintek bagi pengelola KSP/USP	58.510.000,00	48.958.000,00	37.483.600,00	100	76,56
7	Pembinaan Bagi Pengurus dan Pengawas LPD	Terbinanya Pengurus dan Pengawas LPD	47.174.000,00	47.174.000,00	44.220.100,00	100	93,74
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (FPSP)	Terselenggaranya, monitoring, evaluasi dan pembinaan dana	26.816.600,00	26.816.600,00	21.427.250,00	100	79,9
2	Sosialisasi sumber-sumber permodalan	Terlaksananya sosialisasi sumber - sumber permodalan	39.528.000,00	39.528.000,00	32.569.020,00	100	82,39
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro	Terlaksananya monev usaha mikro	34.790.000,00	31.568.000,00	30.336.700,00	100	96,1
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (LPD)	Termonitornya kegiatan LPD	23.397.500,00	23.397.500,00	15.414.400,00	100	65,88

2	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Bertambahnya kelompok yang memahami tentang koperasi	57.665.000,00	40.969.000,00	40.667.550,00	100	99,26
3	Pembinaan , Pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pengawas diklat koperasi/kelompok yang dibintek	100.000.000,00	100.000.000,00	93.825.220,00	100	93,83
4	Pemeringkatan Koperasi	Terlaksananya pemeringkatan koperasi	62.470.000,00	4.336.800,00	2.015.800,00	100	46,48
5	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP	27.778.000,00	24.278.000,00	20.778.349,00	100	85,59
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koperasi)	Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan koperasi	60.405.000,00	60.405.000,00	58.809.150,00	100	97,36
7	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi	Terlaksananya jaringan kerjasama koperasi	52.643.000,00	52.643.000,00	52.326.634,00	100	99,4
Pemberdayaan Koperasi dan UKM							
1	Pemberdayaan Usaha Mikro	Berkembangnya usaha mikro	96.750.000,00	81.116.000,00	79.085.961,00	100	97,5
Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun LPD	Terlaksananya hari ulang tahun LPD	35.880.000,00	7.226.000,00	3.033.600,00	100	41,98
2	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Terlaksananya peringatan hari koperasi	61.189.800,00	60.189.800,00	54.356.400,00	100	90,31
3	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Terlaksananya hari - hari besar nasional	60.000.000,00	60.000.000,00	45.693.300,00	100	76,16

			JUMLAH	5.571.350.155,24	5.433.817.738,00	5.270.439.533,00	100	96,99
Dinas Penanaman Modal&Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)		
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
BELANJA TIDAK LANGSUNG								
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	1.731.572.084,60	1.659.626.103,76	1.656.364.580,00	100	99,8	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS	1.015.050.000,00	1.179.600.000,00	1.179.500.000,00	100	99,99	
BELANJA LANGSUNG								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yg terbayar	558.000.000,00	315.000.000,00	215.862.227,00	100	68,53	
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	768.800.000,00	768.800.000,00	564.110.000,00	100	73,38	
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang sah 400 lembar	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100	100	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dan ATK IT yg tersedia	23.162.200,00	23.162.200,00	23.162.200,00	100	100	

5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan yg tersedia dan jumlah penggandaan dokumen	12.907.100,00	14.407.100,00	12.574.900,00	100	87,28
6	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik yang tersedia	8.900.000,00	8.900.000,00	8.892.000,00	100	99,91
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	13.200.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	100	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat yg terfasilitasi	22.480.000,00	21.480.000,00	19.699.000,00	100	91,71
9	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten piodalan	Jumlah penyelenggaraan purnama, tilem dan nganyarin ke pura-pura dan piodalan yg terselenggara	55.960.000,00	50.960.000,00	50.860.000,00	100	99,8
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dalam daerah yg terfasilitasi	27.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	100
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat di luar daerah yg terfasilitasi	185.000.000,00	185.000.000,00	184.495.796,00	100	99,73

12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara	937.204.024,68	937.204.024,68	796.315.500,00	100	84,97
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	149.685.800,00	157.233.866,70	144.695.650,00	100	92,03
14	Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat	Jumlah media penyebaran informasi berupa leaflet dan banner	80.387.800,00	83.117.800,00	79.584.650,00	100	95,75
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan akhir tahun yg dijilid	5.678.600,00	5.678.600,00	5.628.200,00	100	99,11
16	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan (Renja,DPA dan DPPA) yg dijilid	27.953.400,00	27.953.400,00	27.538.500,00	100	98,52
17	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia	Frekuensi pertemuan dengan dunia usaha yg terfasilitasi	57.624.500,00	53.503.600,00	52.152.150,00	100	97,47
18	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran Investasi yg diikuti	164.575.000,00	148.695.900,00	146.973.731,00	100	98,84
19	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Investasi di Kabupaten Karangasem	Jumlah perusahaan yg dimonitoring dan jumlah buku laporan monitoring investasi	45.965.500,00	45.965.500,00	42.207.994,00	100	91,83
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	94.000.000,00	35.000.000,00	25.627.000,00	100	73,22
21	Standar Pelayanan Minimal Perizinan	Jumlah permohonan yg teregistrasi	37.222.675,00	41.722.675,00	38.634.400,00	100	92,6

22	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	44.663.000,00	100	89,33
23	Koordinasi dan Fasilitasi Mall Pelayanan Publik	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	179.297.800,00	174.297.800,00	148.836.577,00	100	85,39
24	Pelayanan Izin Penunjang Usaha	Jumlah izin penunjang usaha yg terbit	205.939.025,00	205.939.025,00	198.230.281,00	100	96,26
25	Pelayanan Izin Usaha	Jumlah izin usaha yg terbit	92.825.000,00	97.826.200,00	96.814.000,00	100	98,97
26	Pelayanan Tanda Daftar Usaha	Jumlah tanda daftar usaha yg terbit dan frekuensi pelaporan satgas percepatan berusaha	78.340.000,00	74.288.000,00	74.106.709,00	100	99,76
27	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu Goes To Banjar	Frekuensi pelayanan perijinan goes to banjar	336.325.000,00	248.335.800,00	241.250.650,00	100	97,15
28		Terfasilitasinya kegiatan satgas percepatan berusaha	142.305.800,00	129.345.800,00	124.325.021,00	100	96,12
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan yang tersedia	20.024.400,00	18.724.400,00	18.679.400,00	100	99,76
30	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah buku IKM yg disusun	40.904.400,00	38.674.400,00	32.788.050,00	100	84,78

			JUMLAH	7.170.390.109,28	6.844.062.195,14	6.298.192.166,00	100	92,02
Dinas Kebudayaan								
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)		
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2.040.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	100	100	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, listrik dan air yng dibayar	28.800.000,00	25.800.000,00	18.021.813,00	100	69,85	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak	5.000.000,00	5.000.000,00	4.608.600,00	100	92,17	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	3.812.500,00	100	95,31	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.650.000,00	8.500.000,00	6.273.500,00	100	73,81	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	16.000.000,00	16.000.000,00	12.982.300,00	100	81,14	

7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah blanko administrasi kantor yang tersedia	20.180.000,00	20.180.000,00	19.723.700,00	100	97,74
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	2.025.000,00	1.703.500,00	100	84,12
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	5.500.000,00	5.500.000,00	5.352.000,00	100	97,31
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	7.800.000,00	100	75
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	122.115.200,00	100	97,69
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah orang bulan bulan tenaga pendukung administrasi yang terbayar	310.200.000,00	310.200.000,00	243.200.000,00	100	78,4
13	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Jumlah penyelenggaraan piodalan	50.000.000,00	40.500.000,00	40.356.500,00	100	99,65
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25.000.000,00	20.000.000,00	19.860.000,00	100	99,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	129.780.000,00	129.277.204,00	126.538.750,00	100	97,88
2	Pemeliharaan rutin/berkala alat musik tradisional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala alat musik tradisional	20.000.000,00	0	0	0	0
3	Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/Dokumen	Persentase arsip dan dokumen kepegawaian yang terkelola dengan baik	25.000.000,00	12.759.100,00	10.615.000,00	100	83,2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia	3.000.000,00	12.610.060,00	11.378.100,00	100	90,23
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	3.000.000,00	3.000.000,00	2.564.600,00	100	85,49
Program Pengembangan Nilai Budaya							
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kelompok seni/budaya hampir punah yang dilestarikan	73.000.000,00	73.000.000,00	72.137.300,00	100	98,82
2	Peningkatan pemahaman sastra agama	Jumlah jenis lomba utsawa dharmagita yang diikuti	486.040.000,00	486.040.000,00	446.785.047,00	100	91,92

3	Pengembangan bentuk karya sastra dan teater	Jumlah kelompok teater SMA/SMK se Kabupaten Karangasem yang dibina	50.000.000,00	50.000.000,00	47.819.300,00	100	95,64
4	Inventarisasi Tradisi Budaya	Karya budaya/tradisi budaya yang diinventarisir dalam bentuk kajian	45.000.000,00	45.000.000,00	44.077.650,00	100	97,95
5	Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda	Jumah warisan budaya tak benda yang dicatat dan direkam dalam format video	95.000.000,00	95.000.000,00	94.123.620,00	100	99,08
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
1	Inventarisasi dan pemetaan aset pusaka	Jumlah lokasi asset dan pemetaan asset pusaka	1.327.000.000,00	1.327.000.000,00	1.278.970.790,00	100	96,38
2	Sosialisasi dan pendataan cagar budaya	Jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	313.000.000,00	313.000.000,00	277.160.500,00	100	88,55
Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah peserta kelompok-kelompok senibudaya berbasis Desa Pakraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	1.921.000.000,00	1.921.000.000,00	1.834.360.952,00	100	95,49
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							

1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional	50.000.000,00	34.296.500,00	26.478.000,00	100	77,2
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya							
1	Fasilitasi bantuan kepada lembaga adat/tradisional	Jumlah lembaga adat dan tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	44.000.000,00	44.000.000,00	40.495.000,00	100	92,03
2	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan kerjasama pengelola	Persentase lembaga adat dan tradisional yang terpantau pemanfaatan dana bantuan	39.000.000,00	39.000.000,00	28.544.300,00	100	73,19
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan	Jumlah media informasi yang dikelola	25.000.000,00	25.000.000,00	23.033.450,00	100	92,13
Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya							
1	Pelaksanaan event seni budaya	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	1.936.966.000,00	1.936.966.000,00	1.799.990.450,00	100	92,93
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kebudayaan							
1	Pemberian dukungan/penghargaan kepada seniman dan budayawan	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	140.000.000,00	140.000.000,00	133.924.850,00	100	95,66
Program Pengembangan Lembaga Adat dan Tradisional							

1	Pemberdayaan desa adat	Jumlah Desa Pakraman di 3 kelurahan yang terfasilitasi di BKK Provinsi	3.292.000.000,00	3.090.976.825,00	3.031.080.690,00	100	98,06
2	Pemberdayaan subak dan subak abian	Jumlah Subak/Subak Abian di 3 kelurahan yang terfasilitasi BKK Provinsi	1.244.000.000,00	1.188.747.551,00	1.182.824.300,00	100	99,5
3	Pembinaan dan penyuratan Awig-awig Lembaga Tradisional Adat/Tradisonal	Jumlah awig-awig Desa Adat yang sudah kasurat (tertulis)	62.985.000,00	62.985.000,00	61.254.250,00	100	97,25
Belanja Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	1.711.520.864,78	1.907.383.233,61	1.904.429.766,00	100	99,85
2	Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya Tambahan penghasilan pegawai	997.336.000,00	1.007.600.000,00	1.007.100.000,00	100	99,95
JUMLAH			14.650.897.864,78	14.539.291.473,61	13.993.041.278,00	100	96,24
Dinas Perpustakaan & Kearsipan							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Pegawai							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji PNS selama 12 bulan-	1.610.911.610,18	1.506.517.142,40	1.503.973.579,00	100	99,83

2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Terbayarnya Tunjangan kinerja PNS selama 12 bulan	801.450.000,00	893.500.000,00	893.500.000,00	100	100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi surat menyurat dan pembelian materai dalam 1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran Telepon, Air dan Listrik dalam 1 Tahun	50.400.000,00	50.400.000,00	42.434.227,00	100	84,19
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan pembayaran upah cleaning service dalam 1 Tahun	17.608.000,00	17.608.000,00	17.579.800,00	100	99,84
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	13.615.000,00	13.615.000,00	13.606.000,00	100	99,93
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Kantor dalam 1 Tahun	4.448.000,00	4.448.000,00	4.433.000,00	100	99,66

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dalam 1 Tahun	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa majalah, surat kabar dll dalam 1 Tahun	14.499.600,00	14.499.600,00	11.807.500,00	100	81,43
8	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dalam 1 Tahun	17.680.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00	100	100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapt-rapat koordinasi ke Propinsi, Kecamatan dan instansi lainnya dalam 1 Tahun	74.000.000,00	84.000.000,00	83.951.147,00	100	99,94
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya dana untuk pembayaran Upah tenaga kontrak dalam 1 Tahun	336.000.000,00	326.000.000,00	326.000.000,00	100	100
11	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Tersedianya canang, bebanten dan piodalan	23.600.000,00	23.600.000,00	23.554.000,00	100	99,81
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	100	97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Kaersipan	122.076.500,00	117.076.500,00	116.151.800,00	100	99,21
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	TERPELIHARANYA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	23.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolah dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana pengolah dan penyimpanan arsip 33 rak arsip	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala sarana perpustakaan dan bahan pustaka	Terpeliharanya sarana perpustakaan dan bahan pustaka 6 rak perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.997.500,00	100	99,94
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.511.000,00	4.511.000,00	4.511.000,00	100	100
Program Pengembangan Nilai Budaya							
1	Penatagunaan naskah kuno nusantara	Naskah kuno	13.467.600,00	6.237.050,00	6.229.400,00	100	99,88
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Desa adat Se- Kabupaten Karangasem	24.826.000,00	21.186.000,00	20.903.650,00	100	98,67
2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Alih Bahasa naskah kuno	23.872.600,00	18.290.600,00	18.272.200,00	100	99,9

3	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya likal daerah	35.986.000,00	33.628.950,00	33.628.950,00	100	100
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah							
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan Tertata dokumen/arsip di Seluruh SKPD	15.310.000,00	13.993.500,00	13.867.000,00	100	99,1
2	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksannya Penduplikasian Dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika di Kabupaten Karangasem	6.810.600,00	5.745.600,00	5.580.500,00	100	97,13
3	Penelusuran Dokumen Arsip Daerah	Terpeliharanya dokumen dokumen arsip daerah	8.515.500,00	7.630.500,00	7.512.250,00	100	98,45
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan hari hari besar nasional	Terlaksananya Perayaan Hari-Hari besar Nasional	45.500.000,00	45.500.000,00	45.472.000,00	100	99,94
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							
1	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Sistem informasi Kearsipan (Sik) dan Jaminan informasi Kearsipan (jik) Se- Kabupaten Karangasem	5.342.000,00	5.342.000,00	5.204.800,00	100	97,43

2	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta di Kab.Karangasem	28.861.200,00	22.607.500,00	22.522.450,00	100	99,62
3	inventarisasi arsip daerah	terinventarisasinya arsip-arsip dokumen SKPD	6.342.000,00	3.707.000,00	3.689.000,00	100	99,51
4	Pembinaan dan pemantauan kearsipan	terlaksananya pemantauan dan pembinaan arsip ke SKPD di lingk. Kab. Krangasem	77.714.300,00	69.854.030,00	69.635.800,00	100	99,69
5	Pemantapan Pengelola Kearsipan	terlatihnya petugas pengelola arsip pada 40 perangkat desa	36.688.500,00	35.806.500,00	35.806.500,00	100	100
6	Penyusutan arsip	Tersedianya tempat untuk penyimpanan arsip baru	14.337.200,00	13.387.200,00	13.387.200,00	100	100
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							
1	Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Perpustakaan sekolah/desa yang sudah dibina	12.050.100,00	10.993.700,00	10.993.700,00	100	100
2	Operasional mobil/motor pintar	Terlaksananya operasional mobil/motor pintar untuk Anak Usia Dini 4-15 Tahun	55.765.600,00	55.765.600,00	55.688.550,00	100	99,86

3	Operasional perpustakaan keliling	Terlaksananya operasional Perpustakaan Keliling ke seluruh wilayah Kabupaten Karangasem	62.997.400,00	62.997.400,00	62.889.700,00	100	99,83
4	Pelayanan perpustakaan umum	Terlaksananya Pelayanan perpustakaan umum	34.284.200,00	27.901.150,00	27.871.050,00	100	99,89
5	Pemantapan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/SKPD	terselenggaranya bimbingan teknis 40 orang tenaga pengelola perpustakaan sekolah	20.216.800,00	19.976.600,00	19.976.600,00	100	100
6	Pelayanan story telling	terselenggaranya pelayanan story telling tingkat TK	30.165.400,00	30.165.400,00	30.160.400,00	100	99,98
7	Promosi dan Lomba Perpustakaan	Terlaksananya Promosi dan lomba Perpustakaan untuk meningkatnya minat baca terutama siswa/siswi SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI	35.930.900,00	33.902.700,00	33.902.700,00	100	100
8	Hari Kunjung Perpustakaan	Siswa TK/SMP/MTS, SMA/MA DAN Masyarakat Umum	12.561.000,00	4.481.000,00	4.479.650,00	100	99,97
JUMLAH			3.743.744.610,18	3.672.955.222,40	3.656.953.603,00	100	99,56
Dinas Perikanan							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jasa administrasi surat menyurat, 1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	4.054.000,00	100	62,37
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi air dan listrik, 12 bulan	43.820.700,00	40.200.000,30	24.491.712,00	100	60,92
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, 1 Paket	6.305.900,00	5.064.400,00	4.217.950,00	100	83,29
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, AC, komputer, 1 Paket	26.250.000,00	12.100.000,00	12.040.500,00	100	99,51
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor (ATK), 1 Paket	34.692.700,00	25.225.600,00	23.699.000,00	100	93,95
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetak dan pengadaan, 1 Paket	20.000.000,00	13.000.000,00	12.991.500,00	100	99,93

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, 1 Paket	4.775.000,00	4.775.000,00	4.716.500,00	100	98,77
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan pengadaan bahan bacaan surat kabar / majalah, 12 Bulan	4.200.000,00	4.200.000,00	3.900.000,00	100	92,86
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman, 12 Bulan	38.070.180,00	33.138.180,00	30.376.250,00	100	91,67
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbayarnya uang perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, 1 Tahun	60.000.000,00	75.000.000,00	74.987.930,00	100	99,98
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya upah jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan, 312 Ob	322.800.000,00	322.800.000,00	319.800.000,00	100	99,07
12	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten, Piodalan	Terselenggaranya penyediaan biaya canang, bebanten, piodalan, 1 Tahun	76.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	100	100

13	Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-hari Nasional	Tersedianya dekorasi dan materi pameran, 1 paket	147.072.500,00	135.272.500,00	130.408.000,00	100	96,4
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya uang perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, 1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	19.930.000,00	100	99,65
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, 100%	27.479.500,00	27.479.500,00	23.350.000,00	100	84,97
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala, 1 Paket	10.390.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 43 unit dan roda empat 6 unit secara rutin / berkala, 1 tahun	114.500.000,00	114.500.000,00	107.148.819,00	100	93,58
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan							

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan data dan informasi perikanan, 1 Tahun	63.323.800,00	60.866.606,00	57.513.082,00	100	94,49
Program Pengembangan Budidaya Perikanan							
1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Tersedianya denplot gurami, 2 Paket Terlaksananya bimtek budidaya gurami, 1 Paket Tersedia denplot mina padi, 2 Paket Terlaksananya bimtek budidaya mina padi, 1 Paket Terlaksananya temu lapang, 2 Paket	242.037.000,00	215.514.650,00	203.343.481,00	97,62	94,35
2	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota)	Terlaksananya rehabilitasi kolam di BBI dan saluran air pasok dan buang BBI, 849 M.Kubik	1.345.516.000,00	1.345.516.000,00	715.710.834,34	100	53,19
3	Pembangunan Pengembangan Pembenihan Ikan	Terlaksananya Pembinaan Pembenihan Ikan	209.203.300,00	179.841.300,00	155.792.604,00	89,07	86,63
4	Pembangunan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Tersedianya pakan Ikan	70.000.000,00	67.664.500,00	62.297.475,00	95	92,07
Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
1	Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya bimtek, 1 Paket	133.325.000,00	111.347.100,00	109.651.750,00	100	98,48

2	Pendampingan pada Kelompok Nelayan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Terlaksananya bimtek tentang sarana dan prasarana perikanan tangkap, 1 Paket	116.789.500,00	106.731.700,00	104.950.600,00	100	98,33
Belanja Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan	Terbaya Gaji Pegawai	1.880.245.222,30	1.980.619.137,30	1.976.982.121,00	100	99,82
2	Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS	805.374.000,00	999.700.000,00	996.900.000,00	100	99,72
JUMLAH			5.829.170.302,30	5.983.556.173,60	5.255.754.108,34	99,53	87,84
Dinas Pariwisata							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	100	100
2	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Paket Peralatan Kerja Yang Terpelihara	9.000.000,00	9.000.000,00	8.999.500,00	100	99,99

3	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor dan IT yang tersedia	19.916.000,00	23.825.500,00	15.376.600,00	100	64,54
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	240.000.000,00	170.378.500,00	59.910.700,00	85	35,16
5	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100	100
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40.000.000,00	46.125.000,00	43.050.000,00	100	93,33
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	4.872.000,00	100	88,58
8	Penyedia makanan dan minuman	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat di kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan kusultasi ke luar daerah	frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	115.000.000,00	112.869.600,00	100	98,15

10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah bulan pembayaran tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	862.400.000,00	739.850.000,00	733.100.000,00	100	99,09
11	Penyedia biaya canang, bebanten piodalan	Jumlah bulan pelaksanaan upacara keagamaan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.941.500,00	100	99,81
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	23.280.000,00	100	93,12
13	Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terurus perizinannya	10.000.000,00	10.000.000,00	3.555.600,00	100	35,56
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Gedung dan Bangunan yang disewa	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	50	37,5
15	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang dibayar	60.000.000,00	60.000.000,00	32.516.211,00	100	54,19
16	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah barang pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	27.000.000,00	22.000.000,00	15.247.000,00	100	69,3

2	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	38.900.000,00	27.375.000,00	27.135.000,00	100	99,12
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	101.442.244,00	101.442.244,00	95.031.136,00	100	93,68
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyusunan pelaporan	5.000.000,00	11.116.998,40	10.208.000,00	100	91,82
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Frekwensi penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	2.000.000,00	827.000,00	738.400,00	100	89,29
Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
1	Event-event promosi pariwisata	frekwensi Festival pariwisata yang diselenggarakan	1.317.000.000,00	1.355.925.000,00	1.031.367.476,00	85	76,06
2	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah jenis wisata yang dianalisa minat pasarnya	60.855.000,00	60.855.000,00	48.311.600,00	100	79,39
3	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri	NKRI dan Luar NKRI	483.495.716,00	543.530.716,00	308.823.969,00	80	56,82
4	Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata	Jumlah bahan promosi yang dicetak	210.160.000,00	210.160.000,00	206.363.450,00	100	98,19
Pengembangan Destinasi Pariwisata							

1	Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah tatap Muka Stakeholder dalam tata Kelola Destinasi Pariwisata Meningkatnya pemahaman dan Kapasitas para pemangku kepentingan melalui tata kelola destinasi pariwisata dalam pengelolaan pariwisata	269.170.000,00	269.170.000,00	234.890.588,00	100	87,26
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah daerah tujuan wisata yang dipelihara fasilitas sarana dan prasarananya	3.689.506.050,00	3.689.506.050,00	2.659.476.720,00	80	72,08
3	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah daerah tujuan wisata yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	88.942.650,00	88.942.650,00	70.036.050,00	100	78,74
4	Pengembangan dan Penguatan Pembangunan Litbang Bidang Pariwisata	Jumlah regulasi Kepariwisataan yang Tersusun	324.211.250,00	324.211.250,00	306.559.762,00	100	94,56
5	Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di monitoring dan dievaluasi	59.472.700,00	109.472.700,00	27.298.100,00	50	24,94

6	Pembinaan, Sosialisasi serta Penerapan dan Pengawasan TDUP	Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina dalam Menerapkan TDUP	67.368.590,00	73.998.590,00	57.797.602,00	100	78,11
Pengembangan Kemitraan							
1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina untuk mewujudkan sapta pesona	326.430.100,00	326.430.100,00	301.213.200,00	95	92,27
2	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Terlaksanya pendataan usaha pariwisata dan produk ekonomi kretaif	49.780.000,00	49.780.000,00	44.361.650,00	100	89,12
3	Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda Pariwisata	jumlah generasi muda karangasem yang diberdayakan sebagai dita pariwisata Karangasem	269.212.850,00	269.212.850,00	265.439.600,00	100	98,6
4	Pengembangan Desa Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif	jumlah desa wisata yang dibina untuk mendukung daya tarik wisata alternatif	416.437.850,00	416.437.850,00	352.742.100,00	95	84,7
5	Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata	Terlaksananya fasilitas pengembangan produk ekonomi kretif berbasis pariwisata	144.490.000,00	144.490.000,00	141.301.050,00	100	97,79

Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan hari-hari besar nasional	Frekuensi pelaksanaan perayaan hari hari besar nasional dan besar lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	35.472.200,00	100	70,94
Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja pegawai	2.992.560.458,74	2.456.123.674,12	2.178.519.551,99	100	88,7
JUMLAH			12.469.701.458,74	11.910.136.672,52	9.550.255.915,99	90,13	80,19
Dinas Pertanian							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	7.560.000,00	4.650.000,00	2.544.000,00	100	54,71
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	212.160.000,00	212.160.000,00	120.081.058,00	100	56,6
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	160.740.850,00	140.757.250,00	106.352.960,00	100	75,56
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	49.227.500,00	49.227.500,00	48.737.500,00	100	99
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	46.824.800,00	42.966.800,00	42.965.300,00	100	100
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	36.390.500,00	29.123.900,00	27.569.250,00	100	94,66
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	13.608.000,00	13.608.000,00	8.220.000,00	100	60,41
8	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	51.525.500,00	50.000.000,00	49.650.000,00	100	99,3

9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	100.000.000,00	150.000.000,00	148.997.098,00	100	99,33
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrai/teknis/keamanan	12 Bulan	2.348.400.000,00	2.319.550.000,00	2.293.300.000,00	100	98,87
11	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	1 Tahun	94.920.000,00	80.270.000,00	62.954.250,00	100	78,43
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	29.970.000,00	100	99,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	310.592.700,00	290.592.399,00	274.134.886,00	100	94,34
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	73.600.000,00	66.600.000,00	44.566.500,00	100	66,92
3	Pengadaan Mebeleur	12 Paket	5.233.600,00	10.210.700,00	9.480.000,00	100	92,84
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	0	34.676.064,00	34.635.000,00	100	99,88
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	11.107.200,00	11.107.200,00	10.617.500,00	100	95,59
2	Kegiatan monitoring/evaluasi dan Pelaporan kinerja SKPD	1 Jenis Laporan	35.849.660,00	28.318.595,00	26.671.782,00	100	94,18
3	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	6 Jenis Dokumen	47.630.200,00	55.630.200,00	52.574.820,00	100	94,51
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan hari-hari besar nasional	1 Tahun	120.000.000,00	120.000.000,00	112.047.000,00	100	93,37
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1 Paket	768.529.360,00	757.529.360,00	688.263.971,00	100	90,86

2	Pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	1 Tahun	103.940.000,00	100.126.900,00	98.863.342,00	100	98,74
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan							
1	Pembibitan dan perawatan ternak	16600 Dosis	315.928.700,00	298.626.300,00	276.933.527,00	100	92,74
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian							
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	4 kelas	287.451.950,00	277.577.450,00	270.882.340,00	100	97,59
2	Pengembangan Metode Dan Materi Penyuluhan	16 Demplot	90.831.700,00	90.331.700,00	87.685.210,00	100	97,07
3	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi SDM Penyuluh Dan Pelaku Utama/ Pelaku Usaha	44 orang	1.087.293.330,00	1.082.493.330,00	896.091.575,00	100	82,78
4	Pelatihan dan Pembinaan KTNA	30 orang	144.572.830,00	144.447.830,00	140.292.750,00	100	97,12
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							
1	Pengelolaan Lahan dan Air	8 kecamatan	97.774.500,00	95.241.100,00	92.468.300,00	100	97,09
2	Pemantauan Pupuk dan Pestisida	16 kali	99.620.000,00	97.736.000,00	95.830.000,00	100	98,05
3	Pembinaan Alsintan	8 kecamatan	84.174.120,00	83.174.120,00	80.233.550,00	97	96,46
Program Peningkatan Sistem Perlindungan Tanaman dan Hewan							
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	8 Kecamatan	48.263.300,00	47.863.300,00	46.880.295,00	98	97,95
2	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Hortikultura	2 kelompok tani	80.908.225,00	80.908.225,00	77.783.400,00	100	96,14
3	Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	8 Kecamatan	53.817.000,00	50.502.000,00	44.659.400,00	100	88,43
4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	2 Kelas	152.050.000,00	152.050.000,00	147.712.900,00	100	97,15
5	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan	3 Kelompok	139.628.400,00	139.413.400,00	138.093.351,00	100	99,05

6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura	16 kali	46.126.000,00	46.126.000,00	43.550.550,00	100	94,42
Program Peningkatan Produksi Pertanian							
1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan	4 Laporan	34.547.700,00	34.197.700,00	28.469.622,00	100	83,25
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	10 Unit	165.882.410,00	165.882.410,00	150.273.657,00	100	90,59
3	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Perkebunan	1 Laporan	89.532.900,00	89.532.900,00	79.552.700,00	100	88,85
4	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	1 Kelas	155.475.900,00	155.475.900,00	141.545.210,00	100	91,04
5	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau	2 kelompok	240.628.000,00	755.963.420,00	571.681.540,00	96	75,62
6	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Perkebunan	1 kelas	126.802.894,00	126.802.894,00	123.332.207,00	100	97,26
7	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	5000 Pohon	41.383.000,00	41.383.000,00	38.020.750,00	100	91,88
8	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan	3 kelompok	33.785.260,00	33.385.260,00	30.982.806,00	100	92,8
9	Bimbingan Peningkatan Mutu Dan Produksi Hortikultura	2 Kelompok Tani	121.207.400,00	113.613.597,00	109.608.647,00	100	96,47
10	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Hortikultura	4 Laporan	20.739.384,00	20.739.384,00	19.574.650,00	100	94,38
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian							
1	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	8 Kecamatan	63.597.000,00	62.367.850,00	59.586.141,00	100	95,54
2	Pendampingan Simantri	1 Tahun	155.296.600,00	149.211.600,00	135.292.600,00	100	90,67
3	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Kabupaten	30.437.000,00	30.037.000,00	27.455.980,00	100	91,41
4	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan	8 KWT	171.065.000,00	161.356.850,00	152.664.736,00	100	94,61
5	Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Hortikultura	2 kelompok	82.996.759,00	80.536.759,00	73.851.000,00	100	91,7

6	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	1 Angkatan	48.656.100,00	47.272.100,00	38.098.950,00	100	80,6
7	Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	6 Kelompok Tani	78.105.000,00	78.105.000,00	55.343.350,00	100	70,86
8	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Hortikultura	1 Laporan	11.983.368,00	13.343.368,00	12.895.600,00	100	96,64
9	Fasilitasi Dan Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Hortikultura	1 angkatan	24.936.000,00	23.936.000,00	21.645.600,00	100	90,43
10	Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Perkebunan	3 kelas	162.632.300,00	127.302.300,00	110.482.650,00	95	86,79
11	Festival Subak Karangasem	1 Paket	1.770.372.800,00	1.578.342.800,00	1.557.791.967,00	100	98,7
12	Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggulan Daerah	2 kali	113.572.200,00	82.174.430,00	81.629.030,00	100	99,34
13	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Pangan	8 kecamatan	13.327.000,00	13.176.500,00	12.832.336,00	100	97,39
14	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1 Paket	29.080.400,00	28.780.400,00	20.913.000,00	100	72,66
15	Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan	2 Kelompok	71.171.300,00	71.171.300,00	70.928.200,00	100	99,66
16	Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	1 Angkatan	35.651.700,00	31.216.000,00	30.885.000,00	100	98,94
17	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Perkebunan	1 Laporan	33.204.700,00	33.204.700,00	31.627.690,00	100	95,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG							
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Terpenuhinya tambahan Instensif Pemungutan Retribusi Daerah	2.100.000,00	4.300.000,00	2.200.000,00	80	51,16

2	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	10.171.327.268,00	8.187.244.809,00	8.181.573.936,00	100	99,93
3	Tambahan Penghasilan	Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	3.395.784.000,00	3.405.000.000,00	3.402.800.000,00	100	99,94
JUMLAH			24.851.561.268,00	23.028.651.854,00	22.105.832.920,00	99,82	95,99
Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	53.500.000,00	60.039.350,00	57.855.150,00	100	96,36
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	525.000,00	255.000,00	255.000,00	100	100
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK dan ATK IT yang dapat terbeli/terbayar	13.492.800,00	9.412.300,00	8.268.150,00	100	87,84
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya Tenaga Pendukung Administrasi/teknis/keamanan	182.400.000,00	165.400.000,00	165.400.000,00	100	100

5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Foto Copy surat-surat yang dapat terbayar	8.071.000,00	7.741.500,00	7.741.200,00	100	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	19.968.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	7.000.000,00	13.000.000,00	11.752.000,00	100	90,4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.189.400,00	2.700.000,00	2.572.200,00	100	95,27
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan							
1	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terhimpunnya data dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan	33.360.000,00	24.413.000,00	23.844.850,00	100	97,67

Peningkatan Efisiensi Dan Perdagangan Dalam Negeri							
1	Monitoring dan Evaluasi perkembangan sarana perekonomian pasar tradisional dan toko modern	Terlaksananya monitoring perkembangan sarana perekonomian toko modern dan pelatihan petugas pasar tradisional	80.360.000,00	71.500.000,00	70.804.350,00	100	99,03
2	Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Serta Pengendalian Inflasi	Persentase Pelayanan dan prasarana perdagangan pasar tradisional	44.980.000,00	36.845.000,00	34.925.270,00	100	94,79
3	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Terhimpunnya Data sarana perekonomian daerah	36.380.800,00	29.675.800,00	29.363.650,00	100	98,95
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							
1	Pembinaan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum	Peningkatan kinerja PDAM	112.000.000,00	106.360.000,00	94.651.450,00	100	88,99
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan							
1	Pengendalian dan Evaluasi Bidang PLTS	Terhimpunnya data dibidang PLTS	32.520.000,00	29.410.000,00	28.874.900,00	100	98,18
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga yang tersusun	44.680.000,00	36.475.000,00	35.758.500,00	100	98,04

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Presentase Peningkatan fasilitas iklim investasi dan realisasi investasi bagi Perusahaan Daerah yang belum mampu beroperasi/yang akan dibentuk serta fasilitas invesatsi pada BUMD	47.000.000,00	38.855.000,00	20.481.250,00	55	52,71
JUMLAH			723.427.000,00	659.681.950,00	620.147.920,00	97,35	94,01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	4.020.000,00	4.020.000,00	1.398.000,00	100	34,78
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	318.000.000,00	411.636.511,00	369.797.876,00	100	89,84
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor Tetap Terjaga	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	100	100

4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Samsat Kendaraan Dinas Oprasional	7.800.000,00	7.800.000,00	3.728.700,00	100	47,8
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Memadai	24.395.500,00	24.395.500,00	23.125.300,00	100	94,79
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	15.949.000,00	15.949.000,00	15.626.050,00	100	97,98
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pasar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dan Pasar	15.000.000,00	15.000.000,00	14.999.000,00	100	99,99
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.134.600,00	9.134.600,00	9.134.600,00	100	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Koran dan Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	7.974.000,00	100	99,68
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100	100
11	Rapat- Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	61.250.000,00	58.350.000,00	58.272.444,00	100	99,87
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Terbayarnya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	389.400.000,00	368.500.000,00	367.400.000,00	100	99,7

13	Penyediaan Biaya Canang , Bebanen Piodalan	Tersedianya Biaya Canang Harian, Bebanen, Piodalan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.981.000,00	100	99,92
14	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	9.940.000,00	100	99,4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondisi Baik	10.000.000,00	10.000.000,00	9.957.500,00	100	99,58
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kondisi Kendaraan Baik	135.805.793,00	130.002.722,00	120.458.560,00	100	92,66
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen dan Laporan - Laporan SKPD	12.641.000,00	12.311.000,00	11.919.400,00	100	96,82
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN							
1	Tera Ulang Alat UTTP	Terjaminnya Perlindungan Konsumen	194.090.800,00	229.085.800,00	219.762.600,00	100	95,93
2	Pengawasan Alat UTTP	Terjaminnya Perlindungan Konsumen	11.555.000,00	9.950.000,00	9.677.400,00	100	97,26
3	Monitoring Sembako Dan Barang Strategis Lainnya	Untuk Mengetahui Ketersediaan Bahan Pokok, Barang Strategis Lainnya dan Tingkat Harga	49.894.414,00	40.598.414,00	39.694.850,00	100	97,77

4	Pendaftaran HAKI	Merk dan Hak Cipta Produk IKM Terdaptar	55.524.500,00	51.426.980,00	51.423.780,00	100	99,99
5	Pengawasan Retribusi Pasar	0	9.888.400,00	9.888.400,00	9.846.650,00	100	99,58
6	Monitoring Peredaran Gas LPG	Kualitas dan Kuantitas Gas LPG Terjaga	23.414.300,00	18.064.300,00	17.271.050,00	100	95,61
7	Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya yang di Salahgunakan Dalam Pangan	Pangan Layak Dikonsumsi	36.210.300,00	36.210.300,00	35.524.150,00	100	98,11
8	Pembangunan Gedung Serta Sarana Prasarana UPT Kemetrolgian	Terjaminnya Perlindungan Konsumen	1.451.999.400,00	1.451.999.400,00	1.223.807.900,00	100	84,28
9	Pembinaan Indikasi Geografis	Terdaftarnya IG Salak Gula Pasir	86.839.400,00	81.465.000,00	81.422.800,00	100	99,95
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM							
1	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Perajin IKM	41.214.400,00	41.214.400,00	41.201.882,00	100	99,97
2	Penerapan Jaringan Mutu Melalui GKM	Tenaga Kerja Menjadi Terampil	29.021.000,00	29.021.000,00	28.974.400,00	100	99,84
3	Pembinaan Pengerajin Oleh Dekranasda Kabupaten Karangasem	Tenaga Kerja Menjadi Terampil	209.421.743,00	179.421.743,00	177.757.150,00	100	99,07
4	Monev Kegiatan Dana Bergulir	Dana Bergulir Tepat Guna	13.025.250,00	13.025.250,00	13.024.350,00	100	99,99
5	Pendataan Potensi Indag	-	28.482.400,00	28.482.400,00	28.455.150,00	100	99,9
6	Kajian Akedemik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Kajian / Naskah Akademis RPIK Karangasem	87.726.500,00	87.726.500,00	86.433.164,00	100	98,53
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN							

1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Meningkatnya Partisipasi dan Nasionalisme Pegawai	50.000.000,00	47.260.000,00	47.192.150,00	100	99,86
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR							
1	Pameran Industri dan Dagang	Meningkatnya Promosi Industri dan Dagang	324.633.800,00	252.853.800,00	250.368.460,00	100	99,02
2	Pemasaran Produk IKM Berbasis Website (e - Commers)	Produk IKM dikenal Masyarakat Luas	19.648.400,00	19.648.400,00	19.443.200,00	100	98,96
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
1	Penagihan Retribusi Dan Lain-lain PAD	Adanya Pemasukan Pendapatan ke Kas Daerah	1.025.692.100,00	1.023.592.100,00	993.837.670,00	100	97,09
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI							
1	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Bagi IKM	Produktivitas Perajin Meningkat	9.040.200,00	9.040.200,00	8.763.950,00	100	96,94
2	Pameran Industri Kecil / Kerajinan Dalam Daerah	Adanya Transaksi Langsung Antara Perajin dan Pembeli	48.370.300,00	25.870.300,00	21.981.250,00	100	84,97
3	Pameran Produk Industri Dan Kerajinan Luar Daerah	Produk Industri dikenal di Luar Daerah	101.010.000,00	90.510.000,00	88.746.020,00	100	98,05
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI							
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Sarana dan Prasarana Pasar Terpelihara	430.000.000,00	430.000.000,00	426.543.702,96	90	99,2

2	Pameran PKB	Adanya Transaksi Langsung Antara Perajin dan Pembeli	39.042.600,00	31.042.600,00	30.733.950,00	100	99,01
3	Pelaksanaan Aci Pura Melanting	Mempertebal Tingkat Kerohanian	60.000.000,00	60.000.000,00	59.500.000,00	100	99,17
4	Pembangunan Pasar Di Kabupaten Karangasem	Lancarnya Perekonomian Masyarakat	20.431.647.900,00	20.431.647.900,00	12.449.248.305,24	90	60,93
5	Pelatihan Kewirausahaan	Terlatihnya Pengusaha Industri Kecil dan Menengah dalam Mengembangkan Kewirausahaan	40.631.100,00	40.631.100,00	40.065.400,00	100	98,61
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN							
1	Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Peningkatan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima dan Asongan	32.812.000,00	31.262.000,00	29.363.950,00	100	93,93
Belanja Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Terbayar nya Gaji Pegawai	2.734.789.145,04	2.429.793.642,64	2.358.690.309,00	100	97,07
2	Tambahan Penghasilan PNS	-	1.156.854.000,00	1.264.000.000,00	1.233.000.000,00	100	97,55
3	Insentif Pemungutan Daerah	-	175.940.800,00	338.821.550,00	235.922.730,00	100	69,63
JUMLAH			30.102.616.045,04	29.991.452.812,64	21.454.190.753,20	93,04	71,53
Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)		

			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Program pelayanan administrasi perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat; 800 lembar	4.200.000,00	4.200.000,00	1.350.000,00	100	32,14
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang terbayar; 100%	108.000.000,00	108.000.000,00	54.813.064,00	100	50,75
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat; 20 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	6.882.500,00	100	45,88
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar; 100 %	52.493.200,00	52.493.200,00	52.115.200,00	100	99,28
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan; 100%	40.000.000,00	40.000.000,00	24.300.500,00	100	60,75

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan; 100%	10.000.000,00	10.000.000,00	9.922.400,00	100	99,22
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia; 10 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	11.760.000,00	100	98
8	Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia; 600 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	46.080.000,00	100	92,16
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 25 kali	323.372.839,00	323.372.839,00	319.949.409,50	100	98,94
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Volume tenaga kontrak yang terbayar; 480 OB	708.000.000,00	690.000.000,00	598.800.000,00	100	86,78
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan; 75 kali	60.000.000,00	60.000.000,00	41.160.000,00	100	68,6

12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Persentase canang dan bebanten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura Sad Khayangan; 100%	56.200.000,00	36.200.000,00	35.440.000,00	100	97,9
13	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan; 100%	50.812.000,00	50.812.000,00	44.423.750,00	100	87,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara; 3 unit	102.533.730,00	90.000.000,00	76.854.000,00	100	85,39
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara; 100%	32.800.000,00	22.800.000,00	18.078.000,00	100	79,29
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 20 unit	210.000.000,00	210.000.000,00	172.342.665,00	100	82,07
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	0	51.425.300,00	47.930.000,00	100	93,2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD dan Laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu; 65 buku	42.226.000,00	42.226.000,00	37.252.750,00	100	88,22
Program pengembangan data/informasi							
1	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku profile daerah Kabupaten Karangasem dan buku sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang tersusun; 120 buku	162.360.000,00	184.128.394,00	179.833.970,00	100	97,67
2	Monitoring dan evaluasi program CBD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi CBD yang tersusun; 20 buku	137.970.000,00	133.111.200,00	127.317.350,00	100	95,65
3	Pengembangan Program Sistem Perencanaan	Workshop SIMDA Perencanaan;50 OPD	183.380.000,00	125.196.500,00	108.099.600,00	100	86,34
4	Kajian Akademis Dasar Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Aktivitas Aktivitas baru yang belum	Tersusunnya Kajian Dasar Retribusi Daerah ; 10 Buku	115.451.000,00	115.451.000,00	103.674.150,00	100	89,8
Program pengembangan wawasan kebangsaan							
1	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Frekuensi perayaan hari-hari besar nasional dan daerah; 2 kali	70.000.000,00	33.574.700,00	26.100.000,00	100	77,74

Program perencanaan pembangunan daerah							
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun; 480 buku	289.806.400,00	289.806.400,00	248.068.510,00	100	85,6
2	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun; 90 buku	83.736.100,00	83.736.100,00	66.527.300,00	100	79,45
3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan hasil evaluasi TA. 2019, laporan hasil evaluasi dan monitoring tahun 2018, buku TW I, II dan III 2018 yang tersusun; 150 buku	118.370.000,00	111.429.150,00	89.795.750,00	100	80,59
4	Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS	Laporan hasil evaluasi TA. 2019, laporan hasil evaluasi dan monitoring tahun 2018, buku TW I, II dan III 2018 yang tersusun; 150 buku	114.440.000,00	139.146.859,00	117.159.650,00	100	84,2

5	Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah buku laporan akhir DAK tahun 2019 dan jumlah buku laporan DAK per triwulan; 30 buku, Frekuensi rapat DAK; 3 kali	72.670.000,00	87.670.000,00	80.221.490,00	100	91,5
6	Pengkajian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem	Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem; 12 bulan	373.654.970,00	373.654.970,00	336.401.024,00	100	90,03
7	Penyusunan Perubahan RPJMD	Dokumen Perubahan RPJMD kabupaten karangasem; 100 buku	700.000.000,00	700.000.000,00	571.795.400,00	99	81,69
8	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	dokumen Perencanaan Kelitbangan; 1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	87.110.745,00	100	87,11
Program perencanaan pembangunan ekonomi							
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Kelautan dan Perikanan Ketahanan Pangan	Jumlah buku Perencanaan pembangunan Pertanian Kelautan dan Perikanan Katahanan Pangan ; 10 buku	282.238.100,00	27.649.190,00	26.831.140,00	100	97,04

2	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah buku ekonomi makro daerah yang tersusun; 70 buku	60.155.000,00	53.205.000,00	46.410.900,00	100	87,23
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Penanaman Modal Pariwisata	Jumlah buku perencanaan pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Pariwisata ; 15 buku	69.860.000,00	72.860.000,00	68.601.620,00	100	94,16
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah buku Perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan dan Energi Sumber daya Mineral ; 10 buku	47.095.200,00	39.901.100,00	38.952.400,00	100	97,62
Program perencanaan sosial dan budaya							
1	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsi	Jumlah cetak buku hasil perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip daerah; 15 buku	133.143.700,00	94.143.700,00	91.156.880,00	100	96,83

2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, p	Jumlah buku hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB ; 40 buku	53.785.000,00	53.785.000,00	51.729.820,00	100	96,18
3	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah cetak buku LP2KD dan rapat koordinasi kemiskinan; 33 buku	103.429.100,00	97.429.100,00	87.333.830,00	100	89,64
4	Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan	Jumlah buku laporan koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP; 15 buku	44.860.000,00	44.860.000,00	40.774.770,00	100	90,89
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam							

1	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah PU dan Tata Ruang dan Pertanahan	Laporan Akhir Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan penataan ruang dan pertanahan dokumen RPIJM 2019-2023; 25 buku dn 10 buku	254.270.000,00	247.270.000,00	237.686.530,00	100	96,12
2	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perumahan Permukiman dan Pemadam Kebakaran	Laporan Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran;25 buku dan 25 buku	119.600.000,00	106.545.000,00	96.521.000,00	100	90,59
3	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Komunikasi dan Informasi, Perhubungan	Laporan Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan;30 buku	84.050.000,00	64.310.000,00	59.144.430,00	100	91,97
Program Kerjasama Pembangunan							

1	Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek	Jumlah proposal lomba ristek yang diikuti;10 proposal, Jumlah dokumen kajian penguatan pengelolaan manajemen des inovatif	193.495.000,00	193.495.000,00	184.280.250,00	100	95,24
Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Pegawai	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan PNS Baperlitbangda Kab. Karangasem; 100%	4.119.362.726,94	4.204.448.869,39	4.134.468.565,00	100	98,34
JUMLAH			9.964.820.065,94	9.645.336.571,39	8.905.451.312,50	99,93	92,33
SKPD : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung							
1	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.064.066.442,22	2.925.163.179,49	2.907.884.920,00	100	99,41
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Terpenuhinya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.141.554.000,00	1.339.900.000,00	1.294.900.000,00	100	96,64
Pelayanan Administrasi Perkantoran							

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat-menyurat tepat waktu	9.500.000,00	9.500.000,00	3.235.000,00	100	34,05
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Telp/Fax, jaringan internet air dan listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	66.032.656,00	100	77,69
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya Perpanjangan STNK Roda 4 dan Roda 2	12.000.000,00	8.000.000,00	5.066.700,00	100	63,33
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan pembersih, peralatan kebersihan & terbayarnya jasa tenaga cleaning service	34.608.900,00	34.608.900,00	33.742.600,00	100	97,5
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	23.504.600,00	100	67,16
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	25.000.715,00	25.000.715,00	20.837.500,00	100	83,35
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	12.170.200,00	12.170.200,00	11.904.700,00	100	97,82
8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.500.000,00	9.500.000,00	7.363.200,00	100	77,51

9	Penyediaan makanan & minuman	Tersedianya makanan dan minuman	72.803.400,00	40.430.500,00	29.839.500,00	100	73,8
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	137.500.000,00	132.396.281,00	100	96,29
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya Jasa tenaga kerja non PNS	211.800.000,00	190.500.000,00	174.100.000,00	100	91,39
12	Penyediaan biaya canang, Bebanten/Piodalan	Terselenggaranya upacara keagamaan dan piodalan	38.000.000,00	38.000.000,00	37.730.000,00	100	99,29
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	35.886.306,00	42.186.306,00	40.570.000,00	100	96,17
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor pada BKPSDM Kab. Karangasem	60.000.000,00	133.297.400,00	119.385.200,00	100	89,56
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor BKPSDM	50.000.000,00	50.000.000,00	49.038.600,00	100	98,08
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	120.600.000,00	130.600.000,00	125.068.933,00	100	95,76
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	42.800.000,00	42.800.000,00	39.124.500,00	100	91,41

5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BKPSDM	135.000.000,00	135.000.000,00	132.804.000,00	100	98,37
Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Perayaan hari-hari Nasional dan Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan hari-hari nasional dan daerah	80.000.000,00	63.000.000,00	40.708.000,00	100	64,62
Pendidikan Kedinasan							
1	Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural yang Lulus dan Bersertifikat	1.223.667.090,00	1.138.367.090,00	1.115.928.588,00	100	98,03
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							
1	Diklat Teknis,Fungsional dan Kepemimpinan	Persentase Terpenuhiya Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	400.000.000,00	350.000.000,00	335.976.822,00	100	95,99
2	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Meningkatnya Kemampuan CPNS	2.000.086.410,00	2.019.486.410,00	1.971.371.410,00	100	97,62
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS atau PPPK	Persentase Terpenuhiya peserta yang lulus tes seleksi Penerimaan Calon PNS atau PPPK	407.995.910,00	263.536.839,00	110.812.710,00	75	42,05

2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase Terpenuhinya SK Kenaikan Pangkat PNS yang dapat diselesaikan	76.640.700,00	56.607.825,00	53.445.019,00	100	94,41
3	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Persentase terpenuhinya PNS/Aparatur yang Mendapat Penghargaan SLKS	25.471.500,00	18.468.500,00	16.807.580,00	100	91,01
4	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	20.776.454,00	20.776.454,00	10.162.894,00	100	48,92
5	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Persentase terpenuhinya buku laporan monitoring di Bidang Kepegawaian	34.590.600,00	34.590.600,00	26.040.250,00	100	75,28
6	Pengelolaan, Pendataan Pelayanan dan Penyusun data/informasi kepegawaian	Persentase terpenuhinya buku data informasi kepegawaian	26.143.508,00	30.320.708,00	28.548.800,00	100	94,16
7	Pengambilan sumpah dan janji pegawai dan Penyerahan SK PNS	Persentase terpenuhinya Aparatur yang diambil Sumpah Janji dan Penyerahan SK PNS	21.305.600,00	0	0	0	0

8	Penataan Sistem Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Persentase terpenuhinya Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu), Kartu Istri (Karis)	29.700.973,00	27.116.773,00	26.100.400,00	100	96,25
9	Penempatan PNS	Persentase terpenuhinya Penempatan PNS yang dapat terselesaikan	720.383.599,00	822.173.199,00	683.031.689,00	100	83,08
10	Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian	persentase terpenuhinya Aparatur yang mengikuti Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian	69.251.700,00	69.251.700,00	55.349.762,00	100	79,93
11	Pembinaan KORPRI	Persentase Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	89.221.200,00	58.833.700,00	39.844.700,00	100	67,72
12	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Persentase terpenuhinya Penyelesaian SK Pensiun PNS	75.667.337,00	75.022.337,00	70.473.950,00	100	93,94

13	pembinaan penyusunan dan pelaporan data kepegawaian	Persentase Terpenuhinya Buku Laporan Data Kepegawaian Semesteran (Semester I dan Semester II)	20.120.000,00	18.527.000,00	16.890.400,00	100	91,17
14	penataan sistem pengurusan konversi NIP dan Kartu PNS elektrik	Persentase Usul Konversi NIP dan KPE yang diproses dan didistribusikan	33.435.898,00	33.435.898,00	32.377.000,00	100	96,83
15	Penataan sistem penyimpanan dan pengelolaan serta peningkatan sarana dan prasarana arsip kepegawaian	Persentase Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian yang disimpan dan dikelola	64.788.500,00	49.048.500,00	29.284.670,00	100	59,71
16	Penyusunan Kebutuhan ASN	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan ASN	82.210.600,00	57.229.600,00	17.661.500,00	100	30,86
17	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS	80.000.000,00	280.000.000,00	257.088.700,00	100	91,82
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan serta Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja OPD	17.139.000,00	14.752.800,00	13.520.400,00	100	91,65

2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang berbasis akrual	14.401.400,00	11.126.400,00	9.364.300,00	100	84,16
JUMLAH			10.908.287.942,22	10.935.829.533,49	10.215.318.434,00	99,4	93,41
Sekretariat DPRD							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.000.000,00	385.000.000,00	310.158.046,00	100	80,56
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	467.600.000,00	467.600.000,00	433.147.400,00	100	92,63
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bakar Gas	5.500.000,00	5.500.000,00	3.240.000,00	80	58,91
4	Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya Upah Tenaga teknis sesuai kebutuhan	1.111.800.000,00	1.111.800.000,00	1.085.400.000,00	100	97,63
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	98.667.163,00	98.667.163,00	66.555.500,00	90	67,45
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	21.600.000,00	21.600.000,00	17.425.500,00	90	80,67

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.778.000,00	100	98,89
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan	3.050.000,00	3.050.000,00	2.469.000,00	100	80,95
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Raker dan Konsultasi Dalam Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	43.400.000,00	80	76,14
10	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Terselenggaranya Banten Piodalan, Galungan, Kuningan, Kesanga, Purnama, Tilem dan Persembahyangan Sehari-hari	79.456.000,00	87.456.000,00	77.063.500,00	90	88,12
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Raker dan Konsultasi Luar Daerah	170.000.000,00	200.000.000,00	186.603.736,00	100	93,3
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	11.600.000,00	11.600.000,00	6.358.000,00	80	54,81
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	574.250.000,00	599.250.000,00	466.530.400,00	80	77,85
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	115.998.800,00	115.998.800,00	90.430.273,00	90	77,96

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	490.000.000,00	490.000.000,00	400.305.100,00	90	81,69
3	Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/Dokumen	Terlaksananya pengelolaan data pegawai dan penataan arsip/ dokumen	52.711.800,00	52.711.800,00	44.800.000,00	90	84,99
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	13.365.000,00	100	44,55
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1.684.400.000,00	1.544.400.000,00	1.219.437.763,72	90	78,96
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	28.269.300,00	261.990.300,00	239.868.200,00	100	91,56
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	206.860.000,00	309.635.000,00	272.688.000,00	100	88,07
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	386.000.000,00	386.000.000,00	249.117.550,00	100	64,54
9	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	91.550.000,00	135.724.200,00	121.149.700,00	100	89,26
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	100.000.000,00	50.000.000,00	49.553.554,00	100	99,11
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	25.833.200,00	25.833.200,00	12.148.300,00	100	47,03
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek dan mendapatkan tambahan wawasan	7.714.292.600,00	6.964.292.600,00	4.650.894.590,00	90	66,78
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	1.011.770.100,00	603.716.451,10	200.103.800,00	90	33,15
3	Perawatan dan Pengobatan serta Check-Up	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up	157.221.900,00	60.521.900,00	14.297.100,00	80	23,62
4	Publikasi dan Interaksi Media	Terhimpunnya Dokumentasi Kegiatan	805.879.125,00	805.879.125,00	592.002.250,00	90	73,46
5	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Keputusan dewan yang dihasilkan	517.133.900,00	517.133.900,00	365.829.200,00	100	70,74
6	Rapat-rapat Paripurna	Terselenggaranya rapat paripurna pelantikan	398.408.600,00	398.408.600,00	236.295.750,00	90	59,31

7	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan	280.784.800,00	280.784.800,00	173.551.000,00	90	61,81
8	Peningkatan Penataan Administrasi Keuangan DPRD	Tertatanya Administrasi Keuangan	75.240.300,00	75.240.300,00	43.421.000,00	80	57,71
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja luar daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	18.381.734.800,00	22.974.484.900,00	22.811.997.974,00	100	99,29
10	Peliputan dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah kegiatan DPRD yang diliput dan diinformasikan	934.912.400,00	979.112.400,00	859.406.550,00	100	87,77
11	Kegiatan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses dan menyerap aspirasi	1.659.512.500,00	3.114.428.000,00	2.726.895.000,00	100	87,56
12	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah yang direncanakan dalam PROLEGDA, jumlah Perda Inisiatif DPRD dan Rata-rata jumlah bulan penyelesaian pembahasan perda	7.965.790.000,00	9.565.534.000,00	8.729.698.387,00	100	91,26

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN							
1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	75.673.000,00	78.173.000,00	45.977.240,00	90	58,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Terbayarnya Gaji 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD	27.525.563.900,00	28.593.542.251,00	28.407.538.709,00	100	99,35
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji PNS Sekretariat DPRD	4.553.151.303,68	4.473.708.416,16	4.172.968.518,00	100	93,28
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas sesuai jumlah yang dibutuhkan	1.434.121.000,00	1.434.121.000,00	1.267.202.038,00	100	88,36
JUMLAH			79.708.336.491,68	87.389.898.106,26	80.729.071.628,72	98,49	92,38
Inspektorat Daerah							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	
			DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung							

1	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	2.825.972.149,62	3.263.211.907,80	3.225.366.177,00	100	98,84
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Tepenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	2.564.100.000,00	2.413.162.551,50	2.404.200.000,00	100	99,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi tepat waktu (12 bulan)	9.900.000,00	9.900.000,00	7.039.000,00	100	71,1
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu (12 bulan)	80.000.000,00	80.000.000,00	61.969.797,00	95	77,46
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (18 unit)	150.250.000,00	188.562.256,10	183.889.497,00	100	97,52
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	17.500.000,00	17.500.000,00	14.642.650,00	95	83,67
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	19.800.000,00	19.800.000,00	19.621.000,00	100	99,1

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100	100
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	11.000.000,00	11.000.000,00	10.908.500,00	100	99,17
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	15.500.400,00	15.500.400,00	12.592.800,00	95	81,24
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	29.000.000,00	29.000.000,00	28.150.000,00	100	97,07
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana (12 bulan)	100.000.000,00	140.500.000,00	139.953.500,00	100	99,61

11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah pegawai non PNS yang terbayarkan upah kerjanya tepat waktu (7 orang)	106.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	100	100
12	Penyediaan Biaya Canang, Bebanen Piodalan	Jumlah bebanen, canang dan bebanen piodalan yang tersedia dalam 1 tahun (12 bulan)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.946.000,00	100	99,87
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana (12 bulan)	40.000.000,00	49.000.000,00	47.930.000,00	100	97,82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun (12 bulan)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.425.304,32	100	99,57
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun	43.860.000,00	43.860.000,00	41.085.000,00	100	93,67
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam 1 tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	33.462.000,00	100	95,61
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							

1	Perayaan Hari-Hari Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar nasional dan pameran yang terselenggara dengan baik (1 kali)	60.000.000,00	27.500.000,00	26.060.000,00	100	94,76
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							
1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (2 laporan/2 semester)	105.343.356,13	105.343.356,13	103.445.795,00	100	98,2
2	Pengawasan Fungsional (Reguler)	Jumlah LHP Fungsional/Reguler yang diterbitkan (60 LHP)	188.950.400,00	171.650.400,00	168.596.850,00	100	98,22
3	Pelaksanaan Inspeksi Mendadak/Sidak	Jumlah inspeksi mendadak/sidak yang dilaksanakan dalam 1 tahun	93.079.700,00	93.079.700,00	89.737.300,00	100	96,41
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							
1	Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah OPD yang LAKIPnya dievaluasi (32 OPD)	81.794.300,00	61.475.600,00	52.973.150,00	100	86,17
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Jumlah OPD yang laporan keuangan tahun 2016 yang direviu (40 OPD)	101.194.552,00	104.194.552,00	99.860.450,00	100	95,84
3	Peningkatan Kompetensi APIP dan Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah PKS yang terlaksana 36 kali	254.690.760,00	254.690.760,00	235.803.200,00	100	92,58
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan							

1	Pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P),LHKPN dan LHKASN Kabupaten Karangasem	Jumlah laporan LP2P ,LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemkab. Karangasem (3 Laporan)	67.181.820,00	47.149.600,00	45.434.560,00	100	96,36
2	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karangasem	Jumlah peserta Bimtek SPIP (51 orang)	228.549.500,00	240.049.500,00	221.321.095,00	100	92,2
3	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D)	Tercapainya level III SPIP dan terbentuknya WBK dan WBBM	40.712.540,00	28.519.100,00	19.088.000,00	95	66,93
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
1	Penanganan Pemeriksaan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti oleh APIP (15 kasus)	63.105.000,00	21.207.700,00	19.125.000,00	100	90,18
2	Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kab. Karangasem	Unit Satgas Saber Pungli berjalan dengan baik	115.990.971,87	55.990.971,87	54.689.400,00	100	97,68
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan (1 Laporan Kinerja dan 1 Laporan Keuangan)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.603.500,00	100	96,04
JUMLAH			7.522.675.449,62	7.707.048.355,40	7.546.619.525,32	99,91	97,92

Tabel 2. 174
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.646.069.010.529,28	1.624.330.234.621,80	(21.738.775.907,48)	98,68
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	220.797.328.354,22	233.013.034.998,75	12.215.706.644,53	105,53
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.765.710.571,00	108.373.667.756,32	16.607.957.185,32	118,10
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.200.916.900,00	13.046.347.757,00	(3.154.569.143,00)	80,53
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.055.640.529,00	11.633.177.239,01	577.536.710,01	105,22
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.775.060.354,22	99.959.842.246,42	(1.815.218.107,80)	98,22
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.264.985.494.683,06	1.232.576.603.617,81	(32.408.891.065,25)	97,44
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.015.950.662.720,00	987.507.077.752,00	(28.443.584.968,00)	97,20
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	20.305.620.000,00	14.302.086.354,00	(6.003.533.646,00)	70,43
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.688.207.000,00	1.354.971.323,00	(333.235.677,00)	80,26
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	771.789.284.000,00	771.789.284.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	222.167.551.720,00	200.060.736.075,00	(22.106.815.645,00)	90,05
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	110.032.889.000,00	110.032.889.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	110.032.889.000,00	110.032.889.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	139.001.942.963,06	135.036.636.865,81	(3.965.306.097,25)	97,15
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	139.001.942.963,06	135.036.636.865,81	(3.965.306.097,25)	97,15
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	160.286.187.492,00	158.740.596.005,24	(1.545.591.486,76)	99,04

1.3.1	Pendapatan Hibah		58.492.065.407,00	61.367.509.758,78	2.875.444.351,78	104,92
1.3.3	Pendapatan Lainnya		101.794.122.085,00	97.373.086.246,46	(4.421.035.838,54)	95,66
2	BELANJA		1.760.500.163.661,78	1.635.821.925.442,27	(124.678.238.219,51)	92,92
2.1	BELANJA OPERASI		1.533.621.111.478,33	1.470.023.413.597,40	(63.597.697.880,93)	95,85
2.1.1	Belanja Pegawai		767.945.734.200,36	757.619.678.646,13	(10.326.055.554,23)	98,66
2.1.2	Belanja Barang		547.673.262.145,97	495.846.044.749,86	(51.827.217.396,11)	90,54
2.1.3	Belanja Bunga		100.000.000,00	13.463.551,41	(86.536.448,59)	13,46
2.1.5	Belanja Hibah		15.201.400.000,00	14.763.150.000,00	(438.250.000,00)	97,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		23.250.000.000,00	22.591.164.466,00	(658.835.534,00)	97,17
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		179.450.715.132,00	179.189.912.184,00	(260.802.948,00)	99,85
2.2	BELANJA MODAL		211.348.590.612,22	152.232.672.539,85	(59.115.918.072,37)	72,03
2.2.1	Belanja Tanah		250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		38.781.529.138,30	30.446.009.088,90	(8.335.520.049,40)	78,51
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung		50.230.367.805,00	36.931.093.067,21	(13.299.274.737,79)	73,52
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		109.281.610.683,28	72.969.076.900,02	(36.312.533.783,26)	66,77
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		12.805.082.985,64	11.886.493.483,72	(918.589.501,92)	92,83
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER		14.030.461.571,23	13.565.839.305,02	(464.622.266,21)	96,69
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA		14.030.461.571,23	13.565.839.305,02	(464.622.266,21)	96,69
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak		12.128.631.394,23	12.128.631.388,22	(6,01)	100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi		1.901.830.177,00	1.437.207.916,80	(464.622.260,20)	75,57
		SURPLUS / (DEFISIT)	(114.431.153.132,50)	(11.491.690.820,47)	102.939.462.312,03	10,04
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH		120.826.153.132,50	120.841.876.092,64	15.722.960,14	100,01
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		120.826.153.132,50	120.826.153.367,64	235,14	100,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	15.722.725,00	15.722.725,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH		6.395.000.000,00	6.380.872.917,64	(14.127.082,36)	99,78

3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	145.000.000,00	130.872.917,64	(14.127.082,36)	90,26
	PEMBIAYAAN NETTO	114.431.153.132,50	114.461.003.175,00	29.850.042,50	100,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	102.969.312.354,53	102.969.312.354,53	0,00

Sumber : LRA Tahun 2019

2.2.2 Realisasi RPJMD

Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2019 mengacu pada target Pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan capaian urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel 2.175.

Tabel 2. 175
 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Capaian Urusan Pemerintahan Daerah
 Sampai Dengan Tahun 2019

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2016)	Capaian 2019	Target 2020	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
I.	Aspek Kesejahteraan Rakyat					
I.A.	Aspek Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	%	5,81	5,97	6,03	6,09
2	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Jutaan Rupiah per tahun	31,81	44,44	49,74	54,95
3	PDRB ADHK Per Kapita	Rupiah	21,72	26,97	28,46	29,64
4	Persentase Penduduk Miskin	%	6,88	6,09	5,94	5,75
5	Index Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,01	66,15	66,87	67,61
6	Koefisien Gini (Indeks Gini)	Angka	0,3089	0,3393	0,3393	0,3393
7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase (%)	6,88	6,09	5,94	5,75
8	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yaitu:					
	40% Bawah	Persentase (%)	26,4	21,84	22,25	23,32
	40% Sedang	Persentase (%)	37,16	37,95	37,6	37,5
	20% Tinggi	Persentase (%)	36,43	40,21	40,15	39,18
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Persentase (%)	6,88	6,35	6,25	6,00
I.B	Kesejahteraan Sosial					
I.B1.	Pendidikan					
1	Persentase APK SD / MI	%	100,56	100,56	100,56	100,56
2	Persentase APM SD/MI	%	79,47	86	90	97
3	Persentase APK SMP /MTs	%	97,38	97,44	97,46	97,48
4	Persentase APM SMP /MTs	%	74,97	75,04	75,06	75,08
5	Persentase Kelulusan SD/MI Paket A	%	100	100	100	100
6	Persentase Kelulusan SMP/MTs Paket B	%	100	100	100	100
I.B2	Kesehatan					
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	angka	95	90	90	
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	angka	12	8	8	8
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	angka	12	8	8	8
4	Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	100	100	100	100

5	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	80	80	80	80
6	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100
7	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100
8	Persentase Sembuh Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	80	80	80	80
9	Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Akseptor KB (%)	%	70	70	75	75
10	Persentase Lansia Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	70	70	70	70
28	Angka Kesakitan Demam Berdarah	angka	193	145	140	130
29	Persentase Prevalensi HIV/AIDS	%	0,03	<0,6	<0,5	<0,5
30	Persentase Pasien Yang Dikonseling Mau Dites HIV	%	97	98	98	98
31	Angka Kesakitan Malaria	Per 100.000 penduduk	0,002	< 2	< 1	< 1
32	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+	angka	84	87	88	90
33	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb	%	88	89	89	90
34	Menurunnya Prevalensi Gula Darah Tinggi	%	6,53	6,4	6,27	100
35	Mempertahankan Prevalensi Obesitas	%	15,4	15,4	15,4	100
36	Proporsi Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan POSBINDU PTM	%	20	40	50	100
37	Proporsi Perempuan Usia 30-50 Th Terdeteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	%	20	40	50	100
38	Tertanganinya Kasus Campak Dan Lumpuh Layuh (AFP) Anak Usia <15 Th	%	100	100	100	100
39	Tertanganinya Desa Yang Mengalami Kejadian Luar Biasa	%	100	100	100	100
40	Tertanganinya Kasus JE di Seluruh Kab. Karangasem	%	100	100	100	100
41	Persentase Rumah Sehat	%	85	88	89	90

42	Persentase Tempat Umum Sehat (%)	%	94	80	83	83
43	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	%	88	94	96	100
44	Persentase Kualitas Air Minum Di Penyelenggara Yang Memenuhi Syarat	%	53	80	89	100
45	Jumlah Desa STBM (Satuan Indikator : Desa)	Desa	69	78	78	78
46	Persentase Penduduk Dengan Fasilitas Sanitasi Layak (%)	%	73	88	93	100
47	Persentase TPM Yang Memenuhi Syarat	%	15	28	30	32
48	Persentase RS Dan FASYANKES Yang Mengelola Limbah Medis	%	0	28	36	40
49	Tatanan Kota Sehat (Satuan Indikator: Tatanan)	Tatanan	0	2	3	5
50	Persentase Puskesmas Yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	%	80	95	98	100
51	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pencatatan Dan Pelaporan Melalui SIK	%	83	95	100	100
52	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Program SIK Puskesmas	%	100	100	100	100
53	Jumlah Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kemampuannya Melalui Pelatihan	Orang	30	60	90	90
54	Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat	%	69	78	80	82
55	Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif	%	50	62	62	64
56	Persentase Posyandu Aktif	%	47	53	55	60
57	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	25	40	45	55
58	Persentase Penggunaan Obat Rasional Di Puskesmas	%	68,9	74	76	78
59	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	%	80	90	95	96
60	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	%	0	25	33,33	100
61	Jumlah Pos UKK Yang Terbentuk Di Daerah PPI/TPI	POS UKK	0	1	1	4

62	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olah Raga Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	%	0	25	33,33	100%
63	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Puskesmas	12	12	12	12
64	Jumlah Puskesmas Yang Telah Melaksanakan Manajemen Puskesmas	Puskesmas	0	8	12	12
65	Jumlah Puskesmas Rawat Jalan Dan Rawat Inap Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Puskesmas	12	12	12	12
66	Jumlah Puskesmas Yang Siap Akreditasi	Puskesmas	0	4	8	12
67	Persentase Battra Yang Dibina	%	5	25	35	50
68	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer	%	15	60	75	100
I.B3	Kemiskinan					
1	Garis Kemiskinan	Rupiah Per bulan	248.379	278.379	288.379	298.379
2	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	27.800	24.800	23.800	22.800
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,98	0,92	0,9	0,89
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,2	0,19	0,18	0,18
I.B4	Kesempatan Kerja					
1	Jumlah Peminat Magang Di Dalam Dan Luar Negeri	Orang	376	20	20	20
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikasi	Orang	742	112	112	112
3	Jumlah LPKS Dan Kelompok Usaha Produktif Yang Meningkatkan Kompetisinya	LPSK	21	32	32	32
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	90	100	Tetap	Tetap
5	Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek	%	42	44	Tetap	Tetap
6	Besaran Upah Minimum Kabupaten	Rp.	1.700.000	2.335.500	2.592.000	2.877.500
II	Aspek Pelayanan Umum					
II.A1	Kesehatan					

1	Persentase Posyandu Lansia Aktif	%	100	100	100	100
2	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kes. Anak Usia Sekolah	%	100	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Lomba Dokter Kecil	%	100	100	100	100
4	Persentase Kader Kesehatan Remaja Aktif	%	100	100	100	100
5	Jumlah Penduduk Peserta JKBM	Orang	303.625	0	0	0
6	Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Orang	153.014	502.303	552.533	668.565
7	Persentase Bumil Kek Mendapat Makanan Tambahan	%	13	75	85	95
8	Persentase Bumil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet	%	82	95	98	100
9	Persentase Bayi Usiakuran Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	%	38	47	50	100
10	Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	100
11	Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	%	10	40	50	60
12	Persentase Ibu Hamil Menderita KEK	%	10	9	9	9
13	Persentase Balita Kurang Gizi	%	13	12	11,5	10
14	Persentase Balita Ditimbang (D/S)	%	82	85	85	85
15	Persentase Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beryodium	%	70	82	83	85
16	Persentase Balita Mendapat Vit. A Dosis Tinggi	%	90	97	98	99
17	Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100
II.A2	Pelayanan Rumah Sakit Umum					
1.00	Persentase Peningkatan Jenis Pelayanan Yang Memenuhi Standar Akreditasi Pemerintah	%	60	80	90	90
2.00	Persentase Peningkatan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	%	75	90	95	100

3.00	Persentase Peningkatan Keandalan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	%	80	95	100	100
II.A3	Lingkungan Hidup					
1.00	Persentase penanganan sampah	%	82,03	95	100	100
2.00	Jumlah sumber-sumber air dan sungai yang dijaga kelestariannya	Sumber air	11	23	29	36
3.00	Jumlah tokoh masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga Pemerintah/ Lembaga Adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang	84	18	18	169
II.A4	Penataan Ruang					
1	Jumlah Dokumen Teknis Rancangan Perda Tata Ruang	Dokumen	2	4	5	6
II.A5	PERHUBUNGAN Dan Pemadam Kebakaran					
1	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang dalam kondisi mantap	titik		470	300	1070
2	Persentase Terpeliharanya Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	%	75	90	95	100
3	Persentase layanan angkutan darat	%		23	24	25
4	Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal	Orang		147.404	147.904	443.712
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi		4	4	4
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	Lokasi		1	1	3
7	Persentase Pemasangan rambu-rambu	%		0,3	2,17	13,78
8	Persentase Angkutan Darat Yang Beroperasi Dalam Keadaan Laik Jalan	%	75	100	100	100
9	Response Time 15 Menit Pemadam Kebakaran Sampai ditujuan	Km	10	15	15	15
10	Persentase Kasus Kebakaran Yang Ditangani	%	98	100	100	100
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%		100	100	100
II.B	Pelayanan Penunjang					
II.B1	Industri Dan Perdagangan					

1	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dengan Perkembangan Tertib Usaha Perdagangan	%	11,46	14	15	16
2	Persentase Produk Industri Dan Dagang Yang Berkembang	%	3,16	3,68	4,12	4,61
3	Persentase Pertumbuhan IKM	%	1,26	2,1	2,2	2,3
II.B2	Ketenagakerjaan					
1	Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan Yang Terdata	Orang	75	50	50	50
2	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	358	300	300	300
3	Banyaknya Penganggur Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Orang	134	20	20	20
4	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	-	20	20	20
II.B3	Pemberdayaan Perempuan Dan KB					
1	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	10	30	35	40
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsive Gender	%	50	70	80	85
3	Persentase Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	%	89	95	97	100
4	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	%	49,29	54,81	56,92	58,74
5	Persentase Partisipasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100
6	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menjadi Peserta KB Aktif	%	78,65	79,98	80,09	80,16
7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/Cpr)	%	73,18	74,26	74,51	74,82
8	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif	%	30,29	36,96	38,23	38,87
9	Persentase Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Yang Aktif	%	25,64	36,84	40,23	44,56

10	Persentase Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif	%	29,83	36,78	37,23	38,84
11	Persentase Pengembangan Informasi Dan Data Mikro Kependudukan Dan Keluarga	%	95	98	99	100
II.B4	Komunikasi Dan Informatika					
1	Persentase SKPD Dan Fasilitas Umum Yang Sudah Terkoneksi Jaringan WIFI	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Berbasis Web Pada Setiap SKPD	%	20	50	70	100
3	Tingkat Kepatuhan Pengelola Menara Telekomunikasi Terhadap Regulasi Operasional Menara Telekomunikasi	%	100	100	100	100
II.B5	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1	Bimbingan Teknis Dan Fasilitas Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Desa	75	75	75	75
2	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	75	75	75	75
3	Fasilitas Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Desa	75	75	75	75
II.B6	Keamanan Dan Ketertiban					
1	Persentase Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran PERDA Dan PERGUB	%	75	90	95	100
2	Persentase Keamanan Lingkungan Yang Terkendali	%	100	100	100	100
III	Aspek Daya Saing Daerah					
III.A	Kemampuan Ekonomi Daerah					
1	Angka Konsumsi RT Per Kapita	(Rp) Per Bulan	578.017,82	669.127,88	702.584,27	737.713,49
2	Pengeluaran Makanan	(Rp) Per Bulan	306.465,05	354.771,60	372.510,18	391.135,69
	Pengeluaran Non Makanan	(Rp) Per Bulan	271.552,77	314.356,28	330.074,09	346.577,80
III.B	Pertanian					
1	Jumlah Produksi Padi	Ton	66.398,89	68.410,84	69.094,95	69.785,90
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	11.125	11.462,10	11.576,72	11.692,49
3	Jumlah Produksi kacang Tanah	Ton	4.151,30	4.277,09	4.319,86	4.363,06
4	Jumlah Produksi Kacang Kedelai	Ton	98,95	52,26	55,00	60,00

5	Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	380,12	350,87	355,00	360,00
6	Jumlah Produksi Salak	Ton	29.992	23.594,84	24.000,00	24.500,00
7	Jumlah Produksi Mete	Ton	2.211,09	2.278,09	2.300,87	
8	Jumlah Produksi Kopi	Ton	494,14	352,27	360,00	365,00
9	Jumlah Produksi Pisang	Ton	22.601	19.125,00	20.000,00	22.000,00
10	Jumlah Produksi Nangka	Ton	9.620	9.911,50	10.010,61	10.110,72
11	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	14.319,38	14.753,27	14.900,80	15.049,81
III.C	Peternakan Kelautan Dan Perikanan					
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	500	577,50	580,00	581,00
2	Persentase Kesakitan Ternak Sapi	%	4	3,15	3,10	3,05
3	Persentase Kesakitan Ternak Kambing	%	4	3,35	3,25	3,15
4	Persentase Kesakitan Ternak Babi	%	6	5,15	5,10	5,05
5	Persentase Kesakitan Ternak Unggas	%	6	5,15	5,10	5,05
6	Persentase Kesakitan Hpr	%	0,4	0,2	0,19	0,18
7	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.500	22.000	22.500	23.000
8	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Perikanan	%	100	100	100	100
9	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Ekor	8.789	13.000	13.500	14.000
10	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	121.637	126.000	128.000	130.000
11	Jumlah Populasi Ternak Babi	Ekor	240.000	243.000	244.000	245.000
12	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	18.837	22.000	23.000	24.000
13	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	360.000	363.000	364.000	365.000
14	Jumlah Pematangan Ternak	Ekor	439.000	442.000	443.000	444.000
15	Tingkat Konsumsi Ikan	Indeks	31	31	32	32
16	Jumlah Kelompok/Usaha Pengolahan Hasil Ternak	Kelompok	0	10	13	15

17	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan	Kelompok	0	30	35	40
18	Jumlah Kelompok Yang Mengelola Perluasan Areal Pakan Ternak	Kelompok	0	7	8	9
19	Jumlah Kelompok Pengembangan SPR	Kelompok	0	20	25	30
III.D	Kunjungan Wisatawan					
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	0	15	20	25
III.E	Investasi					
1	Jumlah Investasi Asing (PMA)	US\$	2.531.900	2.608.619	2.634.705	2.661.052
2	Jumlah Investasi Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rp	163.429	168.381	170.065	171.765

Sumber : RPJMD Kab. Karangasem data diolah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaitu :

- 1) Tingginya angka kemiskinan serta rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi oleh masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, tingginya angka mengulang sekolah, tingginya buta aksara, masih adanya stunting, belum optimalnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan masih banyaknya masyarakat yang rentan social serta adanya kemiskinan cultural.
Rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Karangasem ditunjukkan dengan capaian IPM Kabupaten Karangasem yang masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi Bali dan nasional.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan masih rendahnya investasi.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir menunjukkan angka pada kisaran 5 sampai dengan 6 persen. Bahkan pada tahun 2018 mengalami perlambatan akibat bencana erupsi Gunung Agung pada tahun 2017.
Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem belum didukung oleh regulasi yang memadai. Sampai saat ini revisi perda RTRW belum tuntas sebagai salah satu payung hukum di bidang penanaman modal.

- 3) Belum meratanya infrastruktur yang berakibat ketimpangan wilayah.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem setiap tahun terus dibangun khususnya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta kemudahan pergerakan ekonomi. Keterbatasan anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan mengakibatkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem. Pemerintah daerah terus mengupayakan sumber-sumber pembiayaan tidak hanya dari APBD tetapi juga dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya khususnya kerjasama dengan pihak lain melalui dana CSR dan lain sebagainya.
- 4) Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana
Menurunnya kualitas lingkungan yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak hanya karena alih fungsi lahan maupun eksploitasi lahan galian mineral bukan logam, tetapi juga pencemaran lingkungan khususnya akibat sampah plastik serta masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem. Meningkatnya resiko bencana karena Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten yang memiliki resiko bencana ke 92 tertinggi di Indonesia berdasarkan data IRBI, serta kabupaten yang memiliki resiko bencana tertinggi di Provinsi Bali (gunung meletus, tanah longsor dan kebakaran hutan).
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dilihat dari masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, proses administrasi yang berbelit-belit, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih berorientasi pada output bukan hasil dan dampaknya sehingga diperlukan penyederhanaan birokrasi.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi permasalahan pembangunan pada setiap urusan yang menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Adapun permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karangasem sebagaimana tabel 2.176.

Tabel 2.176
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN/PERMASALAHAN		PERANGKAT DAERAH
1	WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN		
	1	Penuntasan Buta Aksara Belum Sepenuhnya di laksanakan secara optimal	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	pemerataan guru yang belum merata dan tepat sasaran sesuai kebutuhan pada masing-masing sekolah serta sarana dan prasarana yang baik belum sepenuhnya dapat diwujudkan	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	belum terkoordinasinya lembaga penyelenggara pendidikan dengan pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	4	Target Pemenuhan Peta Mutu Pendidikan Belum Maksimal, hal ini disebabkan masih banyak sekolah yang belum paham tentang pengisian data standar sarpras masing-masing	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN		
	1	SDM kesehatan dan non kesehatan yang masih kurang	DINAS KESEHATAN
	2	Rendahnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari capaian SPM bidang kesehatan dan kepesertaan JKN mandiri yang masih rendah	DINAS KESEHATAN
	3	Dukungan anggaran dalam hal preventif dan promotif masih kurang	DINAS KESEHATAN
	4	Cara pandang masyarakat dan Pemerintah dalam bidang kesehatan masih menggunakan paradigma sakit	DINAS KESEHATAN
	1	Terbatasnya sarana dan prasaran pelayanan, terutama pembangunan gedung pelayanan dan pengadaan alat kesehatan untuk pengembangan jenis pelayanan	RSUD
	2	Terbatasnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis tertentu, tenaga paramedis dan tenaga yang ahli dibidang akuntansi rumah sakit	RSUD
	3	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang standar prosedur dan tatacara memperoleh pelayanan di RSUD Karangasem	RSUD

3	WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	Potensi sumber daya air tidak merata antar wilayah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	Meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai kepentingan (pertanian, permukiman dan pariwisata);	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	3	Terjadinya kerusakan pada alur sungai serta jaringan irigasi sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	4	Terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam fasilitas umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	5	Pembangunan jalan baru belum dibangun secara maksimal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	6	Kemampuan jalan masih terbatas, untuk di beberapa ruas jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	7	Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	8	Target cakupan pelayanan air bersih baik di perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi akibat terbatasnya sumber air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	9	Pengolahan air baku menjadi air bersih terkendala biaya yang sangat mahal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	10	Belum optimalnya pelibatan swasta dalam pengelolaan dan pelayanan air bersih	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	11	Sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan sarana prasarana jalan dan air minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	12	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan di bidang pekerjaan umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	13	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh IMB dan mematuhi peraturan tata ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	14	Terkait terjadinya bencana erupsi Gunung Agung dan curah hujan yang tinggi beberapa infrastruktur seperti jalan yang jebol, sungai dan saluran irigasi mengalami kerusakan sehingga penanganannya perlu bantuan dari pihak pusat untuk membantu penanganannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	Belum sempurnanya basis data perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	Belum seluruhnya wilayah Kabupaten Karangasem tertangani dalam pengelolaan persampahan dan pertamanan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	4	Bertambahnya jumlah penduduk musiman akibat adanya urbanisasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	1	Pembubaran PKI dalam era reformasi cenderung memberikan peluang untuk menghidupkan faham komunis, ditengarai akan memutar balikkan fakta sejarah dan Ketahanan ideologi Pancasila ditengah-tengah gema reformasi yang cenderung liberalis dikhawatirkan akan semakin melemahkan pemahaman & implementasi nilai-nilai Pancasila	KESBANG POL LINMAS
	2	Sifat paternalistik dan primordial dalam kehidupan politik mempersulit proses pendidikan politik rakyat dan memberikan peluang munculnya sikap arogansi individu maupun kelompok.	KESBANG POL LINMAS
	3	Munculnya konflik vertikal, seperti kasus adat, kasus pertanahan yang cenderung bersifat anarkhis merupakan wujud pergeseran tata nilai dalam dinamika kehidupan masyarakat Karangasem	KESBANG POL LINMAS
	4	Tindak kriminal menonjol, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba cukup memprihatinkan,	KESBANG POL LINMAS
	1	Masih adanya pelanggaran Perda / Perkada, baik pelanggaran secara Yustisi maupun Non Yustisi	SAT POL PP
	2	Masih terdapat pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	SAT POL PP
	3	Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	SAT POL PP
	4	Masih rendahnya kompetensi Anggota Perlindungan Masyarakat	SAT POL PP
	1	Penanganan bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan gunung api.	BPBD
	2	Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;	BPBD
	3	Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan	BPBD
	4	Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal / regional sesuai dengan jenis bencana	BPBD
	5	Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana	BPBD
	6	Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor	BPBD
	7	Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES)	BPBD
	8	Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Karangasem yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana	BPBD

	1	Berkembangnya kawasan perumahan, kawasan padat hunian termasuk kawasan kumuh, kawasan pariwisata memerlukan antisipasi pola penanganan berbeda terutama mengenai tindakan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	2	sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang belum mempunyai kompetensi, belum berperan dalam memberikan rekomendasi persyaratan teknis proteksi kebakaran sesuai dengan Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan, Gedung dan Lingkungan.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	3	Belum optimalnya pemenuhan Response Time kejadian kebakaran 15 menit	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	4	Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga apabila pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang baik terhadap cara pencegahan dan antisipasi awal bahaya kebakaran saat terjadi kebakaran, masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemadaman dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	5	Infrastruktur yang belum memadai atau kurang mendukung seperti keberadaan Pos Pemadam Kebakaran, hidran kota/sumur kebakaran/sumber air dan jaringan jalan atau hambatan untuk akses yang harus dilalui untuk menjangkau pelayanan pemadaman kebakaran.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	6	Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, baik secara kuantitas maupun kualitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
6	WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL		
	1	Masih tingginya jumlah anak terlantar, fakir miskin, lansia terlantar dan penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi	DINAS SOSIAL
	2	Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan	DINAS SOSIAL
	3	Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi terkait dan stakeholder lainnya	DINAS SOSIAL
	4	Dunia usaha belum sepenuhnya mengakomodasi bagi tenaga kerja dan PMKS	DINAS SOSIAL
	5	Beredarnya obat terlarang, narkotika yang semakin luas	DINAS SOSIAL
	6	Belum maksimalnya kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
	7	Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik sebagai akibat dari pengaruh globalisasi	DINAS SOSIAL
7	WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA		
	1	Lapangan pekerjaan semakin terbatas	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	Tingginya jumlah pengangguran	DINAS KETENAGAKERJAAN

	3	Minimnya perlindungan hukum tenaga kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
	4	Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten	DINAS KETENAGAKERJAAN
	5	Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah	DINAS KETENAGAKERJAAN
	6	Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi	DINAS KETENAGAKERJAAN
8	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	3	Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	4	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	5	Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	6	Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	7	Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	8	Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN		
	1	Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah konsumen	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2	Belum memadainya infrastruktur dan prasarana	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3	Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien	DINAS KETAHANAN PANGAN
	4	Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya pangan lokal.	DINAS KETAHANAN PANGAN
	5	Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan lokal.	DINAS KETAHANAN PANGAN
	6	Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen atas perlunya pangan yang sehat dan aman	DINAS KETAHANAN PANGAN
	7	Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama	DINAS KETAHANAN PANGAN
	8	Kendala budaya dan kebiasaan makan masyarakat sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga.	DINAS KETAHANAN PANGAN
	9	Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan, terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan	DINAS KETAHANAN PANGAN
	10	Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan pangan dan gizi	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP		
	1	Masih rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi swasta untuk berinventasi dalam pengelolaan dan pengendalian LH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	4	Pengelolaan sampah yang belum maksimal	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	1	Masih banyaknya penduduk pendatang yang tidak melapor di wilayah tempat tinggalnya	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	Masih banyak penduduk pendatang belum memenuhi persyaratan untuk memiliki KTS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	3	Kondisi geografis yang tersebar sering menjadi hambatan dalam pengawasan penertiban penduduk.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	4	Belum tersedianya database kependudukan yang valid	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
12	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	1	Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	Belum terpadunya program antar sektor dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	3	Kondisi prasarana/sarana desa dan TTG belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	4	Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	Masih adanya perempuan yang melahirkan pada usia muda 15 sd 19 tahun	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN		
	1	Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung pemerataan pembangunan di bidang Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	Rendahnya penggunaan angkutan umum	DINAS PERHUBUNGAN
	3	Meningkatnya kecelakaan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
15	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	1	Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	3	Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
	1	Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

	2	Tidak semuanya Koperasi yang dapat melaksanakan RAT	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	3	Rendahnya penguasaan manajemen bagi pengelola koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	4	Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	5	Masih adanya permodalan dalam tahap musyawarah	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	6	Belum optimalnya peran klinik UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	7	Belum optimalnya pengetahuan kewirausahaan bagi pengelola kelompok UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
17	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL		
	1	Belum optimalnya pelayanan perijinan terkait regulasi rencana tata ruang yang belum selesai	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	Belum semua pelayanan publik terpusat pada pelayanan terpadu satu pintu	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	Sistem elektronik belum berjalan secara optimal dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	1	Kurangnya pembinaan, pelatihan, pendampingan dan kemitraan kegiatan kepemudaan	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	Kurangnya sarana prasarana kepemudaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang meliputi Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	Kurangnya wadah dan kegiatan (wahana) untuk menuangkan minat, bakat, potensi, kreativitas dan inovasi pemuda	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	4	Masih rendahnya partisipasi masyarakat/pelajar dalam melakukan kegiatan olahraga	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	5	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang keolahragaan	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	6	Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	7	Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi SDM bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berprestasi	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	8	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang berstandarisasi	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	9	Minimnya anggaran yang tersedia untuk program/kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana pendukung termasuk anggaran pemeliharaan sarana prasarana	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
19	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN		
	1	Banyaknya kesenian-kesenian langka maupun sakral yang tidak aktif akibat kurangnya dana dan sarana/prasarana pendukung	DINAS KEBUDAYAAN
	2	Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem	DINAS KEBUDAYAAN
	3	Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem	DINAS KEBUDAYAAN
	4	Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya	DINAS KEBUDAYAAN
	5	Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lembaga tradisional/ adat istiadat dan penyuratan awig-awig baik di desa pekraman, sekaa teruna maupun subak	DINAS KEBUDAYAAN
20	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN		
	1	Rendahnya minat baca masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	2	Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	3	Kurangnya adanya regulasi yang mendukung turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	4	Kurangnya komitmen stake holder terhadap perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN

	5	Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	6	Kurangnya respon dari Aparat Desa terkait pengelolaan perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	7	Kurangnya bahan pustaka yang tersedia	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
21	WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN		
	1	Kurangnya adanya regulasi yang mendukung turunan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	2	Kurangnya tenaga pustakawan dan arsiparis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
	3	Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
22	PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	1	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Tangkap	DINAS PERIKANAN
	2	Kurang Optimalnya produksi perikanan, dengan memperhatikan panjang pantai di Kabupaten Karangasem dibanding dengan produksi perikanan	DINAS PERIKANAN
	3	Lemahnya kemampuan dan daya saing kelompok	DINAS PERIKANAN
	4	Terbatasnya sentra-sentra pembudidaya ikan	DINAS PERIKANAN
23	PILIHAN PARIWISATA		
	1	Sumberdaya Pariwisata yang masih minim dalam menunjang kepariwisataan	DINAS PARIWISATA
	2	Minimnya anggaran yang tersedia mengingat tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang padat, diantara bagaimana caranya meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata termasuk juga pembinaan stakeholder pariwisata	DINAS PARIWISATA
	3	Sumberdaya manusia dalam Dinas Pariwisata yang masih minim dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata	DINAS PARIWISATA
24	PILIHAN PERTANIAN		
	1	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	DINAS PERTANIAN
	2	Menurunnya tingkat kesuburan lahan	DINAS PERTANIAN
	3	Terbatasnya ketersediaan air irigasi	DINAS PERTANIAN
	4	Masih rendahnya mutu produk hasil usaha pertanian	DINAS PERTANIAN

	5	Masih tingginya kehilangan hasil	DINAS PERTANIAN
	6	Adanya serangan OPT dan penyakit ternak	DINAS PERTANIAN
	7	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian	DINAS PERTANIAN
	8	Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat	DINAS PERTANIAN
	9	Masih rendahnya kemampuan SDM pertanian	DINAS PERTANIAN
	10	Terbatasnya permodalan dan akses pasar	DINAS PERTANIAN
	11	Masih tingginya fluktuasi harga produk pertanian	DINAS PERTANIAN
25	PILIHAN PERINDUSTRIAN		
	1	Masih kurangnya pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya lokal	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	Masih rendahnya manajemen usaha industri kecil dan menengah dan kerajinan rumah tangga	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	Masih lemahnya aspek daya saing produk industri kecil dan menengah dan kerajinan rumah tangga	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	4	Masih kurangnya kemampuan akses permodalan usaha di sektor industri dan perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	5	Masih tingginya pencemaran limbah akibat industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	6	Masih kurangnya kesadaran untuk mengurus HAKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26	PILIHAN PERDAGANGAN		
	1	Belum optimalnya pembinaan sektor perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	Kondisi pasar masih belum tertata dengan baik	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
	1	Belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima	SETDA
	2	Belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SETDA
	3	Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah	SETDA

	4	Masih belum optimalnya penerapan disiplin dan penegakan hukum	SETDA
	1	Koordinasi yang masih parsial sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik	SEKRETARIAT DPRD
	1	Belum optimalnya kinerja Kecamatan Karangasem dalam memberikan pelayanan publik yang prima	KECAMATAN KARANGASEM
	2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	KECAMATAN KARANGASEM
	3	Tata kelola pemerintahan belum optimal	KECAMATAN KARANGASEM
	1	Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat	KECAMATAN ABANG
	2	Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah	KECAMATAN ABANG
	3	Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan	KECAMATAN ABANG
	4	Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah	KECAMATAN ABANG
	5	Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan	KECAMATAN ABANG
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN KUBU
	2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa	KECAMATAN KUBU
	3	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan	KECAMATAN KUBU
	1	Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang	KECAMATAN BEBANDEM
	2	Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan	KECAMATAN BEBANDEM
	3	Menurunnya penerapan nilai nilai seni dan budaya di masyarakat sebagai akibat dari ancaman kebudayaan luar yang merusak	KECAMATAN BEBANDEM

	4	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Desa sehingga berakibat langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	KECAMATAN BEBANDEM
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN SELAT
	2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa	KECAMATAN SELAT
	3	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan	KECAMATAN SELAT
	1	Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN RENDANG
	2	Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa	KECAMATAN RENDANG
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN SIDEMEN
	2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa	KECAMATAN SIDEMEN
	3	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan	KECAMATAN SIDEMEN
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	KECAMATAN MANGGIS
	2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa	KECAMATAN MANGGIS

	3	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan	KECAMATAN MANGGIS
28	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PENGAWASAN		
	1	belum terpenuhinya 3P (Pembiayaan, Personil, Prasarana), khususnya pembiayaan dan personil untuk pelaksanaan evaluasi AKIP yang kurang, dimana belum bisa untuk dialokasikan untuk semua obrik	INSPEKTORAT DAERAH
	2	kurangnya pemahaman dari masing-masing Perangkat Daerah mengenai AKIP	INSPEKTORAT DAERAH
	3	masih adanya keengganan dari Perangkat Daerah untuk diperiksa, dan kurang proaktif untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan/pembinaan, sehingga temuan yang sama sering kali muncul kembali pada pengawasan selanjutnya	INSPEKTORAT DAERAH
	4	masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi/hasil temuan dari pengawas internal dan eksternal pada waktu yang telah ditentukan	INSPEKTORAT DAERAH
	5	tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang-kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan	INSPEKTORAT DAERAH
	6	kurang proaktifnya obrik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT DAERAH
	7	kurangnya pemahaman aparatur tentang tupoksi Perangkat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	8	belum adanya sistem diklat yang berkesinambungan karena keterbatasan anggaran	INSPEKTORAT DAERAH
	9	9) banyaknya kegiatan dari pemerintah pusat yang harus diakomodir dan difasilitasi oleh Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
29	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PERENCANAAN		
	1	Terdapat ketidak selarasan dokumen perencanaan untuk menindaklanjutinya dituangkan dalam program perencanaan pembangunan dimana didalamnya terdapat kegiatan penyelenggaraan musrenbang, penetapan RKPD dan penyusunan KUA dan PPAS yang nantinya akan mengupayakan penyelarasan dokumen perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2	Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan di daerah sehingga mengakibatkan inkonsistensi perencanaan dimana Bappelitbangda harus terus melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti berbagai perubahan melalui program perencanaan dimasing- masing bidang	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	3	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya untuk menindaklanjutinya dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi yang nantinya menyiapkan data dan melakukan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	4	Masih lemahnya proses pengolahan dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah diingkatkan melalui program pengembangan data/informasi	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	Koordinasi antar Perangkat Daerah yang belum optimal ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program perencanaan di masing- masing bidang yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
30	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PENELITIAN PENGEMBANGAN		
	1	Hasil penelitian pengembangan belum dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2	Terbatasnya SDM Bidang penelitian dan pengembangan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
31	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEUANGAN DAN ASET		
	1	Pengelolaan sumber – sumber pendapatan asli daerah belum optimal	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	2	Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada perusahaan yang tidak memiliki IUP atau IUPK belum dapat dilaksanakan, namun masih beroperasi seperti biasa mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumber pendapatan daerah.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3	keterbatasan financial maupun SDM menjadi hambatan dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi di bidang keuangan	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4	Belum sinergi perencanaan pembangunan di antara perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
32	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	1	Belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan PNS daerah, meliputi: sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	2	Belum diterapkan pengembangan karir dan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk reward and punishment terhadap kontribusi pegawai bagi unit kerjanya	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN

			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	3	Masih lemahnya transparansi proses perekrutan, pemindahan dan promosi pegawai maupun pejabat	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4	Kurangnya kesejahteraan pegawai untuk memacu kinerja pegawai dan menarik talenta-talenta terbaik untuk menjadi PNS	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	Belum tersedianya data pegawai yang akurat dan up to date dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.4. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural* set aparatur. Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pada tahun 2019

untuk penilaian (IGA) 2018, Pemerintah Kabupaten Karangasem masuk pada kategori Kabupaten Inovatif.

Adapun beberapa inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, baik inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagaimana tabel 2.177 dan tabel 2.178.

Tabel 2.177

Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

No	Nama Inovasi	Hasil Inovasi	Perangkat Daerah
1.	Kartu Karangasem Cerdas (KKC)	Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan dan menaikkan angka partisipasi kasar (APK) serta angka partisipasi murni (APM) pada Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	Kartu Karangasem Sehat (KKS)	Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Public Safety Center (PSC 119)	Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan ke masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Mall Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, terjangkau dan mudah	DPMPTSP
4.	Goes To Banjar	Pelayanan perizinan yang semakin mudah dan cepat dengan mendatangi masyarakat di banjar-banjar	DPMPTSP
5	Pemberian Makan Gratis untuk penunggu pasien	Meringankan beban masyarakat yang menjalani rawat inap di RSUD dan Puskesmas di Karangasem	RSUD
6	Sinergitas pengentasan gelandangan dan pengemis berbasis desa wisata di Kabupaten Karangasem "Desaku Menanti"	Karangasem bebas gepeng 2020	Dinas Sosial
7	Promosi Online Hasil Usaha Tenaga Kerja Mandiri	Hasil pelatihan yang telah dilaksanakan dapat dipromosikan lewat website	Dinas Ketenagakerjaan
8	Layanan mobil pusling dan mopin	Meningkatkan minat baca masyarakat, memperkenalkan keberadaan perpustakaan umum daerah kepada masyarakat	Dinas Perpustakaan

9	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIP-RFK)	Kualitas pelaporan realisasi fisik dan keuangan daerah makin baik, pemerintah dapat mengetahui dan memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan kegiatan.	Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
10.	E-monev	Progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan sehingga permasalahannya yang dihadapi perangkat daerah dapat diselesaikan lebih cepat pula	Bappelitbangda
11.	Aplikasi E-Dashboard Pasti Praktis BKPSDM Kabupaten Karangasem	E-Dashboard Pasti Praktis (E-Dashboard Pelayanan Administrasi Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu, Konversi NIP dan KPE) Pada BKPSDM Kabupaten Karangasem	BKPSDM
12.	Simetris IMB	Pengurusan IMB secara online	Dinas PUPR

Tabel 2.178
Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh Masyarakat

NO	NAMA/KELOMPOK MASYARAKAT	INOVASI
1	I Wayan Karya dari Kelompok Karya Sari Seraya	Tenun Kain Bebali dengan Pewarna Alam.
2	Ni Ketut Sugiartini dari Br. Saren Kauh Desa Budekeling	Kerupuk Ikan Nila
3	I Gusti Ngurah Alit dari Dusun Palak Desa Besakih	Bunga Krisan Hasil Optimal dengan Pemupukan Berimbang
4	I Wayan Pica dari Br. Perangsari Kelod Desa Duda Utara	Olahan Manisan Kurma Salak
5	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Penyulingan Minyak Nilam dengan Pemanasan Sederhana
6	I Ketut Latra dari Br. Dinas Tanah Ampo Desa Jungutan	Peningkatan Produktivitas Pertanian Menggunakan Pupuk Cair Organik Cimpling
7	I Wayan Sudarma dari Br. Dinas Belatung Desa Menanga	Peningkatan Produktivitas Madu Klanceng (Apis Trigona) dengan Sistem Pengembangbiakan Melalui Teknik Penyepihan
8	Kelompok Wanita Tani Putri	Model Pengolahan Salak dengan Sistem

	Mandiri dari Br. Dinas Juuklegi Desa Duda Timur	Zero Waste
9	Banjar Adat Dukuh Penaban, Kelurahan Karangasem	Museum Pustaka Lontar.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang untuk pencapaian target kinerja daerah yang telah ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal antara lain perekonomian regional, nasional dan global. Sedangkan kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber - sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor - sektor potensial serta perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Gambaran rancangan kerangka ekonomi tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Karangasem.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan

mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Dengan mewabahnya pandemic covid 19, kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif dan perekonomian domestik diperkirakan akan mengalami dampak yang cukup hebat. Berdasarkan pola penyebaran Covid 19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian yang relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, Industry pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem Kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, jaminan Kesehatan dan SDM Kesehatan terutama untuk deteksi dan surveillans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat Kesehatan. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan pada hampir semua aspek kehidupan. Hal ini dimulai dari aktivitas ekonomi yang terganggu diindikasikan menurunnya FDI Dunia 30-40%, perdagangan dunia juga turun 13-32%, perjalanan turis dunia turun 40%. Karena aktivitas perekonomian terganggu maka dunia dapat mengalami resesi ekonomi sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk mengatasi dampak Covid-19, arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 difokuskan pada (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem Kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana.

Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan berkontraksi 2,41 persen secara kuartalan. Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I 2020 melambat

cukup dalam dari 5,07 persen pada kuartal I 2019. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2020 yaitu minus 3,8 persen yang merupakan imbas pandemic virus corona yang masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini mengalami tekanan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi. Namun diperkirakan pada kuartal III dan IV pertumbuhan ekonomi nasional akan berangsur-angsur membaik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan ditentukan oleh pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2020.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, tema RKP tahun 2021 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 – 5,5 persen dengan asumsi masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional yang berangsur pulih akibat covid 19 dan tidak terjadi second wave penyebaran covid 19.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 -72,90;
4. Gini rasio pada kisaran 0,377 - 0379;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 7,5 – 8,2 persen.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali

Total perekonomian Bali pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (adhb) tercatat sebesar Rp. 252,60 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan (adhk) tercatat sebesar Rp. 162,78 triliun. Dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2019 sebesar 4,34 juta jiwa, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 58,24 juta rupiah. Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,33 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 47,96 persen. Ekonomi Bali triwulan IV-2019 (y-on-y) tercatat tumbuh 5,51 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,59 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tercatat tumbuh 11,95 persen. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 yakni Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat tumbuh sebesar 10,4 persen. Secara (q-to-q) atau jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Bali triwulan IV-2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,77 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tercatat tumbuh 9,79 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 28,49 persen.

Berdasarkan rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, maka target ekonomi makro Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan Provinsi ditarget sebesar 3,3 persen
2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ditarget sebesar 4,74 (3,88 – 5,85) persen
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,61 (75,41 – 75,61)
4. Gini rasio sebesar 0,3081
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,7 persen

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada anak sub bab 2.1.2 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi
Selama tahun 2016 – 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mencapai 5,92 % mengalami perlambatan di tahun 2017 menjadi 5,06 %, naik di tahun 2018 menjadi 5,48% dan tahun 2019 menjadi 5,50% dan tahun 2020 ditargetkan kisaran 5 sd 6 %.
2. Indeks Gini/ Gini Ratio
Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Ditargetkan tahun 2019 sebesar 0,3228, tahun 2020 sebesar 0,3226.
3. Tingkat Kemiskinan
Selama lima tahun terakhir perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem cenderung mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan.

Tahun 2016 tingkat kemiskinan di kabupaten Karangasem sebesar 6,61, menurun menjadi 6,55 pada tahun 2017, 6,28 di tahun 2018 dan 6,25 di tahun 2019. Tahun 2020 tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,94.

4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2016 mencapai 64,01 menjadi 67,34 di Tahun 2019 berada pada kategori sedang. IPM Kabupaten Karangasem tahun 2019 tumbuh sebesar 1,28 persen, merupakan pertumbuhan IPM Tertinggi di Provinsi Bali. Namun pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun 2018 yang besarnya mencapai 1,40 persen.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan persentase pengangguran di Kabupaten Karangasem tahun 2019 berada pada angka 0,6%. Jika dibandingkan dengan kabupaten Kota di Bali, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem masih cukup rendah, berada dibawah provinsi Bali yang besarnya 1,52%.

3.1.4 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut :

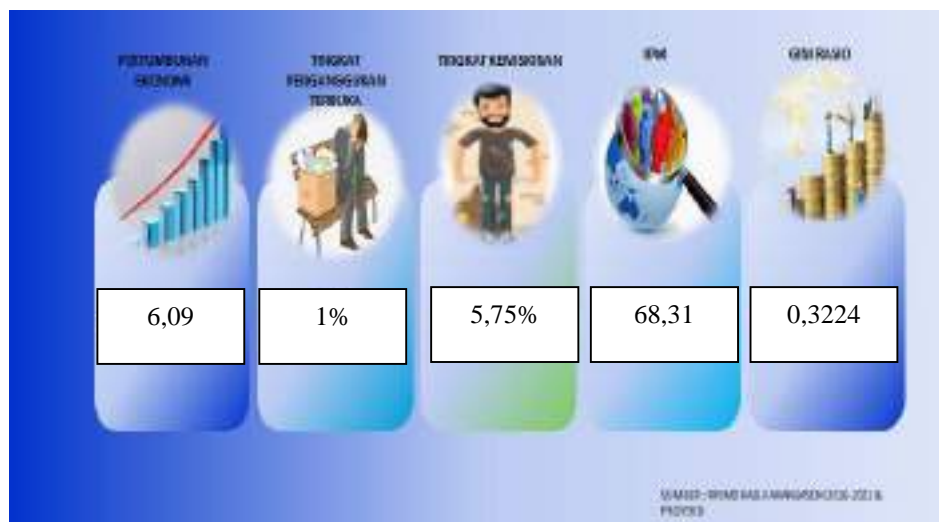
- 1) Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sangat tergantung atau banyak sekali dipengaruhi oleh consumption. Dengan adanya kebijakan mengenai social distancing, work from home (WFH) dan PSBB, tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negative serta penundaan belanja investasi.
- 2) Pemberian insentif oleh Pemerintah dari sisi perpajakan, menciptakan pengaruh untuk mendorong aktivitas ekonomi.
- 3) Arah Kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada sektor industri, pariwisata, investasi, reformasi sosial dan ketahanan bencana diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
- 4) Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.
- 5) Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- 6) Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemic covid 19.

- 7) Pengembangan industry kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
- 8) Terbatasnya penerapan dan penguasaan teknologi. Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
- 9) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun 2021 berdasarkan target RPJMD Kabupaten Karangasem adalah sebagaimana Gambar 3. 1.

Gambar 3.1
Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021



Sumber : RPJMD Kab. Karangasem tahun 2016-2021 (Data diolah)

Dengan mewabahnya pandemi covid 19, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi masyarakat. Untuk itu target makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	TARGET RPJMD TAHUN 2021	PROYEKSI SAAT INI
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,09	3,44 (3-4%)
2	Tingkat Pengangguran terbuka	1 %	1-2 %
3	Tingkat Kemiskinan	5,75	6,29
4	IPM	68,31	68,31
5	Gini Ratio	0,3224	0,3224

Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 ditargetkan sebesar 6,09 persen. Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem diperkirakan akan mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2021 berada pada angka di bawah 4 persen sebagai akibat melemahnya sektor pariwisata, industri dan investasi. Berdasarkan kondisi tersebut target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dipasang pada angka 3,44 persen atau pada kisaran 3-4 persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem sesuai dengan target RPJMD ditargetkan sebesar maksimal 1 persen. Jumlah dan persentase pengangguran diprediksikan akan semakin bertambah sejalan dengan banyaknya tenaga kerja khususnya pada sektor jasa, pariwisata yang dirumahkan bahkan di PHK sebagai akibat mewabahnya covid 19. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 ditargetkan pada kisaran maksimal 1-2 persen. Dengan diberlakukannya tatanan penerapan kehidupan era baru di Provinsi Bali maupun di Kabupaten karangasem diharapkan kondisi pariwisata pulih kembali sehingga membuka peluang dan kesempatan kerja.

3. Tingkat Kemiskinan
Target kemiskinan pada RPJMD Kabupaten Karangasem ditargetkan sebesar 5,75 persen. Mewabahnya pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan jaring pengaman sosial diharapkan akan mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh terlalu dalam pada tingkat kemiskinan. Dengan memperhatikan persentase kenaikan angka kemiskinan nasional sebesar 0,5 persen dan kenaikan kemiskinan Provinsi Bali sebesar 0,35 persen maka target tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2021 diprediksi mengalami kenaikan 0,4 persen dari capaian tahun 2019 yang besarnya 6,25 persen menjadi 6,29 persen.
4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Dengan mewabahnya covid 19, terjadi penurunan target IPM nasional sebesar 2,76 dari target RPJMN yang besarnya 75,54 menjadi 72,78. Sementara target IPM provinsi Bali masih sama dengan target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan penurunan target nasional dan memperhatikan target Provinsi Bali maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem ditargetkan sama dengan target pada RPJMD yaitu sebesar 68,31.
5. Gini Ratio
Mewabahnya covid 19 diprediksi tidak akan banyak mempengaruhi Angka gini ratio atau kesenjangan antar masyarakat karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan target nasional dan provinsi, pada tahun 2021 ditargetkan sama dengan target RPJMD sebesar 0,3224.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021, arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid - 19, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diarahkan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui :

- 1) Peningkatan Industri, Pariwisata, Investasi,
- 2) Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial,
- 3) Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup,
- 4) Kompetensi Sumber Daya Manusia,
- 5) Penguatan insfrastuktur serta
- 6) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan

- a. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019.
- b. Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada alokasi DAK tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019. Alokasi DAK dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah sepanjang telah ditetapkan dalam APBN.
- c. Perhitungan alokasi Dana bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH tahun 2020 dan realisasi tahun 2019.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga baik dari badan, lembaga, serta organisasi yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta penguatan regulasi.
- b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- c. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 digambarkan pada tabel 3.2. Jika dilihat dari komposisinya, ketergantungan Kabupaten Karangasem terhadap dana pusat khususnya dana perimbangan masih cukup tinggi yaitu berkisar 62,20 persen di tahun 2017 hingga perkiraan mencapai 73,97 persen di tahun 2021.

Harapan ke depannya dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem jumlah pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap dana perimbangan dapat dikurangi.

Tabel 3.2 REALISASI DAN PROYEKSI / TARGET PENDAPATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 – 2021

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	PROYEKSI/TARGET
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	PADA TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan asli daerah	198.663.672.239,22	200.362.025.514,55	220.797.328.354,22	259.456.397.933,00	262.605.525.953,53
1.1.1	Pajak daerah	96.850.262.306,72	91.995.240.970,84	91.765.710.571,00	128.829.394.404,00	151.798.046.052,96
1.1.2	Retribusi daerah	12.590.471.840,26	13.199.321.374,00	16.200.916.900,00	26.571.486.000,00	13.707.856.442,60
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.519.621.044,16	10.750.650.743,67	11.055.640.529,00	11.055.640.529,00	11.667.719.200,61
1.1.4	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	77.703.317.048,08	84.416.812.426,04	101.775.060.354,22	92.999.877.000,00	85.431.904.257,36
1.2	Dana Perimbangan	949.134.029.659,00	937.885.910.117,00	1.015.950.662.720,00	1.035.150.981.000,00	1.555.818.418.097,98
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.233.118.804,00	20.959.757.363,00	21.993.827.000,00	18.640.572.000,00	24.483.185.751,03
1.2.2	Dana Alokasi Umum	722.184.384.000,00	729.378.991.000,00	771.789.284.000,00	782.943.444.000,00	1.003.715.864.758,10
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	203.716.526.855,00	187.547.161.754,00	222.167.551.720,00	233.566.965.000,00	527.619.367.588,85
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	378.138.203.793,85	344.702.760.391,93	409.321.019.455,06	339.431.216.816,99	300.719.572.829,60
1.3.1	hibah	57.937.837.284,29	57.763.756.774,00	58.492.065.407,00	56.872.000.000,00	58.009.542.000,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	115.364.651.529,10	125.012.273.304,37	139.001.942.963,06	128.574.331.616,99	126.461.029.166,81

1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	71.182.742.000,00	99.489.619.000,00	110.032.889.000,00	30.626.087.000,00	53.080.007.514,96
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	130.625.906.203,62	59.442.092.230,60	101.794.122.085,00	123.358.798.200,00	63.168.994.147,83
1.3.7	Sumbangan Pihak Ketiga	3.027.066.776,84	2.995.019.082,96	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.525.935.905.692,07	1.482.950.696.023,48	1.646.069.010.529,28	1.634.038.595.749,99	2.119.143.516.881,11

Sumber : RPJMD Kab. Karangasem tahun 2016-2021 , APBD, LRA (Data diolah)

Dari Tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target pendapatan daerah tahun 2021 dirancang sesuai target RPJMD sebesar Rp. 2,119 trilyun lebih, naik dari tahun 2020 sebesar Rp. 485 Milyar lebih atau sebesar 29,69 persen.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sesuai target RPJMD sebesar Rp. 262,605 Milyar lebih , naik dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 3,149 Milyar lebih atau sebesar 1,2 persen.
3. Dana Perimbangan diproyeksikan sesuai target RPJMD yaitu sebesar Rp. 1,556 Trilyun lebih, naik sebesar Rp. 520 Milyar lebih atau 50,29 persen dari tahun 2020 yang besarnya Rp. 1, 035 Trilyun lebih.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sesuai target RPJMD yaitu sebesar Rp. 300,719 Milyar lebih, lebih rendah dari tahun 2020 yang besarnya 339,431 Milyar lebih.

Target pendapatan daerah tahun 2021 ini diproyeksikan sesuai dengan target RPJMD. Target ini belum memperhitungkan kondisi riil saat ini khususnya dampak terhadap pandemi covid 19. Target pendapatan daerah akan disesuaikan kembali dalam penyusunan rancangan KUA /PPAS tahun 2021.

Dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, maka Struktur pendapatan daerah tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019

NO	URAIAN		JUMLAH DANA TAHUN 2021
I	PENDAPATAN DAERAH :		2.119.143.516.881,11
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		262.605.525.953,53
	a.	Pajak daerah	151.798.046.052,96
	b.	Retribusi daerah	13.707.856.442,60
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.667.719.200,61
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	85.431.904.257,36
2	PENDAPATAN TRANSFER		1.798.528.448.927,58
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	1.608.898.425.612,94
	1)	dana perimbangan	

					1.474.014.762.097,98
				a) Dana Transfer Umum	1.028.199.050.509,13
			(1)	DBH (Dana Bagi Hasil)	24.483.185.751,03
			(2)	DAU (Dana Alokasi Umum)	1.003.715.864.758,10
				b) Dana Transfer Khusus	445.815.711.588,85
			(1)	DAK Fisik	167.938.778.555,52
			(2)	DAK Non Fisik	277.876.933.033,33
			2)	dana insentif daerah	53.080.007.514,96
			3)	dana otonomi khusus	-
			4)	dana keistimewaan	-
			5)	dana desa	81.803.656.000,00
			b.	transfer antar-daerah	189.630.023.314,64
			1)	pendapatan bagi hasil	126.461.029.166,81
			2)	bantuan keuangan	63.168.994.147,83
	3			LAN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.009.542.000,00
		a.		Hibah	-
		b.		Dana Darurat	-
		c.		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	58.009.542.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata

serta ekonomi kreatif, pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi antara lain : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja bunga, (3) Belanja hibah, (4) Belanja bantuan sosial, (5) Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (6) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan (7) Belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Langsung (BL) yang meliputi antara lain : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja barang dan jasa, serta (3) dan Belanja modal. Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan belanja daerah yang disempurnakan dan secara khusus diarahkan pada :

Kebijakan Belanja Langsung, meliputi :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

- b. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- c. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari Volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dan untuk tahun 2021 difokuskan pada reformasi kesehatan pasca covid-19.
- d. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pengawasan (APIP) sebesar 0,3 - 0,9% dari Volume Anggaran APBD Tahun 2021.
- e. Pemenuhan anggaran untuk peningkatan SDM sebesar 0,16% dari Volume Anggaran APBD Tahun 2021.
- f. Kegiatan-kegiatan untuk pelayanan publik kepada masyarakat
- g. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah melalui pemenuhan 25% insfrastruktur yang bersumber dari dana transfer yang bersifat umum.
- h. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial maka untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi serta dalam rangka menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
- i. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial maka untuk menjaga kondisi sosial, belanja diarahkan untuk menjamin perlindungan sosial terutama kepada masyarakat yang rentan sehingga tidak masuk ke kondisi yang lebih dalam.
- j. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial khususnya dalam rangka menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam, maka annggaran difokuskan untuk pencegahan, penanggulangan dan ketahanan bencana daerah.
- k. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid 19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan serta peningkatan kesempatan kerja.
- l. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya

daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga diarahkan untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Bank Dunia dan Pusat Investasi Pemerintah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk Tahun 2020 diprioritaskan untuk pemenuhan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

e. Belanja Bagi Hasil

Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa yang meliputi bantuan keuangan kepada desa, gaji perbekel dan perangkat desa.

g. Belanja Tak Terduga

Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat tak terduga seperti terjadi bencana alam gunung meletus, gempa bumi, longsor, wabah penyakit dan lain-lain.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karangasem tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.4. Dilihat dari perkembangannya bahwa setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung yang didominasi oleh belanja pegawai, begitu juga belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa. Ke depan komposisi belanja langsung akan lebih diarahkan ke belanja modal dalam upaya menambah dukungan terhadap nilai aset pemerintah daerah.

Tabel 3.4 REALISASI DAN PROYEKSI / TARGET BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 – 2021

Struktur Realisasi Belanja Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Target (Rp)
	1.506.221.682.564,41	1.480.600.620.458,56	1.635.821.925.442,27	1.713.278.925.604,22	2.165.588.275.863,92
	901.616.935.594,16	924.654.496.669,56	987.743.208.152,56	1.006.239.995.680,52	1.005.882.995.680,00
	712.006.526.726,93	735.880.551.079,62	757.619.678.646,13	741.356.043.628,00	822.843.039.105,81
	633.649.863,42	22.984.556,17	13.463.551,41	100.000.000,00	204.000.000,00
	11.370.600.000,00	6.151.450.000,00	14.763.150.000,00	53.867.255.000,00	3.040.110.000,00
	1.461.164.000,00	2.144.566.000,00	22.591.164.466,00	1.750.000.000,00	974.100.000,00

Belanja bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	9.484.943.389,38	13.260.786.666,77	13.565.839.305,02	20.202.114.452,52	16.550.590.249,55
	165.834.010.414,43	164.631.942.882,00	179.189.912.184,00	187.964.582.600,00	160.271.156.324,64
	826.041.200,00	2.562.215.485,00	0,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	604.604.746.970,25	555.946.123.789,00	648.078.717.289,71	707.038.929.923,70	1.159.705.280.183,92
				70.018.898.150,00	
	367.534.860.607,25	411.039.360.832,28	495.846.044.749,86	410.510.590.456,36	
Belanja modal	237.069.886.363,00	144.906.762.956,72	152.232.672.539,85	226.509.441.317,34	

Sumber : RPJMD Kab. Karangasem tahun 2016-2021 , APBD, LRA (Data diolah)

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target belanja dirancang sebesar Rp. 2,165 Trilyun lebih dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 1,159 Trilyun lebih dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,005 Trilyun lebih.
2. Target belanja dirancang sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021
3. Pada saat penyusunan rancangan KUA/PPAS akan disesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah secara riil memperhitungkan kondisi saat ini dan prioritas daerah.

Struktur belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 sebagaimana tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH DANA TAHUN 2021
II	BELANJA DAERAH :	2.165.588.275.863,92
1	Belanja Operasi	1.615.196.957.518,80
	a. belanja pegawai	937.653.861.844,02
	b. belanja barang dan jasa	673.324.885.674,78
	c. belanja bunga	204.000.000,00
	d. belanja subsidi	
	e. belanja hibah	3.040.110.000,00
	f. belanja bantuan sosial	974.100.000,00
2	Belanja Modal	371.569.571.770,93
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	176.821.746.574,19
	a. belanja bagi hasil	16.550.590.249,55
	b. belanja bantuan keuangan	160.271.156.324,64

3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah : Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 3.6. Perkembangan pembiayaan daerah jika dilihat dari sisi penerimaan hanya bergantung pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal /investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang.

Tabel 3.6 REALISASI DAN PROYEKSI / TARGET PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 – 2021

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI 2019	TARGET TAHUN 2020	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2021
-2	-3	-4	-5	-6	-7
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	125.188.456.552,69	122.184.280.406,14	120.826.153.367,64	79.485.229.854,23	51.084.758.982,81
Penerimaan piutang daerah	51.480.977,00	22.669.979,08	15.722.725,00		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.239.937.529,69	122.206.950.385,22	120.841.876.092,64	79.485.229.854,23	51.084.758.982,81
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	6.250.000.000,00		4.500.000.000,00
Pembayaran pokok hutang	19.171.070.518,64	130.872.917,64	130.872.917,64	145.000.000,00	140.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.771.070.518,64	3.730.872.917,64	6.380.872.917,64	145.000.000,00	4.640.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	102.468.867.011,05	118.476.077.467,58	114.461.003.175,00	79.340.229.854,23	46.444.758.982,81

Sumber : RPJMD Kab. Karangasem tahun 2016-2021 , APBD, LRA (Data diolah)

Tabel 3.7

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sesuai PP 12 Tahun 2019

NO	URAIAN		JUMLAH DANA TAHUN 2021
III	PEMBIAYAAN DAERAH :		46.444.758.982,81
	1	Penerimaan Pembiayaan	51.084.758.982,81
;	a.	SILPA	51.084.758.982,81
	b.	Pencairan Dana Cadangan	
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	4	Pengeluaran Pembiayaan	4.640.000.000,00
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	140.000.000,00
	b.	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00
	c.	Pembentukan Dana Cadangan	
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disusun mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 serta dengan memperhatikan :

1. Keselarasan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2021.
3. Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta capaian target RPJMD.

4. Isu strategis yang berkembang baik pada tatanan global, nasional, maupun daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 yaitu:

" KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Adapun penjabaran makna dari Visi tersebut adalah :

Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang.

Bersih mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan memiliki Daya Saing.

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Karangasem yang Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Budaya Bali. secara rinci Visi Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 jika diselaraskan dengan Misi Pembangunan yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi RPJMD dengan Misi RPJPD

VISI RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021	MISI RPJPD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2006-2025	
Karangasem yang Cerdas	7	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal dan non formal
	9	Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Karangasem yang Bersih	2	Mewujudkan otonomi daerah yang mantap, ditunjang pelaksanaan sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien

	3	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governave dan clean government)
	5	Mewujudkan kesadaran dan penegakan supremasi hukum dan HAM, serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif.
Karangasem yang Bermartabat	1	Meningkatkan srada dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya yang dijiwai oleh budaya Bali
	4	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal melalui pengembangan kemitraan.
Berlandaskan Tri Hita Karana	6	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana
	8	Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang, berwawasan budaya, kesehatan dan lingkungan hidup

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.
2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.
3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.
5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.
6. Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan. sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD

MISI RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021		MISI RPJPD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2006-2025	
1	Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.	7	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal dan non formal
2	Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap	2	Mewujudkan otonomi daerah yang mantap, ditunjang pelaksanaan sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien
		3	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance dan clean government)
		5	Mewujudkan kesadaran dan penegakan supremasi hukum dan HAM, serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif.
3	Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah	4	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal melalui pengembangan kemitraan
		9	Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
4	Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan	8	Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang, berwawasan budaya, kesehatan dan lingkungan hidup
5	Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan	6	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana
6	Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial	1	Meningkatkan sraga dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya yang dijiwai oleh budaya Bali.

4.1.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, maka dirumuskan kedalam 19 tujuan, 70 sasaran dan ditempuh 70 strategi pembangunan sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1 : Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.					
1	Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	2	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan
		3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.	3	Meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang iptek dan seni
		4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.	4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang merata
		5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.	5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)	6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin
		70	Konsumsi perkapita	2	Meningkatkan konsumsi perkapita masyarakat

3	Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas	10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, murah, ramah dan paripurna
		11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	2	Peningkatan jangkauan, ketersediaan, dan layanan dalam bidang kesehatan yang berkualitas
		12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	3	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan
MISI 2 : Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.					
4	Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.	13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien
		14	Meningkatnya disiplin PNS	2	Penerapan penghargaan dan hukuman terhadap aparatur sipil negara secara proporsional
		15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS	3	Peningkatan kapasitas, kompetensi, profesionalisme dan motivasi untuk berprestasi akan meningkatkan peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
		17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sangsi	5	Peningkatan kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi
		7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan	6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dilaksanakan
		8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.	7	Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam pengelolaan program desa
		9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.	8	Penguatan SDM desa dalam pengelolaan keuangan daerah

5	Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat yang Bersih dan Bermartabat.	18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat	1	Pengembangan manusia yang beretika dan beradab melalui peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat guna mewujudkan human development (pembangunan manusia)
		19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2	Peningkatan peranan Desa Pekraman yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat seluruh warganya, guna menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tenteram dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesama warga, dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa
		20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	3	Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai agama Hindu, mengembangkan kebudayaan, memelihara dan melestarikan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa, mengembangkan ekonomi kerakyatan, memelihara kelestarian Kahyangan Tiga, mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama dalam menghadapi kondisi tertentu
MISI 3 : Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah					
6	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.	21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin	1	Pemenuhan hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki

		22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik	2	Peningkatan akses masyarakat miskin terdapat kesempatan hidup yang layak, diperlukan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, air bersih, listrik dan transportasi
		23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.	3	Peningkatan akses masyarakat miskin dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan potensi lokal yang tersedia
7	Meningkatkan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.	24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).	1	Peningkatan program pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
		25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	2	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi
		26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian	3	Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi seperti sarana produksi, permodalan, informasi, dan transportasi, dan pasar serta mengembangkan keanekaragaman hasil pertanian
		27	Meningkatnya angka kecukupan pangan	4	Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Karangasem
		28	Meningkatnya produksi perikanan	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan
8	Meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta memperbaiki iklim perdagangan.	29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	1	Peningkatan iklim kondusif bagi investasi
		30	Meningkatnya jumlah investasi.	2	Peningkatan ketersediaan informasi potensi investasi, peningkatan kerjasama investasi
		31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga	3	Peningkatan investasi didukung dengan strategi peningkatan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (agroindustri)

		32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri.	4	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan, dan pasar tradisional
		33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD	5	Peningkatan peranan BUMD sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi rakyat
		34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional	6	Revitalisasi pasar tradisional
9	Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.	35	Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	1	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan koperasi
		36	Meningkatnya koperasi yang aktif.	2	Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil
		37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	3	Peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM dan koperasi
		38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil	4	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah pada petani, nelayan, dan pedagang kecil
MISI 4 : Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan					
10	Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.	39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang	1	Pengembangan dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku
		40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata	2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kawasan pariwisata
		41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri	3	Peningkatan kerjasama dan promosi pariwisata.

11	Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.	42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual	1	Pengembangan pariwisata budaya yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dijiwai agama Hindu
		43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan	2	Pengembangan pariwisata terutama pariwisata sepiritual yang berbasis desa adat, dan pengembangan pariwisata berwawasan pelestarian lingkungan yang berlandaskan Tri Hita Karana
12	Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.	44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang	1	Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
		45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam	2	Peningkatan keharmonisan tata ruang pembangunan antar sektor serta mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait
		46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C	3	Peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam khususnya galian mineral bukan logam.
MISI 5 : Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.					
13	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.	47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan	1	Keseimbangan pembangunan desa dan kota dengan memperkuat pemerataan pembangunan, sehingga infrastruktur di desa mendapatkan teknologi yang sesuai untuk memberdayakan daerahnya
14	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.	48	Meningkatnya pengelolaan persampahan	1	Peningkatan sarana dan sarana infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, dan telekomunikasi bagi wilayah perdesaan yang potensial

		49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif	2	Peningkatan akses penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional
15	Meningkatkan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.	50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.	1	Peningkatan pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
		51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman	2	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa
MISI 6 : Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.					
16	Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.	52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat	1	Peningkatan bantuan keuangan kepada lembaga lembaga agama dan adat
		53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan	2	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pendidikan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya, saling menghormati, dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
		54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat	3	Pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama, agenda menciptakan Karangasem yang aman dan damai
		55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman	4	Peningkatan kapasitas lembaga pesraman di pembinaan dan penyuluhan masing-masing desa adat
		56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah	5	Peningkatan kehidupan ritual keagamaan dan pemahaman keagamaan di kalangan umat beragama

		57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	6	Peningkatan kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
17	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemuda dan olahraga.	58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia	1	Peningkatan kesejahteraan sosial warga Karangasem yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan, akibatnya tidak mampu mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan
		59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan	2	Mewujudkan kesetaraan gender
		60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	3	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan
		61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan	4	Peningkatan pembinaan pemuda
18	Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.	62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah	1	Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal terutama seni dan budaya yang hampir punah
		63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat	2	Perlindungan terhadap aset pusaka dan kearifan lokal masyarakat dan mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dari luar dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang positif dan serasi melalui peningkatan kreativitas atraksi seni dan budaya

		64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya	3	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pekraman untuk berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya dalam rangka mendukung Pesta Kesenian Bali
		65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB	4	Peningkatan pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan pemberdayaan sentra-sentra kesenian
		66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya	5	Perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya
19	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi.	67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi	1	Peningkatan semangat kebangsaan, mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa serta mendorong tumbuhnya demokrasi, saling menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
		68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.	2	Pengembangan wawasan kebangsaan, meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan yang berbasis kearifan lokal
		69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersama sebagai bangsa atas dasar kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karangasem yang telah tersusun diterjemahkan dalam prioritas daerah yang akan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021, selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali maupun Nasional.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Bali dan isu strategis Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar dalam perumusan tema serta prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Nasional :
 - 1) Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia,
 - 2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan
 - 3) Infrastruktur masih terbatas
 - 4) Karakter Bangsa (melemahnya nilai budaya)
 - 5) Kewilayahan (Ketimpangan antar wilayah dan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya
 - 6) Lingkungan Hidup dan Bencana (Penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingginya resiko bencana)
 - 7) Politik, hukum, pertahanan dan keamanan (belum optimalnya penegakan hukum serta Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik)
2. Isu Strategis Provinsi Bali :
 - 1) Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
 - 2) Daya Saing
 - 3) Nilai Tambah
 - 4) Sustainability
 - 5) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan umum
 - 6) Perubahan Iklim Penanganan Bencana
3. Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem :
 - 1) Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk di Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem khususnya, membawa dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada dampak sosial sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah.
 - 2) Tingginya angka kemiskinan serta rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi oleh masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, tingginya angka mengulang sekolah, tingginya buta aksara, masih adanya stunting, belum optimalnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, masih banyaknya

rumah tidak layak huni dan masih banyaknya masyarakat yang rentan sosial serta adanya kemiskinan kultural.

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Karangasem ditunjukkan dengan capaian IPM Kabupaten Karangasem yang masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi Bali dan nasional.

- 3) Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan masih rendahnya investasi.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir menunjukkan angka pada kisaran 5 sampai dengan 6 persen. Bahkan pada tahun 2018 mengalami perlambatan akibat bencana erupsi Gunung Agung pada tahun 2017.
Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem belum didukung oleh regulasi yang memadai. Sampai saat ini revisi perda RTRW belum tuntas sebagai salah satu payung hukum di bidang penanaman modal.
- 4) Belum meratanya infrastruktur yang berakibat ketimpangan wilayah.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem setiap tahun terus dibangun khususnya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta kemudahan pergerakan ekonomi. Keterbatasan anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan mengakibatkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem. Pemerintah daerah terus mengupayakan sumber-sumber pembiayaan tidak hanya dari APBD tetapi juga dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya khususnya kerjasama dengan pihak lain melalui dana CSR dan lain sebagainya.
- 5) Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana
Menurunnya kualitas lingkungan yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak hanya karena alih fungsi lahan maupun eksploitasi lahan galian mineral bukan logam, tetapi juga pencemaran lingkungan khususnya akibat sampah plastik serta masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.
Meningkatnya resiko bencana karena Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten yang memiliki resiko bencana ke 92 tertinggi di Indonesia berdasarkan data IRBI, serta kabupaten yang memiliki resiko bencana tertinggi di Provinsi Bali (gunung meletus, tanah longsor dan kebakaran hutan).
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dilihat dari masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, proses administrasi yang berbelit-belit, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih

berorientasi pada output bukan hasil dan dampaknya sehingga diperlukan penyederhanaan birokrasi.

4.2.2. Tema Pembangunan

Berdasarkan isu strategis yang berkembang baik isu strategis nasional, provinsi maupun isu strategis Kabupaten Karangasem serta dengan memperhatikan :

1. Tema RKP Tahun 2021 yaitu : “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”;
2. Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu : “Peningkatan Daya Saing Perekonomian Bali Didorong Pemajuan Kebudayaan Menuju Pemerataan Pembangunan”;
- serta
3. Pencapaian sasaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021,

maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yaitu :

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Peningkatan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Ketahanan Bencana dan Kompetensi Sumber Daya Manusia”

Makna Tema :

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial :

Merupakan upaya untuk pemulihan perekonomian masyarakat dengan mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang membahayakan perekonomian daerah yang berampak terhadap kondisi sosial masyarakat.

Peningkatan Industri :

Dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah secara berkelanjutan dengan mendorong perkembangan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif.

Peningkatan Pariwisata :

Merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Karangasem didukung oleh pengembangan industri dan pertanian dalam arti luas.

Peningkatan Investasi :

Merupakan upaya untuk mendorong kemudahan investasi di Kabupaten Karangasem dengan memperhitungkan dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesehatan:

Merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Jaring Pengaman Sosial :

Dimaknai sebagai upaya atau program pemerintah yang bertujuan untuk membantu membangun ketahanan keluarga miskin agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Ketahanan Bencana :

Dimaknai sebagai upaya untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana sehingga mampu beradaptasi dengan cara bertahan dan meningkatkan kapasitasnya untuk mengurangi resiko bencana.

Kompetensi Sumber Daya Manusia :

Dimaknai sebagai upaya untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional, berwawasan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta loyalitas dan mental spriritual yang kuat dalam upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Karangasem sebagai subyek pembangunan dan bukan obyek pembangunan sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan global.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan sasaran pembangunan daerah maka pada pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 ditetapkan ke dalam 6 (Enam) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Industri, Pariwisata dan Investasi

- a. Diarahkan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi dan dukungan terhadap sektor pariwisata.
- b. Diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis desa adat dan potensi unggulan daerah dengan mengedepankan kearifan lokal.
- c. Diarahkan investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan perijinan, serta penyederhanaan regulasi

Prioritas 2 : Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial

- a. diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pasca pandemi covid 19 melalui gerakan

masyarakat hidup sehat, pengendalian penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, serta diarahkan untuk peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan stunting, serta pengawasan obat dan makanan.

- b. Diarahkan untuk peningkatan perlindungan sosial masyarakat terutama terhadap masyarakat miskin yang mengalami dampak pandemi covid 19 melalui program-program sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Prioritas 3 : Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup

Diarahkan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, ketaatan terhadap regulasi terutama tata ruang wilayah.

Prioritas 4 : Pembangunan SDM, Adat dan Budaya

- a. Diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, terampil dan inovatif serta berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal, peningkatan keterampilan masyarakat, penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi dan kreativitas serta penanaman sikap mental dan spiritual.
- b. Diarahkan untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Prioritas 5 : Infrastruktur

Diarahkan untuk membangun infrastruktur rakyat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat

Prioritas 6 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Diarahkan dalam upaya mewujudkan good governance melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2020;
- 5) Program dan kegiatan merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Secara umum, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem diarahkan untuk selaras mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali dan prioritas nasional sebagaimana tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Tabel 4.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KARANGASEM		PRIORITAS NASIONAL	
1	Industri, Pariwisata dan Investasi	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
		6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4	Pembangunan SDM, Adat dan Budaya	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

		4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Infrastruktur	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel 4.5
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Bali

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KARANGASEM		PRIORITAS PROVINSI BALI	
1	Industri, Pariwisata dan Investasi	1	Pangan, Sandang dan Papan
		5	Pariwisata
2	Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial	2	Kesehatan dan Pendidikan
		3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
3	Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	6	Penguatan Infrastruktur
4	Pembangunan SDM, Adat dan Budaya	2	Kesehatan dan Pendidikan
		3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
		4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Infrastruktur	6	Penguatan Infrastruktur
6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dituangkan sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021	
1	Industri, Pariwisata dan Investasi	23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.
		24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).
		25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
		26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian
		27	Meningkatnya angka kecukupan pangan
		28	Meningkatnya produksi perikanan
		29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan
		30	Meningkatnya jumlah investasi.
		31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga
		32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri.
		33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD
		34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional
		35	Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
		36	Meningkatnya koperasi yang aktif.
		37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
		38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil
		39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang

		40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata
		41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri
		42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual
		43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
2	Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial	10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat
		11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
		12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan
		58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia
3	Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang
		45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam
		46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C
		48	Meningkatnya pengelolaan persampahan
4	Pembangunan SDM, Adat dan Budaya	1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
		3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.
		4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.
		5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.

		6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.
		18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat
		19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat
		52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat
		53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan
		54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat
		55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman
		56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah
		57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan
		59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan
		60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak
		61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan
		62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah
		63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat

		64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya
		65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB
		66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya
		70	Konsumsi perkapita
5	Insfrastruktur	21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin
		22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik
		47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan
		49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif
		50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.
		51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman
6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan
		8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.
		9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.
		13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.
		14	Meningkatnya disiplin PNS
		15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS
		16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah

		17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sangsi
		67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi
		68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.
		69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan local

4.3. Kebijakan Daerah dalam rangka Penanganan Wabah Covid 19

Beberapa kebijakan strategis telah diambil Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan ketahanan dibidang kesehatan maupun ketahanan dibidang ekonomi selama covid-19 diantaranya :

- 1) Penanganan PMI, ABK dan pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di wilayah Kabupaten Karangasem
- 2) Penanganan kasus reaktif rapid test, kasus konfirmasi covid -19 dan ketentuan karantina wilayah / lokal
- 3) Refocusing anggaran dalam bentuk kegiatan dan dalam bentuk Belanja Tidak Terduga, yang diarahkan pada penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
- 4) Pembebasan pembayaran tagihan rekening air pelanggan PDAM yang menggunakan 0-10 m3 selama tiga bulan
- 5) Mengusulkan Bantuan Stimulus Usaha bagi UMKM dengan sumber dana dari Provinsi
- 6) Pemulihan sektor pariwisata dengan pembukaan kembali beberapa DTW, hotel dan restoran yang sudah lolos verifikasi penerapan protocol kesehatan.
- 7) Optimalisasi Pelaksanaan Dana Cadangan DAK Fisik tahun 2020 pada bidang jalan dan irigasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sesuai dengan amanat Permendagri 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, arah pembangunan nasional diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dalam rangka penanganan wabah covid 19 diarahkan untuk :

1. Bidang Kesehatan
 - a) Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat
 - b) Penerapan Protokol Kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat

- c) Penyediaan fasilitas baik sarana prasarana kesehatan maupun tenaga medis
2. Bidang Ekonomi
- a) Fasilitasi peningkatan permodalan bagi UMKM
 - b) Pengembangan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian dalam arti luas
 - c) Pendampingan IKM dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dalam mendukung berkembangnya sektor pariwisata
 - d) Pengembangan pariwisata dan sektor-sektor penggerak ekonomi masyarakat dalam era tatanan kehidupan baru dengan mengedepankan protocol kesehatan dan social distancing
 - e) Peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan
 - f) Membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang diupayakan melalui padat karya.
3. Bidang Sosial
- Diarahkan untuk peningkatan perlindungan sosial masyarakat terutama terhadap masyarakat miskin melalui program-program sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berbagai strategi dan arah kebijakan, disusun program prioritas pembangunan sebagai rencana kerja yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Program prioritas tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah, yang disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat yang diselaraskan dengan program yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam 9 (Sembilan) program unggulan atau disebut dengan Nawa Satya Darma, serta untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang sangat cepat mengalami perubahan yang teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya.

Program prioritas Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi dan azas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi hasil Reses DPRD Kabupaten Karangasem berupa pokok – pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan dan menjadi salah satu bahan utama penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem 2021 yang terdiri dari perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Penelaahan terhadap rekomendasi hasil reses DPRD dilakukan secara komprehensif oleh seluruh Perangkat Daerah untuk dituangkan ke

dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil pembahasannya disajikan pada Lampiran I.

Terhadap usulan langsung masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021, secara umum tidak ada yang disampaikan oleh perorangan secara langsung tetapi melalui pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang yang disampaikan sebagai aspirasi masyarakat dan telah diakomodir menjadi usulan kegiatan di dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun program prioritas tahun 2021 Kabupaten Karangasem berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan yang disusun sebagaimana tabel 5.1

Tabel 5.1
Program Prioritas Kabupaten Karangasem Tahun 2021

PRIORITAS /PROGRAM PRIORITAS	
1	Industri, Pariwisata dan Investasi
	Diarahkan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi dan dukungan terhadap sektor pariwisata
	Diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis desa adat dan potensi unggulan daerah dengan mengedepankan kearifan lokal
	Diarahkan investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan perijinan, serta penyederhanaan regulasi
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2	Program Penataan Struktur Industri
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9	Program Pengembangan Kemitraan
10	Program Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
11	Program Pengembangan Pariwisata Alternatif
12	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
13	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

	14	Program Pelayanan Bidang Perizinan
	15	Program Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat
	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	17	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi
	18	Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM
	19	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	23	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	24	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian
	25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
	26	Program Peningkatan Sistem Perlindungan Tanaman
	27	Program Peningkatan Produksi Pertanian
	28	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
	29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
	30	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
	31	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
	32	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	33	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2	Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial	
	diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pasca pandemi covid 19 melalui gerakan masyarakat hidup sehat, pengendalian penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, serta diarahkan untuk peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan stunting, serta pengawasan obat dan makanan.	
	Diarahkan untuk peningkatan perlindungan sosial masyarakat terutama terhadap masyarakat miskin yang mengalami dampak pandemi covid 19 melalui program-program sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	
	1	Program Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	3	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat

	6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
	10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	13	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
	14	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	17	Program Pembinaan Anak Terlantar
	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma
	19	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos
	22	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia
3	Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	
	Diarahkan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, ketaatan terhadap regulasi terutama tata ruang wilayah.	
	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	2	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana
	3	Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat
	4	Program Peringatan Dini
	5	Program Pengembangan Kemitraan
	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	7	Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

	8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	10	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam
	11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	12	Program Peningkatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup
	13	Program Peningkatan Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
	15	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	16	Program Penataan Bangunan dan lingkungan
	17	Program Perencanaan Tata Ruang
	18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	19	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
4	Pembangunan SDM, Adat dan Budaya	
	Diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, terampil dan inovatif serta berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal, peningkatan keterampilan masyarakat, penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi dan kreativitas serta penanaman sikap mental dan spiritual.	
	Diarahkan untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.	
	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
	3	Program Pendidikan Menengah
	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	6	Program Pendidikan Non Formal
	7	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	8	Program peningkatan Peran Serta kepemudaan
	9	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

10	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
12	Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
13	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
14	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17	Program Transmigrasi Lokal
18	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
21	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
22	Program Penataan Administrasi Kependudukan
23	Program Keluarga Berencana
24	Program Pelayanan Kontrasepsi
25	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
26	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
27	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
28	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
30	Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
31	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
32	Program Pengembangan Nilai Budaya
33	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
34	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
35	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
36	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya
37	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan
38	Program Pengembangan Lembaga adat dan Tradisional
39	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

	40	Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan
	41	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	42	Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
	43	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	44	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	45	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	46	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	47	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5	Infrastruktur	
	Diarahkan untuk membangun infrastruktur rakyat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat	
	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	3	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	6	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	8	Program Pengendalian Banjir
	9	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
	10	Program Pengembangan Informasi Bidang ke-PU-an
	11	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	12	Program Pengembangan Perumahan
	13	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	14	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	15	Program Pemberdayaan komunitas perumahan
	16	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	17	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	18	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	19	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan

	20	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	21	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	22	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	23	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
	24	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
	25	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	26	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
	27	Program Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
	28	Program Pembangunan Fasilitas perhubungan Prasarana dan sarana
	29	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	
	Diarahkan dalam upaya mewujudkan good governance melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.	
	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
	4	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	5	Program Pengembangan Data/Informasi
	6	Program Kerjasama pembangunan
	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	9	Program Pendidikan Kedinasan
	10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	11	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	12	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	13	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	14	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintahan Daerah
	15	Program Pembentukan Hukum
	16	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan
	17	Program Penataan Administrasi Kewilayahan
	18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	19	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum

20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
21	Program Penataan Kelembagaan Daerah
22	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
24	Program inventarisasi Paket Pengadaan Barang/jasa
25	Program pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa
26	Program penyusunan dan pemantauan strategis pengadaan barang/jasa
27	Program penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal
28	Program pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya
29	Program pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
30	Program pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah
31	Program pelaksanaan analisis beban kerjaUKPBJ
32	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
33	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
34	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
35	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
36	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
37	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
38	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
39	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
40	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
41	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
42	Program pendidikan politik masyarakat
43	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
44	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
45	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
46	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
47	Program Penataan Daerah Otonomi Baru

48	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
49	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
53	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
54	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
56	Program Penataan halaman dan taman kantor

Untuk melaksanakan program prioritas pembangunan dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, berdasarkan proyeksi RPJMD pada tahun 2021 maka alokasi pendanaan untuk belanja langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.159.705.280.183,92 yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Dengan berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa APBD TA 2021 disusun berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019 maka Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan pemetaan (mapping) terhadap rencana kerja tahun 2021 dengan nomenklatur program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat beberapa pergeseran kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah yang berimplikasi terhadap perubahan pagu pendanaan per perangkat daerah. Alokasi pendanaan per perangkat daerah hasil pemetaan (mapping) Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Alokasi Pendanaan Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun 2021
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 Dan Hasil Pemetaan (Mapping)
Permendagri 90 Tahun 2019

NO	OPD	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PEMETAAN	Bertambah/ (berkurang)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	243.437.717.250,00	243.537.717.250,00	100.000.000,00	Perpindahan kegiatan pemilihan pemuda pelopor dari Dishub lke Dispendik 100 Juta
2	DINAS KESEHATAN	241.437.298.749,00	241.437.298.749,00	-	TETAP
3	RSUD	94.100.000.000,00	94.100.000.000,00	-	TETAP
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	157.895.185.833,76	168.694.331.683,76	10.799.145.850,00	Perpindahan kegiatan pembangunan gedung dari Setwan Ke PU sebesar 1.200.000.000
					Perpindahan kegiatan Pembangunan Gedung kantor 150.000.000 dari Kec. Abang ke dinas PU
					Perpindahan kegiatan Pembangunan Gedung kantor 5.000.000.000 dari bagian perlengkapan ke dinas PU
					Perpindahan pembangunan gedung kemeteorologian 1.000.000.000 dari disperindag ke Dinas PUPR
					Perpindahan kegiatan pembangunan gedung dari BPKAD Ke PU sebesar Rp. 3.249.145.850,00

					Perpindahan kegiatan pembangunan gedung kantor ke PU sebesar Rp. 200.000.000,
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.603.130.000,00	58.603.130.000,00	-	TETAP
6	KESBANG POL LINMAS	6.219.950.600,00	7.412.687.600,00	1.192.737.000,00	Perpindahan kegiatan Pelacakan Rute perjuangan awalnya di Dinas Sosial 491.937.000, Perayaan Hari-Hari Besar Nasional 300.800.000, dan Perayaan Hari hari Besar Daerah 400.000.000 yang awalnya di Adpem
7	SAT POL PP	5.108.990.000,00	4.908.990.000,00	(200.000.000,00)	Kegiatan pelatihan dan pembinaan korsik pindah ke humas 200.000.000
8	BPBD	4.067.860.000,00	4.067.860.000,00	-	TETAP
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	4.437.697.700,00	4.437.697.700,00	-	TETAP
10	DINAS SOSIAL	8.019.280.000,00	7.527.343.000,00	(491.937.000,00)	Kegiatan Pelacakan Rute perjuangan awalnya di Dinas Sosial 491.937.000 pindah ke Kesbang
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	3.311.700.000,00	2.911.700.000,00	(400.000.000,00)	Kegiatan padat karya 400.000.000 pindah ke DPMD
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.115.800.000,00	3.115.800.000,00	-	TETAP
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.709.180.000,00	1.709.180.000,00	-	TETAP
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.277.678.900,00	33.277.678.900,00	-	TETAP

15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.833.565.700,00	4.833.565.700,00	-	TETAP
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.201.667.371,56	7.601.667.371,56	400.000.000,00	perpindahan Kegiatan padat karya 400.000.000 ke DPMD yang semula di Disnaker
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.162.100.000,00	4.162.100.000,00	-	TETAP
18	DINAS PERHUBUNGAN	17.485.000.000,00	17.385.000.000,00	(100.000.000,00)	Kegiatan pemilihan pemuda pelopor pindah dari Dishub lke Dispendik 100 Juta
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	-	TETAP
20	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2.528.707.000,00	2.528.707.000,00	-	TETAP
21	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.748.960.000,00	6.748.960.000,00	-	TETAP
22	DINAS KEBUDAYAAN	10.137.893.575,00	10.137.893.575,00	-	TETAP
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN	1.723.711.500,00	1.723.711.500,00	-	TETAP
24	DINAS PERIKANAN	4.328.230.000,00	4.328.230.000,00	-	TETAP
25	DINAS PARIWISATA	13.281.050.000,00	13.281.050.000,00	-	TETAP
26	DINAS PERTANIAN	24.735.903.670,20	24.685.903.670,20	(50.000.000,00)	perpindahan Pemantauan pupuk pestisida 50.000.000 dari Distan ke Disperindag

27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.079.138.858,40	37.129.138.858,40	(950.000.000,00)	perpindahan Pemantauan pupuk pestisida 50.000.000 dari Distan ke Disperindag
					Perpindahan pembangunan gedung kemeteorologian 1.000.000.000 dari disperindag ke Dinas PUPR
28	SETDA	52.468.407.310,00	46.792.607.310,00	(5.675.800.000,00)	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2.251.713.000,00	1.550.913.000,00	(700.800.000,00)	Kegiatan Haribesanas dan Daerah 700.800.000, pindah ke Kesbang
	BAGIAN HUKUM DAN HAM	1.587.900.000,00	1.587.900.000,00	-	TETAP
	BAGIAN ORGANISASI	1.590.520.000,00	1.463.520.000,00	(127.000.000,00)	Kegiatan Rapat Kerja 127.000.000 pindah ke PP
	BAGIAN EKONOMI	1.903.588.000,00	1.728.588.000,00	(175.000.000,00)	Perpindahan kegiatan penyusunan SSH dari Ekonomi ke BPKAD sebesar 175.000.000
	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	462.847.000,00	589.847.000,00	127.000.000,00	Perpindahan Kegiatan Rapat Kerja 127.000.000 dari bagian organisasi pindah ke PP
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.194.924.470,00	8.194.924.470,00	-	TETAP
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	5.765.315.000,00	5.965.315.000,00	200.000.000,00	Perpindahan Kegiatan pelatihan dan pembinaan korsik pindah dari Sat Pol PP ke Humas 200.000.000
	BAGIAN PERLENGKAPAN	16.266.790.000,00	11.266.790.000,00	(5.000.000.000,00)	Perpindahan kegiatan Pembangunan Gedung kantor 5.000.000.000 dari bagian perlengkapan ke dinas PU
	BAGIAN UMUM	11.829.359.840,00	11.829.359.840,00	-	TETAP

	BAGIAN PENGADAAN	2.615.450.000,00	2.615.450.000,00	-	TETAP
29	SEKRETARIAT DPRD	45.650.650.000,00	44.450.650.000,00	(1.200.000.000,00)	Perpindahan kegiatan pembangunan gedung dari Setwan Ke PU sebesar 1.200.000.000
30	KECAMATAN KARANGASEM	5.799.550.000,00	5.799.550.000,00	-	TETAP
	KELURAHAN SUBAGAN	-	-	-	TETAP
	KELURAHAN KARANGASEM	-	-	-	TETAP
	KELURAHAN PADANGKERTA	-	-	-	TETAP
31	KECAMATAN ABANG	1.303.250.000,00	1.153.250.000,00	(150.000.000,00)	Perpindahan kegiatan Pembangunan Gedung kantor 150.000.000 dari Kec. Abang ke dinas PU
32	KECAMATAN KUBU	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-	TETAP
33	KECAMATAN BEBANDEM	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	-	TETAP
34	KECAMATAN SELAT	1.351.250.000,00	1.351.250.000,00	-	TETAP
35	KECAMATAN RENDANG	1.610.070.000,00	1.410.070.000,00	(200.000.000,00)	Perpindahan kegiatan pembangunan gedung kantor ke PU sebesar Rp. 200.000.000,
36	KECAMATAN SIDEMEN	1.041.600.000,00	1.041.600.000,00	-	TETAP
37	KECAMATAN MANGGIS	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	-	TETAP
38	INSPEKTORAT DAERAH	4.150.370.200,00	4.150.370.200,00	-	TETAP

39	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.904.470.000,00	6.754.470.000,00	(150.000.000,00)	Perpindahan kegiatan penyusunan KUA dan PPAS dari Bappelitbangda ke BPKAD sebesar 150.000.000
40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.088.175.966,00	15.164.030.116,00	(2.924.145.850,00)	Perpindahan kegiatan penyusunan SSH dari Ekonomi ke BPKAD sebesar 175.000.000
					Perpindahan kegiatan penyusunan KUA dan PPAS dari Bappelitbangda ke BPKAD sebesar 150.000.000
					Perpindahan kegiatan pembangunan gedung dari BPKAD Ke PU sebesar Rp. 3.249.145.850,00
41	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.752.590.000,00	11.752.590.000,00	-	TETAP
	JUMLAH	1.159.705.280.183,92	1.159.705.280.183,92	-	-

Pada tahapan penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah, dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan isu strategis dan tugas fungsi perangkat daerah serta memperhatikan target-target yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid-19. Ada beberapa kebutuhan yang belum mendapatkan pendanaan. Dari pagu pendanaan Rp. 1.159.705.280.183,92 tersusun rencana kebutuhan perangkat daerah sebesar Rp. 1.433.331.632.053,23 yang berarti ada program kegiatan yang belum mendapatkan pendanaan sebesar Rp. 273.626.351.869,31. Program kegiatan tersebut tersebar pada perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kecamatan Selat, dan Inspektorat Daerah. Pagu Pendanaan Perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan secara terinci disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan

NO	OPD	PAGU SETELAH PEMETAAN	TERSUSUN		
			SESUAI PAGU	KEBUTUHAN YANG BELUM MENDAPAT PENDANAAN	TOTAL KEBUTUHAN
1	2	3	4=3	5	6=4+5
1	DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	243.537.717.250,00	243.537.717.250,00	-	243.537.717.250,00
2	DINAS KESEHATAN	241.437.298.749,00	241.437.298.749,00	11.298.855.944,31	252.736.154.693,31
3	RSUD	94.100.000.000,00	94.100.000.000,00	-	94.100.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	168.694.331.683,76	168.694.331.683,76	258.978.914.000,00	427.673.245.683,76
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.603.130.000,00	58.603.130.000,00	-	58.603.130.000,00
6	KESBANG POL LINMAS	7.412.687.600,00	7.412.687.600,00	-	7.412.687.600,00
7	SAT POL PP	4.908.990.000,00	4.908.990.000,00	-	4.908.990.000,00
8	BPBD	4.067.860.000,00	4.067.860.000,00	-	4.067.860.000,00

9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	4.437.697.700,00	4.437.697.700,00	-	4.437.697.700,00
10	DINAS SOSIAL	7.527.343.000,00	7.527.343.000,00	-	7.527.343.000,00
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.911.700.000,00	2.911.700.000,00	-	2.911.700.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.115.800.000,00	3.115.800.000,00	-	3.115.800.000,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.709.180.000,00	1.709.180.000,00	-	1.709.180.000,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.277.678.900,00	33.277.678.900,00	-	33.277.678.900,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.833.565.700,00	4.833.565.700,00	-	4.833.565.700,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.601.667.371,56	7.601.667.371,56	-	7.601.667.371,56
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.162.100.000,00	4.162.100.000,00	-	4.162.100.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	17.385.000.000,00	17.385.000.000,00	-	17.385.000.000,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	-	6.250.000.000,00
20	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2.528.707.000,00	2.528.707.000,00	-	2.528.707.000,00

21	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.748.960.000,00	6.748.960.000,00	-	6.748.960.000,00
22	DINAS KEBUDAYAAN	10.137.893.575,00	10.137.893.575,00	-	10.137.893.575,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN	1.723.711.500,00	1.723.711.500,00	-	1.723.711.500,00
24	DINAS PERIKANAN	4.328.230.000,00	4.328.230.000,00	-	4.328.230.000,00
25	DINAS PARIWISATA	13.281.050.000,00	13.281.050.000,00	-	13.281.050.000,00
26	DINAS PERTANIAN	24.685.903.670,20	24.685.903.670,20	-	24.685.903.670,20
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	37.129.138.858,40	37.129.138.858,40	-	37.129.138.858,40
28	SETDA	46.792.607.310,00	46.792.607.310,00	-	46.792.607.310,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
	BAGIAN HUKUM DAN HAM				
	BAGIAN ORGANISASI				
	BAGIAN EKONOMI				

	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
	BAGIAN KESEJAHTERAAAAN RAKYAT				
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				
	BAGIAN PERLENGKAPAN				
	BAGIAN UMUM				
	BAGIAN PENGADAAN				
29	SEKRETARIAT DPRD	44.450.650.000,00	44.450.650.000,00	-	44.450.650.000,00
30	KECAMATAN KARANGASEM	5.799.550.000,00	5.799.550.000,00	-	5.799.550.000,00
	KELURAHAN SUBAGAN	-	-	-	
	KELURAHAN KARANGASEM	-	-	-	
	KELURAHAN PADANGKERTA	-	-	-	
31	KECAMATAN ABANG	1.153.250.000,00	1.153.250.000,00	-	1.153.250.000,00
32	KECAMATAN KUBU	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-	1.075.000.000,00
33	KECAMATAN BEBANDEM	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	-	1.102.500.000,00

34	KECAMATAN SELAT	1.351.250.000,00	1.351.250.000,00	250.000.000,00	1.601.250.000,00
35	KECAMATAN RENDANG	1.410.070.000,00	1.410.070.000,00	-	1.410.070.000,00
36	KECAMATAN SIDEMEN	1.041.600.000,00	1.041.600.000,00	-	1.041.600.000,00
37	KECAMATAN MANGGIS	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	-	1.170.000.000,00
38	INSPEKTORAT DAERAH	4.150.370.200,00	4.150.370.200,00	3.098.581.925,00	7.248.952.125,00
39	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.754.470.000,00	6.754.470.000,00	-	6.754.470.000,00
40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.164.030.116,00	15.164.030.116,00	-	15.164.030.116,00
41	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.752.590.000,00	11.752.590.000,00	-	11.752.590.000,00
	JUMLAH	1.159.705.280.183,92	1.159.705.280.183,92	273.626.351.869,31	1.433.331.632.053,23

Adapun program dan kegiatan prioritas Kabupaten Karangasem tahun 2021 yang menjadi rencana kerja beserta pendanaannya dilengkapi dengan berita acara pemetaan (mapping) Permendagri 90 Tahun 2019 dan hasilnya, sebagaimana Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
I.	Aspek Kesejahteraan Rakyat			
I.A.	Aspek Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi			
1	Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	%	6,09	6,09
2	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Jutaan Rupiah per tahun	54,95	54,95
3	PDRB ADHK Per Kapita	Rupiah	29,64	29,64
4	Persentase Penduduk Miskin	%	5,75	5,75
5	Index Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,61	67,61
6	Koefisien Gini (Indeks Gini)	Angka	0,3393	0,3393
7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase (%)	5,75	5,75

8	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yaitu:			
	40% Bawah	Persentase (%)	23,32	23,32
	40% Sedang	Persentase (%)	37,5	37,5
	20% Tinggi	Persentase (%)	39,18	39,18
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Persentase (%)	6,00	6,00
I.B	Kesejahteraan Sosial			
I.B1.	Pendidikan			
1	Persentase APK SD / MI	%	100,56	100,56
2	Persentase APM SD/MI	%	95	97
3	Persentase APK SMP /MTs	%	97,48	97,48
4	Persentase APM SMP /MTs	%	75,08	75,08
5	Persentase Kelulusan SD/MI Paket A	%	100	100
6	Persentase Kelulusan SMP/MTs Paket B	%	100	100
I.B2	Kesehatan			
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	angka	90	90
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	angka	8	8
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	angka	8	8
4	Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	100	100
5	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	80	80
6	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100
7	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100
8	Persentase Sembuh Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	80	80
9	Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Akseptor KB (%)	%	75	75
10	Persentase Lansia Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	70	70
28	Angka Kesakitan Demam Berdarah	angka	135	130
29	Persentase Prevalensi HIV/AIDS	%	<0,5	<0,5
30	Persentase Pasien Yang Dikonseling Mau Dites HIV	%	98	98

31	Angka Kesakitan Malaria	Per 100.000 penduduk	< 1	< 1
32	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+	angka	89	90
33	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb	%	90	90
34	Menurunnya Prevalensi Gula Darah Tinggi	%	10	100
35	Mempertahankan Prevalensi Obesitas	%	17	100
36	Proporsi Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan POSBINDU PTM	%	60	100
37	Proporsi Perempuan Usia 30-50 Th Terdeteksi Dini Kanker Servik dan Payudara	%	60	100
38	Tertanganinya Kasus Campak Dan Lumpuh Layuh (AFP) Anak Usia <15 Th	%	100	100
39	Tertanganinya Desa Yang Mengalami Kejadian Luar Biasa	%	100	100
40	Tertanganinya Kasus JE di Seluruh Kab. Karangasem	%	100	100
41	Persentase Rumah Sehat	%	90	90
42	Persentase Tempat Umum Sehat (%)	%	83	83
43	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	%	100	100
44	Persentase Kualitas Air Minum Di Penyelenggara Yang Memenuhi Syarat	%	100	100
45	Jumlah Desa STBM (Satuan Indikator : Desa)	Desa	78	78
46	Persentase Penduduk Dengan Fasilitas Sanitasi Layak (%)	%	100	100
47	Persentase TPM Yang Memenuhi Syarat	%	32	32
48	Persentase RS Dan FASYANKES Yang Mengelola Limbah Medis	%	40	40
49	Tatanan Kota Sehat (Satuan Indikator: Tatanan)	Tatanan	3	5
50	Persentase Puskesmas Yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	%	99	100
51	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pencatatan Dan Pelaporan Melalui SIK	%	100	100
52	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Program SIK Puskesmas	%	100	100

53	Jumlah Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kemampuannya Melalui Pelatihan	Orang	90	90
54	Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat	%	82	82
55	Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif	%	64	64
56	Persentase Posyandu Aktif	%	57	60
57	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	%	50	55
58	Persentase Penggunaan Obat Rasional Di Puskesmas	%	78	78
59	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	%	96	96
60	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	%	50	100
61	Jumlah Pos UKK Yang Terbentuk Di Daerah PPI/TPI	POS UKK	1	4
62	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olah Raga Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	%	50	100%
63	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Puskesmas	12	12
64	Jumlah Puskesmas Yang Telah Melaksanakan Manajemen Puskesmas	Puskesmas	12	12
65	Jumlah Puskesmas Rawat Jalan Dan Rawat Inap Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Puskesmas	12	12
66	Jumlah Puskesmas Yang Siap Akreditasi	Puskesmas	12	12
67	Persentase Battra Yang Dibina	%	50	50
68	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer	%	100	100
I.B3	Kemiskinan			
1	Garis Kemiskinan	Rupiah Per bulan	298.379	298.379
2	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	22.800	22.800
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,89	0,89
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,18	0,18
I.B4	Kesempatan Kerja			
1	Jumlah Peminat Magang Di Dalam Dan Luar Negeri	Orang	20	20
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikasi	Orang	112	112

3	Jumlah LPKS Dan Kelompok Usaha Produktif Yang Meningkatkan Kompetisinya	LPSK	32	32
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100	100
5	Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek	%	45	45
6	Besaran Upah Minimum Kabupaten	Rp.	2.877.500	2.877.500
II	Aspek Pelayanan Umum			
II.A1	Kesehatan			
1	Persentase Posyandu Lansia Aktif	%	100	100
2	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjangkaran Kes. Anak Usia Sekolah	%	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Lomba Dokter Kecil	%	100	100
4	Persentase Kader Kesehatan Remaja Aktif	%	100	100
5	Jumlah Penduduk Peserta JKBM	Orang	0	0
6	Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Orang	607.786	668.565
7	Persentase Bumil Kek Mendapat Makanan Tambahan	%	95	95
8	Persentase Bumil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet	%	100	100
9	Persentase Bayi Usiakuran Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	%	60	100
10	Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
11	Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah	%	60	60
12	Persentase Ibu Hamil Menderita KEK	%	9	9
13	Persentase Balita Kurang Gizi	%	10	10
14	Persentase Balita Ditimbang (D/S)	%	85	85
15	Persentase Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beryodium	%	85	85
16	Persentase Balita Mendapat Vit. A Dosis Tinggi	%	99	99
17	Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	%	100	100
II.A2	Pelayanan Rumah Sakit Umum			
1.00	Persentase Peningkatan Jenis Pelayanan Yang Memenuhi Standar Akreditasi Pemerintah	%	90	90
2.00	Persentase Peningkatan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	%	100	100

3.00	Persentase Peningkatan Kehandalan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	%	100	100
II.A3	Lingkungan Hidup			
1.00	Persentase penanganan sampah	%	100	100
2.00	Jumlah sumber-sumber air dan sungai yang dijaga kelestariannya	Sumber air	36	36
3.00	Jumlah tokoh masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga Pemerintah/ Lembaga Adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang	18	169
II.A4	Penataan Ruang			
1	Jumlah Dokumen Teknis Rancangan Perda Tata Ruang	Dokumen	6	6
II.A5	PERHUBUNGAN Dan Pemadam Kebakaran			
1	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang dalam kondisi mantap	titik	300	1070
2	Persentase Terpeliharanya Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	%	100	100
3	Persentase layanan angkutan darat	%	25	25
4	Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal	Orang	148.404	443.712
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	4	4
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	Lokasi	1	3
7	Persentase Pemasangan rambu-rambu	%	2,29	13,78
8	Persentase Angkutan Darat Yang Beroperasi Dalam Keadaan Laik Jalan	%	100	100
9	Response Time 15 Menit Pemadam Kebakaran Sampai ditujuan	Km	15	15
10	Persentase Kasus Kebakaran Yang Ditangani	%	100	100
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
II.B	Pelayanan Penunjang			
II.B1	Industri Dan Perdagangan			
1	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dengan Perkembangan Tertib Usaha Perdagangan	%	16	16
2	Persentase Produk Industri Dan Dagang Yang Berkembang	%	4,61	4,61
3	Persentase Pertumbuhan IKM	%	2,3	2,3

II.B2	Ketenagakerjaan			
1	Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan Yang Terdata	Orang	50	50
2	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	300	300
3	Banyaknya Penganggur Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Orang	20	20
4	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Orang	20	20
II.B3	Pemberdayaan Perempuan Dan KB			
1	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	40	40
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsive Gender	%	85	85
3	Persentase Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100
4	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	%	58,74	58,74
5	Persentase Partisipasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100
6	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menjadi Peserta KB Aktif	%	80,16	80,16
7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/Cpr)	%	74,82	74,82
8	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif	%	38,87	38,87
9	Persentase Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Yang Aktif	%	44,56	44,56
10	Persentase Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif	%	38,84	38,84
11	Persentase Pengembangan Informasi Dan Data Mikro Kependudukan Dan Keluarga	%	100	100
II.B4	Komunikasi Dan Informatika			
1	Persentase SKPD Dan Fasilitas Umum Yang Sudah Terkoneksi Jaringan WIFI	%	100	100
2	Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Berbasis Web Pada Setiap SKPD	%	100	100
3	Tingkat Kepatuhan Pengelola Menara Telekomunikasi Terhadap Regulasi Operasional Menara Telekomunikasi	%	100	100
II.B5	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Bimbingan Teknis Dan Fasilitasi Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Desa	75	75

2	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	75	75
3	Fasilitasi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Desa	75	75
II.B6	Keamanan Dan Ketertiban			
1	Persentase Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran PERDA Dan PERGUB	%	100	100
2	Persentase Keamanan Lingkungan Yang Terkendali	%	100	100
III	Aspek Daya Saing Daerah			
III.A	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Angka Konsumsi RT Per Kapita	(Rp) Per Bulan	737.713,49	737.713,49
2	Pengeluaran Makanan	(Rp) Per Bulan	391.135,69	391.135,69
	Pengeluaran Non Makanan	(Rp) Per Bulan	346.577,80	346.577,80
III.B	Pertanian			
1	Jumlah Produksi Padi	Ton	69.785,90	69.785,90
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	11.692,49	11.692,49
3	Jumlah Produksi kacang Tanah	Ton	4.363,06	4.363,06
4	Jumlah Produksi Kacang Kedelai	Ton	60,00	60,00
5	Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	360,00	360,00
6	Jumlah Produksi Salak	Ton	24.500,00	24.500,00
7	Jumlah Produksi Mete	Ton		
8	Jumlah Produksi Kopi	Ton	365,00	365,00
9	Jumlah Produksi Pisang	Ton	22.000,00	22.000,00
10	Jumlah Produksi Nangka	Ton	10.110,72	10.110,72
11	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	15.049,81	15.049,81
III.C	Peternakan Kelautan Dan Perikanan			
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	581,00	581,00
2	Persentase Kesakitan Ternak Sapi	%	3,05	3,05
3	Persentase Kesakitan Ternak Kambing	%	3,15	3,15
4	Persentase Kesakitan Ternak Babi	%	5,05	5,05
5	Persentase Kesakitan Ternak Unggas	%	5,05	5,05
6	Persentase Kesakitan Hpr	%	0,18	0,18
7	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.000	23.000
8	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Perikanan	%	100	100
9	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Ekor	14.000	14.000
10	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	130.000	130.000

11	Jumlah Populasi Ternak Babi	Ekor	245.000	245.000
12	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	24.000	24.000
13	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	365.000	365.000
14	Jumlah Pemotongan Ternak	Ekor	444.000	444.000
15	Tingkat Konsumsi Ikan	Indeks	32	32
16	Jumlah Kelompok/Usaha Pengolahan Hasil Ternak	Kelompok	15	15
17	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan	Kelompok	40	40
18	Jumlah Kelompok Yang Mengelola Perluasan Areal Pakan Ternak	Kelompok	9	9
19	Jumlah Kelompok Pengembangan SPR	Kelompok	30	30
III.D	Kunjungan Wisatawan			
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	25	25
III.E	Investasi			
1	Jumlah Investasi Asing (PMA)	US\$	2.661.052	2.661.052
2	Jumlah Investasi Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rp	171.765	171.765

Sumber : RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021, serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah :

1. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Karangasem wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas.
2. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2021.
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi masing-masing melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem.

6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem secara pro aktif melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2021 serta menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya.
7. Staf Ahli Bupati ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Bupati/Wakil Bupati.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, tersedianya dan terencananya anggaran secara efektif dan efisien, juga sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh *stakeholders* dalam mengimplementasikan rencana pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki diharapkan pembangunan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Amlapura, 23 Juli 2020


BUPATI KARANGASEM, *MS*
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2021

DAFTAR LAMPIRAN :

- LAMPIRAN I : POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN HASIL PEMBAHASAN
- LAMPIRAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 YANG MENJADI RENCANA KERJA BESERTA PENDANAANNYA
- LAMPIRAN III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 YANG MENJADI RENCANA KERJA BESERTA PENDANAANNYA SESUAI DENGAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
- LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL PEMETAAN/MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
- LAMPIRAN V : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 YANG BELUM MENDAPATKAN PENDANAAN

LAMPIRAN I

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN HASIL PEMBAHASAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 46);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021.
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Maret 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGASEM

KETUA,



I GEDE DANA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

I NENGAH SUMARDI

I MADE AGUS KERTIANA

I WAYAN PARKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Karangasem di Amlapura.
5. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karangasem.

SETDA KAB. KARANGASEM SUB BAGIAN TATA USAHA	
TGL. TERIMA	04 MAR 2020
KODE	
NOMOR	1087

1/3/20

167

W

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA PEMBANGUN
 DAERAH (RKPD) KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2021

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
 DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

DAPIL	USUL/POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
I	<ol style="list-style-type: none"> 1 Permohonan Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Sapi 2 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Timbul Lingkungan Celagi Kel. Padangkerta Kec. Karangasem 3 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Sari Lingkungan Celagi Kel. Padangkerta Kec. Karangasem 4 Usulan Dana Bansos Dadia Arya Bang Sidemen 5 Usulan Bedah Rumah 6 Permohonan Bantuan 1 Barung Baleganjur 7 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Tauka Karangasem 8 Permohonan LPJ 2 titik 9 Permohonan Drainase di Pertigaan Gelumpang Pangi 10 Permohonan Penambahan Modal Koprasi 11 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Cacing Subak Bedulu Panjang 600m Kel. Subagan 12 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Penaban Tempek Sogsogan 500 x 80 x 70 m 13 Permohonan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Pasegehan Tempek Serogsogan 800m Subagan 14 Permohonan Bantuan Bansos Pasek Gelgel 15 Bansos Dadia Kuta Waringin Subagan

- 16 Permohonan Bedah Rumah Br. Dinas Pauman
- 17 Permohonan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Pejongan Desa Seraya
- 18 Permohonan Bansos untuk rehab Pelinggih Dadia Padek Pejongan Desa Seraya
- 19 Permohonan Bantuan Bedah Rumah Br. Dinas Belubuh atas nama I Made Sukadana
- 20 Permohonan bantuan KIS atau BPJS buat warga yang kurang Mampu
- 21 Permohonan Bantuan Traktor untuk Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Dsn. Dauh Pangkung Seraya Barat Kec.Karangasem
- 22 Bantuan LPJ Dauh Pangkung Seraya
- 23 Bantuan Bedah Rumah untuk Dsn. Dauh Pangkung Seraya Barat Kec.Karangasem
- 24 Permohonan Hibah Bansos Sekenem di Dadia
- 25 Permohonan Drainase Dauh Pangkung
- 26 Usulan Bedah Rumah untuk Kelompok Ngurah Batu Lembang Lingkungan Bangras Kec.Karangasem
- 27 Normalisasi Sungai di Bangras
- 28 Permohonan Pembangunan Pelinggih Hibah Bansos Dadia Arya Petandakan
- 29 Permohonan Perhaban Rumah untuk Desa Adat Perasi Kec.Karangasem
- 30 Bantuan Dana untuk STT Eka Prana Bina Marga Desa Adat Perasi Kec.Karangasem
- 31 Permohonan Pembangunan Pelinggih Hibah Bansos Dadia Arya Petandakan
- 32 Permohonan Perhaban Rumah untuk Desa Adat Perasi Kec.Karangasem
- 33 Usulan Bedah Rumah
- 34 Usulan Peningkatan Irigasi
- 35 Usulan Lampu Penerangan Jalan
- 36 Usulan Perbaikan Jembatan Br. Tukad Buah ke Tukad Tiis Desa Seraya Timur

- 37 Permohonan Bedah Rumah di Br.Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur
- 38 Mohon Bantuan LPJ (lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur
- 39 Mohon Bantuan Sederan Jalan di Br.Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur
- 40 Mohon Rehab Penyengker Pura Puseh Desa Adat Dukuh Padangkerta
- 41 Permohonan saluran irigasi Subak di Jembatan Salang sepanjang 150m dengan lebar 50m
- 42 Permohonan Bantuan Bedah Rumah bagi Warga Desa Adat Dukuh Padangkerta
- 43 Permohonan seragam pecalang
- 44 Mohon bantuan kepada Kelompok Tani Ternak Babi Dukuh Mekar Sari
- 45 Mohon bantuan Pelatihan Serati banten dan Seragam untuk PKK
- 46 Mohon bantuan irigasi di Subak Sampe
- 47 Mohon rehab Pura Pesucian
- 48 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan
- 49 Mohon Bantuan rehab rumah warga se kecamatan Karangasem
- 50 Permohonan Bedah Rumah di Desa Adat Dukuh Kel.Padangkerta Kec.Karangasem
- 51 Bedah rumah
- 52 Usulan Perbaikan Beji / Tempat Permandian Umum
- 53 Usulan Perbaikan Bale Pawedaan Di Pura Penataran Agung Gede
- 54 Usulan Perbaikan Arena Banjar Gede Subagan
- 55 Mohon bantuan Pembuatan Dapur Bale Banjar
- 56 Usulan Bantuan Sound System untuk Ibu PKK
- 57 Mohon pemasangan paving dan Perbaikan Penyengker di Banjar Adat Pempatan.
- 58 Mohon bantuan Pembuatan Dapur/ Pewaregan Bale Banjar
- 59 Permohonan Bedah Rumah di Banjar Swadarma Karangasem
- 60 Permohonan Bedah Rumah di Banjar Eka Cita desa Adat

Karangasem

- 61 Permohonan Bedah Rumah di Banjar Adat Ujung Tengah
- 62 Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Banjar Adat Ujung Tengah
- 63 Permohonan Bedah Rumah di Banjar Dharma Yadnya Kelurahan Karangasem
- 64 Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Banjar Dharma Yadnya Kelurahan Karangasem
- 65 Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Seraya
- 66 Permohonan LPJ
- 67 Perbaiki Jalan di Desa Seraya
- 68 Pembangunan Jalan Br.Bungkulan menuju Br. Suluban Seraya Barat
- 69 Permohonan Bibit Babi
- 70 Pembangunan Jalan Br.Bungkulan menuju Br.Gerobog Seraya Barat
- 71 Permohonan pakan ternak
- 72 Permohonan Pupuk
- 73 Permohonan Jalan Peninggaran menuju Taman
- 74 Permohonan Bibit Jagung
- 75 Mohon Bantuan Tiang Listrik untuk Banjar Peninggaran Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem
- 76 Permohonan Air bersih untuk Kelompok Cita Laksana Banjar Peninggaran Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem
- 77 Permohonan Bedah Rumah dan Perchaban untuk Kelompok Cita Laksana Banjar Peninggaran Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem
- 78 Perbaiki Jalan Banjar suluban menuju banjar bungkulan
- 79 Perbaiki Jalan banjar bungkulan menuju banjar gerobog
- 80 Mohon bantuan Traktor pada kelompok pertanian di Kelompok Bakti Segara Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem
- 81 Mohon bantuan mesin, jaring pada Nelayan untuk Kelompok Bakti Segara Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem
- 82 Bantuan rehab rumah di Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec.

Karangasem

- 83 Bantuan KIS untuk Kelompok Bakti Segara Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem
- 84 Bantuan Bedah Rumah di Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem
- 85 Permohonan Irigasi
- 86 Perehaban Sekolah SD 2 Tumbu
- 87 Permohonan Bedah Rumah
- 88 Permohonan Lpj
- 89 Permohonan Bantuan baju untuk STT Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler
- 90 Permohonan Bantuan Sound Sistem untuk STT Taruna Taruni Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler
- 91 Bantuan Dana untuk STT Taruna Taruni Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler
- 92 Bantuan Bola Volly untuk Club Bola Volly Batu Sanglot Desa Seraya Tengah
- 93 Bantuan Net untuk Club Bola Volly Batu Sanglot Desa Seraya Tengah
- 94 Permohonan LPJ di Desa Seraya Tengah
- 95 Bantuan Seragam untuk Club Bola Volly Batu Sanglot Desa Seraya Tengah
- 96 Permohonan Pengaspalan Jalan Kalanganyar - Jumenang
- 97 Permohonan Bantuan Pipa Air Bersih dari Gunung Desa Bukit Tabuan ke Kalanganyar
- 98 Permohonan Pengaspalan Jalan dari peninggalan ke bukit tabuan
- 99 Permohonan Bedah rumah di desa Bugbug
- 100 Permohonan Lampu penerangan jalan di desa Bugbug
- 101 Permohonan Pembangunan senderan dn pembetonan bada jalan ruas jalan ke pantai Bugbug di desa Bugbug
- 102 Permohonan Rehab penyengker dn pintu masuk sekolah SD di desa Bugbug
- 103 Permohonan Pengadaan Meubeler di sekolah SD di desa

Bugbug

- 104 Permohonan Pembangunan jalan usaha tani di wilayah subak di desa Bugbug
- 105 Permohonan Mohon hibah dari pemda Karangasem terkait keberadaan TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) di desa Bugbug untuk dipergunakan dalam pengelolaan sampah di desa Bugbug.
- 106 Permohonan Pengadaan transportasi gratis untuk siswa SMPN 4 Amlapura di desa Bugbug.
- 107 Rehab Aspal ruas jalan dari Pemunduhan menuju Pura Dalem sepanjang 1,5 km di Desa Bugbug Kec. Karangasem
- 108 Pembangunan senderan dan got ruas jalan dari Pemunduhan sampai Pura Dalem Desa Adat Bugbug kec. Karangasem
- 109 Betonisasi badan jalan dan pemasangan rambu ruas jalan Pura Pasujan Desa Adat Bugbug Kec. Karangasem
- 110 Pembangunan Jalan usaha tani wilayah subak-subak desa Adat Bugbug Kec. Karangasem
- 111 Perbaiki irigasi subak-subak yang ada di Desa Adat Bugbug
- 112 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Sekitar desa Adat Bugbug Kec. Karangasem
- 113 Pembangunan rumah layak huni di Desa Adat Bugbug
- 114 Peningkatan ruas jalan dari Lumpadang menuju Bukit Bako Desa Adat Bugbug
- 115 Pembangunan Ruang Kelas SD 1 Bugbug
- 116 Rehab Penyengker SD 5 Bugbug
- 117 Usulan Bedah Rumah
- 118 Usulan Servis Rumah atau rehab Rumah
- 119 Usulan Lampu Penerangan Jalan
- 120 Usulan Jaminan Kesehatan

- | | |
|-----|---|
| 121 | Usulan Beasiswa untuk anak Sekolah |
| 122 | Usulan Pembinaan Sekaa - Sekaa / Kelompok |
| 123 | Usulan Pembinaan Sekaa - Sekaa / Kelompok (Sekaa Gong, Sekaa Rejang) |
| 124 | Bantuan Betonisasi Jalan |
| 125 | Renovasi Wantilan Bale Banjar |
| 126 | Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 127 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 128 | Usulan Servis/ Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 129 | Usulan Pakaian Seragam untuk Sekee Gong Istri, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 130 | Usulan Dana Pembinaan untuk Sekee Gong Istri Harini Asitha, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 131 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Dalem Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 132 | Usulan Servis Rumah / Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Dalem Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 133 | Usulan KIS untuk masyarakat Dadia Dalem Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 134 | Usulan Air dari PDAM untuk masyarakat Dadia Dalem Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 135 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 136 | Usulan Servis Rumah / Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |
| 137 | Usulan pengajuan KIS untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem |

Karangasem

- 138 Permohonan Jalan Irigasi Got-got di Br. Werdi Guna
- 139 Permohonan Bedah Rumah untuk Masyarakat tidak mampu
- 140 Mohon perbaikan jalan dari jalur Jasri menuju Timbrah
- 141 Mohon Bantuan Jalan Betonisasi Sepanjang jalan Br. Semadi
- 142 Mohon Bantuan Bak Sampah
- 143 Mohon Bantuan Rehab Penyengker pura Dadia dan Bale Banjar Pura dadia Pande Besi Selalang Seraya Barat
- 144 Permohonan Bedah Rumah untuk dadia Pande Besi Selalang Seraya dan Dauh Pangkung Seraya Barat
- 145 Mohon Bantuan Betonisasi Jalan Pemukiman di Dauh Pangkung Seraya Barat
- 146 Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) 7 Titik di Seputar Dauh Pangkung
- 147 Mohon Bantuan Pembentukan dan Permodalan untuk usaha kelompok masyarakat kelompok ternak babi, sapi dan kelompok usaha lainnya
- 148 Mohon pembersih dan atau pangangkutan sampah yang ada di tempat pembangunan sampah di jalan selegenting oleh pihak terkait
- 149 Mohon perbaikan ruas jalan selegenting (dari bengkel Autotama keperumahan Nirmala Sari)
- 150 Mohon perbaikan jalan pinggir pantai (ruas karena sering terendam banjir karena tidak ada saluran pembangunan)
- 151 Permohonan Bedah Rumah di Banjar Adat Kutuh Desa Pekraman Jasri Kelod
- 152 Mohon perbaikan /Normalisasi saluran air /parit di jalan menuju pantai jasri (saluran mampet kalau hujan air meluap kejalan)
- 153 Mohon Bantuan Saluran air pembangunan di banjar kutuh di sekitar bawah tower
- 154 Mohon bantuan untuk di permudah dalam pengurusan ijin keberdaan dan parasional villa di jasri
- 155 Permohonan Bedah Rumah untuk Dadia Darma Astiti Jasri Karangasem

	<p>156 Permohonan Perbaikan Penyengker Pura Dukuh Gunjang dadia Darma Astiti</p> <p>157 Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) 4 titik di pura dalem dan jalan menuju pure dalem desa adat jasri</p> <p>158 Mohon Betonisasi Jalan Menuju Pura Dadia Darma Astiti</p> <p>159 Usul agar dapat dana bansos untuk kegiatan-kegiatan upacara agama dan upacara adat</p> <p>160 Permohonan Bedah Rumah untuk Banjar Dewamas Jasri Karangasem</p> <p>161 Permohonan Rehab Bangunan banjar dewamas</p> <p>162 Mohon pemindahan tempat pembuangan sampah di samping lapangan volly patung salak dan pembuatan tempat pembuangan sampah baru di sebelah barat bengkel Autotama</p> <p>163 Permohonan rambu lalu lintas dan pengaturan lalu lintas di lingkar patung salak-jasri</p> <p>164 Permohonan pemangkas pohon-pohon yang terlalu rindang di seputaran jalan raya jasri</p> <p>165 Perbaikan irigasi subak susuan-jasri</p> <p>166 Perbaikan pura bedugul subak susuan - jasri</p> <p>167 Mohon bantuan pengurus KIS (kartu indonesia sehat)</p> <p>168 Perbaikan Got / saluran limbah didepan banjar Dewamas</p> <p>169 Mohon selalu berkoordinasi dengan kelian banjar ,kelian lingkungan dan kelian desa didlm penentuan warga yg mendapatkan bantuan bedah rumah</p> <p>170 Usulan penghapusan system zonasi sekolah</p> <p>171 Mohon diperbaiki tentang usulan pemekaran desa menjadi kedesaan</p>
II	<p>172 LPJ Penerangan Jalan Sekecamatan Bebandem</p> <p>173 Bedah Rumah Sekecamatan Bebandem</p> <p>174 Penyengker Pura Puja Lawe, Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem</p> <p>175 Meubeler Untuk TK,SD,SMP,SMA Se Kecamatan Bebandem</p> <p>176 Irigasi Sekecamatan Bebandem</p>

- 177 Baleganjur Di Pura Dadia Arya Kuta Waringin Merta Sari, Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem
- 178 Peningkatan Ruas Jalan Dari Dusun Desa Menuju Pura Dalem Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangsem
- 179 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Sengkawan Tempek Pandusan, Dusun Desa , Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem
- 180 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Tempajang, Dusun Desa ,Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem
- 181 Pembangunan Jalan Usaha Tani /Jalan Subak Sengkawan ,Tempek Pandusan, Dusun Desa ,Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem.
- 182 Drainase Di Lingkungan Bungaya, Kecamatan Bebandem Kab. Karangsem
- 183 Pembangunan Jalan Usaha Tani /Jalan Subak Wates Tempajang, Dusun Desa ,Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem
- 184 Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Subak Menuju Balai Subak Den Umah Tempek Sengkawan
- 185 Pembangunan Pura Dadia Gede Banjar Tengah di Desa Pakel ,Kecamatan Bebandem
- 186 LPJ dari Dusun Pande Sari Menuju Liligundi
- 187 Pengaspalan Jalan Dari Desa Pakel Menuju Banjar Dukuh
- 188 Sarana Dan Prasarana Pewargan Pura Paibon Dadia Gede,Banjar Tengah di Desa Pakel ,Kecamatan Bebandem
- 189 Pengadaan Bedah Rumah di kedesaan Bungaya
- 190 Pengadaan Bedah Rumah Se Kecamatan Bebandem
- 191 Pembangunan Sekolah Se Kecamatan Bebandem
- 192 Perehaban Sekolah Sekecamatan Bebandem
- 193 Perehaban Ruang Kelas di SD 1 Bebandem , SD 6 Bebandem, SMP 4 Bebandem
- 194 LPJ di Kecamatan Bebandem
- 195 LPJ di Kedesaan Bungaya (Dari Bungaya Menuju Bungaya

- Kangin) (Dari Bungaya Menuju Sesana)
- 196 Peningkatan Jalan Melingkar Se Kedesaan Bungaya (Dari Dusun Subagan Menuju Dharma Karya)
 - 197 Peningkatan Jalan Bungaya Menuju Gumung
 - 198 Bantuan Irigasi Subak Puseh
 - 199 Baleganjur di Pura Arya Kuta Waringin Bungaya
 - 200 Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pujalawe
 - 201 Pengadaan Cubang Penampungan Air Di Wilayah Kecamatan Bebandem
 - 202 Peningkatan Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lapangan Volly, Tenis Meja dll)
 - 203 Pengadaan LPJ di Dusun Desa ,Desa Bungaya
 - 204 Pengadaan LPJ Se Kecamatan Bebandem
 - 205 Pengadaan Sarana & Prasarana (Tempat Sampah) di Pura Bale Agung & Banjar Desa
 - 206 Peningkatan Sarana Mobil Sampah
 - 207 Pengadaan Gong untuk Deha & Teruna Desa Adat Bungaya
 - 208 PIPANISASI di Kedesaan Bungaya
 - 209 PIPANISASI Se Kecamatan Bebandem
 - 210 Sarana & Prasarana Lapangan Voly di Banjar Adat Jungsri
 - 211 Sarana & Prasarana Pencak Silat, Samsak di Banjar Adat Jungsri
 - 212 Pakaian Seragam Futsal
 - 213 Pakaian Seragam STT
 - 214 Pakaian Seragam Volly
 - 215 Pembangunan Jalan Melingkar di Dusun Dukuh Kecamatan Bebandem
 - 216 Pembangunan Jalan Se Kecamatan Bebandem
 - 217 Pembangunan Jalan Tanah Aron Bebandem Menuju Abang

- 218 Peningkatan Jalan Irigasi Subak Pandusan
- 219 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Den Umah Tempek Sengkawan
- 220 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Tempajang
- 221 Pembangunan Jalan Subak Menuju Balai Subak Pandusan
- 222 Perbaikan Jalan Prapit Abian Menuju Desa Bungaya
- 223 Peningkatan Jalan Di Wilayah Kecamatan Bebandem
- 224 Pengamanan Sungai dan Normalisasi Alur
- 225 Permohonan Jaringan SPAM (Sungai Mata Air Pedesaan)
- 226 Pengamanan Mata Air
- 227 Pemeliharaan Jalan Mumbul sampai Tyingan kurang lebih 1.5km
- 228 Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan)
- 229 Permohonan Bedah Rumah
- 230 Usulan Ruas jalan Liligundi - Gunung Sari (1,5 km)
- 231 Usulan LPJ di Pura Pemaksan Rum Br. Dinas Pande Sari, Ds. Bebandem
- 232 Usulan LPJ di Pura Pemaksan Naga Sari Desa Adat Bebandem
- 233 Pengaspalan Jalan Bebandem - Pakel
- 234 Pemeliharaan Jalan Bebandem - Pakel (Saluran Air)
- 235 Usulan LPJ di Br. Dukuh, Desa Adat Sibetan
- 236 Usulan Penataan Agrowisata di Br. Dukuh, Desa Adat Sibetan
- 237 Usulan LPJ di Pura Beji Sidem Sibetan, Desa Sibetan
- 238 Usulan Pengamanan Mata Air Desa (SPAM) Desa di Pura Beji Sidem Sibetan, Desa Sibetan
- 239 Mohon Bantuan Bedah Rumah
- 240 Mohon Bantuan Pengadaan Air PDAM
- 241 Pengaspalan jalan dari Br. Dinas Dangin Sema menuju Br. Dinas Liligundi
- 242 Mohon bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan)

- 243 Mohon bantuan Pembuatan Jalan baru di Br. Dinas Br. Gula
- 244 Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- 245 Permohonan Bedah Rumah di Dadia Merajan Nangka Desa Adat Nangka
- 246 Permohonan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Dadia Merajan Nangka Desa Adat Nangka
- 247 Permohonan KKC (Kartu Karangasem Cerdas) di Dadia Merajan Nangka Desa Adat Nangka
- 248 Permohonan Air Bersih di Dadia Merajan Nangka Desa Adat Nangka
- 249 Permohonan Bedah Rumah di Pemaksan Alit Tegal Bengkak
- 250 Permohonan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Pemaksan Alit Tegal Bengkak
- 251 Permohonan KKC (Kartu Karangasem Cerdas) di Pemaksan Alit Tegal Bengkak
- 255 Permohonan LPJ (lampu Penerangan Jalan) di Pemaksan Alit Tegal Bengkak
- 256 Permohonan Air Bersih di Pemaksan Alit Tegal Bengkak
- 257 Mohon bantuan pakaian seragam tari kesenian tradisional Rudath
- 258 Mohon agar BPJS bisa diproses dari kelas III menjadi Kartu KIS
- 259 Mohon anggaran perbaikan kolam pancing
- 260 Mohon perbaikan akses jalan dari Kecicang menuju Abian Soan
- 261 Mohon Rehab Permandian umum
- 262 Mohon bantuan alat music dan sound system
- 263 Agar dibentuk Lembaga Perkreditan Khusus untuk menangkai masuknya rentenir
- 264 Mohon bantuan dana untuk Koperasi Pondok Pesantren Alkhairatul Murafiun
- 265 Mohon Perbaikan Got disepanjang jalan menuju Musholla Alkhairatul Murafiun
- 266 Mohon bantuan dana untuk renovasi Musholla Alkhairatul Murafiun
- 267 Mohon bantuan seperangkat Komputer untuk Yayasan Alkhairatul Murafiun untuk kegiatan belajar mengajar

- 268 Mohon bantuan pengadaan mobil ambulance
- 269 Mohon bantuan agar selokan sepanjang musholla ditutup
- 270 Agar ditertibkan bagi warga yang menggunakan lahan gang untuk tangga masuk rumah warga
- 271 Mohon Bantuan pembangunan Balai Serga guna di musholla
- 272 Mohon bantuan pembangunan teras pada Pondok Pesantren
- 273 Mohon bantuan pembangunan wantilan di lahan pemakaman umum
- 274 Moho bantuan alat memasak untuk kelompok suka duka di pondok pesantren
- 275 Mohon bantuan alat music dan seragam kesenian Rudath
- 276 Mohon dibantu Papan Tulis White Board untuk proses belajar pesantren mengajar santri di Pondok Pesantren
- 277 Mohon bantuan seragam guru dan santri pondok pesantren
- 278 Mohon bantuan alat musik Qasidah bagi para guru dan santri
- 279 mohon pembuatan jalan di perbatasan Bungaya-Asak sepanjang 700 meter
- 280 mohon bantuan pavingisasi jalan dari banjar lebah sari menuju sungai setempat
- 281 mohon bantuan tembok penyengker kuburan Desa Lebah Sari
- 282 mohon bantuan bedah rumah bagi warga banjar dinas Lebah Sari
- 283 mohon bantuan alat musik Qasidah dan pakaian untuk majelis takim banjar Dinas Lebah Sari
- 284 mohon bantuan pembangunan Gerbang Kampung
- 285 mohon bantuan pembangunan Masjid dan lampu merkuri untuk wilayah banjar Dinas lebah Sari
- 286 mohon renovasi lantai dan plafon pada balai banjar Dinas Lebah Sari
- 287 mohon bantuan pengadaan rompi Kesenian Jidur
- 288 mohon bantuan rehab rumah warga di Banjar dinas Lebah Sari
- 289 mohon difasilitasi untuk pendirian Yayasan Masjid jami Baiturahim

- 290 mohon bantuan fasilitasi sekolah maupun keperluan belajar mengajar untuk MTs Maarif Kecicang Islam
- 291 mohon perbaikan jalan dari Abian Soan menuju Musholla Ar Rahman Banjar dinas Kecicang Islam
- 292 mohon bantuan pendirian Pondok bTahfis untuk MTs. Maarif
- 293 mohon bantuan pengadaan Mobil Ambulance
- 294 mohon bantuan pembangunan pintu gerbang kuburan Kecicang Islam
- 295 mohon pembangunan jalan menuju kuburan Banjar Dinas Kecicang Islam
- 296 renovasi Gerbang kampung Banjar Dinas Kecicang Islam
- 297 Permohonan jalan menuju Obyek Wisata Kastala
- 298 Permohonan Obyek Wisata
- 299 Permohonan Bedah Rumah
- 300 Permohonan KIS
- 301 Permohonan Irigasi
- 302 Permohonan LPJ
- 303 Permohonan Perbaikan jalan dari Kastala menuju Bungaya
- 304 Permohonan Jalan Bebandem Pengadangan
- 305 Permohonan Perbaikan Balai Gong
- 306 Permohonan baleganjur
- 307 Mohon Biaya untuk Ngaben Masal
- 308 Permohonan Rehab Rumah
- 309 Mohon Perbaikan jalan Tihingan Kangin menuju Tihingan Seka
- 310 Memperbaiki jalan Aspal dari banjar Dinas Dukuh menuju banjar Dinas Tihingan Kangin sepanjang 2,5 km
- 311 Usulan Bibit Babi untuk Kelompok Wanita Maju Jaya Tihingan Kangin sebanyak 80 ekor
- 312 bantuan Bibit Kelapa sebanyak 2000 biji
- 313 Usulan Bibit Panili sebanyak 1000 stek
- 314 Perbaikan Bangunan di Pura Wates Tihingan
- 315 Lampu Pencerangan Jalan di Tihingan Tengah

	316	Bantuan Bedah Rumah di Tihingan Tengah
	317	Usulan bantuan Balai Gong di Pura Segee Banjar Adat Tihingan
	318	Usulan Rehab Pura Dadia yaitu Balai Pewedaan dan Bangunan Linggih Sanghyang Tiga di Dadia Gelumbang
	319	Usulan Rehab Bangunan Balai Serba Guna di Dadia Pande
	320	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Pande
	321	Mohon bantuan Irigasi di Subak Gontalan II
III	322	Mohon Bantuan PIPANISASI dan Reservoir di banjar Bakung
	323	Mohon Bantuan LPJ
	324	Mohon Bantuan Pembangunan Balai banjar adat Bakung
	325	Mohon Bantuan Bedah Rumah bagi warga kurang mampu
	326	Mohon bantuan beasiswa untuk siswa dari SD s/d SMA
	327	Mohon Bantuan Pengadaan seragam Sekeha Gong
	328	Mohon bantuan Pembangunan Jembatan penghubung Desa Antiga dan Antiga Kelod
	329	Mohon bantuan tempat sampah
	330	Mohon Bantuan Pembuatan Got dari Desa Antiga menuju Gegelang
	331	Mohon bantuan rehab sekolah dan Bantuan mebuler untuk SDN 1 Antiga
	332	Mohon Bantuan Fogging
	333	Mohon Bantuan untuk mempertinggi jembatan di Simpangan
	334	Mohon bantuan renovasi Lapangan Volly di Simpangan
	335	Mohon perbaikan jalan di pertigaan simpangan menuju arah barat
	336	Dimohon agar iuran BPJS untuk kelas III agar tidak ada kenaikan
	337	Mohon bantuan rabat beton jalan setapak di selumbang
	338	Mohon bantuan Pembangunan Balai Masyarakat di Banjar Pangi Tebel Desa Antiga Kelod
	339	Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Pangi Tebel Desa Antiga Kelod

- 340 Mohon bantuan Pembangunan Jembatan di Banjar Pangli Tebel Desa Antiga Kelod
- 341 Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Pangli Tebel Desa Antiga Kelod
- 342 Mohon bantuan Pembuatan Senderan Sungai di Banjar Pangli Tebel Desa Antiga Kelod
- 343 Mohon Bantuan LPJ di Banjar Pangli Tebel Desa Antiga Kelod
- 344 Mohon bantuan Perbaikan Balai Pertemuan di Banjar Pangli Tebel Desa Antiga Kelod
- 345 Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA untuk Desa Antiga Kelod
- 346 Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA untuk Desa Sengkidu
- 347 Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Karangasem Desa Sengkidu
- 348 Mohon Bantuan LPJ di Banjar Karangasem Desa Sengkidu
- 349 Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Karangasem Desa Sengkidu
- 350 Mohon bantuan Pembukaan Jalan di Banjar Karangasem Desa Sengkidu
- 351 Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA di Desa Nyuh Tebel
- 352 Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel
- 353 Mohon Bantuan LPJ di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel
- 354 Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel
- 355 Mohon bantuan Senderan Sungai di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel
- 356 Mohon bantuan Pembangunan Balai Masyarakat di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel
- 357 Permohonan LPJ di Pertigaan Padangbai sampai Perempatan Desa Antiga
- 358 Perbaikan Jaringan Irigasi di Desa Telengan dan Br. Ketug

- 359 Mohon Mesin Kompresor dan Peralatan Kerajinan mengukir
- 360 Bantuan Bedah Rumah
- 361 Mohon bantuan Usaha untuk Kelompok
- 362 Mohon Rabat Kurus Jalan Raya Tenganan Pesedahan
- 363 Bantuan Hibah Bansos untuk Pura Dadia
- 364 Permohonan Bedah Rumah di Br.Dinas Kawan Desa Manggis
- 365 Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Kawan Desa Manggis
- 366 Rabas Beton Gang di Br.Dinas Kawan Desa Manggis
- 367 Hibah Bansos ke Dadia Pejeng Desa Manggis
- 368 Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) untuk Dadia Pejeng Desa Manggis
- 369 Mohon Bantuan aspal Jalan Apit Yeh Menuju Buitan.
- 370 Permohonan Bedah Rumah di Br.Dinas Gegelang
- 371 Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Gegelang
- 372 Mohon Bantuan aspal Jalan dari Pura Jati Tembus Pura Taman sari Ketug Antiga
- 373 Pengadaan Jubang Air / Reservoar di Br.Dinas Gegelang
- 374 Permohonan Bedah Rumah
- 375 Permohonan Irigasi
- 376 Permohonan Rehab Sekolah yang mengalami kerusakan Se-Kecamatan Manggis
- 377 Permohonan Lampu Penerangan Jalan
- 378 Permohonan Bedah Rumah untuk masyarakat di banjar Karanganyar
- 379 Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan untuk Wilayah banjar Karanganyar
- 380 Mohon bantuan perbaikan jalan dari banjar Belong menuju Pura Puseh
- 381 Mohon perbaikan Jembatan dari Banjar Belong menuju Banjar Yeh Poh

- | | |
|-----|--|
| 382 | Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan untuk wilayah desa Gegelang |
| 383 | Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Desa Gegelang |
| 384 | Normalisasi Trotoar sekitar Pertamina menuju Pantai labuhan |
| 385 | Mohon bantuan Lampu penerangan Jalan di banjar Seraya Desa Antiga |
| 386 | Perbaiki Jalan (Rabat Beton) untuk Jalan Jalur ke Desa Asak |
| 387 | Mohon lampu Penerangan Jalan |
| 388 | Mohon bantuan Bedah Rumah |
| 389 | Mohon Pembiayaan Baju untuk Ibu-ibu PKK |
| 390 | Mohon bantuan Pengadaan Gong (Baleganjur) |
| 391 | Perbaiki Rabat Beton |
| 392 | Bantuan Hibah untuk Penyengker Balai Banjar |
| 393 | Penyaluran bantuan KIS agar lebih merata |
| 394 | Bantuan Rabat Beton di Pura |
| 395 | Bantuan Sound System untuk Sekaa Truna Truni |
| 396 | Penambahan Sumber Air Bersih di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 397 | Penyediaan Tempat Parkir di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 398 | Permohonan Tempat Sampah di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 399 | Permohonan Pompa listrik (Kincir Air) di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 400 | Penyenderan dan Irigasi Pura Dalem di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 401 | Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 402 | Permohonan Mesin Pemotong Rumput di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 403 | Permohonan Mesin Kolang-kaling (Buah Jaka/Beluluk) di Desa Adat Gumung Kec.Manggis |
| 404 | Senderan (Penataan Lingkungan) di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Kec.Manggis |

- 405 Perluasan Jaringan Listrik di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Kec.Manggis
- 406 Pengadaan Sepeda Motor Viar di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Kec.Manggis
- 407 Mohon bantuan Bansos untuk perbaikan Pelinggih Pura Dadia Batur Taman Sari
- 408 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan disekitar Pura Dadia Batur Taman Sari
- 409 Mohon bantuan pengaspalan jalan lingkar dari Buitan menuju Apit Yeh Desa Manggis
- 410 Mohon Bantuan Bansos untuk perbaikan Pelinggih Pura yang ada di Banjar Pegubugan
- 411 Mohon perbaikan jalan setapak menuju air terjun Gerojog Sambeh di Banjar Pegubugan
- 412 Mohon Bantuan Peningkatan SDM PKK untuk banjar Adat Pande Batur
- 413 Mohon bantuan Bansos untuk rehab Pura dan Balai Banjar Adat Pande Batur
- 414 Mohon dibuka jalan melingkar dari dusun Belong ke Dusun Pande Kedesaan Manggis
- 415 Mohon bantuan Bansos agar diadakan lagi
- 416 Mohon Bantuan pembuatan jembatan untuk fasilitas mesucian Ida Betara Puseh Desa Adat Manggis
- 417 Mohon bantuan jalan lingkar Dusun Bukit Catu-Desa Selumbung-Siig-Desa Manggis

- IV 418 Mohon Bantuan Lpj di beberapa titik di Desa Duda Timur.
- 419 Permohonan Jalan Pesangkan Antiga
- 420 Mohon Bantuan Hibah Bansos
- 421 Permohonan Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu
- 422 Mohon kartu KIS untuk rakyat tidak mampu
- 423 Permohonan LPJ Di Beberapa titik di Desa Duda Timur
- 424 Permohonan Pakian Seragam
- 425 Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekeche/dadia guna membantu pembangunan.

- 426 Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biyai pemerintah
- 427 Mohon Bantuan LPJ di beberapa titik di Desa Duda Timur
- 428 Peningkatan Jalan Wates tengah patch 3 KM
- 429 Permohonan Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu di Banjar Adat Pateh, Desa Duda Timur, Kec. Selat
- 430 Mohon Bantuan Rehab Sekolah di Banjar Adat Pateh, Desa Duda Timur, Kec. Selat
- 431 Mohon kartu KIS untuk rakyat tidak mampu di Br. Babakan, Desa Peringsari
- 432 Permohonan Bedah Rumah di Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Peringsari
- 433 Mohon Bantuan Irigasi di Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Peringsari
- 434 Bantuan Pakaian Seragam Sekeha Gong di Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Peringsari
- 435 Pemeliharaan Jalan Babakan Lusuh 2 KM
- 436 Peningkatan Jalan Pesangkan Antiga 5 KM
- 437 Permohonan LPJ beberapa titik di Desa Duda Timur
- 438 Rehab Balai Banjar Batu Gede, Desa Duda Timur
- 439 Rehab Sekolah Desa Duda Timur
- 440 Perlu Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Desa Talibeng
- 441 Pemeliharaan Jalan Talibeng Delodyeh Kangin 3 KM
- 442 Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biyai pemerintah
- 443 Mohon Bantuan Bedah Rumah bagi warga yang tidak memiliki rumah di Desa Talibeng, Kec. Sidemen
- 444 Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dari Desa menuju Pura Penataran Puri Agung sebanyak : 5 Titik
- 445 Bantuan Sosial untuk Pelaksanaan Karya Nubungdaging ring Pura Penataran Puri Agung tahun 2024
- 446 Pembangunan Candi Bentar ring Pura Puri Agung agar selesai sebelum tahun 2024

- 447 Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Upacara Piodalan seperti Gong dan pakaian tari-tarian
- 448 Bedah Rumah
- 449 Bantuan Lanjut Usia (Lansia)
- 450 Bantuan Bea Siswa anak yang berprestasi
- 451 Bantuan Peralatan Kerja untuk pertanian dan pertukangan
- 452 Bantuan Bedah Rumah untuk Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen
- 453 Lampu Penerangan Jalan diseputaran Pura Pemaksan Penataran Lipah
- 454 Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen
- 455 Bantuan Pemeliharaan Jalan Br. Dukuh Ogang, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen
- 456 Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Br. Dukuh Ogang, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen
- 457 Mohon bantuan untuk pura Dadia di Desa Pempatan terutama bantuan berupa bangunan fisik
- 458 Mohon perbaikan/peningkatan jalan Keladian Kangin
- 459 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk warga kurang mampu
- 460 Mohon bantuan Pos Kamling di Dusun Geliang
- 461 Mohon Bantuan Cubang air di Dusun Geliang
- 462 Mohon bantuan untuk peningkatan bangunan Bale Pertemuan Tempek Baler Jebag
- 463 Mohon adanya santunan untuk para Lansia
- 464 Mohon Bantuan Kursi Roda untuk Penyandang Cacat
- 465 Mohon bantuan pembuatan Lapangan Fotsal
- 466 Mohon bantuan LPJ
- 467 Mohon bantuan alat Gamelan Klentangan
- 468 Mohon bantuan peningkatan jalan Pemuteran menuju Asta dan ke Perbatasan Bangli
- 469 Mohon bantuan pengadaan pakaian sekeha gong

- | | |
|-----|--|
| 470 | Mohon bantuan sosial untuk perbaikan Pura Dadia di sekitar Bajar Dinas Pemuteran |
| 471 | Mohon bantuan modal usaha untuk Kelompok Tani Tunas Rahayu |
| 472 | Mohon perbaikan balai kelompok Tunas Rahayu |
| 473 | Mohon bantuan mesin jahit untuk anggota Kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu |
| 474 | Mohon bantuan seperangkat alat memasak untuk anggota kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu |
| 475 | Mohon bantuan bibit babi untuk anggota kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu |
| 476 | Mohon bantuan untuk para lansia |
| 477 | Mohon bantuan Pembuatan tempat Pitra Yadnya di Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang |
| 478 | Mohon bantuan Buku Gegelaran Jero Mangku untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang |
| 479 | Mohon bantuan Pengadaan Bajra sebanyak 21 buah untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang |
| 480 | Mohon bantuan Bale Pesandekan di tempat Pitra Yadnya untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang |
| 481 | Mohon bantuan Pengadaan seperangkat Gong untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang |
| 482 | Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan di Perbekelan Nongan |
| 483 | Mohon Bantuan rabat lantai Gedung Pemuda di Desa Nongan |
| 484 | Mohon bantuan rabat pinggir aspal jalan sekitar Perbekel Nongan |
| 485 | Mohon bantuan Pembangunan Pura Dadia di Wilayah Perbekelan Nongan |
| 486 | Mohon bantuan BPJS |
| 487 | Mohon bantuan hotmix jalan sekitar Perbekelan Nongan |
| 488 | Mohon bantuan pengobatan gratis untuk warga Nongan |
| 489 | Mohon bantuan seragam Sekeha Gong Wanita Werdi Kencana Desa Nongan |

- 490 Mohon perbaikan Gedung PAUD kumara Guaji Banjar Tengah Desa Nongan
- 491 Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan di Desa Pempatan Kec. Rendang
- 492 Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Pempatan Kec. Rendang
- 493 Mohon bantuan pengadaan bibit ternak babi dan sapi untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang
- 494 Mohon bantuan pakaian seragam kelompok untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang
- 495 Mohon bantuan pengadaan bibit kayu sengon, bibit Alpukat dan Durian untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang
- 496 Mohon Bantuan Peningkatan jalan Pempatan ke Aias Ngandang
- 497 Mohon bantuan Bibit Sapi untuk Kelompok Tani (Gapoktan) Arta Sedana Desa Pempatan Kec. Rendang
- 498 Mohon bantuan Bibit Pohon Sengon, Durian dan Alpukat untuk Kelompok Tani (Gapoktan) Arta Sedana Desa Pempatan Kec. Rendang
- 499 Perehaban Balai Banjar
- 503 Pembangunan Bale Pelik di Ulunsuwi
- 504 Usulan Bedah Rumah
- 505 Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah/ Penampungan Sampah
- 506 Pengadaan mobil/ Alat pengangkut sampah
- 507 Pembangunan jalan Subak/ Jalan pertanian
- 508 Penyaluran Tenaga Kerja Kapal Pesiar
- 509 Rabat Beton di Jalan Persawahan Kalimata
- 510 Saluran Irigasi di jalan subak persawahan kalimata
- 511 Pembangunan Trotoar di jalan Dewa Anom Kec. Rendang
- 512 Perluasan Jaringan Listrik/ Tiang listrik
- 513 Bantuan untuk Lansia
- 514 Bantuan untuk anak yatim piatu

- 515 LPJ di perempatan jalan Dukuh sakti
- 516 Usulan Penyengker Banjar (Bansos)
- 517 Usulan Lampu Penerangan Jalan
- 518 Usulan irigasi pinggir jalan di jalan Abuan menuju Menanga
- 519 Usulan Pakaian untuk PKK
- 520 Perbaikan Jalan Surya Indah Gang Pidpid jalan lingkak 400 m
- 521 Pebaikan Got irigasi Jalan Astina Pura
- 522 Tiang Listrik di Jalan Abuan
- 523 Pengadaan Tiang listrik di Gang pidpid
- 524 Pengarasan ruas jalan Candu tukad Jinah 1 km 40 m jembatan penghubung ke Kab.Bangli
- 525 Usulan LPJ di Candu
- 526 Usulan Irigasi di jalan Candu
- 527 Pebaikan Jalan Muku ke Abuan
- 528 KKC tetap dipertahankan
- 529 Pembangunan Perpustakaan SDN 1 Rendang
- 530 Bantuan masyarakat yang cacat
- 531 Perbaikan Penerangan Jalan
- 532 Pengadaan Angklung
- 533 Pengadaan Pakaian/ Wastra Pemangku (Paiketan Eka Cita Kepemangkuan Kec. Rendang)
- 534 Rambu Jalan di Sepanjang jalan Dewa Anom
- 535 Jalan di Tinggaan wilayah Br. Baler Pasar kurang lebih 1 Km
- 536 Rehab Banjar di Br. Baler Pasar
- 537 Pengadaan Ambulance di Banjar Rendang Kelod
- 538 Usulan Penyengker Setra Adat Rendang
- 539 Jalan Setra Br. Adat Rendang + 2 Km dan Irigasi
- 540 LPJ di lingkungan Br. Adat Rendang
- 541 Pembinaan Pendidikan dan Olahraga, Penataan Lapangan Olahraga Desa Rendang

- 542 Balai Banjar Baler Pasar di Renovasi
- 543 Pembinaan Kesenian Dana Perbaikan Sarana Prasarana dan Pakaian
- 544 Usulan LPJ Desa Tinggaan Rendang
- 545 Jalan Br. Langsung Perubahan status jalan dan pembangunan jalan
- 546 Irigasi di Jalan Br. Langsung
- 547 Pendataan KIS dan Kartu Indonesia Pintar
- 548 Pembuangan air di Yeh Sah dan Pembangunan Jalan Irigasi
- 549 Pengadaan Pipa Induk PDAM di Br. Langsung
- 550 Pembangunan Banjar Adat Langsung (Pengadaan Bansos)
- 551 Pembangunan Jalan di Tanah Bitu Br. Adat Langsung
- 552 Irigasi Subak Tanah Bitu Br. Adat Langsung
- 553 Pengadaan Seragam PKK untuk Banjar Langsung, Desa Adat Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem
- 554 LPJ di Banjar Adat Langsung
- 555 Penataan sumber mata air Belatuk Banjar Semseman dan Tunjung Kuning di Banjar Pakel
- 556 Peningkatan fasilitas pariwisata
- 557 Bantuan Sosial
- 558 Lampu Penerang Jalan Diseputaran Jalan Br. Cegeng Kelod
- 559 Pengembangan Desa Wisata, Dana Bantuan Bansos
- 560 Lampu Penerangan Jalan seputaran Jalan Desa Adat Kebung
- 561 Bantuan Aspal Jalan Dari Pura Puseh Menuju Pesucian Betara Dalem Desa Adat Kebung
- 562 Bantuan Aspal Jalan Menuju Pura Taman Gangsing
- 563 Bantuan Blank Sport, Telkom/Tower (2) Desa Adat Kebung, Telaga Tawang, Kec. Sidemen
- 564 Bantuan Indihome Desa Adat Kebung, Telaga Tawang, Kec. Sidemen
- 565 Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas

Sebudi.

- 566 Usulan Bantuan Bedah Rumah Di Lingkungan Br.Dinas Sebudi
- 567 Usulan Pembetonan Jalan dari Br. Dinas Sebudi menuju Desa Amerta Buana.
- 568 Usulan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan (KIS)
- 569 Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Br. Padang Tunggal.
- 570 Usulan Bantuan Bedah Rumah Di Lingkungan Br.Padang Tunggal.
- 571 Perbaiki Jalan dari Br. Dinas Padang Tunggal menuju Pura Kayu Puring
- 572 Perbaiki Jalan dari Br. Dinas Padang Tunggal menuju Pura Jurang.
- 573 Perbaiki Jalan dari Br. Dinas Padang Tunggal menuju Pura Beji Jepun.
- 574 Perbaiki Jalan dari Br. Dinas Padang Tunggal menuju Pura Sudamala.
- 575 Pemeliharaan Jalan dari Br. Dinas Padang Tunggal menuju Pura Taman Sari.
- 576 Perbaiki saluran irigasi subak jaka tebal.
- 577 Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Banjar Dinas Babakan.
- 578 Usulan Bantuan Bedah Rumah Di Lingkungan Banjar Dinas Babakan.
- 579 Usulan Bantuan Alat - Alat Pertanian (traktor dan Mesin Perontok) untuk anggota subak Langon Babakan.
- 580 Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Lingkungan Desa Pekraman Padangaji.
- 581 Usulan Bantuan Bedah Rumah Di Lingkungan Desa Pekraman Padangaji.
- 582 Usulan Pemeliharaan jalan Hot Mix Desa Pekraman Padangaji
- 583 Pengaspalan jalan lingkaran desa pekraman padangaji.
- 584 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Umasari Kauh
- 585 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Dinas Umasari Kauh

- 586 Mohon Bantuan Traktor di Subak Umacetra Tempek Tukad Barak, Desa Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 587 Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Br. Dinas Umasari Kauh
- 588 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 589 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 590 Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 591 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Gunung Lebah Selat
- 592 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Gunung Lebah Selat
- 593 Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Gunung Lebah Selat
- 594 Mohon Bantuan perbaikan saluran irigasi di subak Langon, Br. Dinas Babakan, Desa Peringsari
- 595 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Padang Tunggal
- 596 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Padang Tunggal
- 597 Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Padang Tunggal
- 598 Usulan bantuan Sapi
- 599 Usulan LPJ
- 600 Usulan Rehab Penyengker SD 2 Pesaban
- 601 Usulan agar Masyarakat memiliki BPJS KIS
- 602 Usulan Bedah Rumah
- 603 Usulan Perbaikan bahu jalan lingkaran pura dalam Pesaban
- 604 Mohon Dana Bansos untuk Rehab Wantilan
- 605 Usulan Perbaikan jaringan irigasi subak Bangbangbiaung
- 606 Usulan perbaikan jalan irigasi Subak Alas Tunggal
- 607 Usulan Perbaikan jalan Padang Tunggal Duda

- 608 Mohon Rehab pembangunan tembok penyengker SDN 1 Pesaban
- 609 Mohon Penerangan Jalan (LPJ) di Dadya Arya Belog Tauman
- 610 Mohon peningkatan jalan lingkaran Pesaban
- 611 Mohon Bedah Rumah untuk Dadya Arya Belog Tauman
- 612 Mohon Rehab banjar Adat, Desa Duda, Kecamatan Selat
- 613 Mohon Penerangan Jalan (LPJ) di Banjar Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat
- 614 Mohon peningkatan jalan Tegal Kauh, Tongala, Geriana Kangin
- 615 Mohon Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat
- 616 Mohon Bantuan Usulan Dana Bansos untuk Pembangunan Rehab Pura Dadia untuk pelinggih, Pesamuan dan Bale Gong
- 617 Mohon Bantuan Pengaspalan jalan Geriana Kangin
- 618 Mohon Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Adat Geriana Kangin
- 619 Mohon peningkatan jalan Tukad Sabuh - Yeh Kori
- 620 Mohon penerangan jalan (LPJ) di Desa Adat Geriana Kangin
- 621 Usulan Perehaban Pelinggih Pura di Pura Linjong
- 622 Usulan LPJ
- 623 Usulan pengadaan tempat pembuangan sampah
- 624 Usulan Anggaran Karya Ngenteg Linggih, Pedudusan Agung dan Mupuk Pedagingan
- 625 Usulan pengadaan tempat pembuangan sampah
- 626 Usulan Penataan Saluran Air PDAM
- 627 Usulan Rabat Beton Jalan
- 628 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Pura Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Susut, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 629 Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Susut, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem

- 630 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Pura Merajan Alit Arya Wang Bang Sidemen, Br. Benekasa, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 631 Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Merajan Alit Arya Wang Bang Sidemen, Br. Benekasa, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 632 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Balai Banjar Adat Kalot, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 633 Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Sekitaran Lapangan Volly di Balai Banjar Adat Kalot, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem
- 634 Usulan Pengadaan Saluran untuk Got di Pura Dadya Pasek Gelgel, Br. Ipah, Ds. Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem
- 635 Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Dadya Pasek Gelgel, Br. Ipah, Ds. Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem
- 636 Aspal Jalan Padi Menuju Keboh Banjar Dinas Besakih Kawan
- 637 Bedah Rumah Bagi Warga kurang Mampu di Br Dinas Besakih Kawan
- 638 Pembuatan Cubang di Br. Dinas Besakih Kawan ukuran 4x3 Meter
- 639 Betonisasi jalan dari Kayu Padi Menuju Pemukiman di Kelompok Tani Taru Mesari Br Dinas Besakih Kawan 350 Meter
- 640 Bedah Rumah A.n I Kadek Darmayasa dan Nengah Kingsan Br.Dinas Besakih Kawan Desa Besakih
- 641 Inprastruktur Jalan Sepanjang 640 KM dr lingkungan Bias Menuju Nangka di Banjar Dinas Besakih Kawan
- 642 Bedah Rumah Bagi Warga kurang Mampu di Lingkungan Bias dan nangka Br Dinas Besakih Kawan
- 643 Lampu penerangan jalan di beberapa titik jalan di Wilayah Banjar Dinas Besakih Kawan
- 644 Pembuatan Cubang di Lingkungan Kayu Padi Kelod Br. Dinas Besakih Kawan
- 645 Bantuan Bedah Rumah di Lingkungan Kayu Padi Kelod Br.Dinas Besakih Kawan Desa Besakih
- 646 Pengadaan Air Bersih PDAM Di lingkungan Kayu Padi Kelod Banjar Dinas Besakih Kawan

- 647 Lampu Penerangan Jalan di Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 648 Penyediaan Air Bersih (PAM) di Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 649 Bantuan Bedah Rumah Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 650 Pembuatan Cubang Penampungan Air di Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 651 Lampu Penerangan Jalan Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 652 Bedah Rumah di Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 653 Perangkat Gambelan Bale Ganjur Desa Besakih Kecamatan Rendang
- 654 Lampu Penerangan Jalan dari Pura Kiduling Kreteg menuju Pertigaan Junggal
- 655 Aspal Jalan dari Kiduling Kreteg menuju Pura Pengubengan Desa Besakih
- 656 Pengaspalan Jalan dari Pati Kala menuju Keboh Sepanjang 650 meter
- 657 Bantuan Bedah Rumah di Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang
- 658 Jalan Desa Diaspal, Ulun Setra menuju Banjar Dinas Batumadeg 3 KM
- 659 Lampu Penerangan Jalan dari Ulun Setra Menuju Banjar Dinas Batumadeg
- 660 Jalan aspal, Kunyit Menuju Tegenan Br. Dinas Kunyit
- 661 Aspal Jalan kupang Menuju Tegenan Br. Dinas Kunyit
- 662 Kartu Indonesia Sehat Bagi Warga Br. Dinas Kunyit
- 663 Air Bersih Bagi warga Br. Dinas Kunyit
- 664 Aspal Jalan Br. Dinas Batang menuju Pengulu ke Besakih jalan Lingkar Sepanjang 2,100Km
- 665 Aspal Jalan dr Batang menuju Kiduling Kreteg
- 666 Pengadaan Air Bersih PDAM di Br. Dinas Batang
- 667 Bantuan Aspal Jalan dari Munggal Lesung Menuju Besakih
- 668 Bantuan Bedah Rumah Dadiye Pasek Tua Aji Pejenengan, Desa Besakih, Kec. Rendang

- | | |
|-----|--|
| 669 | Pipanisasi di Pura Gae Besakih |
| 670 | Pembuatan Balai Kelompok Tani Sari Murni (1 Unit) di Pura Gae, Desa Besakih, Kec. Rendang |
| 671 | Peduli Lansia di Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang |
| 672 | Bantuan Bedah Rumah di Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang |
| 673 | Pembuatan Jalan Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang |
| 674 | Pembuatan Sekolah Kejar Paket A,B,C di Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang |
| 675 | Usulan Irigasi Subak Pesangkan Tempek Klaci |
| 676 | Usulan Irigasi Subak Tegal Kauh Satu |
| 677 | Usulan Irigasi Subak Pesangkan Tempek Gintungan |
| 678 | Usulan Rumah 2 unit |
| 679 | Usulan Pengaspalan Jalan Abian Canang |
| 680 | Usulan Perbaikan Banjar Janglap |
| 681 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Janglap Batu Gede Desa Pakraman Duda |
| 682 | Usulan Pembangunan Pura Penataran Ratu Gede Sakti Dukuh Gading Desa Adat Geriana Kangin |
| 683 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Adat Giri Purwa, Ds. Adat Geriyana Kangin, Ds. Duda Utara, Selat, Karangasem |
| 684 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Taman Bali Wates Kangin Desa Pakraman Duda |
| 685 | Usulan Perbaikan Subak Tegal Kauh |
| 686 | Usulan Perbaikan Subak Klaci |
| 687 | Usulan Perbaikan Subak Desa Muncan |
| 688 | Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Pasek Dukuh Susut Muncan |

V	<p>689 Pembangunan Bale Piyasan</p> <p>690 Pembangunan Puwaregan</p> <p>691 Pembangunan Bale Kulkul</p> <p>692 Pembangunan Bale Pesangkepan</p> <p>693 Pembangunan Bale Petandingan</p> <p>694 Pengadaan Seragam Baju Kaos Berkerah</p> <p>695 Jalan Setra menuju Ancak Sari mohon dibeton atau di Aspal.</p> <p>696 Lampu Penerangan di Setra 2 Buah.</p> <p>697 Lampu Peneranga Jalan dari Parkir Daiving ke Pantai sebanyak 17 buah.</p> <p>698 Pengadaan Tong sampah di seputaran jalan menuju Tulamben.</p> <p>699 Perbaiki Trotoar seputaran jalan menuju Tulamben</p> <p>700 Pengadaan Kebun di seputaran jalan menuju Tulamben</p> <p>701 Pemasangan Keramik dan Finising Balai Banjar</p> <p>702 Pengadaan Angklung atau gender</p> <p>703 Pengadaan alat Angkut Sampah.</p> <p>704 Dari Karang Taruna dimohon agar ada Pelatihan-Pelatihan untuk meningkatkan SDM Setempat.</p> <p>705 Pengadaan Air Bersih</p> <p>706 Pengadaan Traktor untuk mengelola Tanah di musim hujan.</p> <p>707 Penyambungan Aliran Listrik yang masih Rendah .</p> <p>708 Pembangunan Jalan Lingkar Desa</p> <p>709 Lampu Penerangan Jalan.</p> <p>710 Bedah Rumah.</p> <p>711 Pengadaan Penyengker Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para</p> <p>712 Pengadaan Bale Penganteb Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para</p>

- 713 Pengadaan Bale Pebatan/ Polahan Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para
- 714 Pengadaan Bale Pesantian Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para
- 715 Pengadaan Traktor
- 716 Pengadaan Mesin Jahit
- 717 Pembangunan Bale Santi dan Pewaregan untuk Pengempon Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu
- 718 Penataan halaman Pura di Pengempon Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu
- 719 Bedah Rumah untuk Pengempon Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu
- 720 Listrik dan lampu Pura Sendetan Dadia Sira Arya Gajah Para
- 721 Jalan dari Depan LPD menuju Pantai
- 722 Fasilitas tempat pertemuan untuk Kelompok Suka Duka Aпти Dharma Santhi, Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu
- 723 Pembuatan Jalan Lingkar di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu
- 724 Bantuan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Suka Duka Aпти Dharma Santhi, Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu
- 725 Senderan Irigrasi
- 726 Bedah Rumah untuk Kelompok Suka Duka Aпти Dharma Santhi, Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu
- 727 Rabat Beton jalan
- 728 LPJ di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu
- 729 Perehaban Bangunan Balai Kelompok Tani Ternak Pekarangan
- 730 LPJ untuk Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.
- 731 Beasiswa untuk SD di Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.
- 732 Bedah Rumah 5 unit untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.

- | | |
|-----|---|
| 733 | Bansos untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu. |
| 734 | Bantuan Sekeha Santi untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu. |
| 735 | Senderan |
| 736 | Pemindahan KWh Listrik |
| 737 | BPJS untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu. |
| 738 | Bantuan untuk Lansia |
| 739 | Perbaikan jalan di Banjar Dinas Bahel |
| 740 | Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir. |
| 741 | Lampu untuk LPJ yang sudah mati di dua titik. |
| 742 | Senderan atau Got di Banjar Dinas Tegal Sari. |
| 743 | Pupuk Subsidi dan Bibit Jagung untuk Subak Tirta Pertiwi. |
| 744 | Traktor untuk Bajak Sawah. |
| 745 | Perhaban Penyengker Balai Banjar Dinas Tegal Sari. |
| 746 | Penyenderan Jalan Belaka Tebel Dusun Munti Desa Barat. |
| 747 | Bedah Rumah. |
| 748 | Pengaspalan Jalan dari SD 2 Satu Atap menuju ke Batu Dinding kurang lebih 3 km. |
| 749 | Mesin Penyedotan Air. |
| 750 | Perbaikan Cubang. |
| 751 | Mobil Tangki untuk Air Bersih. |
| 752 | Wantilan di Pura Puseh Padang Kelod. |
| 753 | Pengadaan Air Bersih atau Sumur Bor untuk warga masyarakat Mekar Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu |
| 754 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan untuk Desa Tianyar, Kecamatan Kubu |
| 755 | Bedah Rumah untuk masyarakat KSPP Mekar Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu |

- 756 Bantuan untuk Lansia dan Disabilitas
- 757 Modal untuk UMK di KSPK Mekar Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu
- 758 Pengadaan Air Bersih di Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- 759 Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- 760 Bantuan Perchaban Pura Dadia di Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- 761 Penanggulangan Lansia dan Disabilitas untuk masyarakat Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- 762 Paping Pekarangan Balai Banjar Adat Telaga Arum, Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu
- 763 Air Bersih untuk Banjar Adat Telaga Arum, Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu
- 764 LPJ 6 titik di Banjar Adat Telaga Arum, Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu
- 765 Sumur Bor di Barat Rumah Sakit agar bisa dialirkan ke Balai Banjar Adat Telaga Arum
- 766 Jalan ke Rumah Sakit dan Perbaikan Senderan
- 767 Pengaspalan munggal - munduksari Desa Sukadana
- 768 Perluasan Jaringan Pipa air bersih di Desa Sukadana
- 769 Permohonan Bedah Rumah
- 770 Permohonan Paping dari Jalan pertigaan Bukit menuju Sekolah
- 771 Permohonan LPJ(Lampu Penerangan Jalan)
- 772 Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekehe/dadia guna membantu pembangunan.
- 773 Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biyai pemerintah.
- 774 Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekehe/dadia guna membantu pembangunan.
- 775 Permohonan Jaringan Pipa air bersih di Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah.

776	Lanjutan Jalan Darmaji Menuju Pura Dukuh Desa Ban, Kec. Kubu
777	Permohonan Pipa Bansos Br. Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu
778	Permohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu
779	Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) Br. Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu
780	Lanjutan Jalan Temakung Br. Dinas Jatituhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu
781	Perlu Hibah Bansos Pembangunan Wantilan/ Balai Pertemuan Br. Dinas Jatituhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu
782	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Banjar Dinas Jatituhu, Desa Ban, Kec. Kubu
783	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Jatituhu, Desa Ban, Kec. Kubu
784	Hotmix ruas jalan Celagi Trunyan 400M
785	Hotmix ruas jalan Paleg kurang lebih 1 KM
786	Pemohonan Traktor bagi petani Br. Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu
787	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu
788	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu
789	Mohon Bantuan Bagi Lansia Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu
790	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu
791	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu
792	Air Bersih ke Banjar Dinas Batudawa Kaja
792	Lampu Penerangan Jalan di Pertigaan
793	Aspal dan Sederan.
794	Bedah Rumah.
795	Jalan Pelisan sampai Waru agar dibetonisasi.

- 796 Air Bersih dan Cubang
- 797 Bansos.
- 798 Lampu Penerangan Jalan.
- 799 Cubang
- 800 Tiang Listrik dan Kwh.
- 801 Perhaban Jalan Beton.
- 802 Angklung.
- 803 Traktor.
- 804 Air Bersih ke Desa Adat Batudawa.
- 805 Gong Barungan.
- 806 LPJ di Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
- 807 Perhaban Pura Dadia Pasek Perteka
- 808 Bantuan Pupuk Pertanian untuk Dadia Pasek Perteka, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
- 809 Bantuan Sapi untuk Kelompok Ternak untuk Dadia Pasek Perteka, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
- 810 Perhaban Pura Dadia Pasek Kayu Selem Dukuh
- 811 LPJ untuk Pura Dadia Pasek Kayu Selem Dukuh.
- 812 Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Pasek Kayu Selem, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu
- 813 Pengadaan Kamar Mandi dan Tower untuk Dadia Pasek Kayu Selem, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu
- 814 Jalan ke Pura Penyimpanan mohon diperbaiki
- 815 LPJ di Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
- 816 Perbaikan Jalan Pertigaan Embung Batudawa 1
- 817 Perbaikan Jalan Kelampuak
- 818 PIPANISASI AIR EMBUNG BATUDAWA 1 DAN 2
- 819 Pengadaan Air Bersih untuk Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu

- | | |
|-----|--|
| 820 | Pengadaan Speaker untuk Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 821 | Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 822 | Perbaikan Bangunan Banjar Dinas Batudawa Kaja |
| 823 | Bedah Rumah untuk masyarakat Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 824 | Lampu Pencerangan Jalan untuk Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 825 | Bantuan Bale Pesangkepan/Pertemuan untuk Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 826 | Rabat Beton untuk Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu |
| 827 | Pembangunan Balai Banjar Beluhu Perataan Halaman, Pembangunan Dapur dan Toilet |
| 828 | Jalan Puri Madeg ke Tulamben Tegal Panti |
| 829 | Pembangunan Toilet atau Jamban. |
| 830 | Jalan ke Setra Beluhu dan Jembatan. |
| 831 | Bendungan Sungai di Beluhu depan Pura Dalem Beluhu. |
| 832 | Paping Jalan di SD Nomor 1 Tulamben dan Penambahan Halaman 30 hare. |
| 833 | Rehab berat 1 unit Gedung SD Nomor 1 Tulamben. |
| 834 | Traktor untuk Petani/Kelompok Tani. |
| 835 | Pagar di SD Nomor 4 Tulamben. |
| 836 | Pembangunan Lapangan di SD Nomor 4 Tulamben. |
| 837 | Jalan untuk Tulamben Kaja menuju Pengeno. |
| 838 | Pembangunan Wantilan Keramik Paping Penataan Halaman (GOR) |
| 839 | Jalan untuk Batubelah |

- | | |
|-----|---|
| 840 | Bantuan Jukung dan Mesin untuk Kelompok Nelayan Penyimpanan 37 KK |
| 841 | LPJ di Pos Mas Pait Jalan Koloh Panggul |
| 842 | Bantuan Kesejahteraan Pati Jompo |
| 843 | Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Eka Adnyana, Kecamatan Kubu |
| 844 | LPJ di Tukad Mong |
| 845 | Bedah Rumah 4 unit di Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu |
| 846 | LPJ di Tunas Palit-Tukad Santen Kelod |
| 847 | Bantuan untuk orang cacat |
| 848 | LPJ di Tukad Maun 2 titik |
| 849 | LPJ di Pura Pemaksan Desa Tianyar 3 titik |
| 850 | Lanjutan Jalan Lingkar Bantas Banjar Dukuh. |
| 851 | BKK dari Kabupaten. |
| 852 | Bedah Rumah. |
| 853 | Lampu Penerangan Jalan. |
| 854 | Bansos |
| 855 | Pembangunan Jalan di jalur Subak Timpuan |
| 856 | Sumber Air yang ada di hutan biar bisa dikelola pemerintah sehingga berguna untuk masyarakat luas |
| 857 | LPJ di Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu |
| 858 | Cubang Penampung Air untuk Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu |
| 859 | Normalisasi Sungai di Desa Adat Perasan |
| 860 | Senderan di deapan Balai Banjar |
| 861 | BKK untuk Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu |
| 862 | Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu |
| 863 | Pembangunan Kelompok Tani Pagoan Sekaa |

- 864 Usulan LPJ sedesa Dukuh
- 865 Pengadaan Bibit Sapi
- 866 Pengadaan cubang
- 867 Pengadaan bibit pohon kelapa/ jati
- 868 Pengadaan Bedah Rumah atau Rehab Rumah
- 869 Pengaspalan jalan Bumbung Masin dan Melangker Banjar Dinas Bhuana Kusuma
- 870 Pembuatan Embung di Banjar Dinas Bhuana Kusuma
- 871 Pengadaan Suumur Bor di Banjar Dinas Bhuana Kusuma
- 872 Renovasi SDN 4 Dukuh, Bhuana Kusuma
- 873 Usulan LPJ sedesa Dukuh
- 874 Pembangunan Terminal Desa Pakraman Dukuh, Kec. Kubu
- 875 Pembangunan Embung di Desa Dukuh
- 876 Pemappingan atau batu sikat Halaman Tri Kahyangan seperti Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Segara
- 877 Pengadaan Sumur bor di setiap Banjar Adat Desa Dukuh
- 878 Pembangunan Bedah Rumah atau Rehab Rumah
- 879 Renovasi 4 SDN di sedesa Dukuh
- 880 Pembangunan Balai Kelompok Tani dan Suka Duka sedesa Dukuh
- 881 Pengadaan Bibit sapi unggul
- 882 Usulan LPJ sedesa Dukuh
- 883 Pengadaan bibit kelapa atau pohon jati
- 884 Pengadaan Cubang sedesa Dukuh
- 885 Rabat Beton Jalan sedesa Dukuh
- 886 Pengaspalan jalan Pemclastian Banjar Dinas Caniga, Desa Dukuh, Kec. Kubu
- 887 Pengadaan Suumur Bor di Banjar Dinas Caniga
- 888 Pengadaan Pembangunan Bedah Rumah dan rehab Rumah

- 889 Kelanjutan pengaspalan jalan pura gunung sari menuju ke Banjar Adat Bhuana Kusuma
- 890 Pembuatan embung dukuh
- 891 Pengaspalan jalan pemelastian desa dukuh
- 892 Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 893 Penataan parkir pura puseh desa dukuh
- 894 Pembangunan pura dalem yg terbakar pada saat musim kemarau kemarin di Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 895 Pembangunan balai2 kelompok tani ternak untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 896 Rabat beton jalan2 desa di Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 897 Pembuatan sumur2 bor untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 898 Pengadaan cubang2 komunal untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Pengadaan LPJ disetiap ruas jalan banjar dukuh
- 899 Perehaban SD 1 dukuh.
- 900 Penataan bale banjar bahel
- 901 Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 902 Pengadaan LPJ disetiap jalan di Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 903 Pengadaan cubang komunal untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 904 Pembangunan embung di Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 905 Perehaban sekolah SD 2 dan 3 Dukuh
- 906 Pengadaan sumur bor untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 907 Kelanjutan pengaspalan pura gunung sari melingkar ke bhuana kusuma
- 908 Pembangunan balai banjar bhuana kusuma

- 909 Pembangunan cabang2 komunal untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 910 Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 911 Pengadaan embung di bhuana kusuma
- 912 Pengadaan LPJ disetiap ruas jalan bhuana kusuma
- 913 Perhaban sekolah SD 4 Dukuh
- 914 Pengadaan sumur bor untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 915 Pengadaan jukung dan mesin jukung untuk Kelompok Nelayan Segara Giri, Br. Dins Batudawa, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 916 Pengadaan rumpon untuk Kelompok Nelayan Segara Giri, Br. Dins Batudawa, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 917 Pengadaan balai kelompok nelayan untuk Kelompok Nelayan Segara Giri, Br. Dins Batudawa, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 918 Pengadaan alat - alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Segara Giri, Br. Dins Batudawa, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- 919 Pembangunan drainase kurang lebih 450 meter jalan menuju pantai Banjar Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 920 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan menuju pantai Banjar Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 921 Pembangunan drainase kurang lebih 450 meter jalan menuju pantai Kelompok Mina Suka, Banjar Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
- 922 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan menuju pantai Kelompok Mina Suka, Banjar Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 923 Pembangunan drainase kurang lebih sepanjang 1 km jalan menuju Rumah Sakit Pratama, Banjar Dinas Labuan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 924 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di 10 titik jalan menuju Rumah Sakit Pratama Banjar Dinas Labuan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 925 Pembuatan Rumpon untuk Kelompok Nelayan Mahyuni Sari Mina Banjar Dinas Labuan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.

- 926 Pembangunan Sumur Bor di wilayah Banjar Dinas Labuan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.
- 927 Bedah Rumah.
- 928 Lampu Penerangan Jalan 4 titik.
- 929 Traktor untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 930 Bantuan untuk Seke Santi Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 931 Bantuan Gambelan untuk Genjek Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 932 Kompor Mayat untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 933 Lampu Penerangan Jalan di Pejukung.
- 934 Balai Banjar untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 935 Balai Kulkul untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- 936 Bantuan Air Bersih.
- 937 Pengegotan Pura Candi Gora sepanjang 500 meter untuk Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu
- 938 Jukung 5 unit dan 5 unit mesin tempel + mesin dorong 10 BK untuk Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu
- 939 LPJ 3 unit penempatan di wilayah Jukung Nelayan dan 1 unit penempatan di Pura Mina Gora
- 940 Perbaikan jalan depan Candi Mas
- 941 Bantuan Rumpon untuk Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu
- 942 Pengadaan Sumur Bor di Banjar Adat Kutuh Punggul
- 943 Pengadaan Jalan di Banjar Adat Kutuh Punggul
- 944 Rehab Gedung dan Penyengker SD 9 Kutuh Punggul
- 945 Pengadaan Tempat Pertemuan di Banjar Adat Kutuh Punggul
- 946 Akses Jalan Dari Setra menuju Bukit Manggun
- 947 Perbaikan Instalasi LPJ di Banjar Adat Bukit Mangun

- | | |
|-----|--|
| 948 | Perehaban 2 ruang Sekolah SD 3 Pejukung |
| 949 | Pengadaan Air Bersih di banjar Adat Buluh Winangun |
| 950 | Pengadaan LPJ 3 titik di Banjar Adat Buluh Winangun. |

IV

- | | |
|-----|---|
| 951 | Permohonan Bedah Rumah se- kecamatan Abang |
| 952 | Permohonan Rehab Pura Paibon /dadia |
| 953 | Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) se- kecamatan Abang |
| 954 | Permohonan Infrastruktur Jalan se- kecamatan Abang |
| 955 | Fasilitasi Pembuatan KIS / masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIS di Kecamatan Abang |
| 956 | Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat yang kurang mampu di se - Kecamatan Abang |
| 957 | Perbaiki Infrastruktur Jalan di Kecamatan Abang |
| 958 | Permohonan Infrastruktur dan Perehaban Jalan se - Kecamatan Abang |
| 959 | Permohonan Bedah Rumah bagi masyarakat miskin |
| 960 | Permohonan Pembuatan Bale kulkul. |
| 961 | Permohonan Rehab / nyervis gamelan angklung |
| 962 | SD No.2 Kerta Mandala mohon perbaikan tembok retak (kondisi kurang bagus) |
| 963 | Permohonan Bale Pebat tempat pembuatan sarana upakara |
| 964 | Permohonan Bangunan untuk penyimpanan angklung |
| 965 | Permohonan paping diareal penataran pura |
| 966 | Mohon Bantuan kelompok peternakan babi se - Kecamatan Abang |
| 967 | Mohon Bantuan Perbaikan Pelinggih Pura |
| 968 | Permohonan Pembuatan WC di areal pura |
| 969 | Permohonan Jalan di Taru Putih Bedugul belum ada Pengerasan jalan |

- 970 Infastruktur Jalan
- 971 Bedah Rumah bagi Masyarakat miskin di Br. Sadimara Kelod, Desa ababi, Kecamatan Abang
- 972 Lampu Penerangan jalan di Br. Dinas Sadimara , Desa Ababi, Kecamatan Abang
- 973 Peningkatan Ekonomi Kreatif untuk Dadia Pasek Gelgel Br. Dinas Sadimara , Desa Ababi, Kecamatan Abang
- 974 Bedah Rumah bagi Masyarakat miskin untuk Dadya Arya Kebon Tubuh, Br. Dinas Sadimara, Kecamatan Abang
- 975 Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Sadimara, Kecamatan Abang
- 976 Rehab Gedung Sekolah di Kecamatan Abang
- 977 Pengaspalan jalan dari Desa Banyuning menuju Tukad base Br. Dinas Bangle ± 7km
- 978 Pengaspalan jalan dari Purwakerti menuju Lingkungan Gitgit Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan, Kecamatan Abang
- 979 LPJ tersebar di Kecamatan Abang
- 980 Rehab Gedung Sekolah tersebar di Kecamatan Abang
- 981 Bedah Rumah tersebar di Kecamatan Abang
- 982 Pembangunan dan Rehab Jalan di Kecamatan Abang
- 983 Permohonan Senderan jalan Desa Segga menuju Bangle tembus Bunutan.
- 984 Pemeliharaan jalan dari Br. Segga Desa Bunutan menuju Bangle dan Bunutan
- 985 Pembangunan Senderan Sekolah SMP 1 Atap
- 986 Pembangunan Gedung TK.di Segga
- 987 Pemberian bantuan kepada anak yatim piatu atas nama Ni Nengah Devi Uliantari umur 10 th (Ayah, I Nyoman Sumadiasa, Ibu, Ni Ketut Tunas Alm)
- 988 Pembangunan Penyengker SPN 1 Bunutan
- 989 Pengembangan Proyek Air PDAM untuk Desa Nawa Kerti
- 990 Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk warga masyarakat yang kurang mampu di Desa Nawakerta
- 991 Mohon Bantuan Pembangunan Penyengker untuk SD 2 Nawakerti sepanjang (+ 150 m)

- 992 Mohon Bantuan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di jalan Kuange menuju Batu Gede dan Tukad Ootan menuju Jabon sepanjang 7 km
- 993 Mohon bantuan subsidi dalam pengamprahan air bersih untuk masyarakat miskin di desa Nawakerti
- 994 Mohon Bantuan Kartu Karangasem Cerdas kepada sekolah yang ada di Nawakerti
- 995 Mohon Bantuan untuk memberikan kesejahteraan (Insentif) dan sepeda motor kepada kelian banjar adat yang ada di Desa Nawakerti
- 996 Pengembangan Jaringan PDAM di Desa Nawakerti
- 997 Mohon Bantuan Mesin Pelempar air dan cubang serta pipa untuk mengalirkan air ke masing - masing rumah penduduk
- 998 Permohonan Pengadaan Lampu Penerangan jalan (LPJ) di jalan simpar menuju lalang linggah
- 999 Mohon bantuan pembangunan penyengker SDN 2 Desa Nawakerti.
- 1000 Hibah untuk pura dadya/maksan se desa Nawakerti
- 1001 Mohon bantuan Pembangunan Senderan jalan dari kesimpar menuju lalang linggah
- 1002 Permohonan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan melingkar Lempuyang
- 1003 Permohonan Cubang Penampungan air bersih Banjar Dinas Ngis Kaler (Jumetra)
- 1004 Permohonan Truk Pengangkut sampah
- 1005 Hibah bansos Pura (Tempat Ibadah)
- 1006 Mohon bantuan Kelengkapan sarana jro mangku (genta, pakaian)
- 1007 Pengadaan Lampu penerangan jalan (LPJ) dari Bias - Sadimara- Belong
- 1008 Perbaiki jalan Sadimara Bias (depan SD 4 Ababi)
- 1009 Hibah Bansos Ke tempat Ibadah
- 1010 Bedah Rumah untuk masyarakat Sadimara
- 1011 Pengadaan Air Bersih (Perluasan Jaringan PDAM Bersubsidi ± 30 KK.).

- 1012 Bedah Rumah bagi masyarakat kurang mampu di Banjar Dinas Ngis Kaler
- 1013 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Br Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang
- 1014 Bedah Rumah Bagi Masyarakat kurang mampu di Br Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang
- 1015 Permohonan lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Br. Dinas Maga Telu, Desa Tista Kecamatan Abang
- 1016 Mohon bantuan Bedah Rumah untuk warga masyarakat yang kurang mampu di Br. Dinas Maga Telu, Desa Tista Kecamatan Abang
- 1017 Drainase pada jalan di Br. Dinas Maga Telu, Desa Tista Kecamatan Abang.
- 1018 Permohonan Sumur Bor 2 buah
- 1019 Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ)
- 1020 Permohonan Jalan Bunyining - Bangle dan Jalan Lean - Bangle
- 1021 Permohonan Bedah Rumah
- 1022 Posyandu
- 1023 Infrastruktur Jalan Lean- Bangle dan Jalan bangle - Ketung
- 1024 Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Batu Tumpuk
- 1025 Pembuatan Sumur Bor di Tukad Base
- 1026 Permohonan infrastruktur Jalan
- 1027 Permohonan Pipanisasi dan Mesin serta Penampungan air bersih
- 1028 Permohonan Pembangunan Gedung Pertemuan Balai Pesangkepan
- 1029 Senderan di depan Pura Puseh Gulinten 25 m.
- 1030 Permohonan Air Bersih / Cubang
- 1031 Permohonan Pembangunan Setra / Pengembangan Setra

- 1032 Jalan dari amed sangat sempit (Fasilitas) Kurang memadai.
- 1033 Mohon senderan tukad Lean - Tube
- 1034 Penerbitan ijin usaha/Ijin bersyarat bagi pelaku usaha pariwisata agar bisa membayar pajak.
- 1035 Pembagunan sekolah SMA / SMK.
- 1036 Pembangunan TPI (Tempat penampungan ikan)
- 1037 SMK di Abang agar di tambahkan jurusan tata t oga
- 1038 Mohon Bantuan Kostim STT untuk Sekha Truna Truni Dharma Shanti, Kecamatan Abang
- 1039 Perbaikan Infrastruktur jalan Bunutan Gitgit Banjar Gulinten
- 1040 Bantuan untuk orang cacat di Desa bunutan, Kecamatan Abang
- 1041 Bantuan bedah rumah di Desa bunutan, Kecamatan Abang
- 1042 Mohon Senderan tukad dan pupuk
- 1043 Pengangkatan Guru agama Hindu
- 1044 Mengurangi Penggunaan Laser
- 1045 Agar dilakukan study banding agar bis mengelola pariwisata sendri
- 1046 Penyengker padmasana, Gapura dan pemasangan paping di SD 2 Bunutan
- 1047 Penyengker pura maksan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan , Kecamatan Abang
- 1048 Permohonan Peningkatan Jalan Pura Kebon Agung
- 1049 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Kecamatan Abang
- 1050 Permohonan Bedah Rumah se-kecamatan Abang
- 1051 Mohon Bantuan Perbaikan saluran irigasi di subak tempek kelampuak.
- 1052 Mohon Bantuan Irigasi Subak Tempek Timbul

- 1053 Mohon Bantuan Pemeiharaan Daerah Aliran Sungai
- 1054 Normalisasi sungai
- 1055 Mohon Bantuan Perbaiki Dam
- 1056 Mohon Bantuan Angkul - angkul TK Negeri Kerta Mandala
- 1057 Penataan halaman SD 3 Kerta Mandala
- 1058 Penataan Lingkungan perumahan dikebon (perbaikan gang perumahan menjadi got sehingga limbah lancar)
- 1059 Perbaiki jalan usaha tani subak kebon agung
- 1060 Perbaiki saluran irigasi subak tempek kayoan kangin.
- 1061 Mohon lampu penerangan jalan di depan pura pusch
- 1062 Usulan bedah rumah di Dadya Brangsinga Banjar Dinas Bias lantang Kelod, Kecamatan Abang
- 1063 Rehab SD 1 Purwa Kerti
- 1064 Permohonan kartu KIS untuk Dadya Brangsinga Banjar Dinas Bias lantang Kelod, Kecamatan Abang
- 1065 Perbaiki Jalan Longsor dari Sega Menuju bunutan
- 1066 Pengadaan Cubang/ tower dan mesin penarik air untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa sega
- 1067 Bedah Rumah Bagi Masyarakat kurang mampu di Br. Sega
- 1068 Usulan Bedah Rumah Di Desa Ababi sebanyak 13 unit
- 1069 Usulan Lampu Penerangan Jalan di Desa Ababi 7 titik
- 1070 Penataan dan Perbaiki Tempat Permandian Umum di Desa Ababi
- 1071 Pembangunan Trotoar Di Desa Ababi
- 1072 Usulan Bedah Rumah Dan rehab Rumah Di Desa Ababi
- 1073 Usulan Lampu Penerangan Jalan di Desa Ababi
- 1074 Perbaiki jalan menuru ke Pura - Pura di Desa Ababi
- 1075 Perbaiki dan Penataan Saluran Distribusi Air PDAM ke rumah - rumah warga desa (karena air tidak lancar)
- 1076 Irigasi di Subak Gunung Desa Ababi

- 1077 Usulan Trotoar di Desa Ababi 2 unit
- 1078 Ada Gardu Listrik di salah satu rumah warga yang membahayakan agar mendapat perhatian dari pihak PLN
- 1079 Tanah bukti pemerintah di poh santen tidak ada pemberitahuan kepada penggarap sebanyak 6 kk, kalau ditanah tersebut akan dibangun sekolah
- 1080 Permohonan Pembuatan Jamban / MCK
- 1081 Mohon bantuan Pembangunan Balai Gong Pura
- 1082 Pembuatan Kartu KIS
- 1083 Permohonan Mobil Ambulance untuk di Puskesmas Tista
- 1084 Permohonan Infrastruktur Jalan Tista - Kertha Mandala
- 1085 Mohon kartu BPJS (KIS) bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Abang
- 1086 Mohon lampu penerangan jalan di Kecamatan Abang
- 1087 Bedah rumah di Kecamatan Abang
- 1088 Mohon bantuan traktor (Mesin pembajak) di Kecamatan Abang
- 1089 Mohon bantuan gergaji mesin (sensor kecil) di Kecamatan Abang
- 1090 Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang
- 1091 Saluran Irigasi Di Subak Babakan di Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang
- 1092 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) untuk Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang
- 1093 Seperangkat Gong /Bleganjur untuk Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang
- 1094 Mohon Bantuan Dana untuk melengkapi alat genjek
- 1095 Mohon Bantuan Tunjangan perangkat alat komputer untuk menunjang kegiatan organisasi
- 1096 Mohon Bantuan Gong satu barung untuk kegiatan anak dalam rangka melestarikan budaya bali
- 1097 Mohon Bantuan Dana untuk pembelian reong (gong) agar alat - alat yang ada lengkap (Baleganjuran)
- 1098 Mohon Bantuan untuk seragam kepada Sekaa Gong Arsa Suara Desa Purwakerthi

- 1099 Mohon Bantuan untuk peralatan Alat Musik seperti Gitar,drum,bass,dll
- 1100 Pembuatan Trotoar Jalan
- 1101 Akses Jalan menuju Pura Pucak Sari dan Pura Gunung Mas
- 1102 Mohon Bantuan Perbaiki jalan menuju pura dalam yang sudah rusak berat / Infrastruktur jalan
- 1103 Mohon Bantuan Bedah rumah untuk warga yang kurang mampu
- 1104 Pemanfaatan Bak Air yang ada di Desa Culik
- 1105 Bedah Rumah untuk Masyarakat Tyingtali sebanyak 3 Orang
- 1106 Senderan Jalan yang jebol dari Br Teluk menuju Permandian Angsoka
- 1107 Pemappingan jabe tengah Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1108 Fasilitas umum akses jalan didepan Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1109 Permohonan bantuan Bale Gong untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1110 Penyengker Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1111 Perbaiki Gorong - gorong Jalan di Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1112 Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang mampu Di Br. Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan abang
- 1113 Perhatian terhadap kelompok Nelayan, Garam, Kelompok Ternak untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1114 Bantuan Lampu Penerangan Jalan Di Br.Adat Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang
- 1115 Perbaiki Jembatan untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang
- 1116 Mohon Bantuan balai Pertemuan Kelompok Nelayan Pegubugan Lipah Br. Dinas Lean, Desa Bunutan Kecamatan Abang
- 1117 Sarana Transportasi pemungut sampah masih kurang
- 1118 Pengadaan Mesin Tempel Kelompok Nelayan di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan Kecamatan Abang

- 1119 Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin di Pegunungan Lipah
Br. Dinas Lean, Desa Bunutan Kecamatan Abang
- 1120 BPJS KIS bagi masyarakat kurang mampu di Br. Dinas Lean,
Desa Bunutan Kecamatan Abang

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM



WAKIL KETUA,



I NENGAH SUMARDI

WAKIL KETUA,



I MADE AGUS KERTIANA

WAKIL KETUA,



I WAYAN PARKA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ngurah Rai No. 31 Telp. (0363) 21003 Amlapura

Amlapura, 3 Juni 2020

Kepada :

Nomor : 050/546/Bappelitbangda/Setda

Yth. Ketua DPRD Kab. Karangasem

Lampiran : 1 (Satu) Gabung

di-

Perihal : **Hasil Pembahasan Pokir DPRD,**

Amlapura

Menunjuk surat Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor : 179/92/DPRD, Tanggal 24 Pebruari 2020 Perihal Penyampaian Pokir DPRD bersama ini kami sampaikan Berita Acara beserta Matrik Hasil Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dibahas bersama Perangkat Daerah pengampu, difasilitasi oleh Bappelitbangda bersama Sekretaris DPRD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Penjabat Sekretaris Daerah

Kabupaten Karangasem,


I Gede Darmawa, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611231 199703 1 020

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura sebagai laporan
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/522/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan surat Nomor : 005/32/Bappelitbangda/Setda tanggal 20 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Sekretaris DPRD, hadir sebagai peserta rapat Perangkat daerah sesuai undangan. Adapun hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Ngurah	Ka. Bappelitbangda	1.
2.	I Wayan Brotha	Sekwan	2.
3.	I W. Wirawan	Kabag Kesra	3.
4.	Ide Bagus H. Gustika	Distrib	4.
5.	I Nyoman Nurhatawaja	Kadis Perolehan	5.
6.	I Madeputri Ardana	Kesbang / sub pros	6.
7.	I Gede Ika Santika	Kepumandang	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Rena,SP	IV	4 Mohon bantuan Pos Kamling di Dusun Geliang	Kesbang	Usulan Poskamling merupakan kewenangan Desa, tidak masuk Renja Kesbang.
2	Haji Marjuh, SH	II	11 mohon difasilitasi untuk pendirian Yayasan Masjid jami Baiturahim	Kesbang	Kewenangan Kesbang Pol Linmas hanya bisa memfasilitasi sampai terbinya Surat Keterangan Terdaftar.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Badan Kesbang-Pol dan Linmas
Kabupaten Karangasem,

H Ketut Kanginan Subandi, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19621213 198603 1 326

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Sumadi, SE	III	3 Mohon Mesin Kompresor dan Peralatan Kerajinan mengukir	Perindag	Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada BAB IX tentang Keuangan Daerah Paragraf 2 tentang Belanja dan Pasal 298 ayat (5) dijelaskan bahwa Belanja hibah dapat diberikan kepada, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD, dan/atau Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. usulan akan dikomodor dan difasilitasi untuk diusulkan ke Pusat melalui dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka melalui APBN
2	I Putu Suerjana, SS	III	8 Permohonan Mesin Kolang-kaling (Buah Jaka/Beluluk) di Desa Adat Dispoindag Gunung Kec.Manggis		

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayah Ardika, M.Si
Pembina Ulama Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

An Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karangasem
Sekarangis,



Drs. Gyde Loka Santika
Pembina Tk. I

NIP. 19670613 199403 1 006

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAJIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Winata, SH.MH	I	8 Perumahan LPJ 2 titik	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
2	I Nyoman Winata, SH.MH	I	17 Perumahan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Pejongan Desa Seraya	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
3	I Wayan Pura Arnawa	I	3 Usulan Lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
4	I Nengah Suparta, SH.MAP	I	9 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
5	I Made Juwita, SH	I	2 Perumahan LPJ	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
6	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	4 Perumahan Lpi	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
7	I Komang Mustika Jaya, SE	I	2 Perumahan Lampu penerangan jalan di desa Bugbug	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
8	I Komang Mustika Jaya, SE	I	10 Perumahan Pengadaan transportasi gratis untuk siswa SMPN 4 Amlapura di desa Bugbug.	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
9	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	3 Usulan Lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
10	I Made Wirta, SE	II	15 LPJ dan Dusun Pande Sari Menuju Litigundi	Dishub	Agar dipastikan di jalan kabupaten.
11	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	5 Perumahan LPJ (Lampu Penerangan Jalan)	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
12	I Ketut Susinta	II	4 Mohon bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan)	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
13	I Wayan Parka, SH	II	6 Perumahan LPJ	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Apabila anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
14	I Wayan Sunarta, S.PT	III	2 Mohon Bantuan LPJ	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
15	I Nyoman Sumardi, SE	III	1 Perumahan LPJ di Perempatan Padangbai sampai Perempatan Desa Antiga	Dishub	Lokasi yang dimaksud merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Akan Diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Bali (Dishub Provinsi)
16	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	4 Perumahan Lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
17	I Putu Suarjana, SS	III	2 Mohon lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
18	I Gede Agung Puspada, SH	III	2 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan disekitar Pura Dadia Batur Taman Sari	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
19	I Wayan Suasatika, ST	IV	1 Mohon Bantuan Lpj di beberapa titik di Desa Duda Timur.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
20	I Wayan Suasatika, ST	IV	6 Perumahan LPJ Di Beberapa titik di Desa Duda Timur	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
21	I Wayan Sumatra, ST	IV	1 Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dari Desa menuju Pura Penataran Puri Agung sebanyak : 5 Titik	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
22	I Nyoman Rena, SP	IV	10 Mohon bantuan LPJ	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
23	I Made Agus Kertiana, SH	IV	11 Perluasan Jaringan Listrik/ Tiang listrik	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
24	I Made Agus Kertiana, SH	IV	14 LPJ di perempatan jalan Dukuh sakti	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
25	I Made Agus Kertiana, SH	IV	16 Usulan Lampu Penerangan Jalan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
26	I Made Agus Kertiana, SH	IV	21 Tiang Listrik di Jalan Abuan	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
27	I Made Agus Kertiana, SH	IV	22 Pengadaan Tiang listrik di Gang pipod	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
28	I Made Agus Kertiana, SH	IV	24 Usulan LPJ di Candu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
29	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Perbaikan Penerangan Jalan	30	Dishub	Agar diformasikan lokasinya dan siap untuk diindaklanjuti
30	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Rambu Jalan di Sepanjang jalan Dewa Anom	33	Dishub	Lokasi dimaksud merupakan ruas jalan Provinsi. Akan diusulkan kembali kepada Pemprov. Bali
31	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Sebudi.	1	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
32	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Br. Padang Tunggal.	5	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
33	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Banjar Dinas Babakan.	13	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
34	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Usulan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Lingkungan Desa Pekraman Padangaji.	16	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
35	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Usulan LPJ	2	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
36	Ida Bagus Adiyana, SH	IV	Usulan LPJ	2	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
37	NI Putu Sriani	IV	Lampu penerangan jalan di beberapa titik jalan di Wilayah Banjar Dinas Besakih Kawari	8	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
38	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	Lampu Penerangan Jalan dari Ulum Setra Menuju Banjar Dinas Batumadeg	2	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
39	I Gede Parwata,	V	Lampu Penerangan di Setra 2 Buah.	8	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
40	I Gede Parwata,	V	Lampu Penerangan Jalan dari Parkir Diving ke Pantai sebanyak 17 buah.	9	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
41	I Gede Parwata,	V	Penyambungan Aliran Listrik yang masih Rendah .	19	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
42	I Gede Parwata,	V	Lampu Penerangan Jalan.	21	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
43	I Mengah Songkob, SP	V	Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir.	1	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
44	I Mengah Songkob, SP	V	Lampu untuk LPJ yang sudah mati di dua titik.	2	Dishub	Agar diinformasikan lokasinya dan siap untuk dilindaklanjuti
45	I Nyoman Musna Antara, SH	V	Permohonan LPJ(Lampu Penerangan Jalan)	5	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
46	I Wayan Dikep, SH	V	Lampu Penerangan Jalan di Pertigaan	2	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
47	I Wayan Dikep, SH	V	Lampu Penerangan Jalan.	8	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
48	I Wayan Dikep, SH	V	Tiang Listrik dan Kwh.	10	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
49	I Mengah Rinten, S.Pd.SD	V	Lampu Penerangan Jalan.	4	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
50	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Usulan LPJ sedesa Dukuh	2	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
51	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Usulan LPJ sedesa Dukuh	11	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
52	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pembangunan Terminal Desa Pakraman Dukuh, Kec. Kutu	12	Dishub	Jika kelayakan terpenuhi dan anggaran tersedia dapat dilindaklanjuti
53	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Usulan LPJ sedesa Dukuh	20	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat dilindaklanjuti
54	Drs. I Ketut Mangku	V	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan menuju pantai Banjar Dinas Pekurenan, Desa Triyasar Barat, Kecamatan Kubu.	2	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat dilindaklanjuti
55	Drs. I Ketut Mangku	V	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan menuju pantai Kelompok Mina Suka, Banjar Dinas Pekurenan, Desa Triyasar Barat, Kecamatan Kubu	4	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat dilindaklanjuti

NO	NAMA	DAJIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
56	Drs. I Ketut Mangku	V	6 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di 10 titik jalan menuju Rumah Sakit Pratama Banjar Dinas Labuan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
57	Drs. I Ketut Mangku	V	10 Lampu Penerangan Jalan 4 titik.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
58	Drs. I Ketut Mangku	V	15 Lampu Penerangan Jalan di Pejukung.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
59	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	3 Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) se-kecamatan Abang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
60	I Wayan Gaden	VI	11 Mohon Bantuan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di jalan Kluange menuju Batu Gede dan Tukad Oetan menuju Jabon sepanjang 7 km	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
61	I Wayan Gaden	VI	17 Permohonan Pengadaan Lampu Penerangan jalan (LPJ) di jalan simpur menuju talang linggah	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
62	I Wayan Gaden	VI	21 Permohonan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) jalan melingkar Lempuyang	Dishub	Lokasi dimaksud merupakan ruas jalan Provinsi. Akan diusulkan kepada Pemprov. Bali (Dishub
63	I Ketut Suardana	VI	2 Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ)	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
64	I Ketut Suardana	VI	7 Permohonan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Batu Tumpuk	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
65	I Nyoman Mardana Wimbawa, ST	VI	2 Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Kecamatan Abang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
66	I Made Dondo Wijaya, SE	VI	2 Usulan Lampu Penerangan Jalan di Desa Abati 7 titik	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
67	I Made Dondo Wijaya, SE	VI	6 Usulan Lampu Penerangan Jalan di Desa Ababi	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
68	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	1 Ada Gardu Listrik di salah satu rumah warga yang membahayakan agar mendapat perhatian dari pihak PLN	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
69	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	11 Mohon Bantuan Lampu Penerangan jalan yang dekat kuburan	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
70	I Nyoman Winata, SH.MH	I	Bantuan LPJ Dauh Pangkung Seraya	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
71	I Wayan Pura Arnawa	I	Mohon Bantuan LPJ (lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
72	I Made Juwita, SH	I	Mohon Bantuan Tiang Listrik untuk Banjar Peninggaran Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem	Dishub		Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
73	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	Permohonan LPJ di Desa Seraya Tengah	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
74	I Komang Mustika Jaya, SE	I	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Sekitar desa Adat Bugbug Kec. Karangasem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
75	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Dadia Penataran AM Perasi Kangin, Ds. Pertama Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
76	I Wayan Budi, SH	I	Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) 7 Titik di Sapular Dauh Pangkung	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
77	I Wayan Budi, SH	I	Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) 4 titik di pura dalem dan jalan menuju pura dalem desa adat jasri	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
78	I Wayan Budi, SH	I	Permohonan rambu lalu lintas dan pengaturan lalu lintas di lingkaran palung salak-jasri	Dishub		Lokasi dimaksud merupakan persimpangan antara ruas jalan kabupaten dan ruas jalan
79	I Made Wirta, SE	II	LPJ di Kecamatan Bebandem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
80	I Made Wirta, SE	II	LPJ di Kedesaan Bungaya (Dari Bungaya Menuju Bungaya Kangin) (Dari Bungaya Menuju Sesana)	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
81	I Made Wirta, SE	II	Pengadaan LPJ di Dusun Desa ,Desa Bungaya	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
82	I Made Wirta, SE	II	Pengadaan LPJ Se Kecamatan Bebandem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
83	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan LPJ di Pura Pemaksan Rum Br. Dinas Pande Sari, Ds Bebandem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
84	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan LPJ di Pura Pemaksan Naga Sari Desa Adat Bebandem	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
85	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan LPJ di Br. Dukuh, Desa Adat Sibetan	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
86	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan LPJ di Pura Beji Sidem Sibetan, Desa Sibetan	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	
				PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
87	I Ketut Susanta	II	Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Pemakisan Alit Togal Bengkak	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
88	Haji Marjuhin, SH	II	mohon bantuan pembangunan Masjid dan lampu merkuhi untuk wilayah banjar Dinas lebah Sari	Kesra dan Dishub	Untuk pembangunan LPJU, jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
89	I Wayan Parika, SH	II	Lampu Penerangan Jalan di Tihingan Tengah	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
90	I Wayan Sunarta, S.PI	III	Mohon Bantuan LPJ di Banjar Pangi Tebel Desa Antiga Kelod	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
91	I Wayan Sunarta, S.PI	III	Mohon Bantuan LPJ di Banjar Karangasem Desa Sengkudu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
92	I Wayan Sunarta, S.PI	III	Mohon Bantuan LPJ di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
93	I Nyoman Sumardi, SE	III	Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Kawon Desa Manggis	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
94	I Nyoman Sumardi, SE	III	Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) untuk Dadia Pejeng Desa Manggis	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
95	I Nyoman Sumardi, SE	III	Mohon Bantuan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Br.Dinas Gegelang	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
96	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan untuk Wilayah banjar Karanganyar	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
97	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan untuk wilayah desa Gegelang	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
98	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Mohon bantuan Lampu penerangan Jalan di banjar Seraya Desa Antiga	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
99	I Putu Suarjana, SS	III	Penyediaan Tempat Parkir di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	Dishub	Jika kelayakan terpenuhi dan anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
100	I Putu Suarjana, SS	III	Permohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat diindaklanjuti
101	I Putu Suarjana, SS	III	Perluasan Jaringan Listrik di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Kec.Manggis	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
102	I Wayan Suastika, ST	IV	Mohon Bantuan LPJ di beberapa titik di Desa Duda Timur	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti
103	I Wayan Suastika, ST	IV	Permohonan LPJ beberapa titik di Desa Duda Timur	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat diindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
					PENANGGUNG JAWAB	
104	Wayan Suastika, ST	IV	15	Perlu Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Desa Tailbeng	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
105	Wayan Sumatra, ST	IV	2	Lampu Penerangan Jalan disepulatan Pura Pemaksan Penataran Lipah	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
106	Nyoman Rena, SP	IV	6	Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan di Perbekelan Mongan	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
107	Nyoman Rena, SP	IV	15	Mohon bantuan Lampu Penerangan Jalan di Desa Pempatan Kec. Rendang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
108	Made Agus Kertiana, SH	IV	6	LPJ di lingkungan Br. Adat Rendang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
109	Made Agus Kertiana, SH	IV	10	Usulan LPJ Desa Tinggaa Rendang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
110	Made Agus Kertiana, SH	IV	20	LPJ di Banjar Adat Langsat	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
111	Kadek Sujanayasa, SH	IV	1	Lampu Penerang Jalan Disepulatan Jalan Br. Cegeng Kelod	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
112	Kadek Sujanayasa, SH	IV	3	Lampu Penerangan Jalan seputaran Jalan Desa Adat Kebung	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
113	Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	1	Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Umasai Kauh	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
114	Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	5	Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
115	Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	8	Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Gunung Lebat Selat	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
116	Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	12	Mohon Bantuan Lampu Penerangan Jalan di Padang Tunggal	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
117	Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	2	Mohon Penerangan Jalan (LPJ) di Daarya Arya Belog Tauman	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
118	Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	6	Mohon Penerangan Jalan (LPJ) di Banjar Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
119	Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	13	Mohon penerangan jalan (LPJ) di Desa Adat Geriana Kangin	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
120	Ida Bogus Adnyana, SH	IV	7	Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Dadia Tangkas Kon Agung, Br. Susut, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
					PENANGGUNG JAWAB			
121	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	4	Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Merajan Nit Anya Wang Bang Sidemen, Br. Benekasa, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
122	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	6	Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Sekitaran Lapangan Volly di Balai Banjar Adat Kalot, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
123	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	8	Usulan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Pura Dadya Pasek Gelgel, Br. Ipah, Ds. Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
124	Ni Putu Sriani	IV	1	Lampu Penerangan Jalan di Desa Adat Kesimpar, Dosa Besakih, Kec. Rendang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
125	Ni Putu Sriani	IV	5	Lampu Penerangan Jalan Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
126	Ni Putu Sriani	IV	8	Lampu Penerangan Jalan dari Pura Kiduling Kreteg menuju Perigi Janggal	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
127	I Gede Parwata,	V	4	Listrik dan lampu Pura Smitcan Dadia Sira Anya Gajah Para	Dishub	Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti		
128	I Gede Parwata,	V	12	LPJ di Banjar Dinas Bekuhu Karang, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
129	I Gede Parwata,	V	14	LPJ untuk Banjar Dinas Bahol, Kecamatan Kubu.	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
130	I Gede Parwata,	V	20	Pemindahan KWh Listrik	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
131	I Nengah Songkob, SP	V	2	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan untuk Desa Tianyar, Kecamatan Kubu	Dishub	Pekerjaan dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan		
132	I Nengah Songkob, SP	V	12	LPJ 6 titik di Banjar Adat Telaga Anum, Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
133	I Nyoman Musna Antara, SH	V	4	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) Br. Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
134	I Nyoman Musna Antara, SH	V	7	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Banjar Dinas Jatiduru, Desa Ban, Kec. Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
135	I Nyoman Musna Antara, SH	V	12	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		
136	I Nyoman Musna Antara, SH	V	15	Pemohonan LPJ (Lampu Penerangan Jalan) di Banjar Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti		

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	
				PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
137	Wayan Dikep, SH	V	1 LPJ di Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
138	Wayan Dikep, SH	V	6 LPJ untuk Pura Dadia Paesok Kayu Selam Dukuh	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
139	Wayan Dikep, SH	V	10 LPJ di Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
140	Wayan Dikep, SH	V	20 Lampu Penerangan Jalan untuk Kelompok Tani Eka Karya Bojog, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
141	Komang Sartika	V	1 LPJ di Pos Mas Pait Jalan Koloh Parigul	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
142	Komang Sartika	V	4 LPJ di Tukad Mong	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
143	Komang Sartika	V	6 LPJ di Tunas Paifit-Tukad Santen Kelod	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
144	Komang Sartika	V	8 LPJ di Tukad Maun 2 titik	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
145	Komang Sartika	V	9 LPJ di Pura Penaksan Desa Tianyar 3 titik	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
146	Nengah Rinten, S.Pd.SU	V	3 LPJ di Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
147	Pufu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	5 Penataan parkir pura puseh desa dukuh	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
148	Pufu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	11 Pengadaan LPJ disetiap ruas jalan banjar dukuh	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
149	Pufu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	15 Pengadaan LPJ disetiap jalan di Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
150	Pufu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	25 Pengadaan LPJ disetiap ruas jalan Ithurna kusuma	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
151	Drs. I Ketut Mangku	V	3 LPJ 3 unit penempatan di wilayah Jukung Nelayan dan 1 unit penempatan di Pura Mina Gora	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
152	Drs. I Ketut Mangku	V	12 Perbaikan Instalasi LPJ di Banjar Adat Bukit Mangun	Dishub	Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
153	Drs. I Ketut Mangku	V	15 Pengadaan LPJ 3 titik di Banjar Adat Buluh Winangun.	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
154	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	3 Lampu Penerangan jalan di Br. Dinas Sadimara, Desa Ababi, Kecamatan Abang	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
155	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	6 Lampu Penerangan Jalan di Br. Dinas Sadimara, Kecamatan Abang	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
156	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	10 LPJ tersebar di Kecamatan Abang	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
157	I Wayan Geden	VI	1 Pengadaan Lampu penerangan jalan (LPJ) dari Bias - Sadimara - Belong	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
158	I Wayan Geden	VI	7 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Br Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
159	I Wayan Geden	VI	9 Permohonan lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Br. Dinas Maga Telu, Desa Tista Kecamatan Abang	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
160	I Ketut Suardana	VI	13 Mengurangi Penggunaan Laser	Dishub		Hal tersebut bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
161	I Nyoman Mandana Winbawa, ST	VI	1 Mohon lampu penerangan jalan di depan pura puseh	Dishub		Jika anggaran tersedia dapat ditindaklanjuti
162	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	2 Mohon lampu penerangan jalan di Kecamatan Abang	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
163	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	8 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) untuk Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti
164	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	10 Bantuan Lampu Penerangan Jalan Di Br. Adat Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang	Dishub		Lokasi agar ditentukan di jalan kabupaten. Jika anggaran tersedia, dapat ditindaklanjuti

Kepala Bappellitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT

Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karangasem,



Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660208 198602 1 005

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Winata, SH.MH	I	4 Usulan: Dana Bansos Dadia Arya Bang Sidemen	Bagian Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diwujudkan melalui mekanisme BKK
2	I Nyoman Winata, SH.MH	I	14 Permohonan Bantuan Bansos Pasek Gelgel	Bagian Kesra	
3	I Nyoman Winata, SH.MH	I	15 Bansos Dadia Kuta Waringin Subagan	Bagian Kesra	
4	I Nyoman Winata, SH.MH	I	18 Permohonan Bansos untuk rehab Pelinggih Dadia Padek Pejongan Desa Seraya	Bagian Kesra	
5	I Nengah Suparta, SH.MAP	I	6 Mohon bantuan Pelatihan Serati banten dan Seragam untuk PKK	Bagian Kesra	Pelatihan serati banten masuk dalam Renja Bagian Kesra, Terkait dengan bantuan seragam PKK difasilitasi DPMD Kabupaten Karangasem
6	I Gusli Ngurah Gede Subagiarta	I	2 Usulan Perbaikan Bale Pawedaan Di Pura Penataran Agung Gede	Bagian Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diwujudkan melalui mekanisme BKK
7	I Made Wirta, SE	II	14 Pembangunan Pura Dadia Gede Banjar Tengah di Desa Pakel ,Kecamatan Behandem	Bagian Kesra	
8	I Made Wirta, SE	II	17 Sarana Dan Prasarana Pewargan Pura Paibon Dadia Gede,Banjar Tengah di Desa Pakel ,Kecamatan Behandem	Bagian Kesra	
9	Haji Marjuhun, SH	II	10 Mohon bantuan dana untuk renovasi Musholla Alkharatul Murafun	Bagian Kesra	
10	Haji Marjuhun, SH	II	15 Mohon Bantuan pembangunan Balai Serga guna di mustholia	Bagian Kesra	kiranya dapat diwujudkan melalui BKK
11	Haji Marjuhun, SH	II	16 Mohon bantuan pembangunan teras pada Pondok Pesantren	Bagian Kesra	kiranya dapat diwujudkan melalui BKK

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
12	Haji Marjuhin, SH	II	Mohon bantuan pembangunan warilca di lahan pemakaman umum	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan melalui BKK
13	Haji Marjuhin, SH	II	Moho bantuan alat memasak untuk kelompok suka duka di pondok pesantren	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan melalui BKK
14	I Wayan Parka, SH	II	Mohon Biaya untuk Ngaben Masal	Bagian Kesra	kiranya bisa terprogram dalam kegiatan Upacara agama (Panca Yadiya) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
15	I Nyoman Sumadi, SE	III	Bantuan Hibah Bansos untuk Pura Dadia	Bagian Kesra	Usulan ini terbentur dengan UJ No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
16	I Putu Suarjana, SS	III	Bantuan Hibah untuk Penyengker Balai Banjar	Bagian Kesra	
17	I Putu Suarjana, SS	III	Bantuan Rabat Beton di Pura	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
18	I Gede Agung Puspada, SH	III	Mohon bantuan Bansos untuk perbaikan Pelinggih Pura Dadia Batur Taman Sari	Bagian Kesra	Usulan ini terbentur dengan UJ No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
19	I Gede Agung Puspada, SH	III	Mohon Bantuan Bansos untuk perbaikan Pelinggih Pura yang ada di Banjar Pegubugan	Bagian Kesra	
20	I Wayan Suasitika, ST	IV	Mohon Bantuan Hibah Bansos	Bagian Kesra	
21	I Wayan Suasitika, ST	IV	Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekeluarga guna membantu pembangunan.	Bagian Kesra	
22	I Wayan Sumatra, ST	IV	Bantuan Sosial untuk Pelaksanaan Karya Nukungdagang ring Pura Penalaran Puri Agung tahun 2024	Bagian Kesra	
23	I Wayan Sumatra, ST	IV	Pembangunan Candi Bentar ring Puri Agung agar selesai sebelum tahun 2024	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
24	I Wayan Sumatra, ST	IV	Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Upacara Piodalan seperti Gong dan pakaian tari-tarian	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
25	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon bantuan untuk pura Dadia di Desa Pempatan terutama bantuan berupa bangunan fisik	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
26	I Nyoman Rena, SP	IV	14	Mohon bantuan sosial untuk perbaikan Pura Dedia di sekitar Bajar Dinas Pemuteran	Bagian Kesra Usulan ini terbentuk dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
27	I Made Agus Kertiana, SH	IV	2	Pembangunan Bale Pelik di Ulimsuw	Bagian Kesra kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
28	I Made Agus Kertiana, SH	IV	15	Usulan Penyengker Banjar (Bansos)	Bagian Kesra Usulan ini terbentuk dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
29	I Made Agus Kertiana, SH	IV	32	Pengadaan Pakatan/ Wastra Pemangku (Paiketan Eka Cita Kopemangkuan Kec. Rendang)	Bagian Kesra Masuk Renja 2021
30	I KADEK SUJANAYASA, SH	IV	3	Bantuan Sosial	Bagian Kosra
31	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	7	Mohon Dana Bansos untuk Rehab Wantiian	Bagian Kesra Usulan ini terbentuk dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
32	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	1	Usulan Perehaban Pelinggih Pura di Pura Linjong	Bagian Kesra kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
33	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	4	Usulan Anggaran Karya Ngenteg Linggih, Pedudusan Agung dan Mupuk Pedagingan	Bagian Kesra kiranya bisa terprogram dalam kegiatan Upacara agama (Panca Yadnya) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
34	I Gede Parwata,	V	1	Pembangunan Bale Piyasan	Bagian Kesra kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
35	I Gede Parwata,	V	2	Pembangunan Puwaragan	Bagian Kesra
36	I Gede Parwata,	V	3	Pembangunan Bale Kulikul	Bagian Kesra
37	I Gede Parwata,	V	4	Pembangunan Bale Pesangkepan	Bagian Kesra

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
38	I Gede Parwata,	V	5	Pembangunan Bale Petandingan	Bagian Kesra	
39	I Gede Parwata,	V	6	Pengadaan Seragam Baju Kaos Berkerah	Bagian Kesra	
40	I Gede Parwata,	V	7	Jalan Seltra menuju Arecak Sari mohon dibeton atau di Aspal.	Bagian Kesra	
41	I Gede Parwata,	V	23	Pengadaan Penyengker Pura Sendetan Dadia Sira Anya Gajah Para	Bagian Kesra	
42	I Gede Parwata,	V	24	Pengadaan Bale Penganteb Pura Sendetan Dodia Sira Anya Gajah Para	Bagian Kesra	
43	I Gede Parwata,	V	25	Pengadaan Bale Pebatan/ Polohan Pura Sendetan Dadia Sira Anya Gajah Para	Bagian Kesra	
44	I Gede Parwata,	V	26	Pengadaan Bale Pesantian Pura Sendetan Dadia Sira Anya Gajah Para	Bagian Kesra	
45	I Nyoman Musna Antara, SH	V	6	Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekehe/dadia guna membantu pembangunan.	Bagian Kesra	
46	I Nyoman Musna Antara, SH	V	8	Perlu Hibah bansos untuk kelompok/sekehe/dadia guna membantu pembangunan.	Bagian Kesra	
47	I Wayan Dikep, SH	V	7	Bansos.	Bagian Kesra	
48	I Nengah Rinten, S.Pd.SD	V	5	Bansos	Bagian Kesra	
49	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	14	Pemapihan atau batu sikat Halaman Tri Kahyangan seperti Pura Puseh, Pura Dalam dan Pura Segara	Bagian Kesra	
50	Drs. I Ketut Mangku	V	12	Bantuan untuk Sekeloa Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
51	Drs. I Ketut Mangku	V	14	Kompor Mayat untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Bagian Kesra	
52	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	2	Permohonan Rehab Pura Paibon Idadia	Bagian Kesra	
53	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	10	Permohonan Pembuatan Bale kulkul.	Bagian Kesra	
54	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	13	Permohonan Bale Pebat tempat pembuatan sarana upacara	Bagian Kesra	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
55	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	15	Permohonan paving diareal penataran pura	Bagian Kesra	
56	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	17	Mohon Bantuan Perbaikan Pelinggih Pura	Bagian Kesra	
57	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	18	Permohonan Pembuatan WC di areal pura	Bagian Kesra	
58	I Wayan Geden	VI	19	Hibah untuk pura dadya/maksan se desa Nawakerti	Bagian Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
59	I Wayan Geden	VI	24	Hibah bansos Pura (Tempat Ibadah)	Bagian Kesra	
60	I Wayan Geden	VI	25	Mohon bantuan Kelengkapan sarana jro mangku (genta, pakaian)	Bagian Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
61	I Ketut Suardana	VI	11	Permohonan Pembangunan Gedung Pertemuan Balai Pesangkepkan	Bagian Kesra	
62	I Ketut Suardana	VI	14	Permohonan Pembangunan Setra / Pengembangan Setra	Bagian Kesra	
63	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	4	Mohon bantuan Pembangunan Balai Gong Pura	Bagian Kesra	
64	I Nyoman Winata, SH.MH	I	4	Permohonan Hibah Bansos Sekenem di Dadia	Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
65	I Nyoman Winata, SH.MH	I	8	Permohonan Pembangunan Pelinggih Hibah Bansos Dadia Arya Pelandakan	Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
66	I Nyoman Winata, SH.MH	I	11	Permohonan Pembangunan Pelinggih Hibah Bansos Dadia Arya Pelandakan	Kesra	
67	I Wayan Budi, SH	I	1	Mohon Bantuan Rehab Penyengker pura Dadia dan Balo Banjar Pura dadia Pande Besi Selalang Seraya Barat	Kesra	
68	I Wayan Budi, SH	I	14	Permohonan Perbaikan Penyengker Pura Dukuh Guriyang dadia Darma Astiti	Kesra	
69	I Wayan Budi, SH	I	17	Usul agar dapat dane bansos untuk kegiatan-kegiatan upacara agama dan upacara adat	Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
70	I Wayan Budi, SH	I	24	Perbaikan pura bedugul subak susuan - jasri	Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
71	I Made Wirta, SE	II	12	Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pujalawe	Kesra	
72	Haji Marjuhin, SH	II	3	mohon bantuan tembok penyengker kuburan Desa Lebah Sari	Kesra	
73	Haji Marjuhin, SH	II	7	mohon bantuan pembangunan Masjid dan lampu merkuri untuk wilayah Banjar Dinas lebah Sari	Kesra dan Dishub	
74	Haji Marjuhin, SH	II	16	mohon bantuan pembangunan pintu gerbang kuburan Kecicang Islam.	Kesra	
75	I Wayan Parka, SH	II	9	Usulan Rehab Pura Dadia yaitu Balai Pewedaan dan Bangunan Linggih Sanghyang Tiga di Dadia Gelumbang	Kesra	
76	I Wayan Parka, SH	II	10	Usulan Rehab Bangunan Balai Serba Guna di Dadia Pande	Kesra	
77	I Nyoman Sumadi, SE	III	4	Hibah Bansos ke Dadia Pejeng Desa Manggis	Kesra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
78	I Gede Agung Puspada, SH	III	2	Mohon bantuan Bansos untuk rehab Pura dan Balai Banjar Adat Pande Batur	Kesra	
79	I Gede Agung Puspada, SH	III	4	Mohon bantuan Bansos agar diadakan lagi	Kesra	
80	I Nyoman Rena, SP	IV	1	Mohon bantuan Pembuatan tempat Pitra Yadnya di Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
81	I Nyoman Rena, SP	IV	2	Mohon bantuan Buku Gegejaran Jero Mangku untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Kesra	kiranya dapat dilaksanakan dalam kegiatan Sastra Agama pada bag Kesra sepanjang anggaran memadai
82	I Nyoman Rena, SP	IV	3	Mohon bantuan Pengadaan Bajra sebanyak 21 buah untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Kesra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
83	I Nyoman Rena, SP	IV	4	Mohon bantuan Bale Pesandekan di tempat Pitra Yadnya untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Kesra	
84	I Nyoman Rena, SP	IV	9	Mohon bantuan Pembangunan Pura Dadia di Wilayah Perbekelan Nongan	Kesra	
85	I Made Agus Kertiana, SH	IV	4	Usulan Penyengker Sutra Adat Rendang	Kesra	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
86	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	9 Mohon Bantuan Usulan Dana Bansos untuk Pembangunan Rehab Pura Dadia untuk pelinggih, Pesangunan dan Bale Gong	KEsra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
87	I Wayan Suparta, SE	IV	4 Usulan Pembangunan Pura Penataran Ratu Gede Sakri Dukuh Gading Desa Adat Geriana Kangin	KEsra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
88	I Gede Parwata,	V	1 Pembangunan Bale Samli dan Pewaregan untuk Pengompon Pura Sendelan Dadia Sira Arya Gajah Para, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu	Kesra	
89	I Gede Parwata,	V	2 Penataan halaman Pura di Pengompon Pura Sendelan Dadia Sira Arya Gajah Para, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Kubu, Kecamatan Kubu	Kesra	
90	I Gede Parwata,	V	6 Fasilitas tempat pertemuan untuk Kelompok Suka Duka Apti Dharma Santhi, Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu	KEsra	
91	I Gede Parwata,	V	17 Bansos untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahol, Kecamatan Kubu.	KEsra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
92	I Gede Parwata,	V	18 Bantuan Sekeha Samli untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.	KEsra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
93	I Nengah Songkob, SP	V	8 Bantuan Perhaban Pura Dadia di Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	KEsra	
94	I Nyoman Musna Antara, SH	V	6 Perlu Hibah Bansos Pembangunan 'Wantilan' Balal Pertemuan Br. Dinas Jalituhu, Desa Dan, Kecamatan Kubu	KEsra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
95	I Wayan Dikep, SH	V	2 Perhaban Pura Dadia Pasek Penteka	KEsra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
96	I Wayan Dikep, SH	V	5 Perhaban Pura Dadia Pasek Kayu Selam Dukuh	KEsra	
97	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	6 Pembangunan pura dalam yg terbakar pada saat musim kemarau kemarin di Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	KEsra	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
98	I Wayan Geden	VI	3 Hibah Bansos Ke tempat ibadah	KEsra	Usulan ini terbentur dengan UU No 23 Th 2014 terkait badan hukum kedepannya bisa diusulkan melalui mekanisme BKK
99	I Ketut Suardana	VI	16 Penyengker pura maksan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bumutan , Kecamatan Abang	KEsra	kiranya dapat diusulkan pada BKK melalui Desa Adat
100	I Nyoman Karti Arianta, SH	VI	3 Pemappingan jabe tengah Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	KEsra	
101	I Nyoman Karti Arianta, SH	VI	6 Penyengker Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	KEsra	

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Karangasem,



I Wayan Widrawan, S.S.Kar
Pembina Tk. I
NIP. 19660820 200003 1 005

POKIR RESESE TGI. 27 s/d 28 Januari 2020

NO	NAMA	DAPIL	NO	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Winata, SH, MH	1	3	Bantuan Bedah Rumah untuk Des. Dauh Pangkung Seraya Barat Kec. Karangasem	Perkim	Akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
1	I Nyoman Winata, SH, MH	1	6	Usulan Bedah Rumah untuk Kelompok Ngurah Batu Lejang Lingkungan Bangas Kec. Karangasem	Perkim	Akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
1	I Nyoman Winata, SH, MH	1	9	Permohonan Perbaikan Rumah untuk Desa Adat Perasi Kec. Karangasem	Perkim	Akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSPS
1	I Nyoman Winata, SH, MH	1	12	Permohonan Perbaikan Rumah untuk Desa Adat Perasi Kec. Karangasem	Perkim	Akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSPS
2	I Wayan Pura Arnawa	1	1	Permohonan Bedah Rumah di Br. Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
3	I Mengah Suparta, SH, MAP	1	1	Permohonan Bedah Rumah di Desa Adat Dukuh Kal Padangkera Kec. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
4	I Gusti Ngurah Gede Subagianta	1	1	Permohonan Bedah Rumah di Banjar Swadharma Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
4	I Gusti Ngurah Gede Subagianta	1	2	Permohonan Bedah Rumah di Banjar Eka Cita desa Adat Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
4	I Gusti Ngurah Gede Subagianta	1	3	Permohonan Bedah Rumah di Banjar Adat Ujung Tengah	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

4	I Gusti Ngurah Gede Subagariha	1	5	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dharma Yodhya Kelurahan Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
5	I Made Juwita, SH	1	3	Pemohonan Bedah Rumah dan Perelaban untuk Kelompok Cita Laksana Banjar Peringgiran Desa Seraya Tengah Kec.	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
5	I Made Juwita, SH	1	8	Bantuan rehab rumah di Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem	Perkim	akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSFS
5	I Made Juwita, SH	1	10	Bantuan Bedah Rumah di Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
7	I Komang Mustika Jaya, SE	1	7	Pembangunan rumah layak huni di Desa Adat Bugbug	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	2	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Perlima Kec. Karangasem, Kab.	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	3	Usulan Servis/ Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Perlima Kec. Karangasem, Kab.	Perkim	akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSFS
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	6	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Dalam Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	7	Usulan Servis Rumah / Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Dalam Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Perkim	akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSFS
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	10	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Perlima Kec. Karangasem, Kab.	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
8	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	1	11	Usulan Servis Rumah / Rehab Rumah untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Perlima Kec. Karangasem, Kab.	Perkim	akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BSFS
8	I Wyan Budi, SH	1	7	Pemohonan Bedah Rumah untuk dadia Pandu Besi Selalang Seraya dan Dauh Pangkung Seraya Barat	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

9	I Wayan Budi, SH	I	3	Mohon Bantuan Betonisasi Jalan Pemukiman di Dauh Panglung, Siraya Barat	Perkim	bukan kewenangan perkim, perkim menanggapi di wilayah pemukiman kawasan kumuh di perkotaan
9	I Wayan Budi, SH	I	9	Permohonan Bedah Rumah di Banjar Adat Kutuh Desa Pekraman Jasin Ketod	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
9	I Wayan Budi, SH	I	13	Permohonan Bedah Rumah untuk Dada Darna Astri Jasin Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
9	I Wayan Budi, SH	I	18	Permohonan Bedah Rumah untuk Banjar Dewamas Jasin Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
9	I Wayan Budi, SH	I	27	Mohon selalu berkoordinasi dengan kelian banjar kelian lingkungan dan kelian desa didlm penentuan warga yg mendapatkan bantuan bedah rumah	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
10	I Made Wirta, SE	II	1	Pengadaban Bedah Rumah di kedsaan Bungaya	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
10	I Made Wirta, SE	II	2	Pengadaan Bedah Rumah Se Kecamatan Bebatokan	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
12	I Ketut Susanta	II	1	Permohonan Bedah Rumah di Dada Merajan Nangka Desa Adat Nangka	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
12	I Ketut Susanta	II	5	Permohonan Bedah Rumah di Pemekasan Aik Tejal Bengkok	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
13	Haji Maryuhin, SH	II	4	mohon bantuan bedah rumah bagi warga banjar dinas Lebah San	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
13	Haji Maryuhin, SH	II	6	mohon bantuan pembangunan Gerbang Kampang	Perkim	akmal tidak jelas

13	Haji Marjuhn, SH		II	10	mohon bantuan rehab rumah warga di Banjar dinas Lebah Sari	Perkim	akan diusulkan di anggaran APBN 2021 di program BS/PS
13	Haji Marjuhn, SH		II	18	renovasi Gerbang kampung Banjar Dinas Kecamatan Islam	Perkim	tidak dapat direnovasi karena tidak sebagai aset pemerintah
14	I Wayan Parika, SH		II	7	Bantuan Bedah Rumah di Tinggan Tengah	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
14	I Wayan Parika, SH		II	11	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Dada Pande	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
15	I Wayan Sumarta, S.Pi		III	4	Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Pang Tebel Desa Antiga Kelod	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
15	I Wayan Sumarta, S.Pi		III	12	Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Karangasem Desa Sempikidu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
15	I Wayan Sumarta, S.Pi		III	17	Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
16	I Nyoman Sumardi, SE		III	1	Pemohonan Bedah Rumah di Br Dinas Kawan Desa Manggis	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
16	I Nyoman Sumardi, SE		III	3	Ratas Beton Gang di Br Dinas Kawan Desa Manggis	Perkim	bukan kewenangan perkim, perkim menanganai di wilayah pemerintahan kawasan umum di perkotaan
16	I Nyoman Sumardi, SE		II	7	Pemohonan Bedah Rumah di Br Dinas Gegalang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
17	Ir I Wayan Tama, SH/MIH		II	1	Pemohonan Bedah Rumah untuk masyarakat di Banjar Karanganyar	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
17	Ir I Wayan Tama, SH/MIH		II	5	Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Desa Gegalang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

18	I Putri Suarjana, SS	III	9	Seodoran (Perhatikan Lingkungan) di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Kec. Manggis	Perkim	bulan kewenangan perkim, perkim menanggapi di wilayah permukiman kawasan kumuh di perkotaan
20	I Wayan Suasitika, ST	IV	3	Pemohonan Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu di Banjar Adat Pateh, Desa Duda Timur, Kec. Selat	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
20	I Wayan Suasitika, ST	IV	6	Pemohonan Bedah Rumah di Dauda Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Peringsari	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
20	I Wayan Suasitika, ST	IV	7	Pemohonan Bedah Rumah di Dauda Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Peringsari	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
20	I Wayan Suasitika, ST	IV	18	Mohon Bantuan Bedah Rumah bagi warga yang tidak memiliki rumah di Desa Talibeng, kec. Sidemen	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
21	I Wayan Sumatra, ST	IV	1	Bantuan Bedah Rumah untuk Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
22	I Nyoman Renut, SP	IV	16	Mohon bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Pempatan Kec. Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
25	I Gusti Lanang Agung Anawan, SE	IV	2	Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Dinas Umasar Kauh	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
25	I Gusti Lanang Agung Anawan, SE	IV	6	Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
25	I Gusti Lanang Agung Anawan, SE	IV	9	Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Gunung Lebah Selat	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
25	I Gusti Lanang Agung Anawan, SE	IV	13	Mohon Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Pujung Tunggai	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
26	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	4	Mohon Bantuan Rumah untuk Dauda Arya Beleg Taunan	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

26	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	8	Mohon Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
26	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	11	Mohon Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Adat Gertana Kangan	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
28	Ni Putu Sriani	IV	3	Bantuan Bedah Rumah Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
28	Ni Putu Sriani	IV	6	Bedah Rumah di Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
28	Ni Putu Sriani	IV	11	Bantuan Bedah Rumah di Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
29	I Putu Eka Julawan, SH	IV	2	Bantuan Bedah Rumah Dadiye Pasek Tua Aji Peleangan, Desa Besakih, Kec. Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
29	I Putu Eka Julawan, SH	IV	6	Bantuan Bedah Rumah di Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
30	I Wayan Suparta, SE	IV	3	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Janglap Batu Gode Desa Pakraman Duda	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
30	I Wayan Suparta, SE	IV	5	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Adat Giri Purwa, Ds. Adat Genyana Kangan, Ds. Duda Utara, Selat, Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
30	I Wayan Suparta, SE	IV	6	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Br. Tannan Bai Wates Kangan Desa Pakraman Duda	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
30	I Wayan Suparta, SE	IV	10	Usulan Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Pasek Dukuh Susut Muncan	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
31	I Gede Parwata	V	3	Bedah Rumah untuk Pengempon Pura Sempalan Dada Sira Anya Gajalt Para, Banjar Dinas Karanganyar Desa Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

31	I Gedde Panwata	V	10	Bedah Rumah untuk Kelompok Suka Duka Ajiti Dharma Santhi, Banjar Dinas Beluhu Kangin, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
31	I Gedde Panwata	V	16	Bedah Rumah 5 unit untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
32	I Nengah Songkoh, SP	V	3	Bedah Rumah untuk masyarakat KSPP Mekar Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
32	I Nengah Songkoh, SP	V	7	Bantuan Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
33	I Nyoman Mustina Antara, SH	V	3	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
33	I Nyoman Mustina Antara, SH	V	8	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Jatuhuru, Desa Ban, Kec. Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
33	I Nyoman Mustina Antara, SH	V	13	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Cakem, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
33	I Nyoman Mustina Antara, SH	V	16	Pemohonan Bedah Rumah di Banjar Dinas Pengnyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
34	I Wayan Dikep, SH	V	7	Bedah Rumah untuk masyarakat Dadia Pasek Kayu Selem, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
34	I Wayan Dikep, SH	V	17	Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
34	I Wayan Dikep, SH	V	19	Bedah Rumah untuk masyarakat Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Baludewen Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
35	I Komang Sartika	V	3	Bedah Rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Eka Adnyana, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

35	I Komang Santika	V	5	Bedah Rumah 4 unit di Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
36	I Nengah Rintan, S.Pd.SD	V	8	Bedah Rumah untuk masyarakat Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
37	Pulu Dini Suryawan Giri, S.Sos	V	4	Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
37	Pulu Dini Suryawan Giri, S.Sos	V	14	Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
37	Pulu Dini Suryawan Giri, S.Sos	V	23	Pembangunan bedah dan rehab rumah untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
39	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	2	Bedah Rumah bagi Masyarakat miskin di Br. Sadimara Kelod, Desa ababi, Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
39	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	5	Bedah Rumah bagi Masyarakat miskin untuk Dadya Arya Kebon Tubuh, Br. Dinas Sadimara, Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
39	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	12	Bedah Rumah tersebar di Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
40	I Wayan Gedlen	VI	4	Bedah Rumah untuk masyarakat Sadimara	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
40	I Wayan Gedlen	VI	6	Bedah Rumah bagi masyarakat kurang mampu di Banjar Dinas Ngs Kaka	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
40	I Wayan Gedlen	VI	6	Bedah Rumah Bagi Masyarakat kurang mampu di Br Ngs Kaka, Desa Tribawara Kecamatan Abang	Putim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
40	I Wayan Gedlen	VI	10	Mohor bantuan Bedah Rumah untuk warga masyarakat yang kurang mampu di Br Onas Mega Telu, Desa Tista Kecamatan	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

41	I Ketut Suardana	VI	10	Bantuan bedah rumah di Desa Luntan, Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
42	I Nyoman Mardana Wibawa, ST	VI	2	Usulan bedah rumah di Dadya Brangsinga Banjar Dinas Bias Iantang Kelod, Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
42	I Nyoman Mardana Wibawa, ST	VI	7	Bedah Rumah Bagi Masyarakat kurang mampu di Br. Segia	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
44	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	3	Bedah rumah di Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
44	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	6	Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di Dadya Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
45	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	1	Bedah Rumah untuk Masyarakat Tjringtan sebanyak 3 Orang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
45	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	8	Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang mampu Di Br. Leteh, Desa Purnakerti, Kecamatan abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya
45	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	15	Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin di Pegunungan Lipah Br. Dinas Legih, Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perkim	akan di usulkan di anggaran APBD 2021 jika ada anggarannya

Kepala Bappedalingda Kab. Karangasem



I Nyoman Siki Nigrah, ST, ME
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kab. Karangasem



Drs. I Wayan Ardhika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691011 198903 1 003

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Karangasem



Ir. I Nyoman Miertha Yanyan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630129 198303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/523/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan surat Nomor : 005/32/Bappelitbangda/Setda tanggal 20 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Sekretaris DPRD, hadir sebagai peserta rapat Perangkat daerah sesuai undangan. Adapun hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Ngurah	Ka. Bappelitbangda	1.
2.	Wayan Arista	sekwan	2.
3.			3.
4.	Irena Arngwa	Dusbud / Kabus	4.
5.	Gele Basma	Dinas Ros / Kadis	5.
6.	Ka Subadra	DPUPIT / Sekdis	6.
7.	Wayan Sarya	Bisdispon	7.
8.	Soy Subana	DPMD / Sumpog	8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	2 Perehaban Sekolah SD 2 Tumbu	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
2	I Komang Mustika Jaya, SE	I	4 Perumahan Rehab penyengker di pintu masuk sekolah SD di desa Bugbug	Disdikpora	Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
3	I Komang Mustika Jaya, SE	I	5 Perumahan Pengadaan Meubeler di sekolah SD di desa Bugbug	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
4	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	5 Usulan Beasiswa untuk anak Sekolah	Disdikpora	sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
5	I Made Wirta, SE	II	4 Meubeler Untuk TK,SD,SMP,SMA Se Kecamatan Bebandem	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SMP
6	Haji Marjuhin, SH	II	11 Mohon bantuan seperangkat Komputer untuk Yayasan Alkhairatul Murafiqun untuk kegiatan belajar mengajar	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
7	Haji Marjuhin, SH	II	20 Mohon dibantu Papan Tulis White Board untuk proses belajar pesantren mengajar santri di Pondok Pesantren	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
8	Haji Marjuhin, SH	II	21 Mohon bantuan seragam guru dan santri pondok pesantren	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
9	Haji Marjuhin, SH	II	22 Mohon bantuan alat musik Qasidah bagi para guru dan santri	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
10	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	5 Mohon bantuan beasiswa untuk siswa dari SD s/d SMA	Disdikpora	sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan untuk SMA tidak terakomodir karena merupakan kewenangan Provinsi
11	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	20 Mohon bantuan rehab sekolah dan bantuan meubler untuk SDN 1 Amiga	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
12	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	23 Mohon bantuan renovasi Lapangan Volley di Sirmangan	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
					PENANGGUNG JAWAB			
13	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	3	Permohonan Rehab Sekolah yang mengalami kerusakan Se- Kecamatan Manggis	Disdikpora			Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN 3 Manggis dan SDN 3 Ngis dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah SMP (Pekerjaan Pembangunan, Perencanaan, Pengawasan Konstruksi Pagar/Penyengker SMPN 2 Manggis)
14	I Wayan Sumatra, ST	IV	7	Bantuan Bea Siswa anak yang berprestasi	Disdikpora			Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
15	I Nyoman Rena, SP	IV	9	Mohon bantuan pembuatan Lapangan Football	Disdikpora			Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
16	I Made Agus Kertiana, SH	IV	27	KKC tetap dipertahankan	Disdikpora			Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SMP
17	I Made Agus Kertiana, SH	IV	28	Pembangunan Perpustakaan SDN 1 Rendang	Disdikpora			Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pembangunan ruang perpustakaan SD
18	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	3	Usulan Rehab Penyengker SD 2 Pesaban	Disdikpora			Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung konstruksi pagar SDN 2 Pesaban
19	I Mengah Songkub, SP	V	9	Pengaspalan Jalan dan SD 2 Satu Atap menuju ke Batu Dinding kurang lebih 3 km.	Disdikpora			Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
20	I Komang Sartika	V	6	Paving Jalan di SD Nomor 1 Tulamben dan Penambihan Halaman 30 hare.	Disdikpora			Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
21	I Komang Sartika	V	7	Rehab berat 1 unit Gedung SD Nomor 1 Tulamben.	Disdikpora			Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
22	I Komang Sartika	V	9	Pagar di SD Nomor 4 Tulamben.	Disdikpora			Bisa diakomodir menyesuaikan ketersediaan anggaran
23	I Komang Sartika	V	10	Pembangunan Lapangan di SD Nomor 4 Tulamben.	Disdikpora			Bisa diakomodir menyesuaikan ketersediaan anggaran
24	I Komang Sartika	V	12	Pembangunan Wanti Wanti Keramik Paving Penataan Halaman (GOR)	Disdikpora			Tidak terakomodasi karena keterbatasan anggaran
25	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	10	Renovasi SDN 4 Dukuh, Bhuana Kusuma	Disdikpora			Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
26	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	17	Renovasi 4 SDN di sedesa Dukuh	Disdikpora			Bisa Terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD

NO	NAMA	DAJIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
27	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	SD No.2 Kerta Mandala mohon perbaikan tembok retak (kondisi kurang bagus)	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
28	I Wayan Geden	VI	Pembangunan Sederan Sekolah SMP 1 Arap	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SMP
29	I Wayan Geden	VI	Pembangunan Gedung TK di Sega	Disdikpora	Belum terakomodir pada Program Pendidikan Anak Usia Dini karena masih menunggu kepastian dari renja dengan yang disepakati di musrenbang da anggarannya belum muncul di DPA 2020
30	I Wayan Geden	VI	Pembarigunan Penyongker SPN 1 Bunutan	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
31	I Wayan Geden	VI	Mohon Bantuan Pembangunan Penyongker untuk SD 2 Nawakerti sepanjang (+ 150 m)	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
32	I Wayan Geden	VI	Mohon Bantuan Kartu Karangasem Cerdas kepada sekolah yang ada di Nawakerti	Disdikpora	sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
33	I Wayan Geden	VI	Mohon bantuan pembangunan penyongker SDN 2 Desa Nawakerti.	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
34	I Nyoman Mardana Wimbawa, ST	VI	Mohon Bantuan Angkul – angkul TK Negeri Kerta Mandala	Disdikpora	Belum terakomodir pada Program Pendidikan Anak Usia Dini karena masih menunggu kepastian dari renja dengan yang disepakati di musrenbang da anggarannya belum muncul di DPA 2020
35	I Nyoman Mardana Wimbawa, ST	VI	Penataan halaman SD 3 Kerta Mandala	Disdikpora	Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
36	I Komang Dwi Purwa Adf Susila	VI	Tanah bukti pemerintah di poh santen tidak ada pemberitahuan kepada penggarap sebanyak 6 kk, kalau ditamah tersebut akan dibangun sekolah	Disdikpora	Sosialisasi lahan pemerintah Provinsi Bali kepada penggarap sudah diakomodir BPKAD Kab. Karangasem bersama BPKAD Prov. Bali yg dilaksanakan dikantor Desa Tista
37	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	Mohon Bantuan untuk perlatan Alat Musik seperti Gitar,drum,bass,dll	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena keterbatasan anggaran
38	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	Bantuan Bola Volly untuk Club Bola Volly Batu Sanglat. Desa Seraya Tengah	Disdikpora	Tidak bisa diakomodir, bukan kewenangan disdikpora

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
39	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	5 Bantuan Net untuk Club Bola Volly Batu Sanglot Desa Seraya Tengah	Disdikpora		Tidak bisa diakomodir, bukan kewenangan disdikpora
40	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	7 Bantuan Seragam untuk Club Bola Volly Batu Sanglot Desa Seraya Tengah	Disdikpora		Tidak bisa diakomodir, bukan kewenangan disdikpora
41	I Komang Mustika Jaya, SE	I	9 Pembangunan Ruang Kelas SD 1 Bugbug	Disdikpora		Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pembangunan ruang kelas baru
42	I Komang Mustika Jaya, SE	I	10 Rehab Penyengker SD 5 Bugbug	Disdikpora		Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SDN 5 Bugbug
43	I Wayan Budi, SH	I	28 Usulan penghapusan system zonasi sekolah	Disdikpora		Kewenangan pusat yang diatur melalui Permendikbud.
44	I Made Wirta, SE	II	3 Pembangunan Sekolah Se Kecamatan Bebandem	Disdikpora		Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan penambahan ruang kelas sekolah SMP
45	I Made Wirta, SE	II	4 Perhaban Sekolah Sekecamatan Bebandem	Disdikpora		Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN 2 Bebandem
46	I Made Wirta, SE	II	5 Perhaban Ruang Kelas di SD 1 Bebandem , SD 6 Bebandem, SMP 4 Bebandem	Disdikpora		bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD dan kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
47	I Made Wirta, SE	II	14 Peningkatan Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lapangan Volly, Tennis Meja dll)	Disdikpora		Untuk kegiatan-kegiatan tsb pengadaan sarpras keolahragaan di Kecamatan serta sarpras cabang olahraga tertentu bukan kewenangan Disdikpora.
48	I Made Wirta, SE	II	22 Sarana & Prasarana Lapangan Voly di Banjar Adat Jungstri	Disdikpora		Untuk kegiatan-kegiatan tsb pengadaan sarpras keolahragaan di Kecamatan serta sarpras cabang olahraga tertentu bukan kewenangan Disdikpora.
49	I Made Wirta, SE	II	23 Sarana & Prasarana Pencak Silat, Samsak di Banjar Adat Jungstri	Disdikpora		Untuk kegiatan-kegiatan tsb pengadaan sarpras keolahragaan di Kecamatan serta sarpras cabang olahraga tertentu bukan kewenangan Disdikpora.
50	I Made Wirta, SE	II	24 Pakaian Seragam Futsal	Disdikpora		Untuk kegiatan-kegiatan tsb pengadaan sarpras keolahragaan di Kecamatan serta sarpras cabang olahraga tertentu bukan kewenangan Disdikpora.
51	I Made Wirta, SE	II	26 Pakaian Seragam Volly	Disdikpora		Untuk kegiatan-kegiatan tsb pengadaan sarpras keolahragaan di Kecamatan serta sarpras cabang olahraga tertentu bukan kewenangan Disdikpora.
52	I Ketut Susanta	II	3 Permohonan KKC (Kartu Karangasem Cerdas) di Dadia Merojan Nangka Desa Adat Nangka	Disdikpora		Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
53	I Ketut Susinta	II	7	Permohonan KKC (Kartu Karangasem Cerdas) di Pemaksan Alit Tegai Bergak	Disdikpora		sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
54	Haji Marjuhini, SH	II	12	mohon bantuan fasilitas sekolah maupun keperluan belajar mengajar untuk MTs Maarif Kecicang Islam	Disdikpora		Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
55	Haji Marjuhini, SH	II	14	mohon bantuan pendirian Pondok Btahfis untuk MTs. Maarif	Disdikpora		Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas
56	I Wayan Sumarta, S.Pt	III	8	Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA untuk Desa Antiga Kelod	Disdikpora		sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
57	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	9	Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA untuk Desa Sengkudu	Disdikpora		sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
58	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	14	Mohon bantuan Beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA di Desa Nyuh Tebel	Disdikpora		sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD dan Kegiatan Beasiswa SMP
59	I Wayan Suastika, ST	IV	4	Mohon Bantuan Rehab Sekolah di Banjar Adat Pateh, Desa Duda Timur, Kec. Selat	Disdikpora		bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
60	I Wayan Suastika, ST	IV	14	Rehab Sekolah Desa Duda Timur	Disdikpora		bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
61	I Nyoman Rena, SP	IV	7	Mohon Bantuan rabat lantai Gedung Pemuda di Desa Nongan	Disdikpora		Bukan aset dinas pendidikan, tidak bisa diakomodir
62	I Nyoman Rena, SP	IV	14	Mohon perbaikan Gedung PAUD kumara Guaji Banjar Tengah Desa Nongan	Disdikpora		Bukan aset dinas pendidikan, tidak bisa diakomodir
63	I Made Agus Kertiana, SH	IV	7	Pembinaan Pendidikan dan Olahraga, Penataan Lapangan Olahraga Desa Rendang	Disdikpora		Bukan aset dinas pendidikan, tidak bisa diakomodir
64	I Made Agus Kertiana, SH	IV	13	Pendataan KIS dan Kartu Indonesia Pintar	Sosial dan Disdikpora		KIS diakomodir di Dinas Sosial sedangkan KIP dapat difasilitasi Dinas Pendidikan
65	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	1	Mohon Rehab pembangunan tembok penyengker SDN 1 Pesaban	Disdikpora		Bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan
66	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	8	Pembuatan Sekolah Kejar Paket A,B,C di Lingkungan Tekedan Kamdik Desa Besaroh, Kecamatan Rendang	Disdikpora		Bukan aset dinas pendidikan, tidak bisa diakomodir
67	I Gede Parwata,	V	15	Beasiswa untuk SD di Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.	Disdikpora		sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan Beasiswa SD
68	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	12	Perehaban SD 1 dukuh.	Disdikpora		Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN 1 Dukuh

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
69	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Perehaban sekolah SD 2 dan 3 Dukuh	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
70	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Perehaban sekolah SD 4 Dukuh	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
71	Drs. I Ketut Mangku	V	Rehab Gedung dan Penyengker SD 9 Kutuh Panggul	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
72	Drs. I Ketut Mangku	V	Perehaban 2 ruang Sekolah SD 3 Pejukung	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
73	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	Rehab Gedung Sekolah di Kecamatan Abang	Disdikpora	Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN 1 Kesimpar
74	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	Rehab Gedung Sekolah tersebar di Kecamatan Abang	Disdikpora	Sudah terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN 2 Kesimpar dan kegiatan kegiatan rehabilitasi
75	I Ketut Suardana	VI	Pembangunan sekolah SMA / SMK.	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas, atau merupakan kewenangan Provinsi
76	I Ketut Suardana	VI	SMK di Abang agar di tambahkan jurusan tata boga	Disdikpora	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas, atau merupakan kewenangan Provinsi
77	I Ketut Suardana	VI	Pengangkatan Guru agama Hindu	Disdikpora	Tahun 2021 masih kelebihan guru agama, difasilitasi melalui pemerataan guru.
78	I Ketut Suardana	VI	Penyengker padmasana, Gapura dan pemasangan paving di SD 2 Bumutan	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung SD
79	I Nyoman Mardana Wibawa, ST	VI	Rehab SD 1 Purwa Kerti	Disdikpora	bisa terakomodir pada program wajib belajar sembilan tahun kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD

Kepala Bappelitbangla Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720-199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Urutima Muda
NIP. 19691012-198903 1 003

A.n Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karangasem

Sekretaris,



Dr. I Wayan Sarya, S.Pd., M.Ag., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19701125-198903 1 003

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	
				PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Wayan Budi, SH	I	Mohon bantuan untuk di permudah dalam pengurusan ijin keberadaan dan parasonal villa di jasri	DPMPTSP	Sudah terakomodir dalam program penanaman modal Renja dalam pelayanan
2	I Ketut Suardana	VI	Penerbitan ijin usaha/ijin bersyarat bagi pelaku usaha pariwisata agar bisa membayar pajak.	DPMPTSP	Sudah terakomodir dalam program penanaman modal. Ijin bersyarat sudah diakomodir dalam Perbup Nomor 32 Tahun 2019.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utanua Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

A. n Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karangasem
Sekretaris,



Drs. I Komang Subadra, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 199303 1 135

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB	Secara Umum :
1	I Nyoman Winata, SH, MH	I	1. Permohonan bantuan KIS atau BPJS buat warga yang kurang Mampu	Dinas Sosial	1) Untuk permohonan Kartu KIS Sudah terakomodir bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Karangasem dengan BPJS Caba. Klungkung untuk Tahun 2020 diperpanjang. Kepesertaan JKN-KIS dari semua segmen Kab. Karangasem sampai dengan bulan April 2020 sudah mencapai 513.501 jiwa atau sebanyak 99,29% dari jumlah penduduk Kab. Karangasem. Dari jml tersebut yang dibantu dengan APBD (PBI APBD) mencapai 234.479 jiwa. Untuk pengurusan baru secara kolektif yang belum sebagai peserta diusulkan melalui Desay/Kelurahan, kecuali yang dalam kondisi emergency/usulan perorangan disampaikan langsung ke Dinas Sosial.
2	I Ketut Susinta	II	2. Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat)	Dinas Sosial	
3	Haji Marjulan, SH	II	3. Mohon agar BPJS bisa diproses dari kelas III menjadi Kartu KIS	Dinas Sosial	
4	I Wayan Parka, SH	II	4. Permohonan KIS	Dinas Sosial	
5	I Putu Suarjana, SS	III	5. Penyaluran bantuan KIS agar lebih merata	Dinas Sosial	
6	I Wayan Suastika, ST	IV	6. Mohon kartu KIS untuk rakyat tidak mampu	Dinas Sosial	
7	I Wayan Suastika, ST	IV	7. Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biayai pemerintah	Dinas Sosial	
8	I Wayan Sumatra, ST	IV	8. Bantuan Lanjut Usia (Lansia)	Dinas Sosial	2) Sudah diakomodir pada program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pada Renja Dinas Sosial Tahun 2021.
9	I Nyoman Rena, SP	IV	9. Mohon adanya santunan untuk para Lansia	Dinas Sosial	
10	I Nyoman Rena, SP	IV	10. Mohon Bantuan Kursi Roda untuk Penyandang Cacat	Dinas Sosial	
11	I Nyoman Bena, SP	IV	11. Mohon bantuan untuk para lansia	Dinas Sosial	
12	I Made Agus Kertiana, SH	IV	12. Bantuan untuk Lansia	Dinas Sosial	
13	I Made Agus Kertiana, SH	IV	13. Bantuan untuk anak yatim piatu	Dinas Sosial	
14	I Made Agus Kertiana, SH	IV	14. Bantuan masyarakat yang cacat	Dinas Sosial	
15	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SF	IV	15. Usulan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan (KIS)	Dinas Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
16	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	16. Usulan agar Masyarakat memiliki BPJS KIS	Dinas Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
17	I Putu Eka Julawan, SH	IV	17. Kartu Indonesia Sehat Bagi Warga Br Dinas Kunyit	Dinas Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
18	I Hengah Songkob, SP	V	18. Mobil Tangki untuk Air Bersih.	Dinas Sosial	Usulan pengadaan mobil tangki untuk perangkat daerah dimungkinkan masuk renja, jika pengabdian untuk di tingkat desa diupayakan melalui dana desa, untuk pelayanan air bersih sudah berjalan.

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
19	I Nyoman Musna Antara, SH	V	Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biayai pemerintah.	Dinas Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
20	I Gede Dana, S.Pd,M.Si	VI	Fasilitasi Pembuatan KIS / masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIS di Kecamatan Abang	Dinas Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
21	I Wayan Geden	VI	Pemberian bantuan kepada anak yatim piatu atas nama Ni Nengah Dewi Ulinantari umur 10 th (Ayah, I Nyoman Sumadisa, Ibu, Ni Ketut Tunas Alm)	Dinas Sosial		Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
22	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	Pembuatan Kartu KIS	Dinas Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
23	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	I	Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Banjar Adat Ujung Tengah	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
24	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	I	Mohon Bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Banjar Dharma Yadiya Kelurahan Karangasem	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
25	I Made Juwita, SH	I	Bantuan KIS untuk Kelompok Bakti Segara Br. Suluhun Desa Seraya Barat Kec. Karangasem	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
26	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH.,M.Kn	I	Usulan KIS untuk masyarakat Dadia Dalam Segening, Ds. Bukit Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
27	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH.,M.Kn	I	Usulan pengajuan KIS untuk masyarakat Dadia Penataran Alit Perasi Kangin, Ds. Pertamina Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
28	I Wayan Budi, SH	I	Mohon bantuan pengurus KIS (kartu Indonesia sehat)	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
29	I Ketut Susinta	II	Permohonan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Dadia Merajan Nangka Desa Adat Nangka	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
30	I Ketut Susinta	II	Permohonan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Pemaksan Alit Tegal Bengkak	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
31	I Wayan Suastika, ST	IV	Mohon kartu KIS untuk rakyat tidak mampu di Br. Babakan, Desa Peringsari	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
32	I Wayan Suastika, ST	IV	Masyarakat sangat membutuhkan Kartu Indonesia Sehat /BPJS yang di biayai pemerintah	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
33	I Wayan Sumatra, ST	IV	Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
34	I Wayan Sumatra, ST	IV	Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Br. Dukuh Ogang, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
35	I Nyoman Rena,SP	IV	Mohon bantuan BPJS	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
36	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Pendaftaran KIS dan Kartu Indonesia Pintar	Sosial dan Disdikpora		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas
37	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Br. Dimas Umatsari Kauh	Sosial		Sudah terakomodir seperti terurai pada point 1 diatas

NO	NAMA	DAPIH	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
38	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Desa Selat, Kec. Selat, Kab. Karangasem	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas
39	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Gunung Lebah Selat	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas
40	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Mohon Bantuan Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Padang Tunjgal	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas
41	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	Peduli Lansia di Lingkungan Tekedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Itendang	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
42	I Gede Parwata	V	BPJS untuk Kelompok Tani Ternak Pekarangan, Banjar Dinas Bahel, Kecamatan Kubu.	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas
43	I Gede Parwata	V	Bantuan untuk Lansia	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
44	I Nengah Songkob, SP	V	Bantuan untuk Lansia dan Disabilitas	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
45	I Nengah Songkob, SP	V	Penanggulangan Lansia dan Disabilitas untuk masyarakat Banjar Dinas Buana Pule, Desa Tianyar Barzt, Kecamatan Kubu	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
46	I Nyoman Musna Antara, SH	V	Mohon Bantuan Bagi Lansia Br. Dinas Pengiyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
47	I Komang Sartika	V	Bantuan Kesejahteraan Pati Jembo	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
48	I Kamang Sartika	V	Bantuan untuk orang cacat	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
49	I Ketut Suardana	VI	Bantuan untuk orang cacat di Desa bunutan, Kecamatan Abang	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
50	I Nyoman Mardana Wimbawa, ST	VI	Permohonan kartu KIS untuk Dadya Brangsinga Banjar Dinas Bias lantang Kelod, Kecamatan Abang	Sosial	Bisa diakomodir dalam renja seperti terurai pada poin 2 di atas
51	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	Mohon kartu BPJS (KIS) bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Abang	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas
52	I Nyoman Karta Ariantia, SH	VI	BPJS KIS bagi masyarakat kurang mampu di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan Kecamatan Abang	Sosial	Sudah terakomodir seperti terurai pada poin 1 diatas

Kepala Boppeltbangda Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Sili Ngurah, ST., MT.
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Medika, M.Si
Pembina Utakya Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem,

I Gede Basma, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198803 1 241

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Winata, SH.MH	1	6 Permohonan Bantuan 1 Barung Baeganjur		Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum
2	I Nengah Suparta, SH.MAP	1	1 Mohon Rehab Penyengker Pura Puseh Desa Adat Dukuh Padangkerta		Disbud	Tidak bisa diakomodir dalam Renja Dinas Kebudayaan, dirumuskan melalui mekanisme BKK
3	I Nengah Suparta, SH.MAP	1	4 Permohonan seragam pecalang		Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum
4	I Nengah Suparta, SH.MAP	1	8 Mohon rehab Pura Pesucian		Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
5	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	1	3 Usulan Perbaikan Arena Banjar Gede Subagan		Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
6	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	1	4 Mohon bantuan Pembuatan Dapur Bale Banjar		Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
7	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	1	6 Mohon pemasangan paving dan Perbaikan Penyengker di Banjar Adat Pempatan.		Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
8	I Gusti Ngurah Gede Subagiarta	1	7 Mohon bantuan Pembuatan Dapur/ Pewartagan Bale Banjar		Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
9	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH.,M.Kn	I	6	Usulan Pembinaan Sekaa – Sekaa / Kelompok	Disbud	maksud dari kegiatan ini tidak bisa dipahami	
10	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH.,M.Kn	I	7	Usulan Pembinaan Sekaa – Sekaa / Kelompok (Sekaa Gong, Sekaa Rejang)	Disbud	kewenangan Dinas Kebudayaan hanya memfasilitasi Terentuknya Tim Pembina	
11	Kadek Weisya Kusmiadewi, SH.,M.Kn	I	9	Renovasi Wanflin Bale Banjar	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
12	I Made Wirta, SE	II	1	LPJ Penerangan Jalan Sekelamatan Bebandem	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
13	I Made Wirta, SE	II	3	Penyengker Pura Puja Lawe, Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
14	I Made Wirta, SE	II	6	Baleganjur Di Pura Dadia Arya Kula Waningin Mertia Sari, Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum	
15	Haji Marjuhin, SH	II	1	Mohon bantuan pakaian seragam tari kesenian tradisional Rudath	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum	
16	Haji Marjuhin, SH	II	19	Mohon bantuan alat music dan seragam kesenian Rudath	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum	
17	I Wayan Parka, SH	II	9	Permohonan Perbaikan Balai Gong	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
18	I Wayan Parka, SH	II	10	Permohonan baleganjur	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
19	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	3	Mohon Bantuan Pembangunan Balai banjar adat Bekung	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
20	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	6	Mohon Bantuan Pengadaan seragam Sekeha Gong	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum
21	I Putu Suarjana, SS	III	5	Mohon bantuan Pengadaan Gong (Baleganjur)	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
22	I Putu Suarjana, SS	III	10	Bantuan Sound System untuk Sekaa Truna Truni	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
23	I Nyoman Rena, SP	IV	11	Mohon bantuan alat Gamelan Klentangan	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
24	I Nyoman Rena, SP	IV	13	Mohon barituan pengadaan pakaian sekeha gong	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
25	I Made Agus Kertiana, SH	IV	1	Perehaban Balai Banjar	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
26	I Made Agus Kertiana, SH	IV	31	Pengadaan Angklung	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
27	I Gede Parwata,	V	13	Pemasangan Keramik dan Finising Balai Banjar	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
28	I Gede Parwata,	V	14	Pengadaan Angklung atau gender	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum
29	I Gede Parwata,	V	16	Dari Karang Taruna dimohon agar ada Pelatihan-Pelatihan untuk meningkatkan SDM Setempat	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
30	I Nengah Songkob, SP	V	6 Perehaban Penyengker Balai Banjar Dinas Tegal Sari.	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
31	I Nengah Songkob, SP	V	13 Wantilan di Pura Puseh Padang Kelod.	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
32	I Wayan Dikep, SH	V	12 Angklung.	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
33	I Wayan Dikep, SH	V	15 Gong Barungan.	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
34	I Komang Sartika	V	1 Pembangunan Balai Banjar Beluhu Perataan Halaman, Pembangunan Depur dan Toilet	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
35	Drs. I Ketut Mangku	V	13 Bantuan Gambelan untuk Genjek Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Bertabalan Hukum
36	Drs. I Ketut Mangku	V	16 Balai Banjar untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
37	Drs. I Ketut Mangku	V	17 Balai Kulkul untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
38	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	11 Permohonan Rehab / nyervis gamelan angklung	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
39	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	14 Permohonan Bangunan untuk penyimpanan angklung	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
40	I Wayan Geden	VI	14	Mohon Bantuan untuk memberikan kesejahteraan (Insentif) dan sepeda motor kepada kelian banjar adat yang ada di Desa Nawakerti	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang Berbadan Hukum	
41	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	1	Mohon Bantuan Dana untuk melengkapi alat gerak	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang	
42	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	3	Mohon Bantuan Gong satu barung untuk kegiatan anak dalam rangka melestarikan budaya bali	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang	
43	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	4	Mohon Bantuan Dana untuk pembelian reong (gong) agar alat - alat yang ada lengkap (Baleganjuran)	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang	
44	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	5	Mohon Bantuan untuk seragam kepada Sekaa Gong Arsa Suara Desa Purwakerti	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang	
45	I Nyoman Winata, SH,MH	I	10	Bantuan Dana untuk STT Eka Prana Bina Marga Desa Adat Perasi Kec.Karangasem	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
46	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	1	Pemohonan Bantuan baju untuk STT Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
47	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	2	Pemohonan Bantuan Sound Sistem untuk STT Taruna Taruni Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
48	I Ketut Badra, S.Pd.SD	I	3	Bantuan Dana untuk STT Taruna Taruni Tattwamasi Persada Jagatdita Br. Kaler	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	
49	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	4	Usulan Pakelan Seragam untuk Sekce Gong Isti, Ds. Perlina Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang	
50	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	5	Usulan Dana Pembinaan untuk Sekce Gong Isti Harini Astiha, Ds. Perlina Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
51	I Wayan Budi, SH	I	19 Perumahan Rehat Bangunan banjar dewamas	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
52	I Made Wirta, SE	II	11 Baleganjur di Pura Arya Kula Waringin Bungaya	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
53	I Made Wirta, SE	II	19 Pengadaan Gong untuk Deha & Teruna Desa Adat Bungaya	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
54	I Made Wirta, SE	II	25 Pakaian Seragam STT	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
55	Haji Marjuhin, SH	II	5 mohon bantuan alat musik Qasidah dan pakaian untuk majelis takim banjar Dinas Lebah Sari	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
56	Haji Marjuhin, SH	II	9 mohon bantuan pengadaan toropi Kesenian Jidur	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
57	Haji Marjuhin, SH	II	8 mohon renovasi lantai dan plafon pada balai banjar Dinas Lebah Sari	DPMD	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
58	I Wayan Parka, SH	II	5 Perbaikan Bangunan di Pura Wates Tihingan	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
59	I Wayan Parka, SH	II	8 Usulan bantuan Balai Gong di Pura Segee Banjar Adat Tihingan	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
60	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	1 Mohon bantuan Pembangunan Balai Masyarakat di Banjar Pangri Tebel Desa Antiga Kelod	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
61	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	7 Mohon bantuan Perbaikan Balai Pertemuan di Banjar Pangri Tebel Desa Antiga Kelod	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
62	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	19 Mohon bantuan Pembangunan Balai Masyarakat di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
63	I Wayan Suastika, ST	IV	9 Bantuan Pakaian Seragam Sekeha Gong di Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Babakan, Desa Pening Sari	Disbut	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
64	I Wayan Suastika, ST	IV	13 Rehab Balai Banjar Batu Gede, Desa Duda Timur	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
65	I Nyomati Rena, SP	IV	5 Mohon bantuan Pengadaan seperangkat Gong untuk Banjar Dinas Waringin Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Disbut	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
66	I Nyoman Rena, SP	IV	13 Mohon bantuan seragam Sekeha Gong Wanita Werdi Kencaha Desa Nongan	Disbut	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
67	I Made Agus Kertiana, SH	IV	2 Rehab Banjar di Br. Baler Pasar	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
68	I Made Agus Kertiana, SH	IV	8 Balai Banjar Baler Pasar di Renovasi	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
69	I Made Agus Kertiana, SH	IV	9 Pembinaan Kesemian Dana Pertukaan Sarana Prasarana dan Pakaian	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
70	I Made Agus Kertiana, SH	IV	16 Pembangunan Banjar Adat Langsung (Pengadaan Bansos)	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
71	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	5 Mohon Rehab banjar Adat, Desa Duda, Kecamatan Selat	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
72	NI Putu Sriani	IV	7 Perangkat Gambelan Bale Banjar Desa Besakih Kecamatan Rendang	Disbut	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
73	I Wayan Suparta, SE	IV	2 Usulan Perbaikan Banjar Janglap	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
74	I Nengah Songkrob, SP	V	10 Paping Pekarangan Balai Banjar Adat Telaga Arum, Desa Adat Tanyar, Kecamatan Kubu	Disbut	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
75	I Wayan Dikep, SH	V	18 Perbaikan Bangunan Banjar Dinas Batudawa Kaja	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
76	I Nengah Rinten, S.Pd.SD	V	7 BKK untuk Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu	Disbud	Tidak dimengerti
77	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	13 Penataan bale banjar jahel	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
78	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	21 Pembangunan balai banjar bhwana kusuma	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
79	Drs. I Ketut Mangku	V	10 Pengadaan Tempat Pertemuan di Banjar Adat Kutuh Punggul	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
80	I Ketut Suardana	VI	7 Mohon Bantuan Koslim STT untuk Sekha Truna Truni Dharma Shanti, Kecamatan Abang	Disbud	Tidak terakomodasi karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Dinas Kebudayaan
81	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	9 Seperangkat Gong /Bleganjur untuk Dadia Maha Gotra Pasek Triste Kecamatan Abang	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang
82	I Nyoman Karfa Arianta, SH	VI	5 Permotohan bantuan Bale Cong untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	Disbud	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang Diberikan Pada Organisasi yang

NB Usulan pengadaan sarana ke Desa Adat (pembangunan pura, pengadaan gong, dll) dimungkinkan melalui mekanisme BKK kepada Desa Adat

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Karangasem,



Drs. I Putu Arnawa, S.Ag., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630805 198312 1 002

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	
				PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Gusli Ngurah Gede Subagiarta	I	5 Usulan Bantuan Sound System untuk Ibu PKK	DPMD	Tidak dapat direkomendasi karena dibatasi oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang diberikan pada Organisasi yang berbadan hukum
2	I Putu Suarjana, SS	III	4 Mohon Pembiayaan Baju untuk Ibu-ibu PKK	DPMD	Tidak dapat direkomendasi karena dibatasi oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang diberikan pada Organisasi yang berbadan hukum
3	I Made Agus Kertiana, SH	IV	18 Usulan Pakaian untuk PKK	DPMD	Tidak dapat direkomendasi karena dibatasi oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang diberikan pada Organisasi yang berbadan hukum
4	I Kelut Suardana	VI	5 Posyandu	DPMD	Sudah terakomodasi pada program peningkatan kualitas kader posyandu dalam kegiatan pembinaan kelompok/kelembagaan posyandu pada renja Dinas PMD Tahun 2021 di 8 Kecamatan se- Kabupaten Karangasem volume kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
5	I Wayan Budi, SH	I	29 Mohon diperbaiki tentang usulan pemekaran desa menjadi kedesasaan	DPMD	Untuk usulan pemekaran akan dikaji dan diproses sesuai ketentuan yang bertakhsulan pemekaran menjadi desa
6	Haji Marjuhin, SH	II	8 Mohon renovasi lantai dan plafon pada balai banjar Dinas Lobah Sari	DPMD	Menjadi Kewenangan Desa
7	I Gede Agung Puspada, SH	III	1 Mohon Bantuan Peningkatan SDM PKK untuk banjar Adat Pande Batur	DPMD	Menjadi Kewenangan Desa
8	I Made Agus Kertiana, SH	IV	19 Pengadaan Seragam PKK untuk Banjar Langsal, Desa Adat Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	DPMD	Tidak dapat direkomendasi karena dibatasi oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Hibah Barang diberikan pada Organisasi yang berbadan hukum

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
 Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



I Wayan Ardiha, M.Si
 Pembina Utama Muda

NIP. 19691011 198903 1 003

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Kabupaten Karangasem,



Mengah Mindra, SE., MM
 Pembina Utama Muda

NIP. 19730319 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/524/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan surat Nomor : 005/32/Bappelitbangda/Setda tanggal 20 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Sekretaris DPRD, hadir sebagai peserta rapat Perangkat daerah sesuai undangan. Adapun hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Muryadi	Ka. Bappelitbangda	1.
2.	I Wayan Artha	Gubernur	2.
3.	I B B WIDIONTORA	Bappelitbangda / Sekban	3.
4.	Ket. Artha	Safpel PP / Sumprog	4.
5.	I Ghd Adi Agus	BPRAD	5.
6.	I Wayan Widana	DPA / Sekretaris	6.
7.	I Kom Daging	Diskominfo	7.
8.	I N. Sutirayasa	DPOPR / Kabis	8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nyoman Winata, SH,MH	1	5 Perumahan Drainase Dauh Pangkung	DPUPR	Lokasi tidak jelas
2	I Nyoman Winata, SH,MH	1	7 Normalisasi Sungai di Bangras	DPUPR	Merupakan normalisasi Tukad Bangbang, bisa diakomodir
3	I Wayan Pura Arnawa	1	3 Mothon Bantulan Sederan Jalan di Br.Dinas Batu Kori Desa Seraya Timur	DPUPR	Terkait kewenangan, perlu konfirmasi untuk memasibkan jalan dimaksud sudah tercantum dalam SK Jalan Kabupaten (Perlu konfirmasi lokasi)
4	I Made Juwita, SH	1	2 Perumahan Air bersih untuk Kelompok Cita Laksana Banjar Peninggaran Desa Seraya Tengah Kec. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Infrakatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
5	I Made Juwita, SH	1	4 Perbaikan Jalan Banjar suluban menuju banjar bungkulun	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
6	I Made Juwita, SH	1	5 Perbaikan Jalan banjar bungkulun menuju banjar gerobog	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
7	I Ketut Badra, S.Pd,SD	1	8 Perumahan Pengaspalan Jalan Katanganyar - Jumenang	DPUPR	Fisik direncanakan TA 2020 Karena direnasalisasi, akan diakomodir setelah tersedia anggaran.
8	I Ketut Badra, S.Pd,SD	1	9 Perumahan Bantulan Pipa Air Bersih dari Gunung Desa Bukit Tabuan ke Katanganyar	DPUPR	Sudah ada dalam infrakatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
9	I Ketut Badra, S.Pd,SD	1	10 Perumahan Pengaspalan Jalan dari peninggaran ke bukit labuan	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
10	I Komang Mustika Jaya, SE	1	1 Rehab Aspal ruas jalan dari Penunduhan menuju Pura Dalem sepanjang 1,5 km di Desa Bugbug Kec. Karangasem	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
11	I Komang Mustika Jaya, SE	1	2 Pembangunan sederhana dan got ruas jalan dari Penunduhan sampai Pura Dalem Desa Adat Bugbug kec. Karangasem	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
12	I Komang Mustika Jaya, SE	1	3 Betonisasi badan jalan dan pemasangan rambu ruas jalan Pura Pasujan Desa Adat Bugbug Kec. Karangasem	DPUPR	Pemeliharaan rutin jalan Kec. Karangasem untuk beton bahu jalan. Rambu jalan kewenangan Dishub
13	I Komang Mustika Jaya, SE	1	5 Perbaikan irigasi subak-subak yang ada di Desa Adat Bugbug	DPUPR	Yang bisa diakomodir adalah Subak Tegakin

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
14	I Komang Mustika Jaya, SE	I	8 Peningkatan ruas jalan dari Lumpadang menuju Bukit Bako Desa Adat Bugbug	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
15	I Kadek Weisya Kusmiadewi, SH, M.Kn	I	9 Usulan Air dari PDAM untuk masyarakat Dadia Dalam Segening, Ds. Bukit Karangasem, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, sesuai dengan ketersediaan anggaran
16	I Wayan Budi, SH	I	7 Mohon perbaikan ruas jalan selegenting (dari bingkai Autotama kepenumahan Nirmala Sari)	DPUPR	RJ Jasri-BTN Nirmasari (sesuai SK Jalan 2016), bisa diakomodir
17	I Wayan Budi, SH	I	8 Mohon perbaikan jalan pinggir pantai (ruas karena sering terendam banjir karena tidak ada saluran pembangunan)	DPUPR	RJ Jasri-Pantai Jasri, bisa diakomodir
18	I Wayan Budi, SH	I	10 Mohon perbaikan /Normalisasi saluran air (parit dijalan menuju pantai jasri (saluran mampet kalau hujan air meluap kejalan)	DPUPR	RJ Jasri-Pantai Jasri, bisa diakomodir
19	I Wayan Budi, SH	I	11 Mohon Barutuan Saluran air pembangunan di banjar kuluh di sekitar bawah lower	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
20	I Wayan Budi, SH	I	16 Mohon Betonisasi Jalan Menuju Pura Dadia Dama Astili	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
21	I Wayan Budi, SH	I	23 Perbaikan irigasi subak susuan-jasri	DPUPR	Bisa diakomodir
22	I Wayan Budi, SH	I	26 Perbaikan Got /saluran limbah di depan banjar Dewamas	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
23	I Made Wirta, SE	II	8 Peningkatan Jalan Melingkar Se Kedesaan Bungaya (Dari Dusun Subagan Menuju Dharma Karya)	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
24	I Made Wirta, SE	II	9 Peningkatan Jalan Bungaya Menuju Gumung	DPUPR	RJ Bungaya-Cumung
25	I Made Wirta, SE	II	10 Bantuan irigasi Subak Puseh	DPUPR	Bisa diakomodir
26	I Made Wirta, SE	II	13 Pengadaan Cutang Penampungan Air Di Wilayah Kecamatan Bebandem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
27	I Made Wirta, SE	II	20 Pisanisasi Kekeasaan Bungaya	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, pengelolaan Belum Jelas bila dikelola Bumdes perlu proposal Hibah
28	I Made Wirta, SE	II	21 Pisanisasi Se Kecamatan Bebandem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, pengelolaan Belum Jelas bila dikelola Bumdes perlu proposal Hibah
29	I Made Wirta, SE	II	27 Pembangunan Jalan Melingkar di Dusun Dukuh Kecamatan Bebandem	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
30	I Made Wirta, SE	II	28 Pembangunan Jalan Se Kecamatan Bebandem	DPUPR	Diakomodir melalui Pemeliharaan rutin jalan Kac Bebandem
31	I Made Wirta, SE	II	29 Pembangunan Jalan Tanah Aron Bebandem Menuju Abang	DPUPR	Diakomodir, masuk pada R/ Abang-Tanah Aron

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH	
				PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
32	I Made Wirta, SE	II	Peningkatan Jalan Irigasi Subak Pandusan	DPUPR	Jalan usaha lain, merupakan Kewenangan Desa
33	I Made Wirta, SE	II	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Den Umah Tempok Sengkawan	DPUPR	Bisa diakomodir
34	I Made Wirta, SE	II	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Tempajang	DPUPR	Merupakan bagian dari D.I. Yeh Sayang, bisa diakomodir
35	I Made Wirta, SE	II	Pembangunan Jalan Subak Menuju Balai Subak Pandusan	DPUPR	Jalan usaha lain, merupakan Kewenangan Desa
36	I Made Wirta, SE	II	Perbaikan Jalan Prapit Abian Menuju Desa Bungaya	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
37	I Made Wirta, SE	II	Peningkatan Jalan Di Wilayah Kecamatan Bebandem	DPUPR	Pemeliharaan rutin jalan Kec. Bebandem
38	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan Ruas jalan Ligungdi – Gunung Sari (1,5 km)	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
39	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Pengaspalan Jalan Bebandem – Pakel	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
40	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Pemeliharaan Jalan Bebandem – Pakel (Saluran Air)	DPUPR	Diakomodir melalui Pemeliharaan rutin jalan Kec. Bebandem
41	I Nengah Sumardi, SE.M.Si	II	Usulan Pengamanan Mata Air Desa (SPAM) Desa di Pura Beji Sidam Sibetan, Desa Sibetan	DPUPR	Untuk Pengamanan Mata Air sudah dilaksanakan fisik tahun 2016, tinggal melanjutkan ke tahap distribusi menunggu ketersediaan dana (belum masuk indikasi)
42	I Ketut Susinta	II	Permohonan Air Bersih di Dada Merajan Nangka Desa Adat Nangka	DPUPR	Sudah ada dalam Indikasi 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
43	I Ketut Susinta	II	Permohonan Air Bersih di Pemaksan Aji Tegal Bongkak	DPUPR	Sudah ada dalam Indikasi 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
44	Haji Marjuhin, SH	II	1. mohon pembuatan jalan di perbatasan Bungaya-Asak sepanjang 700 meter	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
45	Haji Marjuhin, SH	II	2. mohon bantuan pavingisasi jalan dari banjar kebah sari menuju sungai setempat	DPUPR	Bukan kewenangan DPUPR
46	Haji Marjuhin, SH	II	13. mohon perbaikan jalan dari Abian Soan menuju Musholla Ar Rahiman Banjar dinas Kecicang Islam	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
47	Haji Marjuhin, SH	II	17. mohon pemertanian jalan menuju kuburan Banjar Dinas Kecicang Islam	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
48	I Wayan Parka, SH	II	1. Memperbaiki jalan Aspal dari banjar Dinas Dukuh menuju banjar Dinas Tihingan Kangin sepanjang 2,5 km	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi

NO	NAMA	DAJIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
49	I Wayan Parika, SH	II	Mohon bantuan irigasi di Subak Gantalan II	DPUPR	Bisa diakomodir
50	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Pangji Tebel Desa Antiga Kelod	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
51	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pembangunan Jembatan di Banjar Pangji Tebel Desa Antiga Kelod	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
52	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pemugaran Senderan Sungai di Banjar Pangji Tebel Desa Antiga Kelod	DPUPR	Tempek Dan Umah D.I Nagasungsang, bisa diakomodir
53	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Karangasem Desa Sengkidu	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
54	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pembukaan Jalan di Banjar Karangasem Desa Sengkidu	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
55	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Pembuatan Got di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
56	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan Senderan Sungai di Banjar Karanganyar Desa Nyuh Tebel	DPUPR	Tukad Berwatan, bisa diakomodir
57	I Nyoman Sumadi, SE	III	Mohon Bantuan aspal Jalan Agli Yeh Menuju Buntan	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
58	I Nyoman Sumadi, SE	III	Mohon Bantuan aspal Jalan dari Pura Jati Tembus Pura Taman sari Kelug Antiga	DPUPR	Bisa diakomodir pada RJ Ketug-Pt. Jati
59	I Nyoman Sumadi, SE	III	Pengadaan Cubang Air /Reservoir di Br.Dimas Gegelang	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
60	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Mohon bantuan perbaikan jalan dari banjar Belong menuju Pura Pusah	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
61	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Mohon perbaikan Jembatan dari Banjar Belong menuju Banjar Yeh Poh	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
62	Ir. I Wayan Tama, SH, MH	III	Normalisasi Trotoar sekitar Pertamina menuju Pantai labuhan	DPUPR	Diakomodir dalam renja sesuai ketersediaan dana, Masuk RJ Labuhan-Labuhan Amuk
63	I Pulu Suarjana, SS	III	Penambahan Sumber Air Bersih di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
64	I Pulu Suarjana, SS	III	Pemohonan Pompa listrik (Kincir Air) di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
65	I Pulu Suarjana, SS	III	Penyederhanan dan Irigasi Pura Dalom di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	DPUPR	Tempek Dan Umah D.I Nagasungsang, bisa diakomodir

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
66	I Gede Agung Puspada, SH	III	3	Mohon dibuka jalan melingkar dari dusun Belong ke Dusun Pamde Kedesaan Manggis	DPUPR		Untuk dipenuhi syarat teknis, penyerahan aset badan jalan
67	I Gede Agung Puspada, SH	III	5	Mohon Bantuan pembuatan jembatan untuk fasilitas mesucian Ida Botara Puseh Desa Adat Manggis	DPUPR		Didorong melalui Dana Desa
68	I Gede Agung Puspada, SH	III	6	Mohon bantuan jalan lingkar Dusun Bukit Batu-Desa Selumbung-Sig-Desa Manggis	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
69	I Wayan Suastika, ST	IV	2	Peningkatan Jalan Wates lengah patah 3 KM	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
70	I Wayan Suastika, ST	IV	8	Mohon Bantuan Irigasi di Dada Tangkas Kori Agung, Br. Bobakan, Desa Peningasan	DPUPR		Lokasi tidak diformulasikan (disebutkan Terpeki/Subak/DI)
71	I Wayan Suastika, ST	IV	10	Pemeliharaan Jalan Babakan Lusu 2 KM	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
72	I Wayan Suastika, ST	IV	11	Peningkatan Jalan Pesangkan Antiga 5 KM	DPUPR		Perencanaan TA 2020. Karena dirasionalisasi, akan diakomodir setelah tersedia anggaran.
73	I Wayan Suastika, ST	IV	16	Pemeliharaan Jalan Talberg Dobyeh Kangih 3 KM	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
74	I Wayan Sumatra, ST	IV	4	Bantuan Pemeliharaan Jalan Br. Dukuh Ogang, Desa Sangkim Gunung, Kec. Sidaman	DPUPR		RJ Gilgit-Ogang. DAK 2020 ditangguhkan. Menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kementerian PUPR.
75	I Nyoman Rena, SP	IV	8	Mohon bantuan rabat pinggir aspal jalan sekitar Kantor Perbekel Nongan	DPUPR		Merupakan jalan nasional (kewenangan pusat)
76	I Nyoman Rena, SP	IV	11	Mohon bantuan hotmix jalan sekitar Perbekel Nongan	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
77	I Nyoman Rena, SP	IV	20	Mohon Bantuan Peningkatan jalan Pempatan ke Alas Ngandang	DPUPR		RJ Pempatan-Alas Ngandang
78	I Made Agus Kertiana, SH	IV	1	Jalan di Tinggahan wilayah Br. Baler Pasar kurang lebih 1 Km	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
79	I Made Agus Kertiana, SH	IV	5	Jalan Sutra Br. Adat Reritang + 2 Km dan Irigasi	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
80	I Made Agus Kertiana, SH	IV	11	Jalan Br. Langsat Perubahan status jalan dan pembangunan jalan	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
81	I Made Agus Kertiana, SH	IV	12	Irigasi di Jalan Br. Langsat	DPUPR		Termasuk wilayah D.I. Aica yang merupakan kewenangan Pusat
82	I Made Agus Kertiana, SH	IV	14	Pembangunan di Yeh Sali dan Pembangunan Jalan Irigasi	DPUPR		Lokasi tidak jelas
83	I Made Agus Kertiana, SH	IV	15	Pengalangan Pijit disubstitusi PDAM di Br. Langsat	DPUPR		Sudah ada dalam Indikator 2021, Anggaran belum mencukupi
84	I Made Agus Kertiana, SH	IV	17	Pembangunan Jalan di Tanah Bita Br. Adat Langsat	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
85	I Made Agus Kertiana, SH	IV	18	Irigasi Subak Tanah Bita Br. Adat Langsat	DPUPR		Bisa diakomodir

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
86	I Kadek Sujanayasa, SH	IV	Bantuan Aspal Jalan Dan Pura Puseh Menuju Pesucian Betara Dalam Desa Adat Kebung	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
87	I Kadek Sujanayasa, SH	IV	Bantuan Aspal Jalan Menuju Pura Taman Gangsing	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
88	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Mohon Bantuan perbaikan saluran irigasi di subak Langon, Br. Dinas Babakan, Desa Peringsari	DPUPR		Bisa diakomodir
89	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Mohon peningkatan jalan lingkar Pesabon	DPUPR		Realisasi 2019, apakah ada ruas jalan yang belum terealisasi (perlu konfirmasi)
90	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Mohon peningkatan jalan Tegat Kauh, Tongala, Geriana Kangin	DPUPR		Diakomodir melalui RJ Duda-Griana Kangin
91	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Mohon Bantuan Pengaspalan jalan Gemana Kangin	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
92	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Mohon peningkatan jalan Tukad Sabuh - Yah Kori	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
93	I Ma Bagus Adnyana, SH	IV	Usulan Pengadaan Saluran untuk Got di Pura Dadya Pasak Getgel, Br. Ipah, Ds. Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
94	NI Putu Sriani	IV	Penyediaan Air Bersih (PAM) di Desa Adat Kesimpar, Desa Besakih, Kec. Rendang	DPUPR		Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencakupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
95	NI Putu Sriani	IV	Pembuatan Cubang Perampungan Air di Br. Dinas Temukus, Desa Besakih, Kec. Rendang	DPUPR		Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencakupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
96	NI Putu Sriani	IV	Aspal Jalan dari Kiduling Kreteg menuju Pura Pengubengan Desa Besakih	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
97	NI Putu Sriani	IV	Pengaspalan Jalan dari Pati Kala menuju Keboh Sepanjang 650 meter	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
98	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	Bantuan Aspal Jalan dan Menggal Lebung Menuju Desakih	DPUPR		Fisik direncanakan TA 2020. Karena dimisialisasi akan diakomodir setelah tersedia anggaran.
99	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	Pipanisasi di Pura Goa Besakih	DPUPR		Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencakupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
100	I Putu Eka Juliawan, SH	IV	Pembuatan Jalan Lingkungan Tebedan Kandik Desa Besakih, Kecamatan Rendang	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
101	I Wayan Suparta, SE	IV	Usulan Pengaspalan Jalan Ablan Carang	DPUPR		Perlu konfirmasi lokasi
102	I Weyan Suparta, SE	IV	Usulan Perbaikan Subak Tegat Kauh	DPUPR		Bisa diakomodir
103	I Wayan Suparta, SE	IV	Usulan Perbaikan Subak Klad	DPUPR		Bisa diakomodir

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
104	Wayan Suparta, SE	IV	9	Usulan Perbaikan Subak Desa Muncan	DPUPR	Kewenangan BWS	
105	Gede Parwata,	V	5	Jalan dari Depan LPD menuju Pantai	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
106	Gede Parwata,	V	7	Pembuatan Jalan Lingkar di Banjar Dinas Baluhu Kangin, Kecamatan Kubu	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
107	Gede Parwata,	V	9	Sonderan Ingrasi	DPUPR	Tidak Menyebutkan lokasi	
108	Gede Parwata,	V	11	Rabat Beton jalan	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
109	Gede Parwata,	V	19	Senderan	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
110	Gede Parwata,	V	23	Perbaikan jalan di Banjar Dinas Bahel	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
111	Nengah Songkob, SP	V	1	Pengadaan Air Bersih atau Sumur Bor untuk warga masyarakat Mekar Sari, Desa Trianyar, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
112	Nengah Songkob, SP	V	6	Pengadaan Air Bersih di Banjar Dinas Guana Pula, Desa Trianyar Barat, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
113	Nengah Songkob, SP	V	11	Air Bersih untuk Banjar Adat Telaga Arum, Desa Adat Trianyar, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
114	Nengah Songkob, SP	V	13	Sumur Bor di Barat Rumah Sakit agar bisa diatikan ke Balai Banjar Adat Telaga Arum	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
115	Nyoman Musna Antara, SH	V	1	Lanjutan Jalan Darmaji Menuju Pura Dukuh Desa Ban, Kec. Kubu	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
116	Nyoman Musna Antara, SH	V	2	Pemohonan Pipa Bansos Br. Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
117	Nyoman Musna Antara, SH	V	5	Lanjutan Jalan Temakung Br. Dinas Jatituhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu	DPUPR	Masuk dalam RJ Temakung-Jati Tuhu	
118	Nyoman Musna Antara, SH	V	9	Hotmix ruas jalan Celagi Trinyan 400M	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
119	Nyoman Musna Antara, SH	V	10	Hotmix ruas jalan Paleg kurang lebih 1 KM	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
120	Wayan Dikep, SH	V	8 Penggadaan Kamar Mandi dan Tower untuk Dadia Pasek Kayu Salem, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	DPUPR	Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah fokus pada penyediaan prasarana air limbah (IPAL atau Tangki Septick), Ketersediaan lahan, Kepemilikan aset setelah konstruksi harus jelas, dan kejelasan lokasi Kegiatan. Dana belum mencukupi tetapi sudah masuk dalam daftar tunggu 2021
121	Wayan Dikep, SH	V	9 Jalan ke Pura Penyimpanan mohon diperbaiki	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
122	Wayan Dikep, SH	V	11 Perbaikan Jalan Perigaan Embung Batudawa 1	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
123	Wayan Dikep, SH	V	12 Perbaikan Jalan Kelampauk	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
124	Wayan Dikep, SH	V	13 Peningkatan Jalan Batudawa-Pengeno	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
125	Wayan Dikep, SH	V	14 Pipanisasi Air Embung Batudawa 1 dan 2	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Pengelolaanya desa atau Kelompok Masyarakat dan perlu proposal hibah
126	Wayan Dikep, SH	V	15 Penggadaan Air Bersih untuk Banjar Dinas Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
127	Wayan Dikep, SH	V	22 Rabat Beton untuk Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	DPUPR	Menjadi Kewenangan Desa, didorong melalui Dana Desa
128	Nengah Rinton, S.Pd SD	V	2 Sumber Air yang ada di hulan biar bisa dikelola pemerintah sehingga berguna untuk masyarakat luas	DPUPR	Bukan kewenangan DPUPR (mohon diperjelas lokasi sumber air dimaksud)
129	Nengah Rinton, S.Pd SD	V	4 Cubang Penampung Air untuk Desa Adat Perasan, Kecamatan Kubu	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
130	Nengah Rinton, S.Pd SD	V	5 Normalisasi Sungai di Desa Adat Perasan	DPUPR	Bisa diakomodir
131	Nengah Rinton, S.Pd SD	V	6 Senderan di depan Balai Banjar	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
132	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	1 Kelanjutan pengaspalan jalan pura gunung san menuju ke Banjar Adat Bhuana Kusuma	DPLUPR	Perlu konfirmasi lokasi
133	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	2 Pembuatan embung dukuh	DPUPR	Bisa diakomodir
134	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	3 Pengaspalan jalan penelastian desa dukuh	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
135	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	8 Rabat beton jalan2 desa di Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Kewenangan Desa, Didorong melalui Dana Desa

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH	
					PENANGGUNG JAWAB		
136	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	9	Pembuatan sumur2 bor untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
137	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	10	Pengadaan cubang2 komunal untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
138	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	16	Pengadaan cubang komunal untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
139	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	17	Pembangunan embung di Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Bisa diakomodir	
140	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	19	Pengadaan sumur bor untuk masyarakat Banjar Dinas Bahel, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu	
141	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	20	Kelanjutan pengaspalan pura gunung sari melingkar ke bhuana kusuma	DPUPR	RJ Dukuh Gunung Sari-Bhuana Kusuma	
142	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	22	Pembangunan cubang2 komunal untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu	
143	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	24	Pengadaan embung di bhuana kusuma	DPUPR	Bisa diakomodir	
144	Putri Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	27	Pengadaan sumur bor untuk masyarakat Br. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
145	Drs. I Ketut Mangku	V	1	Penggotan Pura Candi Gora sepanjang 500 meter untuk Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
146	Drs. I Ketut Mangku	V	4	Pertbaikan jalan depan Candé Mas	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
147	Drs. I Ketut Mangku	V	6	Pengadaan Air Bersih di Banjar Adat Kutuh Punggul	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
148	Drs. I Ketut Mangku	V	7	Pengadaan Sumur Bor di Banjar Adat Kutuh Punggul	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah	
149	Drs. I Ketut Mangku	V	8	Pengadaan Jalan di Banjar Adat Kutuh Punggul	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	
150	Drs. I Ketut Mangku	V	11	Akses Jalan Dari Seitra menuju Bukit Manggun	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
151	Des. I Ketut Mangku	V	14	Pengadaan Air Bersih di banjar Adat Buluh Winangun	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
152	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	1	Infrastruktur Jalan	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
153	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	8	Pengaspalan jalan dari Desa Banyuning menuju Tukad base Br Dinas Bangle ± 7km	DPUPR	RJ Banyuning-Bangle
154	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	9	Pengaspalan jalan dari Purwakerti menuju Lingkungan Gilgit Banjar Dinas Gulinten Desa Bumutan, Kecamatan Abang	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
155	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	13	Pembangunan dan Rehab Jalan di Kecamatan Abang	DPUPR	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Abang
156	I Wayan Geden	VI	2	Perbaikan jalan Sadimara Bias (depan SD 4 Ababi)	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
157	I Wayan Geden	VI	5	Pengadaan Air Bersih (Perluasan Jaringan PDAM Bersubsidi ± 30 KK).	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
158	I Wayan Geden	VI	11	Drainase pada jalan di Br. Dinas Mega Telu, Desa Tista Kecamatan Abang.	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
159	I Ketut Suardana	VI	1	Jalan dari amod sangat sempit (Fasilitas) Kurang memadai.	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
160	I Ketut Suardana	VI	2	Mohon senderan tukad Lean - Tube	DPUPR	Bisa dilayani sepanjang ada Rekomendasi Teknis dari BWSBP, menyesuaikan kemampuan pendanaan
161	I Ketut Suardana	VI	8	Perbaikan Infrastruktur jalan Bumutan Gilgit Banjar Gulinten	DPUPR	Bisa diakomodir, masuk RJ Gulinten-Gilgit
162	I Ketut Suardana	VI	11	Mohon Senderan tukad dan pupuk	DPUPR	Untuk senderan sungai Bisa ditangani sepanjang ada Rekomendasi Teknis dari BWSBP, menyesuaikan kemampuan pendanaan, untuk pupuk menjadi kewenangan Dinas Pertanian
163	I Nyoman Mardana Wibawa, ST	VI	5	Perbaikan Jalan Longsor dari Segi Menuju bumutan	DPUPR	Bisa diakomodir, masuk RJ Bumutan-Cekik
164	I Nyoman Mardana Wibawa, ST	VI	6	Pengadaan Cubang/ tower dan mesin pompa air untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa sega	DPUPR	Sudah ada dalam Indikatif 2021, Anggaran belum mencukupi dan untuk Pengelolaan Non PDAM perlu proposal Hibah
165	I Made Donito Wijaya, SE	VI	1	Insasi di Subak Gunung Desa Ababi	DPUPR	Bisa diakomodir
166	I Made Dondo Wijaya, SE	VI	2	Usulan Trotoar di Desa Ababi 2 unit	DPUPR	Pemeliharaan Rutin Jalan Kec. Abang

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB		
167	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	7	Seluran Irigasi Di Subak Babakan di Dadia Maha Gotra Pasek Tista Kecamatan Abang	DPUPR	Lokasi tidak dilemukan
168	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	2	Senderan Jalan yang jebol dari Br Teluk menuju Permandian Angsoka	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
169	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	4	Fasilitas umum akses jalan di depan Pura Pemaksan Kayu Putih Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
170	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	7	Perbaikan Gorong - gorong Jalan di Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi
171	I Nyoman Karla Arianta, SH	VI	11	Perbaikan Jembatan untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	DPUPR	Perlu konfirmasi lokasi

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Sili Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ayofka, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198303 1 003

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Sutirtayasa, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199703 1 004

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Komang Mustika Jaya, SE	I	Permohonan Mohon hibah dari pemda Karangasem terkait keberadaan TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) di desa Bugbug untuk dipergunakan dalam pengelolaan sampah di desa Bugbug	DLH	Permohonan hibah dari Pemerintah daerah terkait TPST sudah difasilitasi dengan berkoordinasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan sudah beberapa kali dirapatkan dengan pihak desa
2	I Wayan Budi, SH	I	Mohon Bantuan Bak Sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
3	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	Mohon bantuan tempat sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
4	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah/ Penampungan Sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
5	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Pengadaan mobil/ Alat pengangkut sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
6	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	Usulan pengadaan tempat pembuangan sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
7	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	Usulan pengadaan tempat pembuangan sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
8	I Gede Parwata,	V	Pengadaan Tong sampah di seputaran jalan menuju Tulamben.	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
9	I Gede Parwata,	V	Pengadaan Kebun di seputaran jalan menuju Tulamben	DLH	Jika yang dimaksudkan adalah taman dimungkinkan masuk renja sepanjang menjadi kewenangan kabupaten
10	I Gede Parwata,	V	Pengadaan alat Angkut Sampah.	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
11	I Wayan Geden	VI	Permohonan Truk Pengangkut sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
12	I Wayan Budi, SH	I	Mohon pembersih dan atau pangsangutan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah di jalan sekeping oleh pihak terkait	DLH	Sudah dilakukan pelayanan pada lokasi dimaksud.
13	I Wayan Budi, SH	I	Mohon pemindahan tempat pembuangan sampah di samping lapangan volley patung salak dan pembuatan tempat pembuangan sampah baru di sebelah barat bengkel Autotama	DLH	Diakomodir, untuk ditindaklanjuti

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
					Diakomodir, sesuai dengan ketersediaan anggaran
14	I Wayan Budi, SH	I	22 Perumahan pemangkas pohon-pohon yang terlalu rindang di seputaran jalan raya jasi	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
15	I Made Wirta, SE	II	17 Peningkatan Sarana Mobil Sampah	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
16	I Made Wirta, SE	II	18 Perumahan Tempat Sampah di Desa Adat Gumung Kec.Manggis	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
17	I Putu Suarjana, SS	III	3 Perumahan Mesin Pemotong Rumput di Desa Adat Gumung DLH Kec.Manggis	DLH	Didorong melalui Dana Desa
18	I Putu Suarjana, SS	III	7 Pengadaan Sepeda Motor Viar di Desa Adat Tenganan Daah Tukad Kec.Manggis	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
19	I Putu Suarjana, SS	III	11 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Pura Dadia Tangkas Kori Agung, Br. Susut, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
20	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	1 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Pura Merajan Alit Arya Wang Bang Sidemen, Br. Benekasa, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
21	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	3 Usulan Pengadaan Bak Sampah untuk Balai Banjar Adat Kalot, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
22	Ida Bagus Adnyana, SH	IV	5 Sarana Transportasi pemungut sampah masih kurang	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.
23	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	13	DLH	Dimungkinkan masuk renja sesuai dengan kemampuan pendanaan.

NIB Pengadaan sarana prasarana persampahan baik untuk Desa Adat maupun Desa Dinas dimungkinkan melalui mekanisme BKK

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

A.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karangasem,



I Wayan Widana, S.Sos
Pembina

NIP. 19661215 199703 1 013

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	Haji Marjuhin, SH	II	14 Agar ditertibkan bagi warga yang menggunakan lahan gang untuk tangga masuk rumah warga	Sat Pol PP	Sudah terakomodir pada Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem Tahun 2021

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19691102 199003 1 005

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Kadek Sujanayasa,SH	IV	6 Bantuan Blank Sport, Telkom/Tower (2) Desa Adat Kebung, Telaga Tawang, Kec. Sidemen	Diskominfo	Pembangunan tower/menara telekomunikasi dilakukan oleh pihak ketiga (pengusaha telekomunikasi) dan bukan dibangun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pihak Diskominfo akan menawarkan kepada pihak investor agar mau berinvestasi membangun tower telekomunikasi di daerah blankspot dimaksud. Tentunya pihak investor juga akan mempertimbangkan aspek bisnis dalam berinvestasi. Dapat kami sampaikan bahwa di Kecamatan Sidemen saat ini sudah terbangun 7 buah tower/menara telekomunikasi milik para telco operator (pengusaha telekomunikasi). Mengenai blankspot, hal ini bisa terjadi karena topografi/kontur wilayah yang berbukit-bukit.
2	I Kadek Sujanayasa,SH	IV	7 Bantuan Indihome Desa Adat Kebung, Telaga Tawang, Kec. Sidemen	Diskominfo	Bahwa IndiHome merupakan jaringan koneksi internet berbayar milik PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Dan untuk pemasangannya dapat dilakukan dengan pembiayaan langsung secara pribadi (mandiri) ke PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2020 ada kebijakan provinsi melalui BKK berupa pengadaan jaringan internet di Desa Adat, Puskesmas dan ODTW dengan program Free Wifi melalui BSI. Untuk kelanjutan pelaksanaan BKK BSI (free WIFI) TA. 2020, kami masih dalam tahap melakukan survey ke titik-titik pemasangan akses point untuk ditawarkan pada penyedia yang baru.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
 Pembina
 NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Karangasem,



I Komang Daging, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651023 198602 1 002

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Nengah Rinten, S.Pd.SD	V	2 BKK dari Kabupaten.	BPKAD	BKK yang diusulkan belum jelas, BKK dimungkinkan difasilitasi mengikuti mekanisme sesuai ketentuan.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,

Drs. J Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 148903 1 003



Dr. Erade Sujana Erawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198603 1 3712



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/521/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan surat Nomor : 005/32/Bappelitbangda/Setda tanggal 20 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Sekretaris DPRD, hadir sebagai peserta rapat Perangkat daerah sesuai undangan. Adapun hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Mulya	Ka. Bappelitbangda	1.
2.	IBB WIDADWARA	Bappelitbangda/Sebidan	2.
3.			3.
4.	Suastinungud	Kadi Libyep	4.
5.	IPUTU SUTHA ANTARA	D. PERTANIAN	5.
6.	Arysura Umefun	D. Perikanan	6.
7.	Goedo Hwanda Sepura	Dinas Pariwisata	7.
8.	Mi M Budi Wafini	Dinas Kesehatan	8.
9.	I Gusti Bayu Sunirka	Dinas Ketenagakerjaan	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	Kadek Weisya Kusniadewi, SH.,M.Kn	I	4 Usulan Jaminan Kesehatan	Diskes	Kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah kewenangan Dinas Sosial
2	Haji Marjuhun, SH	II	12 Mohon bantuan pengadaan mobil ambulance	Diskes	Pelayanan kegawat darurat sudah dilaksanakan oleh PSC dan 12 Puskesmas dan semua Puskesmas sudah memiliki ambulance
3	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	11 Mohon Bantuan Fogging	Diskes	Dilema (masuk dalam renja) jika kasus sesuai dengan ketentuan dalam prolap penangan DED
4	I Wayan Sunarta, S.Pt	III	15 Dimohon agar iuran BPJS untuk kelas III agar tidak ada kenaikan	Diskes	Kewenangan Pemerintah Pusat mengacu Perpres 64 Tahun 2020
5	I Komang Dwi Purwa Adi Susita	VI	6 Permohonan Mobil Ambulance untuk di Puskesmas Tista	Diskes	Pelayanan ambulance untuk wilayah Tista dilaksanakan oleh Puskesmas Albang I
6	Haji Marjuhun, SH	II	15 mohon bantuan pengadaan Mobil Ambulance	Diskes	Pelayanan kegawat darurat sudah dilaksanakan oleh PSC dan 12 Puskesmas dan semua Puskesmas sudah memiliki ambulance
7	I Nyoman Rena,SP	IV	12 Mohon bantuan pengobatan gratis untuk warga Nongan	Diskes	masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan dapat menggunakan program uhc dengan mendallarkan kepesertaan di dinas sosial dan tempat pelayanan sudah tersedia sampai di tingkat desa yaitu di pustu nongan
8	I Made Agus Kertiana, SH	IV	3 Pengadaan Airbulance di Banjar Rendang Kelod	Diskes	Pelayanan kegawat darurat sudah dilaksanakan oleh PSC dan 12 Puskesmas dan semua Puskesmas sudah memiliki ambulance

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
9	I Nengah Songkob, SP	V	14 Jalan ke Rumah Sakit dan Perbaikan SENDERAN	Diskes	untuk senderan di RS Pratama masuk dalam rencana 2021, Jalan menuju RS Pratama kewenangan Dinas PUPR

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si

Drs. I Wayan Ardika, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem,



HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB	DAERAH	
1	Nyoman Winata, SH,MH	I	1 Permohonan Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Dinas Pertanian	1. Bantuan tidak dapat dilakukan melalui anggaran APBD karena terkait UU 23 tahun 2014, bantuan hanya dapat diberikan pada kelompok/subak yang telah berbadan hukum Indonesia.	
2	Nengah Suparta, SH,MAP	I	5 Mohon bantuan kepada Kelompok Tani Ternak Babi Duku Mekar Sari	Dinas Pertanian	2. Bantuan melalui anggaran APBD hanya dapat diberikan berupa demplot, pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.	
3	Made Juwita, SH	I	5 Permohonan Bibit Babi	Dinas Pertanian	3. Bantuan dapat diberikan melalui anggaran APBN dengan mekanisme :	
4	Made Juwita, SH	I	7 Permohonan pakan ternak	Dinas Pertanian	- Usulan diajukan berupa proposal ke Kabupaten yang akan dirput melalui sistem eproposal.	
5	Made Juwita, SH	I	8 Permohonan Pupuk	Dinas Pertanian	- Calon petani dan calon lokasi penerima manfaat harus jelas.	
6	Made Juwita, SH	I	10 Permohonan Bibit Jagung	Dinas Pertanian	- Kelompok/Subak telah terdaftar di Simluhan.	
7	Komang Mustika Jaya, SE	I	8 Permohonan Pembangunan jalan usaha tani di wilayah subak di desa Bugbug	Dinas Pertanian		
8	Made Wirta, SE	II	10 Pembangunan Jalan Usaha Tani /Jalan Subak Sengkawan ,Tempok Pandusan, Dusun Desa ,Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem.	Dinas Pertanian		
9	Made Wirta, SE	II	12 Pembangunan Jalan Usaha Tani /Jalan Subak Wates Tempajang, Dusun Desa ,Desa Bungaya , Kec. Bebandem, Kab. Karangsem	Dinas Pertanian		
10	Made Wirta, SE	II	13 Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Subak Menuju Balai Subak Den Umah Tempek Sengkawan	Dinas Pertanian		
11	Wayan Sumatra, ST	IV	8 Bantuan Peralatan Kerja untuk pertanian dan pertukangan	Pertanian dan Disnaker		
12	Nyoman Rena, SP	IV	6 Mohon bantuan untuk peningkatan bangunan Bale Pertemuan Tempek Baler Jobag	Dinas Pertanian		
13	Nyoman Rena, SP	IV	15 Mohon bantuan modal usaha untuk Kelompok Tani Tunas Rahayu	Dinas Pertanian		

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB	DAERAH	
14	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon perbaikan balai kelompok Tunas Rahayu	Dinas Pertanian		
15	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon bantuan mesin jahit untuk anggota Kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu	Perfarian dan Disnaker		
16	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon bantuan seperangkat alat memasak untuk anggota kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu	Dinas Pertanian		
17	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon bantuan bibit babi untuk anggota kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu	Dinas Pertanian		
18	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Pembangunan jalan Subak/ Jalan pertanian	Dinas Pertanian		
19	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Rabat Beton di Jalan Persawahan Kalimata	Dinas Pertanian		
20	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	Usulan Bantuan Alat - Alat Pertanian (Traktor dan Mesin Perontok) untuk anggota subak Langan Babakan.	Dinas Pertanian		
21	I Gusti Agung Dwi Putra, ST	IV	Usulan bantuan Sapi	Dinas Pertanian		
22	I Gede Parwata,	V	Pengadaan Traktor untuk mengelola Tanah di musim hujan.	Dinas Pertanian		
23	I Gede Parwata,	V	Pengadaan Traktor	Dinas Pertanian		
24	I Mengah Songkob, SP	V	Pupuk Subsidi dan Bibit Jagung untuk Subak Tirta Pertiwi.	Dinas Pertanian		
25	I Mengah Songkob, SP	V	Traktor untuk Bejak Sawah.	Dinas Pertanian		
26	I Wayan Dikep, SH	V	Traktor.	Dinas Pertanian		
27	I Komang Sartika	V	Traktor untuk Petani/Kelompok Tani.	Dinas Pertanian		
28	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pembangunan Kelompok Tani Pagoan Sekaa	Dinas Pertanian		
29	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pengadaan Bibit Sapi	Dinas Pertanian		
30	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pengadaan bibit pohon kelapa jati	Dinas Pertanian		
31	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pembangunan Balai Kelompok Tani dan Suka Duka sedesa Dukuh	Dinas Pertanian		
32	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pengadaan Bibit sapi unggul	Dinas Pertanian		
33	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	Pengadaan bibit kelapa atau pohon jati	Dinas Pertanian		
34	Drs. I Ketut Mangku	V	Traktor untuk Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.	Dinas Pertanian		
35	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	Mohon Bantuan kelompok peternakan babi se - Kecamatan Abang	Dinas Pertanian		

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
				PENANGGUNG JAWAB	DAERAH	
36	I Nyoman Mardana Winbawa, ST	VI	12	Perbaikan jalan usaha tani subak kebon agung	Dinas Pertanian	
37	I Nyoman Winata, SH.MH	I	1	Pemohonan Bantuan Traktor untuk Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Dsn. Dauh Pangkung Seraya Barat Kec. Karangasem	Pertanian	
38	I Made Juwita, SH	I	6	Mohon bantuan Traktor pada kelompok pertanian di Kelompok Bakti Segara Br. Suluban Desa Seraya Barat Kec. Karangasem	Pertanian	
39	I Komang Mustika Jaya, SE	I	4	Pembangunan Jalan usaha tani wilayah subak-subak desa Adat Bugbug Kec. Karangasem	Pertanian	
40	I Wayan Budi, SH	I	5	Mohon Bantuan Pembentukan dan Pemmodalan untuk usaha kelompok masyarakat kelompok ternak babi, sapi dan kelompok usaha lainnya	Pertanian	
41	I Mengah Sumardi, SE.M.Si	II	7	Usulan Penataan Agrowisata di Br. Dukuh, Desa Adat Sibetan	Pertanian	
42	I Wayan Parka, SH	II	2	Usulan Bibit Babi untuk Kelompok Wanita Maju Jaya Thingan Kangin sebanyak 80 ekor	Pertanian	
43	I Wayan Parka, SH	II	3	bantuan Bibit Kelapa sebanyak 2000 biji	Pertanian	
44	I Wayan Parka, SH	II	4	Usulan Dibit Panili sebanyak 1000 stek	Pertanian	
45	I Nyoman Rena, SP	IV	17	Mohon bantuan pengadaan bibit ternak babi dan sapi untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang	Pertanian	
46	I Nyoman Rena, SP	IV	18	Mohon bantuan pakaian seragam kelompok untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang	Pertanian	
47	I Nyoman Rena, SP	IV	19	Mohon bantuan pengadaan bibit kayu sengon, bibit Alpukat dan Durian untuk Kelompok Tani Ternak Upasana Desa Pempatan Kec. Rendang	Pertanian	
48	I Nyoman Rena, SP	IV	21	Mohon bantuan Bibit Sapi untuk Kelompok Tani (Gapoktan) Arta Sedana Desa Pempatan Kec. Rendang	Pertanian	
49	I Nyoman Rena, SP	IV	22	Mohon bantuan Bibit Pohon Sengon, Durian dan Alpukat untuk Kelompok Tani (Gapoktan) Arta Sedana Desa Pempatan Kec. Rendang	Pertanian	
50	I Gusti Lanang Agung Ariawan, SE	IV	3	Mohon Bantuan Traktor di Subak Umacetra Tempek Tukad Barak, Desa Peringsari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	Pertanian	
51	I Pitu Eka Juliawan, SH	IV	4	Pembuatan Balai Kelompok Tani Sari Mumi (1 Unit) di Pura Gae, Desa Besakih, Kec. Rendang	Pertanian	

NO	NAMA	DAPIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN		PERANGKAT DAERAH		TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
					PENANGGUNG JAWAB		
53	I Gede Parwata,	V	13	Perehaban Bangunan Balai Kelompok Tani Ternak Pekarangan	Pertanian		
54	I Nyoman Musna Antara, SH	V	11	Pemohonan Traktor bagi petani Br. Dinas Dalam, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	Pertanian		
55	I Wayan Dikep, SH	V	3	Bantuan Pupuk Pertanian untuk Dadia Pasek Perleka, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Pertanian		
56	I Wayan Dikep, SH	V	4	Bantuan Sapi untuk Kelompok Ternak untuk Dadia Pasek Perleka, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Pertanian		
57	I Wayan Dikep, SH	V	21	Bantuan Bale Pesangkepan/Perkemian untuk Kelompok Tani Eka Karya Bejug, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	Pertanian		
58	I Nengah Rinten, S.Pd,SD	V	1	Pembangunan Jalan di jalur Subak Timpuan	Pertanian		
59	Putu Deni Suryawan Giri, S.Sos	V	7	Pembangunan balai2 kelompok tani ternak untuk masyarakat Banjar Adat Dukuh, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pertanian		
60	I Komang Dwi Purwa Adi Susila	VI	4	Mohon bantuan traktor (Mesin pembajak) di Kecamatan Abang	Pertanian		
61	I Nyoman Karta Arianta, SH	VI	9	Perhatian terhadap kelompok Nelayan, Garam, Kelompok Ternak untuk Banjar Adat Lebah, Kecamatan Abang	Pertanian		

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT

Pembina

NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si

Pembina Utanra Muda

NIP. 19691012 198903 1 003

an. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem

Sekretaris,



Ir. I Putu Sutha Antara

Pembina Tk. I

NIP. 19641120 199203 1 006

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPIL	NO	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
32	I Nengah Songkob, SP	V	5	Modal untuk UMK di KSPP Mekar Sari, Desa Triaryar, Kecamatan Kubu	Koperasi	Kelompok Simpan Pinjam dapat ditingkatkan menjadi koperasi simpan pinjam, terkait permodalan untuk dipujuk dari masing-masing anggota.
1	I Nyoman Winata, SH, MH	I	10	Pemohonan Penambahan Modal Koperasi	Dinas Koperasi	Tidak bisa masuk Renja, siap untuk difasilitasi ke Pusat (Lembaga Pengketa Dana Bergulir)
13	Haji Majuhin, SH	II	7	Agar dibentuk Lembaga Perkreditan Khusus untuk menangkal masuknya rentenir	Dinas Koperasi	Optimalisasi peran Koperasi dan LPD yang sudah ada di masing-masing desa
13	Haji Majuhin, SH	II	8	Mohon bantuan dana untuk Koperasi Pondok Pesantren Alkhairatul Muraahun	Dinas Koperasi	Tidak bisa masuk Renja, siap untuk difasilitasi ke Pusat
16	I Nyoman Sumardi, SE	III	5	Mohon bantuan Usaha untuk Kelompok	Dinas Koperasi	Disarankan untuk membentuk koperasi, terkait permodalan bisa difasilitasi ke pusat melalui LPDB

Kepala Bappellitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina
NIP. 197407201994031003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Arlika, M.Si
Pembina Usaha Muda
NIP. 19691012199031003

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem



I Nengah Toya, SE., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196012311981031395

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAFIL	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Wayan Sumatra, ST	IV	Bantuan Peralatan Kerja untuk pertanian dan pertukangan	Pertanian dan Disnaker	Tidak masuk renja karena dibatasi UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah barang diberikan kepada organisasi yang berbadan hukum Indonesia
2	I Nyoman Rena, SP	IV	Mohon bantuan mesin jahit untuk anggota Kelompok Wanita Tani Tunas Rahayu	Pertanian dan Disnaker	Tidak masuk renja karena dibatasi UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah barang diberikan kepada organisasi yang berbadan hukum Indonesia
3	I Made Agus Kertiana, SH	IV	Penyaluran Tenaga Kerja Kapal Pesiar	Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan hanya menerbitkan rekomendasi untuk bekerja di kapal pesiar kalau mengenai penyaluran melalui EP3TKI
4	I Gede Parwata,	V	Pengadaan Mesin Jahit	Disnaker	Tidak dapat diakomodir karena dibatasi UU 23 Tahun 2014 dan Permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah barang diberikan kepada organisasi yang berbadan hukum Indonesia

NB Bantuan peralatan terbentur pada UU 23 Tahun 2014, yang bisa diakomodir hanya pelatihan tenaga kerja

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
 Pembina
 NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



Drs. I Wayan Ardika, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Suradnya, S.Sos., MAP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621231 198103 1 041

HASIL PEMBAHASAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERSAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	DAPII	USULAN / POKOK - POKOK PIKIRAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
1	I Wayan Parka, SH	II	2 Permotongan Obyek Wisata	Dispar	Usulan belum jelas, jika objek dimaksud diluar kewenangan pemerintah daerah dimungkinkan diusulkan melalui mekanisme BKK
2	I KADEK SUJANAYASA, SH	IV	2 Peningkatan fasilitas pariwisata	Dispar	Usulan belum jelas, jika objek dimaksud diluar kewenangan pemerintah daerah dimungkinkan diusulkan melalui mekanisme BKK
3	I Kadek Sujanayasa, SH	IV	2 Pengembangan Desa Wisata, Dana Bantuan Bansos	Pariwisata	Di arahkan ke OPD terkait melalui BKK dengan pengajuan proposal serta menilah pekerjaan disertai rekomendasi OPD sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam perbup no 45 tahun 2019 (belum bisa masuk renja)
4	I Gede Dana, S.Pd.M.Si	VI	4 Peningkatan Ekonomi Kreatif untuk Dadia Pasek Gelgel Br. Dinas Sadimara , Desa Ababi, Kecamatan Abang	Pariwisata	Diterima(masuk renja), usulan digabung dengan usulan desa yang lain terkait dengan pembinaan ekraf
5	I Ketut Suardana	VI	14 Agar dilakukan study banding agar bis mengelola pariwisata sendiri	Pariwisata	Diterima (masuk renja), dengan melibatkan komisi IV DPRD Karangasem

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem,



I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
 Pembina
 NIP. 19740720 199403 1 003

Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem,



I Wayan Ardika, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691012 198903 1 003

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem,



I Ketut Sedana Mello, ST., MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670120 199703 1 003

LAMPIRAN II
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
YANG MENJADI RENCANA KERJA
BESERTA PENDANAANNYA

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

KABUPATEN KARANGASEM

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1.	WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1 Penyediaan jasa surat menyurat	- Terlaksananya jasa surat menyurat	13 Unit	1	12.245.190
					2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di masing-masing unit pelayanan pendidikan	13 Unit	2	673.486.000
					3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Terpeliharanya kebersihan kantor	13 orang	3	145.411.750
					4 Penyediaan jasa alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	13 Unit	4	459.195.000
					5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Unit	5	191.331.250
					6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Unit	6	76.532.500
					7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	7	1.099.793.300
					8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 UPTD	8	153.065.000
					9 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	415 Orang	9	206.637.750
					10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	10	153.065.000
					11 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi / teknis/ Keamanan	- Terwujudnya tenaga jasa administrasi / teknis / keamanan	1 Tahun	11	12.353.737.000
					12 Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	- tersedianya canang dan bebanten dan piodalan	374 Kali	12	229.597.500
					13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	- Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah	0	13	30.613.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1 Pembangunan Gedung Kantor	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan		1 2.563.697.300	
					2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua		2 1.725.000.000	
					3 Pengadaan Meubelair	- Tersedianya meubelair kantor baru		3 535.727.500	
					4 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		4 335.212.350	
					5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional		5 422.459.400	
					6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan kantor : Komputer		6 145.411.750	
					7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- Terlaksananya rehabilitasi ringan gedung kantor UPTD		7 306.130.000	
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi	1	1 153.065.000	
		Program Peningkatan sistem Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan sistem Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	- Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1 Tahun	1 76.532.500	
					2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	- Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Tahun	2 72.583.400	
					3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	3 76.532.500	
					4 Penyusunan Laporan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	- Terlaksananya penyusunan laporan Aset SKPD	1 Tahun	4 130.065.000	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	37%	1 Pembangunan Gedung Sekolah	-	20 lembaga	1 1.201.792.550	
			Jumlah TK Ber APE lengkap	16	2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	- Terbangunnya ruang kelas baru di TK Negeri Abang	1 Unit	2 484.274.200	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				3 Penambahan ruang guru sekolah	- Terlaksananya penambahan Ruang Guru Sekolah pada TK Negeri	1 Unit	3 0
				4 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	- Terbangunnya sarana dan prasarana Olahraga	9 Lembaga	4 21.352.050
				5 Pembangunan sarana dan prasarana bermain	- Terlaksananya Pembangunan tempat bermain TK negeri Pembina Abang	5 Lembaga	5 150.003.700
				6 Pembangunan ruang serba guna/aula	- Terbangunnya Ruang Serba Guna / Aula pada TK Negeri	1 Unit	6 144.868.950
				7 Pembangunan ruang ibadah	- Terbangunnya Ruang Ibadah pada TK Negeri	1 Unit	7 144.868.950
				8 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	- Terlaksananya pembanguan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	2 Paket	8 13.185.900
				9 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	- Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary pada TK Negeri	1 Paket	9 38.266.250
				10 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	- Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis untuk siswa 5 TK Negeri	600 Orang	10 159.187.600
				11 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	- Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	5 Paket	11 65.817.950
				12 Pengadaan Meubelair sekolah	- Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah TK Negeri Kerta Mandala	2 lembaga	12 419.238.250
				13 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	- Terpeliharanya bangunan sekolah secara rutin dan berkala	3 lembaga	13 393.377.050
				14 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	- Terpeliharanya Ruang guru sekolah secara rutin dan berkala	3 Paket	14 22.499.750
				15 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana bermain	- Terwujudnya Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana bermain	4 Lembaga	15 19.989.300
				16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	- Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer sekolah	5 Lembaga	16 61.226.000
				17 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	- Terlaksananya Lembaga PAUD yang mendapatkan DAK BOP	255 Lembaga	17 229.597.500
				18 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	- Terlaksananya Pemberian Insentif se Kab. Karangasem	450 Orang	18 6.430.260.650

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
					19 Penyelenggaraan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	- Tersusunnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	582291 kepek TK/KB,137 guru TK dan 154 guru KB	19 414.276.000	
					20 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	- Terlaksananya Pembinaan Pendidik PAUD dan Lembaga PAUD se Kabupaten Karangasem'	638 orang	20 502.053.200	
					21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga dan Pendidik PAUD	32 Lembaga	21 76.532.500	
					22 Pembinaan dan Lomba Gugus tingkat provinsi	- Terlaksanakanya Lomba Gugus PAUD	8 Sekolah	22 103.470.100	
					23 Lomba Kreativitas PAUD	- Terlaksananya Lomba Anak Usia Dini dalam rangka hari jadi Kota amlapura dan hari proklamasi	12 Bulan	23 15.092.400	
		Program peningkatan Peran Serta kepemudaan	Jumlah kelompok sentra pemberdayaan pemuda	8	1 Seleksi paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi	- Meningkatnya wawasan Kebangsaan para pelajar SMA/SMK di Kabupaten Karangasem 19 sekolah	86 Orang	1 132.400.650	
			Jumlah wirausaha muda dilatih	50	2 Pelatihan Paskibraka HUT RI Tingkat Kabupaten	- Meningkatnya wawasan Kebangsaan para pelajar SMA/SMK di Kabupaten Karangasem 19 Sekolah	76 Orang	2 1.769.986.850	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan PASKIBRA	1	3 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	- Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antara Provinsi 15 orang	15 orang	3 73.011.200	
			Jumlah kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional yang diikuti	3	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda	- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda, 1 Gedung	1 Paket	4 117.094.150	
					5 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	- Terfasilitasinya/Dukungan Kegiatan Kepemudaan/Kepanduan, 2 Kegiatan	0	5 8.372.550	
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah tanah yang dibeli dan akan disertifikat	4	1 Pensertifikatan tanah	- Jumlah tanah yang dibeli dan akan disertifikatkan	4 sertifikat dan satu tanah	1 4.174.500.000	
		Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Persentase APK SD / MI	100,56%	2 Pembangunan Gedung Sekolah (RKB) SD	- Terbangunnya Gedung Sekolah	14 Sekolah	2 3.699.163.600	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Persentase APM SD/MI	97%	3 Pembangunan Gedung Sekolah (RKB) SMP	- Terbangunnya Gedung Sekolah	40 Sekolah	3 849.442.650	
			Persentase APK SMP / MTs	97,48%	4 Penambahan Ruang Kelas SD	- Bertambahnya Ruang kelas sekolah	27 lembaga	4 4.539.875.700	
			Persentase APM SMP / MTs	75,08%	5 Penambahan Ruang Guru Sekolah	- Bertambahnya Ruang kelas sekolah	45 Lembaga	5 282.600.000	
Dst.			Persentase Kelulusan SD/MI Paket A	100%	6 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	- Terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah SD	21 lembaga	6 119.250.000	
Jml.			Persentase Kelulusan SMP/MTs Paket B	100%	7 Penambahan Ruang Kelas SMP	- Bertambahnya Ruang kelas sekolah	9 Sekolah	7 4.539.875.700	
			Rata-rata ujian SMP/MTs Paket B	8,00	8 Pembangunan Ruang Guru SMP	- Terbangunnya Ruang Guru pada SMP	6 Sekolah	8 150.500.000	
			Jumlah SD/MI yang sarana prasarananya sudah memenuhi SPM	4	9 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	- Tersedianya Laboratorium SMP	3 SMP	9 150.500.000	
			Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarananya sudah memenuhi SPM	4	10 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD	- Tersedianya Gedung Perpustakaan	30 lembaga	10 1.625.001.750	
			Jumlah juara / Medali / prestasi siswa tingkat provinsi / nasional	42	11 Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP	- Tersedianya Gedung Perpustakaan	SMP	11 812.502.600	
			Jumlah Sekolah Melaksanakan Kurikulum Nasional	328	12 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	- Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	12 sekolah	12 150.000.000	
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	13 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD	- Terbangunnya Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD	241 sekolah	13 150.000.000	
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99%	14 Pembangunan Ruang Ibadah	- Terbangunnya Ruang Ibadah	18 lembaga	14 150.000.000	
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99%	15 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	- Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	47 sekolah	15 150.000.000	
			Rasio APM perempuan/laki laki di SD	1,11	16 Pengadaan Alat Praktek dan Peaga Siswa	- Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa	7 sekolah	16 5.836.929.650	
			Rasio APM perempuan/laki laki di SMP	1,05	17 Pengadaan alat rumah tangga sekolah SD	- Terpenuhinya alat-alat rumah tangga sekolah SD	4 sekolah	17 250.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 24 tahun	0,87	18 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD	- Terpenuhinya perlengkapan sekolah SD	19 sekolah	18 250.000.000	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,0026	19 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	- Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	4 sekolah	19 250.000.000	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,0034	20 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	- terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	287 sekolah	20 250.000.000	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	21 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD	- terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru sekolah SD	15 sekolah	21 250.000.000	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	22 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD	- Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD	4 sekolah	22 250.000.000	
					23 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	- terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	107 sekolah	23 250.000.000	
					24 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	- Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	24 sekolah	24 250.000.000	
					25 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	- Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	31 sekolah	25 250.000.000	
					26 Pengadaan Mebeluer Sekolah	- Terpenuhinya Meubelair Sekolah pada jenjang SD	116 sekolah	26 250.000.000	
					27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	- Terpeliharanya ruang kelas sekolah secara rutin dan berkala	7 sekolah	27 250.000.000	
					28 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	- terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	40 sekolah	28 250.000.000	
					29 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	- Terpeliharanya prasarana sekolah	SD	29 7.449.199.000	
					30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	- Terpeliharanya prasarana sekolah	48 sekolah	30 4.199.817.910	
					31 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	- Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SD	31 3.764.376.650	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				32 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	- Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SMP	32 1.882.190.050
				33 Pengadaan Meubelair sekolah SMP	- Terpenuhinya Meubelair Sekolah pada jenjang SMP	35 sekolah	33 250.000.000
				34 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP	- terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP	12 sekolah	34 250.000.000
				35 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah SMP	- terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah SMP	12 sekolah	35 250.000.000
				36 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	- Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru SMP	409 kepek SD dan SMP, 714 guru kelas1 dan IV, 624 guru mapel SMP	36 1.183.876.700
				37 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	- Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru SD	366 SD	37 50.000.000
				38 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	- terbangunnya sarana air bersih dan sanitary SMP	8 Sekolah	38 300.000.000
				39 Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD	- Tersedianya buku sekolah	276 Sekolah	39 60.346.555.900
				40 Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SMP	- Tersedianya buku sekolah	139 Sekolah	40 30.173.277.950
				41 Pengadaan Buku Sekolah	- Tersedianya buku sekolah	SD dan SMP	41 459.195.000
				42 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SD	- Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains MIPA, OOSN dan FLS2N	100 Orang	42 520.421.000
				43 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	- Meningkatnya Akreditasi Sekolah	247 SD dan 14 SMP	43 377.418.500
				44 Penyiapan Akreditasi SMP	- Terlaksananya akreditasi sekolah		44 0

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				45 Monitoring, Evaluasi , dan Pelaporan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	364 SD	45 248.730.050	
				46 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMP	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	54 SMP	46 12.929.000	
				47 Ujian Akhir Sekolah SMP/MTS	- Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SMP/MTS	54 SMP(6.686.000)	47 416.336.800	
				48 Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	- Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	7585 Siswa kelas VI SD	48 535.727.500	
				49 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP	- Terlaksananya Pembinaan OSN, O2SN, FL2SN,LPSN, LKJS, LCSAN Siswa SMP	SISWA OSN, O2SN DAN FLS2N SMP	49 1.479.066.750	
				50 Sosialisasi BOS, BSM dan DAK	- Terlaksananya Sosialisasi BOS, BSM dan DAK	1254 kepala sekolah	50 459.195.000	
				51 Sosialisasi BOS dan BSM SMP	- Terlaksananya Sosialisasi BOS dan BSM SMP	50 sekolah	51 167.378.000	
				52 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI	- Tersedianya buku pelajaran SD	356 sekolah	52 1.084.675.000	
				53 Workshop Tata Kelola BOS	- Terlaksananya Workshop Tata Kelola BOS	412 Sekolah	53 765.325.000	
				54 Beasiswa SD	- Tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SD	16894 siswa miskin	54 22.451.574.200	
				55 Beasiswa SMP	- Tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SMP	8448 siswa miskin	55 9.761.554.000	
				56 Bantuan Sarana Transportasi Siswa Miskin SD/SMP - Sepeda Gunung	- Tersedianya Bantuan Sarana Transportasi Siswa miskin SD/SMP- Sepeda Gunung	1000 siswa miskin terpencil	56 0	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelaksanaan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional	- Terlaksananya peringatan hari-hari besar Nasional	1 Tahun	1 451.541.750
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal	58	2 Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan	- Meningkatnya Mutu Lembaga Pendidikan Non Formal, Akreditasi 6 Lembaga	6 Lembaga	2 46.378.350
			Persentase Penduduk Buta Aksara	12%	3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Bidang Keaksaraan/ Pemberantasan Buta Huruf dan Keaksaraan Usaha Mandiri, 1500 orang	1500 orang	3 1.565.523.750

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Berkembangnya pendidikan pasraman	20%	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Terselenggaranya Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pendidikan Non Formal, 1 Tahun	8 Kec.	4 5.860.050	
					5 Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) SKB	- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal di SKB, 130 orang/1 Tahun	130 Orang	5 283.431.300	
					6 Jambore PTK-PNF	- Terlaksananya Pemberian Apresiasi terhadap Peserta Jambora PTK-PNF, 15 Jenis Kegiatan/Lomba	15 Jenis Lomba	6 25.131.400	
					7 Penyelenggaraan Paket A setara SD	- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD di 1 Lembaga, 100 orang	1 Lembaga	7 57.857.650	
					8 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP di 12 Lembaga	10 Lembaga	8 527.820.000	
					9 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA di 12 Lembaga	12 Lembaga	9 1.566.990.000	
					10 Pengembangan Pendidikan Pasraman	- Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	1 Unit	10 150.000.000	
		Program Pembinaan dan pemyarakatan Olahraga	Jumlah Kejuaraan tingkat Kecamatan	8	1 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Masyarakat	8 Cabang Olahraga	1 1.231.009.450	
			Jumlah Kejuaraan tingkat Kabupaten	1	2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	- Terselenggaranya Pembinaan dan Pemyarakatan Olahraga, sebanyak 6 kali: Porsenijar Tk. Kecamatan, Tk. Kabupaten, Tk. Provinsi, Kejuaraan Bola Volley, Liga Pelajar dan Atletik	14 cabang seni, 11 cabang olahraga, 3 kejuaraan liga pelajar, volly dan atletik	2 6.499.802.050	
			Jumlah Juara/Medali/Prestasi tingkat Provinsi	24	3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga HUT	- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga, sebanyak 2 kali (Memeriahkan HUT RI dan HUT Kota Amlapura).	7 Jenis Lomba	3 1.301.052.500	
			Jumlah juara / Medali / prestasi siswa tingkat nasional	1					

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Terselenggaranya Pelatihan senam guru - guru olahraga	1					
			Jumlah pembinaan/pelatihan PTK dan siswa	40					
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik berkwalifikasi S1/D4	100%	1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	- Guru, Kepala Sekolah dan Operator Sekolah	90% guru mendapat sertifikasi	1 270.611.100	
			Persentase Pendidik bersertifikat	100%	2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	2 150.000.000	
			Persentase Pengawas berkwalifikasi S1/S2	100%	3 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	- Guru SD dan SMP	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	3 50.000.000	
			Persentase Pengawas bersertifikat pendidik	100%	4 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	- Guru	Guru	4 200.000.000	
			Persentase Kepala Sekolah mendapatkan pelatihan calon kepala sekolah	100%	5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan	- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	90% guru mendapat pelatihan	5 358.524.000	
			Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan yang meraih prestasi tingkat provinsi dan nasional	17	6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	- Pengawas TK-SD, SMP/SMA/SMK	100% Kepala Sekolah di evaluasi	6 95.280.950	
			Persentase GTK memperoleh jaminan perlindungan	100%	7 Pemilihan Guru dan Siswa Berprestasi	- Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	90 % guru, siswa, kepek dan pengawas berprestasi	7 45.919.500	
					8 Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Teknis	- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	90% guru naik pangkat	8 99.492.250	
					9 Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	- Calon Pengawas Sekolah	90 % pengawas sekolah di latih	9 115.823.400	
					10 Monitoring Pengawas	- Pengawas TK-SD, SMP/SMA/SMK	100% Sekolah di monitoring	10 112.817.300	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
					11 Pelatihan Calon Kepala Sekolah	- Calon Kepala Sekolah	90% kepala sekolah di latih	11 765.325.000	
					12 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan SD	- Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru dan kepala sekolah SD	100 orang guru SD	12 196.128.000	
					13 Pemilihan guru berprestasi SD	- Terpilihnya siswa dan guru berprestasi 6 Orang	10 orang guru dan siswa	13 111.874.000	
					14 Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Teknis SD	- Terlaksananya kenaikan pangkat bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD	30 orang PTK	14 66.855.000	
					15 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	- Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	65 orang guru	15 184.483.000	
					16 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMP berprestasi	- Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	9 Orang Guru	16 136.430.000	
					17 Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga teknis SMP	- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Guru SMP	500 orang Guru SMP	17 15.650.000	
					18 Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru TK	- Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	9 TK Negeri	18 36.680.000	
					19 Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru SD	- Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	50 SD	19 69.794.000	
					20 Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru SMP	- Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	47 SMP	20 69.150.000	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pedoman / standar dan media informasi	30	1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	- dapat terevaluasinya hasil kinerja bidang pendidikan	1	1 153.065.000	
			Jumlah kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait pendidikan	49	2 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang pendidikan	- Terbiayainya Pendidikan S1 bagi siswa SMA/SMK berprestasi	siswa SMA/SMK	2 1.413.401.750	
			Jumlah satuan pendidikan formal terakreditasi minimal B	356	3 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	- Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	0	3 50.000.000	
			Jumlah satuan pendidikan non formal terakreditasi	38	4 Pembinaan dewan pendidikan	- terlaksananya pembinaan terhadap dewan pendidikan	1	4 72.383.300	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Jumlah siswa yang menerima beasiswa prestasi dan mandiri untuk ke perguruan tinggi	56	5 Pembinaan komite sekolah	- terlaksananya pembinaan terhadap komite sekolah	1	5 206.479.050	
			Jumlah lembaga PAUD siap terakreditasi	34	6 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	- Tersedianya Informasi Pendidikan melalui Wibesite: http://pendidikan.karangasem.go.id dengan basis DAPODIK	1	6 342.125.000	
					7 Penyelenggaraan Pelatihan seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	- Terselenggaranya seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah bagi guru -guru yang akan dan telah menulis Karya Tulis Ilmiah Guru sejumlah 400 Orang	Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK	7 395.274.550	
					8 Penyelenggaraan penerimaan siswa baru	- Terlaksananya Penerimaan Siswa baru	3000 siswa	8 75.000.000	
					9 Pendataan pendidikan	- Tersedianya Data Pokok Pendidikan yang Update dengan Program Aplikasi DAPODIK pada PAUD dan DIKDAS	561 sekolah	9 687.711.500	
					10 Pembinaan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	- Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru PAUD	Kepala TK/ Pengelola Kelompok Bermain	10 255.639.250	
					11 Akreditasi Sekolah	- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah pada PAUD/SD/SMP	25 sekolah PAUD / SD / SMP	11 60.954.600	
					12 Penyusunan rencana dan Program Pendidikan	- Tersusunnya Program -program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karangasem	1 Tahun	12 459.195.000	
					13 Penyusunan Profil Pendidikan	- Tersusunnya Profil Pendidikan	700 Exemplar	13 171.577.700	
		Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	6%	1 Oprasional TBM dan Motor Kunjung	- Meningkatnya minat baca masyarakat	20 Lembaga	1 192.188.000	
			Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	16	2			2	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terselesaikannya Pembangunan Kawasan Gelanggang Olahraga (Stadion) Kota Amlapura	12 bulan	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Terselesaikannya Pembangunan Kawasan Gelanggang Olahraga (Stadion) Kota Amlapura (jalan Lingkar stadion)	5 item	1 5.663.405.000	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memadai di kecamatan dan kabupaten	12	2 Pemberdayaan Operasional Gelanggang Olahraga (GOR) Amlapura	- Terpeliharanya dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung, Amlapura, 1 Paket	1 Unit	2 413.275.500	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				3 Rehabilitasi sedang dan berat fasilitas umum olahraga	- Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2 Unit	3 811.244.500	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Adanya data potensi kepemudaan desa dan kelurahan	28	1 Pendataan Potensi Kepemudaan	- Adanya data potensi kepemudaan dan pelatihan enterpreneur/kewirausahaan	20 Organisasi	1 153.065.000
			Jumlah pendataan organisasi pemuda dan potensi kepemudaan	1				
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kelompok bebas narkoba di karang taruna	28	1 Pemberian Penyuluhan tentang narkoba bagi pemuda	- Terbebasnya pengaruh narkoba bagi pemuda	Kab. Karangasem	1 76.532.500
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tertatanya arsip dan terkelolanya data kepegawaian	1	1 Penataan Arsip dan Pengelolaan data kepegawaian	- Tertatanya arsip keuangan dan Kepegawaian dan terkelolanya data kepegawaian	1	1 163.779.550
			Persentase penataan arsip dan data kepegawaian	100%				
JUMLAH		18 PROGRAM			164 KEGIATAN		243.437.717.250	
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN								
2	WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1 Penyediaan jasa surat menyurat	1 Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	100%	1 6.900.000
					2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Persentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	2 837.936.000
					3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3 Persentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	3 17.250.000
					4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4 Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	4 149.500.000
					5 Penyediaan alat tulis kantor	5 Persentase terpenuhinya pelayanan jasa alat tulis kantor	100%	5 83.835.000
					6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	6 86.250.000
					7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Persentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100%	7 17.250.000
					8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	8 28.750.000
					9 Penyediaan peralatan rumah tangga	9 Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	9 17.825.000
					10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%	10 35.650.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				11 Penyediaan makanan dan minuman	11 Persentase makanan dan minuman rutin dan tamu yang tersedia	100%	11 76.912.000	
				12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 69.000.000	
				13 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	13 Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang tersedia	418 orang	13 5.864.372.100	
				14 Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	14 Persentase canang dan banten piodalan yang tersedia	100%	14 51.750.000	
				15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	15 11.500.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	1 Pembangunan rumah dinas	1 Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	1 unit	1 165.115.500
				2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	2 Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	2 134.601.500	
				3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	3 Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	3 390.500.000	
				4 Rehabilitasi sedang berat rumah dinas	4 Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	2 unit	4 0	
		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	90	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Jumlah tenaga aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	90 orang	1 450.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase program kegiatan yang tersusun	100%	1 Penyusunan Perencanaan kegiatan dan pelaporan	1 Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	1 310.292.070
					2 Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	100%		
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	96%	1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	96%	1 5.108.298.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	12	1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase terpenuhinya masyarakat yang berobat ke Puskesmas tanpa memberikan uang jaminan	100%	1 3.993.727.100
			Angka usia harapan hidup	72		2 Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di Puskesmas	100%	
			Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Peserta JKN	10%		3 Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	2 Peningkatan Pelayanan Laboratorium	2 Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	100%	2 3.158.388.650	
			Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	100%	3 Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	1 Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	100%	3 154.964.504.056	
						2 Jumlah Pemanfaat Kartu Karangasem Sehat (KKS)	98268 Orang		
					4 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Pratama	4 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	4 1.362.213.375	
					5 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Manggis I	5 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	5 1.744.091.250	
					6 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Manggis II	6 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	6 702.643.920	
					7 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rendang	7 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	7 2.428.369.200	
					8 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Sidemen	8 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	8 2.509.923.780	
					9 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Selat	9 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	9 3.539.527.157	
					10 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Bebandem	10 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	10 2.241.516.000	
					11 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Karangasem I	11 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	11 3.056.095.680	
					12 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Karangasem II	12 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	12 2.495.226.000	
					13 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Abang I	13 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	13 2.456.038.800	
					14 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Abang II	14 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	14 2.477.520.000	
					15 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kubu I	15 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	15 3.130.836.972	
					16 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kubu II	16 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	100%	16 2.552.514.600	
					17 Peningkatan Upaya Rumah Sakit Pratama	17 Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di RS Pratama	100%	17 3.120.952.000	
						Persentase terpenuhinya kegiatan pelayanan sesuai standar Rumah Sakit Pratama	100%		
						Persentase masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pratama tanpa memberikan uang jaminan	100%		
					18 Peningkatan Upaya Puskesmas Manggis I	18 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	18 638.555.400	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				19 Peningkatan Upaya Puskesmas Manggis II	19 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	19 385.758.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				20 Peningkatan Upaya Puskesmas Rendang	20 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	20 629.483.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				21 Peningkatan Upaya Puskesmas Sidemen	21 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	21 624.602.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				22 Peningkatan Upaya Puskesmas Selat	22 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	22 806.903.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				23 Peningkatan Upaya Puskesmas Bebandem	23 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	23 670.213.800
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				24 Peningkatan Upaya Puskesmas Karangasem I	24 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	24 789.692.500
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				25 Peningkatan Upaya Puskesmas Karangasem II	25 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	25 658.877.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		
					26 Peningkatan Upaya Puskesmas Abang I	26 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	26	597.737.400
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	100%		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				27 Peningkatan Upaya Puskesmas Abang II	27 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	27 558.755.900
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				28 Peningkatan Upaya Puskesmas Kubu I	28 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	28 489.542.600
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
				29 Peningkatan Upaya Puskesmas Kubu II	29 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	29 578.503.400
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	100%	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	1 Persentase Pengawasan Batra (Pengobat tradisional) yang dilaksanakan	100%	1	94.162.200
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase RT berperilaku hidup sehat	88%	1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1 Jumlah populasi yang diberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat	515 Populasi	1	801.988.000
			Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif	70%	2 Penyuluhan Masyarakat Melalui Sekolah	2 Persentase sekolah yang melaksanakan penjarangan/skrining kesehatan sesuai standar	100%	2	31.130.000
			Persentase sekolah yang melaksanakan penjarangan/skrining kesehatan sesuai standar	100%		Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	100%		
			Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	100%		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	3 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja	3 Terbentuknya Pos UKK di daerah PPI/TP	4 unit	3	50.000.000
			Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	50%		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100%		
			Pembentukan pos UKK di daerah PPI/TPI	1	4 Upaya Peningkatan Kesehatan Olah raga	4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pendataan atau pembinaan kelompok olah raga	100%	4	50.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	100%		Persentase bayi usia kurang dari 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	60%		
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat Umum Sehat	83%	1 Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan	1 Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	100%	1	3.764.051.226
			Persentase Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi Layak	100%		Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat	100%		
			Tatanan Kota Sehat (satuan indikator : tatanan)	5		Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (satuan indikator : Desa)	78 Desa		
			Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	100%		Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	100%		
			Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat	100%		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis	40%		
			Jumlah Desa STBM (satuan indikator : Desa)	78					
			Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	32%					
			Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis	40%					
			Persentase Rumah Sehat	90%					
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani kurang dari 18 jam	100%	1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	1 Persentase fogging yang dilaksanakan pada lokasi resiko tinggi		1	473.752.499
			Angka bebas jentik	95%	2 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	2 Persentase bayi (anak usia 0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%	2	300.000.000
			Persentase pemeriksaan HIV sesuai standar bagi orang beresiko terinfeksi HIV	98%		Persentase balita yang mendapat imunisasi lanjutan	90%		
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,5%	3 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3 Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	3	1.506.128.774
			Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	50%		Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus pneumonia balita sesuai standar	100%		
			Proporsi jumlah penduduk usia 15 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	80%		Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus diare sesuai standar	100%		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%		Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus GHPR sesuai standar	100%		
			Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	40%		Persentase pengobatan kecacingan secara massal	100%		
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%		Persentase pasien TB mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	4 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	4 Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon	100%	4	187.425.000
			Penderita diare yang ditangani	100%		Persentase terpenuhinya pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%		
			Tingkat kematian akibat malaria	0%	5 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	5 Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	100%	5	552.817.300
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100%	6 Peningkatan standar perijinan pelayanan kesehatan	6 Persentase Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek	100%	6	169.403.000
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk dibawah 15 tahun	3		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin	100%		
			Persentase bayi (anak usia 0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%	7 Pengelolaan Standar Kompetensi SDM Kesehatan	7 Persentase SDM kesehatan yang lulus uji kompetensi (Ukom)	10%	7	100.000.000
			Angka Kesakitan Demam Berdarah	50					
			Angka Kesakitan Demam Berdarah per 100.000 penduduk	50					
			Persentase terpenuhinya tatalaksana kasus pneumonia balita sesuai standar	100%					
			Persentase terpenuhinya tatalaksana kasus diare sesuai standar	100%					
			Persentase terpenuhinya tatalaksana kasus GHPR sesuai standar	100%					
			Persentase pengobatan kecacingan secara massal	100%					

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Angka kejadian Malaria (Angka Kesakitan Malaria (per 1000 pdd))	< 1					
			Angka Kesakitan Kusta (per 10.000 pdd)	< 1					
			Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita TB	100%					
			Angka keberhasilan pengobatan TB	>90%					
			Persentase batita yang mendapat imunisasi lanjutan	88%					
			Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon	95%					
			Persentase terpenuhinya pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%					
		Program Pengadaan, Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun/direhabilitasi	15	1 Pembangunan Puskesmas	1 Jumlah puskesmas yang dibangun	2 Unit	1 11.000.000.000	
					2 Pembangunan Puskesmas Pembantu	2 Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun	1 Unit	2 400.000.000	
					3 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	3 Jumlah puskesmas pembantu yang di rehabilitasi	16 Unit	3 2.744.425.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan	1 Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1 125.790.000	
		Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	90	1 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 Persentase terpenuhinya pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu bersalin	90%	1 1.508.977.000	
			Angka Kematian Bayi (AKB)	10		Persentase kunjungan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	10%		
			Angka Kematian Balita (AKBA)	10		Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar (KN3) bagi bayi baru lahir	10%		
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%		
			Cakupan kunjungan bayi	100%		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
			Persentase kunjungan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	100%		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		
			Cakupan pelayanan nifas	100%					
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%					
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%					
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%					
			Persentase bayi baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (KN3)	100%					
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular	1 Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	100%	1	250.000.000
			Persentase meningkatnya desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	70%		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		
			Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan.	100%	1 Perayaan hari-hari besar nasional	1 Jumlah perayaan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan	3 Perayaan	1	51.047.040

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
JUMLAH		16 PROGRAM			71 KEGIATAN			241.437.298.749	
PERANGKAT DAERAH : RSUD									
3	WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pencapaian pemberian makanan gratis bagi 1 penunggu pasien rawat inap kelas III (RSUD)	100%	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Karangasem	- Jumlah Pasien yang dilayani bail rawat jalan maupun rawat inap	110.000 kunjungan	1	70.000.000.000
			BOR (Bed Occupancy Ratio)	71%					
			Penurunan NDR (Net Death Rate)	14%					
			Penurunan Gross Death Rate (GDR)	25%					
			Bed Turn Over (BTO)	40					
			Angka Turn Over Interval (TOI)	2 (hari)					
			Angka Length Of Stay (LOS)	4 (hari)					
			Presentase Indek Kepuasan Masyarakat	85%					
			Presentase Pegawai yang dilatih minimal 20 Jam per tahun	65%					
			CRR (Cost Recopery Rate)	100%					
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	80%					
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	80%	1 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	- Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	40 unit	1	7.500.000.000
					2 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS	- Jumlah penunggu pasien rawat inap kelas III yang mendapatkan makanan.	40000 orang	2	600.000.000
					3 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)	- Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	1 unit	3	1.000.000.000
					4 Pembangunan Gedung Rumah Sakit	- Jumlah Gedung yang dibangun	1 unit	4	15.000.000.000
JUMLAH		2 PROGRAM			5 KEGIATAN			94.100.000.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
4	WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Prosentase penyelenggaraan jasa surat menyurat dan koordinasi antar SKPD dalam setahun	1 Tahun	1	2.593.000,77	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	-	Prosentase penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik dalam setahun	9%	2	237.716.000,00	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Prosentase pengadaan jasa, bahan material, dan alat - alat kebersihan kantor dalam setahun	2%	3	58.573.000,00	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Prosentase pengadaan alat tulis kantor dan alat tulis kantor berbasis IT dalam setahun	2%	4	52.682.000,00	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Prosentase pemenuhan barang cetakan dan pengadaan selama setahun	1%	5	24.994.000,00	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Prosentase terpeliharanya jaringan listrik/penerangan kantor	0%	6	12.681.000,00	
					7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Prosentase peningkatan sumber informasi yang memadai	1%	7	21.106.000,00	
					8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	Prosentase kebutuhan makanan dan minuman rapat/pertemuan/tamu selama setahun	2%	8	67.150.000,00	
					9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	Prosentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun	7%	9	144.070.000,00	
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	-	Prosentase kelancaran tugas - tugas administrasi / teknis selama setahun	23%	10	641.616.000,00	
					11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten, Piodalan	-	Prosentase kebutuhan banten dan canang setiap hari ; pada hari - hari besar keagamaan selama setahun	3%	11	106.299.000,00	
					12	Penataan dekorasi dan kegiatan hari-hari nasional	-	Prosentase terselenggaranya penataan dekorasi dan kegiatan hari - hari nasional	3%	12	43.221.000,00	
					13	Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Prosentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama setahun	1%	13	28.814.000,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pembangunan Gedung Kantor	-	Meningkatnya prasarana aparatur		1	-	
					2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dan kenyamanan kinerja pegawai	12%	2	15.847.000,00	
					3	Pengadaan Mebeleur	-	Meningkatnya kuantitas mebeulair dan kinerja pegawai	13%	3	53.590.000,00	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Prosentase terpeliharanya kondisi gedung kantor Dinas PUPR	3%	4	39.620.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8				
				5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran mobilitas pimpinan/pegawai	16%	5	287.980.000,00		
				6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Prosentase peningkatan kualitas peralatan kantor	1%	6	43.220.000,00		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya pelaporan Dinas PUPR Kab. Karangasem	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersusunnya Buku Lakip dan Laporan Dinas PUPR Kab. Karangasem	100%	1	59.550.000,00	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya jalan dan jembatan	100%	1	Pembangunan Jalan	- Pembangunan Infrastruktur Jalan	1%	1	15.639.630.350,00	
				2	Pembangunan Jembatan	- Terbangunnya jembatan/box culvert	6%	2	5.000.000.000,00		
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase terpeliharanya jalan dan jembatan	74%	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	- Terpeliharanya Infrastruktur Jembatan (M)	12%	1	219.615.000,00	
				2	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	- Terpeliharanya Jalan untuk mempertahankan kondisi baik (KM)	78%	2	9.524.286.625,00		
				3	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	- Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Km)	5%	3	6.932.808.000,00		
				4	Peningkatan Jalan Kabupaten	- Peningkatan Infrastruktur Jalan (Km)	5%	4	75.094.505.235,99		
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terwujudnya data informasi infrastruktur ke Puan (Bidang Bina Marga)	100%	1	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	- Tersedianya database jalan di Kabupaten Karangasem	100%	1	218.037.622,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase jumlah dan jenis alat berat yang tersedia	26 Unit	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat	- Prosentase alat - alat berat siap pakai	75%	1	218.725.000,00	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, bantaran dan bangunan sungai yang tertata dan tersusunnya data dan informasi infrastruktur ke PU an Bidang Sumber Daya Air	75%	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	- Prosentase jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	1%	1	18.070.350.000,00	
				2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	- Prosentase bantaran tanggul yang ditangani	0%	2	2.340.387.000,00		
				3	Pembangunan Irigasi Subak di 7 Kecamatan	- Prosentase jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	1%	3	6.432.080.000,00		
				4	Penyusunan Sistem Informasi / Database Sumber Daya Air	- Prosentase data dan informasi infrastruktur ke-PU-an Bidang Sumber Daya Air yang terupdate	100%	4	792.387.000,00		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase terpeliharanya prasarana/bangunan penyediaan air baku	0,03%	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan penyedia air baku	0,26%	1	833.465.000,00	
					2	Perlindungan Mata Air	-	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan penyedia air baku	8,82%	2	665.998.000,00	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang berakses air minum dan air limbah	4	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	-	Persentase penduduk yang terakses saluran air limbah yang layak	0,7648	1	4.958.900.000,00	
					2	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	-	Persentase penduduk yang terakses air minum	0,8752	2	7.962.188.000,00	
		Program Pengendalian Banjir	Prosentase panjang pantai yang tertangani	0,23%	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	-	Prosentase panjang garis pantai yang ditangani	0,23%	1	174.172.000,00	
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya ketaatan BUJK dan Pengguna BUJK terhadap peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi	100%	1	Sosialisai dan Diseminasi Peraturan Perundang – Undangan Jasa Konstruksi	-	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang mengetahui dan memahami peraturan perundang - undangan jasa konstruksi	100%	1	54.929.000,00	
					2	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	Persentase tersedianya 7 jenis informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada SIPJAKI	71%	2	37.884.000,00	
		Program Pengembangan Informasi Bidang ke-PU-an	Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang ke-PU-an	37%	1	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan ke-PU-an	-	Prosentase jumlah kegiatan ke-PU-an yang dimonev	40%	1	89.300.000,00	
		Program Penataan Bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang terencana dan tertata dengan baik	100%	1	Fasilitasi Perencanaan Bangunan dan Lingkungan	-	Persentase fasilitasi perencanaan bangunan dan lingkungan yang dapat tertangani tepat waktu	100%	1	50.203.000,00	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase perencanaan tata ruang dan bangunan yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK	-	Jumlah perencanaan dokumen RDTRK dan RTRK yang dapat di selesaikan tepat waktu	2 Paket	1	92.500.000,00	
					2	Penetapan Kebijakan Tentang RTBL	-	Jumlah perencanaan dokumen RTBL yang dapat diselesaikan tepat waktu	1 paket	2	56.469.000,00	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang dan bangunan yang dapat dikendalikan/ sesuai dengan tata ruang	100%	1	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	-	Prosentase Pengawasan Ruang dan Bangunan dari Rekomendasi Teknis IMB yang diterbitkan	70%	1	48.708.000,00	
					2	Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang	-	Persentase informasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan tepat waktu	100%	2	36.293.000,00	
		Program Penataan halaman dan taman kantor	Terpeliharanya halaman dan taman kantor	100%	1	Penataan Halaman dan Taman Kantor	-	Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai Dinas PUPR Kab. Karangasem		1	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Hak atas tanah milik Pemerintah Kab. Karangasem tertata secara administrasi dan memenuhi aspek legalitas	2	1	Pengadaan Tanah	-	Jumlah pengadaan tanah dan legalitas hak atas tanah milik Dinas PUPR Kabupaten Karangasem		1		-
		Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pengelolaan Limbah Dan Persampahan Di Kabupaten Karangasem	100%	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Limbah	-	Persentase pengelolaan limbah di Kab. Karangasem	76%	1	261.946.000,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan tata ruang yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	1	Peningkatan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	-	Jumlah pelaporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang dapat diselesaikan tepat waktu	2 Kali	1	148.097.000,00	
JUMLAH		20 PROGRAM			49 KEGIATAN						157.895.185.834	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
5	WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	-	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat		1	1	2.130.000
					2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-	Jumlahnya Telepon Air dan Listrik yang Terbayar		1	2	60.000.000
					3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlahnya Penyediaan Alat Tulis Kantor Berbasis IT		1	3	25.000.000
					4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	-	Jumlah Barang Cetak, Pengadaan dan Foto Copy		1	4	13.000.000
					5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	5	6.500.000
					6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	6	95.000.000
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Bahan dan Buku Bacaan		1	7	4.500.000
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan		1	8	11.000.000
					9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	Jumlah Perjananan Dinas Ke Luar Daerah		1	9	160.000.000
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	Persentase Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	30 Org		10	700.000.000
					11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Piodalan dan Pengadaan		1	11	45.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8
					12 Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-Hari Nasional	- Terlaksananya Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-Hari Nasional	1 12	50.000.000
					13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	1 13	0
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 1	160.000.000
					2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Jumlah Kendaraan Roda 2,Roda 4 yang Terpelihara dan Jumlah STNK Roda 4, Roda 2 yang Di Samsat	1 2	200.000.000
					3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 3	21.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersusunya Buku lakip dan Laporan DPKP	1 1	10.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Tersusunnya data perumahan Kabupaten Karangasem	100%	1 Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangasem	- Terlaksananya Monev Perumahan	1 1	300.000.000
					2 Pendataan dan Pemetaan Rumah	- Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Rumah 1 Tahun	1 2	500.000.000
					3 Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni	- Terlaksananya Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni	1 3	50.620.000.000
					4 Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	- Terlaksanananya Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 4	250.000.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten	10%	1 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	- Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	1 1	1.000.000.000
					2 Perbaikan Lingkungan Permukiman	- Terlaksananya Perencanaan dan Kontruksi Perbaikan Lingkungan	1 2	2.000.000.000
					3 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	- Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	1 3	100.000.000
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terjaganya kualitas lingkungan kawasan perumahan	100%	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	- Tercapainya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan sehat perumahan	1 1	1.000.000.000
		Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya Sistem Drainase Di Kawasan Permukiman Perkotaan (%)	14%	1 Pembangunan Saluran Drainase	- Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan/Draina-se	1 1	1.000.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya Pengembangan Perumahan	100%	1 Pemantauan Pengembangan Perumahan	- Jumlah Pemantauan Pengembangan Perumahan	1	1	250.000.000	
		Penataan Halaman dan Taman Kantor	Persentase Penataan Halaman dan taman kantor	100%	1 Penataan Halaman dan taman kantor	- Persentase Penataan Halaman dan taman kantor	1	1	20.000.000	
JUMLAH		9 PROGRAM			28 KEGIATAN				58.603.130.000	
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
6	WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.	100%	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Materai yang dipergunakan	1 Tahun	1	2.000.000	
					2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dapat terbayarkan	1 Tahun	2	60.000.000	
					3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah jasa kebersihan kantor yang dapat terbayarkan	1 Tahun	3	24.000.000	
					4 Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah alat tulis kantor yang dapat terbayarkan	1 Tahun	4	25.000.000	
					5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang yang dapat dicetak dan digandakan	1 Tahun	5	12.000.000	
					6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	1 Tahun	6	12.000.000	
					7 Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan	1 Tahun	7	5.000.000	
					8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat terbayarkan	1 Tahun	8	12.000.000	
					9 Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang dapat disediakan	1 Tahun	9	1.000.000	
					10 Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah makanan dan minuman rapat yang dapat disediakan	1 Tahun	10	40.000.000	
					11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat	1 Tahun	11	75.000.000	
					12 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	- Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang	1 Tahun	12	1.100.000.000	
					13 Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	- Jumlah canang dan bebanten yang dapat terbayarkan	1 Tahun	13	75.000.000	
					14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dapat	1 Tahun	14	15.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.	100%	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat diadakan	1 Tahun	1	400.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	1 Tahun	2	100.000.000	
					3	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang dapat diadakan	1 Tahun	3	50.000.000	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	1 Tahun	4	250.990.000	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 Tahun	5	30.000.000	
					6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 Tahun	6	150.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin kerja Aparatur	100%	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang dapat diadakan	1 Tahun	1	385.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Anggota Satpol.PP yang terdidik dan terlatih	100%	1	Pembinaan dan latihan korsik	-	Jumlah pembinaan dan latihan korsik yang dilakukan	1 Tahun	1	200.000.000	
					2	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	-	Jumlah Sumber daya aparatur yang lulus tes kesamaptaan pol.pp	1 Tahun	2	50.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Keuangan terlaporkan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang dapat tersusun tepat waktu	1 Tahun	1	15.000.000	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan bagi tamu WVIP dan juga kenyamanan lingkungan	100%	2	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dapat disiapkan	1 Tahun	2	50.000.000	
					3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	jumlah pengendalian keamanan lingkungan yang dapat dilaksanakan	1 Tahun	3	30.000.000	
					4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dapat dilaksanakan	1 Tahun	4	51.000.000	
					5	Pengamanan dan pengawalan Tamu WVIP pejabat negara dan tamu negara	-	Jumlah pengamanan dan pengawalan Tamu WVIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara yang dapat dilakukan	1 Tahun	5	536.000.000	
					6	Pelatihan bagi Anggota Hansip/Linmas	-	Jumlah anggota hansip/linmas yang terlatih	1 Tahun	6	140.000.000	
					7	Pendataan dan Penertiban Bangunan-Bangunan, Villa, Tempat Usaha lainnya yang tanpa ijin dan tuna wisma	-	Jumlah Pendataan dan penertiban bangunan villa, tempat usaha lainnya tanpa ijin dan tuna wisma yang dapat dilakukan	1 Tahun	7	200.000.000	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase kegiatan pencegahan tindak kriminal	100%	1	Peningkatan Tindakan Deteksi Dini terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	-	Jumlah tindakan deteksi dini terhadap perda dan peraturan bupati yang dapat dilakukan	1 Tahun	1	50.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan perayaan hari-hari besar Nasional dan Daerah	100%	2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	2	100.000.000	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keamanan lingkungan kab. Karangasem tentram, tertib dan terkendali	100%	1	Patroli wilayah dan trantibum	-	Jumlah patroli wilayah yang dapat dilakukan	1 Tahun	1	350.000.000	
					2	Pembinaan, pengendalian dan penegakan Perda	-	Jumlah pembinaan, pengendalian dan penegakan perda yang dapat	1 Tahun	2	100.000.000	
					3	Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja	-	Jumlah keikutsertaan sumber daya aparatur Pol.pp dalam gelar pasukan	1 Tahun	3	150.000.000	
					4	Operasional Penyelidikan dan Penyidikan	-	Jumlah Operasional Penyelidikan dan Penyidikan yang dapat dilaksanakan	1 Tahun	4	63.000.000	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perbup	100%	1	Operasi Yustisi Produk Hukum	-	Jumlah Operasi Yustisi yang dapat dilaksanakan	1 Tahun	1	200.000.000	
JUMLAH		10 PROGRAM			37 KEGIATAN					5.108.990.000		
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMADAM KEBAKARAN												
7	WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 bulan	1	1.200.000,00	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Jumlah bulan pembayaran rekening air listrik dan telepon yang dibayar	12 bulan	2	43.800.000,00	
					3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	jumlah bulan terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	3	10.315.500,00	
					4	Penyediaan alat tulis kantor	-	Jumlah item alat tulis kantor yang dibeli	40 item	4	15.379.000,00	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 tahun	5	10.736.500,00	
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	Jumlah bulan tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan	6	2.500.000,00	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah bulan tersedianya koran bacaan lain	12 bulan	7	6.060.000,00	
					8	Penyediaan makanan dan minuman	-	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	571 kotak	8	32.661.200,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	9	60.000.000,00	
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/ Keamanan	-	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan	16 orang	10	215.006.400,00	
					11	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Terlaksananya piodalan di Disdamkar	1 paket	11	57.505.000,00	
					12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12	10.000.000,00	
					13	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	-	Jumlah bulan terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	12 bulan	13	49.000.000,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pembangunan Gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	1	0	
					2	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit	2	50.000.000,00	
					3	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 unit	3	15.338.400,00	
					4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor Yang diadakan	6 unit	4	61.315.700,00	
					5	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang diadakan	0 unit	5	0	
					6	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	1 unit	6	20.000.000,00	
					7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	-	Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional terpelihara	12 bulan	7	100.000.000,00	
					8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gednung Kantor	-	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	8	10.000.000,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	100%	1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi Aparatur / Petugas Operasional di Daerah	-	jumlah aparatur / petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	20 orang	1	160.687.100,00	
					2	Peningkatan ketrampilan Fisik, Mental dan Disiplin aparatur pemadam kebakaran	-	Jumlah aparatur/petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	51 orang	2	66.806.600,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah laporan yang disusun	3 laporan	1	7.003.100,00	
					2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0 laporan	2	0	
					3	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	-	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	0 laporan	3	0	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	3 hari-hari besar	1	97.571.500,00	
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Response time 15 menit pemadam kebakaran sampai tujuan	15 Menit	1	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	100 persen	1	1.265.702.850,00	
			Persentase kasus kebakaran yang ditangani	100%	2	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	-	Jumlah lokasi pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan bencana kebakaran yang dilaksanakan	11 lokasi	2	122.312.500,00	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	3	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	-	Jumlah bulan penyusunan laporan	12 bulan	3	31.345.250,00	
			Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	100%	4	Pembinaan Kesiapsiagaan Penggunaan Instalasi Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung	-	Jumlah lokasi pembinaan yang dilaksanakan	0 lokasi	4	0	
			Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atai dibawah Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	100%								

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
		Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	85%	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	-	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	2 unit	1	1.691.947.500,00	
					2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	-	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	6 unit	2	223.503.600,00	
JUMLAH		7 PROGRAM			37 KEGIATAN					4.437.697.700		
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
8	WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Terselenggaranya surat menyurat	100%		2.300.000	
					2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Terselenggaranya komunikasi terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	100%		42.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Lembur	-	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan di luar jam kantor				
					4	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	-	Tercapainya perizinan kendaraan dinas/ operasional	100%		20.000.000	
					5	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	terpeliharanya peralatan kerja (komputer)	100%		35.000.000	
					6	Penyediaan Alat Tulis kantor	-	Tersedianya Alat Tulis kantor	100%		40.000.000	
					7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%		25.000.000	
					8	penyediaan komponen instalansi, listrik/penerangan bangunan kantor	-	Tersedianya komponen listrik	100%		17.000.000	
					9	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%		28.000.000	
					10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%		11.000.000	
					11	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Tersedianya bahan logistik (pengisian tabung gas)				
					12	Penyediaan makanan dan minuman	-	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	100%		60.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%		138.075.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
					14 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	-	Terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	100%	502.450.000	
					15 Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Terlaksananya upacara keagamaan	100%	50.000.000	
					16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	26.050.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1 Pengadaan kendaraan dinas bermotor / operasional	-	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	100%	86.550.000	
					2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	20.200.000	
					3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer FC dan Laptop	-	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Komputer FC dan Laptop	100%	26.750.000	
					4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	20.000.000	
					5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor	100%	20.000.000	
					6 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	-	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	100%	165.000.000	
					7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	20.000.000	
					8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	27.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	-	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100%	57.000.000	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	1 Pengendalian keamanan lingkungan	-	Terlaksananya HUT Hansip kabupaten Karangasem			
					2 Pengamanan Daerah Karangasem	-	Terciptanya keamanan wilayah kab. Karangasem			
					3 Pengadaan pakaian Seragam hansip	-	Tersedianya pakaian hansip			
					4 Pemeliharaan CCTV	-	Terciptanya keamanan wilayah kab. Karangasem			
					5 Pelatihan bagi Anggota hansip/ Linmas dan Pecalang	-	Terlaksananya pembinaan bagi anggota hansip/Linmas dan Pecalang			

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
					6 Operasional Tim Terpadu Penanganan gangguan Dalam negeri	-	Terciptanya keamanan daerah Kabupaten Karangasem		
					7 Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	-	1). terwujudnya mediasi penanganan konflik sosial 2). Meningkatkan pemahaman tentang konflik sosial 3). Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial	100%	320.000.000
					8 Operasional Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Karangasem	-	1). persentase cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat 2). meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini masyarakat	100%	227.720.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegah kejahatan	11 or	1 Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegah kejahatan	-	1). Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegah kejahatan 2). Terlaksanya penyuluhan teknik pencegahan tindak kriminal	100%	86.000.000
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah terlaksananya kegiatan bulan bakti Bung Karno		1 Perayaan Hari-hari besar nasional dan daerah	-	Terlaksananya kegiatan pawai dan pameran pembangunan dalam rangka HUT RI	100%	36.000.000
			Jumlah terlaksananya pertemuan tokoh masyarakat	2	2 Upacara Apel Bendera peringatan Sumpah Pemuda	-	Terlaksananya Apel bendera Peringatan Sumpah Pemuda		
			Jumlah pertemuan FKUB	2	3 Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial	-	Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial	100%	30.000.000
			Jumlah pertemuan FKDM	2	4 Penyuluhan /ceramah ormas/LSM	-	Meningkatnya pemahaman tentang arti dan fungsi ormas		
			Jumlah pertemuan FPK	2	5 Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	-	1). Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan 2). Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	100%	112.280.000
			persentase terlaksanya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	6 Perayaan Hari-hari besar nasional	-			
					7 Pendidikan Bela Negara	-	Terlaaksananya Pelatihan kader Bela Negara	100%	100.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
					8 Operasional Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	- Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	100%	150.000.000	
					9 Bulan Bakti Bungkarso	- Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila	100%	345.787.800	
					10 Gerakan Revolusi Mental	- Tersusunnya rencana aksi	100%	655.787.800	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase terpenuhinya pelaksanaan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	100%	1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	- 1).Terpenuhinya pelaksanaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. 2). Terlaksananya sosialisasi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	100%	35.000.000	
		Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan	Persentase terjalannya hubungan antara pimpinan daerah untuk terciptanya keamanan daerah	100%	1 Operasional Kominda Kabupaten Karangasem	- Terjalannya hubungan kerjasama dengan para anggota Kominda guna memperlancar pelaksanaan Tugas komunitas Intelijen daerah	100%	900.000.000	
			Persentase jumlah gangguan keamanan yang ditindaklanjuti	70%	2 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem (FORKOPIMDA)	- Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan terjalannya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	100%	274.000.000	
					3 Operasional Forum Muspida	- Tercapainya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas Muspida di kab.karangasem			
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Upaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100%	1 Pengawasan Peredaran Gelap narkoba	- Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Karangasem	100%	75.000.000	
			Persentase bertambahnya kader penyuluh narkoba	90%	2 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	- Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba			
			Persentase terlaksananya penyuluhan peredaran gelap/penggunaan miras dan narkoba	100%	3 Operasional BNK	- Terlaksananya pengawasan peredaran narkoba			
					4 Pelatihan kader Penyuluh Narkoba	- Bertambahnya Kader Penyuluh Narkoba			

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8
					5 Penyuluh pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Mikol	- Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan mikol	100%	103.226.250	
					6 Penyuluh Pencegahan Praktek Prostitusi	- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi	100%	283.830.600	
					7 Pelatih Kader Penyuluh Pekat	- Terlaksananya kegiatan pelatihan kader penyuluh pekat bagi guru-guru di Kabupaten Karangasem	100%	312.943.150	
		Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	95%	1 Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	- 1). Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol. 2). Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Keuangan Parpol 3). Termonitornya Penggunaan Bantuan keuangan parpol	100%	63.000.000	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas, Lembaga dan Politik yang dilakukan	4kali	2 Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan	- 1). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengajuan Dana Hibah 2). Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Dana Hibah 3). Termonitornya Penggunaan bantuan dana hibah	100%	60.000.000	
			Persentase yang mendapatkan pembinaan Politik	90%	3 Tim Koordinasi dukungan Kelancaran pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur	- Terlaksananya Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur karangasem			
			Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	95%	4 Pembuatan Buku direktori politik, Ormas dan LSM	- Adanya buku tentang Direktori politik, Ormas dan LSM			
					5 Verifikasi persyaratan administrasi dana hibah oleh organisasi semi pemerintah dan LSM	- Terlaksananya kelengkapan persyaratan administrasi dana hibah			
					6 Tim Koordinasi dukungan Kelancaran Pemilu Legislatif Tahun 2014	- Terbentuknya tim koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014			
					7 Tim Koordinasi dukungan kelancaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	- Terbentuknya tim koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil presiden Tahun 2014			
					8 Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Gubernur dan wakil gubernur dan pemilu legislatif	- Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Gubernur dan wakil gubernur dan pemilu legislatif			

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				9 Tim Koordinasi dukungan kelancaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	- Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015		
				10 Fasilitasi Petugas Linmas Pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur	- Terfasilitasi Petugas Linmas Pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur		
				11 Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol	- Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol		
				12 Fasilitasi petugas Linmas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Karangsem	- Terciptanya keamanan dan ketertraman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014		
				13 Fasilitasi petugas Linmas pada Pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Karangsem	- Terciptanya keamanan dan ketertraman Pemilu Legislatif Tahun 2014		
				14 Fasilitas organisasi Kemasyarakatan	- 1). Terfasilitasinya pendataan organisasi kemasyarakatan di daerah 2). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan politik	100%	60.000.000
				15 Tim Koordinasi dukungan Kelancaran pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati	- Terwujudnya Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati		
				16 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	- 1). Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat 2). Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat	100%	160.000.000
				17 Forkomkon Parpol	- 1). Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi antara pemerintah dengan Partai Politik 2). Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan partai politik	100%	100.000.000
				18 Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah	- Terbentuknya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 2). Terlaksananya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 3). Termonitornya/Terpantaunya Organisasi Kemasyarakatan di daerah	100%	90.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8				
				19 Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	- 1). Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa 2). Meningkatnya Pemahaman Wawasan Politik Masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	100%	200.000.000				
				20 Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan pemilu legislatif	- Terwujudnya Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan pemilu legislatif						
JUMLAH		10 PROGRAM		75 KEGIATAN			6.219.950.600				
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
9	WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi yg tertangani	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	600 lembar	1	5.060.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	- Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	100 persen	2	55.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100 persen	3	25.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Persentase alat tulis kantor yang diadakan	100 persen	4	15.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Persentase barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100 persen	5	10.000.000	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100 persen	6	10.000.000	
					7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	7	45.000.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 jenis	8	15.000.000	
					9	Penerbitan Media Informasi Pemerintah Daerah	- terbitnya majalah informasi BPBD	140 exemplar	9	65.000.000	
					10	Publikasi Interaksi Media	- Terpublikasinya Informasi Kehumasan BPBD	48 kali	10	70.000.000	
					11	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	500 orang	11	37.800.000	
					12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	- Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	12	80.000.000	
					13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	78 OB	13	2.300.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					14	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan sad kahyangan	100 persen	14	30.000.000	
					15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	Frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 kali	15	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Persentase gedung/kantor yang dipelihara	100 persen	1	45.000.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit	2	50.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	persentase peralatan gedung/kantor yang dipelihara	100 persen	3	35.000.000	
					4	Penataan Halaman dan Taman Kantor	-	persentase halaman dan taman kantor yang dipelihara	100 persen	4	-	
					5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	5	-	
					6	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	-	volume gedung kantor yang direhab	100 persen	6	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	5 laporan	1	30.000.000	
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Jumlah laporan yang tersusun dan tepat waktu	8 laporan	2	25.000.000	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	100%	1		-			1		
					2	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Frekuensi perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	2	25.000.000	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	100%	1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	-	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang tersedia	100 persen	1	75.000.000	
					2	Pos Emergency Service Respond di Kabupaten Karangasem	-	Persentase penanganan kejadian bencana	100 persen	2	410.000.000	
					3	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	100 persen	3	50.000.000	
					4	Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB)	-	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	1 sekolah	4	40.000.000	
					5	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan	-	persentase logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersalurkan	100 persen	5	70.000.000	
					6	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	-	Jumlah dokumen evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihasilkan	10 Dokumen	6	40.000.000	
					7	Mitigasi Bencana	-	persentase penanggulangan bencana yang terlayani	100 persen	7	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					8	Operasional Tim Siaga Bencana	-	Persentase operasional tim siaga bencana yang terbayar	100 persen	8	55.000.000	
					9	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersumber dari rupiah murni	-	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	100 persen	9	-	
					10	Pengadaan Logistik di Pos Komando	-	persentase logistik yang dapat disalurkan untuk penanggulangan bencana	0 persen	10	-	
		Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Jumlah aparat penyelenggara penanggulangan bencana yang terdidik dan terlatih	110 Orang	1	Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana	-	Jumlah aparat penanggulangan bencana yang terlatih	30 orang	1	45.000.000	
					2	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana	-	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terlatih	30 orang	2	45.000.000	
					3	Pelatihan Penanggulangan Bencana	-	Jumlah anggota TRC yang terlatih	50 orang	3	45.000.000	
							-					
		Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat Terdidik dan terlatih Siaga Bencana	60 Orang	1	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	-	Jumlah masyarakat tangguh bencana yang terbentuk	60 orang	1	75.000.000	
		Program Peringatan Dini	Persentase peralatan peringatan dini pada daerah rawan bencana yang layak pakai dan berfungsi	100%	1	Pembangunan Sistem Peringatan Dini	-	Persentase peningkatan sistem peringatan dini bencana yang terbentuk	100 persen	1	75.000.000	
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase keterlibatan BPBD dalam Kemitraan pengurangan Bencana	100%	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kepemanduan Wisata Tirta	-	Persentase keterlibatan BPBD dalam Kemitraan pengurangan Bencana	100 persen	1	70.000.000	
JUMLAH		9 PROGRAM			40 KEGIATAN						4.067.860.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL												
10	WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat-menyurat	-	Prosentase Jasa Surat Menyurat	100 %	1	2.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Unit	2	80.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			
				3	Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berizin/ bersamsat	7 Unit Mobil 22 Sepeda Motor	3	17.000.000	
				4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya selama 12 bulan	3 Orang	4	55.200.000	
				5	Penyediaan alat tulis kantor	- Prosentase ATK yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	100 %	5	15.000.000	
				6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan foto copy yang bisa terpenuhi	12 bl	6	10.000.000	
				7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah alat listrik dan elektronik yang dapat terpenuhi	12 bl	7	4.000.000	
				8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	1 Paket	8	200.000.000	
				9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah surat kabar yang mampu tersedia selama 12 bulan	12 bl	9	4.000.000	
				10	Penyediaan makanan dan minuman rapat	- Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam rapat rutin selama 12 bulan	1000 Kotak	10	16.450.000	
				11	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasinke luar daerah yang dapat diikuti selama 12 bulan	100 %	11	125.000.000	
				12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	- Jumlah tenaga kontrak administrasi/teknis/keamanan yang terbayar gajinya selama 12 bulan	35 Or	12	554.400.000	
				13	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	- Jumlah canang, bebanten piodalan, purnama, tilem, sehari-hari dll yang mampu disediakan selama 12 bulan	12 bl	13	35.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Prosentase terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	100 %	14	25.000.000	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	-	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 2 unit	2 Unit	1	200.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan	7 Unit Mobil 22 Sepeda Motor	2	170.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan kantor yang dapat dipelihara selama 12 bulan sebanyak 10 AC, 14 komputer dan 11 laptop	35 Unit	2	15.000.000	
					3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	Jumlah bangunan gedung kantor direhab sedang/berat	1 Unit	3	400.000.000	
					3	Pembangunan Gedung Kantor	-	Terbangunnya Gedung Kantor	1 Unit	3	1.341.730.000	
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Tersusunnya laporan tahunan (LAKIP, LPPD, LKPJ dan sejenisnya) selama 12 bulan	100 %	1	40.000.000	
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Tersusunnya laporan Keuangan dan sejenisnya selama 12 bulan	100 %	2	50.000.000	
					3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelporan	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan sejenisnya selama 12 bulan	100 %	3	60.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase Fakir Miskin yang menerima pemberdayaan sosial	22%	1	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	-			1	71.580.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					2	Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan	-	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	100 %	2	349.331.000	
					3	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	-	Persentase penyaluran Rastra/raskin dikelurahan/desa	100 %	3	144.395.000	
		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial /terpenuhi perlindungan sosial	100%	1	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	-	Jumlah korban trafficking, korban bencana dan perindungan hukum fakir miskin yang ditangani	20 or	1	32.015.000	
					2	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	Jumlah bantuan bagi korban bencana ala/sosial pada saat tanggap cepat darurat pasca bencana serta TAGANA yang mendapatkan bimbingan sosial	255 KK	2	1.498.741.000	
					3	Kajian identifikasi dan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	Persentase tersedianya data PBI JKN, PMKS, dan PSKS yang akurat dan Valid	100 %	3	272.255.000	
					4	Pelayanan orang terlantar dan orang gangguan jiwa	-	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	100 Or	4	29.051.000	
					5	Keserasian sosial	-	Desa Yang mendapatkan bantuan kegiatan keserasian sosial	100 %	5	33.350.000	
		PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan kebutuhan dasarnya, perlindungan dan jaminan sosial	28%	1	Pembinaan dan penyantunan anak terlantar	-	Jumlah anak terlantar yang masih sekolah diluar panti yang mendapatkan pakaian dan perlatan sekolah serta jaminan sosial	90 Or	1	54.464.000	
		PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan mendapatkan jaminan sosial	22,50%	1	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	-	Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	10 Or	1	125.784.000	
					2	Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	-	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	10 Or	2	39.885.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					3	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	-	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial dan diberikan jaminan sosial	125 Or	3	143.535.000	
		PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni panti asuhan	100%	1	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	-	Jumlah penghuni panti yang mendapat bantuan permakanaan dan bantuan operasional kepada panti asuhan/LKSA	83 Or	1	173.277.000	
		PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Persentase tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	20%	1	Pembinaan dan rehabilitasi eks narapidana	-	Jumlah Eks. Narapidana yang ditangani	20 Or	1	36.220.000	
					2	Penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng)	-	Jumlah gepeng yang terjaring razia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diberikan pembinaan dan dipulangkan ketempat	100 Or	2	87.057.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANJUT USIA	Persentase Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dan jaminan sosial	22,20%	1	Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia	-	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan diberikan jaminan sosial	305 Or	1	197.553.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	persentase Kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan terampil	24,50%	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-	Jumlah Perusahaan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	200 Or	1	16.835.000	
					2	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	-	Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial	90 Or	2		
					3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	-	Jumlah SDM kesos yang mendapatkan bimbingan teknis	90 Or	3	306.018.000	
					4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	-	Jumlah orsos yang dibina	8 Orsos	4	36.580.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					5	Operasional K3S	-	Prosentase Koordinasi penyelenggaraan kesos	100 %	5	55.446.000	
					6	Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	Persentase kasus KDRT, pelecehan seksual dan pencurian yang tertangani	100 %	6	55.300.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	1	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	-	Persentase orang yang tertanam nilai - nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	100 %	1	269.956.000	
					2	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	100 %	2	50.000.000	
					3	Pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	-	Terselenggaranya Pelacakan Rute Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	10 Regu	3	491.937.000	
					4	Pemeliharaan monumen perjuangan/tonggak sejarah	-	Terpeliharanya monumen perjuangan/Tonggak sejarah	1 Monumen	4	28.935.000	
JUMLAH		12 PROGRAM			25 KEGIATAN						8.019.280.000	

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

11	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	Tersedianya jasa surat-menyurat	100 %	1	3.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	tersedianya jasa telepon, air dan listrik	36 bulan rekening	2	81.950.000	
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	3	121.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	4	19.800.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 % 5 15.000.000	
				6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat elektronik dan listrik	100 % 6 10.000.000	
				7	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Tersedianya peralatan rumah tangga	100 % 7 5.000.000	
				8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya koran, bacaan lain di kantor	100 % 8 5.400.000	
				9	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	100 % 9 8.000.000	
				10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 % 10 100.000.000	
				11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	- Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	100 % 11 295.996.000	
				12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	- Terlaksananya piodalan dan banten sehari-hari	100 % 12 30.000.000	
				13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 % 13 5.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	100 % 1 250.000.000
				2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor , penataan halaman kantor dan pemeliharaan jalan	100 % 2 30.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebeulair	100 %	3	40.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunya laporan tepat waktu	100%	1	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Tersusunya laporan tepat waktu	100 %	1	10.500.000	
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas total daerah		1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100 orang	1	374.680.000	
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	46%	2	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana BLK	-	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana BLK	100 %	2	30.000.000	
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	5	3	Penyiapan calon magang ke dalam negeri dan luar negeri	-	Jumlah calon magang yang mendapat pelatihan	20 orang	3	158.570.000	
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	20	4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Lembaga Kursus	-	Jumlah lembaga pelatihan/kursus mendapat pembinaan ()	9 Lembaga	4	40.000.000	
			Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		5	Pembinaan Tenaga Kerja Kelompok- Kelompok Usaha di Pedesaan/Perkotaan	-	Jumlah tenaga kerja produktif di pedesaan/perkotaan yang mendapat pelatihan	1 kelompok	5	100.000.000	
			Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	0,0025%	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja	-	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	50 orang	6	100.000.000	
			Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	99,31%								
			Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja									
			Rasio lulusan S1/S2/S3									

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	68%	1	Penyusunan informasi bursa kerja	-	Informasi lowongan kerja	100 %	1	61.000.000	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	112	2	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	-	Jumlah penganggur yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20 orang	2	236.600.000	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	132	3	Pendataan tenaga kerja asing	-	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ()	50 perusahaan	3	50.000.000	
			Angka partisipasi angkatan kerja	60%	4	Kegiatan Padat Karya	-	Terserapnya tenaga kerja di daerah pedesaan	132 orang	4	400.000.000	
			Tingkat pengangguran terbuka	0,76								
			Rasio penduduk yang bekerja	60%								
			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur									
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	1	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	100 %	1	78.400.000	
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	2	Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan	100 %	2	88.000.000	
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	13.000	3	Penetapan besaran upah minimum kabupaten	-	Penetapan besaran UMK	1 dokumen	3	115.000.000	
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	4	Pembinaan dalam rangka pembentukan LKS bipartit pada perusahaan	-	Jumlah LKS Bipartit yang dibina pada Perusahaan	5 lembaga	4	94.804.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					5	Pembinaan dalam rangka pembentukan SP/SB pada perusahaan	-	Jumlah SP/SB yang dibina pada Perusahaan	5 lembaga	5	94.000.000	
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Terlaksananya hari-hari besar nasional dan daerah	100 %	1	50.000.000	
		Transmigrasi Lokal	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang dibina	33KK	1	Transmigrasi Lokal	-	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang dibina	31 KK	1	210.000.000	
JUMLAH		8 PROGRAM			34 KEGIATAN						3.311.700.000	

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat yang terkirim	450 surat	1	2.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telepon, air, dan listrik yang terbayar	48 rekening bulan	2	40.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah orang bulan tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya	12 orang bulan	3	15.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	450 unit	4	11.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah barang cetakan yang terbayar	284 unit	5	7.000.000	
					6	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang terbayar	74 unit	6	3.000.000	
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar	12 rekening bulan	7	4.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah makanan dan minuman rapat rutin yang terbayar	360 kotak	8	9.000.000	
					9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	10 kali	9	150.000.000	
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya	144 orang bulan	10	130.000.000	
					11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar	30 paket bulan	11	45.000.000	
					12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	20 kali	12	15.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar	0	1	-	
					2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	2 paket	2	30.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	3	70.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	3 unit	4	80.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	18 unit	5	8.000.000	
					6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	6	500.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Tepat Waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu	27 laporan	1	20.000.000	
					2	Monitoring / Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	-	Jumlah monitoring kinerja SKPD yang terlaksana tepat waktu	24 monitoring	2	10.000.000	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase desa/kelurahan layak anak	45%	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Jumlah buku monitoring dan evaluasi yang tercetak	-	1	-	
			Persentase capaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	50%	2	Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Jumlah peserta sosialisasi yang mampu memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	2	-	
					3	Sosialisasi Kabupaten Layak Anak	-	Jumlah peserta sosialisasi yang mampu memahami KLA	-	3	-	
					4	Peningkatan Peran Anak sebagai Generasi Penerus Pembangunan	-	Jumlah kegiatan berorientasi anak yang terfasilitasi	4 kegiatan	4	20.000.000	
					5	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	-	Jumlah desa layak anak yang terbentuk	16 desa	5	160.000.000	
					6	Forum Anak Daerah dan Mimbar Anak	-	Jumlah anak sekolah yang berpartisipasi aktif dalam FAD dan MAD	40 orang	6	75.000.000	
					7	Pengembangan Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak	-	Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif	300 orang	7	36.000.000	
					8	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak	-	Jumlah APSAI yang terfasilitasi	-	8	-	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang responsive gender	20%	1	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	-	Jumlah perangkat desa yang teradvokasi PUG	-	1	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8	
			Indeks Pembangunan Gender	77,32	2	Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	Jumlah lembaga berbasis gender yang mampu diberdayakan	-	2	-
					3	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	Jumlah perangkat daerah yang mampu menerapkan anggaran responsif gender	-	3	0
					4	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	Jumlah lembaga/institusi yang memiliki data terpilah	-	4	0
					5	Evaluasi Pelaksanaan PUG	-	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 OPD	5	18.000.000
					6	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	-	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpilah	-	6	0
					7	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	-	Jumlah lembaga berbasis gender yang mampu diberdayakan	-	7	0
					8	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	-	Jumlah peserta workshop yang mampu memahami peran perempuan dalam pengambilan keputusan	75 orang	8	50.000.000
					9	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	-	Jumlah perangkat desa yang mampu menerapkan anggaran responsif gender	30 perangkat desa	9	85.000.000
					10	Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	Jumlah perempuan dan perangkat desa yang mampu memahami kesetaraan dan keadilan gender	320 orang	10	57.800.000
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	1	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang terfasilitasi	5 perayaan	1	50.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Persentase Cakupan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	1	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	-	Jumlah produk hukum tentang perlindungan perempuan dan anak yang tersusun	1 perbup	1	45.000.000	
			2. Persentase Cakupan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya	100%	2	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	-	Jumlah peserta TOT yang terlatih dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	4 orang	2	35.000.000	
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	3	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	-	Jumlah OPD yang teradvokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	10 desa	3	100.000.000	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	4	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	-	Jumlah OPD dengan data terpilah	10 desa	4	150.000.000	
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	5	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	-	Jumlah kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang terfasilitasi	9 kegiatan	5	175.000.000	
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	6	Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Eksploitasi	-	Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani sesuai SOP yang ditindaklanjuti	60 kasus	6	300.000.000	
			Rasio KDRT	0,018	7	Pengembangan Sistem Informasi Gender	-	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender	-	7	0	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	8	Pengembangan Sistem Informasi Khusus Anak	-	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data khusus anak	-	8	0	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8		
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	9	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	-	Jumlah P2TP2A yang dapat dikembangkan	-	9	0	
			Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%								
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	58,74%	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	-	Jumlah anggota organisasi perempuan yang mampu memahami pengelolaan administrasi organisasi	-	1	-	
			2. Indeks Pemberdayaan Gender	61,98	2	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	-	Jumlah pengusaha perempuan yang memahami pengelolaan manajemen usaha	280 orang	2	80.000.000	
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	26,92%	3	Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Kesejahteraan Sehat Sejahtera (P2WKSS)	-	Jumlah anggota kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun keluarga sehat sejahtera	-	3	0	
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	78,42	4	Peningkatan Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pembangunan	-	Jumlah organisasi Wanita (GOW) yang terfasilitasi	21 organisasi	4	100.000.000	
			Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	22,95	5	Peningkatan Peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam Pembangunan	-	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang terfasilitasi	100 orang	5	50.000.000	
					6	Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan	-	Jumlah anggota organisasi wanita yang berpartisipasi aktif	580 orang	6	330.000.000	
					7	Pembinaan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sehat Sejahtera (Pembinaan P2WKSS)	-	Jumlah ibu rumah tangga anggota kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun keluarga sehat sejahtera	50 orang	7	50.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
JUMLAH		8 PROGRAM			55 KEGIATAN			3.115.800.000		
PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN										
13	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PANGAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- pengiriman surat-surat dinas	1 paket	1	3.000.000
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- jasa komunikasi, air dan listrik dan jasa Internet selama 12 bulan	1 paket	2	41.982.000
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- kebersihan kantor dan pembayaran upah	1 paket	3	3.000.000
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- tersedianya alat tulis kantor	1 paket	4	14.000.000
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya barang cetak dan fotocopy	1 paket	5	3.000.000
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- tersedianyaKomponen instalasi listrik	1 paket	6	3.000.000
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- tersedianya bahan bacaan	1 paket	7	4.000.000
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	- tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat, makanan dan minuman lapangan	1 paket	8	19.000.000
					9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	9	47.000.000
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- terbayarnya upah waker, sopir dan petugas administrasi	1 paket	10	143.400.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					11	Penyediaan Biaya Canang, Bebaten Piodalan	-	terlaksananya upacara keagamaan di lingkungan kantor	1 paket	11	24.000.000	
					12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 paket	12	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Peralatan kantor	5 buah	1	23.000.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Pemeliharaan bangunan/gedung/pagar halaman/taman	1 tahun	2	13.600.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasi	1 tahun	3	79.798.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Terpeliharanya sarana komputer	1 tahun	4	12.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta laporan tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja	-	Tersusunnya laporan Capaian kinerja dan keuangan	1 paket	1	4.400.000	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketahanan pangan	100%	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	Tersediannya Data Cadangan Pangan dan penanganan kerawanan pangan	1 laporan	1	29.425.000	
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama Setara Beras	100%			-	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Desa Mandiri Pangan 6 Desa	90%			
			Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,20%			-	Terlaksananya Pelatihan Desa Mandiri Pangan 9 Desa, 60 orang	60 orang			
			Persentase Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	100%	2	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan	-	Terlaksananya pembinaan Kelompok Ketahanan Pangan 42 kelompok	42 kelompok	2	46.575.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8
			Persentase Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	100%			-	Terlaksananya Pelatihan Rumah Pangan Lestari 30 orang	30 orang		
			Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	95,00%			-	Terlaksananya Bimtek Konsumsi Pangan B2SA 30 orang	30 orang		
			Persentase Keamanan Pangan Segar (Uji Lab)	100%			-	Terlaksananya Demplot Rumah Pangan Lestari 10 lokasi	10 lokasi		
			Jumlah Kelompok Wanita yang melaksanakan Rumah Pangan Lestari (RPL)	52			-	Terlaksananya Lomba Ketahanan Pangan 10 lokasi	10 lokasi		
			Ketersediaan energi dan protein perkapita :	2.750 kkal/kap/hr			-	Terlaksananya Analisis PPh Konsumsi	94,60%		
			- energi								
			- protein	68 gr/kap/hr	3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-	Terlaksananya Pembinaan Penganekaragaman Pangan Alternatif	1 paket	3	28.425.000
			Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	8 lokasi			-	Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	1 paket		
			jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan (hasil analisis SKPG)	1 rekomendasi			-	Terlaksananya Pelatihan Penganekaragaman Pangan Alternatif 30 orang	30 orang		
							-	Terlaksananya pengawasan pangan segar	100%		
							-	Terlaksananya media informasi keamanan pangan	1 paket		
					4	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	-	Terlaksananya Penyuluhan sumber Pangan Alternatif	8 kecamatan	4	-

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
							-	Terlaksananya Bintek Sumber Pangan Alternatif 60 orang	60 orang			
					5	Pengembangan Ketersediaan Pangan	-	Terlaksananya Pelatihan Lumbung Pangan Desa, 9 kelompok 30 orang	30 orang	5	1.145.575.000	
							-	Terlaksananya pembinaan Lumbung Pangan Desa, 9 Desa	88,89 %			
							-	Terlaksananya Demplot Ketersediaan Pangan Lokal : Palawija, Hortikultur dan perikanan	1 paket			
							-	Tersediannya Data PPH Ketersediaan	94 %			
							-	Persentase peningkatan Pangan Utama Setara Beras	100%			
							-	Tersediannya Cadangan Pangan Daerah (sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2020) minimal sebesar 100ton beras x Rp. 11.000				
		Program Pengembangan Wawasan Nusantara	Persentase pelaksanaan hari besar nasional dan daerah	100%	6	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	-	Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional	1 paket	6	11.000.000	
JUMLAH		5 PROGRAM				23 KEGIATAN					1.709.180.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
14	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Tersediannya jasa surat menyurat/Persentase penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1	8.500.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	-	Terbayarnya rekening listrik, air dan telpun/ Persentase pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	2	100.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			
				3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terurusnya surat perijinan kendaraan dinas /operasional / Persentase pengurusan ijin kendaraan dinas /operasional	13 unit	3	100.000.000	
				4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah alat tulis kantor yang tersedia / persentasepenyediaan alat tulis kantor	12 bulan	4	44.576.000	
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia / Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12 bulan	5	28.227.000	
				6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen listrik yang tersedia / Persentase komponen listrik yang disediakan	12 bulan	6	15.000.000	
				7	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia / Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan	22 jenis	7	7.335.900	
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah bahan bacaan yang tersedia / Persentase bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	8	12.000.000	
				9	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah makanan dan minuman yang tersedia / Persentase makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	9	45.108.000	
				10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Rapat Kordinasi ke luar daerah / Persentase rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	10	225.000.000	
				11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- Terbayarnya jasa /upah tenaga pendukung administrasi/ teknis /keamanan/sopir / Persentase terbayarnya jasa /upah tenaga pendukung administrasi/ teknis /keamanan/sopir	12 bulan	11	459.752.000	
				12	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	- Jumlah Upacara keagamaan yang dilaksanakan / Persentase upacara keagamaan yang dilaksanakan	12 Bulan	12	50.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
					13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan / Persentase pelaksanaan rapat koordinasi	12 Bulan	13	40.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang tersedia / Persentase perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Paket	1	82.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor / Persentase terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	2	50.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional / Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	3	265.000.000	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor / Persentase pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	4	25.000.000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta laporan tepat waktu	100%	1	Kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	-	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah / Persentase terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	12 Bulan	1	16.000.000	
					2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah / Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	12 bulan	2	80.000.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelola persampahan terbina dan terawasi	100%	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang diadakan / Persentase prasarana dan sarana persampahan yang diadakan	1 paket	1	1.668.903.700	
			Jumlah pengelola persampahan tersosialisasi	58 Unit	2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-	Terlaksananya operasional kebersihan	12 bulan	2	5.914.731.700	
			Sarana dan prasarana persampahan yang tersedia		3	Pemungutan retribusi persampahan	-	Terlaksananya pemungutan retribusi persampahan 19 titik obyek retribusi	12 bulan	3	100.320.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Jumlah kelompok pengelola persampahan diajak kerjasama	15 kelompok	4	Pelayanan angkutan persampahan	-	Terlayannya angkutan persampahan/ kebersihan di 16 titik	12 bulan	4	1.700.000.000	
			Operasional sarana dan prasarana persampahan yang ditingkatkan dan dipelihara	34 km	5	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Sampah	-	Terkelolanya sampah di Kabupaten Karangasem	12 bulan	5	1.025.000.000	
			Retribusi persampahan dipungut	1 paket								
			Jumlah Angkutan persampahan	68 unit								
			Pengelolaan akhir sampah yg ditingkatkan	48.000m3								
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	20 titik	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	-	Terlaksananya penilaian kota sehat adipura / Terwujudnya pengharagaan bidang kebersihan kota amlapura	1 Paket	1	153.971.100	
			Jumlah dokumen kerusakan lingkungan pasca tambang tersusun	1 dokumen	2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	Jumlah titik kualitas lingkungan / Persentase titik pantau kualitas lingkungan	20 Titik	2	233.078.000	
			Kota sehat/adipura yg dinilai	1 paket	3	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program DSL / Kelompok Masyarakat mengikuti program DSL	8 Kelompok	3	138.974.100	
			Desa sadar lingkungan yg dibina	8 kelompok	4	Pemantauan Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup	-	Tersusunya buku data kerusakan lingkungan / Persentase data kerusakan lingkungan yang tersusun	1 Dokumen	4	29.327.000	
			Laboratorium lingkungan yang ditingkatkan	2 paket	5	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	-	Jumlah pemeliharaan kalibrasi sarpras peralatan laboratorium lingkungan hidup dan reagen bahan kimia / Persentase pemeliharaan kalibrasi sarpras peralatan laboratorium lingkungan hidup dan reagen bahan kimia	2 Paket	5	175.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar nasional	2	1 Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	- Frekwensi pelaksanaan hari besar nasional dan hari besar lainnya / Persentase perayaan besar nasional dan hari besar lainnya	2 kali	1	50.000.000	
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH terawasi dan dikendalikan	10 lokasi	1 Pengawasan dan pengendalian RTH	- Tercapainya pengawasan dan pengendalian RTH	10 lokasi	1	17.253.000	
			RTH yang ditata dan dipelihara	9 lokasi	2 Penataan dan pemeliharaan RTH	- Tercapainya penataan dan pemeliharaan RTH	9 lokasi	2	2.673.289.000	
			Jumlah angkutan perindangan dan Pertamanan yg memberikan layanan	5 unit	3 Pelayanan angkutan perindangan dan pertamanan	- Terlaksananya pelayanan angkutan dan pertamanan	5 unit	3	1.619.586.000	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	SDA yang diawasi dan dikendalikan	3 titik	1 Pengendalian dampak perubahan iklim	- Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi program kampung iklim / Jumlah desa yang mengikuti program kampung iklim	2 Desa	1	130.254.000	
			Dampak perubahan iklim yang bisa dikendalikan	2 desa	2 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	- Jumlah titik sumber mata air yang dirahabilitasi dengan menanam pohon / Persentase sumber mata air yang dirahabilitasi dengan menanam pohon	3 Titik	2	239.038.000	
			Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 paket		- Jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang dibuat	66 bh			
					3 Hari Lingkungan Hidup Sedunia	- Terlaksananya perayaan Hari Lingkungan Hidup 2 paket	2 Paket	3	59.318.000	
		Program Peningkatan Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang tersusun		1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	- Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang tersusun 1 dok.	1 Dokumen	1	196.150.000	
			Persentase penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan hidup			- Tersusunnya buku laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)				
			Persentase kasus dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti		2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	- Persentase jumlah pemohon dokumen lingkungan terselesaikan / Persentase penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan terselesaikan	100%	2	45.100.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang menaati dokumen lingkungan	3 Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	- Persentase jumlah dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaporkan / Persentase penyelesaian dugaan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan	100% 3 33.982.000	
				4 Pengawasan Peta dan Dokumen Lingkungan	- Jumlah unit usaha dan atau kegiatan terbina terawasi dalam penataan penyusunan dokumen lingkungan / Persentase unit usaha dan atau kegiatan yang menaati penyusunan dokumen lingkungan	100 Unit 4 58.181.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terawasi dan memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3	25 Unit 1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Jumlah unit usaha dan atau kegiatan yang mengelola B3 dan berpotensi menghasilkan limbah B3 yang terawasi dan terbina / Terbina dan terawasinya unit usaha dan atau kegiatan yang mengelola B3 dan berpotensi menghasilkan limbah B3	25 Unit 1 15.177.055.400	
		Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	8 Kelompok 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	- Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata TK, Kabupaten, Propensi, Nasional dan mandiri / Persentase jumlah sekolah yang menerima penghargaan adiwiyata Tk. Kabupaten, Provinsi, Nasional dan mandiri	27 Sekolah 1 185.668.000	
			Kota sehat/adipura yang dinilai	1 paket			
			Desa sadar lingkungan yang dibina	8 Kelompok			
JUMLAH		12 PROGRAM		42 KEGIATAN		33.277.678.900	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8					
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
15	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Persentase tersedianya Belanja Habis Pakai (Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya)	100%	1	3.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Persentase terselenggaranya Belanja Jasa Kantor (Telepon, internet, air dan listrik)	100%	2	130.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Persentase tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai dan kebersihan kantor	100%	3	11.645.500	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Persentase tersedianya belanja alat-alat tulis kantor	100%	4	31.349.800	
					5	Penyediaan Belanja Cetakan dan Penggandaan	-	Persentase tersedianya belanja cetak dan penggandaan	100%	5	15.568.000	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	-	Persentase Tersedianya Belanja Alat-Alat Listrik dan Elektronik	100%	6	7.384.700	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Persentase Tersedianya Belanja Surat Kabar & Majalah (Bali Post dan Nusa)	100%	7	10.000.000	
					8	Penyediaan Makan dan Minuman	-	Persentase Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas	100%	8	27.800.000	
					9	Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	-	Persentase Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	9	10.000.000	
					10	Penyediaan jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Keamanan	-	Persentase Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non P N S (Adm Keu, Malam dan Harian)	100%	10	1.816.800.000	
					11	Penyediaan biaya canang banten piodalan	-	Persentase Tersedianya Belanja untuk Sesajen dan Piodalan	100%	11	50.000.000	
					12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Persentase Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	12	15.000.000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	Persentase Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	1	3.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	2	174.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	3	14.600.000	
					4	Pengelolaan dan Penataan arsip	-	Persentase tertalnya arsip administrasi perkantoran	100%	4	18.048.950	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja	-	Persentase tersusunnya buku perencanaan dan laporan kinerja	100%	1	54.762.400	
					2	Penyusunan laporan keuangan	-	Persentase tersusunnya buku laporan keuangan	100%	2	13.178.900	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan Kartu Keluarga	99%	1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	-	Persentase terbangunnya sistem administrasi kependudukan	100%	1	55.931.000	
			Persentase penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	90%	2	Penyusunan profil kependudukan	-	Persentase tersusunnya profil kependudukan yang menunjukkan laju perkembangan penduduk Kabupaten Karangasem (Frofil Perkembangan Penduduk)	100%	2	0	
			Persentase penerbitan KTP-el	95%	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Nilai IKM	98%	3	8.521.200	
			Persentase Penerbitan Akta Catatan Sipil Yang meliputi :		4	Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat	-	Persentase penyampaian informasi dan fasilitasi mengenai pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat (Radio, spanduk, brosur)	100%	4	12.883.500	
			Persentase penerbitan Akta Kelahiran	95%	5	Inovasi Pelayanan administrasi Kependudukan	-	persentase pelaksanaan Inovasi Pelayanan administrasi Kependudukan	100%	5	9.681.800	
			Persentase penerbitan Akta Perkawinan	95%	6	Pendataan penduduk	-	Persentase tersusunnya laporan valid tentang data kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan penduduk Kabupaten Karangasem (LAMPID)	100%	6	8.700.700	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
			Persentase penerbitan Akta Kematian	95%	7	Pelayanan Administrasi Perpindahan Penduduk	-	Persentase penerbitan administrasi Surat Pindah Datang penduduk.	100%	7	10.722.700	
			Persentase penerbitan Akta Perceraian	5%	8	Kerjasama tentang Pemanfaatan Data dengan Instansi terkait	-	Persentase pelaksanaan Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi terkait	100%	8	10.851.800	
			Persentase Validasi Data Penduduk Pendetang	85%	9	Peningkatan tatakelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan	-	Jumlah SDM yang di bina dalam upaya penguasaan teknologi informasi kependudukan	115	9	20.241.100	
			Persentase Validasi Data Base Kependudukan	100%	10	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP-el, KTS, KIA) melalui kegiatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik	100%	10	292.781.500	
			Cakupan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat untuk pemenuhan syarat pelayanan	100%	11	Pelayanan Goes to banjar akta pencatatan sipil	-	Persentase penerbitan akta akta pencatatan sipil melalui kegiatan keliling ke banjar-banjar	70%	11	27.458.800	
			Cakupan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat Desa / banjar (Goes to Banjar)	95%	12	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	Persentase penerbitan akta akta pencatatan sipil melalui kegiatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik	100%	12	55.418.950	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5%	13	Penataan warkah capil	-	Persentase penataan warkah catatan sipil	100%	13	41.758.400	
					14	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	Persentase Terlaksananya Sosialisasi adminduk di 8 kecamatan	100%	14	48.148.400	
					15	Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	Persentase meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan	90%	15	199.719.600	
					16	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	-	Persentase tersedianya bahan penerbitan dokumen kependudukan	90%	16	1.269.698.000	
					17	Pengelolaan sistem informasi kependudukan SIAK dan / atau Pendayagunaan data kependudukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan	-	Persentase meningkatnya pengelolaan SIAK dan pendayagunaan data kependudukan	100%	17	6.910.000	
					18	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan	-	Persentase meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN disdukcapil	100%	18	298.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari besar Nasional dan Daerah	-	Persentase penyediaan materi pameran dan jasa dekorasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan hari-hari besar daerah yang menyangkut	100%	1	50.000.000	
JUMLAH		5 PROGRAM			37 KEGIATAN					4.833.565.700		
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
16	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah surat masuk dan keluar	2000 surat	1	8.520.000,00	
					2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	Jumlah rekening telpon,air dan listrik	36 rekening bulan	2	42.530.000,00	
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	-	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	3	133.130.000,00	
					4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Terlksedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	4	21.280.000,00	
					5	Penyediaan alat tulis kantor	-	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	5	25.590.000,00	
					6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6	16.980.000,00	
					7	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	7	8.100.000,00	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi PNS	12 Bulan	8	11.580.000,00	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	9	24.310.000,00	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	10	115.760.000,00	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	12 Bulan	11	243.100.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Terlaksananya upacara keagamaan	12 Bulan	12	18.230.000,00	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	13	25.470.000,00	
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	1 unit	1	25.000.000,00	
					2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	2	20.000.000,00	
					3	Pengadaan meubelair	-	Jumlah meubelair yang tersedia	1 paket	3	20.000.000,00	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	4	27.000.000,00	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	5	15.000.000,00	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	13 dokumen	1	4.500.000,00	
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	13 dokumen	2	3.380.000,00	
		Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan keberdayaan masyarakat perdesaan	95%	1	Pembinaan pengembangan teknologi tepat guna (TTG)	-	Jumlah kelompok perajin yang dibina TTG	8 kelompok	1	295.000.000,00	
					2	Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa dan kelurahan	-	Jumlah kelompok LPM yang dibina	86 kelompok	2	165.000.000,00	
					3	Pembinaan desa siaga aktif	-	Jumlah kader desa siaga aktif yang dibina	32 orang	3	110.000.000,00	
		Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Persentase penumbuhan lembaga ekonomi masyarakat di desa	95%	1	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Bumdes	-	Jumlah Orang yang dilatih manajemen Bumdes	38 orang	1	165.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8		
					2	Pembinaan pasar desa	-	Jumlah kelompok pengelola pasar desa yang dibina	8 Pasar Desa	2	218.000.000,00	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa	95%	1	Penilaian lomba desa	-	Jumlah desa yang dibina dan dinilai dalam lomba desa	8 Desa/1 Kelurahan	1	124.330.000,00	
					2	Monitoring dan evaluasi kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP)	-	Jumlah kelompok yang di monitoring simpan pinjam khusus perempuan (SPP)	8 UPK	2	60.150.000,00	
					3	Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	-	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD	1 desa	3	95.000.000,00	
					4	Penyusunan propil desa	-	Jumlah desa yang menginfut Propil Desa dan Kelurahan	75 desa	4	77.180.000,00	
					5	Pembinaan monitoring dan evaluasi gerbang sadu	-	Jumlah kelompok Bumdes yang dibina dan di Monev	74 desa	5	64.000.000,00	
					6	Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	-	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan BBGRM	75 Desa/3 Kel.	6	71.660.000,00	
					7	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	-	Jumlah kelompok yang dibina Pamsimas	8 kelompok	7	112.460.000,00	
					8	Peningkatan Keswadayaan Masyarakat	-	Jumlah buku yang dicetak mengenai data swadaya masyarakat	20 buku	8	115.070.000,00	
					9	Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat	-	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	156 orang	9	60.150.000,00	
		Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan hari-hari besar nasional dan Daerah	-	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	30.390.000,00	
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah orang yang dibintek dan pelatihan kapasitas aparatur pemerintahan desa	225 orang	1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	Jumlah orang yang dibintek dan pelatihan kapasitas aparatur pemerintahan desa	225 orang	1	1.169.750.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase meningkatnya peran perempuan dalam membangun desa	95%	1	Peningkatan kualitas kader posyandu	-	Jumlah pembinaan administrasi kelompok posyandu	8 kelompok	1	150.680.000,00	
					2	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal Posyandu	-	Terbentuknya pokjanal posyandu tingkat kabupaten	8 kelompok	2	150.000.000,00	
					3	Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan TP PKK	-	Terbinanya TP PKK Kab.Karangasem	1 TP PKK	3	150.000.000,00	
					4	Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	-	Jumlah kelompok PKK yang melaksanakan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	9 Klp.PKK	4	270.000.000,00	
					5	Pembinaan 10 Program pokok PKK	-	Jumlah Kelompok PKK yang dibina	8 kelompok	5	250.000.000,00	
					6	Jambore Kader PKK	-	Jumlah Kelompok PKK yang ikut berpartisipasi	8 kelompok	6	250.000.000,00	
					7	Penataan Tertib Administrasi PKK	-	Jumlah kelompok PKK yang dibina administrasinya	8 Klp.PKK Kecamatan	7	200.000.000,00	
					8	Pelatihan Kader PKK	-	Jumlah kader PKK yang terlatih	25 orang	8	200.000.000,00	
		Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	95%	1	Fasilitasi pembinaan alokasi dana desa (ADD)	-	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan ADD	75 desa	1	120.000.000,00	
					2	Pembinaan administrasi keuangan desa	-	Jumlah desa yang dibina administrasi keuangan desa	75 desa	2	145.000.000,00	
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Jumlah perbekel yang dipilih dan dilantik	51 Orang	1	Pemilihan dan pelantikan perbekel	-	Jumlah perbekel yang dipilih dan dilantik	51 orang	1	1.128.000.000,00	
		Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan desa yang di bentuk/dibina	2 Desa	1	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	-	Jumlah kawasan Desa yang dibentuk/dibina	2 desa	1	125.387.371,56	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Penataan peraturan perundang undangan	Jumlah desa yang terfasilitasi sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa	75 Desa	1	Fasilitasi peraturan tentang pemerintahan desa	-	Jumlah desa yang terfasilitasi sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa	75 desa	1	125.000.000,00	
			Jumlah perda tentang kerjasama desa yang tersusun	1 Perda	2	Penyusunan Perda tentang Kerjasama Desa	-	Jumlah Perda tentang kerjasama desa yang tersusun	1 perda	2	20.000.000,00	
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah desa/br.dinas /lingkungan yang di mekarkan	3 Desa	1	Fasilitasi pembinaan dan pemekaran desa/kelurahan	-	Jumlah desa/br.dinas/lingkungan yang di mekarkan	3 desa	1	175.000.000,00	
JUMLAH		14 PROGRAM			51 KEGIATAN						7.201.667.372	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
17	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan yang terfasilitasi : 4 perayaan		1	27.560.000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat yang terkirim tepat waktu : 330 surat	330 surat	2	1.500.000	
					3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar : 36 rekening bulan	36 rekening bulan	3	30.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar : 2 orang, 72 unit	2 orang, 72 unit	4	24.280.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar : 572 unit	572 unit	5	20.000.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah foto copy dan cetak yang terbayar : 10.000 lembar, 12 buku	10.000 lembar, 12 buku	6	5.000.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang terbayar : 56 komponen	56 komponen	7	2.000.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar : 36 rekening bulan	36 rekening bulan	8	3.960.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terbayar : 800 kotak	800 kotak	9	16.000.000	
					10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi : 10 kali	10 kali	10	80.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan	-	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya : 43 orang	43 orang	11	520.800.000	
					12	Penyediaan Biaya Canang Bebanten Piodalan	-	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar : 25 paket bulan	25 paket bulan	12	25.270.000	
					13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi : 30 kali	30 kali	13	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar : 3 unit	3 unit	1	29.900.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Jumlah bahan baku bangunan yang terbayar : 4 unit	4 unit	2	15.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 58 unit	58 unit	3	55.250.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara : 10 unit	10 unit	4	10.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu : 10 laporan	10 laporan	1	10.440.000	
					2	Kegiatan Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	-	Jumlah monitoring kinerja SKPD yang terlaksana tepat waktu : 8 monitoring	8 monitoring	2	9.240.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1	Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	-	Jumlah orang untuk penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional yang dinilai : 30 PKB	30 PKB	1	5.790.000	
		Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	80,09%	2	Pengadaan sarana dan prasarana keluarga berencana	-	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	8 Upt	2	850.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Angka Kelahiran Total (TFR=Total Fertility Rate)	2,12	3	Belanja Operasional Keluarga Berencana	-	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	8 balai penyuluhan	3	1.970.790.000	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	74,51%	1	Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB	-	Terlayannya pemasangan kontrasepsi terhadap 150 akseptor	150 akseptor	1	54.190.000	
			Cakupan PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6,45	2	Pelayanan Kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK	-	Terlayannya pelayanan kotrasepsi KB terhadap 150 akseptor	150 akseptor	2	50.000.000	
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	89,00%	1	Pelatihan dan Pembinaan Administrasi kader Kelompok UPPKS	-	Terbinanya Kader dan Kelompok UPPKS sebanyak 100 orang	100 orang	1	40.000.000	
					2	Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)	-	Meningkatnya Pemahaman Sub PPKBD para kelian banjar (tentang program KB) : 72 orang	72 orang	2	22.690.000	
					3	Orientasi Bina Keluarga Balita di Kecamatan	-	Terlatihnya Keluarga Balita di 8 (delapan) Kecamatan	8 (delapan) Kecamatan	3	50.000.000	
					4	Sosialisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	Meningkatnya Kesertaan KB dalam mensukseskan Program Nasional : 125 peserta	125 peserta	4	30.000.000	
					5	Penggarapan Calon Akseptor KB melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	-	Meningkatnya Calon Akseptor KB dalam Rangka TKBK Melalui Mobil Penerangan KB : 726 banjar dinas	726 banjar dinas	5	25.000.000	
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	44,56%	1	Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi Keluarga Remaja dan Keluarga Sebaya	-	Meningkatnya pemahaman kelompok remaja dan keluarga sebaya tentang PIK-Remaja dari 90% menjadi 100% : 200 orang	200 orang	1	20.000.000	
			Angka kelahiran pada remaja 15-19btahun (ASFR=Age Spesifik Fertility Rate)	30 per 1000	2	Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	-	meningkatnya kategori PIK Remaja dari kategori tumbuh menjadi kategori tegak : 25 kelompok	25 kelompok	2	42.700.000	
		Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	38,84%	1	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	-	Terbinanya Kelompok Bina Keluarga Lansia sebanyak 42 kelompok	42 kelompok	1	22.050.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Persentase cakupan PUS anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	90,50%								
		Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - Padu	Persentase Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	100%	2	Pemutahiran Data Keluarga	-	Terdatanya 8 K/O Potensi Wilayah di 8 Kecamatan, Terdatanya 70 K/O PKB/PLKB di 8 Kecamatan, Terdatanya 78 K/O PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Sub PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Kelompok BKB, Terdatanya 53 K/O Kelompok BKR, Terdatanya 43 K/O Kelompok BKL, Terdatanya 130 K/O Kelompok UPPKS, Terdatanya 23 K/O Kelompok PIK-R, Terkirimnya Semua Data K/O ke BKKBN. : 726 banjar dinas	726 banjar dinas	2	40.000.000	
			Cakupan PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,66	3	Pengembangan Kampung KB	-	Terlaksananya Kegiatan dan Program-program Kampung KB : 8 kampung KB	8 kampung KB	3	42.690.000	
JUMLAH		11 PROGRAM			33 KEGIATAN						4.162.100.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN												
18	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat menyurat yang terkirim	1300 lbr	1	1.800.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	36 Bln/ rekening	2	6.302.400.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	3	5.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	22 paket	4	20.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan	8 paket	5	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	8 paket	6	5.000.000	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	1440 buah	7	6.000.000	
					8	Penyediaan makanan dan minuman	-	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	3000 bks	8	70.000.000	
					9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	9	110.000.000	
					10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Tersedianya Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	564 OB	10	803.800.000	
					11	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor Perhubungan	12 bulan	11	72.000.000	
					12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12	40.000.000	
					13	Penyediaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)	-	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan	1 lokasi	13	3.500.000	
					14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	-	Terbayarnya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	1440 OB	14	40.500.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pembangunan gedung kantor	-	Jumlah Gedung Yang dibangun	1 unit	1	100.000.000	
			Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100%	2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah Kendaraan roda 2, roda 4, dan mobil derek yang diadakan	1 unit	2	20.000.000	
					3	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Buah	3	50.000.000	
					4	Pengadaan meubelair	-	Jumlah meubelair yang diadakan	20 Buah	4	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit	5	20.000.000	
					6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah bulan Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	12 bulan	6	90.000.000	
					7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	13 Buah	7	20.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Pelaporan yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisaa rrealisasi kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan yang disusun	3 laporan	1	5.800.000	
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	-	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	2	4.200.000	
					3	Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan	-	Jumlah laporan Keuangan Bulanan yang disusun	96 laporan	3	14.000.000	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	30%	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan/Dermaga	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan/Dermaga yang dibangun	1 lokasi	1	110.000.000	
			Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang dalam kondisi mantap	300 titik	2	Monitoring fasilitas Perlengkapan jalan	-	Jumlah Laporan yang disusun	25 buku	2	20.000.000	
					3	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	Jumlah LPJU yang dipasang	300 titik	3	1.000.000.000	
					4	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	-	Jumlah Meterisasi LPJU yang dipasang	40 titik	4	200.000.000	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	95%	1	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Jumlah Prasarana Balai pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	1 unit	1	350.000.000	
					2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	jumlah Terminal yang dipelihara	1 lokasi	2	200.000.000	
					3	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	-	Jumlah LPJU yang dipelihara	900 titik	3	1.000.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					4	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	-	jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	100 titik	4	125.000.000	
					5	Rehabilitasi/pemeliharaan Tempat Parkir	-	Jumlah Tempat Parkir yang dipelihara	1 lokasi	5	180.000.000	
					6	Pemeliharaan Halte	-	jumlah Halte yang dipelihara	1 unit	6	50.000.000	
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Rata-rata kecepatan kendaraan bermotor didalam kota	40 Km/jam	1	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	-	Jumlah sekolah yang dilayani angkutan gratis siswa	2 sekolah	1	2.540.000.000	
			Persentase layanan angkutan darat	25%	2	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	-	jumlah awak angkutan umum yang meningkat kemampuannya tentang tertib berlalu lintas	30 orang	2	110.000.000	
			Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal	148.404 orang	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah Laporan yang disusun	10 buku	3	40.000.000	
					4	Monitoring dan fasilitasi Sarana dan Prasarana kepelabuhan	-	Jumlah Laporan yang disusun	12 buku	4	155.000.000	
					5	Peningkatan pemungutan retribusi parkir bidang perhubungan	-	Jumlah tempat parkir yang tertata	45 titik	5	265.000.000	
		Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun	1 lokasi	1	Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal	-	jumlah halte yang dibangun	1 unit	1	100.000.000	
			Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4 lokasi	2	Pembangunan Terminal dan Tempat Parkir	-	Jumlah terminal dan tempat parkir yang dibangun	1 lokasi	2	505.000.000	
		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pemasangan rambu-rambu	2,29%	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	-	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	300 titik	1	355.000.000	
			Jumlah Pelanggaran Angkutan umum di jalan	200 kasus	2	Pengadaan Marka Jalan	-	Jumlah marka jalan yang dipasang	900 meter	2	210.000.000	
					3	Pengadaan pagar pengaman jalan	-	Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	125 meter	3	210.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					4	Peningkatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas	-	Jumlah pengawasan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	12 bulan	4	750.000.000	
					5	Pengadaan Zebra Cross dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	-	jumlah Zebra Cross dan zona selamat sekolah yang dipasang	2 titik	5	320.000.000	
					6	Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas	-	jumlah pelajar yang memahami tentang keselamatan berlalu lintas	30 orang	6	100.000.000	
					7	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	Jumlah Laporan yang dihasilkan	4 laporan	7	40.000.000	
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam kedaan laik jalan	100%	1	Pengadaan alat penguji kendaraan bermotor	-	Jumlah Alat pengujian Kendaraan bermotor yang diadakan	4 paket	1	392.000.000	
					2	Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor	-	Jumlah kendaraan yang laik jalan	7793 unit	2	275.000.000	
		Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan	100%	1	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	-	Jumlah peringatan hari-hari besar dan daerah yang dilaksanakan	3 kali	1	39.000.000	
JUMLAH		10 PROGRAM			51 KEGIATAN					17.485.000.000		
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
19	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12	1	1.500.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik	12	2	421.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Terlaksananya penataan kebersihan kantor	12	3	7.500.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor	12	4	15.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor	12	5	8.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	-	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai	12	6	5.000.000	
					7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	7	25.000.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan	12	8	6.000.000	
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu	12	9	15.000.000	
					10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	10	80.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	-	Terpenuhinya kelancaran administrasi/teknis/keamanan	12	11	270.000.000	
					12	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Terlaksananya upacara agama	12	12	35.000.000	
					13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-	Terpenuhinya peningkatan kinerja melalui konsultasi dalam daerah	12	13	18.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana perkantoran	100%	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman	12	1	49.000.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	-	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik	12	2	90.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik	12	3	30.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Mebeleur	-	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik	12	4	4.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman	-	Terpenuhinya pemeliharaan taman kantor	12	5	4.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya kinerja tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	12	1	8.000.000	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi secara memadai	100%	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	Jumlah OPD dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi	12	1	1.000.000.000	
			Jumlah kunjungan pemberian layanan internet secara edukatif ke kecamatan	30	2	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	-	Jumlah kunjungan layanan internet lokasi di kecamatan	12	2	750.000.000	
			Persentase terpenuhinya kapasitas layanan informasi dan komunikasi pada kelompok informasi masyarakat sebagai mitra komunikasi pemerintah daerah	100	3	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Dengan Lembaga komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah	-	Jumlah KIM terbina	12	3	500.000.000	
			Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap OPD	100%	4	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	-	Terpenuhinya pemeliharaan website OPD	12	4	150.000.000	
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%								
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	69,50%								
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	80,95%								
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	47,20%								

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)	100%	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	Tersedianya data informasi statistik daerah	12	1	150.000.000	
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih memanfaatkan IT sebagai media informasi yang cepat, efektif, dan edukatif	40,00	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	Jumlah SDM terlatih IT	12	1	700.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	-	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	12	1	8.000.000	
		Program Kerjasama Informasi Dengan Mas media	Persentase terpenuhinya publikasi data statistik pemerintah daerah	100%	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	Terpenuhinya tindak lanjut terhadap pengaduan layanan informasi publik	12	1	100.000.000	
			Persentase layanan pengaduan on line dari masyarakat kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dengan akuntabel dan tepat waktu	100%	2	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran dan Dialog Publik.	-	Terpenuhinya penyebarluasan informasi publik secara akuntabel	12	2	700.000.000	
			Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat	100%	3	Peningkatan pelayanan informasi pembangunan daerah	-	Jumlah majalah informasi tercetak dan disebarikan kepada publik	12	3	100.000.000	
			Jumlah penyebaran majalah informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai media informatif, komunikatif, dan edukatif	250								
		Program Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Persentase terpenuhinya pendapatan daerah dari retribusi menara telekomunikasi sesuai regulasi dan penetapan target	100%	1	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi	12	1	300.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Persentase terpenuhinya pengelolaan persandian sebagai media informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100%	2	Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	-	Terpenuhinya fasilitasi penanganan persandian pemerintah daerah	12	2	500.000.000	
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	2,00%	3	Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	-	Terpenuhinya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah	12	3	200.000.000	
			Persentase radio pancar ulang (repeater) dengan kondisi baik sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah	100%								
JUMLAH		9 PROGRAM			32 KEGIATAN						6.250.000.000	

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENGAH

20	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Surat terkirim	400 lbr	1	2.310.000,00	
					2	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	Jumlah rekening terbayarkan	36 rekening bulan	2	120.400.000,00	
					3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpakai	38 jenis	3	13.495.400,00	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 jenis	4	33.393.800,00	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	5	15.032.000,00	
					6	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	6	3.230.290,00	
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	7	9.600.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Tersedianya makanan dan minuman	600 kotak	8	36.165.000,00	
					9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi luar daerah	4 kali	9	75.000.000,00	
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	32 orang	10	492.000.000,00	
					11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Terselenggaranya piodalan-piodalan	12 bulan	11	33.055.475,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket	1	25.000.000,00	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Terpeliharanya Gedung Kantor	20 unit	2	174.000.000,00	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	3	41.975.000,00	
					4	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor	-	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 gedung kantor	4	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Tersedianya buku laporan kinerja terbuat	6 laporan	1	10.025.900,00	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pengembangan kewirausahaan yang meningkat	100%	1	Fasilitasi pengembangan Sarana Hasil Produksi	-	Jumlah Sarana Promosi Hasil Produksi yang dihasilkan	1 paket	1	70.149.235,00	
			Persentase pendukung bagi Usaha mikro yang meningkat		2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	-	Jumlah usaha mikro yang terlatih	68 pengusaha	2	200.000.000,00	
					3	Pelatihan Menejemen Pengelolaan Koperasi/KUD	-	Jumlah Pengelola Koperasi/KUD yang telah mengikuti Pelatihan	69 orang	3	202.500.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					4	Peningkatan manajemen usaha bagi koperasi/kelompok	-	Jumlah pengurus pengawas dan pengelola koperasi yang dibintek	60 orang	4	80.698.000,00	
					5	Peningkatan manajemen usaha bagi LPD/LKM	-	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	30 orang	5	45.680.000,00	
					6	Bimbingan teknis bagi pengelola KSP/USP	-	Jumlah pengelola yang mengikuti bintek	30 orang	6	58.510.000,00	
					7	Pembinaan bagi pengurus dan pengawas LPD	-	Jumlah pengurus dan pengawas yang dibina	50 LPD	7	47.174.000,00	
					8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SP	-	Jumlah KSP/USP yang dimonev	70 KSP/USP	8	26.816.600,00	
					9	Sosialisasi Sumber-sumber Permodalan	-	Jumlahpeserta KSP/USP yang disosialisasi	50 orang	9	39.528.000,00	
					10	Monitoring evaluasi dan pelaporan usaha mikro	-	Jumlah Usaha mikro yang dimonev		10	34.790.000,00	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan	100%	1	Penyelenggaraan Hari Koperasi	-	Terlaksananya Hari Koperasi	1 Kali	1	61.189.800,00	
					2	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun LPD	-	Terlaksananya HUT LPD	1 kali	2	35.880.000,00	
					3	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Terlaksananya Hari besar Nasional dan Daerah	1 kali	3	60.000.000,00	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi berprestasi	100%	1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman koperasi	-	Jumlah Kelompok masyarakat yang memahami tentang koperasi	8 kelompok	1	57.665.000,00	
					2	Jpembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan koperasi berprestasi	-	Jumlah Pengawas KSP/USP yang dilatih		2	100.000.000,00	
					3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPD	-	Jumlah LPD yang Dimonev	50 LPD	3	23.397.500,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					4	Pemeringkatan Koperasi	-	Jumlah Koperasi yang diperingkat	20 koperasi	4	62.470.000,00	
					5	Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	Jumlah KSP/USP yang sehat	50 koperasi	5	27.778.000,00	
					6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	-	Jumlah Koperasi yang Di Monev	269 koperasi	6	60.405.000,00	
					7	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerjasama usaha koperasi	-	Jumlah usaha yang ditangani koperasi	120 koperasi	7	52.643.000,00	
		Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi yang dibina	100%	1	Pemberdayaan Usaha Mikro	-	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	40 Pengusaha Mikro	1	96.750.000,00	
					2	Pembinaan Usaha Ultra Mikro	-	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	40 pengusaha	2	-	
JUMLAH		7 PROGRAM			39 KEGIATAN					2.528.707.000		
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
21	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Banyaknya dokumen yang sah	200 lembar	1	1.050.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	7 rekening	2	661.200.000	
					3	Penyediaan alat tulis kantor	-	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	1281 unit	3	27.950.000	
					4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Banyaknya barang cetakan yang tersedia	150 buku	4	12.910.000	
					5		-	banyaknya fotocopy yang tersedia	20000 lembar	5		
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	-	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	30 unit	6	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	770 unit	7	30.470.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	2920 eksemplar/tahun	8	13.200.000	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	8 kali	9	22.480.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	10 kali	10	185.000.000	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan	-	Banyaknya Upah tenaga administrasi, teknis dan pengemudi yang terbayarkan,	40 orang	11	768.800.000	
					12	Penyediaan canang, bebanten dan piodalan	-	Banyaknya sesajen sehari-hari dalam satu tahun	18300 buah	12	55.960.000	
							-	Banyaknya penyelenggaraan hari raya purnama, tilem dan nganyarin ke pura-pura dalam satu tahun	36 kali			
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	-	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terfasilitasi	28 kali	13	27.000.000	
		Program peningkatan sarana dan prsarana aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai	100%	1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	4 unit	1	100.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	1 unit	2	730.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	3	200.000.000	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Banyaknya peralatan yang dipelihara	24 unit	4	50.000.000	
					5	Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor	-	Banyaknya bangunan yang siap pakai	1 unit	5	1.000.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	13 buku	1	25.000.000	
					2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun	53 buku	2	10.000.000	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase tersebarnya informasi peluang investasi	100%	1	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha	-	Frekuensi pertemuan dengan dunia usaha	1 kali	1	45.390.000	
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0,0002	2	Penyelenggaraan pameran investasi	-	Banyaknya pameran investasi yang diselenggarakan	3 kali	2	458.060.000	
					3	Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem	-	Banyaknya perusahaan yang dimonitoring	25 perusahaan	3	27.450.000	
							-	Banyaknya buku money investasi	15 buku			
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi	1%	1	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	-	Frekuensi pertemuan dengan calon investor	3 kali	1	75.000.000	
					2	Penyusunan Profil Investasi Daerah Kabupaten Karangasem	-	Banyaknya buku profil investasi unggulan daerah yang tersusun	60 buku	2	75.000.000	
					3	Penyusunan pemetaan potensi unggulan daerah	-	Banyaknya buku pemetaan potensi unggulan daerah	60 buku	3	150.000.000	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	-	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	1	50.000.000	
		Program pelayanan bidang perijinan	Persentase layanan izin sesuai waktu	100%	1	Standar Pelayanan Minimal Perizinan	-	Banyaknya permohonan yang teregistrasi	1600 dokumen	1	150.000.000	
					2	Pelayanan Izin Penunjang Usaha	-	Jumlah Izin Penunjang Usaha yang terbit	500 izin	2	358.760.000	
					3	Pelayanan Izin Usaha	-	Jumlah Izin Usaha yang terbit	300 ijin	3	214.420.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					4	Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan	-	Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang terbit	300 ijin	4	140.460.000	
					5	Monitoring dan evaluasi perizinan	-	Banyaknya perusahaan yang di monitoring	48 perusahaan	5	75.000.000	
					6	Peningkatan koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu Goes To Banjar	-	Frekuensi layanan goes to banjar	8 kali	6	327.620.000	
					7	Koordinasi dan fasilitasi mall pelayanan publik	-	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	76 layanan	7	215.480.000	
					8	Koordinasi dan fasilitasi satgas percepatan berusaha	-	Terfasilitasinya kegiatan satgas percepatan berusaha	2 laporan	8	169.100.000	
		Program pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	1	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	-	Banyaknya buku IKM yang disusun,	80 buku	1	50.000.000	
					2	Penyampaian informasi kepada masyarakat	-	Jumlah masyarakat yang menerima informasi	320 orang	2	236.200.000	
JUMLAH		8 PROGRAM			36 KEGIATAN						6.748.960.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN												
22	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah materai yang tersedia	500 lbr	1	2.550.000,00	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah bulan rekening telepon, listrik dan air yang dibayar	36 rekening bulan	2	45.300.000,00	
					3	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	-	Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajak	7 unit	3	6.000.000,00	
					4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	-	Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 paket	4	5.500.000,00	
					5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	5	15.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor ysng tersedia	2 paket	6	24.000.000,00	
					7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah bulan blanko administrasi kantor yang tersedia	12 bln	7	30.000.000,00	
					8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	8	3.000.000,00	
					9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 unit	9	42.000.000,00	
					10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	36 bln	10	5.500.000,00	
					11	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bln	11	17.500.000,00	
					12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 kali	12	100.000.000,00	
					13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/ Keamanan	-	Jumlah tenaga pendukung administrasi yang terbayar	240 ob	13	310.200.000,00	
					14	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Jumlah penyelenggaraan piodalan	1 kali	14	35.000.000,00	
					15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30 kali	15	30.000.000,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	2 unit	1	-	
					2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	2	40.000.000,00	
					3	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah pengadaan Mebeleur	3 buah	3	15.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	7 unit	4	150.000.000,00	
					5	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer jaringan	-	Jumlah website yang terpelihara	1 website	5	25.000.000,00	
					6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Musik Tradisional	-	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala alat musik tradisional	12 bln	6	10.000.000,00	
					7	Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	-	Persentase arsip dan dokumen kepegawaian yang terkelola dengan baik	100%	7	50.000.000,00	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan transparansi laporan keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia	10 buku	1	4.000.000,00	
					2	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	10 buku	2	4.000.000,00	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pelaksanaan pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya	100%	1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	Jumlah kelompok seni/ budaya hampir punah yang dilestarikan	2 sekaa	1	150.000.000,00	
					2	Peningkatan Pemahaman Sastra Agama	-	Jumlah jenis lomba utsawa dharmagita yang diikuti	37 jenis lomba	2	920.000.000,00	
							-	Terlaksananya bulan bahasa bali	1 kali			
					3	Pengembangan Bentuk Karya Sastra dan Teater	-	Jumlah kelompok teater SMA/SMK se Kabupaten Karangasem yang dibina	2 kelompok	3	50.000.000,00	
					4	Inventarisasi Tradisi Budaya	-	Jumlah Karya Budaya/Tradisi Budaya yang terinventarisasi dalam bentuk kajian	1 kajian	4	125.000.000,00	
							-	Jumlah generasi muda yang mendapat pengenalan dan pemahaman tentang tradisi budaya	15 org			

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8				
				5	Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda	- Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dicatatkan, direkam dalam format video	4 tradisi budaya	5	125.000.000,00		
						- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang direkonstruksi/terpelihara	1 objek				
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset pusaka dan peninggalan sejarah	2 dokumen	1	Inventarisasi dan Pemetaan Asset Pusaka	- jumlah lokasi asset pusaka yang di inventarisir	2 lokasi	1	200.000.000,00	
						- Tertatanya kota pusaka	100%				
				2	Sosialisasi dan Pendataan Cagar Budaya	- Jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	10 peninggalan	2	100.000.000,00		
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	20	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	- Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	15 sekaa	1	2.700.000.000,00	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pegawai negeri sipil dalam perayaan hari hari besar nasional	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	- Persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional	100%	1	-	
					2	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	- Persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	2	50.000.000,00	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak, Subak Abian yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	190 DP, 716 BA, 160 S, 230 SA	1	Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/ tradisional	- Jumlah Lembaga adat/ tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	1.296 lembaga adat dan tradisional	1	50.000.000,00	
					2	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	- persentase lembaga adat dan tradisional yang terpantau pemanfaatan dana bantuan	100%	2	40.000.000,00	
		Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	3	1	Pelaksanaan Event Seni Budaya	- Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	3 kali	1	2.848.343.575,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Persentase terpenuhinya penghargaan terhadap seniman dan budayawan	100%	1	Pemberian Dukungan/ Penghargaan kepada Seniman dan Budayawan	-	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	16 seniman	1	150.000.000,00	
		Program Pengembangan Lembaga adat dan Tradisional	Persentase terpenuhinya penghargaan terhadap lembaga adat/ tradisional	100%	1	Pemberdayaan Desa Adat	-	Jumlah penghargaan kepada Desa Adat	16 Desa Adat	1	295.000.000,00	
							-	Jumlah pembinaan kepada pecalang	100 pecalang			
					2	Pemberdayaan Subak dan Subak Abian	-	Jumlah penghargaan kepada Subak Abian	16 subak	2	1.265.000.000,00	
							-	Jumlah subak/subak abian di 3 kelurahan yang terfasilitasi BKK Provinsi	23 subak/subak abian			
					3	Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig Lembaga Adat/ Tradisional	-	Jumlah awig-awig lembaga adat/ tradisional yang dibahas	4 awig	3	100.000.000,00	
JUMLAH		11 PROGRAM			41 KEGIATAN						10.137.893.575	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												
23	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Output : Jumlah Surat terkirim dan SPJ Outcome : Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	400 lembar	1	2.500.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Output : Jumlah tersedianya aliran telepon, air, listrik Outcome : Jumlah tersedianya aliran telepon, air, listrik	12 bulan	2	50.000.000	
					3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Output : Jumlah terlaksananya kebersihan kantor Outcome : Jumlah terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	3	21.811.500	
					4	Penyediaan alat tulis kantor	-	Output : Jumlah tersedianya alat tulis kantor Outcome : Jumlah tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	4	18.000.000	
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Output : Jumlah buku cetakan dan penggandaan Outcome : Jumlah buku yang di cetak dan digandakan	6 jenis cetakan dan 1000 lembar foto copy	5	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Output : Jumlah alat listrik yang terpasang di gedung kantor Outcome : Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan gedung/ruangan	11 ruangan pada 5 gedung	6	4.500.000	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Output : Jumlah media cetak yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat Outcome : Jumlah media cetak yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	12 jenis	7	15.000.000	
					8	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Output : Jumlah isi ulang tabung gas 12 kg Outcome : Jumlah isi ulang tabung gas 12 kg	4 kali isi	8	600.000	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Output : Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu kantor Outcome : Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	8 kali	9	20.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	-	Output : Jumlah rapat koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI dan ANRI Outcome : Jumlah rapat koordinasi antara Perpustakaan Nasional RI dan ANRI	6 kali	10	120.000.000	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis/keamanan	-	Output : Jumlah tenaga operasional Mobil Pintar, Perpustakaan Keliling, Pemilah Arsip dan Keamanan Kantor yang mendapat gaji/upah Outcome : Jumlah tenaga operasional Mobil Pintar, Perpustakaan Keliling, Pemilah Arsip dan Keamanan Kantor yang mendapat gaji/upah	28 orang	11	388.800.000	
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	-	Output : Jumlah kegiatan persembahyangan Outcome : Jumlah kegiatan persembahyangan yang terlaksana	25 kali	12	30.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	-	Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan kabupaten lain dan provinsi Outcome : Jumlah rapat-rapat koordinasi antara kabupaten lain dan provinsi	12 kali	13	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 dan 2 mobil dan sepeda motor	1	-	
					2	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	-	Output : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 jenis peralatan	2	15.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	Output : Jumlah gedung kantor terpelihara Outcome : Jumlah gedung kantor terpelihara	5 gedung	3	25.000.000	
					4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	-	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 dan 6 mobil dan sepeda motor	4	140.000.000	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Output : Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor Outcome : Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	5	35.000.000	
					6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip	-	Output : Jumlah terpeliharanya meubelair kantor Outcome : Jumlah pemeliharaan rak arsip, almari arsip, rool opack dan lain-lain	12 bulan	6	3.500.000	
					7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana perpustakaan dan bahan pustaka	-	Output : Jumlah terpeliharanya sarana perpustakaan dan bahan pustaka Outcome : Jumlah terpeliharanya rak buku perpustakaan dan meubelair perpustakaan.	12 bulan	7	3.500.000	
					8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	Output : Jumlah terpeliharanya sedang/berat gedung kantor Outcome : Jumlah terlaksananya pemeliharaan sedang/berat gedung kantor.	5 gedung	8	40.000.000	
					9	Penataan halaman dan taman kantor	-	Output : Jumlah tertata Halaman dan Taman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Outcome : Jumlah tertata halaman dan taman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	9	15.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	-	Output : Jumlah Jenis laporan kinerja dan realisasi anggaran yang di buat Outcome : Jumlah jenis laporan kinerja dan realisasi anggaran yang di buat	8 jenis laporan	1	10.500.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan.	100%	1	Perayaan hari-hari besar Nasional dan Daerah	-	Output : Jumlah perayaan hari besar nasional dan daerah yang terlaksana Outcome : Jumlah perayaan hari besar nasional dan daerah yang terlaksana dengan baik	2 kali	1	40.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pelaksanaan pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya	100%	1	Penatagunaan naskah kuno Nusantara	-	Output : Jumlah Penatagunaan lontar/naskah kuno yang tersebar di seluruh masyarakat untuk dapat dikumpulkan Outcome : Jumlah terlaksananya penatagunaan lontar/naskah kuno yang tersebar di seluruh masyarakat sehingga dapat dikumpulkan	12 bulan	1	30.000.000	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase terpenuhinya pendataan serta pelestarian fisik, kandungan bahan pustaka/naskah kuno.	100%	1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	-	Output : Jumlah pendataan secara kuantitatif baik fisik maupun kandungan (konten) naskah kuno disimpan, dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat Outcome : Jumlah pendataan secara kuantitatif baik fisik maupun kandungan (konten) naskah kuno disimpan, dirawat dan	20 kali	1	30.000.000	
			Persentase tersedianya turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar untuk dilayankan kepada masyarakat	100%	2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	-	Output : Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar untuk dilayankan kepada masyarakat Outcome : Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	100 lembar lontar	2	30.000.000	
			Terlaksananya sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada 100 masyarakat	1 kali	3	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya local daerah	-	Output : Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat Outcome : Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	100 masyarakat	3	30.000.000	
		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah/desa	20%	1	Pembinaan Perpustakaan dan peningkatan minat dan budaya baca	-	Output : Jumlah perpustakaan sekolah/desa yang dibina Outcome : Jumlah perpustakaan sekolah/desa yang sudah dibina	45 kali	1	40.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
			Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan pada perpustakaan sekolah dan desa	100%	2	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	-	Output : Jumlah jenis pengadaan buku/keperustakaan Outcome : Jumlah jenis buku bertambah koleksinya	8 jenis buku	2	60.000.000	
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	43.000 orang	3	Operasional mobil/motor Pintar	-	Output : Jumlah kecamatan yang desanya di sasar oleh operasional mobil/motor pintar Outcome : Jumlah kecamatan yang meningkatnya minat baca anak-anak dari umur 7 -15 tahun.	8 Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	3	40.000.000	
			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	4.700 orang	4	Operasional Perpustakaan Keliling	-	Output : Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan perpustakaan keliling Outcome : Jumlah kecamatan yang meningkat minat baca masyarakat di Kabupaten Karangasem.	8 Kecamatan	4	40.000.000	
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	12.715 eks	5	Pelayanan perpustakaan umum	-	Output : Jumlah jam buka pelayanan perpustakaan umum Outcome : Jumlah jam buka pelayanan perpustakaan umum untuk melayani masyarakat	8 jam setiap hari senin s/d sabtu (kecuali hari libur)	5	40.000.000	
			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.034 Judul	6	Pemantapan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/SKPD	-	Output :Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD Outcome : Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik	1 kali	6	35.000.000	
			Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8 pustakawan	7	Pelayanan Story Telling	-	Output : Jumlah Taman Kanak Kanak/RA dan PAUD se Kabupaten Karangasem yang mengikuti kegiatan story telling Output : Jumlah Taman Kanak Kanak/RA dan PAUD yang meningkatnya kemampuan anak dalam bercerita	16 Taman Kanak-kanak/RA dan PAUD	7	30.000.000	
				4 tenaga teknis	8	Promosi dan lomba perpustakaan	-	Output : Jumlah lomba perpustakaan yang akan dilaksanakan Outcome : Jumlah lomba perpustakaan yang sudah dilaksanakan	5 lomba	8	30.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
				4 penilai yang memiliki sertifikat	9	Hari Kunjung Perpustakaan	-	Output : Jumlah pelayanan hari kunjung perpustakaan Outcome : Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	1 kali	9	40.000.000	
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	100%	1	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	-	Output : Jumlah PD yang tertata arsipnya Outcome : Jumlah PD yang sudah tertata arsipnya	1 daerah/pera	1	20.000.000	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	2	Penduplikasian dokumen /arsip daerah dalam bentuk informatika	-	Output : Jumlah terselenggaranya penduplikasian arsip ke dalam bentuk informatika Outcome : Jumlah tercapainya arsip-arsip dalam bentuk informatika.	12 bulan	2	25.000.000	
			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	20%	3	Penelusuran Dokumen Arsip Daerah	-	Output : Jumlah penelusuran dokumen arsip daerah Kabupaten Karangasem yang terlaksana Outcome : Jumlah penelusuran dokumen arsip daerah Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan	20 kali	3	30.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase terpenuhinya pelayanan informasi yang berkualitas	100%	1	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	-	Output Jumlah arsip yang akan dimasukan ke aplikasi SIKN dan JIKN Outcome : Jumlah arsip yang akan masuk ke aplikasi SIKN dan JIKN	1000 lembar arsi	1	25.000.000	
					2	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	-	Output : Jumlah penyuluhan Kearsipan Outcome : Jumlah penyuluhan Kearsipan dapat terlaksana dengan baik	8 kali	2	25.000.000	
					3	Inventarisasi Arsip Daerah	-	Output : Jumlah inventaris arsip yang terlaksana. Outcome : Jumlah inventaris arsip yang sudah terlaksana dengan baik.	4 kali	3	15.000.000	
					4	Pembinaan dan pemantauan kearsipan	-	Output : Jumlah pemantauan dan pembinaan kearsipan daerah Outcome : Jumlah perangkat daerah yang sistem kearsipan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku	40 perangkat daerah/perang akt desa	4	30.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					5	Pemantapan Pengelola Kearsipan	-	Output : Jumlah pemantapan pengelola kearsipan perangkat desa/perangkat daerah yang terlaksana dengan baik Outcome : Jumlah pemantapan pengelola kearsipan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik	40 perangkat daerah/perangkat desa	5	40.000.000	
					6	Penyusutan arsip	-	Output : Jumlah PD yang melaksanakan penyusutan arsip Outcome : Jumlah PD yang berkurang arsip yang telah jatuh retensinya	2 perangkat daerah	6	20.000.000	
JUMLAH		9 PROGRAM			47 KEGIATAN					1.723.711.500		

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

24	PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Terselenggaranya administrasi surat Menyurat	100%	1	6.500.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	2	50.000.000	
					3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan jasa kebersihan kantor	100%	3	13.200.000	
					4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	Terpeliharanya peralatan kerja	100%	4	30.000.000	
					5	Penyediaan alat tulis kantor	-	Tersedianya alat tulis kantor	100%	5	44.000.000	
					6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	6	21.296.000	
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Tersedianya komponen penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	7	6.655.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	100%	8	6.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					9	Penyediaan makan dan minum	-	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu	100%	9	45.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	10	115.000.000	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Meningkatnya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/keamanan	312 OB	11	369.327.000	
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Tersedianya canang sehari-hari dan banten piodalan	100%	12	86.000.000	
					13	Penataan dekorsi dan kegiatan hari-hari nasional	-	Terseleenggaranya perayaan hari-hari besar nasional (paket)	1 paket	13	109.142.000	
					14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	14	36.300.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Terseleenggaranya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	1	30.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1 paket	2	35.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala (Unit)	49 unit	3	176.610.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja dan Tranparansi Laporan Keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Tersedianya laporan kinerja dan data informasi perikanan (paket)	5 paket	1	102.490.000	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	330,00	2	Pembangunan pengembangan pembenihan ikan	-	Jumlah produksi benih ikan (ekor)	2980000 ekor	2	489.392.000	
					3	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan	-	Terlaksananya Rehabilitasi Kolam , Saluran Air Pasok/ Buang, Bangunan dan Pagar UPT PPBAT	3 paket	3	1.346.448.000	
					4	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	-	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dengan peningkatan kelas kelompok	10 kelompok	4	400.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					5	Pembangunan pengembangan kawasan produksi perikanan budidaya air tawar	-	Tersedianya Pakan Ikan, Peralatan, Obat-obatan dan Bibit Unggul di UPT PPBAT serta Tercapainya target PAD	100%	5	279.840.000	
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27.500	1	Pendampingan pada kelompok nelayan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	-	Jumlah kelompok nelayan dengan peningkatan kelas kelompok	35 kelompok	1	323.400.000	
			Cakupan bina kelompok nelayan	35 klp	2	Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	-	Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	35 kelompok	2	206.130.000	
JUMLAH		5 PROGRAM			25 KEGIATAN						4.328.230.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA												
25	PILIHAN PARIWISATA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 bulan	1	4.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah bulan pembayaran rekening air listrik dan telephon	12 bulan	2	60.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Gedung dan Bangunan Yang Disewa	2 bangunan	3	16.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	-	Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinannya	11 unit	4	10.000.000	
					5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	jumlah paket peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	1 paket	5	37.400.000	
					6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	jumlah paket peralatan kerja yang terpelihara	1 paket	6	9.000.000	
					7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	jumlah paket alat tulis kantor dan IT yang tersedia	1 paket	7	24.000.000	
					8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	8	75.000.000	
					9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	9	3.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 unit	10	40.000.000	
					11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	12 bulan	11	9.000.000	
					12	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat dikantor	12 bulan	12	26.000.000	
					13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	frekwensi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9 kali	13	110.000.000	
					14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	jumlah bulan pembayaran tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	12 bulan	14	862.400.000	
					15	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	-	jumlah bulan pelaksanaan upacara keagamaan	12 bulan	15	50.000.000	
					16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-	jumlah bulan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	16	26.000.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	1	60.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah pemeliharaan gedung yang terpelihara penataannya	1 paket	2	50.000.000	
					3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Tersediannya Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3	60.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	-	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	100	4	115.000.000	
					5	Penataan Kerasipan	-	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	5	10.000.000,00	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan transparansi laporan keuangan	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keuangan	4 laporan	1	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8		
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Persentase Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 laporan	2	2.000.000,00	
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	560.648	1	Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	-	jumlah jenis wisata yang dianalisa minat pasarnya	4 Jenis Wisata	1	61.000.000	
					2	Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	-	frekwensi promosi yang dilaksanakan	6 Kali	2	1.375.000.000	
							-	Promosi pariwisata				
					3	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	-	jumlah bahan promosi yang dicetak	7 Cetak	3	430.000.000	
					4	Event - event promosi pariwisata	-	frekwensi festival pariwisata yang diselenggarakan	4 Kali	4	575.000.000	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	11,2	1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	-	Jumlah DTW yang tertata fasilitas sarana dan prasarananya	8 kecamatan	1	6.425.000.000	
			Jumlah DTW yang dikembangkan	7 DTW								
			Jumlah DTW yang tertata	4								
					2	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	-	Jumlah kerjasama yang terbangun dalam pengelolaan obyek wisata	2 lokasi	2	236.000.000	
					3	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	-	Jumlah daya tarik wisata yang terfasilitasi pengembangannya	3 DTW	3	675.000.000	
					4	Sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi standarisasi usaha pariwisata	-	Jumlah usaha pariwisata yang terfasilitasi peningkatan standar mutu produk usahanya	25 unit	4	105.000.000	
					5	Pengembangan dan penguatan pembangunan litbang bidang pariwisata	-	Jumlah regulasi pariwisata yang tersusun	1 Dokumen	5	375.000.000	
					6	Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi pada DTW	-	Jumlah destinasi pariwisata yang terawasi dalam pemungutan retribusi	7 DTW	6	110.000.000	
					7	Pembinaan, sosialisasi serta penerapan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina dalam penerapan TDUP	50 Unit	7	165.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pegawai negeri sipil dalam perayaan hari hari besar nasional	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	-	Persentase Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional Dan Hari Besar Lainnya	2 Kali	1	50.000.000,00	
		Program Pengembangan Kemitaan	Jumlah desa yang dibina menjadi daerah tujuan wisata alternatif	5	1	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base	-	Jumlah jenis data usaha pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang tersaji	12 jenis	1	95.000.000	
			Jumlah kelompok masyarakat yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	7								
					2	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	-	Jumlah kelompok masyarakat yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	3 Pokdarwis	2	155.000.000	
							-	Pelatihan pemandu wisata				
							-	Terbinanya pemandu wisata di pura lempuyang luhur				
					3	Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis pariwisata	-	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan berbasis masyarakat	1 produk	3	165.000.000,00	
							-	peningkatan ekonomi kreatif untuk dadia pasek gelgel				
					4	Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda pariwisata	-	Jumlah generasi muda Karangasem yang diberdayakan sebagai duta pariwisata Karangasem	16 orang	4	269.000.000,00	
					5	Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata	-	Jumlah sktor produk ekonomi berbasis masyarakat yang dikembangkan	1 produk	5	110.000.000,00	
		Program Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah peserta workshop pengelolaan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan Tri Hita Karana	100 orang	1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata	-	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memahami Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100 Orang	1	100.000.000	
					2		-	Studi banding agar bisa mengelola pariwisata sendiri		2		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Pariwisata Alternatif	Jumlah DTW berbasis desa yang di bangun (desa wisata)	7 DTW	1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	-	Jumlah Desa Wisata Yang Terbina Untuk Mendukung Daya Tarik Wisata Alternatif	7 DTW	1	136.250.000	
JUMLAH		9 PROGRAM			43 KEGIATAN						13.281.050.000	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN												
26	PILIHAN PERTANIAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1	4.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2	212.160.000	
					3	Penyediaan alat tulis kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang disiapkan	1 Tahun	3	160.740.800	
					4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	4	59.565.000	
					5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Tahun	5	46.824.800	
					6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Tahun	6	45.000.000	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	7	13.608.000	
					8	Penyediaan makanan dan minuman	-	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	8	62.345.800	
					9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	9	132.000.000	
					10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Jumlah jasa tenaga harian dan tenaga kontrak yang dibayar	12 Bulan	10	2.841.564.000	
					11	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	-	Jumlah biaya canang, bebanten piodalan yang tersedia	1 Tahun	11	100.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	-	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	12	55.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	1	50.000.000	
					2	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang tersedia	1 Tahun	2	49.500.000	
					3	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	3	100.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun	4	375.817.200	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	5	82.500.000	
		Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1 laporan	1	36.463.680	
					2	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan	-	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	1 laporan	2	59.400.000	
					3	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaporan yang tersusun	10 jenis dokumen	3	60.514.520	
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase perayaan hari besar nasional	100%	1	Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	-	Jumlah hari-hari besar nasional	1 Tahun	1	120.000.000	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	- persentase jumlah serangan penyakit ternak	3,05%	1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	-	Jumlah terpeliharanya kesehatan ternak dan tercegahnya penyakit menular ternak	1 tahun	1	845.382.296	
			- Jumlah pemotongan ternak dalam pengawasan kesmavet (ekor)	34.750,00			-	Jumlah terpeliharanya kesehatan ternak dan tercegahnya penyakit menular ternak	1 tahun		100.000.000	
					2	Kesehatan masyarakat veteriner	-	Jumlah Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 tahun	2	114.553.450	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	- Jumlah Kelahiran ternak Hasil IB (ekor sapi) 9.600,00	1 Pembibitan dan Perawatan Ternak	- Jumlah Pelaksanaan Pembibitan dan perawatan ternak 1 tahun	1 347.521.570	
					- Jumlah bantuan bibit kambing 44 ekor	110.000.000	
					- Jumlah bantuan bibit sapi 80 ekor	1.000.000.000	
					- Jumlah bantuan bibit babi 308 ekor	924.000.000	
					- Jumlah bantuan ayam buras 600 ekor	27.000.000	
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian	- Jumlah aparatur pembina teknis dengan evaluasi kinerja baik (Org) 80	1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Jumlah Kemampuan Lembaga Petani yang meningkat 4 Kelas, 8 Kecamatan	1 345.827.295	
			- Jumlah kelas kelompok tani 180		- Jumlah pembangunan gedung BPP Kecamatan 3 Unit BPP Kecamatan	3.000.000.000	
				2 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan	- Jumlah terlaksananya metode penyuluh 32 pkt, 1 kali	2 225.000.000	
				3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Penyuluh dan Pelaku Utama/Pelaku Usaha	- Jumlah aparatur pembina teknis yang memenuhi standar kompetensi PPL&POPT, 78 desa, 8 desa, 1	3 363.530.750	
				4 Pelatihan dan Pembinaan KTNA	- Jumlah terselenggaranya pelatihan dan pembinaan KTNA 30 Orang	4 222.066.229	
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pertanian 100%	1 Pengelolaan Lahan dan Air	- Jumlah terlaksananya pengelolaan lahan dan air 8 Kecamatan	1 151.800.000	
			- Alsintan 100%	2 Pemantauan Pupuk dan Pestisida	- Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalur sesuai dengan ketentuan 16 kios dan 156 Subak	2 109.582.000	
			- Pupuk 100%		- Jumlah bantuan pupuk organik 200 Ton	300.000.000	
			- Sarana Pengairan 100%	3 Pembinaan Alsintan	- Jumlah Pembinaan dan Pendataan Alsintan 8 Kecamatan	3 176.000.000	
					- Jumlah Bantuan Traktor 8 Kecamatan	1.260.000.000	
					- Jumlah bantuan Slip Jagung 2 unit	100.000.000	
					- Jumlah bantuan power thresher 23 unit	470.000.000	
					- Jumlah bantuan hand sprayer 133 unit	120.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
					- Jumlah bantuan selder	15 unit	300.000.000		
					- Jumlah bantuan alat cultivator	4 unit	50.000.000		
					- Jumlah bantuan mesin pembuatan pupuk organik	2 unit	540.000.000		
		Program Peningkatan Sistem Perlindungan Tanaman	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim	97,00	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura	- Jumlah Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	8 Kecamatan	1	83.575.800
					2 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	- Jumlah terlaksananya bimtek Organisme Pengganggu tanaman (OPT) pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar	10 Kali	2	159.500.000
					3 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman Pangan	- Jumlah SLPHT Tanaman Pangan di Kelompok Tani/Subak	4 Klp/Subak	3	153.591.240
					4 Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	- Jumlah Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	8 Kecamatan	4	59.198.700
						- Jumlah Pelatihan Pengendalian Hama Gayas	Kec.Abang		20.000.000
					5 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Hortikultura	- Jumlah SLPHT tanaman Hortikultura	4 Angkatan	5	88.999.048
					6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	- Jumlah terlaksananya bimtek pengendalian OPT tanaman perkebunan bagi petani	2 Kelas	6	167.255.000
		Program Peningkatan Produksi Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,21%	1 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan	- Jumlah Data Base dan Catatan Analisa Usaha Tani pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi kayu.	1 Paket	1	85.206.570
			- Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah) (ton)	#####	2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	- Jumlah Intensifikasi tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi kayu.	8 Subak	2	230.658.142

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8				
			- Jumlah produksi tanaman hortikultura/buah-buahan (salak, mangga, pisang, durian, nangka) (ton)	841.000	3	Penyusunan Data Base Potensi Perkebunan	- Jumlah Data Potensi Perkebunan yang tersedia	1 laporan	3	98.486.190	
			- Jumlah produksi tanaman hortikultura/sayuran (sawi/petsai, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang) (ton)	38.500,00	4	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	- Jumlah bimtek budidaya tanaman perkebunan yang terlaksana	2 Angkatan	4	171.023.490	
			- Jumlah produksi tanaman perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapuk, vanili, tembakau) (ton)	14.900,80			- Peremajaan tanaman perkebunan (Kelapa, Jambu Mete)	250 Ha		500.000.000	
					5	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)	- Jumlah Bimtek Budidaya dan Manajemen Agribisnis Tembakau	2 Angkatan	5	356.048.000	
					6	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Perkebunan	- Jumlah bimtek perbenihan/perbibitan tanaman perkebunan	1 Angkatan	6	141.680.000	
							- Jumlah bantuan bibit kelapa genjah	100 Ha		1.470.000.000	
							- Jumlah bantuan bibit kopi	50 Ha		250.000.000	
							- Jumlah bantuan bibit coklat	10 Ha		50.000.000	
							- Jumlah bantuan bibit cengkeh	10 Ha		25.000.000	
					7	Pengembangan Perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan	- Jumlah Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan	1 Klp	7	37.163.786	
							- Jumlah bantuan benih/bibit tanaman pangan	2500 Ha		815.500.000	
					8	Bimbingan Peningkatan Mutu dan Produksi Hortikultura	- Jumlah SL-GAP/SOP Tanaman Hortikultura	4 Angkatan	8	133.328.140	
					9	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian Hortikultura	- Jumlah Data Potensi Hortikultura, Ubinan, Stasyik Pertanian Hortikultura dan analisa Usaha Tani Hortikultura	1 laporan	9	81.130.170	
					10	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	- Jumlah tersedianya benih/Bibit Tanaman hortikultura	5000 pohon/benih bersertifikat	10	82.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8	
							-	Jumlah tersedianya benih/Bibit Tanaman hortikultura (manggis, durian, jeruk keprok srikaya, mangga, salak gula pasir, sawo, pepaya, rambutan)	40 Ha		897.000.000	
							-	Jumlah bantuan bibit bawang merah	6 Ha		208.000.000	
							-	Jumlah bantuan bibit sayur hijau	10 Ha		25.000.000	
							-	Jumlah bantuan bibit cabai	13 Ha		40.000.000	
		Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	- Persentase produk tanaman pangan pangan yang laku dipasarkan (Kacang tanah)	32%	1	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	Jumlah Gapoktan yang dibina	78 Gapoktan	1	69.956.700	
			- Persentase produk tanaman hortikultura/buah-buahan (salak) yang laku dipasarkan	84%	2	Pendampingan Simantri	-	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Simantri	94 Klp	2	170.826.260	
			- Persentase produk tanaman hortikultura/buah-buahan (mangga) yang laku dipasarkan	88%			-	Jumlah demplot organik simantri	16 Demplot		300.000.000	
			- Jenis produk olahan tanaman hortikultura (buah-buahan) yang laku dipasarkan	9,00	3	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	-	Jumlah pembinaan dan Monev Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan pada Kelompok Tani dan Pelaku Pengolahan	8 Klp/Subak	3	55.021.340	
			- Jumlah produk perkebunan yang laku dipasarkan (ton)	800	4	Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggulan Daerah	-	Jumlah pelaksanaan promosi produk agribisnis	3 Kali	4	200.000.000	
			- Jumlah produk olahan hasil peternakan yang laku dipasarkan (ton)	1,35	5	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Pangan	-	Jumlah Data dan Pemantauan Informasi pasar tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi Kayu	1 Paket	5	27.500.000	
					6	Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan	-	Jumlah Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen (SL-GHP) pada Tanaman Pangan di Kelompok tani dan Subak	2 Klp/Subak	6	78.288.430	
					7	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	-	Jumlah pembinaan lomba kelompok dalam hal Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan	8 Kali	7	188.171.500	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					8	Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	-	Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	1 Angkatan	8	39.216.870	
					9	Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Hortikultura	-	Jumlah SLGHP Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Hortikultura	4 Angkatan	9	91.296.435	
					10	Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	-	Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1 Angkatan	10	53.521.710	
					11	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Hortikultura	-	Jumlah pembinaan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	4 Kelompoktani	11	85.915.500	
					12	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Hortikultura	-	Jumlah Publikasi Harga Pasar, Data PIP, dan Data SIGAPURA (TPID) yang dilaksanakan	1 th	12	20.937.730	
					13	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	Jumlah Pembinaan kelembagaan Pemasaran Hasil dan Temu Kemitraan yang terlaksana	1 Angkatan	13	55.000.000	
					14	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	-	Jumlah Bimtek Pengolahan Hasil Perkebunan	3 Kelas	14	180.715.700	
							-	Jumlah pembinaan pengolahan dan pelatihan buah jambu mete	1 Angkatan		50.000.000	
					15	Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Perkebunan	-	Jumlah Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Perkebunan	1 Laporan	15	36.525.170	
					16	Festival Subak Karangasem	-	Jumlah demplot gelar teknologi pertanian yang dilaksanakan	1 Paket	16	733.898.660	
JUMLAH		12 PROGRAM			66 KEGIATAN						24.735.903.670	
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
27	PILIHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Meningkatkan tertib surat menyurat	12 Bulan	1	3.900.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	Meningkatkan sarana pendukung kinerja	12 Bulan	2	562.205.582,40	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pegawai	12 Bulan	3	7.800.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Meningkatkan kebersihan kantor	12 Bulan	4	31.200.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Meningkatkan kelancaran kinerja pegawai	12 Bulan	5	23.000.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Meningkatkan penataan dokumen	12 Bulan	6	11.275.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Pasar	-	Meningkatkan penyediaan komponen listrik	12 Bulan	7	31.350.000	
					8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Meningkatkan efektivitas kinerja pegawai	12 Bulan	8	149.668.700	
					9	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Meningkatkan pengetahuan pegawai	12 Bulan	9	12.000.000	
					10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Meningkatkan kebutuhan pegawai	12 Bulan	10	24.241.600	
					11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Meningkatkan koordinasi luar daerah	12 Bulan	11	100.000.000	
					12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	-	Meningkatkan produktivitas kerja	29 Orang	12	562.800.000	
					13	Penyediaan biaya canang bebanten piodalan	-	Meningkatkan kerohanian	12 Bulan	13	44.616.000	
					14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	Meningkatkan koordinasi dalam daerah	12 Tahun	14	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	1	Pembangunan Gedung Kantor	-	Meningkatkannya keamanan dan nyaman kantor	1 Unit	1	50.000.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Meningkatkan sarana pendukung produktifitas kinerja	12 Bulan	2	450.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Meningkatkan Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	18 Bulan	3	200.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Meningkatkan Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	4	50.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	-	Meningkatkan Kenyamanan dan Keindahan kantor	12 Bulan	5	15.000.000	
					6	Rehabilitasi Sedang / Berat Tembok Penyengker	-	Meningkatkan Kenyamanan Pegawai Dalam Bekerja	12 Bulan	6	0	
					7	Penataan halaman dan taman kantor	-	Tertatanya halaman dan taman kantor	12 Bulan	7	100.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					8	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	-	Tersedianya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	8	0	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Meningkatkan tertib administrasi	12 Bulan	1	13.980.000	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Terpenuhinya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dengan Perkembangan Tertib Usaha Perdagangan Serta Kepastian Perlindungan Terhadap Konsumen	100%	1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	-	Terawasinya Jumlah peredaran barang dan jasa	12 Bulan	1	25.000.000	
					2	Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian	-	Meningkatkan Pelayanan Kemetrolagian	1 Unit	2	203.250.000	
					3	Tera Ulang Alat UTTP	-	Meningkatkan Tera Ulang Alat UTTP	6.500 Timbangan	3	170.000.000	
					4	Pengawasan Alat UTTP	-	Meningkatkan Pengawasan Alat UTTP	300 Timbangan	4	20.000.000	
					5	Pembinaan HAKI	-	Meningkatkan pembinaan para perajin tentang HAKI	200 Usaha	5	50.000.000	
					6	Monitoring Sembako dan Barang-Barang Strategis Lainnya	-	Meningkatkan Monitoring sembako	48 Bulan	6	20.000.000	
					7	Pendaftaran HAKI	-	Meningkatkan pendaftaran HAKI	5 Merk	7	40.000.000	
					8	Pembentukan, Pemilihan, Pelantikan Anggota dan Oprasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	-	Terciptanya Harkat dan Martabat Konsumen	-	8		
					9	Sosialisasi peraturan mikol	-	Terciptanya kesadaran masyarakattentang aturan mikol	12 Bulan	9	0	
					10	Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	12 Bulan	10	0	
					11	Pasar Tertib Ukur	-	Meningkatkan tertib ukur bagi pedagang pasar tradisional	12 Bulan	11	0	
					12	Pengawasan/Monitoring Perdagangan Minuman Beralkohol	-	Meningkatkan pengawasan minuman beralkohol	48 Bulan	12	30.000.000	
					13	Pengawasan Retribusi Pasar	-	Meningkatkan pengawasan retribusi pasar	12 Bulan	13	15.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8	
					14	Monitoring Peredaran Gas LPG	- Meningkatkan monitoring peredaran LPG	12 Bulan	14	22.000.000	
					15	Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang disalahgunakan Dalam Pangan	- Terawasinya bahan berbahaya dalam pangan	10industri	15	30.000.000	
					16	Pembangunan Gedung serta Sarana Pra sarana UPT kemetrolgian Daerah	- Terbangunnya Gedung serta Prasarana UPT Kemetrolgian Daerah	1unit	16	1.000.000.000	
					17	Pembinaan Indikasi Geografis	- Terdaftaranya IG Salak Gula Pasir (Sibetan)	12 Bulan	17	40.000.000	
					18	Pasar Murah	- Terlaksananya pasar murah	12 Bulan	18	0	
					19	Pasar Agro	- Terlaksananya pasar agro	12 Bulan	19	0	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Kuantitas IKM	13,76%	1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	- Meningkatkan pembinaan Perajin IKM	5 Kelompok	1	200.000.000	
			Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		2	Penerapan Jaringan Mutu Melalui GKM	- Meningkatkan pembinaan Kelompok perajin tentang GKM	1 Klpk	2	50.000.000	
					3	Pembinaan Pengrajin oleh DEKRANASDA Kabupaten Karangasem	- Meningkatkan pembinaan perajin	10 Klpk	3	150.000.000	
					4	Monitoring/Pengawasan terhadap industri kecil menengah yg berdampak pada lingkungan	- Meningkatkan pengawasan Pencemaran pada kelompok IKM	8 Kecamatan	4	25.000.000	
					5	Pembinaan Industri Kecil Menengah Yang Berdampak Pada Lingkungan	- Meningkatkan pembinaan kelompok IKM yang berpotensi mencemari lingkungan	8 Kecamatan	5	0	
					6	Monev Kegiatan Dana Bergulir	- eningkatkan Monev Keg. DanaBergulir	8 Kecamatan	6	15.000.000	
					7	Temu Usaha perajin / Pedagang	- Meningkatkan Temu usaha Perajin / Pedagang Sebanyak 60 Orang	50 Orang	7	-	
					8	Pendataan Potensi Indag	- Meningkatkan penyediaan Buku data Potensi Indag	78 Desa	8	45.000.000	
					9	Kajian Akademis tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	- Tersusunnya draft kajian RPIK	-	9		
					10	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	- Tersusunnya Ranperda	1 Ranperda	10	87.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Partisipasi Pengembangan wawasan Kebangsaan	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan	12 bulan	1	52.500.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terpenuhiya Retribusi dan Lain - lain PAD	100%	1	Penagihan Retribusi dan lain-lain PAD	-	Peningkatkan Pendapatan Daerah	12 Bulan	1	1.300.000.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Terpenuhiya Pengenalan Produk - produk Unggulan Kepada Masyarakat Luas	100%	1	Pameran Hasil dan Potensi Pembangunan	-	Terlaksananya Pameran	-	1		
					2	Pameran Industri dan Dagang	-	Meningkatkan pameran Industri dan dagang di Kabupaten	10 hari	2	374.500.000	
					3	Pameran Produk Ekspor Luar Daerah (PPE)	-	Meningkatkan promosi Produk Export IKM Daerah Bali	2 kali	3	146.750.000	
					4	Identifikasi Produk Orientasi Ekspor	-	Terlaksananya Identifikasi produk Orientasi Ekspor	12 Bulan	4	0	
					5	Pemasaran Produk IKM Berbasis Website (e - commers)	-	Terpromosinya Produk IKM Berbasis website(e - commers)	12 Bulan	5	35.000.000	
		Program Penataan Struktur Industri	Persentase Terwujudnya Perajin Yang Mandiri dan Berdaya Saing	100%	1	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana bagi IKM	-	Meningkatkan Pemberian bantuan pada IKM	12 Bulan	1	3.461.035.750	
					2	Pameran Industri Kecil/Kerajinan Dalam Daerah	-	Meningkatkan Promosi Produk Industri Kecil Dalam Daerah	1 Kali	2	55.370.000	
					3	Pameran Produk Industri dan Kerajinan Luar daerah	-	Meningkatkan Promosi Produk Industri Luar Daerah	2 Kali	3	225.000.000	
					4	Pembangunan sentra IKM di Kabupaten Karangasem	-	Terbangunnya Sentra IKM	1 Unit	4	3.000.000.000	
					5	Pelatihan Manajemen sederhana	-	Meningkatkan Keterampilan Pengerajin	8 Kecamatan	5	75.000.000	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar yang terbangun	16	1	Peningkatan Sistem Jaringan dan Informasi Perdagangan	-	Meningkatkan penyediaan Informasi Produk IKM	250 eksplar	1	0	
			Ekspor Bersih Perdagangan		2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pasar	-	Terciptanya Kenyamanan Pelayanan Masyarakat	16 Pasar	2	200.000.000	
					3	Pameran Pesta Kesenian Bali (PKB)	-	Meningkatkan promosi produk IKM	30 Hari	3	100.000.000	
					4	Pelaksanaan Aci Pura Melanting	-	Terlaksananya Upacara Ke - Agamaan	6 Pasar	4	200.000.000	
					5	Pembangunan Pasar di Kabupaten Karangasem	-	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar	3 Pasar	5	23.992.696.226	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					6	Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar	-	Terciptanya rancangan awal pembangunan pasar	1 paket	6	50.000.000	
					7	Pelatihan Kewirausahaan	-	Terlaksanannya Pelatihan Kewirausahaan	30 Pengusaha	7	75.000.000	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Terfasilitasinya Permodalan Bagi IKM dan UKM	100%	1	Kegiatan Fasilitas Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	Meningkatkan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	200 Orang	1	46.000.000	
JUMLAH		11 PROGRAM			72 KEGIATAN					38.079.138.858		

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

28	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PERENCANAAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	800 lembar	1	4.200.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Persentase air, listrik, telepon yang terbayar	100%	2	107.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin	20 Unit	3	15.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	-	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100%	4	41.270.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	100%	5	46.700.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Persentase barang cetak maupun penggandaan yang diadakan	100%	6	30.228.400	
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%	7	10.000.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	-	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia	10 jenis	8	12.000.000	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	950 orang	9	49.965.100	
					10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali	10	200.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan	-	Volume tenaga kontrak yang terbayar	480 OB	11	696.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura sad kahyangan	100%	12	56.200.000	
					13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	75 Kali	13	50.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	gedung kantor yang dipelihara	3 unit	1	150.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 unit	2	190.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	3	25.000.000	
					4	Penataan dan Pengelolaan Arsip	-	persentase penataan dan pengelolaan arsip	100%	4	30.000.000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Bappelitbangda Kabupaten Karangasem	A	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	-	Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD dan laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	65 buku	1	50.000.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase dokumen data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditindaklanjuti	100%	1	Penyusunan Profil Daerah	-	Jumlah buku Profil Daerah Kabupaten Karangasem dan SIPD yang tersusun	100 buku	1	150.000.000	
					2	Pengembangan Program Sistem Perencanaan	-	Jumlah OPD Yangtervabilitas SIMDA dalam menyusun dokumen perencanaan	50 PD	2	200.000.000	
		Program kerjasama pembangunan	Persentase inovasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1	Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek	-	inovasi masyarakat yang masuk nominasi ristek (Buku Ristek dan SIDA)	10 Buku	1	200.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dan ditindaklanjuti	100%	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun	450 Buku	1	300.000.000	
					2	Penetapan RKPD	-	Jumlah dokumen RKPD maupun Perubahan RKPD yang tersusun	160 Buku	2	200.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8	
					3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	-	Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersusun	120 Buku	3	200.000.000
					4	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	-	KUA/PPAS; KUPA/PPASP; DPA dan DPPA	640 buku	4	200.000.000
					5	Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	Jumlah buku Laporan Akhir DAK	70 buku	5	200.000.000
							-	Jumlah bukulaporan DAK per Triwulan	72 Buku		
					6	Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangasem	-	Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem	3 Kali	6	486.527.300
					7	Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem	-	Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 yang tersusun	20 Buku	7	750.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi yang tersusun dan ditindaklanjuti	100%	1	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan	-	Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan	15 buku	1	78.160.000
					2	Koordinasi dan Evaluasi perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, pariwisata	-	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Evaluasi perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, pariwisata	15 buku	2	150.000.000
					3	Penyusunan indikator ekonomi daerah	-	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang tersusun	50 Buku	3	63.100.000
					4	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	15 Buku	4	50.000.000
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100%	1	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	-	Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	5 Buku	1	62.856.400

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	-	Jumlah laporan Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	6 Buku	2	100.262.800	
					3	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	-	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	25 Buku	3	210.000.000	
					4	Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa dan satuan pol PP	-	Jumlah laporan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa dan satuan pol PP	7 Buku	4	200.000.000	
		Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase dokumen hasil perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersusun dan ditindaklanjuti	100%	1	Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata Ruang dan pertanahan	-	Terkoordinasinya infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata Ruang dan pertanahan	12 bulan	1	610.000.000	
					2	Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran	-	Terkoordinasinya infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran	30 laporan	2	350.000.000	
					3	Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	-	Terkoordinasinya infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	30 buku	3	300.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Frekuensi Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	1	80.000.000	
JUMLAH		10 PROGRAM			40 KEGIATAN						6.904.470.000	
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
29	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Persentase terpenuhinya pelayanan surat menyurat	100%	1	6.600.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Persentase terpenuhinya pelayanan komunikasi, sumber daya listrik dan air	100%	2	330.000.000	
					3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	Persentase terpenuhinya sarana administrasi keuangan	100%	3	10.450.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					4	Penyediaan alat tulis kantor	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis	100%	4	154.000.000	
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	5	55.000.000	
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	Persentase terpenuhinya fasilitas penerangan gedung kantor	100%	6	55.000.000	
					7	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	7	88.000.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	-	Persentase terpenuhinya bahan bacaan	100%	8	45.072.500	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	9	92.950.000	
					10	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	10	220.000.000	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung/ administrasi/ teknis/ keamanan	100%	11	3.923.100.000	
					12	Pengadaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan canang, bebanten dan piodalan	100%	12	66.000.000	
					13	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	-	Persentase pelaksanaan kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100%	13	55.000.000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pembangunan gedung kantor	-	Terbangunnya Gedung BPKAD dan Tembok Penyengker Pos Tianyar Barat	2 paket	1	3.000.000.000	
					2	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	-	Tersedianya sarana operasional kendaraan roda dua	20 unit	2	500.000.000	
					3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Tersedianya perlengkapan kantor	5 paket	3	22.827.200	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
					4	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah paket peralatan kantor yang diadakan	9 paket	4	358.000.000	
					5	Pengadaan mebeleur	-	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	4 paket	5	204.827.700	
					6	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	3 unit	6	234.588.310	
					7	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	-	Persentase kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	100%	7	230.000.000	
		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	100%	1	Pemeliharaan mebeleur	-	Persentase mebeleur yang terpelihara	100%	1	6.050.000	
					2	Rehab sedang /berat gedung kantor	-	Penataan halaman kantor	1 paket	2		
					3	Penataan dan Pemeliharaan arsip	-	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan dan pemeliharaan arsip tahun berkenaan	100%	3	55.000.000	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	Persentase pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja PD yang tepat waktu	100%	1	22.000.000	
					2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Persentase pelaporan keuangan akhir tahun PD yang tepat waktu	100%	2	22.000.000	
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Opini pemeriksaan BPK RI	WTP	1	Persertifikatan tanah	-	Jumlah tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disertifikatkan	2 bidang	1	75.384.100	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pencapaian target penerimaan pajak daerah	100%	1	Penyusunan rancangan peraturan daerah / peraturan kepala daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah	-	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah yang tersusun	1 buah	1	81.763.000	
			Opini pemeriksaan BPK RI	WTP	2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang tersusun	1 buah	2	299.442.110	
					3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	-	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tersusun	1 buah	3	205.669.200	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	- Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang tersusun	1 buah	4	276.559.250
				5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	- Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun	1 buah	5	158.205.300
				6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD	- Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD yang tersusun	1 buah	6	233.588.190
				7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD	- Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD yang tersusun	1 buah	7	179.298.240
				8	Peningkatan manajemen aset / barang daerah	- Jumlah perangkat daerah yang terdata asetya	40 OPD	8	136.098.710
				9	Pendataan dan penghapusan aset – aset daerah (inventaris barang yang rusak)	- Jumlah perangkat daerah yang terdata aset daerah untuk dihapuskan	41 OPD	9	34.694.000
				10	Penentuan dan penetapan pajak daerah	- Persentase pajak terhutang yang diterbitkan ketetapanya	100	10	98.134.950
				11	Penanganan Keberatan pajak	- Persentase permohonan keberatan, keringanan dan banding yang tertangani	100%	11	51.145.600
				12	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	- Tercapainya target penerimaan BPHTB	100%	12	174.964.790
				13	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	- Persentase objek pajak reklame yang lunas pajak	100%	13	19.899.000
				14	Penyusunan database wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah	- Persentase jenis pajak yang terdata dalam database wajib pajak daerah	100%	14	15.648.600
				15	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah	- Persentase kelompok belanja yang terfasilitasi kebijakan dan penatausahaan	100%	15	415.632.250
				16	Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah	- Jumlah aparatur pelaksana yang mengikuti bimbingan teknis	20 orang	16	165.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				17	Intensifikasi pengelolaan PBB-P2	- Persentase pencapaian target penerimaan PBB-P2	100%	17	520.323.900
				18	Monitoring dan penyuluhan pajak daerah	- Persentase jenis pajak yang dimonitoring	100%	18	3.296.546.146
				19	Pendataan pajak daerah	- Persentase WP Official assesment yang didata objek pajaknya	100%	19	174.790.000
				20	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah	- Jumlah jenis pajak yang diadakan penilaian wajib pajak teladan	100%	20	197.969.200
				21	Pemeriksaan pajak daerah	- Jumlah jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib apajak dalam memenuhi kewajibannya	100%	21	68.636.040
				22	Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah	- Persentase pemeliharaan aplikasi komputer dan pengembangan	100%	22	128.605.400
				23	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD, dan DKPBMD	- Persentase jumlah dokumen yang tersusun dalam rangka pengelolaan BMD	100%	23	28.968.390
				24	Penagihan pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB	- Jumlah jenis pajak yang terlaksana penagihannya	100%	24	88.217.360
				25	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	- Persentase pencapaian target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	21	25	86.792.750
				26	Penanganan keberatan PBB-P2 dan BPHTB	- Persentase permohonan keberatan, keringanan dan banding yang tertangani	100%	26	15.562.800
				27	Pembukuan PAD dan Pendapatan lainnya	- Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah	100%	27	63.623.340
				28	Penyampaian dan fasilitasi dana perimbangan dan bagi hasil	- Persentase pelaporan dana perimbangan dan dana bagi hasil yang tepat waktu	100%	28	173.672.620
				29	Analisa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan	- Jumlah Laporan hasil analisa yang tersusun	100%	29	74.656.450

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					30	Penyusunan laporan persediaan	-	Persentase jumlah laporan persediaan yang terfasilitasi	100%	30	44.367.400	
					31	Optimalisasi pemanfaatan aset	-	Persentase BMD yang dimanfaatkan secara optimal	100%	31	39.545.660	
					32	Penatausahaan piutang pajak daerah	-	Persentase piutang pajak daerah yang dicatat berdasarkan kualitas piutang	100%	32	35.757.480	
					33	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan daerah	-	Jumlah sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang terpelihara dan dikembangkan	1 buah	33	118.222.720	
					34	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah bidang tanah aset yang difasilitasi pengamanan BMD	3 bidang	34	34.694.660	
					35	Penatausahaan belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan	-	Persentase belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan yang terfasilitasi	100%	35	109.430.200	
					36	Pengelolaan administrasi gaji PNS Daerah	-	Persentase pengelolaan daftar gaji dan SKPP	100%	36	203.473.050	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terpenuhinya perahaan hari - hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan hari – hari besar nasional dan daerah	-	Jumlah terlaksananya perayaan hari besar nasional dan daerah	2 paket	1	77.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Opini pemeriksaan BPK RI	100%	1	Pembinaan sistem penyusunan laporan pertanggung jawaban daerah	-	Persentase perangkat daerah yang mengikuti pembinaan sistem penyusunan pertanggung jawaban	100%	1	129.727.400	
JUMLAH		7 PROGRAM			64 KEGIATAN						18.088.175.966	
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA												
30	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu	100%	1	9.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	Persentase terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	100%	2	120.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Persentase terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional yang terselenggarakan	100%	3	16.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Persentase terbayarnya jasa dan bahan alat kebersihan	100%	4	42.000.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor pada BKPSDM	100%	5	40.000.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	100%	6	30.000.000	
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	-	Persentase tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	100%	7	15.000.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Persentase tersedianya bahan bacaan	100%	8	10.000.000	
					9	Penyediaan makanan & minuman	-	Persentase tersedianya makanan dan minuman	100%	9	45.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar	100%	10	150.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis/Keamanan	-	Persentase terbayarnya jasa tenaga pendukung, administrasi, teknis/keamanan	100%	11	200.000.000	
					12	Penyediaan biaya canang, Beban/Piodalan	-	Persentase terbayarnya pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang terlaksana	100%	12	40.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	-	Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terbayar	100%	13	20.000.000	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	100%	1	100.000.000	
			Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	2	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Persentase tersedianya peralatan gedung kantor	100%	3	100.000.000	
			Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	4	Pengadaan Mebeleur	-	Persentase tersedianya mebeleur	100%	4	70.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan	100%	5	100.000.000	
					6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional yang ada	100%	6	135.000.000	
					7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	7	45.000.000	
					8	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	-	Persentase terselesaikannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	8	200.000.000	
					9	Penataan halaman dan taman kantor	-	Persentase penataan halaman dan taman kantor	100%	9	15.000.000	
		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur	100%	1	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	-	Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	1	20.000.000	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	-	Persentase pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu	0%	1	13.000.000	
					2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	0%	2	15.000.000	
		PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Persentase perayaan HUT RI dan HUT Kota Amlapura	100%	1	50.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat PIM dalam rangka Meningkatkan Profesionalisme aparatur Pemerintah	3000%	1	Pendidikan Penjurangan Struktural	-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural	30 Pejabat	1	1.115.598.100	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai ASN yang diikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	17500%	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	-	Jumlah CPNS yang lulus Diklat Dasar/Prajabatan	44 Orang	1	4.795.783.700	
					2	Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	-	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan	56 Orang	2	990.500.000	
					3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-	Jumlah PNS yang Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	0	3	0,00	
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	95%	1	Seleksi Penerimaan CPNS	-	Persentase Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	100%	1	1.200.000.000	
					2	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	-	Persentase PNS/Aparatur yang SK Kenaikan Pangkatnya terselesaikan	100%	2	120.000.000	
					3	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	-	Persentase Aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	100%	3	45.000.000	
					4	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	-	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	100%	4	40.000.000	
					5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Persentase terpenuhinya Buku Laporan Monitoring dibidang Kepegawaian	100%	5	40.000.000	
					6	Pengelolaan, Pendataan Pelayanan dan Penyusunan data/informasi kepegawaian	-	Persentase terpenuhinya buku data informasi kepegawaian	100%	6	45.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				7	Pengambilan sumpah dan janji pegawai dan Penyerahan SK PNS	- Persentase jumlah aparatur yang diambil sumpah janjinya dan penyerahan SK yang terselesaikan	100%	7	0
				8	Penataan Sistem Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	- Persentase jumlah karpeg, karis dan karsu yang terselesaikan	100%	8	45.000.000
				9	Penempatan PNS	- Persentase jumlah penempatan PNS/Aparatur yang dapat terselesaikan	100%	9	925.083.900
				10	Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian	- Persentase jumlah PNS/Aparatur yang mengikuti Pembinaan Teknis Kepegawaian	100%	10	70.624.300
				11	Pembinaan KORPRI	- Persentase pelaksanaan kegiatan KORPRI	100%	11	75.000.000
				12	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	- Persentase Penyelesaian SK Pensiun PNS/Aparatur Tepat Waktu	100%	12	140.000.000
				13	Pembinaan Penyusunan dan Pelaporan Data Kepegawaian	- Persentase terpenuhinya buku laporan data kepegawaian semesteran	100%	13	50.000.000
				14	Penataan Sistem Pengurusan Konversi NIP dan Kartu PNS Elektrik (KPE)	- Persentase Usul Konversi NIP dan KPE yang diproses dan didistribusikan	100%	14	45.000.000
				15	Penataan Sistem Penyimpanan dan Pengelolaan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Arsip Kepegawaian	- Persentase Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian yang disimpan dan dikelola	100%	15	140.000.000
				16	Penyelesaian Penyusunan Kebutuhan ASN	- Persentase Terpenuhinya Penyusunan Kebutuhan ASN	100%	16	50.000.000
				17	Facilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS	- Persentase penyelesaian penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan ketentuan	100%	17	200.000.000
JUMLAH		8 PROGRAM		47 KEGIATAN				11.752.590.000	
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD									

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
31	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Terlaksananya Surat Menyurat	1800 lbr	1	14.175.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Terselenggaranya Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik Kantor dan 3 Rumah Jabatan	3 Jenis	2	489.142.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bln	3	691.796.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	4	126.478.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	5	32.842.000	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bln	6	27.951.000	
					7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan	12 Bln	7	7.686.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	8	15.373.000	
					9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Tersedianya Bahan Bakar Gas	12 Bln	9	6.987.000	
					10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bln	10	572.572.700	
					11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi keluar Daerah	-	Terselenggaranya Raker dan Konsultansi Luar Daerah	20 Kali	11	160.000.000	
					12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/ Keamanan	-	Terbayarnya Upah Tenaga Kemanan, Sopir dan Teknis	12 Bln	12	1.127.400.000	
					13	Penyediaan Biaya Canang, bebanten dan Piodalan	-	Terselenggaranya Banten Piodalan, Galungan, Kuningan, Kesanga, Purnama, Tilem dan Persembahyangan Sehari-hari	12 Bln	13	96.911.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	-	Terselenggaranya Raker dan Konsultasi Dalam Daerah	20 Kali	14	67.641.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi	100%	1	Pembangunan Rumah Jabatan	-	Terbangunnya Rumah Jabatan	0%	1	-	
					2	Pembangunan Gedung Kantor	-	Terbangunnya Gedung dan bangunan pelengkap Kantor	1 Unit	2	500.000.000	
					3	Pengadaan Mobil Jabatan	-	Tersedianya mobil Jabatan	0%	3	-	
					4	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	4 Unit	4	105.000.000	
					5	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	12 Bln	5	74.895.000	
					6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bln	6	190.460.000	
					7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bln	7	311.304.500	
					8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	-	Terpeliharanya Rumah Jabatan	12 Bln	8	227.170.000	
					9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bln	9	250.185.000	
					10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	-	Terpeliharanya Mobil Jabatan	12 Bln	10	148.140.000	
					11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bln	11	560.000.000	
					12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	-	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan	12 Bln	12	37.750.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bln	13	553.000.000	
					14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	-	Terpeliharanya Rumah Jabatan	12 Bln	14	-	
					15	Penataan Halaman dan Taman Kantor	-	Tertatanya Halaman dan Taman Kantor	12 Bln	15	60.500.000	
					16	Pegelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	-	Tertatanya Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	12 Bln	16	59.681.800	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	Tersedianya Pakaian dinas sesuai jumlah yang dibutuhkan	90 Stel PSH	1	897.475.000	
									45 Stel PSR			
									45 Stel PSH LP			
									45 stel pakaian tradisional			
									45 Stel PSL			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan	100%	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	6 Jenis Laporan	1	45.700.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah yang direncanakan dalam PROLEGDA, jumlah Perda Inisiatif DPRD dan Rata-rata jumlah bulan penyelesaian pembahasan perda	5 Perda	1	7.659.146.300	
									2 Perda Inisiatif			

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						2 Bulan	
						11 Kep. DPRD	
				2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	- Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	2 295.678.000
						2 Persetujuan	
						31 Kesepakatan	
				3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	- Jumlah Keputusan dewan yang dihasilkan	150 Keputusan Rapat	3 320.000.000
				4 Rapat-Rapat paripurna	- Terselenggaranya rapat paripurna pelantikan	2 Kali	4 399.000.000
				5 Reses	- Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses dan menyerap aspirasi	45 Orang	5 4.540.000.000
				6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	- Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	45 Orang	6 1.112.500.000
				7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	- Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti BinteK dan mendapatkan tambahan wawasan	45 Orang	7 5.137.455.500
				8 Peliputan dan Penyebarluasan Informasi	- Jumlah kegiatan DPRD yang diliput dan diinformasikan	28 Kali	8 1.419.000.000
				9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	- Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja luar daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	45 Orang	9 15.843.000.000
				10 Peningkatan Penataan Administrasi Keuangan DPRD	- Tertatanya Administrasi Keuangan	5 Jenis Buku Register	10 136.980.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					11	Perawatan dan Pengobatan serta Cek Up	-	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up	45 Orang	11	294.000.000	
					12	Publikasi dan Interaksi Media	-	Terhimpunnya Dokumentasi Kegiatan	11 Jenis Surat Kabar, Tabloid dan Majalah	12	945.874.200	
					13	Jaminan Perlindungan Dasar Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Terjaminnya Perlindungan Dasar Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD		13		
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan.	100%	1	Perayaan Hari-hari besar Nasional	-	Terselenggaranya Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	2 Kali	1	89.800.000	
JUMLAH		6 PROGRAM			46 KEGIATAN						45.650.650.000	

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

32	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Menyurat Yang Ditangani	1000 berkas		19.100.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang dibayar	59 rekening		960.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Ruang dan Gedung di Lingkungan Setda menjadi bersih dan rapi	10 gedung		166.270.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan ATK	42 jenis		146.730.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Tersedianya barang cetakan dan dan Photo Copy	13 jenis		75.100.000	
					6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga rumah Jabatan Sekda	12 bulan		102.850.000	
					7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat pada Bagian Umum dan Sekda	12 bulan		265.050.000	
					8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya Perjalanan dinas ke luar Daerah	12 bulan		1.708.610.000	
					9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan		Tersedianya jasa Tenaga harian dan tenaga kontrak	13 dan 91 Tenaga harian dan tenaga kontrak		1.734.580.000	
					10	Penyediaan Biaya Canang, Bebanen Piodalan		Tersedianya Banten dan Canang Sehari-hari,Purnama Tilem pada Kantor Bupati dan Rumah Dinas	12 bulan		202.860.840	
					11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Lancarnya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		250.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan dan Rumah-Rumah Dinas yang terpelihara dan kondisinya menjadi baik	3 Unit	154.440.000
					2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan Dinas /Operasional bagian Umum dan Setda kondisinya menjadi baik	100%	109.660.000
					3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor pada Bag.Umum dan Setda Kab.karangasem Kondisinya menjadi baik	100%	65.000.000
					4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Jumlah Taman kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, wakil berhasil diperbaiki dan kondisinya menjadi baik	3 lokasi	164.360.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terselenggaranya Pelatihan Tenaga Keamanan	100%	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	121 stel	326.810.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Realisasi Keuangan yang dapat tersusun	12 dokumen	30.940.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	1 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar Negeri dalam rangka koordinasi	12 bulan	3.079.900.000
					2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	634.750.000
					3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	1.056.900.000
					4 Penerimaan Tamu-Tamu Bupati dan Wakil Bupati	Penerimaan Tamu-Tamu Bupati dan Wakil Bupati terlayani dengan baik	100%	123.909.000
					5 Pemeliharaan Kesehatan/ Medical Check UP	Terlaksananya medical check up KDH dan WKDH	2 orang	300.000.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terselenggaranya Verifikasi SPP 10 Bagian di Sekretariat Daerah	100%	1 Verifikasi SPP	Jmlah Administrasi Keuangan Terverifikasi	900 berkas	93.340.000
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya Penataan Arsip di Sekretariat Daerah.	100%	1 Penataan Arsip dan Pengelolaan Data Pegawai	Tertatanya Arsip Keuangan dan Pemerintahan Setda Kab. Karangasem	1068 berkas	58.200.000
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	600 lembar	2.500.000
					2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	39 jenis	13.003.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				3	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 jenis	10.700.000	
				4	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nakanan dan minuman rapat yang tersedia	400 kotak	6.900.000	
				5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat/koordinasi ke luar daerah dapat terlaksana	1 kali	15.000.000	
				6	Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis / keamanan	Terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	96 OB	144.000.000	
				7	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	Tersedianya biaya canang, bebanten untuk bakti penganyar	1 paket	2.000.000	
				8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat/koordinasi dalam daerah dapat terlaksana	6 kali	6.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	2 unit	17.630.000
				2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	44.700.000	
				3	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	32.700.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan dalam Pelayanan HUT RI dan hari besar	90%	1	Perayaan hari-hari besar nasional	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	2 peringatan	300.800.000
				2	Perayaan Hari-Hari Besar Daerah	Perayaan hari-hari besar daerah dapat terselenggara dengan baik	2 peringatan	400.000.000	
				3	Perayaan menyambut Tahun Baru	Jumlah perayaan menyambut Tahun Baru dapat berjalan dengan baik	1 peringatan	190.000.000	
		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya kerja sama antar pemerintah daerah	90%	1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik	Terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dapat terlaksana dengan baik	100%	326.190.000
		Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional (berdasarkan keputusan Mendagri)	ST (Sangat Tinggi) 3,3	1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	ST (Sangat Tinggi)3,3	121.800.000
				2	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Jumlah LKPJ Bupati dapat tersusun tepat waktu	1 dokumen	84.200.000	
				3	Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati	8 kecamatan	47.000.000	
				4	Pembinaan Dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya penyusunan SPM enam pelayanan dasar	2 dokumen	97.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
		Program Penataan Administrasi Kewilayahan	persentase kelengkapan data base administrasi kewilayahan	90%	1 Fasilitasi Tapal Batas Administrasi Antar Daerah	Jumlah administrasi tapal batas antar daerah dapat diselesaikan	2 segmen	39.590.000
					2 Fasilitasi Penerimaan Unsur-Unsur Rupabumi/toponimi	Terselenggaranya fasilitasi penerimaan unsur-unsur rupabumi/toponimi	8 kecamatan	30.000.000
					3 Fasilitasi Penataan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya fasilitasi penataan pemanfaatan Tanah	8 kecamatan	45.000.000
					4 Pembangunan/pemeliharaan monumen tapal batas antar kabupaten	Terselenggaranya pembangunan/pemeliharaan monumen tapal batas antar kabupaten selama 1 tahun	1 paket	150.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	persentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		-
					BAGIAN ORGANISASI			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	156 lembar	600.000
					2 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	26 jenis	8.000.000
					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3.500.000
					4 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Kotak	-
					5 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 kali	78.870.000
					6 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Terbayarnya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Keamanan	72 0/B	108.000.000
					7 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	17 kali	3.600.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terselenggaranya pelayanan Sarana dan prasarana aparatur	100%	1 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional kondisinya menjadi baik	3 unit	50.000.000
					2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor kondisinya menjadi baik	100%	17.050.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya Laporan Kinerja	100%	1 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan IKM tepat waktu	40 OPD	19.000.000
					2 Pembinaan dalam rangka Penyusunan SOP	Jumlah PD yang dibina dalam penyusunan SOP	8 OPD	43.000.000
					3 Pendampingan ISO 2001-2008	Jumlah perangkat daerah yang bersertifikat ISO 9001-2015	OPD	32.000.000
					4 Penyusunan dan penulisan LAKIP Kabupaten Karangasem	Nilai LAKIP Kabupaten Karangasem	Predikat B, 69	60.350.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui pembinaan Gerakan Disiplin Nasional dan rapat Rutin/Rapat kerja	100%	1	Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Persentase meningkatnya disiplin ASN	100%	75.000.000	
					2	Rapat Rutin/ rapat kerja	Jumlah pelaksanaan rapat rutin/ rapat kerja dalam 1 tahun	10 kali	127.000.000	
					3	Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah buku laporan pembinaan pelayanan publik	55 buku	50.000.000	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Forum Pertemuan sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Bali	100%	1	Forum Pertemuan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia Wilayah Bali	Terlaksananya forum pertemuan Sekretaris daerah seluruh Indonesia wilayah Bali	1 kali	462.000.000	
		Program Penataan Kelembagaan Daerah	Persentase terpenuhinya Penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku	100%	1	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya kelembagaan perangkat Daerah	100%	90.000.000	
					2	Analisis jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan yang tersusun dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	90.000.000	
					3	Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Roadmap reformasi Birokrasi yang tersusun	1 dokumen	90.000.000	
					4	Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan standar kompetensi jabatan	40 OPD	75.000.000	
					5	Analisis beban kerja	Jumlah Dokumen ABK yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	60.000.000	
					6	Evaluasi Jabatan	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Evaluasi Jabatan	100%	47.550.000	
					BAGIAN HUKUM DAN HAM					
		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	54 jenis	33.600.000	
					2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	22 jenis	12.600.000	
					3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah upah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang terbayar	108 O/B	128.000.000	
					4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 kali	30.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7	-8
					5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat dilaksanakan	55 kali	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pemeliharaan rutin/berkala/kendaraan dinas/operasional	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100%	97.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala/perengkapan gedung kantor	persentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	20.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin aparatur	100%	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	50 PNS	50.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Realisasi keuangan yang dapat tersusun tepat waktu	7 laporan	7.000.000	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	1	Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat	200 peserta	140.000.000	
					2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk Hukum Daerah yang dapat ter-entry dan ter-upload ke dalam Website JDIH	600 dokumen	175.000.000	
					3	Pembahasan, Penelitian, Penyusunan,Koordinasi dan Konsultasi Rancangan Perda dan Peraturan Bupati (Produk hukum Daerah)	Jumlah Perda dan Perbup serta Keputusan Bupati yang diterbitkan	600 P.HD	335.000.000	
					4	Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya sosialisasi rancangan produk Hukum Daerah	13 P.HD	50.000.000	
		Program Pembinaan Sarana dan prasaran Hukum	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	100%	1	Penyusunan laporan pelaksanaan RANHAM	Tersusunnya laporan pelaksanaan RANHAM secara berkala setiap 6 (Enam) bulan dalam 1 Tahun	4 laporan	40.000.000	
					2	Pembinaan dan Pembentukan Calon Desa Sadar Hukum (CDSH)	Jumlah Masyarakat yang ikut pembinaan dan pembentukan Calon desa sadar Hukum (CDSH)	Orang	-	
					3	Penyuluhan Hukum	Terwujudnya peningkatan pemahaman da pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Hukum dan Perlindungan HAM	100 peserta	39.200.000	
					4	Pelayanan Bantuan Hukum	Terwujudnya peningkatan pemahaman da pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Hukum dan Perlindungan HAM	3 kasus	50.000.000	
					5	Penanganan masalah-masalah/kasus-kasus hukum pemerintah Kabupaten Karangasem	Terlaksanannya penanganan masalah-masalah/kasus kasus hukum Kab.Karangasem	4 kasus	350.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				6	Fasilitasi Permohonan rekomendasi tanah pelaba pura	Terselesainya Permohonan rekomendasi tanah pelaba pura	2 kasus	20.000.000	
					BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	120 lembar	600.000
					2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah tersedianya Alat Tulis kantor	18 jenis	6.770.000
					3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	3.000.000
					4	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	TersedianyaJasa tenaga Non Pegawai / Kontrak	96 O/B	107.400.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional kondisinya menjadi baik	100%	45.077.000
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor kondisinya menjadi baik	100%	18.500.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	persentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lakip, LKPJ dan LPPD OPD yang tersusun tepat waktu	30 Buku	18.500.000
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terselenggaranya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	100%	1	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah paket pekerjaan dapat dimonitoring dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku	164 paket	85.500.000
					2	Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Renja,RKA,DPA, Renstra, DPPA yang diselesaikan dan disusun tepat waktu	50 buku	35.000.000
					3	Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan SKPD dan TEPPRA tersusun tepat waktu	49 buku	92.500.000
					4	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksannanya kunjungan evaluasi pembangunan di 8 Kec.agar hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat	15 kali	50.000.000
						BAGIAN PERLENGKAPAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1075 lembar	6.230.000
					2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dalam setahun	44 jenis	48.240.000
					3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	6 jenis	32.400.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
					4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Elektronik Penerangan Bangunan	Persentase pemeliharaan jaringan instalasi listrik di lingkungan setda dalam 1 tahun	100%	60.000.000	
					5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minuman rapat	950 kotak	26.850.000	
					6	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/ Keamanan	TersedianyaJasa tenaga Non Pegawai / Kontrak	324 O/B	372.600.000	
					7	Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah SPPT PBB	10 SPPT PBB	30.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun untuk kepentingan kantor Setda	1 unit	3.374.785.000	
					2	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan wakil Bupati	1 unit	900.000.000	
					3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas untuk kegiatan operasional yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemda	1 unit	1.000.000.000	
					4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan untuk keperluan kelengkapan sarana dan prasana kantor	20 item	1.012.820.000	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	100%	75.000.000	
					6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor, halaman, taman dan lainnya yang dipelihara	1005	1.000.000.000	
					7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua	100%	2.000.000.000	
					8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan kantor di Sekretariat Daerah	100%	150.000.000	
					9	Penyediaan sarana mobilitasi darat Tamu-Tamu Pemerintah	tersedianya Sewa sarana mobilitas darat untuk tamu-tamu pemerintah dan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya	75 kali	100.000.000	
					10	Penyediaan Sarana dan Prasaranan Kegiatan Pemerintah Daerah	jumlah Kegiatan Pemkab yang dilaksanakan	144 kali	975.150.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksanana perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Kegiatan Perayaan hari-hari besar nasional	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar Nasional	4 kegiatan	1.992.500.000	
					2	Kegiatan Perayaan hari-hari besar daerah	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar daerah	3 kegiatan	1.000.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Jumlah laporan aset	4 laporan	500.000.000	
						BAGIAN EKONOMI				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	750 lembar	3.300.000	
					2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional kondisinya menjadi baik	100%	67.000.000	
					3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor dan ATK IT yang tersedia	38 jenis	30.250.000	
					4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	14.738.000	
					5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang tersedia	860 kotak	47.300.000	
					6	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan	Jumlah tenaga jasa pendukung administrasi yang terbayar	156 O/B	204.000.000	
					7	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Prekuensi terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50 kali	22.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor kondisinya menjadi baik	100%	85.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian Kinerja yang tersusun tepat waktu	40 buku	3.500.000	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah Pengusaha bidang Pertambangan Bahan galian C Yang terbina (pengusaha)	20%	1	Fasilitasi dan koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Sumber daya Mineral	Jumlah pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina	20 pengusaha	350.000.000	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase fasilitasi untuk BUMD yang belum mampu beroperasi, dan yang akan dibentuk serta fasilitasi realisasi investasi Pemda.	100%	1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	Terfasilitasinya Persuda yang belum beroperasi dan atau yang akan dibentuk serta fasilitasi terkait dengan investasi Pemda	1005	61.000.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Tentang Standar Satuan Harga Yang Tersedia	150 Buku	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Informasi Tentang Standar Satuan Harga Yang Tersedia	150 buku	175.000.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang Terbina	20%	1	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan Bidang Eenergi	Jumlah PLTS menjadi berkualitas dan dapat dipergunakan dengan baik	5 PLTS	130.000.000	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase terpenuhinya pelayanan dan prasarana perdagangan pasar tradisional dan pasar modern.	100%	1	Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Serta Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase terkendalinya inflasi daerah	< 4%	147.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8	
					2	fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terfasilitasinya pelaksanaan Monitoring Sarana Perekonomian Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemda dan Toko Modern	34 pasar tradisional dan Toko Moderen		125.000.000	
					3	fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan pariwisata	Tersusunnya Laporan Perkembangan Sarana Perekonomian Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	13 Buku		288.000.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tingkat Cakupan Pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)	60%	1	Pembinaan Terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir	Tingkat Cakupan Pelayanan Perusahaan umum Daerah Tirta Tohlangkir yang terbina	100%		150.000.000	
						BAGIAN PENGADAAN					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran	3%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan terkirimnya surat-surat	100 Lembar		450.000	
					2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK, jenis ATK yang tersedia	35 Jenis		10.000.000	
					3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, jumlah barang cetakan yang tersedia	5 jenis		10.000.000	
					4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor; dan layanan internet pokja	6 Unit		100.000.000	
					5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan klarifikasi penyedia keluar daerah	12 bulan		300.000.000	
					6	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya jasa tenaga kontrak	36 O/B		90.000.000	
					7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan klarifikasi penyedia di dalam daerah	12 bulan		50.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,30%	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	12 bulan		60.000.000	
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor dan jaringan Internet	12 bulan		20.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan	1 kali	1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan	1 Kali		220.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	1	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Tersusunnya LRA,RFK, Renstra,Renja,LAKIP SKPD, Jumlah Laporan	45 Laporan		50.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah paket lelang yang ditangani	200 paket lelang	1	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket lelang yang ditangani	200 Paket lelang		800.000.000	
					2	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali		50.000.000	
					3	Penanganan Sanggah dalam pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kasus sanggah dari penyedia barang/jasa yang ditangani	Kasus		25.000.000	
					4	Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung { SimPel}	Tersedianya Software untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa	1 Paket		50.000.000	
		Program Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Membantu pemetaan OPD yang belum menyelesaikan pengumuman RUP di SIRUP dan memperoleh data statistik pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pengadaan, jenis pengadaan, besaran anggaran, alokasi waktu, lokasi pekerjaan dan metode dalam pemilihan penyedia	100%	1	Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan data paket pada SIRUP	Membantu pemetaan OPD yang belum menyelesaikan pengumuman RUP di SIRUP dan memperoleh data statistik pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pengadaan, jenis pengadaan, besaran anggaran, alokasi waktu, lokasi pekerjaan dan metode dalam pemilihan penyedia 50 OPD	50 OPD		35.000.000	
		Program Pelaksanaan Riset dan Analisa Pasar Barang/Jasa	Ketersediaan Barang/Jasa pada suatu wilayah sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan strategis pembangunan dan pengadaan pada tahun rencana dan memperoleh informasi untuk menjadi rekomendasi dalam identifikasi barang/jasa pemaketan dan merencanakan kebutuhan barang/jasa	100%	1	Penyusunan karakteristik Barang/Jasa pada Jenis Pengadaan Tertentu	Ketersediaan Barang/Jasa pada suatu wilayah sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan strategis pembangunan dan pengadaan pada tahun rencana dan memperoleh informasi untuk menjadi rekomendasi dalam identifikasi barang/jasa pemaketan dan merencanakan kebutuhan barang/jasa 50 OPD	50 OPD		40.000.000	
		Program Penyusunan dan Pemantauan Strategis Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan Kontrak berjalan tertib yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		1	Pembuatan SOP Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia	SOP dan Dokumen Pendukung proses perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia	10 SOP		25.000.000	
					2	Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia	Melakukan perbaikan atas kekurangan dan kelemahan dokumen perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia	200 paket		25.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8	
					3	Pendampingan pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan Kontrak berjalan tertib yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan implementasi mitigasi resiko dalam pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	200 paket		50.000.000	
		Program Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Penyediaan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik lokal	100%	1	Pengelolaan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik lokal	Pengelolaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Lokal	8 Kec.		40.000.000	
		Program Pelaksanaan Pengelolaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastrukturnya	Pengelolaan Sistem Pengadaan yang terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat berfungsi lebih optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan 1 jaringan integrasi	100%	1	Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem pengadaan terintegrasi dengan sistem lainnya	Pengelolaan Sistem Pengadaan yang terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat berfungsi lebih optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan 1 jaringan integrasi	1 Jaringan		35.000.000	
					2	Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sistem informasi pengadaan barang/jasa	Tersedianya infrastruktur sistem informasi pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan	1 Jaringan		100.000.000	
		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Melaksanakan layanan dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik	100%	1	Melaksanakan layanan dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik	Para pengguna dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dengan baik dan sesuai kebutuhan; 200 paket	200 Paket		25.000.000	
					2	Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa	Memberikan layanan registrasi dan verifikasi bagi pengguna sistem; 50 OPD dan para pelaku usaha	50 OPD		30.000.000	
					3	Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas	Layanan Informasi pengadaan barang/jasa dapat dengan mudah diakses masyarakat luar sesuai SOP, sehingga keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dapat tercapai; 200 paket	200 Paket		35.000.000	
		Program Pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyelenggaraan bimbingan teknis pelatihan pendampingan advisory dan coaching clinic	100%	1	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pendampingan, advisory dan coaching clinic	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pendampingan, Advisory dan Coaching Clinic sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja para pelaku PBJ; 50 OPD dan para pelaku usaha	50 OPD		85.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8	
					2	Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan	Terlaksananya kerjasama dengan Stakeholder terkait, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik; 5 OPD dan 1 Instansi vertikal (LKPP)	6 OPD/Instansi	100.000.000		
					3	Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ	Tingkat kematangan UKPBJ dapat tercapai dalam penilaiannya; 6 OPD dan 1 instansi Provinsi dan 1 Instansi vertikal	8 OPD/Instansi	50.000.000		
		Program Pelaksanaan Analisis Beban Kerja UKPBJ	Tersedianya Analisa Jabatan di UKPBJ sebagai dasar keputusan strategis lebih lanjut 24 orang untuk jabatan fungsional PBJ	100%	1	Meyusun Analisis Jabatan di UKPBJ	Tersedianya Analisa Jabatan di UKPBJ sebagai dasar keputusan strategis lebih lanjut 24 orang untuk jabatan fungsional PBJ	24 Orang	30.000.000		
					2	Pengelolaan personil UKPBJ	Melakukan atau mempersiapkan Bimtek dan sertifikasi PBJ untuk menjangkau calon personil UKPBJ maupun Jabfung PPBJ dengan berkoordinasi dengan OPD BKPSDM; 24 orang Jabatan Fungsional PBJ	24 Orang	25.000.000		
					3	Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi	Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian sengketa kontrak lebih tetib dan sesuai peraturan yang berlaku; 50 OPD terkait dan tim hukum	50 Orang	50.000.000		
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
		Program Pelayanan Adminitiasi Perkantoran	Persentase administrasi Perkantoran	100%	1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam Pengadministrasian	42 jenis	11.000.000		
					2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya arang Cetak dan Pengadaan dalam pengadministrasian	6 jenis	82.560.000		
					3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	25.000.000		
					4	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	380 kotak	13.750.000		
					5	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan	228 O/B	310.860.000		
					6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	7 kali	10.000.000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	66.000.000		
					2	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	100%	14.300.000		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8
		Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Desa adat/ pekraman yang dibina pengentasan kemiskinan kultural di Kab.Karangasem	8 DesaAdat/pekraman	1 Peningkatan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural Kabupaten Karangasem	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan kultur di kab. Karangasem	8 kali pembinaan		77.207.200	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan pola kemitraan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	90 orang	1 Peningkatan Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pola kemitraan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	90 Orang		181.935.600	
		Program Pengembangan Nilai budaya	Persentase Pengembangan nilai Budaya	100%	1 Peningkatan Pembinaan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui Darma Santi di Kabupaten Karangasem, Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Kali		272.981.000	
					2 Peningkatan pemahaman sastra agama	Terlaksananya pembinaan <i>Kepemangkuan/Serati Banten</i> yang tersebar di Kab.Karangasem	2 Hari		98.097.420	
					3 Pelaksanaan Upacara Keagamaan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan <i>Panca Yadnya</i> pada pura kahyangan jagat, pura sad kahyangan di Kabupaten, se Bali dan pura yang ada di Indonesia	100%		5.139.640.600	
					4 Paruman Sulinggih Kabupaten Karangasem	Meningkatnya pemahaman umat melalui hasil keputusan paruman sulinggih dan pemberian punia kepada pemuka agama/para sulinggih lanang Istri di kab.karangasem	1 Bisama		746.098.400	
					5 Peningkatan pemahaman sarana dan prasarana penunjang upacara keagamaan	Terlaksananya peningkatan pemahaman sarana prasarana penunjang Upacaramelalui sekaa wewalen	12 Bulan		127.501.630	
					6 Pelaksanaan Darmaduta dan Darmasrama	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan penyuluhan sastra agama terhadap masyarakat di Kabupaten karangasem	245Orang		60.551.610	
					7 Peningkatan Pembinaan Lembaga Umat	Jumlah Lembaga Umat yang menghadiri acara Buka Puasa, Natal, Waisak dan Imlek di Kabupaten Karangasem	5 Lembaga Umat		905.749.270	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Proposal Bantuan Sosial dan Hibah yang difasilitasi dan dimonitoring	2 Proposal berbadan hukum	1 Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah	Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Sosial dan Hibah yang berbadan Hukum di Kabupaten Karangasem	2 Proposal berbadan hukum		12.260.600	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7	-8
		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Kelompok Sekaa Teruna yang dibina di kabupaten Karangasem	8 kelompok sekaa Teruna	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah orang anggota Sekaa Teruna yang mengikuti kegiatan Pembinaan maupun lomba di Tingkat kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi	8 kelompok sekaa Teruna	39.431.140	
						BAGIAN HUMAS PROTOKOL				
		Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase administrasi Perkantoran	100%	1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	18.500.000	
					2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	3 buah	25.000.000	
					3	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	290 Kotak	15.080.000	
					4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali	50.000.000	
					5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	180 O/B	366.000.000	
					6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terselenggaranya kegiatan Rapat koordinasi , konsultasi dan rapat kedinasan lainnya	10 Kali	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang diadakan	17 Unit	45.000.000	
					2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	100%	186.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara dengan baik	100%	25.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pelatihan	20%	1	Pendidikan dan pelatihan Keprotokolkan	Jumlah Personil yang mengikuti Diklatke protokolkan	40Orang	120.000.000	
					2	Pendidikan dan pelatihan Jurnalistik	Jumlah Personil yang mengikuti Diklat Jurnalistik	40 Orang	120.000.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	100%	1	Fasilitasi Acara Resmi Pejabat Negara dan/Atau pejabat Pemerintah	Jumlah acara resmi pejabat negara/atau pejabat pemerintah Daerah yang terfasilitasi	60 kali acara resmi	250.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Terselenggaranya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	1	Pembinaan Regu Penyayi	Jumlah regu penyayi pemda yang dapat dibina	30 Orang	130.000.000	
					2	Pameran pembangunan	Terselenggaranya pameran pembangunan	10 hari	50.000.000	
					3	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah upacara bendera yang terlaksana dengan baik	21 kali Upacra bendera	165.000.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	100%	1	Peningkatan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang terdokumentasi dengan baik	3000 Exemplar	650.000.000	
					2	Pembuatan iklan layanan masyarakat	Iklan layanan masyarakat yang dapat diinformasikan	2 Paket	2.100.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase terlaksananya peran-peran kehumasan dengan baik	100%	1	Penerbitan media informasi pemerintah daerah	Jumlah media informasi yang diterbitkan	3000 Eksemplar			200.000.000	
					2	Publikasi interaksi media	Jumlah Interaksi media yang terpublikasi	1000 Kali penerbitan			2.500.000.000	
					3	Pelaksanaan kegiatan Temu Media, Arahan Media, Konferensi Media dan Peninjauan Media	jumlah kegiatan kerjasama dengan media	360 Kali			159.800.000	
					4	Orientasi Jurnalistik rekayasa penyampaian informasi publik	Jumlah personil yang mengikuti kegiatan orientasi jurnalistik	35 Orang			240.150.000	
					5	Press Room	Terseleenggaranya operasional press room	8 jenis			75.000.000	
JUMLAH		70 PROGRAM			211 KEGIATAN						52.468.407.310	

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

33	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan	100	1		11.880.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terselenggaranya komunikasi serta terpenuhinya kebutuhan air dan listrik 12 bulan	100	2		96.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan (5 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua)	100	3		204.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terselenggaranya penyediaan ATK 12 bulan	100	4		21.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	100	5		23.760.000	
					6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	100	6		7.800.000	
					7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan	100	7		13.200.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terselenggaranya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan	100	8		18.600.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8	
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	100	9	42.800.000	
					10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	100	10	140.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	Terselenggaranya pembayaran upah non PNS	100	11	129.060.000	
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	-	Tersedianya bebanten piodalan dan canang 12 bulan	100	12	48.000.000	
					13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	-	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	100	13	48.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Tersedianya peralatan gedung kantor (1 Almari Persediaan, 3 Kursi eselon IV, 20 Buah Kursi lipat)	100	1	60.000.000	
					2	Pengadaan mebulair	-	Tersedianya mebulair kantor (15 kursi kerja)	100	2	96.978.480	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Terpeliharanya bangunan/gedung/pagar halaman/taman 12 bulan	100	3	50.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan	100	4	42.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD	-	Terselenggaranya LAKIP dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	100	1	30.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Nasionalisme/Kebangsaan		1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	-	Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional	100	1	72.000.000	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%	1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	-	Terselenggaraan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 12 bulan	85	1	252.000.000	
			Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	2	Pengawasan fungsional (Reguler)	-	Terselenggaranya pengawasan fungsional (reguler)	WTP	2	311.750.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%	3	Pelaksanaan Inspeksi Mendadak / sidak	-	Terlaksananya Sidak pada SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	92	3	121.000.000	
			Prosentase jumlah kasus kerugian negara / daerah yang selesai ditindaklanjuti	95%	4	Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Kabupaten Karangasem	-	Terlaksananya pelaporan koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dan Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Karangasem	100	4	225.000.000	
			Prosentase Peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	95%								
			Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas	90%								
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja SKPD yang mendapat nilai minimal kategori B	91%	1	Evaluasi LAKIP SKPD	-	Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2020	75	1	75.000.000	
			Persentase peningkatan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	2	Reviu RKP, RKA, LKPD, Probitas audit dan Laporan DAK.	-	Terselenggaranya Reviu RKP, RKA, LKPD, Probitas audit dan Laporan DAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	95	2	350.000.000	
			Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas	95%	3	Peningkatan Kopetensi APIP, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan Bintek APIP	-	Peningkatan Kopetensi APIP dari Level 2 ke Level 3 , terselenggaranya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan Bintek APIP	Level 3	3	700.663.000	
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN, LKASN, LP2P	100%	1	Pelaporan LHKPN, dan LHKASN Kabupaten Karangasem	-	Terselenggaranya Laporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	100	1	163.530.864	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
			Persentase peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada SKPD melalui penerapan SPIP	95%	2	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karangasem	-	Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada SKPD melalui penerapan SPIP	90	2	251.405.000	
			Terbentuknya unit pengendalian gratifikasi	100%	3	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabaupaten Karangasem	-	Terbentuknya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	80%	3	200.000.000	
			Persentase terbentuknya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilyah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah	100%								
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah kasus/pengaduan terselesaikan	100%	1	Penanganan pemeriksaan tertentu, pengaduan masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi	-	Terselenggaranya pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat dan Pengendalian Gartifikasi	98	1	90.000.000	
			Menurunnya kasus praktek pungli di Kabupaten Karangasem	2%	2	Fasilitasi kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karangasem	-	Terlaksananya fasilitasi kegiatan salgas saber pungli Kab. Karangasem	6	2	254.942.856	
JUMLAH		8 PROGRAM				31 KEGIATAN					4.150.370.200	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGASEM												
34	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat menyurat yang terkirim	850 lembar	1	4.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	36 rekening bulan	2	45.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	12 unit	3	6.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	230 unit	4	5.000.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	1560 unit	5	29.500.000	
					6		-	Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	50 unit	6		
					7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	27000 lembar	7	20.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				8		- Jumlah barang cetakan yang terbayar 150 buku	8	
				9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar 205 unit	9 6.200.000	
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah surat kabar yang terbayar 1460 buah	10 7.600.000	
				11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar 10 unit	11 2.600.000	
				12	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar 560 kotak	12 32.000.000	
				13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi 9 orang kali	13 75.000.000	
				14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar 216 orang bulan	14 216.000.000	
				15	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	- Jumlah sarana upakara yang terbayar 12 paket bulan	15 39.000.000	
				16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi 50 orang kali	16 12.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang terbayar 2 unit	1 56.000.000
				2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar 3 buah	2 30.000.000	
				3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar 5 unit	3 48.000.000	
				4	Pengadaan Pembangunan Pelinggih dan Penyengker	- Jumlah Pengadaan pembangunan pelinggih dan penyengker Paket	4	
				5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit	5 14.000.000	
				6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 144 unit bulan	6 106.860.000	
				7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 16 unit	7 24.000.000	
				8	Penataan halaman dan taman kantor	- Jumlah halaman dan taman kantor yang terpelihara Unit	8	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun 7 dokumen	1 10.000.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	98%	1	Penerbitan Penduduk Pendaftar	- Jumlah desa/kelurahan dengan penduduk pendatang yang terdata untuk pengurusan SKTSnya 11 desa/kelurahan	1 25.000.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	61%	1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	- Jumlah lembaga tradisional yang terbina Lembaga tradisional	1 155.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8		
					2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	-	Jumlah pelaku seni yang terbina	15 orang/kelompok	2	43.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana	75%	1	Tim Penggulangan Kemiskinan Kecamatan	-	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya	11 desa/kelurahan	1	20.000.000	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ kelurahan yang terfasilitasi	3 kasus	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Jumlah anggota tim terpadu penanganan konflik sosial kecamatan yang terfasilitasi	40 orang	1	10.000.000	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase desa pakraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	44%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Jumlah desa yang terbina kesadaran lingkungannya	1 desa	1	15.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	2 perayaan	1	157.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang	100%	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah desa/kelurahan yang terawasi kegiatan pembangunannya	11 desa/kelurahan	1	28.000.000	
					2	Pembinaan Lomba Desa	-	Jumlah desa/kelurahan yang terbina tata kelola administrasinya	4 desa/kelurahan	2	26.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan	100%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	Jumlah desa yang terbina administrasi pemerintahnya	8 desa	1	22.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa/kelurahan yang mendapat pembinaan	100%	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	-	Jumlah anggota organisasi perempuan desa/kelurahan dan kecamatan yang terbina	15 orang	1	20.000.000	
					2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	-	Jumlah PKK desa/kelurahan yang terbina	4 desa/kelurahan	2	25.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa tepat waktu	90%	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	-	Jumlah desa yang terevaluasi APBdesanya	8 desa	1	25.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan promosi kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan pemberdayaan pola hidup sehat di masyarakat	83%	1	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	-	Jumlah sekolah yang terbina pola hidup sehatnya	3 sekolah	1	20.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	60%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah atlet yang terbina	0	1		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa/kelurahan yang terverifikasi dan diusulkan dalam musrenbang kabupaten	97%	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	Jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	925 usulan	1	30.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu	98%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	Jumlah rekomendasi perijinan dan ijin yang dikeluarkan	663 buah	1	55.000.000	
			Indeks kepuasan masyarakat	80,55			-	Jumlah banjar dinas/lingkungan yang melaksanakan pelayanan perijinan goes to banjar	32 banjar/link			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat yang terkirim	450 lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	36 rekening bulan	2	25.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	4 unit	3	2.500.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	55 unit	4	1.200.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	400 unit	5	9.000.000	
							-	Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	30 unit		6.500.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	17000 lembar	6	5.100.000	
							-	Jumlah barang cetakan yang terbayar	50 buku		3.200.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	40 unit	7	4.500.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah surat kabar yang terbayar	1905 buah	8	4.800.000	
					9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	10 unit	9	1.800.000	
					10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	400 kotak	10	12.000.000	
					11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	2 orang kali	11	15.000.000	
					12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	132 orang bulan	12	378.600.000	
							-	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	120 orang bulan			
					13	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	-	Jumlah sarana upakara yang terbayar	12 paket bulan	13	27.000.000	
					14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	25 orang kali	14	6.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terbayar	60 set	1	25.000.000	
					2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	8 unit	2	23.000.000	
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	3	9.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	60 unit bulan	4	23.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 unit	5	13.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	98%	1	Pengembangan data base kependudukan	-	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1	21.000.000	
		Program Pengembangan Data/informasi	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT	3 dokumen	1	Penyusunan profile daerah	-	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	1 profile	1	14.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana	75%	1	Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	-	Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	1 kegiatan	1	9.000.000	
					2	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	-	Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	499 orang	2	25.000.000	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ kelurahan yang terfasilitasi	3 kasus	1	Pelatihan Bagi Anggota Hansip/Linmas	-	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terlatih	26 orang	1	15.000.000	
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ lingkungan yang terehab/terpelihara	40%	1	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	-	Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	6 titik	1	90.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	2 perayaan	1	6.000.000	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SPPT yang tersebar di kelurahan	95%	1	Penyebaran SPPT pertanahan	-	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	7075 lembar	1	26.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang	100%	1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	143 usulan	1	13.000.000	
					1	Penilaian Lomba Desa	-	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi sebagai peserta dalam lomba kelurahan Tk. Propinsi	1 kelurahan	1	90.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase program kerja organisasi perempuan di kelurahan yang terlaksana	75%	1	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	22 orang	1	30.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	60%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah atlet yang terbina	20 orang	1	10.000.000	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pemberian tambahan makanan dan vitamin balita di kelurahan	95%	1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	6400 orang bulan	1	163.900.000	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan	78%	1	Pemilihan kepala lingkungan	-	Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	3 orang	1	13.000.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan kelurahan	40%	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	30 unit	1	21.300.000	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase terpeliharanya insfratraktur lingkungan di kelurahan	40%	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	-	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	5 paket	1	134.141.000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat menyurat yang terkirim	330 lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	48 rekening bulan	2	25.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	5 unit	3	2.250.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	49 unit	4	1.600.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	370 unit	5	9.000.000	
							-	Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	30 unit		6.500.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	14000 lembar	6	4.200.000	
							-	Jumlah barang cetakan yang terbayar	54 buku		3.500.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	70 unit	7	4.800.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah surat kabar yang terbayar	1460 buah	8	4.800.000	
					9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	10 unit	9	1.800.000	
					10	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	450 kotak/bungkus	10	12.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			
				11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	2 orang kali	11	15.000.000	
				12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	168 orang bulan	12	852.200.000	
						- Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	348 orang bulan			
				13	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	- Jumlah sarana upakara yang terbayar	12 paket bulan	13	27.000.000	
				14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	20 orang kali	14	6.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	50 set	1	29.000.000
					2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	2 unit	2	24.000.000
					3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	3	10.000.000
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	60 unit bulan	4	23.000.000
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	5	13.000.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	98%	1	Pengembangan data base kependudukan	- Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1	24.000.000
		Program Pengembangan Data/informasi	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT	3 dokumen	1	Penyusunan profile daerah	- Jumlah profile kelurahan yang tersusun	1 profile	1	15.000.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana	75%	1	Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	- Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	1 kegiatan	1	9.000.000
					2	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	- Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	758 orang	2	25.000.000
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ kelurahan yang terfasilitasi	3 Kasus	1	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	- Jumlah poskamling yang terbangun	1 unit	1	25.000.000
					2	Pelatihan Bagi Anggota Hansip/Linmas	- Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	58 orang	2	40.000.000
		Program Pembangunan dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Persentase terbangunnya fasilitas perhubungan lingkungan dikelurahan	40%	1	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	- Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang	4 titik	1	21.941.000
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	- Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	perayaan	1	6.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SPPT yang tersebar di kelurahan	95%	1	Penyebaran SPPT pertanahan	-	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	6165 lembar	1	27.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang	100%	1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	108 usulan	1	14.000.000	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase program kerja organisasi perempuan di kelurahan yang terlaksana	75%	1	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	30 orang	1	42.500.000	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	60%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah atlit yang terbina	40 orang	1	12.000.000	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	95%	1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	5655 orang bulan	1	310.967.000	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan	78%	1	Pemilihan kepala lingkungan	-	Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	8 orang	1	10.000.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan kelurahan	40%	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	1 unit	1	40.000.000	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase terpeliharanya insfrastuktur lingkungan di kelurahan	40%	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	-	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	8 paket	1	210.000.000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah surat yang terkirim	800 lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	36 rekening bulan	2	22.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	3 unit	3	2.250.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	20 unit	4	1.200.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	300 unit	5	8.500.000	
							-	Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	23 unit		6.000.000	
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	-	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	9300 lembar	6	2.800.000	
							-	Jumlah barang cetakan yang terbayar	40 buku		4.700.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	60 unit	7	4.500.000	
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah surat kabar yang terbayar	1905 buah	8	4.800.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8				
				9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	11 unit	9	1.800.000		
				10	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	350 kotak	10	11.000.000		
				11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	2 orang kali	11	15.000.000		
				12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	- Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	84 orang bulan	12	387.600.000		
						- Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	156 orang bulan				
				13	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	- Jumlah sarana upakara yang terbayar	12 paket bulan	13	27.000.000		
				14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	25 orang kali	14	6.000.000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terbayar	3 unit	1	22.000.000	
					2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	3 unit	2	20.000.000	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	3	12.000.000	
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	72 unit bulan	4	23.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	13 unit	5	10.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	98%	1	Pengembangan data base kependudukan	- Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1	20.000.000	
		Program Pengembangan Data/informasi	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT	3 dokumen	1	Penyusunan profile daerah	- Jumlah profile kelurahan yang tersusun	1 profile	1	11.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana	75%	1	Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	- Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	1 kegiatan	1	11.105.000	
					2	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	- Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	349 orang	2	25.000.000	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ kelurahan yang terfasilitasi	3 Kasus	1	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	- Jumlah poskamling yang terbangun	5 unit	1	25.000.000	
					2	Pelatihan Bagi Anggota Hansip/Linmas	- Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	68 orang	2	71.168.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ lingkungan yang terehab/terpelihara	40%	1	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	-	Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang	4 titik	1	20.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	2 perayaan	1	6.000.000	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SPPT yang tersebar di kelurahan	95%	1	Penyebaran SPPT pertanahan	-	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	3760 lembar	1	23.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang	100	1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	143 usulan	1	11.000.000	
					2	Penilaian Lomba Desa	-	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi sebagai peserta dalam lomba kelurahan Tk Provinsi		2		
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase program kerja organisasi perempuan di kelurahan yang terlaksana	75%	1	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	44 orang	1	42.055.000	
		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	60%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah atlet yang terbina	18 orang	1	8.000.000	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pemberian tambahan makanan dan vitamin balita di kelurahan	95%	1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	3425 orang bulan	1	75.100.000	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan	78%	1	Pemilihan kepala lingkungan	-	Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	3 orang	1	11.000.000	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan kelurahan	40%	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	13 unit	1	69.558.000	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase terpeliharanya infrastruktur lingkungan di kelurahan	40%	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	-	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	1 paket	1	120.555.000	
JUMLAH		65 PROGRAM			147 KEGIATAN						5.799.550.000	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ABANG												
35	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah bulan tersedianya surat menyurat	12 bulan	1	2.500.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	2	33.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
				3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang disamsat 9 buah	3 3.500.000		
				4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor 12 bulan	4 26.900.000		
				5	Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan	5 15.000.000		
				6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	6 8.000.000		
				7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	7 3.000.000		
				8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	8 6.000.000		
				9	Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan	9 1.500.000		
				10	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman dalam rapat rapat 12 bulan	10 25.000.000		
				11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah 12 bulan	11 35.000.000		
				12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	- Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang terbayarkan 12 bulan	12 296.400.000		
				13	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	- Jumlah bulan tersedianya biaya canang ,bebanten dan piodalan 12 bulan	13 35.000.000		
				14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan	14 18.700.000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1	Pembangunan gedung kantor	- Jumlah gedung kantor (aula rapat) yang dibangun 1 buah	1 150.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 buah	2	22.000.000	
					3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 buah	3	5.000.000	
					4	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 buah	4	12.000.000	
					5	Pengadaan mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang diadakan		5	-	
					6	Pengadaan pembangunan pelinggih dan penyengker	-	Jumlah paket terbangunnya pelinggih dan penyengker		6		
					7	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	Jumlah rumah dinas yang terpelihara		7		
					8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	8	5.000.000	
					9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	9 buah	9	100.000.000	
					10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 buah	10	5.000.000	
					11	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 unit	11		
					12	Penataan halaman dan taman kantor	-	Tertatanya halaman dan taman kantor	1 paket	12	5.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 buku	1	3.500.000	
					2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	2	6.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Tertata	95%	1	Penertiban penduduk pendatang	-	Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS	50 orang	1	10.500.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang Mendapat Pembinaan	50%	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	Jumlah lembaga adat yang dapat dibina	4 lembaga adat	1	44.500.000,00	
					2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	-	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina untuk ikut dalam kegiatan Pra PKB	3 kelompok seni	2	50.000.000,00	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Duta Olahraga Kecamatan yang Berprestasi	0%	1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-	Jumlah Cabang Olahraga yang dapat berpartisipasi dalam Porkab	10 cabang olahraga	1		
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungannya terkendali	3 Kasus	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	14 Desa	1	15.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinan	75%	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	-	Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	14 Desa	1	10.500.000	
		Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa yang Mendapat Pembinaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	35%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan	1 Desa pakraman	1	15.750.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 perayaan	1	115.500.000	
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang memiliki tatakelola administrasi yang baik	100%	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	14 Desa	1	20.000.000	
					2	Pembinaan lomba desa	-	Jumlah desa yang terbina	2 Desa	2	16.750.000	
		Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pembinaan	75%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	14 Desa	1	15.750.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Perempuan Desa yang Mendapat Pembinaan	100%	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-	Jumlah organisasi perempuan terbina	2 organisasi	1	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					2	Pembinaan 10 program pokok PKK	-	Jumlah PKK desa yang terbina	2 Desa	2	20.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan promosi kesehatan dengan pola hidup sehat	3 Sekolah	1	Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	-	Jumlah sekolah yang dibina	3 sekolah	1	30.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa tepat waktu	85%	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	14 Desa	1	20.000.000,00	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Desa yang Terverifikasi dan Diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten	75%	1	Penyelenggaraan musrenbang RKP	-	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	3 bidang usulan	1	45.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Tepat Waktu	95%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan	700 rekomendasi	1	40.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			45 KEGIATAN						1.303.250.000	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUBU												
36	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah bulan tersedianya surat menyurat	12 bulan	1	2.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	2	50.000.000	
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	10 Unit	3	4.000.000	
					4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	4	15.000.000	
					5	Penyediaan alat tulis kantor	-	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	5	15.000.000	
					6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6	8.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN		KET.		
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7		-8		
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7	10.000.000	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8	5.500.000	
					9	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	9	1.000.000	
					10	Penyediaan makanan dan minuman	-	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman dalam rapat rapat	12 bulan	10	18.000.000	
					11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	11	55.000.000	
					12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang terbayarkan	12 bulan	12	108.000.000	
					13	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	-	Jumlah bulan tersedianya biaya canang ,bebanten dan piodalan	12 bulan	13	43.500.000	
					14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	14	35.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket	1	10.000.000	
					2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 buah	2	40.000.000	
					3	Pengadaan mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 buah	3	10.000.000	
					4	Pengadaan pelinggih dan penyengker	-	Persentase terpenuhinya pelinggih dan penyengker	1 paket	4	100.000.000	
					5	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 paket	5		

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
				6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas terpelihara 10 Unit	6 120.000.000	
				7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 10 buah	7 10.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelaporan 100%	1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 buku	1 5.000.000	
				2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	- Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan 12 bulan	2 10.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang administrasi penduduk pendatangnya terdata 9	1	Penertiban penduduk pendatang	- Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS 9 Desa	1 20.000.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaksanaan pengembangan nilai budaya yang terfasilitasi 4	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah lembaga adat yang dapat dibina 4 lembaga adat	1 35.000.000	
				2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	- Jumlah Desa yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 9 Desa	2 35.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase atlit duta olahraga kecamatan yang berprestasi 45%	1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	- Persentase cabang olahraga yang berprestasi 100%	1 -	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah desa yang terkendali keamanan dan kenyamanan lingkungannya 9	1	Pelatihan Hansip/Linmas	- Jumlah Hansip yang dilatih 9 Desa	1 10.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya 9	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	- Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan 9 Desa	1 10.000.000	
		Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa yang aktif terhadap kebersihan lingkungan Hidup 9	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	- Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan 9 Desa	1 10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	2 perayaan	1	115.000.000	
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik	1	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	9 Desa	1	20.000.000	
					2	Pembinaan lomba desa	-	Jumlah desa yang terbina	1 Desa	2	15.000.000	
		Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan kapasitas aparatur pemerintahan desanya yang memadai	9	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	9 Desa	1	10.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah organisasi perempuan desa yang terbina untuk berpartisipasi dalam pembangunan	9	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-	Jumlah organisasi perempuan terbina	1 Organisasi	1	10.000.000	
					2	Pembinaan 10 program pokok PKK	-	Jumlah PKK desa yang terbina	9 Desa	2	15.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah sekolah yang telah melaksanakan promosi kesehatan dengan pola hidup sehat	2	1	Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	-	Jumlah sekolah yang dibina	3 sekolah	1	20.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang tepat waktu	9	1	Evaluasi APB Desa	-	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	9 Desa	1	20.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah usulan desa dan kecamatan yang terakomodir dalam musrenbang	10	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	9 Desa+ 1 Kecamatan	1	20.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu di kecamatan	600	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan	80 Ijin	1	35.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			40 KEGIATAN						1.075.000.000	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RENDANG												

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
37	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	375 Lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	-	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	36 rekening	2	20.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan jasa tenaga Clening service	12 bulan	3	25.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	4	10.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	-	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	12 bulan	5	10.000.000	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6	5.000.000	
					7	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	7	9.500.000	
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 bulan	8	500.000	
					9	Penyediaan Makan dan Minuman	-	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	9	10.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	-	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	12 bulan	10	40.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	-	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	14 orang /tahun	11	158.000.000	
					12	Penyediaan Biaya Canang Beban dan Piodalan	-	Jumlah sarana upakara yang terbayar	12 bulan	12	40.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	-	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	12 bulan	13	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1	Pembangunan Gedung Kantor	-	Jumlah Gedung kantor yang terbangun	1 unit	1	200.000.000	
					2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	2 unit	2	5.000.000	
					3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	2 unit	3	20.000.000	
					4	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	1 Unit	4	20.000.000	
					5	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	2 unit	5	21.000.000	
					6	Pengadaan Pembangunan Pelinggih dan Penyengker	-	Jumlah pembangunan pelinggih dan penyengker yg terbangun	1 paket	6	100.000.000	
					7	Pengadaan pembangunan Candi dan tembok kantor	-	Jumlah Terbangunnya candi dan penyengker kantor	1 paket	7	100.000.000	
					8	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	-	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 unit	8	4.000.000	
					9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	9	20.000.000	
					10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	13 unit	10	149.070.000	
					11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	25 unit	11	12.000.000	
					12	Penataan halaman dan taman kantor	-	Jumlah halaman dan taman kantor yg tertata	5 are	12	10.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan laporan keuangan	100%	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	3 Dokumen	1	10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
					2	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	-	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 dokumen	2	14.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang pengelolaan keuangan desanya baik	100%	1	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	-	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	6 desa	1	26.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa yang administrasi penduduk pendatangnya terdata	50%	1	Penerbitan Penduduk Pendatang	-	Jumlah desa yang data penduduk pendatangnya benar	6 desa	1	26.000.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang	60%	1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	-	Jumlah lembaga adat yang administrasinya baik	3 lembaga adat	1	70.000.000	
					2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	-	Jumlah peserta yang ikut dalam pra PKB	70 orang	2	30.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase jumlah PMKS (penyanggah masalah kesejahteraan sosial) di kecamatan	60%	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	-	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	6 desa	1	10.500.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang kegiatan dan administrasinya baik	60%	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah desa yang pelaksanaan kegiatannya dimonitoring dievaluasi dan dilaporankan	6 Desa	1	40.000.000	
					2	Pembinaan Lomba Desa	-	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	6 desa	2	30.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Persentase meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa	70%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	Jumlah desa yang memiliki tertib administrasi pemerintahan	6 desa	1	50.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan bangsa	60%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara dengan baik	1 Perayaan	1	110.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa yang meningkat pemahamannya terhadap partisipasi pembangunan	80%	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	-	Jumlah kader organisasi kewanitaan yang meningkat pemahamannya tentang agama dan sosial budaya	6 desa	1	10.000.000	
					2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	-	Jumlah PKK desa yang meningkat pemahamannya tentang PKK	6 desa	2	20.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase jumlah sekolah yang mengerti berperilaku hidup sehat	10%	1	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	-	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	3 sekolah	1	52.500.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang pelaksanaan musrembangnya tepat waktu	80%	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	Jumlah usulan indikatif	6 desa	1	26.000.000	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Jumlah desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	1 desa	1	21.000.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungannya terkendali	60%	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat.	6 desa	1	10.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SDM,SAPRAS,DATA perijinan dan non perijinan yang diterbitkan tepat waktu	80%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	-	Jumlah ijin dan non perijinan yang terbit dan dilayani	0 ijin	1	42.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			43 KEGIATAN						1.610.070.000	

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SIDEMEN

38	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Lancarnya administrasi surat menyurat	650 Lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	-	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	36 rekening	2	30.400.000	
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	Terbayarnya samsat kendaraan Dinas	8 Unit	3	3.000.000	
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Terlaksanannya kebersihan kantor	1 Unit	4	31.400.000	
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	1 Paket	5	15.000.000	
					6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	-	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terbayar	1 Paket	6	10.000.000	
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	1 Paket	7	4.000.000	
					8	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang terbayar	60 exemplar	8	6.500.000	
					9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	1 Paket	9	1.000.000	
					10	Penyediaan Makan dan Minuman	-	Jumlah makanan dan minuman yang terbayar	800 kotak	10	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			
				11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	5 orang/kali	11	50.000.000	
				12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	- Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	168 orang / tahun	12	178.200.000	
				13	Penyediaan Biaya Canang Beban dan Piodalan	- Jumlah sarana upacara yang terbayar	1 paket	13	29.000.000	
				14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	119 orang/kali	14	18.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional	5 Unit	1	-
				2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	2	13.000.000	
				3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas	8 unit	3	110.000.000	
				4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Paket	4	20.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	1	2.500.000
				2	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	6 Dokumen	2	7.500.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang dapat mengelola APBDes Tepat waktu		1	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	- Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan	10 Desa	1	9.000.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk pendatang yang mengurus SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara)	10 Desa	1	Penertiban Penduduk Pendatang	- Jumlah Desa dengan administrasi kependudukan yang baik	10 Desa	1	25.000.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Desa dengan lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	10 Desa	1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah lembaga adat (Desa Pakraman, Sekaa Teruna, Subak dan Subak Abian) yang dapat dibina	10 Desa	1	70.000.000
				2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	- Terpantau dan terevaluasinya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	10 Desa	2	40.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Tim	10 Desa	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	- Jumlah Desa yang terfasilitasi Tim	10 Desa	1	30.100.000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Desa yang dapat mengelola APBDes Tepat waktu	95%	1	Pembinaan lomba desa	- Jumlah Desa Binaan dan sasaran yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	2 Desa	1	15.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Persentase Desa yang dapat mengelola APBDes Tepat waktu	95%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	- Jumlah perangkat desa yang dapat dibina	10 Desa	1	10.000.000

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah yang diselenggarakan kecamatan dengan baik	95%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Persentase peringatan hari-hari besar nasional dan daerah yang diselenggarakan kecamatan dengan baik	3 Perayaan	1	120.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi organisasi dan lembaga desa/kelurahan yang ikut dalam pembinaan	10 Desa	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	-	Jumlah kader GOW Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan	10 Desa	1	10.000.000	
					2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	-	Jumlah kader PKK Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan	10 Desa	2	10.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan Promosi Kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan Pemberdayaan pola hidup sehat di Masyarakat	83%	1	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	-	Persentase kegiatan Promosi Kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan Pemberdayaan pola hidup sehat di Masyarakat	83%	1	10.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	95%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	-	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	95%	1	60.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran utusan Desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan	93%	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	Persentase kehadiran utusan Desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan	93%	1	30.000.000	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Pakraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan	39%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Persentase Desa Pakraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan	39%	1	5.000.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	95%	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Jumlah penanganan konflik sosial di Desa yang terfasilitasi	2 Kasus	1	10.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase rekomendasi Camat yang dikeluarkan (perijinan dan non perijinan)	97%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	-	Persentase rekomendasi Camat yang dikeluarkan (perijinan dan non perijinan)	97%	1	35.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			36 KEGIATAN						1.041.600.000	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SELAT												
39	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah surat-surat dinas yang terkirim	12 Bulan	1	3.000.000,00	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Jumlah rekening telpun,air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	2	24.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat.	8 unit	3	3.600.000,00	
					4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Persentase alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	100%	4	36.404.500,00	
					5	Penyediaan alat tulis kantor	-	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	5	20.408.800,00	
					6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	12 Bulan	6	14.814.300,00	
					7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%	7	3.863.900,00	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	8	6.000.000,00	
					9	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	9	1.500.000,00	
					10	Penyediaan makanan dan minuman	-	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	12 bulan	10	23.400.000,00	
					11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Persentase koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	11	30.000.000,00	
					12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Volume tenaga kontrak yang terbayar	12 Orang	12	223.508.500,00	
					13	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	-	Persentase sarana upacara yang tersedia	12 Bulan	13	31.500.000,00	
					14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	14	30.000.000,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	-	Jumlah sarana prasarana kantor	3 Unit	1	90.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah sarana prasarana kantor	2 Unit	2	50.000.000,00	
					3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Unit	3	20.000.000,00	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit	4	10.000.000,00	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	5	10.000.000,00	
					6	Penataan Tempat Parkir Kantor	-	Jumlah tempat parkir kantor yang tertata	1 Paket	6	190.000.000,00	
					7	Penataan Halaman Padmasana	-	Jumlah Halaman yang tertata	1 Paket	7	100.000.000,00	
					8	Pengadaan Pembangunan Penyengker	-	Jumlah Pengadaan pembangunan penyengker yang ditata	1 Paket	8	100.000.000,00	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelaporan	100%	1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	5 Laporan	1	2.500.000,00	
					2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	12 Bulan	2	2.500.000,00	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa yang administrasi penduduk pendatangnya terdata	95%	1	Penertiban penduduk pendatang	-	Jumlah Desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	3 Desa	1	7.000.000,00	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah partisipasi terhadap pengembangan nilai budaya	70%	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	Jumlah Lembaga Adat yang dibangun dan ditata administrasinya	3 Lembaga adat	1	60.000.000,00	
					2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	-	Jumlah Peserta yang dikirim dalam Pra PKB	35 Orang	2	20.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus Desa dengan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terkendali 3 kasus	1 Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	- Jumlah Desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat 3 kasus	1 5.000.000,00	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya 85%	1 Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	- Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa 8 Desa	1 5.000.000,00	
		Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah desa yang aktif terhadap kebersihan lingkungan hidup 65%	1 Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	- Jumlah Desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan 4 Desa	1 5.000.000,00	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang diselenggarakan kecamatan 100%	1 Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	- Jumlah Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah 7 Perayaan	1 123.000.000,00	
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik 92%	1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8 Desa	1 6.000.000,00	
				2 Pembinaan lomba desa	- Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Desa	2 6.000.000,00	
		Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki aparat pemerintahan desa yang berkualitas 80%	1 Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	- Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi 8 Desa	1 5.000.000,00	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa yang terbiasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan 70%	1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	- Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan 2 Organisasi	1 10.000.000,00	
				2 Pembinaan 10 program pokok PKK	- Jumlah PKK Desa yang dibina 2 Desa	2 10.000.000,00	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan promosi kesehatan dengan pola hidup sehat 3 sekolah	1 Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	- Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) 3 Sekolah	1 9.000.000,00	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa tepat waktu 100%	1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	- Jumlah Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa 8 Desa	1 7.000.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Persentase atlet yang berprestasi duta kecamatan	-	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah Atlet yang mengikuti event Porkab	50 Atlet	1	-	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan perijinan goes to banjar	98%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	Jumlah ijin yang dikeluarkan	400 Ijin/Non Perijinan	1	20.000.000,00	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa yang terakomodir dalam musrembang kecamatan	100%	1	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	-	Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrembang kecamatan	8 kecamatan	1	26.250.000,00	
JUMLAH		17 PROGRAM				41 KEGIATAN					1.351.250.000	
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BEBANDEM												
40	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	800 Lembar	1	3.000.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Persentase air, listrik, telepon yang terbayar	12 bulan	2	35.000.000	
					3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100%	3	15.000.000	
					4	Penyediaan alat tulis kantor	-	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	12 bulan	4	12.000.000	
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	12 bulan	5	10.000.000	
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%	6	3.000.000	
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Persentase bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	7	10.000.000	
					8	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	12 bulan	8	3.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7		-8	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	-	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	1 Tahun	9	17.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	10	40.000.000	
					11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	-	Volume tenaga kontrak yang terbayar	15 orang	11	215.000.000	
					12	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	-	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura	12 bulan	12	27.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	12 bulan	13	10.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	1 paket	1	5.000.000	
					2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	Persentase Rumah Dinas yang representatif	100%	2	20.000.000	
					3	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah sarana prasarana kantor	2 unit	3	20.000.000	
					4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 unit	4	20.000.000	
					5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit	5	50.000.000	
					6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	6	15.000.000	
					7	Pemeliharaan rutin/berkala Taman/Lapangan/Tempat Parkir	-	Jumlah lapangan upacara yang dapat dipelihara	1 laporan	7	20.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelaporan keuangan	100%	1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	5 laporan	1	5.000.000	
					2	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	-	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	12 bulan	2	5.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk pendatang yang terdata dengan tertib	100%	1	Penertiban penduduk pendatang	-	Jumlah Desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	3 desa	1	20.000.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	21%	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	Jumlah Lembaga Adat yang dibina dan ditata administrasinya	3 lembaga adat	1	50.000.000	
					2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	-	Jumlah Peserta yang dikirim dalam Pra PKB	35 orang	2	50.000.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah desa/kel yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	8 Desa	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	-	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenram dan tertib masyarakat	8 desa	1	15.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa yang terlaksana	100%	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	-	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dpat dihasilkan setiap desa	8 desa	1	35.000.000	
		Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	persentase desa pekraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	70%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	-	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	1 desa	1	10.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	-	Jumlah Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	7 perayaan	1	120.000.000	
		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persentase desa dengan kategori berkembang	22%	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kecamatan Bahandam	8 desa	1	20.000.000	
					2	Pembinaan lomba desa	-	Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	2 desa	2	25.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN		KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7		-8
		Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan	100%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	8 desa	1	15.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase organisasi perempuan desa yang mendapat pembinaan	20%	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	-	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	2 organisasi	1	10.000.000	
					2	Pembinaan 10 program pokok PKK	-	Jumlah PKK Desa yang dibina	2 desa	2	15.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan promosi kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan pemberdayaan pola hidup sehat di masyarakat	29%	1	Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	-	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	2 sekolah	1	10.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase terevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	100%	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	-	Jumlah Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa	8 desa	1	15.000.000	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa yang terverifikasi dan diusulkan dalam musrenbang kabupaten	100%	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-	Jumlah Usulan Indikatif	21 dokumen	1	27.500.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan goes to banjar.	100%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	Jumlah ijin yang dikeluarkan	400 ijin/ non perijinan	1	45.000.000	
		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	22%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	Jumlah Atlet yang mengikuti event Porkab	50 Atlet	1	60.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			39 KEGIATAN						1.102.500.000	
PERANGKAT DAERAH : MANGGIS												
41	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi	100%	1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	900 Lembar		1.500.000	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.		Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	48 rekening		40.000.000	
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah alat-alat kebersihan kantor	25 paket		4.000.000	
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	26 paket		15.000.000	
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar	9 paket		8.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	20 paket	3.500.000	
					7	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang terbayar	730 exemplar	5.000.000	
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	-	-	
					9	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbayar	1000 kotak	20.000.000	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	7 orang/kali	55.000.000	
					11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	168 orang / tahun	173.060.000	
					12	Penyediaan Biaya Canang Bebaten dan Piodalan	Jumlah sarana upakara yang terbayar	3 paket	30.000.000	
					13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	440 orang/kali	25.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbayar	2 unit	60.000.000	
					2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terbayar	-	-	
					3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	16 buah	50.000.000	
					4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	10 unit	50.000.000	
					5	Pengadaan Pembangunan Pelinggih dan Penyengker	Jumlah pelinggih dan penyengker yang terbangun	-	-	
					6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 unit	25.000.000	
					7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	35.000.000	
					8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	8 unit	74.940.000	
					9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 Paket	30.000.000	
					10	Pemeliharaan rutin/berkala taman	Jumlah taman yang terpelihara	2 Taman	15.000.000	
					11	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	150.000.000	
					12	Penataan halaman dan taman kantor	Jumlah halaman dan taman kantor yang terbangun	-	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN		OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5		-6			-7	-8
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan Capaian Kinerja yang tepat waktu	100%	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 Dokumen		3.000.000	
					2	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	6 Dokumen		7.000.000	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tepat waktu	75%	1	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa yang rancangan APB desanya dievaluasi	12 desa		20.000.000	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Desa yang Administrasi penduduk pendatangnya terdata	100%	1	Penertiban Penduduk Pendatang	Jumlah Desa yang terdata penduduk pendatangnya	6 desa		15.000.000	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang mendapat pembinaan	100%	1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah lembaga tradisional yang terfasilitasi pelestariannya	4 lembaga tradisional		50.000.000	
					2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah peserta lomba nyastra dan kewanitaan yang terfasilitasi mengikuti pra PKB	30 orang		20.000.000	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program dan kegiatan desa yang terfasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	100%	1	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan kecamatan	1 Kegiatan		10.000.000	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang termonitor dan terevaluasi pembangunannya	12 desa		15.000.000	
					2	Penilaian Lomba Desa	Jumlah desa yang terbina	2 desa		20.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Persentase desa yang aparaturnya terdina	65%	1	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahannya	12 desa		10.000.000	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	2 Perayaan		50.000.000	
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa yang terbina untuk berpartisipasi dalam pembangunan	100%	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kader WHDI desa dan kecamatan yang terbina	20 orang		10.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN	KET.	
-1	-2	-3	-4		-5	-6		-7	-8	
					2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah PKK desa yang terbina	2 desa	15.000.000	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	90%	1	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang terbina tentang penyakit kanker dan penangulungannya	3 sekolah	15.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	0%	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlit duta kecamatan yang terfasilitasi dalam kompetisi olah raga	-	-	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Desa yang Terakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	95%	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	150 usulan	15.000.000	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	80%	1	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah desa yang terbina kesadaran lingkungannya	1 Desa	5.000.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penanganan keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terfasilitasi	80%	1	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah desa yang dibina dalam penanganan komplik sosialnya.	12 desa	5.000.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET			PAGU KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4		-5	-6			-7	-8
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu	96%	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Jumlah ijin dan non perijinan yang diterbitkan	100 buah	15.000.000	
JUMLAH		17 PROGRAM			44 KEGIATAN				1.170.000.000	
TOTAL JUMLAH		521 PROGRAM			2132 KEGIATAN				1.159.705.280.184	

LAMPIRAN III

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
YANG MENJADI RENCANA KERJA
BESERTA PENDANAANNYA SESUAI
DENGAN NOMENKLATUR
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Lampiran RKPD
Pemerintah Kabupaten Karangasem
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01	01	PENDIDIKAN					APBD				
1.01	01	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1.01	01	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH			19.606.730.740,00	APBD				23.823.763.677,00
1.01	01	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Karangasem		1.711.549.200,00	APBD		1.797.126.660,00
1.01	01	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dapat terevaluasinya hasil kinerja bidang pendidikan	Kab. Karangasem	153.065.000,00	APBD		160.718.250,00
1.01	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program-program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	630.772.700,00	APBD		662.311.335,00
1.01	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkrosinasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Data Pokok Pendidikan yang Update dengan Program Aplikasi DAPODIK pada PAUD dan DIKDas	Kab. Karangasem	927.711.500,00	APBD		974.097.075,00
1.01	01	01	1.02	Administrasi Keuangan		Kab. Karangasem		595.713.400,00	APBD		625.499.070,00
1.01	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kab. Karangasem	76.532.500,00	APBD		80.359.125,00
1.01	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Karangasem	519.180.900,00	APBD		545.139.945,00
1.01	01	01	2,03	Administrasi Umum		Kab. Karangasem		16.359.003.590,00	APBD		20.413.650.169,50
1.01	01	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana dan terpenuhinya pelayanan jasa persuratan	Kab. Karangasem	168.245.200,00	APBD		176.657.460,00
1.01	01	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di masing-masing unit layanan pendidikan	Kab. Karangasem	673.486.000,00	APBD		707.160.300,00
1.01	01	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan kebersihan dan tenaga kebersihan	Kab. Karangasem	145.411.750,00	APBD		152.682.337,50

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01	01	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dalam penyelenggaraan ruah tangga ketatausahaan pendidikan	Kab. Karangasem			459.195.000,00	APBD				482.154.750,00
1.01	01	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggara dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana proses administrasi kantor	Kab. Karangasem			191.331.250,00	APBD				200.897.812,50
1.01	01	01	2,03	12	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Karangasem			176.532.500,00	APBD				185.359.125,00
1.01	01	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Karangasem			1.099.793.300,00	APBD				1.154.782.965,00
1.01	01	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Karangasem			393.065.000,00	APBD				412.718.250,00
1.01	01	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam peyelenggaraan rapat	Kab. Karangasem			497.085.380,00	APBD				521.939.649,00
1.01	01	01	2,03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam pelaksanaan rencana program pendidikan melalui proses rakor/konsultasi	Kab. Karangasem			393.065.000,00	APBD				412.718.250,00
1.01	01	01	2,03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi, keamanan dan sopir serta penyediaan sesajen / bebantenan untuk penyelenggaraan dan tata usaha pendidikan	Kab. Karangasem			7.885.852.210,00	APBD				11.516.841.220,50
1.01	01	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Karangasem			1.725.000.000,00	APBD				1.811.250.000,00
1.01	01	01	2,03	25	Pengadaan Mebeleur		Kab. Karangasem			535.727.500,00	APBD				562.513.875,00
1.01	01	01	2,03	28	Pemereliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung disdikpora	Kab. Karangasem			1.141.342.350,00	APBD				1.198.409.467,50
1.01	01	01	2,03	30	Pemereliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya dan terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Karangasem			578.459.400,00	APBD				607.382.370,00
1.01	01	01	2,03	32	Pemereliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Karangasem			150.000.000,00	APBD				157.500.000,00
1.01	01	01	2,03	34	Pemereliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Karangasem			145.411.750,00	APBD				152.682.337,50

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.01	01	01	2,04									
1.01	01	01	2,04	10								
1.01	01	02										
1.01	01	02	2,01									
1.01	01	02	2,01	02								
1.01	01	02	2,01	03								
1.01	01	02	2,01	06								
1.01	01	02	2,01	05								
1.01	01	02	2,01	11								
1.01	01	02	2,01	22								
1.01	01	02	2,01	15								
1.01	01	02	2,01	16								
1.01	01	02	2,01	13								
1.01	01	02	2,01	09								
1.01	01	02	2,01	10								
1.01	01	02	2,01	12								
1.01	01	02	2,01	14								
1.01	01	02	2,01	18								
1.01	01	02	2,01	19								

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.01	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	Kab. Karangasem			7.938.825.850,00	APBD			3.952.595.482,50
1.01	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terselenggaranya Pembinaan Akreditasi Sekolah Dasar	Kab. Karangasem			499.801.800,00	APBD			524.791.890,00
1.01	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya biaya personil peserta didik sekolah dasar	Kab. Karangasem			84.022.650.100,00	APBD			88.223.782.605,00
1.01	01	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Kab. Karangasem			459.195.000,00	APBD			482.154.750,00
1.01	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya lomba olimpiade sains MIPA, QOSN dan FLS2N	Kab. Karangasem			520.421.000,00	APBD			546.442.050,00
1.01	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Kab. Karangasem			248.730.050,00	APBD			261.166.552,50
1.01	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SD/MI	Kab. Karangasem			1.593.545.700,00	APBD			1.673.222.985,00
1.01	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Karangasem			6.530.943.100,00	APBD			605.837.373,75
1.01	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Karangasem			37.850.137.185,00	APBD			33.302.421.558,00
1.01	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru	Kab. Karangasem			2.539.875.700,00	APBD			2.666.869.485,00
1.01	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Karangasem			2.134.625.000,00	APBD			2.241.356.250,00
1.01	01	02	2,02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Karangasem			150.500.000,00	APBD			158.025.000,00
1.01	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Tersedianya Pembangunan Laboratorium	Kab. Karangasem			150.500.000,00	APBD			158.025.000,00
1.01	01	02	2,02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya perpustakaan sekolah	Kab. Karangasem			812.502.600,00	APBD			853.127.730,00
1.01	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terpenuhnya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Karangasem			1.918.464.825,00	APBD			2.014.388.066,25
1.01	01	02	2,02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Kab. Karangasem			250.000.000,00	APBD			262.500.000,00
1.01	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Karangasem			125.000.000,00	APBD			131.250.000,00
1.01	01	02	2,02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Ruangan	Terpeliharanya bangunan dan gedung dan ruangan	Kab. Karangasem			2.199.817.910,00	APBD			2.309.808.805,50

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.01	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	Kab. Karangasem			1.882.190.050,00	APBD			1.976.299.552,50
1.01	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Tersedianya mebeluer sekolah SMP	Kab. Karangasem			250.000.000,00	APBD			262.500.000,00
1.01	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Karangasem			250.000.000,00	APBD			262.500.000,00
1.01	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Karangasem			250.000.000,00	APBD			262.500.000,00
1.01	01	02	2,02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Karangasem			300.000.000,00	APBD			315.000.000,00
1.01	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Karangasem			139.035.500,00	APBD			145.987.275,00
1.01	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Karangasem			20.865.890.000,00	APBD			15.651.683.040,00
1.01	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Karangasem			12.929.000,00	APBD			13.575.450,00
1.01	01	02	2,02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Karangasem			474.155.000,00	APBD			497.862.750,00
1.01	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Kab. Karangasem			147.906.600,00	APBD			155.301.930,00
1.01	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Karangasem			1.084.675.000,00	APBD			1.138.908.750,00
1.01	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Karangasem			1.912.070.000,00	APBD			1.824.952.473,75
1.01	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		Kab. Karangasem			1.420.825.600,00	APBD			16.751.352.765,00
1.01	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terpenuhinya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Karangasem			26.400.000,00	APBD			1.770.370.087,50
1.01	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Karangasem			237.518.250,00	APBD			2.638.173.090,00
1.01	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa	Kab. Karangasem			-	APBD			167.146.980,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.01	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Karangasem			137.991.000,00	APBD			691.088.475,00
1.01	01	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Terpenuhinya Perlengkapan PAUD	Kab. Karangasem			-	APBD			440.200.162,50
1.01	01	02	2,03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Kab. Karangasem			371.655.750,00	APBD			436.670.640,00
1.01	01	02	2,03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana bermain PAUD	Kab. Karangasem			-	APBD			85.276.065,00
1.01	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya proses belajar mengajar dan peningkatan mutu dan kualitas PAUD	Kab. Karangasem			424.399.800,00	APBD			6.773.006.756,25
1.01	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PAUD melalui lomba gugus PAUD	Kab. Karangasem			22.000.000,00	APBD			904.220.677,50
1.01	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Kab. Karangasem			5.000.000,00	APBD			80.359.125,00
1.01	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Karangasem			195.860.800,00	APBD			2.764.840.706,25
1.01	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Karangasem			5.655.757.150,00	APBD			5.739.184.525,00
1.01	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya mutu lembaga pendidikan non formal ,akreditasi lembaga	Kab. Karangasem			280.955.000,00	APBD			48.697.267,50
1.01	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya proses belajar pendidikan keaksaraan dan non formal paket A, paket B dan paket C	Kab. Karangasem			4.236.473.725,00	APBD			4.448.297.411,25
1.01	01	02	2,04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Karangasem			5.860.050,00	APBD			6.153.052,50
01	02	2,04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal				1.132.468.375,00	APBD			46.945.000,00
1.01	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Karangasem			-	APBD			1.189.091.793,75
01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					40.200.000,00				41.205.000,00
01	03	2,01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					40.200.000,00				41.205.000,00
01	03	2,01	04		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	Terlaksananya pelatihan kurikulum Nasional/K13	Kab. Karangasem			40.200.000,00	APBD			41.205.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.19	01	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2.906.741.850,00
2.19	01	02	2,01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			2.783.442.900,00	APBD	2.560.664.475,00
2.19	01	02	2,01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Karangasem			1.902.387.500,00	APBD	1.997.506.875,00
2.19	01	02	2,01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Karangasem			173.011.200,00	APBD	181.661.760,00
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kab. Karangasem			243.664.200,00	APBD	249.755.805,00
						Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kab. Karangasem			-		-
2.19	01	02	2,01	06		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kab. Karangasem			464.380.000,00	APBD	131.740.035,00
2.19	01	02	2,02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			329.597.500,00	APBD	346.077.375,00
2.19	01	02	2,02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			329.597.500,00	APBD	346.077.375,00
2.19	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				16.415.897.000,00	APBD	17.224.289.150,00
2.19	01	03	2,01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			8.615.042.450,00	APBD	9.033.391.872,50
19	03	2,01	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Kab. Karangasem			496.108.000,00		508.510.700,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.19	01	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem				8.118.934.450,00	APBD			8.524.881.172,50	
2.19	01	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Karangasem				7.800.854.550,00	APBD			8.190.897.277,50	
2.19	01	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kab. Karangasem				7.800.854.550,00	APBD			8.190.897.277,50	
TOTAL											243.537.717.250,00				256.561.019.618	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02				DINAS KESEHATAN											
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel					3.568.584.010,00				3.958.846.420,00	
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun					100	%			442.909.370,00	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Dinas Kesehatan	100	%		30.000.000,00	APBD		100	%	40.000.000,00
1	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang disusun	Dinas Kesehatan	100	%		213.809.370,00	BOK, APBD		100	%	347.700.000,00
1	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Kesehatan	5	Jenis		92.000.000,00	APBD		5	Jenis	92.000.000,00
1	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kinerja yang dievaluasi	Dinas Kesehatan	100	%		107.100.000,00	Pajak Rokok		100	%	107.100.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya laporan keuangan					100	%			154.900.000,00	
1	02	01	2.02	04	Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase Tersusunnya laporan keuangan	Dinas Kesehatan	100	%		154.900.000,00	APBD		100	%	162.645.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Umum						100	%			2.970.774.640,00	
1	02	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	100	%		99.300.000,00	APBD		100	%	104.265.000,00
1	02	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	100	%		962.936.000,00	APBD		100	%	1.023.749.973,00
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	100	%		17.250.000,00	APBD		100	%	18.112.500,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kesehatan	100	%	189.500.000,00	APBD		100	%	208.450.000,00
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	100	%	83.835.000,00	APBD		100	%	88.026.750,00
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	100	%	86.250.000,00	APBD		100	%	90.562.500,00
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	100	%	47.250.000,00	APBD		100	%	49.612.500,00
1	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	100	%	139.850.000,00	APBD		100	%	146.842.500,00
1	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	Dinas Kesehatan	100	%	32.825.000,00	APBD		100	%	34.466.250,00
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Dinas Kesehatan	100	%	35.650.000,00	APBD		100	%	37.432.500,00
1	02	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase canang dan banten piodal yang tersedia	Dinas Kesehatan	100	%	242.797.040,00	APBD		100	%	254.936.892,00
						Jumlah perayaan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan	Dinas Kesehatan	3	Perayaan				3	Perayaan	
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman rutin dan tamu yang tersedia	Dinas Kesehatan	100	%	91.326.100,00	APBD		100	%	95.892.405,00
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	100	%	100.000.000,00	APBD		100	%	105.000.000,00
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	100	%	280.601.500,00	APBD		100	%	308.661.650,00
1	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	100	%	561.404.000,00	APBD		100	%	643.390.000,00
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	UPTD Kesehatan	85	%	235.872.623.739,00			85	%	255.941.748.460,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	UPTD Kesehatan	100	%	18.944.523.000,00			100	%	15.540.098.000,00
						Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Puskesmas, RS Pratama	100	%				100	%	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	Puskesmas Abang 1 dan Sidemen	2	UNIT	11.000.000.000,00	APBD KAB		1	UNIT	7.350.000.000,00
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas pembantu yang di rehabilitasi	Puskesmas Pembantu	16	UNIT	2.744.425.000,00	APBD KAB		13	UNIT	2.990.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas, RS Pratama	80	%	602.300.000,00	,DAKAPBD, DAK		80	%	602.300.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Puskesmas, RS Pratama	96	%	2.023.100.000,00	APBD, DAK		96	%	2.023.100.000,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase tersedianya bahan habis pakai	Puskesmas, RS Pratama	96	%	2.422.200.000,00	APBD, DAK		96	%	2.422.200.000,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dalam keadaan baik	Puskesmas, RS Pratama	90	%	152.498.000,00	APBD, DAK		90	%	152.498.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Kabupaten	7	Pusk	214.512.111.339,00			3	Pusk	238.392.661.060,00
						Persentase terpenuhinya Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Puskesmas	100	%				100	%	
						Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Peserta JKN	Kabupaten	15	%				15	%	
						Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana	Rumah Sakit	100	%				100	%	
						Persentase Laboratorium kesehatan daerah yang terakreditasi	UPTD Laboratorium	100	%				100	%	
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Puskesmas	100	%				100	%	
						Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Sekolah	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12 Puskesmas	100	%				100	%	
						Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)	12 Puskesmas	7	%				7	%	
						Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil	12 Puskesmas	14	%				14	%	
						Prevalensi BBLR	12 Puskesmas	7,4	%				7,4	%	
						Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah lima tahun)	12 Puskesmas	19	%				19	%	
						Persentase balita gizi buruk (Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)	12 Puskesmas	10	%				10	%	
						Persentase Tempat Umum Sehat	12 Puskesmas	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi Layak	12 Puskesmas	100	%				100	%	
		Tatanan Kota Sehat (satuan indikator : tatanan)	12 Puskesmas	3	Tatanan				3	Tatanan	
		Persentase KLB yang tertangani kurang dari 18 jam	8 Kecamatan	100	%				100	%	
		Angka bebas jentik	8 Kecamatan	≥95%	%				≥95%	%	
		Persentase pemeriksaan HIV sesuai standar bagi orang beresiko terinfeksi HIV	8 Kecamatan	98%	%				98%	%	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	8 Kecamatan	<0,5%	%				<0,5%	%	
		Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	8 Kecamatan	50%	%				50%	%	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	8 Kecamatan	80%	%				80%	%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	8 Kecamatan	100%	%				100%	%	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	8 Kecamatan	40%	%				40%	%	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	8 Kecamatan	100%	%				100%	%	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	8 Kecamatan	90%	%				90%	%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	8 Kecamatan	100%	%				100%	%	
		Penderita diare yang ditangani	8 Kecamatan	100%	%				100%	%	
		Tingkat kematian akibat malaria	8 Kecamatan	0%	%				0%	%	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	8 Kecamatan	100%	%				100%	%	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk dibawah 15 tahun	8 Kecamatan	3	per 100.000 pddk				3	per 100.000 pddk	
		Angka Kesakitan DBD	12 Puskesmas	50	per 100.000 pddk				50	per 100.000 pddk	
		Persentase meningkatnya kesehatan Lansia	12 Puskesmas	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Angka Kematian Ibu (AKI)	12 Puskesmas	90	100.000 KH				90	100.000 KH					
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12 Puskesmas	10	1000 KH				10	1000 KH					
		Angka Kematian Balita (AKBA)	12 Puskesmas	10	1000 KH				10	1000 KH					
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	12 Puskesmas	8	1000 KH				8	1000 KH					
		Cakupan kunjungan bayi	12 Puskesmas	100	%				100	%					
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	12 Puskesmas	100	%				100	%					
		Cakupan pelayanan nifas	12 Puskesmas	100	%				100	%					
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	12 Puskesmas	100	%				100	%					
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	12 Puskesmas	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase kunjungan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	12 Puskesmas	100	%	250.585.000,00	APBD, DAK		100	%	250.585.000,00
				\		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	12 Puskesmas	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase terpenuhinya pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu bersalin	12 Puskesmas	100	%	758.862.000,00	APBD, DAK		100	%	758.862.000,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar (KN3) bagi bayi baru lahir	12 Puskesmas	100	%	263.200.000,00	APBD, DAK		100	%	263.200.000,00
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12 Puskesmas	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	12 Puskesmas	100	%	274.130.000,00	APBD, DAK		100	%	274.130.000,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang melaksanakan penjangkaran/skrining kesehatan sesuai standar	12 Puskesmas	100	%	31.130.000,00	APBD Kab, DAK, Pajak rokok		100	%	40.150.000,00
						Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	12 Puskesmas	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12 Puskesmas	100	%				100	%	

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Karangasem	100	%	102.600.000,00	BOK/APBD		100	%	102.600.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12 Puskesmas	100	%	125.790.000,00			100	%	135.630.000,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karangasem	100	%	63.200.000,00	BOK/APBD		100	%	63.200.000,00
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karangasem	100	%	50.000.000,00	BOK/APBD		100	%	50.000.000,00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Karangasem	100	%	71.100.000,00	BOK/APBD		100	%	71.100.000,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar	8 Kec	100	%	423.235.000,00	BOK/APBD		100	%	318.101.716,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	8 Kec	100	%	426.593.774,00	BOK/APBD		100	%	643.582.126,00
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan penduduk pada kondisi KLB sesuai standar	12 puskesmas	100	%	10.000.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok		100	%	10.000.000,00
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana sesuai standar	kabupaten	100	%	10.000.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok		100	%	10.000.000,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	8 Kecamatan	100	%	178.315.500,00	APBD, DAK, Pajak rokok		100	%	153.305.000,00
						Persentase bayi usia kurang dari 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	8 Kecamatan	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terbentuknya Pos UKK di daerah PPI/TP	8 Kecamatan	4	Unit	40.000.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok		4	Unit	88.200.000,00
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	12 Puskesmas	100	%				100	%	
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pendataan atau pembinaan kelompok olah raga	12 Puskesmas	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	8 Kecamatan	100	%	3.515.651.226,00	APBD, DAK, Pajak rokok		100	%	163.200.000,00
						Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat	8 Kecamatan	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (satuan indikator : Desa)	Desa	78	Desa				78	Desa				
		Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	8 Kecamatan	100	%				100	%				
		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis	8 Kecamatan	100	%				100	%				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Pengawasan Battra (Pengobat tradisional) yang dilaksanakan	12 Pusk	100	%	194.499.900,00	BOK dan APBD	100	%	194.499.900,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Suveilans Kesehatan	Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon	12 pusk	100	%	287.315.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok	100	%	92.000.000,00
						Persentase terpenuhinya pemeriksaan kesehatan jemaah haji	kabupaten	100	%			100	%	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fogging yang dilaksanakan pada lokasi resiko tinggi	8 Kec	100	%	1.466.152.499,00	Pajak rokok, BOK	100	%	1.252.485.558,00
						Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus pneumonia balita sesuai standar	8 Kec	100	%			100	%	
						Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus diare sesuai standar	8 Kec	100	%			100	%	
						Persentase terpenuhinya Tatalaksana kasus GHPR sesuai standar	8 Kec	100	%			100	%	
						Persentase pengobatan kecacingan secara massal	8 Kec	100	%			100	%	
						Prosentase penderita DBD yang ditatalaksana sesuai standar	8 Kec	100	%			100	%	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Kabupaten	100	%	154.964.504.056,00	APBD	100	%	179.855.061.100,00
						Jumlah Pemanfaat Kartu Karangasem Sehat (KKS)	Kabupaten	98268	jiwa			98268	jiwa	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase spesimen yang ditangani sesuai standar	kabupaten	100	%	6.660.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok			10.000.000,00
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase capaian tatanan kabupaten/kota sehat	Kabupaten	3	Tatanan	135.000.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok	3	Tatanan	75.000.000,00
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	RS Pratama	100	%	4.855.165.375,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	5.370.435.000,00
						Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di RS Pratama	RS Pratama	100	%			100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Persentase terpenuhinya kegiatan pelayanan sesuai standar Rumah Sakit Pratama	RS Pratama	100	%				100	%				
		Persentase masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pratama tanpa memberikan uang jaminan	RS Pratama	100	%				100	%				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%	2.568.946.650,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	2.731.311.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Manggis I	100	%			100	%	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%	1.281.902.320,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	1.549.100.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Manggis II	100	%			100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	Puskesmas Manggis II	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%	3.497.352.600,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	3.676.923.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Rendang	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Rendang	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Rendang	100	%				100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Rendang	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%	3.384.426.180,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	3.835.293.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%					
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%					
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%					
		Persentase Orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Sidemen	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%	4.875.157.557,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	5.742.014.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%				
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%				
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Selat	100	%				100	%				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%	3.200.029.800,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	3.601.788.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%			100	%	

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Bebandem	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%	4.097.788.180,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	4.482.367.750,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Karangasem I	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%	3.603.203.400,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	3.918.613.740,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Karangasem II	100	%				100	%				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%	3.319.576.200,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	3.624.953.820,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%			100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	Puskesmas Abang I	100	%				100	%				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%	3.192.575.900,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab	100	%	3.496.203.490,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	
						Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%			100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%				100	%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Abang II	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%	4.054.606.572,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	4.416.644.860,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Kubu I	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%	3.329.318.000,00	Kapitasi JKN, DAK, APBD Kab		100	%	3.642.421.000,00
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Puskesmas Kubu II	100	%				100	%					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pasien mendapat pelayanan kegawatdaruratan	Wilayah Kabupaten KarangasemPSC	100	%	823.200.000,00			100	%	823.200.000,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	UPTD Laboratorium	100	%	3.194.688.650,00	APBD		100	%	786.300.000,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Puskesmas	7	Pusk	1.388.200.000,00	DAK Akreditasi dan APBD		2	Pusk	1.488.200.000,00
						Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	Banjar	100	%				100	%	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Persentase penanganan KIPi sesuai standar	12 pusk	100	%	197.450.000,00	APBD, DAK, Pajak Rokok		100	%	332.000.000,00
						Persentase bayi (anak usia 0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar	12 pusk	100	%				100	%	
						Persentase balita yang mendapat imunisasi lanjutan	12 pusk	90	%				90	%	

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan program SIK Puskesmas	Puskesmas	100	%	479.700.000,00			100	%	72.700.000,00
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Puskesmas	100	%	479.700.000,00	DAK Yandas +Pajak Rokok		100	%	72.700.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki izin		100	%	1.936.289.400,00			100	%	1.936.289.400,00
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase tingkat rujukan	Kabupaten	15	%	1.936.289.400,00	APBD		15	%	1.936.289.400,00
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya		45	%	885.403.000,00			46	%	846.000.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan izin praktek tenaga kesehatan yang	8 Kecamatan	100	%	64.000.000,00			100	%	64.000.000,00
1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek	8 Kecamatan	100	%	64.000.000,00	APBD		100	%	64.000.000,00
1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan izin praktek	8 Kecamatan	100	%	724.803.000,00			100	%	685.400.000,00
						Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai	8 Kecamatan	100	%				100	%	
1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar	12 Pusk	100	%	31.600.000,00	APBD		100	%	31.600.000,00
1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang lulus uji kompetensi (Ukom)	DINKES	100	%	29.000.000,00	APBD		100	%	29.000.000,00
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	DINKES	300	ORANG	664.203.000,00	APBD		300	%	624.800.000,00
1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	Kabupaten	100	%	50.000.000,00			100	%	50.000.000,00
						Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	14 UPTD Kesehatan	100	%				100	%	
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi kesehatan	14 UPTD Kesehatan	100	%	50.000.000,00	APBD KAB		100	%	50.000.000,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kemampuannya dalam pelayanan kesehatan	14 UPTD Kesehatan	100	%	46.600.000,00		100	%	46.600.000,00
						Persentase tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di UKM dan UKP sesuai dengan	14 UPTD Kesehatan	100	%			100	%	
1	02	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang sesuai kompetensi pada Fasyankes	12 puskesmas	100	%	31.600.000,00	APBD KAB	100	%	31.600.000,00
1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES	100	%	15.000.000,00	APBD KAB	100	%	15.000.000,00
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	8 Kecamatan	100	%	295.500.000,00		100	%	295.500.000,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional melaksanakan kegiatannya sesuai ijin yang ditetapkan	8 Kecamatan	100	%	15.500.000,00		100	%	18.000.000,00
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin	8 Kecamatan	100	%	15.500.000,00	APBD KAB	100	%	18.000.000,00
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat	8 Kecamatan	100	%	10.000.000,00	APBD KAB	100	%	10.000.000,00
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Persentase produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 yang memiliki sertifikat	8 Kecamatan	100	%	10.000.000,00	APBD KAB	100	%	10.000.000,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan	8 Kecamatan	100	%	40.000.000,00		100	%	25.000.000,00
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat	8 Kecamatan	100	%	40.000.000,00	APBD KAB	100	%	25.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	8 Kecamatan	100	%	230.000.000,00		100	%	242.500.000,00
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8 Kecamatan	100	%	220.000.000,00	DAK, APBD KAB	100	%	232.500.000,00
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT yang mempunyai izin PIRT	DINKES	100	%	10.000.000,00	DAK, APBD KAB	100	%	10.000.000,00
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase keluarga sehat	Desa/Kelurahan	0,5	%	815.188.000,00		0,5	%	993.200.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT berperilaku hidup sehat	Desa/Kelurahan	88	%	815.188.000,00		88	%	993.200.000,00
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah populasi yang diberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat	Desa/Kelurahan	515	Populasi	815.188.000,00	APBD, DAK, Pajak rokok	515	Populasi	993.200.000,00
						Jumlah KK yang disurvei PHBS	Desa/Kelurahan	10080	KK			10080	KK	
			Jumlah							241.437.298.749,00				262.035.294.880,00
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	02				Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)									
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					94.100.000.000,00				101.600.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000.000,00				75.000.000.000,00
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani baik rawat jalan maupun rawat inap	Amlapura	110.000	Kunjungan	70.000.000.000,00	APBD (BLUD)	120.000	Kunjungan	75.000.000.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					24.100.000.000,00				26.600.000.000,00
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.	Jumlah gedung yang dibangun	Amlapura	1 unit		15.000.000.000,00	APBD	1 unit		15.000.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan yang diadakan	Amlapura	40 unit		7.500.000.000,00	APBD (DAK)	50 unit		10.000.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	Amlapura	1 unit			1.000.000.000,00	APBD		1 unit		1.000.000.000,00
						Jumlah makanan yang dibagikan untuk penunggu pasien rawat inap kelas III	Amlapura	40.000 bungkus			600.000.000,00	APBD		40.000 bungkus		600.000.000,00
					JUMLAH						94.100.000.000,00					101.600.000.000,00
1	03				Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	03				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangasem				1.941.322.000,00			-		2.135.454.200,00
1	03	01	2.03		Kegiatan Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangasem	100,00%			1.852.958.000,00			100,00%		2.038.253.800,00
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase penyelenggaraan jasa surat menyurat dan koordinasi antar SKPD dalam setahun	Kab. Karangasem	1 Tahun			2.593.000,00	APBD		1 Tahun		2.852.300,00
1	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik dalam setahun	Kab. Karangasem	8,79%			237.716.000,00	APBD		8,79%		261.487.600,00
1	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase pengadaan jasa, bahan material, dan alat - alat kebersihan kantor dalam setahun	Kab. Karangasem	1,96%			58.573.000,00	APBD		1,96%		64.430.300,00
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pengadaan alat tulis kantor dan alat tulis kantor berbasis IT dalam setahun	Kab. Karangasem	1,77%			52.682.000,00	APBD		1,77%		57.950.200,00
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan barang cetakan dan pengadaan selama setahun	Kab. Karangasem	0,84%			24.994.000,00	APBD		0,84%		27.493.400,00
1	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase terpeliharanya jaringan listrik/penerangan kantor	Kab. Karangasem	0,41%			12.681.000,00	APBD		0,41%		13.949.100,00
1	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase peningkatan sumber informasi yang memadai	Kab. Karangasem	0,71%			21.106.000,00	APBD		0,71%		23.216.600,00
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase kebutuhan makanan dan minuman rapat/pertemuan/tamu selama setahun	Kab. Karangasem	1,95%			67.150.000,00	APBD		1,95%		73.865.000,00
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun	Kab. Karangasem	7,33%			144.070.000,00	APBD		7,33%		158.477.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tersedianya Bahan Logistik Kantor (Penyediaan Biaya Canang, Beban, Piodalan, Penataan dekorasi dan kegiatan hari-hari nasional)	Kab. Karangasem	100%		149.520.000,00		- Penyediaan Biaya Canang, Beban, Piodalan - Penataan dekorasi dan kegiatan hari-hari	100,00%		164.472.000,00
1	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dan kenyamanan kinerja pegawai	Kab. Karangasem	11,80%		15.847.000,00	APBD		11,80%		17.431.700,00
1	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya kuantitas mebeulair dan kinerja pegawai	Kab. Karangasem	13,10%		53.590.000,00	APBD		13,10%		58.949.000,00
1	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Presentase terpeliharanya kondisi gedung kantor Dinas PUPR dan kelancaran tugas - tugas administrasi / teknis selama setahun	Kab. Karangasem	3,39%		560.480.128,00	APBD	- untuk Tenaga administrasi dan satpam - Penataan Halaman dan Taman Kantor	3,39%		616.528.140,80
1	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran mobilitas pimpinan/pegawai	Kab. Karangasem	16,00%		408.735.872,00	APBD	untuk tenaga pendukung Sopir	16,00%		449.609.459,20
1	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Presentase peningkatan kualitas peralatan kantor	Kab. Karangasem	0,82%		43.220.000,00	APBD		0,82%		47.542.000,00
													-		-
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Administrasi dan Keuangan	Kab. Karangasem	1 Tahun		88.364.000,00			1 Tahun		97.200.400,00
1	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Buku LKIP dan Laporan Dinas PUPR Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 Tahun		59.550.000,00	APBD		1 Tahun		65.505.000,00
1	03	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan keuangan bulanan yang disusun	Kab. Karangasem	12 Bulan		18.814.000,00	APBD	Diambil dari perjalanan dinas	12 Bulan		20.695.400,00
1	03	01	2.02	09	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Karangasem	1 Tahun		10.000.000,00	APBD		1 Tahun		11.000.000,00
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Terselenggaranya jalan kabupaten berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.	Kab. Karangasem	100%		112.683.920.833,76			100,00%		123.952.312.917,13
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan	Kab. Karangasem	100,00%		112.683.920.833,76			100,00%		123.952.312.917,13
						Terwujudnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan							-		-

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Terwujudnya peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat							-		-			
		Terwujudnya pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat							-		-			
		Terwujudnya sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu							-		-			
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Prosentase terbangunnya jalan baru dan/ atau terbangunnya bangunan pelengkap dan perkerasan jalan pada jalan kabupaten yang belum terdapat perkerasan	Kab. Karangasem	1,16%		15.639.630.350,00		1,16%		17.203.593.385,00
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan/ box culvert	Kab. Karangasem	5,57%		5.000.000.000,00		5,57%		5.500.000.000,00
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan jembatan kabupaten	Kab. Karangasem	12,09%		219.615.000,00		12,09%		241.576.500,00
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang kondisinya baik dan sedang	Kab. Karangasem	78,19%		9.579.324.625,77	Termasuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat	78,19%		10.537.257.088,34
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan berkala jalan kabupaten yang kondisinya rusak ringan	Kab. Karangasem	5,38%		6.932.808.000,00		5,38%		7.626.088.800,00
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Prosentase rekonstruksi/ peningkatan jalan kabupaten yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat	Kab. Karangasem	4,57%		75.094.505.235,99		4,57%		82.603.955.759,59
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Tersedianya database jalan dan Jembatan di Kabupaten Karangasem		100,00%		218.037.622,00		100,00%		239.841.384,20
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik, bangunan sungai yang tertata, tersedianya dan terpeliharanya prasarana air baku, tersedianya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tersedianya dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai	Kab. Karangasem			29.308.839.000,00		-		32.239.722.900,00
1	03	02	2.02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	Kab. Karangasem	27,50%		24.502.430.000,00		27,50%		26.952.673.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Kab. Karangasem			15.089.899.000,00	DAK/APBD		1,00%		16.598.888.900,00
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan kewenangan Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem			2.980.451.000,00	APBD		70,00%		3.278.496.100,00
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Kab. Karangasem			6.432.080.000,00	APBD		0,01%		7.075.288.000,00
1	03	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan sungai yang tertata, prosentase prasarana air baku dalam kondisi baik, rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang tersusun, prosentase bangunan pengaman pantai dalam kondisi baik	Kab. Karangasem			4.806.409.000,00			-		5.287.049.900,00
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	Kab. Karangasem	100 meter		1.340.387.000,00	APBD/APBN		100 meter		1.474.425.700,00
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Prosentase sungai yang dinormalisasi dan dipelihara	Kab. Karangasem	0,06%		1.000.000.000,00	APBD/APBN		0,06%		1.100.000.000,00
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai	Kab. Karangasem	1 wilayah sungai		570.500.000,00	APBD		1 wilayah sungai		627.550.000,00
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola sumber daya air yang dibina dan diberdayakan	Kab. Karangasem	82 orang		221.887.000,00	APBD		82 orang		244.075.700,00
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun	Kab. Karangasem	1 unit		-	APBD		1 unit		-
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang direhabilitasi	Kab. Karangasem	1 unit		438.280.000,00	APBD		1 unit		482.108.000,00
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah operasi dan pemeliharaan embung	Kab. Karangasem	5 unit		395.185.000,00	APBD		5 unit		434.703.500,00
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan perlindungan mata air	Kab. Karangasem	5,8%		665.998.000,00	APBD		5,80%		732.597.800,00
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan pengaman pantai	Kab. Karangasem	50 m		174.172.000,00	APBD/APBD Prov		50 m		191.589.200,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	Kab. Karangasem	76,48%		5.220.846.000,00			76,48%		5.742.930.600,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak	Kab. Karangasem	76,48%		5.220.846.000,00			76,48%		5.742.930.600,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 05 2.01 03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Pembangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-T dan SPALD-S) di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	76,48%		4.958.900.000,00			76,48%		5.454.790.000,00
1 03 03 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya sistem operasi dan pemeliharaan akhir dari Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	100%		261.946.000,00			100,00%		288.140.600,00
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terakses air minum	Kab. Karangasem			7.962.188.000,00			-		8.758.406.800,00
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penduduk yang terakses air minum	Kab. Karangasem	87,52%		7.962.188.000,00			87,52%		8.758.406.800,00
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya capaian akses layanan air minum di kawasan Perdesaan	Kab. Karangasem	0%		1.600.000.000,00			-		1.760.000.000,00
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya capaian pelayanan air minum yang layak di kawasan Perdesaan	Kab. Karangasem	0%		6.362.188.000,00			-		6.998.406.800,00
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Berkembangnya Jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem			338.846.000,00			-		372.730.600,00
1 3 11 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terseleenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kab. Karangasem	100%		178.846.000,00			100,00%		196.730.600,00
1 3 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang lulus sertifikasi	Kab. Karangasem	100%		40.000.000,00	APBD		100,00%		44.000.000,00
1 3 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang memahami peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	Kab. Karangasem	100%		138.846.000,00	APBD		100,00%		152.730.600,00
1 3 11 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	71%		50.000.000,00			71,00%		55.000.000,00
1 3 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 jenis informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada SIPJAKI	Kab. Karangasem	71%		20.000.000,00	APBD		71,00%		22.000.000,00
1 3 11 2.02 04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Persentase Tersedianya Informasi ke-PU-an	Kab. Karangasem	71%		30.000.000,00	APBD		71,00%		33.000.000,00
1 3 11 2.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terseleenggaranya penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil/kecil)	Kab. Karangasem	71%		30.000.000,00			71,00%		33.000.000,00
1 3 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase Penerbitan Rekomendasi IUJK sesuai dengan SOP yang ada	Kab. Karangasem	71%		30.000.000,00	APBD		71,00%		33.000.000,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	11	2.04		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertibnya usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	40%		80.000.000,00			40,00%		88.000.000,00
1	3	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kelembagaan Konstruksi	Persentase Peserta Bimbingan Teknis yang Mengetahui dan Memahami tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Karangasem	0%		40.000.000,00	APBD		0,00%		44.000.000,00
1	3	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertibnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ada	Kab. Karangasem	40%		40.000.000,00	APBD		40,00%		44.000.000,00
1	3	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase terlaksananya Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem			10.850.163.850,00			0,00%		56.119.800,00
1	3	08	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Karangasem			10.850.163.850,00			0,00%		56.119.800,00
1	3	8	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	87'17%		10.799.145.850,00	APBD	- Perpindahan kegiatan pembangunan gedung dari Setwan -Pembangunan Gedung dari Kec. Abang - Pembangunan Gedung kantor dari bagian perlengkapan - Pembangunan Gedung Kemeteorologian dari disperindag, Pembangunan	0,00%		-
1	3	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Prosentase Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang dapat dilaksanakan	Kab. Karangasem	20%		51.018.000,00	APBD		20,00%		56.119.800,00
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	18%		93.940.000,00			18,00%		103.334.000,00

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	12	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Prosentase terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kab. Karangasem	8%		93.940.000,00			8,00%		103.334.000,00
1	3	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan	Kab. Karangasem	25%		93.940.000,00	APBD		25,00%		103.334.000,00
1	3	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	25%		57.387.000,00			25,00%		63.125.700,00
1	3	09	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	25%		57.387.000,00			25,00%		63.125.700,00
1	3	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Kab. Karangasem	25%		57.387.000,00	APBD		25,00%		63.125.700,00
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	0%		236.879.000,00			0,00%		260.566.900,00
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Kab. Karangasem	45%		86.383.000,00			45,00%		95.021.300,00
1	3	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan baik	Kab. Karangasem	40%		49.500.000,00	APBD		40,00%		54.450.000,00
1	3	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Prosentase Pemberian Informasi Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan	Kab. Karangasem	50%		36.883.000,00	APBD		50,00%		40.571.300,00
1	3	12	2.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan baik		18%		150.496.000,00			18,00%		165.545.600,00
1	3	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan baik	Kab. Karangasem	70%		150.496.000,00	APBD		70,00%		165.545.600,00
					JUMLAH					168.694.331.683,76	-				173.684.704.417,13
1	04				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	04															
1	04	01				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	04	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Kab. Karangasem	100%		1.256.000.000	APBD		100%		1.575.200.000
1	04	01	2.02			Administrasi keuangan	Persentase layanan administrasi keuangan yang tertangani	Kab. Karangasem	100%		90.000.000			100%		209.000.000
1	04	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	Kab. Karangasem	3 laporan		15.000.000			100%		16.500.000
1	04	01	2.02	07		Penyusunan laporan keuangan bulanan / semesteran	Jumlah laporan bulanan yang tersusun dan terbayarnya jasa pendukung administrasi keuangan	Kab. Karangasem	50 laporan		75.000.000			100%		192.500.000
1	04	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani	Kab. Karangasem			1.166.000.000			100%		1.366.200.000
1	04	01	2.03	1		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan terbayarnya jasa tenaga administrasi dan sekpri	Kab. Karangasem	100%		60.000.000	APBD		100%		66.000.000
1	04	01	2.03	2		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlahnya Telepon Air dan Listrik yang Terbayar	Kab. Karangasem	100%		70.000.000	APBD		100%		77.000.000
1	04	01	2.03	8		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa clening servis yang terbayarkan	Kab. Karangasem	100%		14.000.000	APBD		100%		126.500.000
1	04	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karangasem	100%		176.000.000	APBD		100%		193.600.000
1	04	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlahnya Penyediaan Alat Tulis Kantor Berbasis IT	Kab. Karangasem	100%		30.000.000	APBD		100%		33.000.000
1	04	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak, Pengadaan dan Foto Copy	Kab. Karangasem	100%		13.000.000	APBD		100%		14.300.000
1	04	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karangasem	100%		6.500.000	APBD		100%		7.150.000
1	04	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan dan Buku Bacaan	Kab. Karangasem	100%		4.500.000	APBD		100%		4.950.000
1	04	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan	Kab. Karangasem	100%		11.000.000	APBD		100%		12.100.000
1	04	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjananan Dinas Ke Luar Daerah	Kab. Karangasem	100%		100.000.000	APBD		100%		192.500.000
1	04	01	2.03	16		Penyedia bahan logistik kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Piodalan dan Pengadaan canang sehari hari	Kab. Karangasem	100%		60.000.000	APBD		100%		66.000.000
1	04						Terlaksananya Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-Hari Nasional	Kab. Karangasem	100%		50.000.000	APBD		100%		55.000.000
	04						terlaksananya penataan halaman gedung kantor	Kab. Karangasem	200%		20.000.000	APBD		100%		22.000.000
1	04	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan terbayarnya jasa tenaga waker	Kab. Karangasem	100%		180.000.000	APBD		100%		198.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2,Roda 4 yang Terpelihara dan Jum,lah STNK Roda 4, Roda 2 yang Di Samsat dan terbayarnya jasa sopir	Kab. Karangasem	100%		350.000.000	APBD		100%		275.000.000
1	04	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Karangasem	100%		21.000.000	APBD		100%		23.100.000
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Kab. Karangasem	100%		1.610.000.000	APBD		100%		1.743.500.000
1	04	02	2.06		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan					1.610.000.000					1.743.500.000
1	04	02	2.06	09	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pengembangan perumahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Perumahan	Kab. Karangasem	100%		530.000.000	APBD		75%		583.000.000
						Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Rumah 1 Tahun	Kab. Karangasem	100%		530.000.000	APBD		75%		583.000.000
						Jumlah pemantauan pengembangan perumahan yang tertangani	Kab. Karangasem	100%		275.000.000	APBD		100%		275.000.000
						Terlaksanananya Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kab. Karangasem	100%		275.000.000	APBD		100%		302.500.000
1	04	03			Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh		Kab. Karangasem	100%		43.737.130.000	APBD		100%		54.035.240.000
1	04	03	2.02		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepulu) Ha					3.668.400.000					4.035.240.000
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Kab. Karangasem	100%		2.084.800.000	APBD		100%		2.293.280.000
1	04	03	2.02	04	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Kab. Karangasem	100%		1.583.600.000	APBD		100%		1.741.960.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					40.068.730.000					50.000.000.000
1	04	03	2.03	02	perbaikan rumah tinggal layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	perbaikan rumah tinggal layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Kab. Karangasem	100%		40.068.730.000					50.000.000.000
01	04	04			Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Kab. Karangasem	100%		12.000.000.000	APBD		100%		13.200.000.000
01	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					12.000.000.000					13.200.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan/Draina-se	Kab. Karangasem	100%		4.000.000.000	APBD		100%		4.400.000.000
						Terlaksananya Perencanaan dan Kontruksi Perbaikan Lingkungan	Kab. Karangasem	100%		4.000.000.000	APBD		100%		4.400.000.000
						Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Kab. Karangasem	100%		4.000.000.000	APBD		100%		4.400.000.000
					JUMLAH					58.603.130.000					70.553.940.000
1	05				Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	05				Satuan Polisi Pamong Praja										
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.098.990.000,00					
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan					15.000.000,00					15.000.000,00
1	05	01	1.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang dapat tersusun tepat waktu	Karangasem	1	Tahun	15.000.000,00	APBD		1	Tahun	15.000.000,00
1	05	01	1.03		Administrasi Umum					1.718.990.000,00					2.448.990.000,00
1	05	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dipergunakan	Karangasem	1	Tahun	62.000.000,00	APBD		1	Tahun	62.000.000,00
1	05	01	1.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dapat terbayarkan	Karangasem	1	Tahun	60.000.000,00	APBD		1	Tahun	60.000.000,00
1	05	01	1.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dapat terbayarkan	Karangasem	1	Tahun	24.000.000,00	APBD		1	Tahun	24.000.000,00
1	05	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang dapat disediakan	Karangasem	1	Tahun	36.000.000,00	APBD		1	Tahun	36.000.000,00
1	05	01	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dapat terbayarkan	Karangasem	1	Tahun	25.000.000,00	APBD		1	Tahun	25.000.000,00
1	05	01	1.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dapat dicetak dan digandakan	Karangasem	1	Tahun	12.000.000,00	APBD		1	Tahun	12.000.000,00
1	05	01	1.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	Karangasem	1	Tahun	12.000.000,00	APBD		1	Tahun	12.000.000,00
1	05	01	1.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan	Karangasem	1	Tahun	5.000.000,00	APBD		1	Tahun	5.000.000,00
1	05	01	1.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dapat terbayarkan	Karangasem	1	Tahun	12.000.000,00	APBD		1	Tahun	12.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dapat disediakan	Karangasem	1	Tahun	172.000.000,00	APBD		1	Tahun	172.000.000,00
1	05	01	1.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang dapat disajikan	Karangasem	1	Tahun	40.000.000,00	APBD		1	Tahun	40.000.000,00
1	05	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat terbayarkan	Karangasem	1	Tahun	75.000.000,00	APBD		1	Tahun	75.000.000,00
1	05	01	1.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat diadakan	Karangasem	1	Tahun	380.000.000,00	APBD		1	Tahun	380.000.000,00
1	05	01	1.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	Karangasem	1	Tahun	80.000.000,00	APBD		1	Tahun	80.000.000,00
1	05	01	1.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dapat diadakan	Karangasem	1	Tahun	50.000.000,00	APBD		1	Tahun	50.000.000,00
1	05	01	1.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Karangasem	1	Tahun	143.000.000,00	APBD		1	Tahun	143.000.000,00
1	05	01	1.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Karangasem	1	Tahun	400.990.000,00	APBD		1	Tahun	400.990.000,00
1	05	01	1.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Karangasem	1	Tahun	30.000.000,00	APBD		1	Tahun	30.000.000,00
1	05	01	1.03	38	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor yang dapat disediakan	Karangasem	1	Tahun	100.000.000,00	APBD		1	Tahun	100.000.000,00
1	05	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					365.000.000,00					365.000.000,00
1	05	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang dapat diadakan	Karangasem	1	Tahun	365.000.000,00	APBD		1	Tahun	365.000.000,00
1	05	01			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					2.810.000.000,00					
1	05	01	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.336.000.000,00					2.336.000.000,00
1	05	01	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat dicegah	Karangasem	1	Tahun	1.100.000.000,00	APBD		1	Tahun	1.100.000.000,00
1	05	01	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota yang dapat dilaksanakan	Karangasem	1	Tahun	636.000.000,00	APBD		1	Tahun	636.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
				Volume	Satuan			Volume			Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 05 01 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang diberdayakan	Karangasem	1	Tahun	140.000.000,00	APBD		1	Tahun	140.000.000,00	
1 05 01 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Sumber daya aparatur Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Karangasem	1	Tahun	260.000.000,00	APBD		1	Tahun	260.000.000,00	
1 05 01 2.01 06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja	Jumlah pejabat Fungsional yang dibina	Karangasem	1	Tahun	100.000.000,00	APBD		1	Tahun	100.000.000,00	
1 05 01 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diadakan	Karangasem	1	Tahun	100.000.000,00	APBD		1	Tahun	100.000.000,00	
1 05 01 2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					424.000.000,00					424.000.000,00	
1 05 01 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yang dapat dilaksanakan	Karangasem	1	Tahun	100.000.000,00	APBD		1	Tahun	100.000.000,00	
1 05 01 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yang dilaksanakan	Karangasem	1	Tahun	100.000.000,00	APBD		1	Tahun	100.000.000,00	
1 05 01 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yang dapat tertangani	Karangasem	1	Tahun	224.000.000,00	APBD		1	Tahun	224.000.000,00	
1 05 01 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					50.000.000,00					50.000.000,00	
1 05 01 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Karangasem	1	Tahun	50.000.000,00	APBD		1	Tahun	50.000.000,00	
	JUMLAH					4.908.990.000,00					5.273.990.000,00	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat											
1.05	02 Dinas Pemadam Kebakaran											
1.05	02 01	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Karangasem	100	persen	987.886.000,00	APBD		100	persen	973.355.650,00	
1.05	02 01 2.02	Administrasi Keuangan	Karangasem	100	persen	96.203.100,00	APBD		100	persen	102.200.000,00	
1.05	02 01 2.02 06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Karangasem	3	laporan	96.203.100,00	APBD		3	laporan	102.200.000,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.05	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Karangasem	100	persen	664.189.200,00	APBD		100	persen	600.272.400,00
1.05	02	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan terlaksananya surat menyurat	Karangasem	12	bulan	1.200.000,00	APBD		12	bulan	1.200.000,00
1.05	02	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening air, listrik, dan telepon yang dibayar	Karangasem	12	bulan	43.800.000,00	APBD		12	bulan	61.200.000,00
1.05	02	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Karangasem	12	bulan	36.715.500,00	APBD		12	bulan	38.400.000,00
1.05	02	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat kantor yang dibeli	Karangasem	40	item	15.379.000,00	APBD		42	item	16.500.000,00
1.05	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Karangasem	12	bulan	10.736.500,00	APBD		12	bulan	14.100.000,00
1.05	02	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya alat listrik dan elektronik	Karangasem	12	bulan	2.500.000,00	APBD		12	bulan	3.000.000,00
1.05	02	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Karangasem	12	bulan	6.060.000,00	APBD		12	bulan	6.060.000,00
1.05	02	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Karangasem	12	bulan	155.076.500,00	APBD		12	bulan	165.090.000,00
1.05	02	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Karangasem	571	kotak	32.661.200,00	APBD		530	kotak	30.316.000,00
1.05	02	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Karangasem	12	bulan	60.000.000,00	APBD		12	bulan	80.000.000,00
1.05	02	01	2.03	20	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Karangasem	2	unit	50.000.000,00	APBD		0	unit	0
1.05	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Karangasem	2	unit	15.338.400,00	APBD		0	unit	0
1.05	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor Yang diadakan	Karangasem	6	unit	61.315.700,00	APBD		0	unit	0
1.05	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	Karangasem	1	unit	33.200.000,00	APBD		1	uniut	33.200.000,00
1.05	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional terpelihara	Karangasem	12	bulan	130.206.400,00	APBD		12	bulan	140.206.400,00
1.05	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dipelihara	Karangasem	12	bulan	10.000.000,00	APBD		12	bulan	11.000.000,00
1.05	02	01	2.04		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	Karangasem	100	persen	227.493.700,00	APBD		100	persen	270.883.250,00
1.05	02	01	2.04	09	Pendidikan pelatihan formal	jumlah aparatur / petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	Karangasem	20	orang	227.493.700,00	APBD		51	orang	270.883.250,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.05	02	04			Program Penanggulangan Kebakaran	Response time 15 menit pemadam kebakaran sampai tujuan	Karangasem	100	persen	3.449.811.700,00	APBD		100	persen	4.026.857.250,00
						Persentase kasus kebakaran yang ditangani		100	persen						
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100	persen						
						Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan		100	persen						
						Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atai dibawah Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan		100	persen						
1.05	02	04	2.01		Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Karangasem	100	persen	3.287.899.200,00	APBD		100	persen	3.754.257.250,00
1.05	02	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran	Karangasem	60	kasus	3.287.899.200,00	APBD		60	kasus	3.754.257.250,00
1.05	02	04	2.02		Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi syarat	Karangasem	100	persen	0	APBD		100	persen	100.000.000,00
1.05	02	04	2.02	01	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah lokasi pendataan yang dilaksanakan	Karangasem	-	-	0	APBD		19	lokasi	100.000.000,00
1.05	02	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Karangasem	100	persen	161.912.500,00	APBD		100	persen	172.600.000,00
1.05	02	04	2.04	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan tentang pencegahan bencana kebakaran	Karangasem	11	lokasi	161.912.500,00	APBD		19	lokasi	172.600.000,00
						JUMLAH				4.437.697.700,00					5.000.212.900,00
1.05					Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat										
1.05	04				Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1.05	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Kabupaten Karangasem			1.087.490.000,00					1.219.080.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	04	01	2.02		Administrasi Keuangan					56.760.000,00					56.760.000,00
1.05	04	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	Kabupaten Karangasem	5	laporan	30.000.000,00	APBD		5	laporan	30.000.000,00
1.05	04	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang tersusun dan tepat waktu	Kabupaten Karangasem	8	laporan	26.760.000,00	APBD		8	laporan	26.760.000,00
1.05	04	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Kabupaten Karangasem			1.030.730.000,00					1.162.320.000,00
1.05	04	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	Kabupaten Karangasem	600	lembar	299.870.000,00	APBD		600	lembar	299.870.000,00
1.05	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	Kabupaten Karangasem	100	persen	50.000.000,00	APBD		100	persen	100.000.000,00
1.05	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Kabupaten Karangasem	100	persen	108.460.000,00	APBD		100	persen	118.460.000,00
1.05	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	100	persen	18.000.000,00	APBD		100	persen	18.000.000,00
1.05	04	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Kabupaten Karangasem	100	persen	10.000.000,00	APBD		100	persen	10.000.000,00
1.05	04	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	100	persen	10.000.000,00	APBD		100	persen	10.000.000,00
1.05	04	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karangasem	100	persen	50.000.000,00	APBD		100	persen	121.590.000,00
1.05	04	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karangasem	10	jenis	15.000.000,00	APBD		10	jenis	15.000.000,00
1.05	04	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Kabupaten Karangasem	500	orang	37.800.000,00	APBD		500	orang	37.800.000,00
1.05	04	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Karangasem	20	kali	80.000.000,00	APBD		20	kali	80.000.000,00
1.05	04	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan sad kahyangan dan perayaan hari besar nasional	Kabupaten Karangasem	100	persen	79.300.000,00	APBD		100	persen	79.300.000,00
1.05	04	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung/kantor yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	100	persen	110.300.000,00	APBD		100	persen	110.300.000,00
1.05	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	8	Unit	127.000.000,00	APBD		8	Unit	127.000.000,00
1.05	04	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung/kantor yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	100	persen	35.000.000,00	APBD		100	persen	35.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.05	04	03				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Kabupaten Karangasem			2.980.370.000,00				4.670.810.000,00	
1.05	04	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase informasi Rawan Bencana yang				150.750.000,00				704.750.000,00	
1.05	04	03	2.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Belanja)	Terlaksananya Pusat data dan Informasi BPBD	Kabupaten Karangasem	1	pusat data	150.750.000,00	APBD		1	pusat data	704.750.000,00
1.05	04	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					866.350.000,00				1.207.790.000,00	
1.05	04	03	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terlatih dan Jumlah aparat penanggulangan bencana yang terlatih	Kabupaten Karangasem	60	orang	105.520.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	30	orang	135.520.000,00
1.05	04	03	2.02	05		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rambu / alat peringatan yang tersediaJumlah rambu / alat peringatan yang tersedia	Kabupaten Karangasem	100	persen	157.300.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	100	persen	157.300.000,00
1.05	04	03	2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk, Persentase operasional tim siaga bencana yang terbayar, dan Jumlah masyarakat tangguh bencana yang terbentuk	Kabupaten Karangasem	1 Sekolah, 50 orang, 60 orang	sekolah	401.970.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	1	sekolah	506.970.000,00
1.05	04	03	2.02	07		Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	Persentase penanganan pasca bencana	Kabupaten Karangasem	100	persen	151.560.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	100	persen	308.000.000,00
1.05	04	03	2.02	08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC yang terlatih	Kabupaten Karangasem	50	orang	50.000.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	50	orang	100.000.000,00
1.05	04	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.963.270.000,00				2.758.270.000,00	
1.05	04	03	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang tersedia	Kabupaten Karangasem	100	persen	124.000.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	100	persen	519.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.05	04	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Persentase penanganan kejadian bencana dan pelaksanaan kegiatan Balawista	Kabupaten Karangasem	100	persen	1.839.270.000,00	APBD	Edaran Mendagri, Nomor 360/1220/SJ sesuai arahan Presiden RI	100	persen	2.239.270.000,00
JUMLAH										4.067.860.000,00					5.889.890.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	06	01			DINAS SOSIAL										
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.315.241.000,00					3.812.527.150,00
1	06	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	%	2.953.580.000,00			100	%	3.396.617.000,00
1	06	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat-menyurat	Prosentase Jasa Surat Menyurat	Amlapura	100	%	44.000.000,00	APBD		100	%	50.600.000,00
1	06	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	2	Unit	80.000.000,00	APBD		2	Unit	92.000.000,00
1	06	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berizin/ bersamsat	Amlapura	7 22	Unit Mobil Sepeda Motor	63.800.000,00	APBD		7 22	Unit Mobil Sepeda Motor	73.370.000,00
1	06	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya selama 12 bulan	Amlapura	3	Orang	81.600.000,00	APBD		3	Orang	93.840.000,00
1	06	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase ATK yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Amlapura	100	%	15.000.000,00	APBD		100	%	17.250.000,00
1	06	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang bisa terpenuhi	Amlapura	12	btl	10.000.000,00	APBD		12	bl	11.500.000,00
1	06	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dapat terpenuhi	Amlapura	12	btl	4.000.000,00	APBD		12	bl	4.600.000,00
1	06	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Amlapura	1	paket	200.000.000,00	APBD		1	Paket	230.000.000,00
1	06	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang mampu tersedia selama 12 bulan	Amlapura	12	btl	4.000.000,00	APBD		12	bl	4.600.000,00
1	06	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam rapat rutin selama 12 bulan	Amlapura	1000	Kotak	16.450.000,00	APBD		1.000	Kotak	18.917.500,00
1	06	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasinke luar daerah yang dapat diikuti selama 12 bulan	Luar daerah	100	%	150.000.000,00	APBD		100	%	172.500.000,00
1	06	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah canang, bebanten piodalan, purnama, tilem, sehari-hari dll yang mampu disediakan selama 12 bulan	Amlapura	12	bl	35.000.000,00	APBD		12	bl	40.250.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 2 unit	Amlapura	2	Unit	243.200.000,00	APBD		2	Unit	279.680.000,00
1	06	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan	Amlapura	7 22	Unit Mobil Sepeda Motor	216.800.000,00	APBD		7 22	Unit Mobil Sepeda Motor	249.320.000,00
1	06	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dapat dipelihara selama 12 bulan sebanyak 10 AC, 14 komputer dan 11 laptop	Amlapura	35	Unit	15.000.000,00	APBD		35	Unit	17.250.000,00
1	06	01	2.03	38	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor direhab sedang/berat	Amlapura	1	Unit	1.774.730.000,00	APBD	Kondisi bangunan kantor Dinas Sosial yang sudah hampir rubuh, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi bangunan secara menyeluruh	1	Unit	2.040.939.500,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan		100	%	190.600.000,00	APBD		100	%	219.190.000,00
1	06	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan Keuangan dan sejenisnya selama 12 bulan	Amlapura	100	%	117.000.000,00	APBD		100	%	134.550.000,00
1	06	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan sejenisnya selama 12 bulan	Amlapura	100	%	73.600.000,00	APBD		100	%	84.640.000,00
1	06	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan sejenisnya selama 12 bulan				171.061.000,00					196.720.150,00
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang disusun	Amlapura	100	%	45.446.000,00	APBD		100	%	52.262.900,00
1	06	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan sejenisnya selama 12 bulan	Amlapura	100	%	76.800.000,00	APBD				88.320.000,00
1	06	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan sejenisnya selama 12 bulan	Amlapura			48.815.000,00	APBD		100	%	56.137.250,00
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK,PSM dan masyarakat yang mendapat	Kab. Karangasem	8 Orsos / 200 orang		919.929.000,00	APBD		8 Orsos 200 orang		1.057.918.350,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota					919.929.000,00					1.057.918.350,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM kesos yang mendapatkan bimbingan teknis	Kab. Karangasem	90	Or	321.618.000,00	APBD		90	Or	369.860.700,00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah orsos yang dibina	Kab. Karangasem	8	Orsos	52.180.000,00	APBD		8	Orsos	60.007.000,00
						Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	8 Kecamatan	100	%	349.331.000,00	APBD		100	%	401.730.650,00
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pelatihan bagi pmks / Kluarga Miskin	Kab. Karangasem	90	Or	71.580.000,00	APBD		100	%	82.317.000,00
						Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	Kab. Karangasem	10	Or	39.885.000,00	APBD		10	Or	45.867.750,00
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Soaial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kab. Karangasem	200	Or	16.835.000,00	APBD		200	Or	19.360.250,00
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase kasus KDRT, pelecehan seksual dan pencurian yang tertangani	Kab. Karangasem	100	%	68.500.000,00	APBD		100	%	78.775.000,00
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Kab. Karangasem	100	Or	1.104.136.000,00	APBD				1.269.756.400,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			683.886.000,00						786.468.900,00
1	06	04	2.01	01	Pemberian Permakanan	Persentase penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai	78 Desa / Kelurahan	100	%	200.795.000,00	APBD		100	%	230.914.250,00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental ,Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	Kab. Karangasem	10	Or	125.784.000,00	APBD		10	Or	144.651.600,00
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah anak terlantar yang masih sekolah yang mendapatkan pakaian dan peralatan sekolah serta jaminan	Kab. Karangasem	90	Or	70.064.000,00	APBD		90	Or	80.573.600,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial dan Jaminan Sosial	Kab. Karangasem	125	Or	157.935.000,00	APBD		125	Or	181.625.250,00
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah gepeng yang terjaring razia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diberikan pembinaan dan dipulangkan ketempat	Kab. Karangasem	100	or	100.257.000,00	APBD		100	or	115.295.550,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	2.01	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah / keluarga	Kab. Karangasem	100	Or	29.051.000,00	APBD		100	Or	33.408.650,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV Aids dan Napza di luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				420.250.000,00					483.287.500,00
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penghuni panti yang mendapat bantuan permakanan dan bantuan operasional kepada panti	Kab. Karangasem	83	or	173.277.000,00	APBD		83	or	199.268.550,00
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental ,Spiritual dan Sosial	Jumlah Eks Narapidana yang ditangani		20	or	36.220.000,00	APBD		20	or	41.653.000,00
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan diberikan jaminan sosial	Kab. Karangasem	305	Or	210.753.000,00	APBD		305	Or	242.365.950,00
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Bantuan Bagi Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				302.255.000,00					347.593.250,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin	Persentase ter-update nya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				302.255.000,00					347.593.250,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase tersedianya data PBI JKN, PMKS, dan PSKS yang akurat dan Valid	Amlapura	100	%	302.255.000,00	APBD		100	%	347.593.250,00
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase pasilitasi bantuan sosial pasca konflik				1.589.291.000,00					1.827.684.650,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Presentase bantuan sosial pasca bencana alam dan sosial				1.589.291.000,00					1.827.684.650,00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Persentase bantuan bagi korban bencana alam/sosial pada saat tanggap cepat darurat pasca bencana serta TAGANA yang mendapatkan	8 Kecamatan	255	KK	1.527.541.000,00	APBD		255	KK	1.756.672.150,00
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang orang rentan yang difasilitasi untuk mendapat bantuan	8 Kecamatan	100	%	61.750.000,00	APBD		100	%	71.012.500,00
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan		100	%	296.491.000,00	APBD		100	%	340.964.650,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional				296.491.000,00					340.964.650,00
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makan pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhab	Kab. Karangasem	2	Monumen	197.156.000,00	APBD		100	%	226.729.400,00
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makan pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Terpeliharanya monumen perjuangan/Tonggak sejarah	Kab. Karangasem	2	Monumen	57.335.000,00	APBD		1	Monumen	65.935.250,00
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Pengaman Taman Makam Pahlawan	Kec Bebandem	2	Monumen	42.000.000,00	APBD		1	Monumen	48.300.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
JUMLAH						7.527.343.000,00					8.656.444.450,00					
2																
2.07																
2.07	01															
2.07	01	01				1.110.646.000,00			100	%	1.110.646.000,00					
2.07	01	01	2.01			10.500.000,00			100	%	10.500.000,00					
2.07	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Karangasem		100	%	5.500.000,00	APBD II		100	%	5.500.000,00
2.07	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	Kab. Karangasem		100	%	5.000.000,00	APBD II		100	%	5.000.000,00
2.07	01	01	2.03													
2.07	01	01	2.03		Administrasi Umum	Terselenggaranya Administrasi Kantor					1.100.146.000,00					1.100.146.000,00
2.07	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat	Kab. Karangasem		100	%	193.996.000,00	APBD II		100	%	193.996.000,00
2.07	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa telepon, air dan listrik	Kab. Karangasem		36	bulan rekening	81.950.000,00	APBD II		36	bulan rekening	81.950.000,00
2.07	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Karangasem		100	%	166.000.000,00	APBD II		100	%	166.000.000,00
2.07	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Karangasem		100	%	19.800.000,00	APBD II		100	%	19.800.000,00
2.07	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karangasem		100	%	15.000.000,00	APBD II		100	%	15.000.000,00
2.07	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat elektronik dan listrik	Kab. Karangasem		100	%	10.000.000,00	APBD II		100	%	10.000.000,00
2.07	01	01	2.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Karangasem		100	%	65.000.000,00	APBD II		100	%	65.000.000,00
2.07	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, bacaan lain di kantor	Kab. Karangasem		100	%	5.400.000,00	APBD II		100	%	5.400.000,00
2.07	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Karangasem		100	%	85.000.000,00	APBD II		100	%	85.000.000,00
2.07	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Karangasem		100	%	8.000.000,00	APBD II		100	%	8.000.000,00
2.07	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Karangasem		100	%	100.000.000,00	APBD II		100	%	100.000.000,00
2.07	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Karangasem		100	%	250.000.000,00	APBD II		100	%	250.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.07	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor , penataan halaman kantor dan pemeliharaan jalan	Kab. Karangasem	100	%	60.000.000,00	APBD II		100	%	60.000.000,00
2.07	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebeulair	Kab. Karangasem	100	%	40.000.000,00	APBD II		100	%	40.000.000,00
2.07	01	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi		50	%	773.250.000,00			50	%	773.250.000,00
2.07	01	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		46	%	374.680.000,00			46	%	374.680.000,00
2.07	01	03	2.01	01	Proses Pelaksnaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Kab. Karangasem	112	orang	374.680.000,00	APBD II		112	orang	374.680.000,00
2.07	01	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan		75	%	140.000.000,00			75	%	140.000.000,00
2.07	01	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan/kursus mendapat pembinaan	Kab. Karangasem	5	Lembaga	140.000.000,00	APBD II		5	Lembaga	140.000.000,00
2.07	01	03	2.04		Konsultasi produktivitas Pada Perusahaan kecil	Terselenggaranya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil		100	%	150.000.000,00			100	%	150.000.000,00
2.07	01	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah usaha kecil yang mendapat pelatihan peningkatan produktivitas	Kab. Karangasem	2	kelompok	150.000.000,00	APBD II		2	kelompok	150.000.000,00
2.07	01	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas kabupaten/kota		20	%	108.570.000,00			20	%	108.570.000,00
2.07	01	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi untuk tersertifikasi	Kab. Karangasem	50	orang	108.570.000,00	APBD II		50	orang	108.570.000,00
2.07	01	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan		55	%	347.600.000,00			55	%	747.600.000,00
2.07	01	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah		100	%	85.000.000,00			100	%	200.000.000,00
2.07	01	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Sumberdaya pelayanan antar kerja yang disediakan	Kab. Karangasem	100	%	25.000.000,00	APBD II		100	%	30.000.000,00
2.07	01	04	2.01	02	Pelayanan Antarkerja	Jumlah pelayanan antar kerja yang diberikan	Kab. Karangasem	20	orang	30.000.000,00	APBD II		20	orang	85.000.000,00
2.07	01	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan	Kab. Karangasem	50	perusahaan	30.000.000,00	APBD II		50	perusahaan	85.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.07	01	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan		132	orang	60.000.000,00		132	orang	100.000.000,00
2.07	01	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya sumber daya perizinan LPTKS	Kab. Karangasem	100	%	25.000.000,00	APBD II	100	%	50.000.000,00
2.07	01	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian LPTKS	Kab. Karangasem	100	%	35.000.000,00	APBD II	100	%	50.000.000,00
2.07	01	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar kerja	Tersedianya informasi pasar kerja		100	%	103.600.000,00		100	%	197.600.000,00
2.07	01	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online	Kab. Karangasem	100	%	20.600.000,00	APBD II	100	%	40.600.000,00
2.07	01	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi pasar kerja online yang disediakan	Kab. Karangasem	25	lowongan	33.000.000,00	APBD II	25	lowongan	63.000.000,00
2.07	01	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Terselenggaranya Bursa Kerja	Kab. Karangasem	100	%	50.000.000,00	APBD II	100	%	94.000.000,00
2.07	01	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan		25	izin	34.000.000,00		25	izin	50.000.000,00
2.07	01	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan ()	Kab. Karangasem	30	orang	34.000.000,00	APBD II	30	orang	50.000.000,00
2.07	01	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100	%	65.000.000,00		100	%	200.000.000,00
2.07	01	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	tersedianya layanan terpadu yang diberikan pada calon PMI	Kab. Karangasem	100	%	25.000.000,00	APBD II	100	%	100.000.000,00
2.07	01	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI yang diberdayakan	Kab. Karangasem	31	KK	40.000.000,00	APBD II	31	KK	100.000.000,00
2.07	01	05			Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		100	%	470.204.000,00		100	%	470.204.000,00
2.07	01	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan		30	perusahaan	182.804.000,00		30	perusahaan	182.804.000,00
2.07	01	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Kab. Karangasem	2	peraturan	44.804.000,00	APBD II	2	peraturan	44.804.000,00
2.07	01	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan	Kab. Karangasem	2	dokumen	50.000.000,00	APBD II	2	dokumen	50.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.07	01	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ikut program jaminan sosial tenaga kerja	Kab. Karangasem	100	orang	88.000.000,00	APBD II		100	orang	88.000.000,00
2.07	01	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial		100	%	287.400.000,00			100	%	287.400.000,00
2.07	01	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Kab. Karangasem	5	kasus	78.400.000,00	APBD II		5	kasus	78.400.000,00
2.07	01	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi pencegahan perselisihan	Kab. Karangasem	5	perusahaan	115.000.000,00	APBD II		5	perusahaan	115.000.000,00
2.07	01	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Terseleenggaranya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab. Karangasem	100	%	44.000.000,00	APBD II		100	%	44.000.000,00
2.07	01	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional tripartit	Kab. Karangasem	100	%	50.000.000,00	APBD II		100	%	50.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.32	01				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi										
3.32	01	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat		31	KK	210.000.000,00			31	KK	210.000.000,00
3.32	01	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan		31	KK	210.000.000,00			31	KK	210.000.000,00
3.32	01	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan		31	KK	210.000.000,00	APBD II		31	KK	210.000.000,00
JUMLAH															3.311.700.000,00
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2	08				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2	08				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Amlapura	1 unit		500.000.000	APBD		1 unit		550.000.000
2	08	02			Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	Amlapura	20 %		805.600.000	APBD		20 %		886.160.000
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	Amlapura	20 %		120.400.000	APBD		20 %		132.440.000
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Ksbupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang responsif gender	Amlapura	58 OPD		18.000.000	APBD		40 OPD		19.800.000
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat desa yang teradvokasi PUG	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	30 perangkat desa		102.400.000	APBD		28 perangkat desa		112.640.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase perempuan yang terfasilitasi di bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Amlapura	58,74%		627.400.000	APBD		58,74%		690.140.000
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang terfasilitasi di bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	355 Orang		130.000.000	APBD		355 Orang		143.000.000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota organisasi wanita yang berpartisipasi aktif	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	21 Organisasi		497.400.000	APBD		21 Organisasi		547.140.000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga yang berbasis gender yang mampu diberdayakan	Amlapura	320 Orang		57.800.000	APBD		320 Orang		63.580.000
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat desa yang berbasis gender yang mampu diberdayakan	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	320 Orang		57.800.000	APBD		320 Orang		63.580.000
2	08	03			Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit Pelayanan Terpadu	Amlapura	100 %		476.400.000	APBD		100 %		524.040.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten / kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Amlapura	100 %		476.400.000	APBD		100 %		524.040.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kasus perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	45 Kasus		476.400.000	APBD		45 Kasus		524.040.000
2	08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Amlapura	100 %		50.000.000	APBD		100 %		55.000.000
2	08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	100 %		50.000.000	APBD		100 %		55.000.000
2	08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Anggota kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun Keluarga Sehat Sejahtera	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	50 Orang		50.000.000	APBD		50 Orang		55.000.000
2	08 05	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengelolaan Data Gender dan Anak yang tersusun	Amlapura	100 %		45.000.000	APBD		100 %		49.500.000
2	08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak Dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah buku statistik gender dan Profil Anak yang tersusun	Amlapura	50 Buku		45.000.000	APBD		50 Buku		49.500.000
2	08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan buku statistik gender dan Profil Anak	Amlapura	50 Buku		45.000.000	APBD		50 Buku		49.500.000
2	08 06	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase desa/kelurahan Layak Anak	Amlapura	45%		308.400.000	APBD		45%		339.240.000
2	08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anak Sekolah/ lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	45%		76.000.000	APBD		45%		83.600.000
2	08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Anak Sekolah/ lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	40 Orang		76.000.000	APBD		40 Orang		83.600.000
2	08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase desa/kelurahan Layak Anak	Amlapura	45%		232.400.000	APBD		45%		255.640.000
2	08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Partisipasi anak/ lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	Amlapura	4 Kegiatan		20.000.000	APBD		4 Kegiatan		22.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / kota	Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif	4 kecamatan	300 Orang		36.000.000	APBD		300 Orang		39.600.000
2	08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah desa layak anak yang terbentuk	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	16 desa		176.400.000	APBD		16 desa		194.040.000
2	08 07	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit Pelayanan Terpadu	Amlapura	100 %		302.400.000	APBD		100 %		332.640.000
2	08 07 2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	Persentase Kasus tindak Kekerasan terhadap anak yang terkoordinasi	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	100 %		302.400.000	APBD		100 %		332.640.000
2	08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus tindak Kekerasan terhadap anak yang tertangani	Tersebar di 8 (delapan) kecamatan	45 kasus		302.400.000	APBD		45 kasus		332.640.000
J U M L A H							3.115.800.000					3.427.380.000
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09		DINAS KETAHANAN PANGAN									
2	09 01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Amlapura	100%	408.780.000,00			100%		418.400.000,00
2	09 01 2.03		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Amlapura	100%	394.380.000,00					403.000.000,00
2	09 01 2.03 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Amlapura	600 lembar	3.000.000,00	APBD		700 lebar		4.000.000,00
2	09 01 2.03 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Amlapura	5 rekening	41.982.000,00	APBD		5 rekening		42.000.000,00
2	09 01 2.03 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan terbayarkannya jasa administrasi keuangan	Amlapura	12 bulan	50.400.000,00	APBD		12 Bulan		50.400.000,00
2	09 01 2.03 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	Amlapura	35 unit	3.000.000,00	APBD		40 unit		3.000.000,00
2	09 01 2.03 10		Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Amlapura	40 unit	14.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	09 01 2.03 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia	Amlapura	10 buku	3.000.000,00	APBD		12 buku		3.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Banyaknya fotocopy yang tersedia		500 lembar					600 lembar		
2	09 01 2.03 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Amlapura	10 unit	3.000.000,00	APBD		15 unit		3.000.000,00
2	09 01 2.03 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Amlapura	36 eksemplar/tahun	4.000.000,00	APBD		38 eksemplar/tahun		5.000.000,00
2	09 01 2.03 17	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Amlapura	12 kali	19.000.000,00	APBD		12kali		20.000.000,00
2	09 01 2.03 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	Amlapura	100%	47.000.000,00	APBD		100%		47.000.000,00
2	09 01 2.03 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Amlapura	100%	35.000.000,00	APBD		100%		37.000.000,00
2	09 01 2.03 24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Amlapura	3 unit	23.000.000,00	APBD		4 unit		24.000.000,00
2	09 01 2.03 28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya peliharaanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Amlapura	1 unit	26.200.000,00	APBD		1 unit		26.600.000,00
2	09 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	Amlapura	9 unit	109.798.000,00	APBD		9 unit		110.000.000,00
2	09 01 2.03 32	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Amlapura	100%	12.000.000,00	APBD		100%		13.000.000,00
2	09 01 2.02	Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Amlapura	100%	14.400.000,00	APBD		100%		15.400.000,00
2	09 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Amlapura	100%	7.200.000,00	APBD		100%		7.700.000,00
2	09 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya laporan Realisasi keuangan yang disusun	Amlapura	100%	7.200.000,00			100%		7.700.000,00
2	09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Kab. Karangasem	100%	1.217.350.000,00	APBD		100%		1.219.000.000,00
2	09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas pasokan dan harga pangan	Terlaksannya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Karangasem		58.175.000,00					59.000.000,00
2	09 03 2.01 04	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase kelembagaan dan jaringan pangan yang dikembangkan	Kab. Karangasem	100%	58.175.000,00	APBD		100%		59.000.000,00
2	09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem		1.100.000.000,00					1.100.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	100	ton beras	1.100.000.000,00	APBD		100	ton beras	1.100.000.000,00
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kab. Karangasem			59.175.000,00					60.000.000,00
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam	Kab. Karangasem	42	kelompok	59.175.000,00	APBD		42	kelompok	60.000.000,00
2 09 04	Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Karangasem			42.025.000,00	APBD				43.000.000,00
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			42.025.000,00					43.000.000,00
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	12	bulan	42.025.000,00			1	tahun	43.000.000,00
2 09 05	Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya pengawasan Keamanan Pangan	Kab. Karangasem	100%		41.025.000,00	APBD		100%		42.000.000,00
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem			41.025.000,00					42.000.000,00
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	100%		41.025.000,00			100%		42.000.000,00
TOTAL											1.722.400.000,00
2 11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Amlapura	100%		1.441.538.000,00	APBD		100%		1.441.538.000,00
2 11 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Karangasem	100%		124.800.000,00	APBD		100%		124.800.000,00
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	Kab. Karangasem	2	dokumen	10.000.000,00	APBD		2	dokumen	10.000.000,00
2 11 01 2.01 02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kab. Karangasem	2	dokumen	84.800.000,00	APBD		2	dokumen	84.800.000,00
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan DLH	Kab. Karangasem	100%		5.000.000,00	APBD		100%		5.000.000,00
2 11 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Laporan akhir tahun, LAKIP, LPPD, LKPJ, RFK)	Kab. Karangasem	4	dokumen	25.000.000,00	APBD		4	dokumen	25.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan	Kab. Karangasem	100%		59.000.000,00	APBD		100%		59.000.000,00
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Karangasem	100%		-	APBD		100%		-
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Amlapura	100%		24.000.000,00	APBD		100%		24.000.000,00
2	11	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Prosentase bahan verifikasi yang dipersiapkan	Amlapura	100%		10.000.000,00	APBD		100%		10.000.000,00
2	11	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase bahan tanggapan pemeriksaan yang dipersiapkan	Amlapura	100%		5.000.000,00	APBD		100%		5.000.000,00
2	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Prosentase tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	Amlapura	100%		10.000.000,00	APBD		100%		10.000.000,00
2	11	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Amlapura	1 dokumen		10.000.000,00	APBD		1 dokumen		10.000.000,00
2	11	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan	Amlapura	100%		1.242.738.000,00	APBD		100%		1.242.738.000,00
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	Amlapura	100%		20.500.000,00	APBD		100%		20.500.000,00
2	11	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	100%		100.000.000,00	APBD		100%		100.000.000,00
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Prosentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Amlapura	100%		100.000.000,00	APBD		100%		100.000.000,00
2	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase tersedianya jasa administrasi keuangan	Amlapura	100%		52.800.000,00	APBD		100%		52.800.000,00
2	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor	Amlapura	100%		24.000.000,00	APBD		100%		24.000.000,00
2	11	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase tersedianya alat tulis kantor	Amlapura	100%		44.576.000,00	APBD		100%		44.576.000,00
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Prosentase tersedianya barang cetak dan pengadaan	Amlapura	100%		28.227.000,00	APBD		100%		28.227.000,00
2	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Amlapura	100%		15.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	11	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	100%		19.335.000,00	APBD		100%		19.335.000,00
2	11	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	100%		12.000.000,00	APBD		100%		12.000.000,00
2	11	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tersedianya bahan logistik kantor	Amlapura	100%		80.000.000,00	APBD		100%		80.000.000,00
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase tersedianya makanan dan minuman kantor	Amlapura	100%		45.108.000,00	APBD		100%		45.108.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	11	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Amlapura	100%		225.000.000,00	APBD		100%		225.000.000,00
2	11	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan kantor	Amlapura	100%		82.000.000,00	APBD		100%		82.000.000,00
2	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya gedung kantor	Amlapura	100%		74.000.000,00	APBD		100%		74.000.000,00
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Amlapura	100%		295.192.000,00	APBD		100%		295.192.000,00
2	11	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	Amlapura	100%		25.000.000,00	APBD		100%		25.000.000,00
2	11	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Amlapura	100%		15.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	11	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi elektronik yang tersedia	Amlapura	1 bh		15.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Karangasem	100%		452.625.400,00	APBD		100%		452.625.400,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	100%		282.557.400,00	APBD		100%		282.557.400,00
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen IKPLHD, IKLH, UKL/UPL yang tersusun	Kab. Karangasem	3 dokumen		282.557.400,00	APBD		3 dokumen		282.557.400,00
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Prosentase terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	100%		170.068.000,00	APBD		100%		170.068.000,00
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang yang dibuat	Kab. Karangasem	1 dokumen		170.068.000,00	APBD		1 dokumen		170.068.000,00
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kab. Karangasem	100%		592.876.100,00	APBD		100%		592.876.100,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	100%		570.282.000,00	APBD		100%		570.282.000,00
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah media yang dipantau dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Kab. Karangasem	3 media		419.779.500,00	APBD		3 media		419.779.500,00
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian emisi rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Karangasem	2 lokasi		150.502.500,00	APBD		2 lokasi		150.502.500,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Prosentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Kab. Karangasem	100%		22.594.100,00	APBD		100%		22.594.100,00
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah lokasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kab. Karangasem	2 lokasi		22.594.100,00	APBD		2 lokasi		22.594.100,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11	04									
2	11	04									
2	11	04	2.01								
2	11	04	2.01	04							
2	11	05									
2	11	05	2.01								
2	11	05	2.01	01							
2	11	06									
2	11	06	2.01								
2	11	06	2.01	03							
2	11	08									
2	11	08	2.01								
2	11	08	2.01	01							
2	11	09									

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau perorangan yang diberikan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	27 lembaga/kelompok masyarakat		221.937.500,00	APBD		27 lembaga/kelompok masyarakat		221.937.500,00
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH yang diberikan penghargaan	Kab. Karangasem	27 lembaga/kelompok masyarakat		221.937.500,00	APBD		27 lembaga/kelompok masyarakat		221.937.500,00
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Kab. Karangasem	100%		110.606.200,00	APBD		100%		110.606.200,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	100%		110.606.200,00	APBD		100%		110.606.200,00
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	100%		110.606.200,00	APBD		100%		110.606.200,00
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengelolaan persampahan	Kab. Karangasem	100%		24.800.340.250,00	APBD		100%		24.800.340.250,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola	Kab. Karangasem	100%		24.702.819.400,00	APBD		100%		24.702.819.400,00
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tersedia	Kab. Karangasem	5 paket%		600.000.000,00	APBD		5 paket%		600.000.000,00
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengurangan sampah ke Tempat Pemrosesan Sampah	Kab. Karangasem	30%		10.226.032.650,00	APBD		30%		10.226.032.650,00
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase sampah tertangani	Kab. Karangasem	70%		13.876.786.750,00	APBD		70%		13.876.786.750,00
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Prosentase terhadap pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Kab. Karangasem	100%		97.520.850,00	APBD		100%		97.520.850,00
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Prosentase pemenuhan target pelayanan pengelolaan sampah	Kab. Karangasem	100%		97.520.850,00	APBD		100%		97.520.850,00
					JUMLAH					33.277.678.900,00					33.277.678.900,00
2	12				KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DISDUKCAPIL								
2	12	01			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DISDUKCAPIL								

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja ASN	DISDUKCAPIL	100%		1.167.064.400,00	APBD		100%		1.699.486.100,00
2	12	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		107.061.700,00			100%		115.861.700,00
2	12	01	2.01	01		Penyusunan RensTra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rensra dan Renja yang disusun		6 dokumen		3.400.000,00	APBD		6 dokumen		3.400.000,00
2	12	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan Program dan Kegiatan yang disusun		50 dokumen		103.661.700,00	APBD		50 dokumen		112.461.700,00
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan		100%		80.378.900,00			100%		85.378.900,00
			2.02	04		Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan		30 dokumen		80.378.900,00	APBD		30 dokumen		85.378.900,00
2	12	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran		100%		979.623.800,00			100%		1.498.245.500,00
2	12	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Belanja Habis Pakai (Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya) dan Jasa Front Office yang terbayar		12 bulan		49.800.000,00	APBD		12 bulan		56.000.000,00
2	12	01	2.03	02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Belanja Jasa Kantor (Telepon, internet, air dan listrik) yang tersedia		36 bulan		130.000.000,00	APBD		36 bulan		150.000.000,00
2	12	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang terbayar		12 bulan		83.645.500,00	APBD		12 bulan		87.245.500,00
2	12	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah belanja alat-alat tulis kantor yang terbayar		100%		31.672.500,00	APBD		100%		50.000.000,00
2	12	01	2.03	11		Penyediaan Belanja Cetakan dan Penggandaan	Jumlah belanja cetak dan poto copy yang terbayar		100%		10.465.800,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	12	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia		100%		8.000.000,00	APBD		100%		10.000.000,00
2	12	01	2.03	15		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar & Majalah yang di bayar		36 bulan		10.000.000,00	APBD		36 bulan		10.000.000,00
2	12	01	2.03	16		Penyedia Bahan Logistik kantor	Jumlah Sesajen yang diperlukan dan tersedianya materi pameran		100%		90.000.000,00	APBD		100%		110.000.000,00
2	12	01	2.03	17		Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas yang dibayar		800 kotak		22.240.000,00	APBD		800 kotak		30.000.000,00
2	12	01	2.03	18		Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terbayar		1 kali		15.000.000,00	APBD		5 kali		50.000.000,00
2	12	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di bayar		3 unit		40.000.000,00	APBD		3 unit		50.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah bahan baku bangunan dan Jasa pengamanan Kantor yang terbayar		2 unit, 48 orang bln		62.600.000,00	APBD		2 unit, 48 orang bln		400.000.000,00
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan Jasa supir yang terbayar		20 unit,72 orang/bln		307.200.000,00	APBD		20 unit,72 orang/bln		310.000.000,00
2	12	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara		173 unit		119.000.000,00	APBD		173 unit		170.000.000,00
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				983.700.700,00	APBD				1.390.400.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk				983.700.700,00					1.390.400.000,00
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminitrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang terdata		100%		79.700.700,00	APBD		100%		95.000.000,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang tertangani		100%		400.800.000,00	APBD		100%		709.200.000,00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan		100%		503.200.000,00	APBD		100%		586.200.000,00
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				588.400.000,00	APBD				661.600.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil				588.400.000,00					661.600.000,00
2	12	03	2.01	01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan ditata				588.400.000,00	APBD				661.600.000,00
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersusunnya Data Informasi Administrasi Kependudukan	<i>DISDUKCAPIL</i>			2.094.400.600,00	APBD				2.130.276.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang disajikan				63.200.000,00					76.800.000,00
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Laporan data Kependudukan yang disajikan		100%		53.200.000,00	APBD		100%		61.800.000,00
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan yang terlaksana		100%		10.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	12	04	2.02		Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan				54.083.500,00					61.800.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	04	2.02	24	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase penyampaian informasi dan fasilitasi mengenai pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat		100%		54.083.500,00	APBD		100%		61.800.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan				1.832.476.000,00					1.837.476.000,00
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terlaksana		100%		10.000.000,00	APBD		100%		15.000.000,00
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan		100%		1.822.476.000,00	APBN		100%		1.822.476.000,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan		114		144.641.100,00			114		154.200.000,00
2	12	04	2.04	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah SDM penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang di bina		114		144.641.100,00	APBD		114		154.200.000,00
JUMLAH										4.833.565.700,00					5.881.762.100,00
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				839.850.000,00					923.835.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran	Amlapura	100	%	830.970.000,00	APBD				914.067.000,00
2	13	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Amlapura	2.000	Surat	25.724.000,00	APBD				28.296.400,00
2	13	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon,air dan listrik	Amlapura	36	Rek.Bulan	45.530.000,00	APBD				50.083.000,00
2	13	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Amlapura	12	Bulan	140.048.000,00	APBD				154.052.800,00
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Amlapura	12	Bulan	214.512.000,00	APBD				235.963.000,00
2	13	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terledianya jasa kebersihan kantor	Amlapura	12	Bulan	25.354.400,00	APBD				27.889.840,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	13	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Amlapura	12	Bulan	25.590.000,00	APBD			28.149.000,00
2	13	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	12	Bulan	16.980.000,00	APBD			18.678.000,00
2	13	01	2.03	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Amlapura	12	Bulan	10.100.000,00	APBD			11.110.000,00
2	13	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi PNS	Amlapura	12	Bulan	11.580.000,00	APBD			12.738.000,00
2	13	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Amlapura	12	Bulan	48.620.000,00	APBD			53.482.000,00
2	13	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	Amlapura	12	Bulan	30.310.000,00	APBD			33.341.000,00
2	13	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Amlapura	12	Bulan	126.621.600,00	APBD			139.283.960,00
2	13	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	Amlapura	1	Unit	25.000.000,00	APBD			27.500.000,00
2	13	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Amlapura	1	Paket	20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
2	13	01	2.03	25	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia	Amlapura	1	Paket	20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
2	13	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Amlapura	12	Bulan	28.000.000,00	APBD			30.800.000,00
2	13	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Amlapura	12	Bulan	17.000.000,00	APBD			18.700.000,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perkantoran	Amlapura	100	%	8.880.000,00	APBD			9.768.000,00
2	13	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	Amlapura	13	Dokumen	4.500.000,00	APBD			4.950.000,00
2	13	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Amlapura	13	Dokumen	4.380.000,00	APBD			4.818.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	13	02				670.000.000,00					737.000.000,00			
2	13	02	2.01		Program Penataan Desa	Persentase Terlaksananya Penataan Desa	Kab.Karangasem	100	%	670.000.000,00	APBD			737.000.000,00
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Usulan Desa yang Difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Kab.Karangasem	3	Desa	75.000.000,00	APBD			82.500.000,00
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Usulan dari Desa yang Difasilitasi untuk Penataan Kewilayahan Desa dalam hal Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Baniar Dinas	Kab.Karangasem	75	Desa	50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab.Karangasem	75	Desa	50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
2	13	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Lancarnya Perekonomian Masyarakat Desa	Kab.Karangasem	1	Desa	495.000.000,00	APBD			544.500.000,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terwujudnya Kerja Sama Desa				145.387.371,56				159.926.108,72
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Kerjasama Antar Desa	Kab.Karangasem	100	%	145.387.371,56	APBD			159.926.108,72
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Kerjasama Antar Desa	Kab.Karangasem	1	Perda	20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terbentuknya 1 Kawasan Perdesaan	Kab.Karangasem	2	Desa	125.387.371,56	APBD			137.926.108,72
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa				3.233.330.000,00				3.556.663.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terseleenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Karangasem	100	%	3.233.330.000,00	APBD			3.556.663.000,00
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Karangasem	75	Desa	145.000.000,00	APBD			159.500.000,00
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Mengenai Pemerintahan	Kab.Karangasem	75	Desa	65.000.000,00	APBD			71.500.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang Dimonitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kab.Karangasem	75	Desa	120.000.000,00	APBD			132.000.000,00
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD yang Diberikan Peningkatan Kapasitas	Kab.Karangasem	225	Orang	1.169.750.000,00	APBD			1.286.725.000,00
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Klarifikasi Peraturan Desa	Kab.Karangasem	75	Desa	60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kelompok Bumdes yang Dibina dan Tertatanya Manajemen BUM Desa dengan Baik	Kab.Karangasem	74	Desa	229.000.000,00	APBD			251.900.000,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan dan Dilantik Kepala Desa/Perbekelnya	Kab.Karangasem	51	Orang	1.128.000.000,00	APBD			1.240.800.000,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Dinilai dari aspek Profil, Tingkat Perkembangan Desa dan Partisipasi Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab.Karangasem	75/1	Desa/Kel	316.580.000,00	APBD			348.238.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT				2.713.100.000,00				2.984.410.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah	Kab.Karangasem	100	%	2.713.100.000,00	APBD			2.984.410.000,00
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Kab.Karangasem	8	Kecamatan	1.666.660.000,00	APBD			1.833.326.000,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbinanya Kelompok Pamsimas, Posyandu dan SDM KPMD	Kab.Karangasem	8	Kelompok	473.290.000,00	APBD			520.619.000,00
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	Kab.Karangasem	16	Kelompok	278.150.000,00	APBD			305.965.000,00
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pembinaan Pengembangan TTG	Kab.Karangasem	8	Kelompok	295.000.000,00	APBD			324.500.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	TOTAL					7.601.667.371,56					8.361.834.108,72				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar														
2	14	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			888.210.000,00					888.210.000,00				
2	14	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.110.000,00				17.110.000,00				
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan renja yang tersusun	DPPKB	4 dokumen		3.370.000,00	APBD		4 dokumen		3.370.000,00
2	14	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	DPPKB	4 dokumen		8.740.000,00	APBD		4 dokumen		8.740.000,00
2	14	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi OPD	DPPKB	6 dokumen		5.000.000,00	APBD		6 dokumen		5.000.000,00
2	14	02	2.02		Administrasi Keuangan					3.000.000,00					3.000.000,00
2	14	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian Kinerja OPD yang tersusun	DPPKB	4 dokumen		3.000.000,00	APBD		4 dokumen		3.000.000,00
2	14	01	2.03		Administrasi Umum					862.310.000,00					862.310.000,00
2	14	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim tepat waktu : 330 surat	DPPKB	330 surat		1.500.000,00	APBD		330 surat		1.500.000,00
2	14	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar : 36 rekening bulan	DPPKB	36 rekening bulan		30.000.000,00	APBD		36 rekening bulan		30.000.000,00
2	14	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan berizin	DPPKB	58 unit		5.000.000,00	APBD		58 unit		5.000.000,00
2	14	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar : 2 orang, 72 unit	DPPKB	2 orang, 72 unit		24.100.000,00	APBD		2 orang, 72 unit		24.100.000,00
2	14	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar : 572 unit	DPPKB	572 unit		20.000.000,00	APBD		572 unit		20.000.000,00
2	14	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah foto copy dan cetak yang terbayar : 10.000 lembar, 12 buku	DPPKB	10.000 lembar, 12 buku		4.000.000,00	APBD		10.000 lembar, 12 buku		4.000.000,00
2	14	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang terbayar : 56 komponen	DPPKB	56 komponen		2.000.000,00	APBD		56 komponen		2.000.000,00
2	14	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	DPPKB	10 unit		7.900.000,00	APBD		10 unit		7.900.000,00
2	14	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbayar	DPPKB	5 unit		5.000.000,00	APBD		5 unit		5.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	14	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar : 36 rekening bulan	DPPKB	36 rekening bulan		3.960.000,00	APBD		36 rekening bulan		3.960.000,00
2	14	01	2.03	16	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar, jumlah paket bulan upakara yang terbayar, jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	DPPKB	43 orang, 25 paket upakara, 30 kali perdin dalam daerah, dan perayaan hari-hari besar nasional		569.850.000,00	APBD		43 orang, 25 paket upakara, 30 kali perdin dalam daerah, dan perayaan hari-hari besar nasional		569.850.000,00
2	14	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terbayar : 800 kotak	DPPKB	800 kotak		12.000.000,00	APBD		800 kotak		12.000.000,00
2	14	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi : 10 kali	DPPKB	10 kali		60.000.000,00	APBD		10 kali		60.000.000,00
2	14	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terbayar	DPPKB	10 unit		2.000.000,00	APBD		10 unit		2.000.000,00
2	14	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terbayar	DPPKB	11 unit		5.000.000,00	APBD		11 unit		5.000.000,00
2	14	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelair yang terbayar	DPPKB	2 unit		10.000.000,00	APBD		2 unit		10.000.000,00
2	14	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bahan Baku Bangunan yang terbayar	DPPKB	13 unit		15.000.000,00	APBD		13 unit		15.000.000,00
2	14	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	DPPKB	58 unit		40.000.000,00	APBD		58 unit		40.000.000,00
2	14	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara	DPPKB	10 unit		5.000.000,00	APBD		10 unit		5.000.000,00
2	14	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	DPPKB	11 unit		2.500.000,00	APBD		11 unit		2.500.000,00
2	14	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang terpelihara	DPPKB	2 unit		2.500.000,00	APBD		2 unit		2.500.000,00
2	14	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terehabilitasi	DPPKB	58 unit		35.000.000,00	APBD		58 unit		35.000.000,00
2	14	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					5.790.000,00					5.790.000,00
2	14	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang terbayar	DPPKB	1 unit		2.500.000,00	APBD		1 unit		2.500.000,00
2	14	01	2.04	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	DPPKB	30 pcs		3.290.000,00	APBD		30 pcs		3.290.000,00
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk					561.541.000,00					561.541.000,00
2	14	02	2.01		Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk					521.541.000,00					521.541.000,00
2	14	02	2.01	07	Penyediaan materi dan pengembangan materi pendidikan dan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 Upt		120.000.000,00	APBD		8 Upt		120.000.000,00
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 Upt		120.000.000,00	APBD		8 Upt		120.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	8 balai penyuluhan		281.541.000,00	APBD		8 balai penyuluhan		281.541.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					40.000.000,00
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersedianya profil kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	DPPKB	1 Dokumen		5.000.000,00			1 Dokumen		5.000.000,00
2	14	02	2.02	08	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Terlaksananya pembentukan rumah dataku di 11 kampung KB	DPPKB	11 kampung KB		10.000.000,00	APBD		11 kampung KB		10.000.000,00
2	14	02	2.02	11	Penyediaan data dan Informasi keluarga	Terdatanya 8 K/0 Potensi Wilayah di 8 Kecamatan, Terdatanya 70 K/0 PKB/PLKB di 8 Kecamatan, Terdatanya 78 K/0 PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/0 Sub PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/0 Kelompok BKB, Terdatanya 53 K/0 Kelompok BKR, Terdatanya 43 K/0 Kelompok BKL, Terdatanya 130 K/0 Kelompok UPPKS, Terdatanya 23 K/0 Kelompok PIK-R, Terkirimnya Semua Data K/0 ke BKKBN. : 726 banjar dinas	DPPKB			10.000.000,00	APBD				10.000.000,00
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga		DPPKB			10.000.000,00	APBD		0		10.000.000,00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Terlaksananya laporan pengendalian lapangan melalui website BKKBN	DPPKB	1 kegiatan		5.000.000,00	APBD		1 kegiatan		5.000.000,00
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					1.704.517.000,00					1.704.517.000,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal					1.026.096.000,00					1.026.096.000,00
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holder dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi kepada pemangku stake holder di kabupaten, kecamatan dan Desa 1 kali dalam setahun	DPPKB	87 kegiatan		22.690.000,00	APBD		87 kegiatan		22.690.000,00
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 Upt		120.000.000,00	APBD		8 Upt		120.000.000,00
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa, cetak, dan elektronik serta media luar ruang	Tersosialisanya program KKBPK di media cetak, elektronik maupun di Medsos sebanyak 4 kali setahun	DPPKB	4 kegiatan		25.000.000,00	APBD		4 kegiatan		25.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga nasional	Terlaksananya perayaan Hari Keluarga Nasional dan hari-hari besar lainnya	DPPKB	2 kegiatan		13.780.000,00	APBD		2 kegiatan		13.780.000,00
2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi Desa(Rakordes), dan Minilokarya (Minilok)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	8 balai penyuluhan		281.541.000,00	APBD		8 balai penyuluhan		281.541.000,00
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	9 balai penyuluhan		281.541.000,00	APBD		9 balai penyuluhan		281.541.000,00
2	14	03	2.01	09	Pengendalian program KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	10 balai penyuluhan		281.544.000,00	APBD		10 balai penyuluhan		281.544.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					150.000.000,00			0		150.000.000,00
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 Upt		100.000.000,00	APBD		8 Upt		100.000.000,00
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,pergerakan, pelayanan dan Pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)		DPPKB	11 kegiatan		50.000.000,00	APBD		11 kegiatan		50.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota					485.731.000,00	APBD				485.731.000,00
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Terpenuhinya alokasi di faskes dan jejaringnya	DPPKB	24 faskes		281.541.000,00	APBD		24 faskes		281.541.000,00
2	14	03	2.01	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah peserta metode MKJP meningkat	DPPKB	1500 akseptor		16.300.000,00	APBD		1500 akseptor		16.300.000,00
2	14	03	2.01	04	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan dana kalau terjadi kegagasan dalam pemakaian alkon dengan metode MKJP	DPPKB	10 akseptor		16.300.000,00	APBD		10 akseptor		16.300.000,00
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 upt		100.000.000,00	APBD		8 upt		100.000.000,00
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Terlaksananya follow up post pelayanan	DPPKB	1500 akseptor		18.190.000,00	APBD		1500 akseptor		18.190.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro di faskes dan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terbinanya faskes dan njejarinya sebanyak 1 kali /faskes/tahun	DPPKB	24 faskes		18.000.000,00	APBD		24 faskes		18.000.000,00
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional pelayanan KB bergerak	Tersedianya anggaran untuk pelayanan KB keliling di setaip kecamatan min 2 kali setahun	DPPKB	100 akseptor		17.400.000,00	APBD		100 akseptor		17.400.000,00
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaaan KB Pria	Jumlah peserta KB Pria	DPPKB	16 akseptor		18.000.000,00	APBD		16 akseptor		18.000.000,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaaan ber-KB					42.690.000,00					42.690.000,00
2	14	03	2.04	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Keterlibatan lintas sektor sdalam penyediaan anggaran di kampung KB	DPPKB	11 kampung KB		14.230.000,00	APBD		11 kampung KB		14.230.000,00
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBP di kampung KB	Terbentuknya pokja di kampung KB sebanyak 11 pokja	DPPKB	11 kampung KB		14.230.000,00	APBD		11 kampung KB		14.230.000,00
2	14	03	2.04	04	Pembinaan terpadu kampung KB	Terbinanya kampung KB 2 kali setahun pada 11 kampung KB	DPPKB	11 kampung KB		14.230.000,00	APBD		11 kampung KB		14.230.000,00
2	14	04			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)					1.007.832.000,00					1.007.832.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga					992.832.000,00					992.832.000,00
2	14	04	2.01	02	Pengadn sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	DPPKB	8 Upt		240.000.000,00	APBD		8 Upt		240.000.000,00
2	14	04	2.01	04	Orientasi pelatihan teknis Pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	DPPKB	8 kegiatan		154.750.000,00	APBD		8 kegiatan		154.750.000,00
2	14	04	2.01	05	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanan(kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKLPPKS,PIK-R dan UPPKS)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	8 balai penyuluh		281.541.000,00	APBD		8 balai penyuluh		281.541.000,00
2	14	04	2.01	06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKLPPKS,PIK-R dan UPPKS)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	DPPKB	8 balai penyuluh		281.541.000,00	APBD		8 balai penyuluh		281.541.000,00
2	14	04	2.01	07	Promosi dan sosialisasi klp kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL dan UPPKS)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi sebanyak 3 kali pada 11 kampung KB	DPPKB	33 kegiatan		15.000.000,00	APBD		33 kegiatan		15.000.000,00
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya advokasi dan Promosi Indeks pembangunan keluarga (IPK) di 8 kecamatan	DPPKB	8 kegiatan		20.000.000,00	APBD		8 kegiatan		20.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
				Volume	Satuan				Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	14	04	2.02			15.000.000,00					15.000.000,00						
2	14	04	2.02	04	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
					Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Terlaksananya promosi dan sosialisasi sebanyak 1 kali di setiap kecamatan	DPPKB	8 kegiatan			15.000.000,00	APBD			8 kegiatan		15.000.000,00
Jumlah											4.162.100.000,00						4.162.100.000,00
2. 15.		URUSAN PEMERINTAHAN		BIDANG PERHUBUNGAN													
2. 15..01		DINAS PERHUBUNGAN															
2. 15. 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelenggaraan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara				100%			7.463.000.000,00				100%		7.532.000.000,00
2. 15. 01. 2.02		Administrasi Keuangan		Persentase layanan administrasi keuangan yg tertangani				100%			89.600.000,00				100%		89.600.000,00
2. 15. 01. 2.02		06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun		kabupaten karangasem		3 laporan			5.800.000,00	APBD			3 laporan		5.800.000,00
		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan yang disusun		kabupaten karangasem		96 laporan			78.500.000,00	APBD			96 laporan		78.500.000,00
		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun		kabupaten karangasem		1 laporan			5.300.000,00	APBD			1 laporan		5.300.000,00
2. 15. 01. 2.03		Administrasi Umum		Persentase layanan administrasi umum yg tertangani				100%			7.373.400.000,00				100%		7.442.400.000,00
2. 15. 01. 2.03.		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim		kabupaten karangasem		1300 lbr			41.400.000,00	APBD			1300 lbr		41.400.000,00
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar		kabupaten karangasem		36 Bln/rekening			6.339.000.000,00	APBD			36 Bln/rekening		6.339.000.000,00
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor		kabupaten karangasem		12 bulan			66.300.000,00	APBD			12 bulan		66.300.000,00
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli		kabupaten karangasem		22 paket			22.500.000,00	APBD			22 paket		22.500.000,00
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan		kabupaten karangasem		8 paket			16.800.000,00	APBD			8 paket		16.800.000,00
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia		kabupaten karangasem		8 paket			5.000.000,00	APBD			8 paket		5.000.000,00
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia		kabupaten karangasem		1440 buah			6.000.000,00	APBD			1440 buah		6.000.000,00
		16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor Perhubungan		kabupaten karangasem		12 bulan			107.000.000,00	APBD			12 bulan		172.000.000,00
				Jumlah peringatan hari-hari besar dan daerah yang dilaksanakan		kabupaten karangasem		3 kali				APBD			3 kali		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	kabupaten karangasem	3000 bks		70.000.000,00	APBD		3000 bks		74.000.000,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	12 Bulan		150.000.000,00	APBD		12 Bulan		150.000.000,00
	20	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda 2, roda 4, dan mobil derek yang diadakan	kabupaten karangasem	1 unit		30.000.000,00	APBD		1 unit		30.000.000,00
	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	kabupaten karangasem	3 Buah		50.000.000,00	APBD		3 Buah		50.000.000,00
	25	Pengadaan Mebuleur	Jumlah mebuleur yang diadakan	kabupaten karangasem	20 Buah		20.000.000,00	APBD		20 Buah		20.000.000,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	kabupaten karangasem	2 Unit		162.800.000,00	APBD		2 Unit		162.800.000,00
	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	kabupaten karangasem	12 bulan		258.600.000,00	APBD		12 bulan		258.600.000,00
	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	kabupaten karangasem	13 Buah		28.000.000,00	APBD		13 Buah		28.000.000,00
2. 15. 02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas Kabupaten		95		9.922.000.000,00			95		12.868.000.000,00
			Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota		0.60 s/d 0.70					0.60 s/d 0.70		
2. 15. 02. 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap	kabupaten karangasem	100%		4.887.000.000,00			100%		7.837.000.000,00
2. 15. 02. 2.02		02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	kabupaten karangasem	175 titik		3.260.000.000,00	APBD		175 titik		6.210.000.000,00
			Jumlah marka jalan yang dipasang	kabupaten karangasem	850 meter			APBD		850 meter		
			Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	kabupaten karangasem	125 meter			APBD		125 meter		
			jumlah Zebra Cross dan zona selamat sekolah yang dipasang	kabupaten karangasem	2 titik			APBD		2 titik		
			jumlah halte yang dibangun	kabupaten	1 unit			APBD		1 unit		
			Jumlah terminal dan tempat parkir yang dibangun	kabupaten karangasem	1 lokasi			APBD		1 lokasi		
			Jumlah LPJU yang dipasang	kabupaten karangasem	100 titik			APBD		100 titik		
			Jumlah Meterisasi LPJU yang dipasang	kabupaten karangasem	40 titik			APBD		40 titik		
			Jumlah Laporan yang disusun	kabupaten	25 buku			APBD		25 buku		
		04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	kabupaten karangasem	100 titik	1.627.000.000,00	APBD		100 titik		1.627.000.000,00
				Jumlah LPJU yang dipelihara	kabupaten karangasem	900 titik		APBD		900 titik		
				Jumlah Tempat Parkir yang dipelihara	kabupaten karangasem	1 lokasi		APBD		1 lokasi		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.15.02.2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal	kabupaten karangasem	148.404 orang		300.000.000,00			150.000 orang		200.000.000,00
2.15.02.2.03	05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah Terminal yang dipelihara	kabupaten karangasem	1 lokasi		300.000.000,00	APBD		1 lokasi		200.000.000,00
2.15.02.2.04		Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tertatanya tempat parkir	kabupaten karangasem	100%		296.000.000,00			100%		296.000.000,00
2.15.02.2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tempat parkir yang tertata	kabupaten karangasem	45 titik		296.000.000,00	APBD		45 titik		296.000.000,00
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan	kabupaten karangasem	100%		864.400.000,00			100%		920.400.000,00
2.15.02.2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat pengujian Kendaraan bermotor yang diadakan	kabupaten karangasem	2 paket		300.000.000,00	APBD		2 paket		300.000.000,00
	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji berkala dalam keadaan laik jalan	kabupaten karangasem	7793 unit		410.400.000,00	APBD		8000 unit		410.400.000,00
	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	kabupaten karangasem	1 paket		154.000.000,00	APBD		1 paket		210.000.000,00
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun	kabupaten karangasem	10 buku		51.400.000,00			10 buku		51.400.000,00
2.15.02.2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun	kabupaten karangasem	10 buku		51.400.000,00	APBD		10 buku		51.400.000,00
2.15.02.2.08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase meningkatnya kemampuan awak kemudi tentang keselamatan berlalu lintas	kabupaten karangasem	100%		166.400.000,00			100%		166.400.000,00
2.15.02.2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan Terminal	Jumlah Laporan yang tersusun	kabupaten karangasem	12 laporan		30.000.000,00			12 laporan		30.000.000,00
	04	Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	jumlah awak angkutan umum yang meningkat kemampuannya tentang tertib berlalu lintas	kabupaten karangasem	30 orang		136.400.000,00	APBD		30 orang		136.400.000,00
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	kabupaten karangasem	25%		3.356.800.000,00			26%		3.396.800.000,00
2.15.02.2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dilayani angkutan gratis siswa	kabupaten karangasem	2 sekolah		2.470.000.000,00	APBD		2 sekolah		2.510.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
				Volume	Satuan				Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	kabupaten karangasem	12 bulan		886.800.000,00	APBD		12 bulan		886.800.000,00	
			Jumlah Laporan yang dihasilkan	kabupaten karangasem	4 laporan			APBD		4 laporan			
			Jumlah				17.385.000.000,00					20.400.000.000,00	
2	2.16		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	2.16		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	2.16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3.405.000.000					3.405.000.000	
2	16	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan kinerja yang akuntabel		60.000.000					55.000.000	
			01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD	12	bulan	25.000.000		12	bulan	25.000.000
			02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya laporan RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	SKPD	12	bulan	25.000.000		12	bulan	25.000.000
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah	SKPD	12	bulan	10.000.000		12	bulan	5.000.000
2	2.16	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu		15.000.000					15.000.000	
			06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	SKPD	12	bulan	15.000.000	APBD	12	bulan	15.000.000
2	2.16	01	2.03	Administrasi Umum	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		3.330.000.000					3.335.000.000	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	SKPD	12	bulan	2.100.000	APBD	12	bulan	2.100.000
			02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik	SKPD	12	bulan	2.553.500.000	APBD	12	bulan	2.553.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kelancaran tenaga pendukung administrasi	SKPD	12	bulan	184.800.000	APBD	12	bulan	184.800.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor	SKPD	12	bulan	7.000.000	APBD	12	bulan	7.000.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor	SKPD	12	bulan	15.000.000	APBD	12	bulan	15.000.000
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor	SKPD	12	bulan	8.000.000	APBD	12	bulan	8.000.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai	SKPD	12	bulan	8.000.000	APBD	12	bulan	8.000.000
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	12	bulan	15.000.000	APBD	12	bulan	15.000.000
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan	SKPD	12	bulan	5.000.000	APBD	12	bulan	5.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
				Volume	Satuan				Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya upacara agama dan pelaksanaan hari besar nasional dan	SKPD	12	bulan	35.000.000	APBD		12	bulan	35.000.000					
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu	SKPD	12	bulan	15.000.000	APBD		12	bulan	15.000.000					
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	12	bulan	80.000.000	APBD		12	bulan	80.000.000					
	22	Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan untuk kantor	SKPD	12	bulan	50.000.000	APBD		12	bulan	50.000.000					
	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan untuk kantor	SKPD	12	bulan	50.000.000	APBD		12	bulan	50.000.000					
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan kantor dan pelayanan kantor	SKPD	12	bulan	134.600.000	APBD		12	bulan	134.600.000					
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik	SKPD	12	bulan	135.000.000	APBD		12	bulan	140.000.000					
	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik	SKPD	12	bulan	30.000.000	APBD		12	bulan	30.000.000					
	35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik	SKPD	12	bulan	2.000.000	APBD		12	bulan	2.000.000					
2	2.16	02		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa							1.245.000.000					
2	2.16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan dan Pengendalian Komunikasi, Informasi, dan Media Massa							1.245.000.000					
				03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi	SKPD		111	Tower		150.000.000	APBD		111	Tower	150.000.000
				05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan diseminasi informasi publik	SKPD		12	bulan		845.000.000	APBD		12	bulan	845.000.000
				06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pejabat PPID yang diberikan layanan informasi publik	SKPD		46	OPD		100.000.000	APBD		46	OPD	100.000.000
				12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya kerjasama dengan mass media	SKPD		78	kelompok		150.000.000	APBD		78	kelompok	150.000.000
2	2.16	03		Program Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Layanan Informasi Publik							1.200.000.000					1.200.000.000
2	2.16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Informasi Data Elektronik							150.000.000					150.000.000
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tata laksana dan pengawasan nama domain dan sub domain	SKPD		12	bulan		150.000.000	APBD		12	bulan	150.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	17	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.	Dinas Koperasi	100	%	1.072.642.665,00			100	%	1.150.500.000,00
2	17	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Dinas Koperasi	100	%	1.006.416.765,00			100	%	1.078.500.000,00
2	17	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Dinas Koperasi	400	Lembar	3.000.000,00	APBD		400	Lembar	3.500.000,00
2	17	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan	Dinas Koperasi	3	Rekening	125.000.000,00	APBD		3	Rekening	135.000.000,00
2	17	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang terbayar	Dinas Koperasi	7	Orang	109.200.000,00	APBD		7	Orang	117.400.000,00
2	17	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Koperasi	1000	Unit	33.393.800,00	APBD		1000	Unit	40.000.000,00
2	17	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terbayar	Dinas Koperasi	112.773	buku/lembar	15.032.000,00	APBD		112773	buku/lembar	18.000.000,00
2	17	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi	30	Unit	3.230.290,00	APBD		30	Unit	4.000.000,00
2	17	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Dinas Koperasi	344	unit	13.495.400,00	APBD		344	unit	15.000.000,00
2	17	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan kantor yang terbayar	Dinas Koperasi	2	Orang	31.200.000,00	APBD		2	Orang	33.600.000,00
2	17	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Dinas Koperasi	4	Unit	9.600.000,00	APBD		4	Unit	10.000.000,00
2	17	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang ada	Dinas Koperasi	1000	kotak	30.165.000,00	APBD		1000	kotak	35.000.000,00
2	17	01	2.03	18		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi luar daerah yang terbayar	Dinas Koperasi	5	kali	75.000.000,00	APBD		5	kali	80.000.000,00
2	17	01	2.03	16		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah sesajen sehari hari dan pejabatian	Dinas Koperasi	360	hari	210.125.275,00	APBD		360	hari	220.000.000,00
							Jumlah piodalan padmasana kantor		2	kali				2	kali	
							Jumlah penyelenggaraan hari raya purnama tilem dan nganyarin ke purapura		36	kali				36	kali	
							jumlah perayaan HUT koperasi, HUT LPD dan hari-hari besar daerah		5	kali				5	kali	
2	17	01	2.03	28		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan /berkala gedung kantor yang ada	Dinas Koperasi	3	gedung	60.000.000,00	APBD		3	gedung	65.000.000,00
2	17	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan /berkala kendaraan dinas/operasional terbayar	Dinas Koperasi	17	unit	246.000.000,00	APBD		17	unit	250.000.000,00
2	17	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan /berkala peralatan gedung kantor yang terbayar	Dinas Koperasi	65	Unit	41.975.000,00	APBD		65	Unit	52.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang telah tersedia	Dinas Koperasi	100	%	66.225.900,00			100	%	72.000.000,00
2	17	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terselesaikan	Dinas Koperasi	20	buku	66.225.900,00	APBD		20	buku	72.000.000,00
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yang ada.	Kabupaten	100	%	413.690.225,00			100	%	490.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kabupaten	100	%	413.690.225,00			100	%	490.000.000,00
2	17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Banyaknya Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro yang terdata	Kabupaten	1000	UKM	101.340.225,00	APBD		1000	UKM	120.000.000,00
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Banyaknya Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Kabupaten	700	UKM	200.000.000,00	APBD		700	UKM	240.000.000,00
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Banyaknya Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro yang telah ada.	Kabupaten	200	UKM	112.350.000,00	APBD		200	UKM	130.000.000,00
2	17	03			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	kabupaten	100	%	668.766.100,00			100	%	770.000.000,00
2	17	03	2.02		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	kabupaten	100	%	668.766.100,00			100	%	770.000.000,00
2	17	03	2.02	02	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	kabupaten	213	Koperasi	465.388.000,00	APBD		213	Koperasi	500.000.000,00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota yang terlaksana	kabupaten	100	Koperasi	203.378.100,00	APBD		100	Koperasi	270.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	17	04				Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi	Kabupaten	100	%	167.306.000,00			100	%	350.000.000,00
2	17	04	2.01			Penilaian kesehatan koperasi Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Penilaian terhadap kesehatan koperasi Simpan pinjam dan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kabupaten	100	%	167.306.000,00			100	%	350.000.000,00
2	17	04	2.01	02		Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Banyaknya Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	20	KSP/USP	100.000.000,00	APBD		20	KSP/USP	200.000.000,00
2	17	04	2.01	01		Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten	20	kali	67.306.000,00	APBD		20	kali	150.000.000,00
2	17	04				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian yang terlaksana	Kabupaten	100	%	206.302.010,00			100	%	
2	17	04	2.01			Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kabupaten	100	%	206.302.010,00			100	%	
2	17	05	2.01	01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Banyaknya Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten	213	Koperasi	206.302.010,00	APBD		213	Koperasi	290.000.000,00
Jumlah											2.528.707.000,00					2.857.166.666,67
2.18						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18	01					DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2.18	01	.01				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100	persen	3.639.020.000,00			100	persen	4.993.410.000,00
2.18	01	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		100	persen	46.000.000,00	APBD		100	persen	47.200.000,00
2.18	01	01	2.01	06		Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun	Amlapura	53	buku	46.000.000,00			44	buku	47.200.000,00
2.18	01	01	2.02			Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu		100	persen	88.000.000,00	APBD		100	persen	89.200.000,00
2.18	01	01	2.02	06		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKJP, Laporan Keuangan yang disusun	Amlapura	13	buku	88.000.000,00			19	buku	89.200.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.18	01	.01	.2.03		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100	persen	3.505.020.000,00	APBD		100	persen	4.857.010.000,00
						Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	persen				100	persen	
2.18	01	.01	.2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Amlapura	200	lembar	73.050.000,00			500	lembar	76.900.000,00
2.18	01	.01	.2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Amlapura	7	rekening	661.200.000,00			7	rekening	661.200.000,00
2.18	01	.01	.2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Amlapura	1.281	unit	27.950.000,00			1.281	unit	28.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia	Amlapura	150	buku	12.910.000,00			150	buku	16.910.000,00
	01					banyaknya fotocopy yang tersedia		20.000	lembar				25.000	lembar	-
2.18	01	.01	.2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya alat listrik/penerangan yang tersedia	Amlapura	30	unit	10.000.000,00			50	unit	12.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Amlapura	770	unit	104.758.000,00			800	unit	100.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Amlapura	2.920	eksemplar/tahun	13.200.000,00			2.920	eksemplar/tahun	13.200.000,00
2.18	01	.01	.2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya sesajen sehari-hari dalam satu tahun	Amlapura	18.300	buah	105.960.000,00			18.300	buah	105.000.000,00
						Banyaknya penyelenggaraan hari raya purnama, tilem dan nganyarin ke pura-pura dalam satu tahun		36	kali				35	kali	-
						Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah		2	kali				2	kali	
2.18	01	.01	.2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Amlapura	8	kali	22.480.000,00			10	kali	25.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	Amlapura	10	kali	185.000.000,00			10	kali	185.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	20	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Amlapura	4	unit	100.000.000,00			4	unit	100.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Amlapura	1	unit	876.112.000,00			2	unit	244.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Amlapura	11	unit	262.400.000,00			11	unit	239.800.000,00
2.18	01	.01	.2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Amlapura	24	unit	50.000.000,00			24	unit	50.000.000,00
2.18	01	.01	.2.03	38	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Banyaknya bangunan yang siap pakai	Amlapura	1	unit	1.000.000.000,00			1	unit	3.000.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.18	01	02				Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal		75	persen	702.580.000,00			75	persen	1.618.600.000,00
							Cakupan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		25	persen				25	persen	
2.18	01	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penetapan kemudahan berusaha		7	buah	477.580.000,00	APBD		7	buah	718.600.000,00
							Persentase evaluasi Jumlah fasilitas evaluasi penetapan kemudahan berusaha.		25	persen				25	persen	
2.18	01	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	Amlapura	76	layanan	308.480.000,00			76	layanan	518.600.000,00
2.18	01	02	2.01	02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Terfasilitasinya kegiatan satgas percepatan berusaha	Amlapura	2	laporan	169.100.000,00			2	laporan	200.000.000,00
2.18	01	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/bidang usaha unggulan		75	persen	225.000.000,00	APBD		75	persen	900.000.000,00
2.18	01	02	2.02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Karangasem	Banyaknya buku profil investasi unggulan daerah yang tersusun	Amlapura	60	buku	225.000.000,00			75	buku	900.000.000,00
							Banyaknya buku pemetaan potensi unggulan daerah	Amlapura	60	buku				100	cd	
2.18	01	03				Promosi Penanaman Modal	Persentase tersebarnya peluang investasi		100	persen	476.060.000,00			100	persen	818.600.000,00
2.18	01	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelenggaraan promosi penanaman modal		3	kali	476.060.000,00	APBD		6	kali	818.600.000,00
2.18	01	03	2.01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya pameran investasi yang diselenggarakan	Kab/Kota Di Indonesia	3	kali	476.060.000,00			6	kali	818.600.000,00
2.18	01	04				Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan		100	persen	1.475.260.000,00			100	persen	2.011.680.000,00
2.18	01	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu		100	persen	1.475.260.000,00	APBD		100	persen	2.011.680.000,00
							Persentase pengaduan yang ditangani		100	persen				100	persen	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.18	01	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya permohonan yang teregistrasi	Amlapura	1600	dokumen	594.880.000,00			1.600	buah	718.000.000,00
					Jumlah Izin Usaha yang terbit	Kab. Karangasem	300	ijin					300	ijin	
					Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang terbit	Kab. Karangasem	300	ijin					300	ijin	
2.18	01	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin Penunjang Usaha yang terbit	Kab. Karangasem	500	izin	430.760.000,00			550	izin	524.400.000,00
2.18	01	04	2.01	03	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya buku IKM yang disusun	Amlapura	80	buku	68.000.000,00			80	buku	173.480.000,00
2.18	01	04	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Frekuensi layanan goes to banjar	Kab. Karangasem	8	kali	381.620.000,00			16	kali	595.800.000,00
2.18	01	05			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase LKPM yang dievaluasi		14	persen	183.840.000,00			14	persen	312.200.000,00
						Cakupan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		24	persen				24	persen	
2.18	01	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase realisasi investasi		1	persen	183.840.000,00	APBD		1	persen	312.200.000,00
						Persentase jumlah perusahaan yang dimonitoring		24	persen				24	persen	
2.18	01	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku movev investasi	Kab. Karangasem	15	buku	45.450.000,00			50	perusahaan	118.600.000,00
2.18	01	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Frekuensi pertemuan dengan dunia usaha	Amlapura	1	kali	63.390.000,00			1	kali	93.600.000,00
2.18	01	05	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya perusahaan yang di monitoring	Kab. Karangasem	48	perusahaan	75.000.000,00			60	perusahaan	100.000.000,00
2.18	01	06			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan berbasis sistem informasi		55	persen	272.200.000,00			55	persen	287.200.000,00
2.18	01	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota	Persentase pelaporan perizinan dan non perizinan		100	persen	272.200.000,00	APBD		100	persen	287.200.000,00
2.18	01	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yang menerima informasi	Amlapura	320	orang	272.200.000,00			320	orang	287.200.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL						6.748.960.000,00					10.041.690.000,00
2	22										
2	22	01									
2	22	01									
2	22	01	2.01								
			04								
2	22	01	2.02								
			02								
			06								
			09								
2	22	01	2.03								
			01								
			02								
			06								
			08								
			09								
			10								
			11								

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kabupaten Karangasem	1 paket		3.000.000,00		1 paket		3.000.000,00	
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Karangasem	3 unit		42.000.000,00		3 unit		42.000.000,00	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	Kabupaten Karangasem	36 bln		5.500.000,00		36 bln		5.500.000,00	
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyelenggaraan piodalan	Kabupaten Karangasem	1 kali		85.000.000,00		1 kali		85.000.000,00	
			Persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kabupaten Karangasem	100%				100%			
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Karangasem	12 bln		17.500.000,00		12 bln		17.500.000,00	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah NKRI	7 kali		100.000.000,00		7 kali		100.000.000,00	
	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Karangasem	2 unit		-		2 unit		50.000.000,00	
	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Karangasem	1 paket		40.000.000,00				-	
	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Kabupaten Karangasem	3 buah		15.000.000,00		3 buah		15.000.000,00	
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kabupaten Karangasem	7 unit		166.800.000,00		7 unit		166.800.000,00	
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase palaksanaan pengembangan kebudayaan	Kabupaten Karangasem	100%	6.084.800.000,00		100%	5.979.800.000,00	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan warisan budaya	Kabupaten Karangasem	100%	292.400.000,00		100%	267.400.000,00	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya/Tradisi Budaya yang terinventarisasi dalam bentuk kajian	Kabupaten Karangasem	1 kajian		292.400.000,00	1 kajian	267.400.000,00
					Jumlah generasi muda yang mendapat pengenalan dan pemahaman tentang tradisi budaya	Kabupaten Karangasem	15 org					
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dicatatkan, direkam dalam format video	Kabupaten Karangasem	4 tradisi budaya			4 tradisi budaya		
					Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang direkonstruksi/terpelihara	Kabupaten Karangasem	1 objek					
					Jumlah media informasi yang terpelihara	Kabupaten Karangasem	1 media					

KODE				Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kesenian tradisional	Kabupaten Karangasem	100%		4.011.200.000,00		100%		3.931.200.000,00
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kelompok seni/ budaya hampir punah yang dilestarikan	Kabupaten Karangasem	2 sekaa		2.875.600.000,00		2 sekaa		2.985.600.000,00
						Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Provinsi Bali	15 sekaa				20 sekaa		
						Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala alat musik tradisional	Kabupaten Karangasem	12 bln				12 bln		
				02	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah jenis lomba utsawa dharmagita yang diikuti	Kabupaten Karangasem	37 jenis lomba		985.600.000,00		37 jenis lomba		745.600.000,00
						Terlaksananya bulan bahasa bali	Kabupaten Karangasem	1 kali						
						Jumlah kelompok teater SMA/SMK se Kabupaten Karangasem yang dibina	Kabupaten Karangasem	2 kelompok				4 kelompok		
				03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Kabupaten Karangasem	16 seniman		150.000.000,00		16 seniman		200.000.000,00
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaa perlindungan dan pembinaan lembaga adat	Kabupaten Karangasem	100%		1.781.200.000,00		100%		1.781.200.000,00
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga adat/ tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	Kabupaten Karangasem	1.296 lembaga adat dan tradisional		165.600.000,00		1.296 lembaga adat dan tradisional		165.600.000,00
						Jumlah awig-awig lembaga adat/ tradisional yang dibahas	Kabupaten Karangasem	4 awig				4 awig		
				02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	persentase lembaga adat dan tradisional yang terpantau pemanfaatan dana bantuan	Kabupaten Karangasem	100%		1.615.600.000,00		100%		1.615.600.000,00
						Jumlah penghargaan kepada Desa Adat	Kabupaten Karangasem	16 Desa Adat				16 Desa Adat		
						Jumlah pembinaan kepada pecalang	Kabupaten Karangasem	100 pecalang				100 pecalang		
						Jumlah penghargaan kepada Subak	Kabupaten Karangasem	16 subak				16 subak		
						Jumlah subak/subak abian di 3 kelurahan yang terfasilitasi BKK Provinsi	Kabupaten Karangasem	23 subak/subak abian				23 subak/subak abian		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Kabupaten Karangasem	3 kali		2.863.943.575,00			3 kali		4.249.600.000,00
2	22	03	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Kabupaten Karangasem	3 kali		2.863.943.575,00			3 kali		4.249.600.000,00
2	22	03	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Kabupaten Karangasem	3 kali		2.863.943.575,00			3 kali		4.249.600.000,00
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem	100%		348.600.000,00			100%		523.600.000,00
2	22	05	2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten	Kabupaten Karangasem	100%		348.600.000,00			100%		523.600.000,00
2	22	05	2.01	01		Register Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	Kabupaten Karangasem	10 peninggalan		117.400.000,00			10 peninggalan		292.400.000,00
				03		Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah lokasi asset pusaka yang di inventarisir	Kabupaten Karangasem	2 lokasi		231.200.000,00			2 lokasi		231.200.000,00
							Tertatanya kota pusaka	Kabupaten Karangasem	100%							
			Jumlah								10.137.893.575,00					11.603.550.000,00
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	01				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase program pemerintahan daerah yang dilaksanakan		100%		819.711.500					2.025.859.700
2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan	Persentase realisasi anggaran yang laporkan		100%		48.900.000					48.900.000
2	23	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	Dispuistaka	8 jenis		48.900.000	APBD		8 jenis		48.900.000
2	23	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		100%		770.811.500					1.976.959.700
2	23	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	Dispuistaka	400 lembar		48.600.000	APBD		400 lembar		48.600.000
2	23	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispuistaka	12 ulan		50.000.000	APBD		12 ulan		50.000.000
2	23	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	Dispuistaka	12 bulan		58.315.500	APBD		12 bulan		28.000.000
2	23	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Dispuistaka	12 bulan		15.000.000	APBD		12 bulan		12.350.700
2	23	01	2.03	11		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak	Dispuistaka	6 jenis cetakan		51.750.000	APBD		6 jenis cetakan		1.750.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Jumlah digandakan	Dispuistaka	1000 lembar foto copy		2.250.000	APBD		1000 lembar foto copy		2.250.000				
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan	Dispuistaka	5 gedung		4.500.000	APBD		5 gedung		2.000.000
2	23	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada	Dispuistaka	12 jenis		15.000.000	APBD		12 jenis		13.000.000
2	23	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Dispuistaka	12 bulan		70.600.000	APBD		12 bulan		20.600.000
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan, minuman rapat dan tamu	Dispuistaka	8 kali		20.000.000	APBD		8 kali		10.000.000
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dispuistaka	6 kali		120.000.000	APBD		6 kali		85.000.000
2	23	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan;	Dispuistaka	3 mobil dan sepeda motor		-			3 mobil dan sepeda motor		461.609.000
2	23	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dispuistaka	4 jenis peralatan		15.000.000	APBD		4 jenis peralatan		197.000.000
2	23	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dispuistaka	5 gedung		40.000.000	APBD		5 gedung		199.000.000
2	23	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dispuistaka	13 mobil dan sepeda motor		184.796.000	APBD		13 mobil dan sepeda motor		395.800.000
2	23	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Dispuistaka	12 bulan		35.000.000	APBD		12 bulan		150.000.000
2	23	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Dispuistaka	5 gedung		40.000.000	APBD		5 gedung		300.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan		100%		490.500.000					920.250.000
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Persenatse pengelolaan perpustakaan kabupaten		100%		378.500.000					769.000.000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	Seluruh wilayah se-kabupaten karangasem	5.000 orang		228.000.000	APBD		5.000 orang		412.000.000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	Kab. Karangasem	30 kali		37.000.000	APBD		30 kali		42.000.000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	Kab. Karangasem	20 kali		15.000.000	APBD		20 kali		20.000.000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/OPD yang terselenggara dengan baik	Amlapura	2 kali		35.000.000	APBD		2 kali		55.000.000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	Dispustaka	5 jenis		60.000.000	APBD		5 jenis		100.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	Dispustaka	12 bulan		3.500.000	APBD		50 eks		140.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Persentase kunjungan ke perpustakaan		100%		112.000.000					151.250.000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	Dispustaka	1 kali		40.000.000	APBD		1 x kali		22.000.000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	Amlapura	16 TK/RA dan PAUD		42.000.000	APBD		5 TK/RA dan PAUD		54.250.000
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	Amlapura	5 lomba		30.000.000	APBD		1 x kali		75.000.000
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan		100%		120.000.000					330.000.000
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan warisan budaya kabuapten karangasem		100%		90.000.000					288.000.000
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pendataan, penatagunaan lontar/naskah kuno secara kuantitatif baik fisik maupun kandungan (konten) disimpan, dirawat dan dilesterikan oleh masyarakat	Amlapura	70 judul		60.000.000	APBD		150 judul		108.000.000
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	Amlapura	1.200 lembar		30.000.000	APBD		75 Judul		180.000.000
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang		100%		30.000.000					42.000.000
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	Amlapura	3 kali		30.000.000	APBD		4 kali		42.000.000
2	24				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN										
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya		100%		273.500.000					713.450.000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem		100%		67.000.000					222.000.000

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip - arsip dalam bentuk informatika	Kab. Karangasem	4 bulan		13.000.000	APBD	4 bulan	62.000.000		
						Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	Kab. Karangasem	10 kali		13.000.000	APBD	15 kali	60.000.000		
						Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran	Kab. Karangasem	20 kali		41.000.000	APBD	20 kali	100.000.000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem		100%		62.500.000			166.700.000		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	40 kali		59.000.000	APBD	50 kali	118.700.000		
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dispustaka	12 bulan		3.500.000	APBD	4 kali	48.000.000		
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Indek kepuasan pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem		100%		144.000.000			324.750.000		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	Dispustaka	12 bulan		37.000.000	APBD	12 bulan	62.000.000		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah sosialisasi kearsipan	Amlapura	4 kecamatan		25.000.000	APBD	8 kecamatan	50.000.000		
						Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	Kab. Karangasem	30 PD/Desa/Lem		42.000.000	APBD	50 PD/Desa/Lem	113.750.000		
						Jumlah pengelola arsip yang dibintek	Amlapura	40 PD/Desa/Lem		40.000.000	APBD	2 kali	99.000.000		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart		100%		20.000.000			35.000.000		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem		100%		20.000.000			35.000.000		
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	Dispustaka	2 PD		20.000.000	APBD	8 PD	35.000.000		
Jumlah										1.723.711.500			4.024.559.700		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN										

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	25	01				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	01				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Amlapura	100	%	1.103.693.000	APBD	100	%	1.214.062.300
3	25	01	2.03			Kegiatan Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Amlapura	100	%	940.203.000	APBD	100	%	1.034.223.300
3	25	01	2.03	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya administrasi surat Menyurat	Amlapura	100	%	30.000.000	APBD	100	%	33.000.000
3	25	01	2.03	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Amlapura	100	%	50.000.000	APBD	100	%	55.000.000
3	25	01	2.03	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan terbayarnya administrasi kantor	Amlapura	12	bulan	60.000.000	APBD	12	bulan	66.000.000
3	25	01	2.03	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan jasa kebersihan	Amlapura	100	%	25.200.000	APBD	100	%	27.720.000
3	25	01	2.03	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Amlapura	100	%	40.000.000	APBD	100	%	44.000.000
3	25	01	2.03	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Amlapura	100	%	44.000.000	APBD	100	%	48.400.000
3	25	01	2.03	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	100	%	21.296.000	APBD	100	%	23.425.600
3	25	01	2.03	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Amlapura	100	%	6.655.000	APBD	100	%	7.320.500
3	25	01	2.03	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	Amlapura	100	%	6.500.000	APBD	100	%	7.150.000
3	25	01	2.03	16		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Amlapura	100	%	195.142.000	APBD	100	%	214.656.200
3	25	01	2.03	17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/ kantor/ tamu	Amlapura	100	%	64.000.000	APBD	100	%	70.400.000
3	25	01	2.03	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Amlapura	100	%	115.000.000	APBD	100	%	126.500.000
3	25	01	2.03	22		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Amlapura	100	%	30.000.000	APBD	100	%	33.000.000
3	25	01	2.03	28		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Amlapura	1	paket	47.000.000	APBD	1	paket	51.700.000
3	25	01	2.03	30		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala (Unit)	Amlapura	49	unit	205.410.000	APBD	49	unit	225.951.000
3	25	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	Amlapura	100	%	163.490.000	APBD	100	%	179.839.000
3	25	01	2.02	06		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan data informasi perikanan	Amlapura	100	%	138.490.000	APBD	100	%	152.339.000
3	25	01	2.02	09		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun OPD	Amlapura	100	%	25.000.000	APBD	100	%	27.500.000
3	25	02				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kab. Karangasem	27.500	Ton	589.530.000	APBD	27.500	Ton	648.483.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	25	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karangasem	35	kelompok	347.400.000	APBD		35	kelompok	382.140.000
3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan dengan peningkatan kelas kelompok	Kab. Karangasem	35	kelompok	347.400.000	APBD		35	kelompok	382.140.000
3	25	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Terselenggaranya Pengembangan/ pengelolaan/ penyelenggaraan TPI	Kab. Karangasem	35	kelompok	242.130.000	APBD		35	kelompok	266.343.000
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan/ Pelayanan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kab. Karangasem	35	kelompok	242.130.000	APBD		35	kelompok	266.343.000
3	25	03			Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kab. Karangasem	330	Ton	2.635.007.000	APBD		330	Ton	2.898.507.700
3	25	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Terselenggaranya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Kab. Karangasem	100	%	937.392.000	APBD		100	%	1.031.131.200
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	Jumlah produksi benih ikan	Kab. Karangasem	1.140.000	ekor	513.392.000	APBD		1.140.000	ekor	564.731.200
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dengan peningkatan kelas kelompok	Kab. Karangasem	10	kelompok	424.000.000	APBD		10	kelompok	466.400.000
3	25	03	2.04		Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan	Terselenggaranya pengelolaan pembudidaya ikan	Kab. Karangasem	100	%	1.697.615.000	APBD		100	%	1.867.376.500
3	25	03	2.04	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Kolam , Saluran Air Pasok/ Buang, Bangunan dan Pagar UPT PPBAT	Kab. Karangasem	3	paket	1.346.448.000	APBD		3	paket	1.481.092.800
3	25	03	2.04	02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pakan Ikan, Peralatan, Obat-obatan dan Bibit Unggul di UPT PPBAT dan Tercapainya Target PAD	Kab. Karangasem	100	%	351.167.000	APBD		100	%	386.283.700
						JUMLAH				4.328.230.000					4.761.053.000
3	26				Bidang Pariwisata										
3	26	01			DINAS PARIWISATA										
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Karangasem	100%		1.204.600.000,00	APBD		100%		1.483.000.000,00
3	26	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Karangasem	100%		45.000.000,00	APBD		100%		67.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah	Jumlah buku tersusun	Kab. Karangasem	3 buku		10.000.000,00	APBD		3 buku		12.000.000,00
3	26	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah DPA dan DPPA yang tersusun	Kab. Karangasem	2 buku		20.000.000,00	APBD		2 buku		25.000.000,00
3	26	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah tersusun	Kab. Karangasem	2 buku		5.000.000,00	APBD		2 buku		10.000.000,00
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	frekwensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	12 bulan		5.000.000,00	APBD		12 bulan		10.000.000,00
3	26	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan evaluasi tersusun	Kab. Karangasem	2 laporan		5.000.000,00	APBD		2 laporan		10.000.000,00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	Kab. Karangasem	100%		90.000.000,00	APBD		100%		108.000.000,00
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karangasem	12 bulan		50.000.000,00	APBD		12 bulan		60.000.000,00
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang tersusun dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah laporan yang terverifikasi	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersusun dalam pelaporan keuangan	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut sebagai tanggapan pemeriksaan	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun.	Kab. Karangasem	1 laporan		5.000.000,00	APBD		1 laporan		6.000.000,00
3	26	01	2.03		Administrasi Umum	persentase terselenggaranya administrasi umum	Kab. Karangasem	100%		1.059.600.000,00	APBD		12 bulan		1.298.000.000,00
3	26	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya penyediaan jasa surat menyurat untuk mendukung administrasi umum	Kab. Karangasem	12 bulan		38.100.000,00	APBD		12 bulan		70.000.000,00
3	26	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, air dan listrik yang di bayar	Kab. Karangasem	15 rekening		60.000.000,00	APBD		12 bulan		70.000.000,00
3	26	01	2.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bangunan yang disewa	Kab. Karangasem	1 unit		10.000.000,00	APBD		12 bulan		26.000.000,00
3	26	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Terbayarnya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kab. Karangasem	12 bulan		5.000.000,00	APBD		12 bulan		6.000.000,00
3	26	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terurus perizinannya	Kab. Karangasem	15 unit		6.000.000,00	APBD		12 bulan		20.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	26	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kab. Karangasem	12 bulan			79.200.000,00	APBD		12 bulan		80.000.000,00
3	26	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang terbayarkan	Kab. Karangasem	12 bulan			43.400.000,00	APBD		12 bulan		50.000.000,00
3	26	01	2.03	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	Kab. Karangasem	24 unit			20.000.000,00	APBD		12 bulan		20.000.000,00
3	26	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor dan IT yang tersedia	Kab. Karangasem	45 item			27.000.000,00	APBD		12 bulan		35.000.000,00
3	26	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karangasem	13 item			100.000.000,00	APBD		12 bulan		120.000.000,00
3	26	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Karangasem	5 item			3.000.000,00	APBD		12 bulan		5.000.000,00
3	26	01	2.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Karangasem	4 unit			40.000.000,00	APBD		12 bulan		50.000.000,00
3	26	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah eksemplar penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Karangasem	960 eksemplar			5.500.000,00	APBD		12 bulan		15.000.000,00
3	26	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam penyelenggaraan rapat	Kab. Karangasem	nasi 520 kotak snack 520 kotak			26.000.000,00	APBD		12 bulan		36.000.000,00
3	26	01	2.03	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Karangasem	12 bulan			110.000.000,00	APBD		12 bulan		130.000.000,00
3	26	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah canang yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Karangasem	Canang 240 kali			66.400.000,00	APBD		Canang 240 kali		70.000.000,00
						Jumlah banten purnama yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor		Banten Purnama tilem 24 kali						Banten Purnama tilem 24 kali		
						Jumlah banten piodalan yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor		piodalan 1 kali						piodalan 1 kali		
						Jumlah pelaksanaan hari besar nasional dan daerah yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor		habernas 2 kali						habernas 2 kali		
3	26	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kab. Karangasem	2 jenis			10.000.000,00	APBD		2 jenis		15.000.000,00
3	26	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Karangasem	7 unit			60.000.000,00	APBD		12 bulan		70.000.000,00
3	26	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang terbayarkan	Kab. Karangasem	5 unit			10.000.000,00	APBD		5 unit		15.000.000,00
3	26	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Karangasem	1 unit			50.000.000,00	APBD		12 bulan		60.000.000,00
3	26	01	2.03	34	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karangasem	3 unit			60.000.000,00	APBD		12 bulan		70.000.000,00
3	26	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kab. Karangasem	15 unit			215.000.000,00	APBD		12 bulan		250.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	26	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Karangasem	5 unit		5.000.000,00	APBD		5 unit		5.000.000,00
3	26	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Karangasem	10 unit		5.000.000,00	APBD		10 unit		5.000.000,00
3	26	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kab. Karangasem	15 unit		5.000.000,00	APBD		15 unit		5.000.000,00
3	26	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Karangasem	100%		10.000.000,00	APBD		100%		10.000.000,00
3	26	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang dianggarkan	Kab. Karangasem	1 unit		10.000.000,00	APBD		1 unit		10.000.000,00
3	26	03			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	persentase pengembangan pemasaran pariwisata di Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	100%		2.441.000.000,00	APBD		100%		3.275.000.000,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Presentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Kab. Karangasem	100%		2.441.000.000,00	APBD		100%		3.275.000.000,00
3	26	03	2.01	03	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan Luar negeri	tersedianya data dengan metode wawancara dan pengamatan yang teranalisa minat pasar pariwisatanya	Kab. Karangasem	10 buku		61.000.000,00	APBD		10 buku		75.000.000,00
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar Negeri	tercapainya kerjasama dan kemitraan dengan badan promosi guna melakukan promosi pariwisata	Kab. Karangasem	4 kali partisipasi		1.375.000.000,00	APBD		4 kali partisipasi		2.000.000.000,00
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	tertatanya bahan promosi yang menarik dan gampang memberikan informasi	Kab. Karangasem	4 kali partisipasi		430.000.000,00	APBD		4 kali partisipasi		500.000.000,00
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	terfasilitasinya kegiatan event yang menarik dan juga dapat mendatangkan wisatawan	Kab. Karangasem	2 kali partisipasi		575.000.000,00	APBD		2 kali partisipasi		700.000.000,00
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Karangasem	100%		8.566.450.000,00	APBD		100%		12.850.000.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Persentase terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten/kota	Kab. Karangasem	100%		7.900.850.000,00	APBD		100%		12.050.000.000,00
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah DTW yang tertata fasilitas sarana dan prasarananya	Kab. Karangasem	4 DTW		6.504.850.000,00	APBD		4 DTW		10.000.000.000,00
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang terbangun dalam pengelolaan obyek wisata	Kab. Karangasem	2 DTW		236.000.000,00	APBD		2 DTW		500.000.000,00
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten	Jumlah DTW yang terfasilitasi pengembangannya	Kab. Karangasem	4 DTW		675.000.000,00	APBD		4 DTW		750.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26	02	2.04	03	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Regulasi Pariwisata yang tersusun	Kab. Karangasem	6 dokumen		375.000.000,00	APBD		6 dokumen		500.000.000,00
3	26	02	2.03	01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Pariwisata yang terawasi	Kab. Karangasem	10 destinasi		110.000.000,00	APBD		10 destinasi		300.000.000,00
3	26	02	2.04		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Kab. Karangasem	100%		555.600.000,00	APBD		100%		600.000.000,00
3	26	02	2.02	05	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah bulan terkelolanya investasi pariwisata	Kab. Karangasem	12 bulan		555.600.000,00	APBD		12 bulan		600.000.000,00
3	26	02	2.02		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Persentase terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Kab. Karangasem	100%		110.000.000,00	APBD		100%		200.000.000,00
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dalam Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten yang termonev	Kab. Karangasem	60 pelaku usaha		110.000.000,00	APBD		60 pelaku usaha		200.000.000,00
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Kab. Karangasem	100%		1.069.000.000,00	APBD		100%		1.700.000.000,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Kab. Karangasem	100%		1.069.000.000,00	APBD		100%		1.700.000.000,00
3	26	05	2.01	01	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Terlatih dan terbinanya masyarakat pariwisata (pokdarwis, pengelola desa wisata, pelaku pariwisata)	Kab. Karangasem	150 orang		250.000.000,00	APBD		150 orang		300.000.000,00
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kab. Karangasem	3 kali pembinaan		165.000.000,00	APBD		3 kali pembinaan		200.000.000,00
3	26	05	2.01	02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terpilih dan terbinanya generasi muda sebagai duta-duta wisata Kabupaten Karangasem dalam partisipasi sebagai mitra pemerintah mengembangkan kepariwisataan daerah	Kab. Karangasem	16 orang		269.000.000,00	APBD		16 orang		500.000.000,00
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata yang terfasilitasi pengembangan kompetensinya	Kab. Karangasem	50 orang		110.000.000,00	APBD		50 orang		300.000.000,00
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi kompetensinya	Kab. Karangasem	100 orang		275.000.000,00	APBD		100 orang		400.000.000,00
					JUMLAH					13.281.050.000,00					19.308.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	27										
2	27										
2	27	01									
3	27	1	2.01								
2	27	01	2.01	02							
3	27	01	2.01	03							
3	27	01	2.01	05							
3	27	01	2.02								
3	27	01	2.02	06							
3	27	01	2.03								
3	27	01	2.03	01							
3	27	01	2.03	02							
3	27	01	2.03	06							
3	27	01	2.03	07							
3	27	01	2.03	10							
3	27	01	2.03	11							
3	27	01	2.03	12							
3	27	01	2.03	13							
3	27	01	2.03	15							

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
				Volume	Satuan			Volume			Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	27 01 2.03 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kabupaten, dan 8 Kecamatan	1	Tahun	220.000.000	APBD		1	Tahun	242.000.000
3	27 01 2.03 17	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Kabupaten	1	Tahun	62.345.800	APBD		1	Tahun	68.580.380
3	27 01 2.03 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang	Luar Daerah	1	Tahun	132.000.000	APBD		1	Tahun	145.200.000
3	27 01 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kabupaten	1	Tahun	50.000.000	APBD		1	Tahun	55.000.000
3	27 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	Kabupaten	1	Tahun	49.500.000	APBD		1	Tahun	54.450.000
3	27 01 2.03 28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten, dan 8 Kecamatan	1	Tahun	100.000.000	APBD		1	Tahun	110.000.000
3	27 01 2.03 30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Kabupaten, dan 8 Kecamatan	1	Tahun	400.817.200	APBD		1	Tahun	440.898.920
3	27 01 2.03 34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten, dan 8 Kecamatan	1	Tahun	82.500.000	APBD		1	Tahun	90.750.000
3	27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	8 Kecamatan	100	%	9.045.621.120			100	%	9.404.799.669
3	27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan sarana pertanian	8 Kecamatan	100	%	8.054.014.642			100	%	8.859.416.106
3	27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Kecamatan	8	Kecamatan	235.582.000	APBD		8	Kecamatan	259.140.200
			Jumlah bantuan sarana pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	3.140.000.000	APBN		8	Kecamatan	3.454.000.000
3	27 02 2.01 02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	397.932.642	APBD		8	Kecamatan	437.725.906
			Jumlah bantuan sarana pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	3.383.500.000	APBN		8	Kecamatan	3.721.850.000
			Jumlah bantuan sarana pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	897.000.000	APBD I		8	Kecamatan	986.700.000
3	27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Kecamatan	100	%	991.606.478			100	%	
3	27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	8 Kecamatan	8	Kecamatan	183.329.784	APBD		8	Kecamatan	201.662.762

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	8 Kecamatan	8	Kecamatan	612.439.694	APBD		8	Kecamatan	673.683.663
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	8 Kecamatan	8	Kecamatan	195.837.000	APBD		8	Kecamatan	215.420.700
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	8 Kecamatan	100	%	5.686.321.570			100	%	6.254.953.727
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	8 Kecamatan	100	%	247.400.000			100	%	272.140.000
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah pembinaan pengelolaan lahan dan air	8 Kecamatan	8	Kecamatan	157.000.000	APBD		8	Kecamatan	172.700.000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi data hasil pertanian	Luar daerah, dalam daerah	1	Tahun	90.400.000	APBD		1	Tahun	99.440.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase penmbangunan prasarana pertanian				3.000.000.000					3.300.000.000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah unit balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang terbangun/terehab/ terpelihara	3 Kecamatan	3	Unit	3.000.000.000	DAK		3	Unit BPP Kecamatan	3.300.000.000
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah	8 Kecamatan	100	%	2.438.921.570			100	%	2.682.813.727
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	8 Kecamatan	9.600	ekor	377.921.570	APBD		9.800	ekor	415.713.727
						Jumlah bantuan bibit ternak	8 Kecamatan	8	Kecamatan	2.061.000.000	APBN		8	Kecamatan	2.267.100.000
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner	8 Kecamatan	3,05	%	1.777.307.246			2,85	%	1.955.037.971
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjaminan kesehatan hewan	8 Kecamatan	3,05	%	1.398.982.296			2,85	%	1.538.880.526

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	8 Kecamatan	3,05	%	1.298.982.296	APBD		2,85	%	1.428.880.526
						Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	8 Kecamatan	1	Tahun	100.000.000	APBN		1	Tahun	110.000.000
3	27	04	2.02		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	8 Kecamatan	100	%	378.324.950			100	%	416.157.445
3	27	04	2.04	01	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Jumlah pemotongan hewan dalam pengawasan kesmavet	8 Kecamatan	34.750		190.153.450	APBD		34.750		209.168.795
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk ternak hewan	8 Kecamatan	8	Kali	188.171.500	APBD		8	Kali	206.988.650
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	97%	97	%	870.719.788			97	%	935.791.767
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	97%	97	%	870.719.788			97	%	935.791.767
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8 Kecamatan	1	Tahun	350.891.240	APBD		1	Tahun	385.980.364
						Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kec.Abang	1	Tahun	20.000.000	APBN		1	Tahun	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8 Kecamatan	1	Tahun	282.173.548	APBD		1	Tahun	310.390.903
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8 Kecamatan	1	Tahun	217.655.000	APBD		1	Tahun	239.420.500
3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelaksanaan perizinan usaha pertanian	100%	100	%	153.685.368			100	%	169.053.905
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1	Tahun	153.685.368			1	Tahun	169.053.905
3	27	06	2.01	02	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang layak untuk direkomendasikan	8 Kecamatan	8	Kecamatan	63.597.000	APBD		8	Kecamatan	69.956.700

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	90.088.368	APBD		8	Kecamatan	99.097.205
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100%	100	%	4.715.444.778			100	%	4.801.989.256
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	4.715.444.778			8	Kecamatan	4.801.989.256
3	27	07	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Banyaknya pembinaan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	8 Kecamatan	8	Kecamatan	2.259.286.733	APBD		8	Kecamatan	2.485.215.407
						Banyaknya pembinaan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	8 Kecamatan	8	Kecamatan	350.000.000	APBD I		16	demplot	
3	27	07	2.01	01	Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Banyaknya pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	8 Kecamatan	8	Kecamatan	1.459.730.750	APBD		8	Kecamatan	1.605.703.825
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Kecamatan	8	Kecamatan	275.400.000	APBD		8	Kecamatan	302.940.000
3	27	07	2.01	04	Pembentukan badan usaha milik petani	Banyaknya badan usaha milik petani yang terbentuk	8 Kecamatan	8	Kecamatan	371.027.295	APBD		8	Kecamatan	408.130.025
					JUMLAH					24.685.903.670,2					26.202.110.474,3
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
3	31	01			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
3	31	01			Program Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	2.358.936.882,40			100	%	2.376.892.840,64
3	31	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		100	%	189.400.000,00			100	%	208.340.000,00
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah	Jumlah buku tersusun	OPD (Dinas Perindustrian dan	15	buku	25.000.000,00	APBD		12	Bulan	27.500.000,00
3	31	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah tersusun RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPPA Perubahan.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	124.400.000,00	APBD		12	Bulan	136.840.000,00
3	31	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Lakip, LPPD, LKPJ tersusun.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	7	buku	15.000.000,00	APBD		12	Bulan	16.500.000,00
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	10.000.000,00	APBD		12	Bulan	11.000.000,00
3	31	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi tersusun	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	15.000.000,00	APBD		12	Bulan	16.500.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.		100	%	40.980.000,00		100	%	45.078.000,00
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang dilaporkan perbulan	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Terverifikasi laporan	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan tindak lanjut pemeriksaan	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan tersusun	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	13.980.000,00	APBD	12	Bulan	15.378.000,00
3	31	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	2.750.000,00	APBD	12	Bulan	3.025.000,00
3	31	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	7.750.000,00	APBD	12	Bulan	8.525.000,00
3	31	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.		100	%	2.128.556.882,40		100	%	2.123.474.840,64
3	31	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung Administrasi Umum.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	bulan	97.500.000,00	APBD	12	Bulan	4.200.000,00
3	31	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Rekening (listrik,Air, Telfon) terbayar.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar)	12	bulan	562.205.582,40	APBD	12	Bulan	618.426.140,64
3	31	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terurus perizinannya.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	21	unit	7.800.000,00	APBD	21	unit	8.500.000,00
3	31	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Terbayarnya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan/Administrasi / Teknis / Perkantoran	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	bulan	44.400.000,00	APBD	12	bulan	8.500.000,00
3	31	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah terbayarnya jasa kebersihan kantor.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	31.200.000,00	APBD	12	Bulan	34.000.000,00
3	31	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	23.000.000,00	APBD	12	Bulan	25.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	11.275.000,00	APBD		12	Bulan	12.000.000,00
3	31	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Pasar tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Pasar Tradisional	12	Bulan	31.350.000,00	APBD		12	Bulan	34.000.000,00
3	31	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	bulan	149.668.700,00	APBD		12	Bulan	149.668.700,00
3	31	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran dan Majalah tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	12.000.000,00	APBD		12	Bulan	13.200.000,00
3	31	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	97.116.000,00	APBD		12	Bulan	49.000.000,00
3	31	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	24.241.600,00	APBD		12	Bulan	26.500.000,00
3	31	01	2.03	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	(Luar Daerah)	12	bulan	100.000.000,00	APBD		12	Bulan	110.000.000,00
3	31	01	2.03	20	pengadaan kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas tersedia.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	bulan	10.000.000,00	APBD		12	Bulan	11.000.000,00
3	31	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Banyaknya Gedung Kantor terpelihara.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3	unit	578.200.000,00	APBD		12	Bulan	636.020.000,00
3	31	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Banyaknya Kendaraan dinas/operasional terpelihara.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	18	unit	298.600.000,00	APBD		18	unit	328.460.000,00
3	31	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan Kantor terpelihara.	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	50.000.000,00	APBD		12	Bulan	55.000.000,00
3	31	01	2.03	38	rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	jumlah tembok penyengker direhab	OPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	12	Bulan	-	APBD		12	Bulan	-
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.										
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PRESENTASE JUMLAH PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100	%	73.200.000,00			100	%	80.520.000,00
3	30	02	2:06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karangasem	100	%	73.200.000,00			100	%	80.520.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
				Volume	Satuan				Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan/Monitoring Perdagangan Minuman Beralkohol di 8 Kecamatan	Kab. Karangasem	16		kali	73.200.000,00	APBD		10	industri	80.520.000,00	
						Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan, Pelabelan dan Penggunaan Bahan Berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)/Konsumen	Kab. Karangasem	16		kali							
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	Kabupaten Karangasem	100		%	25.856.496.226,00			3	Pasar	28.442.145.848,60	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Kabupaten Karangasem	100		%	25.795.496.226,00			3	Pasar	28.375.045.848,60	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	Kabupaten Karangasem	3		Pasar	24.469.096.226,00	BKK prov,(ABPN)DAK+ APBD,DID		3	Pasar	26.916.005.848,60	
						Frekwensi pelaksanaan ACI di Pasar Rakyat	Kabupaten Karangasem	7		kali				7	kali		
						Jumlah Pasar Rakyat yang dilaksanakan pemeliharaan	Kabupaten Karangasem	17		pasar				17 pasar			
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase penagihan retribusi	Kab. Karangasem	100		persen	1.326.400.000,00	APBD		100	persen	1.459.040.000,00	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.	Kabupaten Karangasem	100		%	61.000.000,00			100	%	67.100.000,00	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Frekwensi pelaksanaan pengawasan retribusi	Kab. Karangasem	34		kali	15.000.000,00	APBD		34	kali	16.500.000,00	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang difasilitasi.	Kab. Karangasem	100		Orang	46.000.000,00	APBD		100	Orang	50.600.000,00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Karangasem	100		%	159.800.000,00			100	%	175.780.000,00	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Frekuensi Pemantauan Peredaran Gas LPG guna Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Karangasem	100		%	48.400.000,00			100	%	53.240.000,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Frekuensi Pemantauan Peredaran Gas LPG di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat di tingkat Daerah/Kabupaten	Kab. Karangasem	32		kali	48.400.000,00	APBD		12	Bulan	53.240.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Frekuensi Pemantauan Harga guna Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Kabupaten Karangasem	100		%	61.400.000,00			100	%	67.540.000,00
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat di Tingkat Pasar Kabupaten	Karangasem (Pasar dan Toko di Kota Amlapura)	96		Kali	46.400.000,00	APBD		96	Kali	51.040.000,00
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Terlaksananya Operasi Pasar Murah di Kabupaten	Kab. Karangasem	16		kali	15.000.000,00	APBD		16	kali	16.500.000,00
3	30	04	2:03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Karangasem	100		%	50.000.000,00			100	%	55.000.000,00
3	30	04	2:03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Karangasem	16		kali	50.000.000,00	APBD		16	kali	55.000.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten		100		%	909.450.000,00			100	%	1.000.395.000,00
					Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Frekuensi Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten.		100		%	909.450.000,00			100	%	1.000.395.000,00
3	30	05	2.01	02	Pameran dagang Nasional	Frekuensi Berpartisipasi/Mengikuti Pameran Dagang Nasional Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	(Luar Daerah)	2		kali	371.750.000,00	APBD		2	kali	408.925.000,00
						Frekuensi Berpartisipasi/Mengikuti Pameran produk ekspor/ Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten		1		kali				1	kali	

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Frekuensi Terselenggaranya Pameran Dagang Lokal Bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten	Stadion Padangkerta, Amlapura	1	kali	474.500.000,00	APBD		1	kali	521.950.000,00
						Frekuensi Terselenggaranya Pameran Dagang Lokal Bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten melalui Pameran Pesta Kesenian Bali(PKB)	Denpasar	1	kali		APBD		1	kali	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Usaha	Kab. Karangasem	1	Klpk	63.200.000,00	APBD		1	Klpk	69.520.000,00
						Jumlah Produk IKM Unggulan yang Teridentifikasi	Kab. Karangasem	12	bulan				12	bulan	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100	%	393.250.000,00			100	%	432.575.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.	Persentase Jumlah Terlayannya Metrologi Legal Berupa Tera Ulang Alat UTTP dan Pengawasan Alat UTTP		100	%	393.250.000,00			100	%	432.575.000,00
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang.	Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kabupaten (Kab. Karangasem)		1 unit	373.250.000,00	APBD		1	unit	410.575.000,00
						Jumlah Terlayannya Metrologi Legal Berupa Tera Ulang Alat UTTP	Kab. Karangasem	6.500	Timbangan				6.500	Timbangan	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Terawasanya/Penyuluhan Terhadap Pemilik Alat UTTP	Kab. Karangasem	300	Timbangan	20.000.000,00	APBD		300	Timbangan	22.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten		100	%	90.370.000,00			100	%	99.407.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Jumlah/Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi, Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100	%	90.370.000,00			100	%	99.407.000,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	-Jumlah Produk IKM yang dipromosikan Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	5	produk	35.000.000,00	APBD		5	produk	38.500.000,00
						Frekuensi Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	1	Kali				1	Kali	

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Frekuensi Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kecil / Kerajinan Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	2	Kali	55.370.000,00	APBD		2	Kali	60.907.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya Perencanaan dan pengembangan Industri		100	%	7.139.435.750,00			100	%	7.853.379.325,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100	%	7.139.435.750,00			100	%	7.853.379.325,00
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Kab. Karangasem	1	Ranperda	87.000.000,00	APBD		1	Ranperda	95.700.000,00
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pembinaan Indikasi Geografis Industri di Kecamatan Sidemen	Sidemen	8	kali	40.000.000,00	APBD		8	kali	44.000.000,00
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi monitoring penyediaan sarana dan prasarana IKM	8 Kecamatan	12	bulan	6.474.235.750,00	DAK+APBD		12	bulan	7.121.659.325,00
						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri melalui pembangunan sentra IKM	OPD (Luar Daerah)	1	Unit				1	Unit	
3	31	02	2.01	05	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kreatifitas Industri Kecil Menengah -Terbayarnya Honorarium	Kab. Karangasem	5	Kelompok	538.200.000,00	APBD	Mengakomodir usulan dari kec kec.	5	Kelompok	592.020.000,00
						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui Pembinaan Kelompok IKM oleh Dekranasda Kabupaten	Kab. Karangasem	10	Klpk				10	Klpk	
						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui monitoring /pengawasan thd IKM di Kabupaten Karangasem	8 Kecamatan	8	Kecamatan				8	Kecamatan	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui Pembinaan Kelompok IKM.	Kab. Karangasem	8	Kecamatan				8	Kecamatan						
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui pelatihan manajemen sederhana	Kabupaten Karangasem	8	Kecamatan				8	Kecamatan						
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.	Kabupaten Karangasem	30	Pengusaha				30	Pengusaha						
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		100	%	90.000.000,00			100	%	99.000.000,00
3	31	03	2:01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Presentase fasilitasi Penerbitan ijin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah		100	%	90.000.000,00			100	%	99.000.000,00
3	31	03	2:01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah Pembinaan Industri di 8 Kecamatan	Kab. Karangasem	16	kali	90.000.000,00	APBD			16	kali	99.000.000,00
						Jumlah Terdaftar Merk / Hak Cipta Industri di 8 Kecamatan	Kab. Karangasem	5	Merk					5	Merk	
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PRESENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI NASIONAL		100	%	58.200.000,00			100	%	64.020.000,00
3	31	04	2:01			Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IKUI,IUKI dan IFKI kewenangan Kabupaten/kota.	Presentase informasi industri untuk IUI,IKUI,IUKI dan IFKI kewenangan Kabupaten/kota.		100	%	58.200.000,00			100	%	64.020.000,00
3	31	04	2:01	02	Desiminasi dan Publikasi data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Indag di 8 Kecamatan	Kab. Karangasem	24	kali	58.200.000,00	APBD			78	Desa	64.020.000,00
						JUMLAH					37.129.138.858,40					40.624.115.014,24
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01					SEKRETARIAT DAERAH										

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Pemerintahan	100	persentase	171.133.000	APBD		100	persentase	171.133.000
4	01	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Pemerintahan	100	persentase	171.133.000			100	persentase	171.133.000
4	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bagian Pemerintahan	600	lembar	2.500.000			600	lembar	2.500.000
4	01	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Pemerintahan	39	Jenis	13.000.000			39	Jenis	13.000.000
4	01	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Pemerintahan	7	Jenis	7.000.000			7	Jenis	7.000.000
4	01	01	2.03	16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya biaya canang, bebanten untuk bakti penganyar	Bagian Pemerintahan	6	paket	3.000.000			6	paket	3.000.000
4	01	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Pemerintahan	456	kotak	12.000.000			456	kotak	12.000.000
4	01	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Bagian Pemerintahan	2	kali	35.000.000			2	kali	35.000.000
4	01	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bagian Pemerintahan	2	paket	17.630.000			2	paket	17.630.000
4	01	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Pemerintahan	6	unit	48.303.000			6	unit	48.303.000
4	01	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Pemerintahan	2	unit	32.700.000			2	unit	32.700.000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penguatan regulasi dan pemerintahan umum	Bagian Pemerintahan	100	persentase	1.841.780.000					1.841.780.000
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan			1.017.590.000					1.017.590.000
4	01	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan Minimal enam pelayanan dasar	Bagian Pemerintahan	2	dokumen	339.000.000			2	dokumen	339.000.000
							Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah		3,3	Sangat Tinggi				3,3	Sangat Tinggi	
							Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karangasem		1	dokumen				1	dokumen	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terfasilitasinya tapal batas antar kabupaten	Bagian Pemerintahan	3	segmen	370.590.000		3	segmen	370.590.000
			Terselenggaranya fasilitasi penamaan unsur-unsur rupabumi/toponimi		8	kecamatan			8	kecamatan	
			Terselenggaranya fasilitasi penataan pemanfaatan Tanah		8	kecamatan			8	kecamatan	
4	01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi administrasi pelantikan, pemberhentian Bupati dan Wabup serta PAW Anggota DPRD	Bagian Pemerintahan	100	persentase	308.000.000		100	persentase	308.000.000
			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati		100	persentase			100	persentase	
			Terselenggaranya Peringatan hari Otonomi daerah		100	persentase			100	persentase	
4	01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama/kemitraan yang bermanfaat	Bagian Pemerintahan			824.190.000				824.190.000
4	01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak dalam negeri	Bagian Pemerintahan	100	persentase	644.190.000		100	persentase	644.190.000
			Terselenggaranya kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia		100	persentase			100	persentase	
			Terselenggaranya Forum Pertemuan Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Bali		100	persentase			100	persentase	
4	01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri	Bagian Pemerintahan	100	persentase	100.000.000		100	persentase	100.000.000
4	01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerja sama	Bagian Pemerintahan	1	dokumen	80.000.000		1	dokumen	80.000.000
			JUMLAH				2.012.913.000				2.012.913.000
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi	Bagian Kesejahteraan	100	persentase	268.400.000	APBD	100	persentase	268.400.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	persentas e	268.400.000		100	persentas e	268.400.000
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Kesejahteraan Rakyat	42	jenis	11.000.000		42	jenis	11.000.000
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	82.550.000		12	bulan	82.550.000
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	25.000.000		12	bulan	25.000.000
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	13.750.000		12	bulan	13.750.000
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	121.800.000		12	bulan	121.800.000
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	Persentas e	14.300.000		100	Persentase	14.300.000
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penguatan regulasi dan pemerintahan umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	persentas e	7.926.524.470				7.926.524.470
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pertumbuhan multikultural melalui jalur formal, informal dan non formal	Bagian Kesejahteraan Rakyat			7.926.524.470				7.926.524.470
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui Darma Santi di Tingkat Kabupaten Karangasem, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	7.380.417.410		12	bulan	7.380.417.410
						Terlaksananya Pemahaman Umat melalui Pelatihan Kepemangkuhan/Serati Banten		12	bulan			12	bulan	
						Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan (Panca Yadnya) pada Pura Kahyangan jagat, Pura Sad Kahyangan di Kabupaten se-Bali dan Pura yang ada di Indonesia		12	bulan			12	bulan	
						Meningkatnya pemahaman umat melalui hasil paruman sulinggih		12	bulan			12	bulan	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya peningkatan pemahaman sarana prasarana penunjang upacara agama terhadap pemuka agama (Hindu, Islam, Kristen dan Budha) serta pembinaan sekaa Wewalen/Wali pemkab. Karangasem (Sekaa Gong, Pesantian, Rejang, Topeng)		12	bulan				12	bulan	
		Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan Sastra Agama terhadap masyarakat di Kabupaten Karangasem		12	bulan				12	bulan	
		Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Lembaga Umat di Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan dalam rangka Buka Puasa, Natal, Waisak dan Imlek di Kabupaten Karangasem		12	bulan				12	bulan	
4	01 02 2.02 02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan Kultural di Kabupaten Karangasem	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	Desa adat/pekraman	167.207.200	APBD	8	Desa adat/pekraman	167.207.200
		Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Karangasem		4	Proposal berbadan hukum				4	Proposal berbadan hukum	
4	01 02 2.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kerja sama dalam meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	378.899.860		12	bulan	378.899.860
		Meningkatnya kegiatan pembinaan maupun lomba sekaa teruna di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi		8	kelompok sekaa Teruna				8	kelompok sekaa Teruna	
JUMLAH							8.194.924.470				8.194.924.470
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi	Bagian Hukum	100	persentase	163.200.000	APBD	100	persentase	163.200.000
4	01 01 2.03	Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Hukum	100	persentase	163.200.000		100	persentase	163.200.000
4	01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Hukum	54	jenis	33.600.000		54	jenis	33.600.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Hukum	22	jenis	12.600.000			22	jenis	12.600.000
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Hukum	12	bulan	7.000.000			12	bulan	7.000.000
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Hukum	100	Persentase	90.000.000			100	Persentase	90.000.000
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Hukum	100	Persentase	20.000.000			100	Persentase	20.000.000
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penguatan regulasi dan pemerintahan umum	Bagian Hukum	100	persentase	1.424.700.000	APBD		100	persentase	1.424.700.000
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan yang berlaku	Bagian Hukum			1.424.700.000					1.424.700.000
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tertelitinya rancangan Perda dan Peraturan Bupati	Bagian Hukum	600	PHD	522.140.000			600	PHD	522.140.000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin / Kurang mampu	Bagian Hukum	3	Kasus	451.790.000			3	Kasus	451.790.000
						Tertanganinya masalah masalah / kasus kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Karangasem		4	Kasus				4	Kasus	
						Terselesaikannya permohonan Rekomendasi Tanah Pelaba Pura		2	Kasus				2	Kasus	
						Terlaksananya program RANHAM dengan baik, berupa laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi.		4	Laporan				4	Laporan	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat	Bagian Hukum	200	Peserta	450.770.000			200	Peserta	450.770.000
						Tercapainya pengelolaan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang akurat, cepat dan mudah diakses		600	PHD				600	PHD	
						Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Hukum dan Perlindungan HAM		100	Peserta				100	Peserta	
					JUMLAH					1.587.900.000					1.587.900.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	01	01												
4	01	01												
4	01	01	2.03											
4	01	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	297.088.000	APBD	100	persentase	297.088.000
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	297.088.000		100	persentase	297.088.000
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	750	lembar	3.300.000				3.300.000
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	38	jenis	30.250.000		38	jenis	30.250.000
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7 40	jenis buku	18.238.000		7 40	jenis buku	18.238.000
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1300	kotak	69.300.000		1300	kotak	69.300.000
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	91.000.000		100	persentase	91.000.000
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	85.000.000		100	persentase	85.000.000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	1.431.500.000	APBD	100	persentase	1.431.500.000
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pertumbuhan iklim investasi berbasis pengembangan sektor ekonomi mikro	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			921.500.000				921.500.000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terfasilitasinya perusahaan daerah yang belum mampu beroperasi/yang akan dibentuk serta fasilitasi terkait dengan investasi pemda pada BUMD Kabupaten Karangasem	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	persentase	241.000.000		100	persentase	241.000.000
						Terpenuhinya Pembinaan Terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir		100	persentase			100	persentase	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terfasilitasinya dukungan penyaluran kredit usaha rakyat dan ekonomi kreatif	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	urusan	510.500.000		2	urusan	510.500.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Presentase terkendalinya inflasi daerah		100	persentase				100	persentase	
4	01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	10	buku	170.000.000			10	buku	170.000.000
4	01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya			510.000.000					510.000.000
4	01 03 2.04 01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-			-	-	-
4	01 03 2.04 02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	20	pengusaha	350.000.000			20	pengusaha	350.000.000
4	01 03 2.04 03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	PLTS	160.000.000			5	PLTS	160.000.000
		JUMLAH				1.728.588.000					1.728.588.000
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi	100	persentase	88.947.000	APBD		100	persentase	88.947.000
4	01 01 2.03	Administrasi Umum	Bagian Administrasi Pembangunan	100	persentase	88.947.000			100	persentase	88.947.000
4	01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Administrasi Pembangunan	120	lembar	600.000			202	lembar	600.000
4	01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	18	jenis	6.770.000			22	jenis	6.770.000
4	01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Bagian Administrasi Pembangunan	8	jenis	3.000.000			8	jenis	3.000.000
4	01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Administrasi Pembangunan	100	Persentase	60.077.000			100	Persentase	60.077.000
4	01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	100	Persentase	18.500.000			100	Persentase	18.500.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah	Bagian Administrasi Pembangunan	100	persentase	470.900.000	APBD		100	persentase	470.900.000
4	01	03	2.02			Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian kebijakan pemerintah	Bagian Administrasi Pembangunan	100	persentase	470.900.000			100	persentase	470.900.000
4	01	03	2.02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	Bagian Administrasi Pembangunan	5	dokumen	51.400.000			5	jenis laporan	51.400.000
4	01	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	12	bulan	288.900.000			12	bulan	288.900.000
							Terlaksananya rapat kerja	Bagian Administrasi Pembangunan	10	kali				10	kali	
4	01	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kinerja tersusun	Bagian Administrasi Pembangunan	4	jenis laporan	130.600.000			4	jenis laporan	130.600.000
							JUMLAH				559.847.000					559.847.000
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	persentase	790.500.000	APBD		100	persentase	790.500.000
4	01	01	2.03			Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	persentase	790.500.000			100	persentase	790.500.000
4	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	Lembar	500.000			100	Lembar	500.000
4	01	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	35	Jenis	25.000.000			35	Jenis	25.000.000
4	01	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	jenis	20.000.000			6	jenis	20.000.000
4	01	01	2.03	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	15	jenis	150.000.000			15	jenis	150.000.000
4	01	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	500.000.000			12	bulan	500.000.000
4	01	01	2.03	30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	70.000.000			12	Bulan	70.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	25.000.000			12	Bulan	25.000.000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	persentase	1.824.950.000	APBD		100	persentase	1.824.950.000
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase percepatan pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			1.824.950.000					1.824.950.000
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai penandatanganan kontrak untuk 50 OPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	1.374.950.000			12	bulan	1.374.950.000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Efektif dan baiknya sistem pengadaan barang/jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	150.000.000			12	bulan	150.000.000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek pengadaan barang/jasa, dan study komparatif	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	300.000.000			12	bulan	300.000.000
			JUMLAH							2.615.450.000					2.615.450.000
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Umum	100	persentase	12.845.072.744	APBD		100	persentase	12.845.072.744
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Umum	100	persentase	12.468.260.244			100	persentase	12.468.260.244
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bagian Umum	12	bulan	95.600.000			12	bulan	95.600.000
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang dibayar	Bagian Umum	59	Rekening	864.000.000			59	Rekening	864.000.000
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang dan Gedung di Lingkungan Setda menjadi bersih dan rapi	Bagian Umum	10	unit gedung	166.265.000			10	unit gedung	166.265.000
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Umum	51	jenis	173.011.700			51	jenis	173.011.700
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Umum	14	jenis	138.185.000			14	jenis	138.185.000
4	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Elektronik Penerangan Bangunan	Persentase pemeliharaan jaringan instalasi listrik di lingkungan setda dalam 1 tahun	Bagian Umum	100	Persentase	200.000.000			100	Persentase	200.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 01 01 2.03 14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga rumah Jabatan Sekda	Bagian Umum	12	Bulan	70.190.000			12	Bulan	70.190.000
4 01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Banten dan Canang Sehari-hari, Purnama Tilem pada Kantor Bupati dan Rumah Dinas	Bagian Umum	12	Bulan	303.663.918			12	Bulan	303.663.918
4 01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Umum	12	Bulan	644.291.000			12	Bulan	644.291.000
4 01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Bagian Umum	12	Bulan	1.422.860.579			12	Bulan	1.422.860.579
4 01 01 2.03 19	Pengadaan Mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan wakil Bupati	Bagian Umum	1	unit	860.320.000			1	unit	860.320.000
4 01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Bagian Umum	1	unit	1.500.000.000			1	unit	1.500.000.000
4 01 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bagian Umum	8	item	360.000.000			8	item	360.000.000
4 01 01 2.03 25	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Bagian Umum	12	item	540.000.000			12	item	540.000.000
5 01 01 2.03 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan dan rumah dinas yang terpelihara dan laik guna	Bagian Umum	3	Unit	573.238.049			3	Unit	573.238.049
4 01 01 2.03 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	Bagian Umum	100	persentase	100.000.000			100	persentase	100.000.000
4 01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor, halaman, taman dan lainnya yang dipelihara	Bagian Umum	100	persentase	1.000.000.000			100	persentase	1.000.000.000
4 01 01 2.03 29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Bagian Umum	100	persentase	668.559.000			100	persentase	668.559.000
6 01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Umum	100	Persentase	2.030.715.998			100	Persentase	2.030.715.998
7 01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Umum	100	Persentase	657.360.000			100	Persentase	657.360.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Terpeliharanya Meubelair	Bagian Umum	100	persentase	100.000.000			100	persentase	100.000.000
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase penguatan manajemen SDM Aparatur	Bagian Umum	100	Persentase	376.812.500	APBD		100	Persentase	376.812.500
4	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Bagian Umum	121	Stel	376.812.500			121	Stel	376.812.500
4	01	04			Program Administrasi Umum	Persentase penguatan penataan organisasi dan pelayanan publik	Bagian Umum	100	persentase	9.480.191.149	APBD		100	persentase	9.480.191.149
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum	Persentase efisiensi proses pelayanan birokrasi	Bagian Umum			9.480.191.149					9.480.191.149
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Terfasilitasinya kegiatan administrasi dan tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum	12	bulan	4.365.910.149			12	bulan	4.365.910.149
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan	Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	100	persentase	3.714.500.000			100	persentase	3.714.500.000
						Terbayarnya asuransi gedung dan kendaraan dinas milik Pemda	Bagian Umum	1	tahun				1	tahun	
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan kebutuhan RT Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Bagian Umum	12	bulan	1.399.781.000			12	bulan	1.399.781.000
						Jumlah SPPT PBB	Bagian Umum	10	SPPT-PBB				10	SPPT-PBB	
						JUMLAH				22.325.263.893					22.325.263.893
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Organisasi	100	persentase	161.620.000	APBD		100	persentase	161.620.000
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Organisasi	100	persentase	161.620.000			100	persentase	161.620.000
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bagian Organisasi	140	Lembar	660.000			140	Lembar	660.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bagian Organisasi	26	jenis	8.000.000			26	jenis	8.000.000
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bagian Organisasi	3	jenis	3.500.000			3	jenis	3.500.000
4	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Banten untuk bakti penganyar	Bagian Organisasi	6	paket	5.000.000			6	paket	5.000.000
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Bagian Organisasi	100	Kotak	5.560.000			100	Kotak	5.560.000
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	Bagian Organisasi	6	kali	63.400.000			6	kali	63.400.000
4	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bagian Organisasi	100	persentase	20.000.000			100	persentase	20.000.000
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	Bagian Organisasi	100	persentase	42.000.000			100	persentase	42.000.000
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	Bagian Organisasi	100	persentase	13.500.000			100	persentase	13.500.000
4	01	04			Program Administrasi Umum	Persentase penguatan penataan organisasi dan pelayanan publik	Bagian Organisasi	100	persentase	839.900.000	APBD		100	persentase	839.900.000
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi	Persentase dimensi kelembagaan berorientasi kinerja	Bagian Organisasi			839.900.000					839.900.000
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase tertatanya kelembagaan perangkat Daerah	Bagian Organisasi	100	Persentase	338.550.000			100	Persentase	338.550.000
4	01	04	2.02	01	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase meningkatnya disiplin ASN	Bagian Organisasi	100	Persentase	253.000.000			100	Persentase	253.000.000
						Jumlah OPD yang Nilai IKM-nya Baik		30	OPD				30	OPD	
						Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan SOP		8	OPD				8	OPD	
						Terbentuknya produk hukum daerah terkait tata laksana		2	PHD				2	PHD	
4	01	04	2.02	01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai dan peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi	>70	BB	248.350.000	APBD		>70	BB	248.350.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi		10	dokumen				10	dokumen	
		JUMLAH				1.001.520.000					1.001.520.000
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	100	persentas e	348.243.700	APBD		100	persentas e	298.243.700
4	01 01 2.03	Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	100	persentas e	348.243.700			100	persentas e	298.243.700
4	01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	42	jenis	22.994.220			42	jenis	22.994.220
4	01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	480	Kotak	12.480.000			480	Kotak	12.480.000
4	01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	12	bulan	45.000.000			12	bulan	45.000.000
4	01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	100	persentase	254.400.000		-	100	persentase	204.400.000
4	01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	100	persentase	13.369.480		-	100	persentase	13.369.480
4	01 04	Program Administrasi Umum	Persentase penguatan penataan organisasi dan pelayanan publik	100	persentas e	5.617.071.300	APBD		100	persentas e	5.617.071.300
4	01 04 2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase responsivitas dan kualitas pelayanan kedinasan			5.617.071.300					5.617.071.300
4	01 04 2.03 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah peserta pelatihan keprotokolan	25	orang	2.157.672.500			25	orang	2.157.672.500
			Jumlah fasilitasi acara resmi pimpinan	120	acara resmi				96	acara resmi	
			Jumlah peserta aubade daerah terbina	40	orang				40	orang	
			Jumlah anggota korsik terbina	50	orang				50	orang	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah upacara yang terselenggara dengan baik	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	20	upacara				20	upacara	
4	01 04 2.03 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah publikasi kegiatan pemerintahan daerah	403	penerbitan	2.715.099.400			403	penerbitan	2.715.099.400
		Kerjasama antar Pemerinah Daerah dan media	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	tahun				1	tahun	
4	01 04 2.03 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Seluruh kegiatan pemerintahan daerah terdokumentasi dengan baik	365	hari	744.299.400			365	hari	744.299.400
JUMLAH						5.965.315.000					5.915.315.000
4	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	100	persentas e	509.010.000	APBD		100	persentas e	509.010.000
4	01 01 2.03	Administrasi Umum	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	100	persentas e	509.010.000			100	persentas e	509.010.000
4	01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1075	Lembar	25.000.000			1075	Lembar	25.000.000
4	01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	44	Jenis	85.010.000			44	Jenis	85.010.000
4	01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6	Jenis	100.000.000			6	Jenis	100.000.000
4	01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	24	kali	50.000.000			24	kali	50.000.000
4	01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	12	bulan	50.000.000			12	bulan	50.000.000
4	01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai	100	persentase	70.000.000			100	persentase	70.000.000
4	01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal	100	persentase	129.000.000			100	persentase	129.000.000
4	01 04	Program Administrasi Umum	Persentase penguatan penataan organisasi dan pelayanan publik	100	persentas e	291.875.947	APBD		100	persentas e	291.875.947

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar tepat waktu	Amlapura	204 rekening bulan		427.200.000,00	APBD		204 rekening bulan		448.560.000,00
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang bulan tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya	Amlapura	324 orang bulan		451.400.000,00	APBD		324 orang bulan		451.400.000,00
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Amlapura	2.417 unit		106.478.000,00	APBD		2.417 unit		111.801.900,00
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbayar	Amlapura	4.398 unit		46.042.000,00	APBD		4.398 unit		48.344.100,00
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik di Setwan yang terbayar	Amlapura	583 unit		75.751.000,00	APBD		583 unit		79.538.550,00
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik di rumah jabatan yang terbayar	Amlapura	198 unit		7.686.000,00	APBD		198 unit		8.070.300,00
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar	Amlapura	3.660 rekening bulan		194.000.000,00	APBD		3.660 rekening bulan		203.700.000,00
4	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Amlapura	30 unit		84.987.000,00	APBD		30 unit		89.236.350,00
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat rutin yang terbayar	Amlapura	1.800 kotak		222.210.000,00	APBD		1.800 kotak		233.320.500,00
4	02	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Amlapura	20 Kali		150.000.000,00	APBD		20 Kali		157.500.000,00
4	02	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Amlapura	3 unit		4.500.000.000,00	APBD		3 unit		4.725.000.000,00
4	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Amlapura	4 unit		150.000.000,00	APBD		4 unit		157.500.000,00
4	02	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	Amlapura	12 unit		152.500.000,00	APBD		12 unit		160.125.000,00
4	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Amlapura	20 unit		167.710.000,00	APBD		20 unit		176.095.500,00
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Amlapura	15 unit		170.250.000,00	APBD		15 unit		178.762.500,00
4	02	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah penyengker rumah jabatan yang dipelihara	Amlapura	1 unit		250.000.000,00	APBD		1 unit		262.500.000,00
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Amlapura	1 unit		509.400.000,00	APBD		1 unit		534.870.000,00
4	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Amlapura	4 unit		348.140.000,00	APBD		4 unit		365.547.000,00
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Amlapura	20 unit		554.620.000,00	APBD		20 unit		582.351.000,00
4	02	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dipelihara	Amlapura	10 unit		77.730.000,00	APBD		10 unit		81.616.500,00
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Amlapura	70 unit		236.810.000,00	APBD		70 unit		248.650.500,00
4	02	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi	Amlapura	2 unit		1.859.607.000,00	APBD		70 unit		1.952.587.350,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	02	02			Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan dan administrasi keuangan		100%		2.283.491.400,00		100%		2.397.665.970,00
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi DPRD		100%		1.213.241.400,00		100%		1.273.903.470,00
4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	Jumlah pegawai dan anggota DPRD yang tertata administrasi kepegawaiannya	Amlapura	85 orang		230.281.800,00	APBD	85 orang		241.795.890,00
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah keputusan rapat yang dihasilkan	Amlapura	150 keputusan		830.459.600,00	APBD	150 keputusan		871.982.580,00
4	02	02	2.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Jumlah halaman dan taman kantor yang dipelihara	Amlapura	2 paket		152.500.000,00	APBD	2 paket		160.125.000,00
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100%		1.070.250.000,00		100%		1.123.762.500,00
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah buku register admnistras keuangan yang terfasilitasi	Amlapura	6 buku		106.400.000,00	APBD	6 buku		111.720.000,00
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas DPRD yang diadakan	Amlapura	270 stel		873.850.000,00	APBD	270 stel		917.542.500,00
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up	Amlapura	45 Orang		90.000.000,00	APBD	45 Orang		94.500.000,00
4	02	03			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100%		31.175.037.600,00		100%		32.733.789.480,00
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terpenuhinya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		100%		5.122.640.000,00		100%		5.378.772.000,00
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang disusun dan dibahas	Amlapura	10 Perda		2.508.520.000,00	APBD	10 Perda		2.633.946.000,00
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah dalam PROLEGDA	Amlapura	10 Ranperda		2.614.120.000,00	APBD	10 Ranperda		2.744.826.000,00
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terpenuhinya pembahasan kebijakan anggaran		100%		500.000.000,00		100%		525.000.000,00
4	02	03	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS yang berjalan tepat waktu	Amlapura	1 pembahasan		100.000.000,00	APBD	1 pembahasan		105.000.000,00
4	02	03	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang berjalan tepat waktu	Amlapura	1 pembahasan		100.000.000,00	APBD	1 pembahasan		105.000.000,00
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah pembahasan APBD yang berjalan tepat waktu	Amlapura	1 pembahasan		100.000.000,00	APBD	1 pembahasan		105.000.000,00
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah pembahasan APBD Perubahan yang berjalan tepat waktu	Amlapura	1 pembahasan		100.000.000,00	APBD	1 pembahasan		105.000.000,00
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD yang	Amlapura	2 pembahasan		100.000.000,00	APBD	2 pembahasan		105.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	02	03	2.03												
4	02	03	2.03												
4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rekomendasi pengawasan bidang pemerintahan dan hukum yang dihasilkan	Amlapura	2 rekomendasi		50.000.000,00	APBD		2 rekomendasi		52.500.000,00
4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rekomendasi pengawasan bidang infrastruktur yang dihasilkan	Amlapura	2 rekomendasi		50.000.000,00	APBD		2 rekomendasi		52.500.000,00
4	02	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rekomendasi pengawasan bidang kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan	Amlapura	2 rekomendasi		50.000.000,00	APBD		2 rekomendasi		52.500.000,00
4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rekomendasi pengawasan bidang perekonomian yang dihasilkan	Amlapura	2 rekomendasi		50.000.000,00	APBD		2 rekomendasi		52.500.000,00
4	02	03	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran yang dihasilkan	Amlapura	2 rekomendasi		50.000.000,00	APBD		2 rekomendasi		52.500.000,00
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas DPRD</i>				100%					7.619.010.000,00
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan mendapatkan tambahan wawasan	Amlapura	45 orang		4.911.000.000,00	APBD		45 Orang		5.156.550.000,00
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi DPRD yang terfasilitasi	Amlapura	10 publikasi		729.000.000,00	APBD		10 publikasi		765.450.000,00
4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan DPRD yang diliput dan diinformasikan	Amlapura	28 Kali		1.616.200.000,00	APBD		28 Kali		1.697.010.000,00
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase terpenuhinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</i>				100%					3.865.700.790,00
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD yang terfasilitasi kunjungan kerja dalam daerahnya	Amlapura	45 orang		152.000.000,00	APBD		45 Orang		159.600.000,00
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD yang terfasilitasi resesnya	Amlapura	45 orang		3.529.619.800,00	APBD		45 Orang		3.706.100.790,00
4	02	03	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase terpenuhinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</i>				100%					67.725.000,00
4	02	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah anggota DPRD yang terfasilitasi pengawasan kode etiknya	Amlapura	45 orang		64.500.000,00	APBD		45 Orang		67.725.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	persentase tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Kabupaten Karangasem	100	persen	156.000.000,00	APBD		100	persen	156.000.000,00
						terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kabupaten Karangasem	84	OB		APBD		84	OB	
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Kabupaten Karangasem	100	persen	60.000.000,00	APBD		100	persen	60.000.000,00
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	100	persen	30.000.000,00	APBD		100	persen	70.000.000,00
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kabupaten Karangasem	8	jenis	30.000.000,00	APBD		8	jenis	75.000.000,00
5	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	100	persen	15.000.000,00	APBD		100	persen	20.000.000,00
5	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia	Kabupaten Karangasem	10	Jenis	24.000.000,00	APBD		10	Jenis	42.000.000,00
5	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	Kabupaten Karangasem	100	persen	135.000.000,00	APBD		100	persen	150.000.000,00
5	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Kabupaten Karangasem	950	Orang	60.000.000,00	APBD		950	Orang	75.000.000,00
5	01	01	2.03	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Karangasem	30	kali	300.000.000,00	APBD		25	kali	350.000.000,00
5	01	01	2.03	20	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda dua yang diadakan	Kabupaten Karangasem	5	Unit	160.000.000,00	APBD		5	Unit	160.000.000,00
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat yang diadakan	Kabupaten Karangasem	1	unit	480.000.000,00	APBD		1	unit	300.000.000,00
5	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	1	unit	10.000.000,00	APBD				
5	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kabupaten Karangasem	3	unit	50.000.000,00	APBD		4	unit	75.000.000,00
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	3	unit	222.000.000,00	APBD		3	unit	221.999.921,00
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	20	Unit	298.000.000,00	APBD		20	Unit	298.000.000,00
5	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Karangasem	100	persen	30.000.000,00	APBD		100	persen	50.000.000,00
5.	01				Perencanaan										

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, peningkatan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah	Kabupaten Karangasem	100		persen	2.237.000.000,00	APBD		100	persen	2.800.000.000,00
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Karangasem	100		persen	1.815.000.000,00	APBD		100	persen	2.250.000.000,00
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang tersusun	Kabupaten Karangasem	80	buku		925.000.000,00	APBD		80	buku	1.000.000.000,00
						Jumlah dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang tersusun	Kabupaten Karangasem	80	buku					80	buku	
						Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem yang tersusun	Kabupaten Karangasem	60	buku							
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun	Kabupaten Karangasem	450	buku		250.000.000,00	APBD		450	buku	350.000.000,00
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	jumlah buku profil daerah yang tersusun untuk informasi pembangunan	Kabupaten Karangasem	50	buku		490.000.000,00			50	buku	600.000.000,00
						Jumlah Buku SIPD yang tersusun untuk perencanaan pembangunan	Kabupaten Karangasem	50	buku			APBD		50	buku	
						Integrasi sistem perencanaan	Kabupaten Karangasem	1	tahun					1	tahun	
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi E Planning	Kabupaten Karangasem	41	OPD					41	OPD	
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang tersusun	Kabupaten Karangasem	50	buku		150.000.000,00	APBD		50	buku	300.000.000,00
5	01	02	2:02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil perencanaan pendanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Kabupaten Karangasem	100		persen	186.000.000,00	APBD		100	persen	250.000.000,00
5	01	02	2:02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah buku Laporan Akhir DAK	Kabupaten Karangasem	72	buku		186.000.000,00	APBD		72	buku	250.000.000,00
						Jumlah buku laporan DAK per Triwulan	Kabupaten Karangasem	72	buku					72	buku	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01 02 2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Kabupaten Karangasem	100	persen	236.000.000,00	APBD		100	persen	300.000.000,00
5	01 02 2.03 03	Evaluasi Capaian Program/ kegiatan perangkat daerah	Kabupaten Karangasem	120	buku	236.000.000,00	APBD		120	buku	300.000.000,00
5	01 03	Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	Kabupaten Karangasem	100	Persen	593.470.000,00			100	Persen	900.000.000,00
5	01 03 2.01	Fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kabupaten Karangasem	100	Persen	147.470.000,00	APBD		100	Persen	250.000.000,00
5	01 03 2.01 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan	Kabupaten Karangasem	8	Buku	147.470.000,00			8	Buku	250.000.000,00
5	01 03 2.02	Fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kabupaten Karangasem	100	Persen	118.000.000,00	APBD		100	Persen	250.000.000,00
5	01 03 2.02 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Karangasem	7	buku	118.000.000,00	APBD		10	buku	250.000.000,00
5	01 03 2.03	Fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Karangasem	100	Persen	328.000.000,00	APBD		100	Persen	400.000.000,00
5	01 03 2.03 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Karangasem	9	Buku	328.000.000,00	APBD		9	Buku	400.000.000,00
			Kabupaten Karangasem	30	buku				30	buku	
5	01 04	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Karangasem	100	Persen	504.000.000,00	APBD		100	Persen	750.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 01 04 2.01	Fasilitasi dan monev Penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian yang tersusun	Kabupaten Karangasem	100	Persen	168.000.000,00	APBD		100	Persen	250.000.000,00
5 01 04 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	Kabupaten Karangasem	10	Buku	168.000.000,00	APBD		10	Buku	250.000.000,00
5 01 04 2.02	Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif yang tersusun	Kabupaten Karangasem	100	Persen	218.000.000,00	APBD		100	Persen	300.000.000,00
5 01 04 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi kreatif	Kabupaten Karangasem	10	Buku	218.000.000,00	APBD		10	Buku	300.000.000,00
		Jumlah Dokumen RoadMap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah di Kabupaten Karangasem yang tersusun	Kabupaten Karangasem	10	Buku						
5 01 04 2.03	Fasilitasi dan monev Penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam yang tersusun	Kabupaten Karangasem	100	%	118.000.000,00	APBD		100	%	200.000.000,00
5 01 04 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	Kabupaten Karangasem	10	buku	118.000.000,00	APBD		10	buku	200.000.000,00
5 01 05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase terlaksananya perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Kabupaten Karangasem	100	persen	734.000.000,00	APBD		100	persen	975.000.000,00
5 01 05 2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Kabupaten Karangasem	100	persen	268.000.000,00	APBD		100	persen	300.000.000,00
5 01 05 2.01 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah buku laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Kabupaten Karangasem	8	buku	268.000.000,00	APBD		8	buku	350.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01 05 2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kabupaten Karangasem	100	Persen	168.000.000,00	APBD		100	Persen	300.000.000,00
5	01 05 2.02 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Kabupaten Karangasem	8	buku	168.000.000,00	APBD		6	buku	300.000.000,00
5	01 05 2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Kabupaten Karangasem	100	persen	298.000.000,00	APBD		100	persen	350.000.000,00
5	01 05 2.03 01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Kabupaten Karangasem	10	buku	298.000.000,00	APBD		10	buku	350.000.000,00
5.	05	Penelitian dan Pengembangan daerah									
5.	05 02	Program Penelitian dan pengembangan daerah	Kabupaten Karangasem	100	persen	418.000.000,00	APBD		100	persen	1.000.000.000,00
5	05 02 2.01	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kabupaten karangasem	100	persen	118.000.000,00	APBD		100	persen	250.000.000,00
5	05 02 2.01 02	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Kabupaten karangasem	10	buku	118.000.000,00	APBD		10	buku	250.000.000,00
5	05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Kabupaten karangasem	100	persen	100.000.000,00	APBD		100	persen	250.000.000,00
5	05 02 2.02 01	Penelitian dan pengembangan bidang aspek- aspek Sosial	Kabupaten karangasem	10	buku	100.000.000,00	APBD		10	buku	250.000.000,00
5	05 02 2.03	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kabupaten karangasem	100	persen	100.000.000,00	APBD		100	persen	250.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (pertanian, perkebunan dan pangan)	Kabupaten karangasem	10	buku	100.000.000,00	APBD		10	buku	250.000.000,00	
5	05	02	2.04		Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah	Kabupaten karangasem	100	persen	100.000.000,00	APBD		100	persen	250.000.000,00	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	proposal inovasi kabupaten Karangasem yang diusulkan	Kabupaten karangasem	1	proposal	100.000.000,00	APBD		1	proposal	250.000.000,00	
						Sosialisasi HAKI		1	kali				1	kali		
			JUMLAH							6.754.470.000,00					8.760.209.921,00	
5.02		KEUANGAN														
5.02.01		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
5.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kab. Karangasem	100%		5.006.388.236,00				100%		4.706.477.400,00
5.02.01.2.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	Kab.Karangasem	100%		40.500.000,00				100%		45.000.000,00
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				Persentase Renstra dan Renja yang terpenuhi sesuai ketentuan perundang - undangan	Amlapura	100%		40.500.000,00	APBD II			100%		45.000.000,00
5.02.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan				Persentase pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Amlapura	100%		81.000.000,00				100%		90.000.000,00
5.02.01.2.02.06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu	Amlapura	100%		40.500.000,00	APBD II			100%		45.000.000,00
5.02.01.2.02.09		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu	Amlapura	100%		40.500.000,00	APBD II			100%		45.000.000,00
5.02.01.2.03		Kegiatan Administrasi Umum				Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kab.Karangasem	100%		4.668.888.236,00						4.371.477.400,00
5.02.01.2.03.01		Penyediaan jasa surat menyurat				Persentase terpenuhinya pelayanan surat menyurat	Kab.Karangasem	100%		128.700.000,00	APBD II			100%		168.900.000,00
5.02.01.2.03.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Persentase terpenuhinya pelayanan komunikasi, sumber daya listrik dan air	Amlapura	100%		330.000.000,00	APBD II			100%		330.000.000,00
5.02.01.2.03.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan				Persentase terpenuhinya sarana administrasi keuangan	Amlapura	100%		87.550.000,00	APBD II			100%		107.550.000,00
5.02.01.2.3.10		Penyediaan alat tulis kantor				Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis	Amlapura	100%		153.722.526,00	APBD II			100%		154.000.000,00
5.02.01.2.03.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	100%		55.000.000,00	APBD II			100%		55.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya fasilitas listrik dan penerangan gedung kantor	Amlapura	100%		300.000.000,00	APBD II		100%		55.000.000,00
5.02.01.2.03.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Amlapura	100%		187.300.000,00	APBD II		100%		213.500.000,00
5.02.01.2.03.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan	Amlapura	100%		45.072.500,00	APBD II		100%		45.072.500,00
5.02.01.2.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu	Amlapura	100%		92.950.000,00	APBD II		100%		92.950.000,00
5.02.01.2.03.18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Amlapura	100%		220.000.000,00	APBD II		100%		220.000.000,00
5.02.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja canang, bebanten dan piodalan	Amlapura	100%		143.000.000,00	APBD II		100%		150.000.000,00
		Tersedianya bahan dalam rangka perayaan hari-hari besar nasional dan daerah		2 kali					2 kali		
5.02.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah tambahan sarana operasional kendaraan roda dua	Amlapura	20 unit		660.000.000,00	APBD II		-		0,00
5.02.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	Amlapura	5 paket		22.827.200,00	APBD II		5 paket		22.827.200,00
5.02.01.2.03.24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang diadakan	Amlapura	9 paket		858.000.000,00	APBD II		10 paket		1.258.000.000,00
5.02.01.2.03.25	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	Amlapura	4 paket		204.827.700,00	APBD II		4 paket		304.827.700,00
5.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Amlapura	3 unit		414.588.310,00	APBD II		3 unit		464.800.000,00
5.02.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Persentase kendaraan dinas / operasional kondisi baik dan rusak ringan yang terpelihara	Amlapura	100%		411.800.000,00	APBD II		100%		475.500.000,00
5.02.01.2.03.34	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	Amlapura	100%		247.500.000,00	APBD II		100%		247.500.000,00
5.02.01.2.03.35	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Persentase mebeleur yang terpelihara	Amlapura	100%		6.050.000,00	APBD II		100%		6.050.000,00
5.02.01.2.03.38	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Penataan halaman kantor	Amlapura	1 paket		100.000.000,00	APBD II		-		0,00
5.02.01.2.04	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya disiplin kapasitas sumber daya aparatur	Amlapura	100%		216.000.000,00					200.000.000,00
5.02.01.2.04.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah unit mesin absensi yang diadakan	Amlapura	2 unit		16.000.000,00					0,00
5.02.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah	Kab. Karangasem	20 orang		200.000.000,00	APBD II		20 orang		200.000.000,00
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah		40 orang					40 orang		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah		40 orang					40 orang		
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pelayanan prima (excellent service)		40 orang					40 orang		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Karangasem	100%		3.462.020.640,00			100%		3.914.779.970,00
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Kab. Karangasem	100%		1.800.400.000,00			100%		1.989.400.000,00
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Buku Rancangan KUA yang tersedia	Amlapura	80 Buku		151.400.000,00	APBD II		80 Buku		159.400.000,00
		Jumlah Buku Rancangan PPAS yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
		Jumlah Buku KUA yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
		Jumlah Buku PPAS yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Buku Rancangan Perubahan KUA yang tersedia	Amlapura	80 Buku		125.000.000,00	APBD II		80 Buku		125.000.000,00
		Jumlah Buku Rancangan Perubahan PPAS yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
		Jumlah Buku Perubahan KUA yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
		Jumlah Buku Perubahan PPAS yang tersedia		80 Buku					80 Buku		
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah Verifikasi RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD	Amlapura	84 dokumen		175.000.000,00			84 dokumen		50.000.000,00
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah Verifikasi DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD	Amlapura	84 dokumen		175.000.000,00			84 dokumen		50.000.000,00
5.02.02.2.01.05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang tercetak	Amlapura	72 buku		504.000.000,00	APBD II		72 buku		735.000.000,00
		Jumlah buku Peraturan Daerah tentang APBD yang tercetak		80 buku					80 buku		
		Jumlah rancangan nota keuangan		80 buah					80 buah		
		Jumlah buku rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang tercetak		72 buku					72 buku		
		Jumlah buku peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang tercetak		160 buku					160 buku		
5.02.02.2.01.06	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah buku rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang tercetak	Amlapura	72 buku		500.000.000,00	APBD II		72 buku		700.000.000,00
		Jumlah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang tercetak		80 buku					80 buku		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah rancangan perubahan nota keuangan		80 buah							
		Jumlah buku rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tercetak		72 buku					72 buku		
		Jumlah buku peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tercetak		160 buku					160 buku		
5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah regulasi yang tersusun	Amlapura	2 dokumen		170.000.000,00	APBD II		2 dokumen		170.000.000,00
		Persentase penataan dokumentasi bidang Anggaran		100%					100%		
		Dokumen SIKD APBD dan Perubahan APBD		2 buah					2 buah		
		Dokumen perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah		1 buah					1 buah		
		Dokumen sumber pendanaan anggaran		2 buah					2 buah		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel	Amlapura	100%		674.000.000,00			100%		860.000.000,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan kas daerah	Amlapura	1 Dokumen		55.000.000,00	APBD II		1 Dokumen		75.000.000,00
		Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target		100%					100%		
		Jumlah Dokumen Anggaran Kas		2 dokumen					2 dokumen		
		Jumlah Dokumen SPD SKPD		500 Dokumen					500 Dokumen		
		Persentase terselenggaranya penatausahaan pembiayaan daerah		100%					100%		
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pelaporan dana perimbangan dan dana transfer yang tersusun	Amlapura	1 Dokumen		102.600.000,00	APBD II		1 Dokumen		128.500.000,00
		Persentase terlaksananya pelaporan SIKD		100%					100%		
		Persentase persyaratan dan pelaporan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang terpenuhi		100%					100%		
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Persentase penerbitan SP2D secara akurat dan tepat waktu	Amlapura	100%		75.000.000,00	APBD II		100%		125.000.000,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji serta Penerbitan SKP	Persentase pengelolaan dan pencetakan daftar gaji SKPD	Amlapura	100%		190.000.000,00	APBD II		100%		235.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pelaporan realisasi gaji PNSD		100%					100%		
		Persentase SKPP yang diterbitkan atas permohonan pengajuan SKPP		100%					100%		
		Dokumen pengesahan BLUD dan data pengesahan pola SP3B		12 Dokumen					12 bulan		
		Persentase jumlah pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan		100%					100%		
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas	Amlapura	12 Dokumen		146.400.000,00	APBD II		12 Dokumen		171.500.000,00
		Laporan Aliran Kas		12 Dokumen					12 Dokumen		
		Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK)		12 Dokumen					12 Dokumen		
		Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Kas		12 Dokumen					12 Dokumen		
		Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkoneksi dengan SIMDA Keuangan dengan baik		56 PD/Unit Kerja					56 PD/Unit Kerja		
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Dokumen Kebijakan Petunjuk Teknis Perbendaharaan keuangan daerah	Amlapura	3 Dokumen		105.000.000,00	APBD II		3 Dokumen		125.000.000,00
		Dokumen SK Pengelola Keuangan dan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan		10 Dokumen			APBD II		10 Dokumen		
		Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan		100%					100%		
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Kab. Karangasem	100%		987.620.640,00			100%		1.065.379.970,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan realisasi PAD	Amlapura	13 buah		112.023.340,00	APBD II		13 buah		132.023.340,00
		Persentase Posting data dan penginputan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan buku rekening		100%					100%		

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah buku peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	Amlapura	1 buah		154.000.000,00	APBD II		1 buah		179.000.000,00
		Jumlah laporan realisasi anggaran (bulanan dan triwulanan) yang tersusun		24 dokumen					24 dokumen		
		Jumlah laporan prognosis dan LO triwulanan yang tersusun		4 dokumen					4 dokumen		
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Amlapura	1 buah		240.648.200,00	APBD II		1 buah		240.648.200,00
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Semesteran yang tersusun	Amlapura	2 dokumen		200.000.000,00	APBD II		2 buah		213.588.190,00
		Jumlah Laporan Keuangan Pemda Tahunan yang tersusun		1 buah					1 buah		
		Jumlah Laporan Ikhtisar Kekayaan Desa yang tersusun		1 buah					1 buah		
		Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi APBD Desa tersusun		3 buah					3 buah		
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terpenuhi		100%		20.000.000,00	APBD II		100%		20.000.000,00
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan	Jumlah Berita Acara rekonsiliasi (Bank, Perangkat Daerah, SKPKD dan Pendapatan pajak daerah) yang terselesaikan	Amlapura	204 dokumen		89.500.000,00	APBD II		204 dokumen		105.120.240,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Amlapura	4 dokumen		20.000.000,00	APBD II		4 dokumen		20.000.000,00
5.02.02.2.03.11	Verifikasi dan Pengajuan Bukti Memorial	Persentase Jurnal Koreksi	Amlapura	100%		20.000.000,00	APBD II		100%		20.000.000,00
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapat pembinaan dan sosialisasi penyusunan LKPD	Amlapura	100%		131.449.100,00	APBD II		100%		135.000.000,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Kab. Karangasem	100%		909.384.100,00	APBD II		100%		949.184.100,00
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	41 PD		909.384.100,00			41 PD		949.184.100,00
5.02.03.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Dokumen Informasi Tentang Standar Satuan Harga yang Tersedia	Kab. Karangasem	60 Buku		175.000.000,00	APBD II		60 Buku		175.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Karangasem	100%		40.000.000,00	APBD II		100%		40.000.000,00
5.02.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah	Kab. Karangasem	100%		40.000.000,00	APBD II		100%		40.000.000,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah / pengguna barang yang terdata asetnya	Kab. Karangasem	100%		175.700.000,00	APBD II		100%		194.000.000,00
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disertifikatkan	Kab. Karangasem	5 bidang		128.184.100,00	APBD II		5 bidang		143.184.100,00
		Jumlah bidang aset yang difasilitasi pengamanan fisik		5 bidang					5 bidang		
5.02.03.2.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase terfasilitasinya perangkat daerah atas penilaian BMD dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan	Kab. Karangasem	100%		120.000.000,00	APBD II		100%		120.000.000,00
5.02.03.2.01.09	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi data asetnya untuk digunakan, dimanfaatkan, dimusnahkan dan dihapuskan	Kab. Karangasem	100%		125.500.000,00	APBD II		100%		132.000.000,00
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Persentase BMD kondisi baik yang dimanfaatkan secara optimal	Kab. Karangasem	100%		50.000.000,00	APBD II		100%		50.000.000,00
		Persentase BMD kondisi Rusak Berat yang dipindahtanganan		100%					100%		
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi laporan persediaannya Daerah	Kab. Karangasem	100%		55.000.000,00	APBD II		100%		55.000.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi laporan persediaan		100%					100%		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pencapaian target penerimaan pajak daerah	Kab. Karangasem	100%		5.786.237.140,00			100%		6.487.000.000,00
5.02.04.2.02	Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah yang terlaksana	Kab. Karangasem	100%		5.786.237.140,00			100%		6.487.000.000,00
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah / peraturan kepala daerah tentang pajak daerah yang tersusun	Amlapura	1 buah		81.763.000,00	APBD II		1 buah		1.000.000,00
5.02.04.2.02.03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pajak yang tersedia standar operasional prosedurnya	Amlapura	100%		50.000.000,00	APBD II		100%		70.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pajak yang dievaluasi sistem pelayanannya	Amlapura	100%		50.000.000,00	APBD II		100%		70.000.000,00
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering)	Kab. Karangasem	3 jenis		197.969.200,00	APBD II		3 jenis		210.000.000,00
		Jumlah jenis pajak yang diadakan penilaian wajib pajak teladan		3 jenis					3 jenis		
5.02.04.2.02.06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase jenis pajak yang pelayanannya diterapkan pada tempat pelayanan terpadu	Kab. Karangasem	100%		174.964.790,00	APBD II		100%		200.000.000,00
5.02.04.2.02.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib ajak dan Retribusi	Persentase jenis pajak yang terlaksananya tindak penagihannya	Kab. Karangasem	100%		367.718.510,00	APBD II		100%		411.000.000,00
5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi komputer pengelolaan pajak daerah	Amlapura	100%		186.205.400,00	APBD II		100%		225.000.000,00
		Persentase masa waktu pemeliharaan dan pengembangan website dalam setahun		100%					100%		
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pajak daerah yang terdata dalam database wajib pajak daerah	Kab. Karangasem	100%		1.575.273.000,00	APBD II		100%		1.725.000.000,00
		Persentase wajib pajak official assesment yang didata objek pajaknya		100%					100%		
		Persentase pajak terhutang yang diterbitkan ketetapanannya		100%					100%		
		Persentase objek pajak reklame yang lunas pajak		100%					100%		
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan		160.000 lbr					160.000 lbr		
		Persentase terlaksananya kerjasama updating data subjek dan objek pajak PBB-P2 dengan pihak ketiga		100%					100%		
		Persentase tercapainya target penerimaan PBB-P2		100%					100%		
		Persentase pengajuan validasi BPHTB yang terlayani									
		Tercapainya target penerimaan BPHTB									
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Kab. Karangasem	2 jenis		68.636.040,00	APBD II		2 jenis		75.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pajak daerah yang dimonitoring	Kab. Karangasem	100%		3.033.707.200,00	APBD II		100%		3.500.000.000,00
		Persentase permohonan keringanan, pengajuan keberatan dan banding yang tertangani		100%					100%		
			JUMLAH			15.164.030.116,00					16.057.441.470,00
5	03		KEPEGAWAIAN								
5	03	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA								
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	Amlapura	100%	1.591.200.000,00	APBD	100%		1.766.232.000,00
X	XX	01	2,02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan	Amlapura	100%	50.000.000,00	APBD	100%	55.500.000,00
X	XX	01	2,02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Persentase pelaporan kinerja OPD yang terselesaikan	Amlapura	100%	30.000.000,00	APBD	33.300.000,00
X	XX	01	2,02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase pelaporan keuangan yang terselesaikan	Amlapura	100%	20.000.000,00	APBD	22.200.000,00
X	XX	01	2,03	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi Umum	Amlapura	100%	1.521.200.000,00	APBD	100%	1.688.532.000,00
X	XX	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu	Amlapura	100%	55.800.000,00	APBD	61.938.000,00
X	XX	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Persentase rekening telepon, air, dan listrik yang terbayar	Amlapura	100%	139.200.000,00	APBD	154.512.000,00
X	XX	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	persentase perizinan kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan	Amlapura	100%	16.000.000,00	APBD	17.760.000,00
X	XX	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terbayarnya jasa dan pemenuhan bahan, alat kebersihan	Amlapura	100%	56.400.000,00	APBD	62.604.000,00
X	XX	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	Amlapura	100%	40.000.000,00	APBD	44.400.000,00
X	XX	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Amlapura	100%	30.000.000,00	APBD	33.300.000,00
X	XX	01	2,03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi /penerangan bangunan kantor yang tersedia	Amlapura	100%	15.000.000,00	APBD	16.650.000,00
X	XX	01	2,03	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia	Amlapura	100%	10.000.000,00	APBD	11.100.000,00
X	XX	01	2,03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor dan perayaan hari-hari besar kebangsaan/daerah	Amlapura	100%	111.800.000,00	APBD	124.098.000,00
X	XX	01	2,03	17	Penyediaan makanan & minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	Amlapura	100%	45.000.000,00	APBD	49.950.000,00
X	XX	01	2,03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar	Amlapura	100%	150.000.000,00	APBD	166.500.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Amlapura	5 Unit		100.000.000,00	APBD		5 Unit		111.000.000,00
X	XX	01	2,03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase kelengkapan gedung kantor yang tersedia	Amlapura	100%		20.000.000,00	APBD		100%		22.200.000,00
X	XX	01	2,03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase tersedianya peralatan gedung kantor	Amlapura	100%		100.000.000,00	APBD		100%		111.000.000,00
X	XX	01	2,03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase pengadaan mebeleur yang tersedia	Amlapura	100%		80.000.000,00	APBD		100%		88.800.000,00
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan	Amlapura	100%		128.800.000,00	APBD		100%		142.968.000,00
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Amlapura	100%		178.200.000,00	APBD		100%		197.802.000,00
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Amlapura	100%		55.000.000,00	APBD		100%		61.050.000,00
X	XX	01	2,03	38	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Persentase rehabilitasi sedang/berat gedung yang terselesaikan	Amlapura	100%		190.000.000,00	APBD		100%		210.900.000,00
X	XX	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Amlapura	100%		20.000.000,00	APBD		100%		22.200.000,00
X	XX	01	2,04	05	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Amlapura	100%		20.000.000,00	APBD		100%		22.200.000,00
5	03				KEPEGAWAIAN										
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	Amlapura	100%		10.161.390.000,00	APBD		100%		11.279.142.900,00
5	03	02	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase terpenuhinya Data dan Informasi ASN yang Akurat	Amlapura	100%		329.400.000,00	APBD		100%		365.634.000,00
5	03	02	2,01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian	Amlapura	100%		229.400.000,00	APBD		100%		254.634.000,00
5	03	02	2,01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase terpenuhinya laporan data kepegawaian	Amlapura	100%		100.000.000,00	APBD		100%		111.000.000,00
5	03	02	2,02		Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian terselesaikan	Amlapura	100%		1.574.400.000,00	APBD		100%		1.747.584.000,00
5	03	02	2,02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase terpenuhinya analisis kebutuhan, formasi, serta pengadaan ASN	Amlapura	100%		1.300.000.000,00	APBD		100%		1.443.000.000,00
5	03	02	2,02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Persentase pemberian pensiun yang terselesaikan	Amlapura	100%		140.000.000,00	APBD		100%		155.400.000,00
5	03	02	2,02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	Amlapura	100%		134.400.000,00	APBD		100%		149.184.000,00
5	03	02	2,03		Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase peningkatan kapasitas ASN	Amlapura	100%		7.247.506.100,00	APBD		100%		8.044.731.771,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase peningkatan kapasitas ASN sesuai kompetensi	Amlapura				314.400.000,00	APBD			348.984.000,00
5	03	02	2,03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	Amlapura	100%			200.000.000,00	APBD		100%	222.000.000,00
5	03	02	2,03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN lainnya)	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN	Amlapura	100%			75.000.000,00	APBD		100%	83.250.000,00
5	03	02	2,03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Dasar Bagi CPNS dan/atau Diklat Penjurangan	Amlapura	130 Orang			6.658.106.100,00	APBD		130 Orang	7.390.497.771,00
5	03	02	2,04		Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi	Amlapura	100%			925.083.900,00	APBD		100%	1.026.843.129,00
5	03	02	2,04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan kompetensi	Amlapura	100%			925.083.900,00	APBD		100%	1.026.843.129,00
5	03	02	2,05		Pembinaan ASN	Persentase ASN yang terbina	Amlapura	100%			85.000.000,00	APBD		100%	94.350.000,00
5	03	02	2,05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Amlapura	100%			40.000.000,00	APBD		100%	44.400.000,00
5	03	02	2,05	03	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	Amlapura	100%			45.000.000,00	APBD		100%	49.950.000,00
JUMLAH											11.752.590.000,00				13.045.374.900,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01				INSPEKTORAT DAERAH										
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karangasem	100			1.772.281.480,00	APBD		100	1.772.281.480,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan pada Inspektorat Daerah	Kab. Karangasem	100			45.600.000,00	APBD		100	45.600.000,00
6	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, serta terbayarnya jasa non pns untuk 1 orang	Kab. Karangasem	100			45.600.000,00	APBD		100	45.600.000,00
6	01	01	2.03		Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah	Kab. Karangasem	100			1.026.018.480,00	APBD		100	1.026.018.480,00
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100			11.880.000,00	APBD		100	11.880.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi serta terpenuhinya kebutuhan air dan listrik 12 bulan	Kab. Karangasem	100		96.000.000,00	APBD		100		96.000.000,00
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 bulan (8 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua)	Kab. Karangasem	100		204.000.000,00	APBD		100		204.000.000,00
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya biaya Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan untuk 3 orang	Kab. Karangasem	100		46.800.000,00	APBD		100		46.800.000,00
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya biaya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan untuk 2 orang	Kab. Karangasem	101		31.200.000,00	APBD		100		31.200.000,00
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya penyediaan ATK 12 bulan	Kab. Karangasem	100		21.000.000,00	APBD		100		21.000.000,00
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya pengadaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan	Kab. Karangasem	100		23.760.000,00	APBD		100		23.760.000,00
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		7.800.000,00	APBD		100		7.800.000,00
6	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		13.200.000,00	APBD		100		13.200.000,00
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		18.600.000,00	APBD		100		18.600.000,00
6	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk upacara keagamaan selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		48.000.000,00	APBD		100		48.000.000,00
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Kab. Karangasem	100		72.000.000,00	APBD		100		72.000.000,00
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		42.800.000,00	APBD		100		42.800.000,00
6	01	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Karangasem	100		140.000.000,00	APBD		100		140.000.000,00
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (6 Laptop, 3 Kendaraan roda dua, Printer, AC Ruangan dan peralatan lainnya)	Kab. Karangasem	100		60.000.000,00	APBD		100		60.000.000,00
6	01	01	2.03	25	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor, berupa Kursi untuk eselon IV, Eselon III, dan 30 kursi kerja)	Kab. Karangasem	100		96.978.480,00	APBD		100		96.978.480,00
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan/gedung/pagar halaman/taman secara rutin/berkala selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		50.000.000,00	APBD		100		50.000.000,00
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala selama 12 bulan	Kab. Karangasem	100		42.000.000,00	APBD		100		42.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Karangasem	101		700.663.000,00	APBD		100		700.663.000,00
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kompetensi APIP dari Level 2 ke Level 3 melalui fasilitasi Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan Bintek APIP	Kab. Karangasem	Level 3		700.663.000,00	APBD		Level 3		700.663.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Karangasem	100		1.823.145.864,00	APBD		100		1.823.145.864,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Kab. Karangasem	100		1.524.615.000,00	APBD		100		1.524.615.000,00
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Audit Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan melalui pengawasan fungsional (Reguler)	Kab. Karangasem	WTP		311.750.000,00	APBD		WTP		311.750.000,00
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan terhadap RKPD, RKA, LKPD, Laporan DAK, Probitas Audit, LPPD dan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Karangasem	95		350.000.000,00	APBD		100		350.000.000,00
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pemantauan Kinerja dan Keuangan melalui upaya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dan terbayarnya jasa tenaga non pns 3 orang	Kab. Karangasem	85		315.460.000,00	APBD		85		315.460.000,00
						Jumlah Pemantauan Kinerja dan Keuangan melalui Pelaksanaan Inspeksi Mendadak / sidak	Kab. Karangasem	92		121.000.000,00	APBD		93		121.000.000,00
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Evaluasi Kinerja dan Keuangan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi	Kab. Karangasem	100		100.000.000,00	APBD		100		100.000.000,00
						Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD yang dilaksanakan	Kab. Karangasem	75		75.000.000,00	APBD		78		75.000.000,00
						Jumlah Audit Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kab. Karangasem	90		251.405.000,00	APBD		90		251.405.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Karangasem	100		298.530.864,00	APBD		100		298.530.864,00
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHKPN dan LHKASN yang dilaporkan	Kab. Karangasem	100		173.530.864,00	APBD		100		173.530.864,00
6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Evaluasi Kinerja dan Keuangan melalui Kerjasama Survei Penilaian Integritas (SPI)	Kab. Karangasem	100		125.000.000,00	APBD		100		125.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROsentase Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Karangasem	100		554.942.856,00	APBD		100		554.942.856,00
6	01	03	2.02			Asistensi dan Pendampingan	Terselenggaranya Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Kab. Karangasem	100		554.942.856,00	APBD		100		554.942.856,00
6	01	03	2.02	01		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Kab. Karangasem	98		100.000.000,00	APBD		100		100.000.000,00
							Jumlah Kegiatan Saber Pungli yang ditindaklanjuti	Kab. Karangasem	6		254.942.856,00	APBD		4		254.942.856,00
6	01	03	2.02	02		Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Terbentuknya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Kab. Karangasem	80%		200.000.000,00	APBD		80%		200.000.000,00
						Jumlah Total						4.150.370.200,00				
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01						KECAMATAN KARANGASEM									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						100 %	889.260.000			
7	01	01	2.01				Pere ncaanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kec. Karangasem	12	bulan	12.000.000	APBD		12	bulan	12.000.000
7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan						10.000.000			
7	01	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kec. Karangasem	7	Dokumen	10.000.000	APBD		7	Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.03				Administrasi Umum						867.260.000			
7	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kec. Karangasem	850	Lembar	4.000.000	APBD		850	Lembar	4.000.000
7	01	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Karangasem	36	Rekening bulan	45.000.000	APBD		36	Rekening bulan	45.000.000
7	01	01	2.03	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Karangasem	12	Unit	6.000.000	APBD		12	Unit	10.000.000
7	01	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah upah tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	189.600.000	APBD		12	bulan	189.600.000
7	01	01	2.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat- alat kebersihan kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	5.000.000	APBD		230	Unit	10.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	29.500.000	APBD		1.560	Unit	30.000.000
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	20.500.000	APBD		27.000	Lembar	21.000.000
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	6.200.000	APBD		205	Unit	6.500.000
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kec. Karangasem	12	Buah	7.600.000	APBD		1.460	Buah	8.000.000
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan sarana upakara yang terbayar	Kec. Karangasem	12	bulan	141.600.000	APBD		10	Unit	143.000.000
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Karangasem	12	bulan	32.000.000	APBD		650	Kotak	32.000.000
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Karangasem	9	orang kali	75.000.000	APBD		9	orang kali	75.000.000
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kec. Karangasem	2	Unit	56.000.000	APBD		2	Unit	56.000.000
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kec. Karangasem	3	Buah	30.000.000	APBD		3	Buah	30.000.000
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kec. Karangasem	5	Unit	48.000.000	APBD		5	Unit	50.000.000
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan upah tenaga penjaga kantor yang terbayarkan	Kec. Karangasem	12	bulan	26.000.000	APBD		12	bulan	32.000.000
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan upah tenaga sopir yang terbayarkan.	Kec. Karangasem	12	bulan	121.260.000	APBD		12	bulan	121.260.000
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Karangasem	16	Unit	24.000.000	APBD		16	Unit	30.000.000
7	01	01	2.03	38	Rahabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedeung Kantor	Jumlah halaman dan taman kantor yang terpelihara	Kec. Karangasem	0	Unit	-	APBD		0	Unit	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Karangasem			350.000.000					350.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Karangasem			295.000.000					295.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang terkoordinasikan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana.	Kec. Karangasem	5	kegiatan	295.000.000	APBD	-	5	kegiatan	295.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu	Kec. Karangasem	98	%	55.000.000		-	98	%	55.000.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kec. Karangasem	363	rekomendasi	30.000.000	APBD	-	363	rekomendasi	30.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan nonperijinan yang dikeluarkan	Kec. Karangasem	300	rekomendasi	25.000.000	APBD	-	300	rekomendasi	25.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Karangasem			115.000.000					120.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Karangasem			115.000.000					120.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan	30.000.000	APBD	-	925	Usulan	35.000.000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Kec. Karangasem	3	Sekolah	20.000.000	APBD	-	3	Sekolah	20.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan yang dilaksanakan	Kec. Karangasem	3	Kegiatan	65.000.000	APBD	-	3	Kegiatan	65.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.000.000					10.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					10.000.000					10.000.000
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang Undangan	Jumlah desa/kelurahan dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan	10.000.000	APBD	-	40	Orang	10.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang		100	%	101.000.000			100	%	103.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022										
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif								
				Volume	Satuan				Volume	Satuan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							103.000.000							
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa/kelurahan yang tertib tata kelola administrasi pemerintahannya	Kec. Karangasem	12	Desa/Kelurahan	48.000.000	APBD	12	Desa/Kelurahan	48.000.000					
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	Kec. Karangasem	8	Desa	25.000.000	APBD	-	8	Desa	25.000.000				
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang pelaksanaan kegiatannya dimonitoring, devaluasi dan dilaporkan kegiatan pembangunannya.	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan	28.000.000	APBD		11	Desa/Kelurahan	30.000.000				
JUMLAH															1.465.260.000				1.498.360.000
7	01	01			KELURAHAN SUBAGAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					364.200.000,00					371.400.000,00				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum					364.200.000,00					371.400.000,00				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kel. Subagan	450	Lembar	3.000.000,00			330	Lembar	3.000.000,00				
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Subagan	36	Rekening bulan	25.000.000,00			48	Rekening bulan	25.000.000,00				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Subagan	4	Unit	2.500.000,00			5	Unit	2.500.000,00				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kel. Subagan	12	bulan	106.200.000,00			12	bulan	106.200.000,00				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor dan upah jasa tenaga kebersihan yang terbayar	Kel. Subagan	12	bulan	12.000.000,00			12	bulan	12.300.000,00				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Subagan	400	unit	9.000.000,00			400	unit	10.000.000,00				
7						Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	Kel. Subagan	30	Unit	6.500.000,00			30	Unit	6.500.000,00				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Subagan	17.000	Lembar	5.100.000,00			14.000	Lembar	5.500.000,00				
7						Jumlah barang cetakan yang terbayar	Kel. Subagan	50	Buku	3.200.000,00			50	Buku	3.500.000,00				
	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Subagan	40	Unit	4.500.000,00			40	Unit	4.500.000,00				
7				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Subagan	1.905	Buah	4.800.000,00			1.905	Buah	5.000.000,00				

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan sarana upakara yang terbayar	Kel. Subagan	12	bulan	34.800.000,00		12	bulan	36.800.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Subagan	450	Kotak/Bungkus	12.000.000,00		450	Kotak/Bungkus	12.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Subagan	2	Orang kali	15.000.000,00		2	Orang kali	15.000.000,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Subagan	60	Set	25.000.000,00		60	Set	25.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Subagan	8	Unit	23.000.000,00		2	Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan upah jasa tenaga waker/keamanan kantor yang terbayarkan	Kel. Subagan	12	bulan	19.800.000,00		2	Unit	20.800.000,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	Kel. Subagan	12	bulan	39.800.000,00		12	bulan	39.800.000,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Subagan	12	bulan	13.000.000,00		12	bulan	13.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Subagan			915.341.000,00				932.200.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Subagan			915.341.000,00				932.200.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	Kel. Subagan	143	Usulan	13.000.000,00		143	Usulan	13.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dana Sarana Kelurahan	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Subagan	26	Orang	15.000.000,00		26	Orang	15.000.000,00
						Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Subagan	6	Titik	90.000.000,00		6	Titik	90.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Subagan	120	Orang bulan	240.000.000,00		120	Orang bulan	240.000.000,00
						Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Subagan	1	Dokumen	21.000.000,00		1	Dokumen	21.000.000,00
						Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Subagan	1	Profile	14.000.000,00		1	Profile	15.000.000,00
						Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Subagan	1	Kegiatan	9.000.000,00		1	Kegiatan	9.000.000,00
						Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Subagan	499	Orang	25.000.000,00		499	Orang	25.000.000,00
						Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Subagan	7.075	Lembar	26.000.000,00		7.075	Lembar	26.000.000,00
						Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Subagan	22	Orang	30.000.000,00		22	Orang	30.000.000,00
						Jumlah atlit yang terbina	Kel. Subagan	20	Orang	10.000.000,00		20	Orang	10.000.000,00
						Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	Kel. Subagan	6.400	Orang Bulan	163.900.000,00		6.400	Orang Bulan	163.900.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	Kel. Subagan	3	Orang	13.000.000,00			3	Orang	13.000.000,00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	Kel. Subagan	30	Unit	21.300.000,00			30	Unit	21.300.000,00			
		Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	Kel. Subagan	15	Paket	134.141.000,00			15	Paket	150.000.000,00			
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi sebagai peserta dalam lomba di Tingkat Propensi	Kel. Subagan	1	kelurahan	90.000.000,00			1	kelurahan	90.000.000,00			
		JUMLAH				1.279.541.000,00					1.303.600.000,00			
7	01	01	KELURAHAN KARANGASEM											
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			387.650.000,00					395.700.000,00			
7	01	01	2.03	Administrasi Umum							395.700.000,00			
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kel. Karangasem	330	Lembar	3.000.000,00	APBD	330	Lembar	3.000.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Karangasem	48	Rekening bulan	25.000.000,00	APBD	48	Rekening bulan	25.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Karangasem	5	Unit	2.250.000,00	APBD	5	Unit	2.500.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kel. Karangasem	120	Orang bulan	120.200.000,00	APBD	120	Orang bulan	120.200.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor dan upah jasa tenaga kebersihan yang terbayar	Kel. Karangasem	12	bulan	13.600.000,00	APBD	12	bulan	14.000.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	370	unit	9.000.000,00	APBD	370	unit	10.000.000,00
7						Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	Kel. Karangasem	30	Unit	6.500.000,00	APBD	30	Unit	6.500.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Karangasem	14.000	Lembar	4.200.000,00	APBD	14.000	Lembar	4.200.000,00
7						Jumlah barang cetakan yang terbayar	Kel. Karangasem	34	Buku	3.500.000,00	APBD	34	Buku	3.500.000,00
	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	70	Unit	4.800.000,00	APBD	70	Unit	5.000.000,00
7				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Karangasem	1.460	Buah	4.800.000,00	APBD	1.460	Buah	5.000.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan sarana upakara yang terbayar	Kel. Karangasem	12	bulan	34.800.000,00	APBD	12	bulan	39.800.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Karangasem	450	Kotak/Bungkus	12.000.000,00	APBD	450	Kotak/Bungkus	12.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	2	Orang kali	15.000.000,00	APBD	2	Orang kali	15.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	50	Set	29.000.000,00	APBD		50	Set	29.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	2	Unit	24.000.000,00	APBD		2	Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan upah jasa tenaga waker/keamanan kantor yang terbayarkan	Kel. Karangasem	12	bulan	22.000.000,00	APBD		12	bulan	22.000.000,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	Kel. Karangasem	12	bulan	41.000.000,00	APBD		12	bulan	41.000.000,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Karangasem	10	Unit	13.000.000,00	APBD		10	Unit	13.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Karangasem			1.522.408.000,00	APBD				1.536.408.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Karangasem			1.522.408.000,00	APBD				1.536.408.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	Kel. Karangasem	108	Usulan	14.000.000,00	APBD/APBN		108	Usulan	15.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dana Sarana Kelurahan	Jumlah poskamling yang terbangun	Kel. Karangasem	1	Unit	25.000.000,00	APBN		1	Unit	25.000.000,00
						Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Karangasem	58	Orang	40.000.000,00	APBN		58	Orang	40.000.000,00
						Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Karangasem	4	Titik	21.941.000,00	APBN		4	Titik	21.941.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Karangasem	348	Orang bulan	696.000.000,00	APBD		348	Orang bulan	696.000.000,00
						Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Dokumen	24.000.000,00	APBD		1	Dokumen	24.000.000,00
						Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Profile	15.000.000,00	APBD		1	Profile	15.000.000,00
						Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Karangasem	1	Kegiatan	9.000.000,00	APBN		1	Kegiatan	9.000.000,00
						Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Karangasem	758	Orang	25.000.000,00	APBD		758	Orang	25.000.000,00
						Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Karangasem	6.165	Lembar	27.000.000,00	APBD		6.165	Lembar	30.000.000,00
						Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	30	Orang	42.500.000,00	APBN		30	Orang	42.500.000,00
						Jumlah atlit yang terbina	Kel. Karangasem	40	Orang	12.000.000,00	APBD		40	Orang	12.000.000,00
						Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	Kel. Karangasem	5.655	Orang Bulan	310.967.000,00	APBD		5.655	Orang Bulan	310.967.000,00
						Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	Kel. Karangasem	8	Orang	10.000.000,00	APBD		8	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	Kel. Karangasem	1	Unit	40.000.000,00	APBD		1	Unit	50.000.000,00			
		Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	Kel. Karangasem	8	Paket	210.000.000,00	APBN		8	Paket	210.000.000,00			
		JUMLAH				1.910.058.000,00					1.932.108.000,00			
7	01	01												
		KELURAHAN PADANGKERTA												
7	01	01									316.500.000,00			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				297.800.000,00								
7	01	01	2.03								316.500.000,00			
		Administrasi Umum				297.800.000,00								
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kel. Padangkerta	800	Lembar	3.000.000,00		800	Lembar	3.000.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Padangkerta	36	Rekening bulan	22.000.000,00		36	Rekening bulan	25.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Padangkerta	4	Unit	2.500.000,00		5	Unit	2.500.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kel. Padangkerta	12	bulan	60.000.000,00		12	bulan	60.000.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor dan upah jasa tenaga kebersihan yang terbayar	Kel. Padangkerta	12	bulan	1.200.000,00		12	bulan	1.500.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	300	unit	8.500.000,00		300	unit	10.000.000,00
7						Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	Kel. Padangkerta	23	Unit	6.000.000,00		23	Unit	6.500.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Padangkerta	9.300	Lembar	2.800.000,00		9.300	Lembar	3.000.000,00
7						Jumlah barang cetakan yang terbayar	Kel. Padangkerta	40	Buku	4.700.000,00		40	Buku	4.700.000,00
	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	60	Unit	4.500.000,00		60	Unit	4.500.000,00
7				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Padangkerta	1.905	Buah	4.800.000,00		1.905	Buah	5.000.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan sarana upakara yang terbayar	Kel. Padangkerta	12	bulan	34.800.000,00		12	bulan	36.800.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Padangkerta	350	Kotak/Bungkus	11.000.000,00		350	Kotak/Bungkus	12.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Padangkerta	2	Orang kali	15.000.000,00		2	Orang kali	15.000.000,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	unit	22.000.000,00		3	unit	25.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	Unit	20.000.000,00		3	Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan upah jasa tenaga waker/keamanan kantor yang terbayarkan	Kel. Padangkerta	12	bulan	25.200.000,00		2	Unit	25.200.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	Kel. Padangkerta	12	bulan	39.800.000,00		12	bulan	39.800.000,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Padangkerta	12	bulan	10.000.000,00		12	bulan	12.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Padangkerta			846.891.000,00				859.141.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Padangkerta			846.891.000,00				859.141.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	Kel. Padangkerta	143	Usulan	11.000.000,00		143	Usulan	13.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dana Sarana Kelurahan	Jumlah poskamling yang terbangun	Kel. Subagan	5	Unit	25.000.000,00		5	Unit	25.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dana Sarana Kelurahan	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Padangkerta	68	Orang	62.518.000,00		68	Orang	62.768.000,00
						Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Padangkerta	4	Titik	20.000.000,00		4	Titik	20.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Padangkerta	156	Orang bulan	312.000.000,00		156	Orang bulan	312.000.000,00
						Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	Dokumen	20.000.000,00		1	Dokumen	21.000.000,00
						Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	Profile	11.000.000,00		1	Profile	15.000.000,00
						Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Padangkerta	1	Kegiatan	11.105.000,00		1	Kegiatan	11.105.000,00
						Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Padangkerta	349	Orang	25.000.000,00		349	Orang	25.000.000,00
						Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Padangkerta	3.760	Lembar	23.000.000,00		3.760	Lembar	25.000.000,00
						Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Padangkerta	44	Orang	42.055.000,00		44	Orang	42.055.000,00
						Jumlah atlit yang terbina	Kel. Padangkerta	18	Orang	8.000.000,00		18	Orang	10.000.000,00
						Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	Kel. Padangkerta	3.425	Orang Bulan	75.100.000,00		3.425	Orang Bulan	75.100.000,00
						Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	Kel. Padangkerta	3	Orang	11.000.000,00		3	Orang	12.000.000,00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Terpenuhi	Kel. Padangkerta	13	Unit	69.558.000,00		13	Unit	69.558.000,00
						Jumlah Jalan Lingkungan Yang Terehab/Terpelihara	Kel. Padangkerta	1	Paket	120.555.000,00		1	Paket	120.555.000,00
										1.144.691.000,00				1.175.641.000,00
7	01				JUMLAH									
					KECAMATAN ABANG									

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Abang	100	%	639.600.000	APBD		100	%	624.950.000
7 01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.900.000					14.900.000
	01 Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	Kec. Abang	12	bulan	14.900.000	APBD		12	bulan	14.900.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran				29.300.000					
	06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan	Kec. Abang	12	bulan	14.400.000	APBD		12	bulan	14.400.000
	09 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Abang	12	bulan	14.900.000	APBD		12	bulan	14.900.000
7 01 01 2.03	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran				595.400.000					595.400.000
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan tersedianya surat menyurat	Kec. Abang	12	bulan	25.300.000	APBD		12	bulan	25.300.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Abang	12	bulan	33.500.000	APBD		12	bulan	33.500.000
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Kec. Abang	9	buah	3.500.000	APBD		9	buah	3.500.000
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayarkan	Kec. Abang	12	bulan	114.000.000	APBD		12	bulan	114.000.000
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor	Kec. Abang	12	bulan	26.900.000	APBD		12	bulan	26.900.000
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	Kec. Abang	12	bulan	15.000.000	APBD		12	bulan	15.000.000
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Abang	12	bulan	8.000.000	APBD		12	bulan	8.000.000
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kec. Abang	12	bulan	3.000.000	APBD		12	bulan	3.000.000
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	Kec. Abang	12	bulan	6.000.000	APBD		12	bulan	6.000.000
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Abang	12	bulan	107.000.000	APBD		12	bulan	107.000.000
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman dalam rapat rapat	Kec. Abang	12	bulan	25.000.000	APBD		12	bulan	25.000.000
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar	Kec. Abang	12	bulan	35.000.000	APBD		12	bulan	35.000.000
	20 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kec. Abang	1	buah	25.000.000	APBD		4	buah	25.000.000
	22 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kec. Abang	1	buah	5.000.000	APBD		1	buah	5.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Abang	2	buah	12.000.000	APBD		2	buah	12.000.000		
	25	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kec. Abang								-		
	27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Abang								-		
	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kec. Abang	1	unit	21.400.000	APBD		1	unit	21.400.000		
	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kec. Abang	9	buah	122.800.000	APBD		9	buah	122.800.000		
	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Abang	10	buah	7.000.000	APBD		10	buah	7.000.000		
	37	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	Kec. Abang								-		
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Tertata									
												285.550.000		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								211.350.000		
			02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Abang	6	Kegiatan	211.350.000	APBD		50	orang	211.350.000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								74.200.000		
			01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kec. Abang	150	rekomendasi	26.400.000	APBD		150	rekomendasi	26.400.000
			02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kec. Abang	350	rekomendasi	47.800.000	APBD		350	rekomendasi	47.800.000
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
												149.700.000		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								149.700.000		
			01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Kec. Abang	2	kali	67.800.000	APBD		2	kali	67.800.000
			02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina tentang PKTP	Kec. Abang	3	sekolah	30.000.000	APBD		3	sekolah	30.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Abang	3	kegiatan	51.900.000	APBD		3	kegiatan	51.900.000		
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Abang	90	%	5.000.000	APBD		90	%	5.000.000	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				5.000.000				5.000.000		
			05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Abang	14	desa	5.000.000	APBD		14	desa	5.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Kategori Berkembang	Kec. Abang	90	%	73.400.000	APBD		90	%	73.400.000	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				73.400.000				73.400.000		
			02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Abang	14	desa	22.000.000	APBD		14	desa	22.000.000
			03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kec. Abang	14	desa	31.400.000	APBD		14	desa	31.400.000
			18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kec. Abang	14	desa	20.000.000	APBD		14	desa	20.000.000
TOTAL									1.153.250.000				1.138.600.000	
7	01			KECAMATAN KUBU										
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kubu	100	%	735.000.000,00				735.000.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00			-	-	5.000.000,00	
			01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah bulan perencanaan yang tersusun	Kec. Kubu	12	Bulan	5.000.000,00	APBD		12	Bulan	5.000.000,00
											-	-	-	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang tersusun			10.000.000,00			-	-	10.000.000,00	
			06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan	Kec. Kubu	12	Bulan	5.000.000,00	APBD		12	Bulan	5.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Kubu	12	Bulan	5.000.000,00	APBD		12	Bulan	5.000.000,00
									-	-	-	
7	01	01	2.03	Administrasi Umum			720.000.000,00				720.000.000,00	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat -surat dinas yang terkirim	Kec. Kubu	12	bulan	2.000.000,00	APBD		12	bulan	2.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Kubu	12	bulan	50.000.000,00	APBD		12	bulan	50.000.000,00
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Kubu	8	unit	4.000.000,00	APBD		8	unit	4.000.000,00
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kec. Kubu	12	bulan	108.000.000,00	APBD		12	bulan	108.000.000,00
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Tenaga Kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	28.200.000,00	APBD		12	bulan	28.200.000,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Alat tulis kantor yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	15.000.000,00	APBD		12	bulan	15.000.000,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	8.000.000,00	APBD		12	bulan	8.000.000,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kec. Kubu	12	bulan	10.000.000,00	APBD		12	bulan	10.000.000,00
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan surat kabar /bahan bacaan lainnya yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	5.500.000,00	APBD		12	bulan	5.500.000,00
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan logistik dan sarana upacara yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	102.000.000,00	APBD		12	bulan	102.000.000,00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Kubu	12	bulan	18.000.000,00	APBD		12	bulan	18.000.000,00
	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Kubu	12	bulan	55.000.000,00	APBD		12	bulan	55.000.000,00
	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kec. Kubu	2	paket	17.000.000,00	APBD		2	paket	17.000.000,00
	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kec. Kubu	6	unit	50.000.000,00	APBD		6	unit	50.000.000,00
	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kec. Kubu	4	buah	17.300.000,00			4	buah	17.300.000,00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Kubu	1	paket	100.000.000,00	APBD		1	paket	100.000.000,00
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Kec. Kubu	10	unit	120.000.000,00	APBD		10	unit	120.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Kubu	10	buah	10.000.000,00	APBD		10	buah	10.000.000,00		
									-	-	-			
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu		183.500.000,00					183.500.000,00		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			157.500.000,00			-	-	157.500.000,00		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perayaan Hari-hari besar daerah	Kec. Kubu	1	Perayaan	57.500.000,00	APBD	1 Perayaan	57.500.000,00	
					Jumlah desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Kec. Kubu	1	desa	10.000.000,00	APBD	1 desa	10.000.000,00		
					Jumlah lembaga adat yang dapat dibina	Kec. Kubu	3	lembaga adat	35.000.000,00	APBD	3 lembaga adat	35.000.000,00		
					Jumlah kelompok seni yang dibina untuk ikut PKB	Kec. Kubu	3	Kelompok seni	35.000.000,00	APBD	3 Kelompok seni	35.000.000,00		
					Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS	Kec. Kubu	9	desa	20.000.000,00	APBD	9 desa	20.000.000,00		
					Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di kecamatan	Kec. Kubu	10	cabang olahraga	-		10 cabang olahraga	-		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Kubu			26.000.000,00		-	-	26.000.000,00
				01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kec. Kubu	200	rekomendasi	16.000.000,00	APBD	200 rekomendasi	16.000.000,00	
				02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan nonperijinan yang dikeluarkan	Kec. Kubu	400	rekomendasi	10.000.000,00	APBD	400 rekomendasi	10.000.000,00	
										-	-	-		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec. Kubu			88.500.000,00				88.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					88.500.000,00		-	-	88.500.000,00
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa dan Kecamatan yang ikut forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Kec. Kubu	10	Desa + Kecamatan	32.000.000,00	APBD	10 Desa + Kecamatan	32.000.000,00	
				02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina	Kec. Kubu	2	sekolah	10.000.000,00	APBD	2 sekolah	10.000.000,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Kubu	9	desa	10.000.000,00	APBD		9	desa	10.000.000,00		
			Jumlah organisasi perempuan yang terbina	Kec. Kubu	1	Organisasi	10.000.000,00	APBD		1	Organisasi	10.000.000,00		
			Jumlah PKK desa yang terbina	Kec. Kubu	9	desa	26.500.000,00	APBD		9	desa	26.500.000,00		
									-	-	-			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Kubu				10.000.000,00			10.000.000,00		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					10.000.000,00		-	-	10.000.000,00	
			05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Kubu	9	desa	10.000.000,00	APBD	9	desa	10.000.000,00	
						Kec. Kubu					-	-	-	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangannya	Kec. Kubu				58.000.000,00			58.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Kubu				58.000.000,00		-	-	58.000.000,00
			02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	Kec. Kubu	1	desa	8.000.000,00	APBD	1	desa	8.000.000,00	
					Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Kubu	9	desa	10.000.000,00	APBD	9	desa	10.000.000,00	
			03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	Kec. Kubu	9	desa	20.000.000,00	APBD	9	desa	20.000.000,00	
			18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kec. Kubu	9	desa	20.000.000,00	APBD	9	desa	20.000.000,00	
TOTAL									1.075.000.000,00				1.075.000.000,00	
7	01			KECAMATAN BEBANDEM										
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kecamatan Bebandem	100	%	609.000.000,00	APBD	100	%	1.001.500.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.500.000,00				19.500.000,00	
			01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	17.500.000,00	APBD	12	Bulan	19.500.000,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	01	2.02											
				09	Administrasi Keuangan									
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	Kecamatan Bebandem	5	Laporan	17.000.000,00	APBD	5	Laporan	17.000.000,00
7	01	01	2.03											
					Administrasi Umum									
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat	Kecamatan Bebandem	800	Lembar	15.000.000,00	APBD	800	Lembar	15.000.000,00
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	35.000.000,00	APBD	12	Bulan	40.000.000,00
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Kecamatan Bebandem	13	Buah	5.000.000,00	APBD	13	Buah	5.000.000,00
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayarkan	Kecamatan Bebandem	48	Bulan	58.800.000,00	APBD	48	Bulan	58.800.000,00
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Kecamatan Bebandem	100	%	44.000.000,00	APBD	100	%	44.000.000,00
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	15.000.000,00	APBD	12	Bulan	15.000.000,00
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	10.000.000,00	APBD	12	Bulan	10.000.000,00
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	100	%	5.000.000,00	APBD	100	%	5.000.000,00
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	10.000.000,00	APBD	12	Bulan	10.000.000,00
				16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	116.000.000,00	APBD	12	Bulan	116.000.000,00
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	Kecamatan Bebandem	1	Tahun	22.000.000,00	APBD	1	Tahun	35.000.000,00
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	40.000.000,00	APBD	12	Bulan	40.000.000,00
				22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	Kecamatan Bebandem	1	Paket	10.000.000,00	APBD	1	Paket	50.000.000,00
				23	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase Rumah Dinas yang representatif	Kecamatan Bebandem	100	%	20.000.000,00	APBD	100	%	20.000.000,00
				24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	2	Unit	20.000.000,00	APBD	2	Unit	65.000.000,00
				28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kecamatan Bebandem	1	Unit	40.000.000,00	APBD	1	Unit	240.000.000,00
				30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kecamatan Bebandem	8	Unit	93.700.000,00	APBD	8	Unit	181.200.000,00
				34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Bebandem	15	Unit	15.000.000,00	APBD	15	Unit	15.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
				Volume	Satuan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TEPAT WAKTU	Kecamatan Bebandem	100	%	291.000.000,00	APBD		100	%	291.000.000,00
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					230.250.000,00					230.250.000,00
				02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Bebandem	8	Desa	230.250.000,00	APBD		8	Desa	230.250.000,00
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					60.750.000,00					60.750.000,00
				01		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Bebandem	200	Ijin/Non Perijinan	30.375.000,00	APBD		200	Ijin/Non Perijinan	30.375.000,00
				02		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Bebandem	200	Ijin/Non Perijinan	30.375.000,00	APBD		200	Ijin/Non Perijinan	30.375.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA	PERSENTASE PENYELENGGRAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Kecamatan Bebandem	100	%	96.000.000,00	APBD		100	%	110.000.000,00
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					96.000.000,00					110.000.000,00
				01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrembang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kecamatan Bebandem	21	Dokumen/B uku	21.000.000,00	APBD		21	Dokumen/B uku	35.000.000,00
				02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Kecamatan Bebandem	2	Sekolah	10.500.000,00	APBD		2	Sekolah	10.500.000,00
				03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Bebandem	8	Desa	64.500.000,00	APBD		8	Desa	64.500.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH DESA/KEL YANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN TERKENDALI	Kecamatan Bebandem	8	Desa	15.750.000,00	APBD		8	Desa	15.750.000,00
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah					15.750.000,00					15.750.000,00
				05		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	Kecamatan Bebandem	8	Desa	15.750.000,00	APBD		8	Desa	15.750.000,00
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI MASING-MASING DESA	Kecamatan Bebandem	100	%	90.750.000,00	APBD		100	%	90.750.000,00
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					90.750.000,00					90.750.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Bebandem	8	Desa	40.750.000,00	APBD		8	Desa	40.750.000,00
				03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kecamatan Bebandem	8	Desa	27.750.000,00	APBD		8	Desa	27.750.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kecamatan Bebandem	Kecamatan Bebandem	8	Desa	22.250.000,00	APBD		8	Desa	22.250.000,00
TOTAL										1.102.500.000,00					1.509.000.000,00
7	01				KECAMATAN SELAT										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Selat	100	%	1.066.250.000,00	APBD		100	%	1.066.250.000,00
7	01	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					5.000.000,00					5.000.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kecamatan Selat	2	dokumen	5.000.000,00	APBD		2	dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>					10.000.000,00					10.000.000,00
7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	Kecamatan Selat	2	dokumen	5.000.000,00	APBD		2	dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.02	09	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kecamatan Selat	5	dokumen	5.000.000,00	APBD		5	dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Umum</i>					1.051.250.000,00					1.051.250.000,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat dinas yang terkirim	Kecamatan Selat	12	bulan	3.000.000,00	APBD		12	bulan	3.000.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpun,air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Selat	12	bulan	24.000.000,00	APBD		12	bulan	24.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat.	Kecamatan Selat	8	Unit	3.600.000,00	APBD		8	Unit	3.600.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang terbayar	Kecamatan Selat	12	bulan	90.000.000,00	APBD		12	bulan	90.000.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	Kecamatan Selat	100	%	36.404.500,00	APBD		100	%	36.404.500,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Selat	12	bulan	20.408.800,00	APBD		12	bulan	20.408.800,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Selat	12	bulan	14.814.300,00	APBD		12	bulan	14.814.300,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kecamatan Selat	12	bulan	3.863.900,00	APBD		12	bulan	3.863.900,00
7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Selat	12	bulan	6.000.000,00	APBD		12	bulan	6.000.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Selat	12	bulan	150.000.000,00	APBD		12	bulan	150.000.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	Kecamatan Selat	12	bulan	23.400.000,00	APBD		12	bulan	23.400.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Selat	12	bulan	50.000.000,00	APBD		12	bulan	50.000.000,00
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	3	Unit	90.000.000,00	APBD		3	Unit	90.000.000,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kecamatan Selat	2	Unit	30.000.000,00	APBD		2	Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	2	Unit	50.000.000,00	APBD		2	Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Kecamatan Selat	1	Unit	150.000.000,00	APBD		1	Unit	150.000.000,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Selat	7	Unit	140.758.500,00	APBD		7	Unit	140.758.500,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Selat	15	Unit	100.000.000,00	APBD		15	Unit	100.000.000,00
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah penyengker gedung kantor yang direhab	Kecamatan Selat	1	Unit	65.000.000,00	APBD		1	Unit	65.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Selat	90	%	170.000.000,00	APBD		90	%	170.000.000,00
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				150.000.000,00						150.000.000,00
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Selat	6	Kegiatan	150.000.000,00	APBD		6	Kegiatan	150.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00						20.000.000,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Selat	200	rekomendasi	10.000.000,00	APBD		200	rekomendasi	10.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Selat	200	rekomendasi	10.000.000,00	APBD		200	rekomendasi	10.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
				Volume	Satuan				Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			96	%	75.000.000,00	APBD		96	%	75.000.000,00
7	01	03	2.01			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>						75.000.000,00					75.000.000,00
7	01	03	2.01	1		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Kecamatan Selat	1	kali	30.000.000,00	APBD		1	kali		30.000.000,00
7	01	03	2.01	2		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina tentang PKTP	Kecamatan Selat	3	sekolah	15.000.000,00	APBD		3	sekolah		15.000.000,00
7	01	03	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Selat	2	kegiatan	30.000.000,00	APBD		2	kegiatan		30.000.000,00
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kecamatan Selat	100	%	5.000.000,00	APBD		100	%		5.000.000,00
7	01	05	2.01			<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>						5.000.000,00					5.000.000,00
7	01	05	2.01	05		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kecamatan Selat	8	Desa	5.000.000,00	APBD		8	Desa		5.000.000,00
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangannya	Kecamatan Selat	90	%	35.000.000,00	APBD		90	%		35.000.000,00
7	01	06	2.01			<i>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>						35.000.000,00					35.000.000,00
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Selat	8	desa	5.000.000,00	APBD		8	desa		5.000.000,00
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kecamatan Selat	8	desa	20.000.000,00	APBD		8	desa		20.000.000,00
7	01	06	2.01	18		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan Selat	8	desa	10.000.000,00	APBD		8	desa		10.000.000,00
						TOTAL JUMLAH						1.351.250.000,00					1.351.250.000,00
7	01					KECAMATAN RENDANG											

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan laporan keuangan	Kec. Rendang	100%		1.005.070.000,00				100%		1.005.700.000,00	
7	01	1	1,01				10.000.000,00					10.000.000,00		
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7	01	1	1,01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kec. Rendang	12	buan	10.000.000,00	APBD	12	bulan	10.000.000,00
7	01	1	1,02										14.000.000,00	
					Administrasi Keuangan									
7	01	1	1,02	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kec. Rendang	12	bulan	4.000.000,00	APBD	12	bulan	4.000.000,00
7	01	1	1,02	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	Kec. Rendang	12	bulan	10.000.000,00	APBD	12	bulan	10.000.000,00
7	01	1	1,03										981.700.000,00	
					Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		100%		981.070.000,00		100%		981.700.000,00
				1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	Kec. Rendang	375	lembar	3.000.000,00	APBD	375	lembar	3.000.000,00
				2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Rendang	36	rekening	20.000.000,00	APBD	36	rekening	20.000.000,00
				7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayar	Kec. Rendang	12	bulan	96.000.000,00	APBD	12	bulan	96.000.000,00
				8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan jasa tenaga Clening service	Kec. Rendang	12	bulan	25.000.000,00	APBD	12	bulan	25.000.000,00
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kec. Rendang	12	bulan	10.000.000,00	APBD	12	bulan	10.000.000,00
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kec. Rendang	12	bulan	10.000.000,00	APBD	12	bulan	10.000.000,00
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Rendang	12	bulan	5.000.000,00	APBD	12	bulan	5.000.000,00
				15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kec. Rendang	12	bulan	9.500.000,00	APBD	12	bulan	9.500.000,00
				16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kec. Rendang	12	bulan	125.500.000,00	APBD	12	bulan	125.500.000,00
				17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Rendang	12	bulan	10.000.000,00		12	bulan	10.000.000,00
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Rendang	12	bulan	40.000.000,00	APBD	12	bulan	40.000.000,00
				21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kec. Rendang	2	unit	8.000.000,00	APBD	2	unit	8.000.000,00
				22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kec. Rendang	1	unit	20.000.000,00	APBD	1	unit	20.000.000,00
				23	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kec. Rendang	1	unit	20.000.000,00	APBD	1	unit	20.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Kec. Rendang	2	unit	20.000.000,00	APBD		2	unit	20.000.000,00		
	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Rendang	2	unit	300.000.000,00	APBD		2	unit	300.000.000,00		
	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Kec. Rendang	13	unit	197.070.000,00	APBD		13	unit	197.700.000,00		
	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Rendang	25	unit	12.000.000,00	APBD		25	unit	12.000.000,00		
	36	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Rendang	1	unit	50.000.000,00	APBD		1	unit	50.000.000,00		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu							230.000.000,00		
7	1	2	2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								190.000.000,00		
7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Rendang	6	desa	190.000.000,00		6	desa	190.000.000,00
7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							40.000.000,00		
7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah ijin yang terbit dan dilayani	Kec. Rendang	50	ijin	20.000.000,00	APBD	50	ijin	20.000.000,00
7	1	2	2,04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah ijin dan non perijinan yang terbit dan dilayani	Kec. Rendang	50	ijin	20.000.000,00	APBD	50	ijin	20.000.000,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						80.000.000,00		
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							80.000.000,00		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrembang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kec. Rendang	6	desa	25.000.000,00	APBD	6	desa	25.000.000,00
7	1	3	2,01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Kec. Rendang	3	sekolah	30.000.000,00	APBD	3	sekolah	30.000.000,00
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Rendang	6	desa	25.000.000,00	APBD	6	desa	25.000.000,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungannya terkendali	Kec. Rendang	60%		10.000.000,00		60%		10.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
				Volume	Satuan				Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	1	5	2,01			10.000.000,00					10.000.000,00			
7	1	5	2,01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat.	Kec. Rendang	6	desa	10.000.000,00	APBD	6	desa	10.000.000,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang pengelolaan keuangan desanya baik	Kec. Rendang	100%		85.000.000,00		100%		85.000.000,00
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					85.000.000,00				85.000.000,00
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Rendang	6	desa	30.000.000,00	APBD	6	desa	30.000.000,00
7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	Kec. Rendang	6	desa	25.000.000,00	APBD	6	desa	25.000.000,00
7	1	6	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang pelaksanaan kegiatannya dimonitoring dievaluasi dan dilaporkan	Kec. Rendang	6	desa	30.000.000,00	APBD	6	desa	30.000.000,00
JUMLAH										1.410.070.000,00				1.410.700.000,00
7	01				KECAMATAN SIDEMEN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kec. Sidemen	100	%	710.200.000,00	APBD	100	%	781.220.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terencana dan terevaluasinya kinerja perangkat daerah	Kec. Sidemen	12	Bulan	12.500.000,00	APBD	12	Bulan	13.750.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Sidemen	12	Bulan	12.500.000,00	APBD	12	Bulan	13.750.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Tersusunnya administrasi keuangan yang akuntabel	Kec. Sidemen	12	Bulan	4.500.000,00	APBD	12	Bulan	4.950.000,00
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	Kec. Sidemen	12	Bulan	4.500.000,00	APBD	12	Bulan	4.950.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum					693.200.000,00				762.520.000,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Sidemen	12	Bulan	33.000.000,00	APBD	12	Bulan	36.300.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sidemen	12	Bulan	35.400.000,00	APBD	12	Bulan	38.940.000,00
7	01	01	2.03	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional	Kec. Sidemen	2	Unit	50.600.000,00	APBD	12	Bulan	55.660.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Sidemen	12	Bulan	3.000.000,00	APBD	12	Bulan	3.300.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa pembantu administrasi keuangan	Kec. Sidemen	12	Bulan	52.200.000,00	APBD		12	Bulan	57.420.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanannya Kebersihan kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	37.400.000,00	APBD		12	Bulan	41.140.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	20.000.000,00	APBD		12	Bulan	22.000.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan	Kec. Sidemen	12	Bulan	10.000.000,00	APBD		12	Bulan	11.000.000,00
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	8.800.000,00	APBD		12	Bulan	9.680.000,00
7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sidemen	12	Bulan	7.200.000,00	APBD		12	Bulan	7.920.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	100.000.000,00	APBD		12	Bulan	110.000.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya Makanan dan Minuman	Kec. Sidemen	12	Bulan	25.000.000,00	APBD		12	Bulan	27.500.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Terlaksanannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Kec. Sidemen	12	Bulan	60.000.000,00	APBD		12	Bulan	66.000.000,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	Kec. Sidemen	20	Buah	25.000.000,00	APBD		12	Bulan	27.500.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Kec. Sidemen	4	Unit	30.000.000,00	APBD		12	Bulan	33.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	20.000.000,00	APBD		12	Bulan	22.000.000,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kec. Sidemen	12	Bulan	155.600.000,00	APBD		12	Bulan	171.160.000,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Sidemen	12	Bulan	20.000.000,00	APBD		12	Bulan	22.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sidemen	12	Bulan	194.600.000,00	APBD		12	Bulan	214.060.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Sidemen	12	Bulan	133.600.000,00	APBD		12	Bulan	146.960.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Sidemen	12	Bulan	133.600.000,00	APBD		12	Bulan	146.960.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sidemen	12	Bulan	61.000.000,00	APBD		12	Bulan	67.100.000,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kec. Sidemen	12	Bulan	26.000.000,00	APBD		12	Bulan	28.600.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Kec. Sidemen	12	Bulan	35.000.000,00	APBD		12	Bulan	38.500.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kec. Sidemen	10	Desa	101.800.000,00	APBD		10	Desa	111.980.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Sidemen	10	Desa	101.800.000,00	APBD		10	Desa	111.980.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Sidemen	10	Desa	42.600.000,00	APBD		10	Desa	46.860.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kec. Sidemen	10	Desa	16.000.000,00	APBD		10	Desa	17.600.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Sidemen	10	Desa	43.200.000,00	APBD		10	Desa	47.520.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sidemen	2	Desa	35.000.000,00	APBD		2	Desa	38.500.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Sidemen	2	Desa	35.000.000,00	APBD		2	Desa	38.500.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terfasilitasinya pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sidemen	2	Desa	21.000.000,00	APBD		2	Desa	23.100.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pembinaan pengelolaan keuangan desa	Kec. Sidemen	10	Desa	14.000.000,00	APBD		2	Desa	15.400.000,00
Jumlah										1.041.600.000,00					1.145.760.000,00
7	01				KECAMATAN MANGGIS										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Manggis	100	%	915.000.000	APBD		100	%	915.000.000
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.500.000			-	-	12.500.000
				01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kec. Manggis	2	Dokumen	12.500.000	APBD		2	Dokumen	12.500.000
													-	-	-
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang tersusun				22.500.000			-	-	22.500.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				Volume	Satuan				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	Kec. Manggis	1	dokumen	12.500.000	APBD		1	dokumen	12.500.000
	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Manggis	5	Dokumen	10.000.000	APBD		5	Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.03	Administrasi Umum			880.000.000			-	-	880.000.000
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat -surat dinas yang terkirim	Kec. Manggis	12	bulan	1.500.000	APBD		12	bulan	1.500.000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Manggis	12	bulan	40.000.000	APBD		12	bulan	40.000.000
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Manggis	8	unit	4.500.000	APBD		8	unit	4.500.000
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan tenaga administrasi keuangan yang terbayar	Kec. Manggis	12	bulan	140.000.000	APBD		12	bulan	140.000.000
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Tenaga Kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor yang	Kec. Manggis	12	bulan	25.000.000	APBD		12	bulan	25.000.000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Alat tulis kantor yang ters	Kec. Manggis	12	bulan	15.000.000	APBD		12	bulan	15.000.000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan yang ters	Kec. Manggis	12	bulan	8.000.000	APBD		12	bulan	8.000.000
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Manggis	12	bulan	4.000.000	APBD		12	bulan	4.000.000
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan surat kabar /bahan bacaan lainnya yang tersedia	Kec. Manggis	12	bulan	5.000.000	APBD		12	bulan	5.000.000
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan logistik dan sarana upacara yang tersedia	Kec. Manggis	12	bulan	130.000.000	APBD		12	bulan	130.000.000
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Manggis	12	bulan	20.000.000	APBD		12	bulan	20.000.000
	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Manggis	12	bulan	55.000.000	APBD		12	bulan	55.000.000
	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kec. Manggis	2	Unit	70.000.000	APBD		2	Unit	70.000.000
	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kec. Manggis						-	-	-
	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kec. Manggis	16	buah	50.000.000	APBD		16	buah	50.000.000
	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kec. Manggis	10	unit	75.000.000	APBD		10	unit	75.000.000
	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kec. Manggis						-	-	-
	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Manggis	1	unit	5.000.000	APBD		1	unit	5.000.000
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Manggis	3	unit	30.000.000	APBD		3	unit	30.000.000
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan jasa tenaga sopir	Kec. Manggis	8	unit	132.000.000	APBD		8	unit	132.000.000
	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Manggis						-	-	-

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
				Volume	Satuan				Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Manggis	5	Paket	20.000.000	APBD	5	Paket	20.000.000		
	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	Kec. Manggis					-	-	-		
	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah penyengker gedung kantor yang direhab	Kec. Manggis	1	unit	50.000.000	APBD	1	unit	50.000.000		
									-	-	-		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kec. Manggis	90	%	90.000.000	APBD	90	%	90.000.000	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80.000.000		-	-	80.000.000	
			02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	6	kegiatan	80.000.000	APBD	6	kegiatan	80.000.000
									-	-	-		
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Manggis			10.000.000		-	-	10.000.000
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah pendampingan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	-	-	-		-	-	-
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan nonperijinan yang dikeluarkan	Kec. Manggis	500	rekomendasi	10.000.000	APBD	500	rekomendasi	10.000.000
									-	-	-		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec. Manggis	90	%	75.000.000	APBD	90	%	75.000.000
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Manggis			75.000.000		-	-	75.000.000
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	1	kali	25.000.000	APBD	1	kali	25.000.000
			02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina tentang PKTP	Kec. Manggis	3	sekolah	15.000.000	APBD	3	sekolah	15.000.000
			03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	3	kegiatan	35.000.000	APBD	3	kegiatan	35.000.000
									-	-	-		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Manggis	90	%	5.000.000	APBD	90	%	5.000.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Manggis			5.000.000		-	-	5.000.000
			05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Manggis	12	desa	5.000.000	APBD	12	desa	5.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06							-	-	-
7	01	06							90	%	85.000.000
7	01	06	2.01						-	-	85.000.000
				02					12	desa	40.000.000
				03					12	Desa	25.000.000
				18					12	desa	20.000.000
TOTAL									1.170.000.000		1.170.000.000
8											
8.01											
8.01	01										
8.01	01	01							1.439.375.000,00		1.439.174.400,00
8.01	01	01	1.02						57.000.000,00		57.000.000,00
8.01	01	01	1.02	06					57.000.000,00		57.000.000,00
8.01	01	01	1.03						1.382.375.000,00		1.382.174.400,00
8.01	01	01	1.03	01					2.300.000,00		2.300.000,00
8.01	01	01	1.03	02					42.000.000,00		42.000.000,00
8.01	01	01	1.03	06					20.000.000,00		20.000.000,00
8.01	01	01	1.03	07					446.899.400,00		446.899.400,00
8.01	01	01	1.03	08					38.400.000,00		38.400.000,00
8.01	01	01	1.03	09					35.000.000,00		35.000.000,00
8.01	01	01	1.03	10					40.000.000,00		40.000.000,00
8.01	01	01	1.03	11					25.000.000,00		25.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8.01	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	Karangasem	100	Persen	17.000.000,00	APBD		100	Persen	17.000.000,00
8.01	01	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Karangasem	100	Persen	28.000.000,00	APBD		100	Persen	28.000.000,00
8.01	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Karangasem	100	Persen	11.000.000,00	APBD		100	Persen	11.000.000,00
8.01	01	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Karangasem	100	Persen	50.000.000,00	APBD		100	Persen	50.000.000,00
8.01	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Karangasem	100	Persen	60.000.000,00	APBD		100	Persen	60.000.000,00
8.01	01	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Karangasem	100	Persen	138.075.000,00	APBD		100	Persen	138.075.000,00
8.01	01	01	1.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	Karangasem	100	Persen	86.550.000,00	APBD		100	Persen	86.550.000,00
8.01	01	01	1.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Karangasem	100	Persen	20.000.000,00	APBD		100	Persen	20.000.000,00
8.01	01	01	1.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Karangasem	100	Persen	46.750.000,00	APBD		100	Persen	46.750.000,00
8.01	01	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Karangasem	100	Persen	20.000.000,00	APBD		100	Persen	20.000.000,00
8.01	01	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Karangasem	100	Persen	208.400.600,00	APBD		100	Persen	208.200.000,00
8.01	01	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Karangasem	100	Persen	27.000.000,00	APBD		100	Persen	27.000.000,00
8.01	01	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Karangasem	100	Persen	20.000.000,00	APBD		100	Persen	20.000.000,00
8.01	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.477.592.600,00					2.477.592.600,00
8.01	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.477.592.600,00					2.477.592.600,00
8.01	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pelatihan kader Bela Negara	Karangasem	100	Persen	100.000.000,00	APBD		100	Persen	100.000.000,00
						Tersusunnya rencana aksi	Karangasem	100	Persen	655.787.800,00	APBD		100	Persen	655.787.800,00
						1).Terpenuhinya pelaksanaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. 2). Terlaksananya sosialisasi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Karangasem	100	Persen	35.000.000,00	APBD		100	Persen	35.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1). Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan 2). Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Karangasem	100	Persen	112.280.000,00	APBD		100	Persen	112.280.000,00
						Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Karangasem	100	Persen	736.800.000,00	APBD		100	Persen	736.800.000,00
						Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	Karangasem	100	Persen	491.937.000,00	APBD		100	Persen	491.937.000,00
8.01	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila	Karangasem	100	Persen	345.787.800,00	APBD		100	Persen	345.787.800,00
8.01	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					523.000.000,00					523.000.000,00
8.01	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					523.000.000,00					523.000.000,00
8.01	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terlaksanya pendidikan politik kepada masyarakat 2). Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat	Karangasem	100	Persen	160.000.000,00	APBD		100	Persen	160.000.000,00
						1). Terlaksanya Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa 2). Meningkatnya Pemahaman Wawasan Politik Masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	Karangasem	100	Persen	200.000.000,00	APBD		100	Persen	200.000.000,00
8.01	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi antara pemerintah dengan Partai Politik 2). Terjalannya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan partai politik	Karangasem	100	Persen	100.000.000,00	APBD		100	Persen	100.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol. 2). Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Keuangan Parpol 3). Termonitornya Penggunaan Bantuan keuangan parpol	Karangasem	100	Persen	63.000.000,00	APBD		100	Persen	63.000.000,00
8.01	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					210.000.000,00					210.000.000,00
8.01	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					210.000.000,00					210.000.000,00
8.01	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1). Terfasilitasinya pendataan organisasi kemasyarakatan di daerah 2). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan politik	Karangasem	100	Persen	60.000.000,00	APBD		100	Persen	60.000.000,00
8.01	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengajuan Dana Hibah 2). Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Dana Hibah 3). Termonitornya Penggunaan bantuan dana hibah	Karangasem	100	Persen	60.000.000,00	APBD		100	Persen	60.000.000,00
						Terbentuknya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 2). Terlaksana Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 3). Termonitornya /Terpantaunya Organisasi Kemasyarakatan di daerah	Karangasem	100	Persen	90.000.000,00	APBD		100	Persen	90.000.000,00
8.01	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					955.000.000,00					955.000.000,00
8.01	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					955.000.000,00					955.000.000,00

KODE					Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Karangasem	Karangasem	100	Persen	75.000.000,00	APBD		100	Persen	75.000.000,00
						Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan mikol	Karangasem	100	Persen	103.226.250,00	APBD		100	Persen	103.226.250,00
						Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi	Karangasem	100	Persen	283.830.600,00	APBD		100	Persen	283.830.600,00
						Terlaksananya kegiatan pelatihan kader penyuluh pekat bagi guru-guru di Kabupaten Karangasem	Karangasem	100	Persen	312.943.150,00	APBD		100	Persen	312.943.150,00
8.01	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial	Karangasem	100	Persen	30.000.000,00	APBD		100	Persen	30.000.000,00
						Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	Karangasem	100	Persen	150.000.000,00	APBD		100	Persen	150.000.000,00
8.01	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.807.720.000,00					1.807.720.000,00
8.01	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.807.720.000,00					1.807.720.000,00
8.01	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1). terwujudnya mediasi penanganan konflik sosial 2). Meningkatkan pemahaman tentang konflik sosial 3). Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial	Karangasem	100	Persen	320.000.000,00	APBD		100	Persen	320.000.000,00
8.01	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1). persentase cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat 2). meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini masyarakat	Karangasem	100	Persen	227.720.000,00	APBD		100	Persen	227.720.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1). Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegah kejahatan 2). Terlaksanya penyuluhan teknik pencegahan tindak kriminal	Karangasem	100	Persen	86.000.000,00	APBD		100	Persen	86.000.000,00
		Terjalannya hubungan kerjasama dengan para anggota Kominda guna memperlancar pelaksanaan Tugas komunitas Intelijen daerah	Karangasem	100	Persen	900.000.000,00	APBD		100	Persen	900.000.000,00
		Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan terjalannya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	Karangasem	100	Persen	274.000.000,00	APBD		100	Persen	274.000.000,00
		JUMLAH				7.412.687.600,00					7.412.487.000,00
		JUMLAH TOTAL				1.159.705.280.183,92					1.251.683.221.029,58

LAMPIRAN IV
BERITA ACARA HASIL
PEMETAAN/MAPPING PROGRAM DAN
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 DENGAN NOMENKLATUR
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
PADA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	28	Kecamatan Karangasem
2	Dinas Kesehatan	29	Kecamatan Abang
3	RSUD	30	Kecamatan Kubu
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31	Kecamatan Bebandem
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32	Kecamatan Selat
6	Dinas Pemadam Kebakaran	33	Kecamatan Rendang
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	Kecamatan Sidemen
8	Dinas Sosial	35	Kecamatan Manggis
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	36	Inspektorat Daerah
10	Dinas Perhubungan	37	Bappelitbangda
11	Dinas Lingkungan Hidup	38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40	Dinas Ketenagakerjaan
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	Satuan Polisi Pamong Praja
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
16	Dinas Ketahanan Pangan		
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
18	Dinas Komunikasi dan Informatika		
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
20	Dinas Kebudayaan		
21	Dinas Pariwisata		
22	Dinas Pertanian		
23	Dinas Perikanan		
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
25	Sekretariat Daerah		
26	Kesbangpollinmas		
27	Sekretariat Dewan		



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/447/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal **Sebelas** bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irida, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - e. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang pendidikan dengan out put Terbiayainya Pendidikan S1 bagi siswa SMA/SMK berprestasi bukan merupakan kewenangan kabupaten, selanjutnya diajukan untuk dibahas ditingkat pimpinan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.
2. Dilengkapi dengan kode rekening terhadap program kegiatan yang dipetakan

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUKI MAJUMAH	KH. M. HADJI M. HADJI	
2	I Ketut Arta Putra	ang / kabang	
3	I G. Suparman	IPA / G. Suparman	
4	I Way Sany	Sebidia disidipm	
	ROFIQAH	kab. Sany	
	Mi Wayan Erawati	Pang Organisasi / kab	
7	IEB WICAKANTA	Keperawatan / SEKORAN	
8	I MADE SUADNYANA	Kepriband / Kabid Koordinasi	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura


BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/448/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Kesehatan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Nguro	Ka. Bappelitbangda	
2	I Ketut Arta Rama	ang. Hukum	

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
3	I G. Gunggrong	USA / sekretaris	
4	NI Wini Eraniati	Manajemen Organisasi / kesa	
5	NI Ningsih Wati	Geo. Sumbang Sumbang Dikas	
6	IBB BERNANTARA	Perwakilan / sekretaris	
7	I Made Suardyana	Perwakilan / Kepala Tim	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura





BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/449/Bappelitbangda

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Rumah Sakit Umum Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Plodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Amanah pengelolaan anggaran BLUD sesuai permendagri 79 tahun 2018 diamanahkan untuk anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD disusun dalam 1 program dan 1 kegiatan 1 output. Untuk anggaran yang bersumber dari dana di luar pendapatan BLUD dimungkinkan dalam program yang sama namun sub kegiatannya berbeda.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nugraha	Ka. Pappelitsbangas	
2	Iketut Arta Istama	ang / luty	
3	Ika Sugandhya	itd / sekretaris	
4	NI Wynn Erawati	Pang. Organisasi / kab	
5	Made Suardyana	Kappelitsbangas / Kabid PAK	
6	IDA Bgr Pektini	rsun / Sunproy	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/452/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan alat berat belum ditemukan pada permendagri 90, untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Sementara ditempatkan pada item belanja pada sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan.
3. Kegiatan Pengadaan Tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan di luar Jalan untuk diusulkan kepusat dalam pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ali Mulya	Ka. Bappelittsanga	
2.	Ikhtiar Arman	Dum / Kabang	
3.	I. G. Supriyanto	Uz / Kaluwiris	
4.	I.N. SUTIRTAJASA	DPUR / Kati	
5.	Made Y. Widhazari	Kabid (PW)	
6.	LEB WIRANTARA	Bappelitbas / Sekran	
7.	I Putu Supar ditla	DPUR / Ksb. Sunprog	
8.	Swastiwingsih	Kabid Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/469/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni disepakati sementara masuk pada sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Selanjutnya untuk dilakukan koordinasi dan atau diusulkan dalam pemutakhiran ke Pusat melalui Provinsi.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suci Nugraha	Ka. Kappeltisangda	
2.	Kelvin Arta Putra	Wakil orang	
3.	I Made Subana	Insan I tda	
4.	10 B Womantara	Bappeltisangda / Sekban	
5.	Snastiningal	Kabid Litbangper	
6.	I Komang Yasa	Bappeltisangda / Ksb	
	Uda Tegus Agung	Bpkad / Kesubid	
1.	10 B Womantara	DISTERAKSI	
1	Kusmala Dewi	Sampwag Denpasar	
	I Made Purnamasari	Bappeltisangda / Insan Kertika 8	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT

Nomor : 050/468/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pemadam Kebakaran** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aike Ngura	Ka Bappelitbangda	
2.	Iwade Subana	Ikbn I Itda	
3.	I Ketut Arta Putana	Uniq ang	
	Y Nyoman Smedipala	Bendahar / Sekas	
	I W. Pt. Mahendra	Budaulas / Suprog	
	I B W. KANTARA	Bappelitbangda / Sekpan	
	Ide Bagus Kury	BPKAD / Karubid	
	I Km Yasa	Bappelitbangda / Kab Pominidmud	
	I Mede Puspasana	Bappelitbangda / Kas Perkim & Baku	
	Suastaningas	Kab Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/467/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pilci Nugroho	Ka. Bappelitbangga	
2.	I Ketut Ardana	Wakil Peng	
3.	I Made Subana	INBWI Irci	
4.	I B B Wirono	Bappelitbangga/Sekban	
5.	Suastinugah	Kabid Litper	
6.	Putuika Puta Toton	Jabatan Pelaksana BPPD	
7.	Ula Bagus Agung	Spesial / Kasubid	
8.	I Km Yasa	Bappelitbangga/Asisten	
9.	I Made Purantama	Bappelitbangga / Perkim & Baku	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor ; 050/450/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Sosial** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam mapping tidak ditemukan pada urusan dinas Sosial, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Badan Kesbang Pol Linmas.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Nugro	Ka. Bappelitbangda	
2	I Luhut Arka Riana	ang / luhut	
3	I G. Sungsung	Waz / Sekretaris	
4	NI WGN Erawan	Pony Programari / ksb	
5	I Kt Sutama	Dinas Sosial	
6	I B B W... ..	WAPPELITBANGDA / SEKPTN	
7	IMade Guadnyana	Bappelitbangda / koord. Bm	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/472/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPD dan Kegiatan Pembinaan Bagi Pengurus dan Pengawas LPD dimasukkan pada sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Hasil pemetaan lebih lanjut untuk diperbaiki dalam matrik sesuai dengan format yang sudah disampaikan

4. Hasil Pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Fiki Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2	I Wntu Arta Sulan	lurah ong	
3	Soeprojogi	samprog Dikumkan	
4.	I Mule Subawa	lurah I Tala	
5	I B B Wronantra	Bappelitbangda / Sekban	
6	Quastuningas	Bappelitbangda / Kabid	
	Uda Nugus Agung	Bpkasid / Kasubid	
	I Gae Raul	Bappelitbangda	
	Dani Wihardhi	Diskop	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/453/Bappelitbangda

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Perhubungan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS untuk di Koordinasikan dan dikonsultasikan lebih lanjut.
2. Untuk kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan belum ditemukan dalam pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019. Untuk selanjutnya dikoordinasikan lebih lanjut ke Provinsi oleh Dinas Perhubungan. Sementara masuk pada sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan

Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berjalan lintas untuk dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan ke Provinsi dan atau dibahas lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Pendidikan.
4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Piki Nugroho	Ka. Bappelitbangda	
1	Hutut Attahilmi	Anggota / Widyaiswara	
	Ilda Bagus Antarkesa	DISHUB / Rumpusray	
	Made W. Wibha Sari	Kabtel (FW)	
	IGB WIMANTARA	SEKSI	
	Quasfiringas	Kabid Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/470/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Lingkungan Hidup** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk penataan RTH khusus di Tugu Pahlawan Ciung Wanara sesuai hasil pemetaan Permendagri 90 dikeluarkan dari Renja DLH karena merupakan kewenangan Dinas Sosial, Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3A dan Dinas Perhubungan.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sike Ngura	Ka. Bappelitbangda	
2.	Ikatut Anta Utama	kebang ong	
3.	I Mude Subana	Insan E lida	
4.	IBB WIDAYATI	Bappelitbangda / Sekban	
5.	I Gede Rany	Bappelitbangda / Kabid. ERDA	
	I Putu Eka Suardika	Korbid Desa / Bappelitbangda	
	Ula Bagus Azmy	BPKAD / Korbid	
	I G. A. W. Wiluna	DLT / Kambh	
	Susanto Wina	Kabid Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/481/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenkiatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan nomenkiatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan B aya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat dihilangkan dari Renja Tahun 2021 menjadi urusan Bagian Organisasi.
3. Untuk kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan kegiatan lainnya yang bersumber dari DAK Non Fisik sementara masuk di sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya

untuk di cermati secara menyeluruh sub-sub kegiatan yang ada pada permendagri 90 bersama bidang koordinasi.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	IGB OEBIKANTARA	BAPDEULTIRANEGDA / SEKSI	
2	Ikut Artu Utama	Org Pntda / Kabag	
3	Made Suadnyana	Bappalitbangda / Kabid Pntu	
4	Grafingus	Kabid Litbangper	
5	I Nyoman Suparwa	Disduk Ceyid	
	IN Duta	Hda / Irtan II	
	Ula Bagus Agung	BPKAD / Kasubid	
	I Km Try Endrawan	Disdukcapil	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/476/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUKI NEURAH	KA. Bappelitbangs	
2.	I Ketut Arta Widana	Bagan peng	
3.	I Ketut Susarna	Hda / Auditor Madya	
4.	I B B Wronowidana	Bappelitbangs / Sekwan	
5.	Suasti Winingsih	Bappelitbangs / Kabid	
6.	I Made Sualyana	Bappelitbangs / Kabid Pk	
7.	Ira Bagus Agung	BPRAD / Karubil	
8.	Puteh Yuliani	DPPKB	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/474/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pilci Nurah	Ka. Bappeletbangda	
2.	I Ketut Suwarna	Hdn / Auditor Madya	
3.	I Ketut Arta Endang	Kubung ang	
4.	I G B W... ..	Bappeletbangda / Sekwan	
5.	Suastiningas	Bappeletbangda / Kabid	
6.	I Made Agung	Bappeletbangda / Kabid P... ..	
7.	Lda Bagus Agung	Bp... .. / Kabid	
8.	Ni Wyan Sutimawati	DP3 A	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura





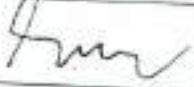
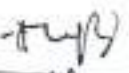

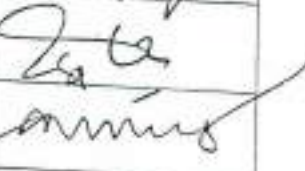
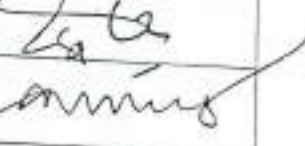
BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/471/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Kegiatan Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan tergabung dalam satu sub kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
3. Kegiatan Monitoring dan evaluasi masuk pada sub kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nugrah	Ka. Bappelitbangda	
2.	Ikhlas Arta Sulan	Kabag. Org	
3.	I Made Subana	Insan S. Lada	
4.	I B B Wicaksono	Bappelitbangda / Setban	
	I Geel Ranih	Bappelitbangda	
	I Wayan Murtayasa	DEMPDOP / Plt. Kabag. Periz.	
	Ide Bagus Agung	PapikAD / Kasubid	
	NI L. PT YAYUK. S	DEMPDOP / Kasubag	
	Quastiningas	Kabid. Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/457/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan ketersediaan pangan untuk dimasukkan ke sub kegiatan pengadaan cadangan pangan daerah kabupaten.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Nugroho	Ka. Bappeli Surabaya	
2.	I W Sudarsono	Wda / Wpektorat	
3.	I Ketut Arta Putera	Wakil Peng	
4.	I Gede Rauh	Bappeltambang	
5.	Ni Luh Pt Eka Adnyani	Plk. Pangan	
	I G B Caturmurti	Bappeltambang / Sekban	
	Estininggil	Bappeltambang / Kabid	
	Uti Supus Ayu	Bappeltambang / Kasubid	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/473/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan Pembinaan Desa Siaga Aktif masuk pada sub kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Ngurah	Ka. Bappelitbangda	
2	Wuluf Arta Pratama	Kubang ang	
3	1 Ketut Sewardana	Hda / Auditor Madya	
4	1 GB W. W. W. W. W.	Bappelitbangda / Sekban	
5	Estining Sis	Bappelitbangda / Kabid	
6	1 Made Sedyana	Bappelitbangda / Kabid	
	1a Nyus Agung	BPRAD / Kasubid	
8	1 Wp Sudana	DPMD	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/454/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT


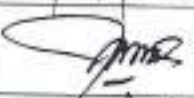

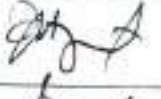

Nomor : 050/446/Bappelitbangda

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SIH NOUTAM	KA. BAPPELITBANGDA	

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
2	I Ketut Aita Sitama	anggota / kabag	
3	I G. Sanyudana	iata / sekretaris	
4	NI Wayan Erawati	organisasi sekolah / guru	
5	Nyoman Tevok	Dipusat / kepala prog	
6	Made Suardyana	Bappalit bagda / koord. kordinasi	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/475/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Kebudayaan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan pemahaman sastra agama dengan indikator pembinaan utsawa darma gita yang semula dipetakan masuk pada sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan disepakati dipindahkan ke sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SITI KURNIAH	Ka. Bappelitbang	
2.	I Ketut Arta Widana	lembing sura	
3.	I Ketut Susanna	Hda / Auditor Madya	
4.	I B B WICAKARTIKA	Bappelitbang / Sekban	
5.	Guastiningas	Bappelitbang / Kabid	
6.	I Made Fucayana	Reg. mistlogis / Kasid Pura	
	Ira Bagus Agung	Bperso / Kasid	
	I Kom Budiarta	Dusbud / Sumpras	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

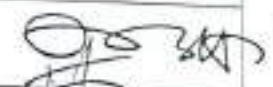
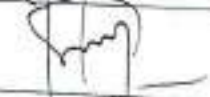

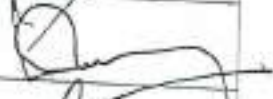
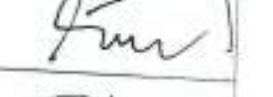


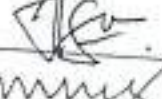

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/458/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pariwisata** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Untuk tenaga pemungut retribusi masuk ke sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja dalam Permendagri 90 tahun 2019.
 - c. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - d. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - e. Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/Dokumen masuk ke item Belanja pada sub kegiatan di bawah subag umum.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pilci Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2	I Ketut Arta Istana	Wakil Ketua	
3	I G. Sumantri	Wakil Sekretaris	
A.	I K. SETANA MERTA	Kadispar	
5	I Gede Raul	Bappelitbangda	
6	Gede Hlanda Sepura	Dispar	
7	I G B CORONUTARA	Bappelitbangda / Kabda	
8	Uu Bayus Agung	BPKAD / Kamling	
9	Suastiningal	Bappelitbangda / Kabda	

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/455/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Pertanian** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan Pembangunan gedung kantor dikeluarkan dari Renja 2021 dinas pertanian dan menjadi kewenangan Dinas PUPR.
3. Untuk sementara Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan diampu oleh Bidang Tanaman Pangan dengan melibatkan Bidang Hortikultura dan Bidang Perkebunan. Lebih lanjut dinas Pertanian berkoordinasi dengan provinsi.

4. Untuk Program Peningkatan Produksi Pertanian masuk ke sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
5. Dari hasil pemetaan sesuai point 3 dan 4 untuk dilakukan pengkajian kembali oleh Bagian Organisasi berkaitan bidang-bidang sesuai struktur yang ada saat ini pada dinas pertanian terutama yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk efektifitas kelembagaan.
6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian belum ditemukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan pada Permendagri 90 tahun 2019. Selanjutnya untuk diusulkan dan dikoordinasikan dalam pemutakhiran ke pusat melalui provinsi.
7. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nugraha	Ka. Bappelitbang	
2.	I Ketut Arta Satriana	Kelompok Organisasi	
3.	J. Wayan Sudarso	Indo	
4.	IPUTU SILITHA ANTARA	DIKTAM / BERSOLA	
5.	Ibada Rauh	Bappelitbang	
6.	Ula Karyas Agung	Bppan / Kesambi	
7.	Puhut Rahayu Apriani	Distan / Sunprag	
8.	I B B WIDYANTARA	Bappelitbang / Seklax	
9.	Sura Finingsih	Bappelitbang / Kabid	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/456/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Perikanan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Silei Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2.	W. Sударjana Wida / Muzliksu		
3	Iketut Hita Rina	Manajemen	
4			
5	I Gede Raul	Bappelitbangda	
6	Aty Sun W	Pemerintah	
	IB B OROTORA	Bappelitbangda / Sekban	
	Suastiningal	Bappelitbangda / Kabid	
	Ida Sari Remy	Bppert / Kamdi	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT


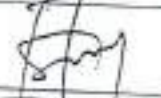
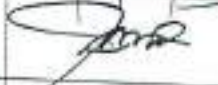



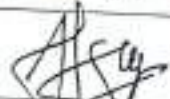
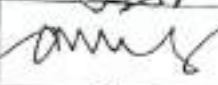

Nomor : 050/459/Bappelitbangda

Pada hari Ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Blaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pembangunan Gedung Kantor (Pos Satpam) tidak menjadi prioritas dandikeluarkan dari renja 2021.

3. Untuk kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dalam Permendagri 90 merupakan kewenangan provinsi sementara dikeluarkan dari Renja 2021 Disperindag selanjutnya untuk berkoordinasi lebih lanjut ke provinsi.
4. Untuk kegiatan pengawasan pupuk pestisida yang sebelumnya muncul di Renja Dinas Pertanian sesuai permendagri 90 menjadi kewenangan dinas Perindustrian dan sudah dirancang di Renja Dinas Perindustrian Tahun 2021.
5. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2	I Ketut Arta Brana	Kebay. Ong	
3	I G. Sanyadana	Wab. / Sekonekang	
4	I Gede Lela Satrio	Wapandag	
5	I Made Puja Suastana	Disperindag	
6	I B B Wironotara	Bappelitbangda / Sekda	
7	I G. Bagus Agung	Bisnis / Kambid	
8	Suastiningas	Bappelitbangda / Kabid	
9	I Gede Raul	Bappelitbangda	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/480/Bappelitbangda


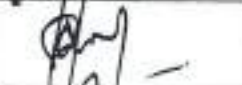
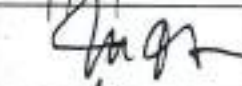
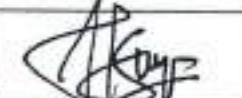
Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Sekretariat Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Penataan halaman dan taman kantor masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Kegiatan Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan output pembayaran PBB Rumah Jabatan dan Rumah Dinas, tidak ditemukan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 sementara dimasukkan ke sub kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga. Kepastian apakah Obyek dimaksud merupakan Objek Pajak PBB untuk dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan melibatkan Setda dan BPKAD.

3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah tingkat Kabupaten sesuai Renja Awal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Adpem, sementara hasil pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat pada Urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesbang Pol Linmas pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Bagian Adpem dan Badan Kesbang Pol Linmas.
4. luran Forsesdasi di bagian Organisasi diampu oleh Bagian Pemerintahan
5. Kegiatan penyusunan standar satuan harga dikeluarkan dari Renja Setda Bagian Ekonomi karena menjadi kewenangan BPKAD. Untuk dibahas lebih lanjut dengan melibatkan BPKAD dan Bagian Ekonomi
6. Untuk kegiatan pembinaan Regu Penyanyi dan Perayaan har-hari besar nasional dan daerah dengan item belanja Karang Bunga, Kartu Ucapan dan Baliho masuk pada sub kegiatan Fasilitas Keprotokolan.
7. Kegiatan Rapat Rutin dan Rapat Kerja yang semula diampu oleh Bagian Organisasi masuk pada sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada bagian PP. Perlu dilakukan rapat pembahasan lebih lanjut yang melibatkan Bagian Organisasi dan Bagian PP.
8. Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Permendagri 56 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Sekretariat Daerah dan Perbup 3 Tahun 2020 terdapat perubahan Nomenklatur Kelembagaan pada Sekretaria Daerah. Bagian Perlengkapan menjadi Subag di Bagian Umum, sedangkan Subag Keuangan di Bagian Umum menjadi Bagian Perencanaan dan Keuangan yang melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Perencanaan (sebelumnya diampu oleh bagian PP), Pengelolaan Keuangan, Penatausahaan Pelaporan.
9. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	I B B CORRIANTARA	BADPELITBANGNEKA / SEKDA	
2	I Wuluh Arta Salm	org utda / katur	
	IN Juresta	itda / tahanan II	
	Ula Bagus Agung	bpren / kasubid	

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
	I Made Hesti S	Kabag Etikoni	
	Ni Ma Suartini	Kabag umum	
	Kadek Dwi Erti Hq	Bag Adpem	
	PI Komang Mudiha Dwi	Bagian Kesra	
	I M Kasih	Bag Hukum	
	Yulin Wulniyanti	Bag PP	
	I Wayan Mardana Putra	Bag. Humas	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/462/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah tingkat Kabupaten sesuai Renja Awal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Adpem, sementara hasil pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat pada Urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesbang Pol Linmas pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Bagian Adpem.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2.	I Ketut Arta Satana	Kelompok	
3.	I G. Suciandana	Ukr / Sektor Trig	
4.	I B WIDIANTRA	Bappelitbangda / Kektan	
5.	I Made Pur Arden	Kelompok / Sunpro	
6.	I Gede Diaksa	Bappelitbangda / Bala	
7.	Ide Bagus Agung	Pupkas / Kambal	
8.	Ika Pur Arden	Bappelitbangda	
9.	Ika Triantini	Bappelitbangda / Kated Data	
10.	Susniungas	Bappelitbangda / Kabag	

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/479/Bappelitbangda

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Sekretariat DPRD** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Plodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan output pembangunan rumah jabatan tidak ditemukan dalam permendagri 90 Tahun 2019, sementara dimasukkan ke dalam Pembangunan gedung kantor yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IGB USIO LANTARA	BAPPENAS/BANGSA / SET-BAN	
1	Kuntut Arta Pratama	Kenday any	
3	I Dewa Made Arimanta	Kabag Keuangan Setwan	
4	Naniak N	Setwan / Sunprog	
5	Suastiningris	Bappenas/Bangsa / Kabid	
	I N Dureta	Uda / Irban II	
	Uda Nugus Any	Pajak / Kerubid	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/494/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Karangasem** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irdi, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan dengan output pembayaran gaji kepala lingkungan masuk pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JF BATAN	TANDA TANGAN
2	1. Ulfah Arta Liana	ONG LITTA / Litay	
3.	2. Kebut Agus Mulin N	Uda / Kcb. Smping	
4.	1. EB Widada	Bappelitbada / Sekban	
5	1. Ida Ayu Ayu Yuliani	Bappelitbada / Supprog	
6	1. Kadek Ary Diptra	Kel. Libagan	
7	1. Nym Suardana	Kel. Karangasem	
8	1. Nym Suardana	Kel. Palangka Raya	
9	1. km Tanti	Kel. Mangrove	
10	1. Cost. N. Dywastara	Kel. Belandean	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura



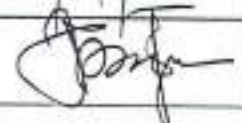

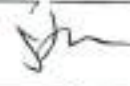
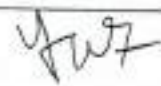
BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/495/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Abang** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Kegiatan Pembangunan gedung kantor untuk dikeluarkan dari Renja Kecamatan Abang kerana menjadi kewenangan Dinas PUPR. Perlu dibahas lebih lanjut dengan melibatkan dinas Kecamatan Abang dengan Dinas PUPR.
6. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
	1 EB WIKONTARA	Bappelektbangda / Sekelau	
2	1 Ketua Arta Situa	ang arta / kabag	
3	3 KT. Agus Mulin N	Uda / Kab. Smpang	
	1 Belt Apad	ngpasi: hanzla	
	1 Wpn. Pt. Suciata A.	Kec. Abang	
	1 da Ayu Ngn yuludin	Bappelektbangda	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

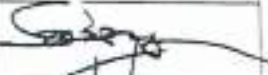

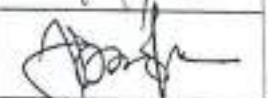

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/496/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Kubu** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada **Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor** sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	153 WIDIONTARA	Bappeltbangda / Sekkau	
2	1 ketut Atta Ratan	ung utta / kabog	
3	1 ketut Agnis Mulia N	Utta / Kab. Sempang	
	1 Gede Ar-jadi	Bappelt bangda	
	1 Gede Majo Yasa Dama.3	Kec. Kulu	
	1 dr. Ayu Niya Yuhani	Bappeltbangda	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura



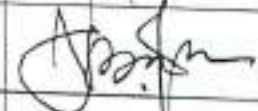
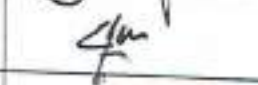
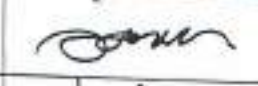
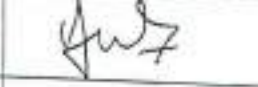
BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/497/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Bebandem** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Blaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	I G B USRIANTARA	Bappelitbang / Sekban	
2	I Ketut Apta Intan	ang rita / lubeay	
3.	I St. Agnes (Muli N)	Utda / Fkb. Semping	
	I Gede Anyas	Mapelitbang	
	I G. N. Djumet sur	rec. Belandem	
	I G. N. Ng. Juliani	Bappelitbang	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

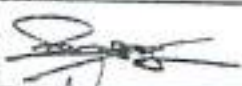

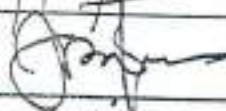


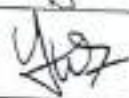
BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/498/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Selat** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Kegiatan penataan dan penyederan lapangan umum selat sementara dikeluarkan dari Renja Kecamatan Selat, untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dirapatkan dengan Perangkat Daerah pengampu untuk menjadi Renja Perangkat Daerah pengampu.
5. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	IGB WIDIANANDA	Bappeletbangda/SELBAM	
2	Murti Ari Wibisono	ang. warta / kabang	
3	I Kd. Agus Muliadi	ltda / Kab. Sempang	
	I Gede Angadi	Bappeletbangda	
	I Komang Saputra	Kec. selat	
	Ika Ayu Ayu Yuliani	Bappeletbangda	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/499/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Rendang** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setca tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Kegiatan Pembangunan gedung kantor untuk dikeluarkan dari Renja Kecamatan Rendang kerana menjadi kewenangan Dinas PUPR.
6. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1 EB W. W. W. W. W. W.	Bappelitbangda / sssss	
2	1 Ketua RTA Rendang	RTA Rendang / Rendang	
3	1 Kp. Agus Nulian	Wda / Kcb. Smp. prog	
	1 belu Anyadi	Bappelitbangda	
	KM Puspasari	Kec. Rendang	
	Ida Ayu Ayu Yuhani	Bappelitbangda	

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura



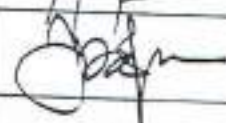



BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/500/Bappelitbangda

Pada hari ini, **Jumat** tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Sidemen** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	I B B WIDHANTARA	Bappalit Bangda / Sekban	
2	I Murti Arta Rahma	org Satwa / Labung	
3.	I Kt. Agus Mulia N	Utda / Kab. Sumprog	
	I Gede Aryadi	Bappalit bangda	
	I W. Suwarnata	Kec. Sibumen	
	Utda Bepu Ngn Yusdian	Bappalit bangda	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura



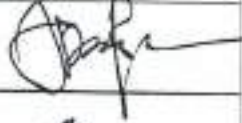


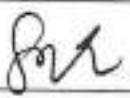
BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/501/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Kecamatan Manggis** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah masuk pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada **Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor** sedangkan yang outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada **sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	IBB WIDIAWATI	Bappelitbangda / Sekban	
2	Wahid Arta Watan	anggota / Kabag	
3	St. Agnes Mulia N	Itda / Ksib. Sumprog	
4	1 Gede Anyadi	Bappelitbangda	
5	Uca Ayu Ngru Yuhani	Bappelitbangda	
6	anggunan Sarye	Re Mangin	

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura


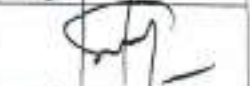
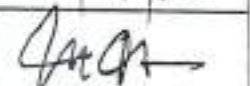

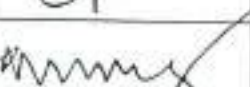
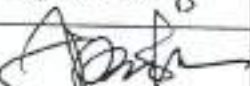
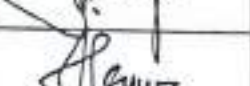

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/484/Bappelitbangda

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Inspektorat Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Plodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.

2. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	ISB Widiyanto	Bappelitbangsa / Sekda	
2	Hektat Arta Utama	ang luda / Kabid	
3	I N Dureta	Itan / Irban II	
4	I Gede Diaksa	Bappelitbang / Kasra	
5	Suarfiringal	Kabid Litbangper	
6	I Ketut Agus Muli	Kesb. Empang Uda	
7	Ua Bagus Agung	BPKAD / Kasubid	
8	Hektat Pua Utama	Bappelitbang	

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT

Nomor : 050/461/Bappelitbangda


Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
 - d. Kegiatan Pengadaan Garase masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS yang saat ini di ampu oleh Bappelitbangda dalam permendagri 90 menjadi Urusan Keuangan, Program Pengelolaan Keuangan, pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada Sub Kegiatan

Penyusunan KUA dan PPAS yang diampu oleh BPKAD. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan BPKAD.

3. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Diki Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2.	Muhut Aha Hama	Hubung sang	
3.	IBB WIDAYATI	Bappelitbangda / Sektan	
4.	Ed. Supriatna	Kader / sekretaris	
	Suastiningas	Bappelitbangda / Kabid	
	I Gede Dikson	Bappelitbangda	
	Ika Hagus Igu	BPKAD / Corulap	
	Ka. Pu. Adnan	Bappelitbangda	
	Ika TriSanti	Bappelitbangda / Kabid	
	Ika Ayu Mgr. Juhani	Bappelitbangda / Sunprog	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/460/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan Pembangunan gedung kantor dikeluarkan dari Renja 2021 BPKAD dan menjadi kewenangan Dinas PUPR.
3. Untuk kegiatan Intensifikasi pemungutan pajak daerah belum ditemukan dalam permendagri 90 Tahun 2019 sementara dimasukkan ke sub kegiatan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk diusulkan dan dikoordinasikan dalam pemutakhiran ke pusat melalui provinsi.

4. Dalam permendagri 90 ditemukan Urusan Keuangan, Program Pengelolaan Keuangan, pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS yang semula diampu oleh Bappelitbangda menjadi kewenangan BPKAD. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi.
5. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siki Nugraha	Ka. Bappelitbangda	
2	I Ketut Arta Widana	Wakil ang	
3	I G. Supriyana	Wka / sekretaris	
4	I B B WIDIANARA	Bappelitbangda / Sekban	
	Snastiungsi	Bappelitbangda / Kabid	
	I Gede Dialek	Bappelitbangda -	
	Uda Bagus Agung	BPKAD / Kabid	
	I Ketut Ardana	Bappelitbangda	
	Ika Trisanti	Bappelitbangda / Kabid	
	I NENGAH SIMPEN	BPKAD / Sekprop	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/505/Bappelitbangda

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat lanjutan Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut pembahasan terhadap permasalahan yang ditemukan pada rapat tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural, Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kegiatan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dimasukkan dalam usb kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.
2. Kegiatan Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian masuk pada sub kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN.
3. Secara utuh hasil pemetaan sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aiki Nguras	Ka. Bappelitbangda	
2.	IGB WIDONARSO	Bappelitbangda/Sebban	
3.	I Ketut Arta Budha	ang utra / luring	
4.	I Ketut Agus Mulia N	Ida / Kab. Sumpreg	
	I Gusti Lanans A.W	kabid . BCPDA	
	Gusti A PUTU SARINI	KABID H2HP BCPDA	
	I Nyoman Swiregara	Kabid Inko & Pengadaan	
	Tjok Gde Ngurah Prabawa	BKPSDA / Sumpreg	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura



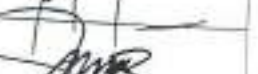
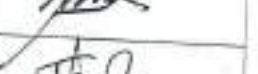
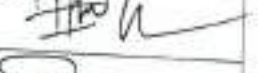


BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/451/Bappelitbangda

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Dinas Ketenagakerjaan** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setca tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan serta kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Kegiatan Padat Karya tidak ditemukan pada urusan dinas Tenaga Kerja, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan DPMPD.
3. Berkaitan dengan urusan Transmigrasi yang berhubungan dengan implementasi pada Simda perlu dirapatkab lebih lanjut dengan BPKAD.

4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Piki Ngung	Ka. Bappelitbangda	
2	I Wntut Ariatama	ang / Wang	
3	IGB. Sufi Dny	USA / sekretaris	
4	NI Wyn Erawati	Pang Organisasi / Krb	
5	IGB LEWONSAWARA	Pangpelitbangda / Sekda	
6	Made Suardyama	Bappelitbangda / Kabid Pang	
7	IGB Bgs Sunirna	Suaprog Disnaker	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/482/Bappelitbangda

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Pemetaan (mapping) nomenklatur program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah **Satuan Polisi Pamong Praja** dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/28/Bappelitbangda/Setda tanggal 5 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Irda, BPKAD, Bagian Organisasi dan Bidang Koordinasi pada Bappelitbangda Kab. Karangasem dengan hasil pemetaan sebagai berikut :

1. Bahwa program kegiatan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 beberapa kegiatan mengalami pergeseran dari kegiatan menjadi Sub kegiatan/aktivitas, belanja atau pendukung aktivitas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan untuk Tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
 - b. Kegiatan Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.
2. Untuk kegiatan Pembinaan dan Latihan Korsik tidak ditemukan menjadi urusan Sat Pol PP, sementara dimasukkan ke Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan sama dengan kegiatan pembinaan regu penyanyi yang diampu oleh Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan. Untuk dilakukan pembahsan lebih lanjut dengan melibatkan Sat Pol PP dan Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan.

3. Untuk kegiatan Penertiban KTP di Pelabuhan Padang bai yang semula ada di Sat Pol PP pindah ke Disduk Capil.
4. Hasil pemetaan secara rinci sebagaimana terlampir.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I B B WIDIANINGSIH	ESPEKELITBANS DA / SEKSI	
2.	I Wulnt Arta Putra	Anggota / Kabag	
3.	I Made Suardyan	Kepelitkayha / Kabid	
4.	I Refus Astawan	Seskol. RP / Kab. Sumpeng	
5.	I Budi Pasak Bendera	Sat. Pol. PP / Staf	
6.	I N Doresta	Itda / It dan II	
7.	I La Bagus Agung	BPKAD / Kasubid	
8.	Quastiniang	Kabid Litbangper	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/513/Bappelitbangda




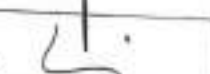




Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Tindak Lanjut Permasalahan terkait Pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai dengan surat Nomor : 005/30/Bappelitbangda/Setda tanggal 15 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Kabag Organisasi, Kabag Hukum dan Inspektur Daerah, hadir sebagai peserta rapat dari : BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, DPMD, Disperindag, Sat Pol PP, Bagian PP, Bagian Ekonomi, Bagian Humas dan Bagian Perlengkapan. Dari hasil pembahasan disepakati hal-hal sebagaimana matrik berikut :

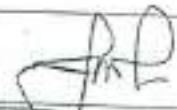
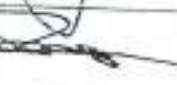
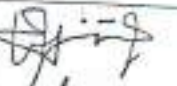

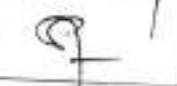
NO	PERMASALAHAN	KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN
1	Kegiatan Padat Karya tidak ditemukan pada urusan dinas Tenaga Kerja, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan DPMPD	Masuk pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Berkaitan dengan urusan Transmigrasi yang berhubungan dengan implementasi pada Simda perlu dirapatkan lebih lanjut dengan BPKAD	Dibahan lebih lanjut secara teknis.
3	Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara menyeluruh yang tersedia dalam Permendagri 90 untuk Dinas Pertanian perlu dilakukan pengkajian kembali oleh Bagian Organisasi berkaitan bidang-bidang sesuai struktur yang ada saat ini pada dinas pertanian terutama yang bersinggungan dalam pelaksanaan	Pada prinsipnya seluruh kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Pertanian dapat dipetakan sesuai Permendagri 90 yang berdampak pada perubahan struktur kelembagaan Dinas Pertanian. Perubahan struktur kelembagaan selanjutnya dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi.

	tugas dan fungsi untuk efektifitas kelembagaan	
4	Untuk kegiatan pengawasan pupuk pestisida yang sebelumnya muncul di Renja Dinas Pertanian sesuai permendagri 90 menjadi kewenangan dinas Perindustrian dan sudah dirancang di Renja Dinas Perindustrian Tahun 2021	Disepakati dikeluarkan dari Renja Dinas Pertanian selanjutnya masuk dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5	Dalam permendagri 90 ditemukan Urusan Keuangan, Program Pengelolaan Keuangan, pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS yang semula diampu oleh Bappelitbangda menjadi kewenangan BPKAD. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi.	Disepakati kegiatan penyusunan KUA dan PPAS dikeluarkan dari Renja Bappelitbangda dan masuk ke Renja BPKAD.
6	Kegiatan Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan output pembayaran PBB Rumah Jabatan dan Rumah Dinas, tidak ditemukan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 sementara dimasukkan ke sub kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga. Kepastian apakah Obyek dimaksud merupakan Objek Pajak PBB untuk dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan melibatkan Setda (Bagian Perlengkapan) dan BPKAD.	Untuk sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimasukkan sebagai belanja pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Bagian Perlengkapan
7.	Kegiatan penyusunan standar satuan harga dikeluarkan dari Renja Setda Bagian Ekonomi karena menjadi kewenangan BPKAD. Untuk dibahas lebih lanjut dengan melibatkan BPKAD dan Bagian Ekonomi.	Penyusunan SSH dan ASB sebagaimana diamanatkan dalam MCP KPK Masuk pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang pada BPKAD.

8	Kegiatan Rapat Rutin dan Rapat Kerja yang semula diampu oleh Bagian Organisasi masuk pada sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada bagian PP. Perlu dilakukan rapat pembahasan lebih lanjut yang melibatkan Bagian Organisasi dan Bagian PP.	Sepakat Kegiatan Rapat Kerja bergeser dari Bagian Organisasi ke Bagian PP dalam Renja Setda.
9	Untuk kegiatan Pembinaan dan Latihan Korsik tidak ditemukan menjadi urusan Sat Pol PP, sementara dimasukkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sama dengan kegiatan pembinaan regu penyanyi yang diampu oleh Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan. Untuk dilakukan pembahsan lebih lanjut dengan melibatkan Sat Pol PP dan Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan.	Disepakati masuk pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada bagian Protokol Komunikasi Pimpinan. Selanjutnya untuk kebutuhan anggaran, personil dan sarana untuk dirapatkan secara internal oleh bagian protokol komunikasi pimpinan bersama Pol PP.

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Silvi Ngurah	Ka. Pappesidang	1. 
2.	I Ketut Arita Putra	Kubayang	2. 
3.			3.
4.	I Kom. Suardana	Bg. Hukum	4. 
5.	W.T. Supandi	Kadis Hukum	5. 
6.	I Made Hodi S	Brg Ekonomi	6. 
7.	I Wayan Sudana	DPMO	7. 
8.	I Ed. Sukerana	POL PP	8. 
9.	I Wayan Sumantra	BIS Dispinindag	9. 

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
10.	I Gede Budi T	Ksb. Protokol Bag. Humas	10. 
11.	I B B WIDHANA	Bappeletkaga/sekban	11. 
12.	Wedasmara	Kalaq PP	12. 
13.	I Kely Sri Kadu	Kadis Malbek	13. 
14.	SUNAN	PASTOR	14. 
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pergeseran dari hal-hal yang sudah sepakati akibat perubahan peraturan perundang-undangan berita acara ini dapat ditinjau kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 52 Telp. (0363) 21013 Amlapura

BERITA ACARA HASIL RAPAT
Nomor : 050/512/Bappelitbangda

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah diselenggarakan rapat, Tindak Lanjut Permasalahan terkait Pemetaan Permendagri 90 Tahun sesuai dengan surat Nomor : 005/30/Bappelitbangda/Setda tanggal 15 Mei 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappelitbangda didampingi : Kabag Organisasi, Kabag Hukum dan Irban, hadir sebagai peserta rapat dari : Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, DLH, DP3A, Badan Kesbang Pol Linmas, Bagian Adpem, Dinas PUPR, Sekretariat DPRD, Kecamatan Abang dan Kecamatan Selat. Dari hasil pembahasan disepakati hal-hal sebagaimana matrik berikut :

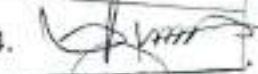
NO	PERMASALAHAN	KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN
1	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang pendidikan dengan out put Terbiayainya Pendidikan S1 bagi siswa SMA/SMK berprestasi bukan merupakan kewenangan kabupaten, selanjutnya diajukan untuk dibahas ditingkat pimpinan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Bagian Adpem	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kegiatan yang mengatur tentang beasiswa mahasiswa untuk 13 orang yang tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dibayarkan sesuai MOU dan Perjanjian Kerjasama berdasarkan hasil rapat diputuskan agar di adendum dan pembayaran beasiswanya dibayarkan sekaligus pada tahun 2020 (BA Hasil Rapat Nomor : 050/0856/Set/Disdikpora).2. Terhadap point 1 Dinas Pendidikan membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati cq. Ketua TAPD untuk dianggarkan pada

		APBD Perubahan 2020.
2	Kegiatan Pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam mapping tidak ditemukan pada urusan dinas Sosial, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Badan Kesbang Pol Linmas	Dimasukkan ke dalam sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesbang Pol Linmas.
3	Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas untuk dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan ke Provinsi dan atau dibahas lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Pendidikan	Dimasukkan ke dalam sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
4	Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah tingkat Kabupaten sesuai Renja Awal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Adpem, sementara hasil pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat pada Urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesbang Pol Linmas pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Bagian Adpem.	Setelah dikaji kembali, diputuskan untuk dimasukkan ke dalam sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesbang Pol Linmas.
5	Untuk penataan RTH khusus di Tugu Pahlawan Ciung Wanara sesuai hasil pemetaan Permendagri 90 dikeluarkan dari Renja DLH karena merupakan	1. Pengelolaan Taman Tugu Pahlawan termasuk semua yang berada di dalamnya menjadi kewenangan Dinas Sosial dimasukkan pada sub

	<p>kewenangan Dinas Sosial. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3A dan Dinas Perhubungan.</p>	<p>kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Taman telajakan yang berada di luar tembok penyengker Tugu Pahlawan tetap menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. 3. Taman bermain yang berada di sisi sebelah timur menjadi tanggung jawab DLH.
6	<p>Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan output pembangunan rumah jabatan tidak ditemukan dalam permendagri 90 Tahun 2019, sementara dimasukkan ke dalam Pembangunan gedung kantor yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR.</p>	<p>Dimasukkan ke dalam Sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>
7.	<p>Kegiatan Pembangunan gedung kantor untuk dikeluarkan dari Renja Kecamatan Abang kerana menjadi kewenangan Dinas PUPR. Perlu dibahas lebih lanjut dengan melibatkan Kecamatan Abang dengan Dinas PUPR.</p>	<p>Dimasukkan ke dalam Sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>

8	Kegiatan penataan dan penyederan lapangan umum selat sementara dikeluarkan dari Renja Kecamatan Selat, untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dirapatkan dengan Perangkat Daerah pengampu untuk menjadi Renja Perangkat Daerah pengampu.	Dimasukkan ke sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum pada Kecamatan Selat
---	---	---

Peserta rapat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Piki Nugraha	Ka. Bappeda Karangasem	1. 
2.	I MA. Subana	Inspektan	2. 
3.	I Km. Suarnatha	Bg. Hukum	3. 
4.	I GN Kantika	Kabid. DDC Pora	4. 
5.	R. Satriana	Kec. Kawerepre Uluwatu	5. 
6.	I Gede Basma	Dinas Sosial/Kedes	6. 
7.	I Ngh Darmu	Kec. Selat / Camat	7. 
8.	Ida Bagus Eka Ananta	Kec. Abang / Camat	8. 
9.	I Ket Jayanti Putra	DAUPR / Sekdes	9. 
10.	I MADE SUTAMA	DT 2A	10. 
11.	Ida Bagus Al. Gustina	Dishub	11. 
12.	Naniek Noerhayati	Setwan	12. 
13.	I Made Suardana	Bagas Adipati	13. 
14.	I Ketut Arta Utama	Bagian Bina	14. 
15.	I Wayan Tulus	DLT / Kabid. PPKLT	15. 

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
16.	IBB CESKANTARA	Bappelitbangsa / sekban	16. 
17.	Suarfuringal	Bappelitbangsa / kalsid	17. 
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam penyempurnaan Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2021. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pergeseran dari hal-hal yang sudah sepakati akibat perubahan peraturan perundang-undangan berita acara ini dapat ditinjau kembali.

1. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum						X	XX	01	2,03	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	01
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di masing-masing unit pelayanan pendidikan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	02
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	08
				Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	10
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	11
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	12
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	13
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	15
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	17
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	18
				Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi / teknis/ Keamanan	Terwujudnya tenaga jasa administrasi / teknis / keamanan	Dimasukkan pada sub kegiatan yang sesuai												

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	tersedianya canang dan bebanten dan piodalan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	16
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah	Dimasukkan pada sub kegiatan yang sesuai												
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur													
							Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan													
							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	20
							Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor baru	Pengadaan Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	25
							Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	28
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	30
							Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor : Komputer	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	32
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	34
							Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi ringan gedung kantor UPTD kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	28
							Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,04		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan	persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,04	10	
						Program Peningkatan sistem Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan sistem Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,01		
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,02	06	
						Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,02	09	
						Penyusunan Laporan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaksananya penyusunan laporan Aset SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,02	09	
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penambahan ruang kelas sekolah di TK Negeri			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						1	01	02	2,03		
							Persentase APK PAUD														
							Jumlah TK Ber APE lengkap														
							Jumlah Bangunan TK negeri yang dipelihara														
						Pembangunan Gedung Sekolah		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	01	
						Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru di TK Negeri Abang	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penambahan ruang guru sekolah	Terlaksananya penambahan Ruang Guru Sekolah pada TK Negeri	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	03
						Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya sarana dan prasarana Olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	01
						Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Terlaksananya pembangunan tempat bermain TK negeri Pembina Abang	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	02
						Pembangunan ruang serba guna/aula	Terbangunnya Ruang Serba Guna / Aula pada TK Negeri	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	02
						Pembangunan ruang ibadah	Terbangunnya Ruang Ibadah pada TK Negeri	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	02
						Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terlaksananya pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	02
						Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary pada TK Negeri	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis untuk siswa 5 TK Negeri	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	10
						Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	12
						Pengadaan Meubelair sekolah	Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah TK Negeri Kerta Mandala	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	09
						Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terwujudnya Pemeliharaan rutin bangunan sekolah di 5 TK Negeri	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	05
						Pemeliharaan rutin bangunan sekolah	Terwujudnya Pemeliharaan rutin bangunan sekolah di 5 TK Negeri	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	05
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	Terpeliharanya Ruang guru sekolah secara rutin dan berkala	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	05
						Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana bermain	Terwujudnya Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana bermain	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	06

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	06
							Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Lembaga PAUD yang mendapatkan DAK BOP	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	13
							Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pemberian Insentif se Kab. Karangasem	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	13
							Penyelenggaraan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tersusunnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	13
							Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	Terlaksananya Pembinaan Pendidik PAUD dan Lembaga PAUD se Kabupaten Karangasem'	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	17
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga dan Pendidik PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	14
							Pembinaan dan Lomba Gugus tingkat provinsi	Terlaksanakanya Lomba Gugus PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	17

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Lomba Kreativitas PAUD	Terlaksananya Lomba Anak Usia Dini dalam rangka hari jadi Kota amlapura dan hari proklamasi	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.03	13
						Program peningkatan Peran Serta kepemudaan	Jumlah kelompok sentra pemberdayaan pemuda													
							Jumlah wirausaha muda dilatih													
							Jumlah pelaksanaan kegiatan PASKIBRA													
							Jumlah kegiatan kepemudaan tingkat provinsi dan nasional yang diikuti													
						Seleksi paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Meningkatnya wawasan Kebangsaan para pelajar SMA/SMK di Kabupaten Karangasem 19 sekolah	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2.01	08
						Pelatihan Paskibraka HUT RI Tingkat Kabupaten	Meningkatnya wawasan Kebangsaan para pelajar SMA/SMK di Kabupaten Karangasem 19 Sekolah	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2.01	08
						Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	Terselenggaranya Pertukaran Pemuda Antara Provinsi 15 orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2.01	01
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda, 1 Gedung	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2.01	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	Terfasilitasinya/Dukungan Kegiatan Kepemudaan/Kepanduan, 2 Kegiatan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2,01	06	
						Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah tanah yang dibeli dan akan disertifikatkan														
						Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Persentase APK SD / MI														
							Persentase APM SD/MI														
							Persentase APK SMP / MTs														
							Persentase APM SMP / MTs														
							Persentase Kelulusan SD/MI Paket A														
							Persentase Kelulusan SMP/MTs Paket B														
							Rata-rata ujian SD/MI Paket A														
							Rata-rata ujian SMP/MTs Paket B														
							Jumlah SD/MI yang sarana prasarananya sudah memenuhi SPM														
							Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarananya sudah memenuhi SPM														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Jumlah Pelatihan Penguatan Kurikulum bagi sekolah jenjang SD/MI													
							Jumlah Pelatihan Penguatan Kurikulum bagi sekolah jenjang SMP/MTs													
							Jumlah juara / Medali / prestasi siswa tingkat provinsi / nasional													
							Jumlah Sekolah Melaksanakan Kurikulum Nasional													
							Jumlah dana pendampingan operasional BOS SD (Rp)													
							Jumlah dana pendampingan operasional BOS SMP (Rp)													
							Jumlah dana beasiswa untuk siswa SD perorang pertahun (Rp)													
						Pembangunan Gedung Sekolah (RKB) SD	Terbangunnya Gedung Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	02
						Pembangunan Gedung Sekolah (RKB) SMP	Terbangunnya Gedung Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	02
						Penambahan Ruang Kelas SD	Bertambahnya Ruang kelas sekolah	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penambahan Ruang Guru Sekolah	Bertambahnya Ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	03
						Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	Terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah SD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	06
						Penambahan Ruang Kelas SMP	Bertambahnya Ruang kelas sekolah	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	02
						Pembangunan Ruang Guru SMP	Terbangunnya Ruang Guru pada SMP	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	03
						Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Tersedianya Laboratorium SMP	Pembangunan Laboratorium		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	06
						Pembangunan Gedung Perpustakaan SD	Tersedianya Gedung Perpustakaan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP	Tersedianya Gedung Perpustakaan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	05
						Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	Tertersedianya Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	11
						Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD	Terbangunnya Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	06
						Pembangunan Ruang Ibadah	Terbangunnya Ruang Ibadah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	06
						Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	06
						Pengadaan Alat Praktek dan Peaga Siswa	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktek dan Peaga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	22

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan alat rumah tangga sekolah SD	Terpenuhinya alat-alat rumah tangga sekolah SD	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	15
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD	Terpenuhinya perlengkapan sekolah SD	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	16
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	13
						Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	13
						Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru sekolah SD	Rehabilitasi sedang / berat ruang guru/ kepala sekolah / TU		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	09
						Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	11

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	12
						Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	12
						Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	12
						Pengadaan Mebeluer Sekolah	Terpenuhinya Meubelair Sekolah pada jenjang SD	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	14
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah secara rutin dan berkala	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	18
						Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	19

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terpeliharanya prasarana sekolah	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	18
						Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terpeliharanya prasarana sekolah	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	29
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	08
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	14
						Pengadaan Meubelair sekolah SMP	Terpenuhinya Meubelair Sekolah pada jenjang SMP	Pengadaan Meubeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	25
						Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	18

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah SMP	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	17
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru SMP	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	41
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru SD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	29
						Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	terbangunnya sarana air bersih dan sanitary SMP	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	19
						Pembinaan Forum Masyarakat Peduli pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	29
						Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD	Tersedianya buku sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	21

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SMP	Tersedianya buku sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	32
						Pengadaan Buku Sekolah	Tersedianya buku sekolah	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	17
						Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SD	Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains MIPA, OOSN dan FLS2N	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	25
						Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatnya Akreditasi Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	28
						Penyiapan Akreditasi SMP	Terlaksananya akreditasi sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	41
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	24

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMP	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	37
						Ujian Akhir Sekolah SMP/MTS	Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SMP/MTS	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	36
						Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	24
						Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP	Terlaksananya Pembinaan OSN, Q2SN, FL2SN,LPSN, LKJS, LCSAN Siswa SMP	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	38
						Sosialisasi BOS, BSM dan DAK	Terlaksananya Sosialisasi BOS, BSM dan DAK	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	21
						Sosialisasi BOS dan BSM SMP	Terlaksananya Sosialisasi BOS dan BSM SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	32

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI	Tersedianya buku pelajaran SD	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	04
						Workshop Tata Kelola BOS	Terlaksananya Workshop Tata Kelola BOS	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	21
						Beasiswa SD	Tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	21
						Beasiswa SMP	Tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	32
						Bantuan Sarana Transportasi Siswa Miskin SD/SMP - Sepeda Gunung	Tersedianya Bantuan Sarana Transportasi Siswa miskin SD/SMP- Sepeda Gunung	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	32
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelaksanaan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah													
						Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Nasional	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,03	16
						Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal													
							Persentase Penduduk Buta Aksara										1	01	02	2,04

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan	Meningkatnya Mutu Lembaga Pendidikan Non Formal, Akreditasi 6 Lembaga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	16
						Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Bidang Keaksaraan/ Pemberantasan Buta Huruf dan Keaksaraan Usaha Mandiri, 1500 orang	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pendidikan Non Formal, 1 Tahun	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	03
						Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) SKB	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal di SKB, 130 orang/1 Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12
						Jambore PTK-PNF	Terlaksananya Pemberian Apresiasi terhadap Peserta Jambora PTK-PNF, 15 Jenis Kegiatan/Lomba	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	15
						Penyelenggaraan Paket A setara SD	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD di 1 Lembaga, 100 orang	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP di 12 Lembaga	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12	
						Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA di 12 Lembaga	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12	
						Pengembangan Pendidikan Pasraman	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12	
						Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kejuaraan tingkat Kecamatan														
							Jumlah Kejuaraan tingkat Kabupaten														
							Jumlah Juara/Medali/Prestasi tingkat Provinsi														
							Jumlah juara / Medali / prestasi siswa tingkat nasional														
							Terselenggaranya Pelatihan senam guru - guru olahraga														
							Jumlah pembinaan/pelatihan PTK dan siswa														
						Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,01	03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, sebanyak 6 kali: Porsenijar Tk. Kecamatan, Tk. Kabupaten, Tk. Provinsi, Kejuaraan Bola Volley, Liga Pelajar dan Atletik	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,02	02	
						Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga HUT	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga, sebanyak 2 kali (Memeriahkan HUT RI dan HUT Kota Amlapura).	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,02	02	
						Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik berkwalifikasi S1/D4														
							Persentase Pendidik bersertifikat														
							Persentase Pengawas berkwalifikasi S1/D4														
							Persentase Pengawas bersertifikat pendidik														
							Persentase Kepala Sekolah mendapatkan pelatihan calon kepala sekolah														
							Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan yang meraih prestasi tingkat provinsi dan nasional														
						Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Guru, Kepala Sekolah dan Operator Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	15
						Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
						Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Guru SD dan SMP	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Guru	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
						Pemilihan Guru dan Siswa Berprestasi	Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	15
						Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Teknis	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
						Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	Calon Pengawas Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Monitoring Pengawas	Pengawas TK-SD, SMP/SMA/SMK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	15
						Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Calon Kepala Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16
						Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
						Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan SD	Meningkatnya Mutu Kependidikan Guru dan kepala sekolah SD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemilihan guru berprestasi SD	Terpilihnya siswa dan guru berprestasi 6 Orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
						Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Teknis SD	Terlaksananya kenaikan pangkat bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
						Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMP berprestasi	Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga teknis SMP	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Guru SMP	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru TK	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	16

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru SD	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	27
						Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru SMP	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	40
						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pedoman / standar dan media informasi													
							Jumlah kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait pendidikan													
							Jumlah satuan pendidikan formal terakreditasi minimal B													
							Jumlah satuan pendidikan non formal terakreditasi													
							Presentase jumlah siswa yang diterima dari jalur prestasi SMP													
							Jumlah siswa yang menerima beasiswa prestasi dan mandiri untuk ke perguruan tinggi													
						Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	dapat terevaluasinya hasil kinerja bidang pendidikan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
						Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang pendidikan	Terbiayainya Pendidikan S1 bagi siswa SMA/SMK berprestasi	Masih dirapatkan ditingkat pimpinan															
						Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Tertindakannya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2.04	10			
						Pembinaan dewan pendidikan	terlaksananya pembinaan terhadap dewan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	28			
						Pembinaan komite sekolah	terlaksananya pembinaan terhadap komite sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	41			
						Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya Informasi Pendidikan melalui Wibesite: http://pendidikan.karangasem.go.id dengan basis DAPODIK	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2.04	10			
						Penyelenggaraan Pelatihan seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Terselenggaranya seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah bagi guru-guru yang akan dan telah menulis Karya Tulis Ilmiah Guru sejumlah 400 Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2.04	10			
						Penyelenggaraan penerimaan siswa baru	Tertindakannya Penerimaan Siswa baru	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	36			

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	24	
						Pendataan pendidikan	Tersedianya Data Pokok Pendidikan yang Update dengan Program Aplikasi DAPODIK pada PAUD dan DIKDAS	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,01	02	
						Pembinaan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	Penguatan Pelaksanaan Kurikulum untuk guru PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	17	
						Akreditasi Sekolah	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah pada PAUD/SD/SMP	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,03	13	
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,02	36	
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,01	24	
						Penyusunan rencana dan Program Pendidikan	Tersusunnya Program - program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karangasem	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,01	02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan Profil Pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Pendidikan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	X	XX	01	2,01	02
						Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat													
						Jumlah perpustakaan dan taman bacaan														
						Oprasional TBM dan Motor Kunjung	Meningkatnya minat baca masyarakat	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2,04	12
						Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terselesainya Pembangunan Kawasan Gelanggang Olahraga (Stadion) Kota Amlapura													
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memadai di kecamatan dan kabupaten														
						Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terselesainya Pembangunan Kawasan Gelanggang Olahraga (Stadion) Kota Amlapura (Jalan Lingkar stadion)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,01	03
						Pemberdayaan Operasional Gelanggang Olahraga (GOR) Amlapura	Terpeliharanya dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung, Amlapura, 1 Paket	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,01	03
						Rehabilitasi sedang dan berat fasilitas umum olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2	19	03	2,01	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Adanya data potensi kepemudaan														
							Jumlah pendataan organisasi pemuda dan potensi kepemudaan														
						Pendataan Potensi Kepemudaan	Adanya data potensi kepemudaan dan pelatihan enterpreneur/kewirausahaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/kota		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2,02	02	
						Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terbebasnya pengaruh narkoba bagi pemuda														
							Jumlah Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba														
						Pemberian Penyuluhan tentang narkoba bagi pemuda	Terbebasnya pengaruh narkoba bagi pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/kota		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	02	2,02	02	
						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tertatanya arsip dan terkelolanya data kepegawaian														
							Persentase penataan arsip dan data kepegawaian														
						Penataan Arsip dan Pengelolaan data kepegawaian	Tertatanya arsip keuangan dan Kepegawaian dan terkelolanya data kepegawaian	masuk pada item belanja Kegiatan Administrasi umum													

2. DINAS KESEHATAN

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran													
1	02	01	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	01
1	02	01	02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	02
1	02	01	06	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	06
1	02	01	09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	09
1	02	01	10	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa alat tulis kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	10

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	01	11	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	11
1	02	01	12	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	12
1	02	01	13	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	13
1	02	01	14	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	14
1	02	01	15	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	15

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	02	01	17	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman rutin dan tamu yang tersedia	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman rutin dan tamu yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	17	
1	02	01	18	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	18	
1	02	01	19	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang tersedia	Masuk pada beberapa sub kegiatan di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan sebagai item belanja yang mendukung capaian output dari sub kegiatan tersebut													
1	02	01	20	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Persentase canang dan banten piodalan yang tersedia	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase canang dan banten piodalan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	16	
1	02	01	26	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Masuk pada beberapa sub kegiatan di Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan sebagai item belanja yang mendukung capaian output dari sub kegiatan tersebut													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
							Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya laporan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.02	04	
1	02	02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur														
1	02	02	02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	04	
1	02	02	22	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	28
1	02	02	24	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	30
1	02	02	41	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Rehabilitasi sedang berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	37

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																						
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE												
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	02	05		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur																				
						Rasio dokter per satuan penduduk																					
1	02	05	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah tenaga aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	03	2.02	03								
1	02	06		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun																				
1	02	06	06	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyusunan Perencanaan kegiatan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.01	01								
						Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.01	02								
							Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1	02	01	2.01	03								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kinerja yang dievaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1	02	01	2.01	05		
1	02	15		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar													
1	02	15	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	14
						Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	16		
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase tersedianya bahan habis pakai	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	17		
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dalam keadaan baik	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	20		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	02	16	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi														
						Persentase terpenuhinya Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)														
						Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Peserta JKN														
						Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)														
1	02	16	09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya masyarakat yang berobat ke Puskesmas tanpa memberikan uang jaminan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pasien mendapat pelayanan kegawatdaruratan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	34
											Persentase terpenuhinya Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
											Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Peserta JKN									
											Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)									
							Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di Puskesmas	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	35
							Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)		Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)											
								Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase tingkat rujukan	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki izin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.04	04
1	02	16	16	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemeriksaan mikrobiologi air, makanan, usap alat, usap dubur, kimia makanan dan kimia air	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laboratorium kesehatan daerah yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	34

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	17	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	26
						Jumlah Pemanfaat Kartu Karangasem Sehat (KKS)														
1	02	16	21	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	32
1	02	16	22	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Manggis I	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	23	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Manggis II	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	16	24	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rendang	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	25	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Sidemen	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	26	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Selat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	27	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Bebandem	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	28	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Karangasem I	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	16	29	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Karangasem II	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	30	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Abang I	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	31	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Abang II	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	32	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kubu I	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
1	02	16	33	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kubu II	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	34	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Rumah Sakit Pratama	Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di RS Pratama	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya pemberian makan gratis bagi 1 orang penunggu pasien rawat inap di RS Pratama	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	32
						Persentase terpenuhinya kegiatan pelayanan sesuai standar Rumah Sakit Pratama			Persentase terpenuhinya kegiatan pelayanan sesuai standar Rumah Sakit Pratama											
						Persentase masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pratama tanpa memberikan uang jaminan			Persentase masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pratama tanpa memberikan uang jaminan											
1	02	16	35	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Manggis I	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar										
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar										
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar										
							Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar										
							Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
							Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar											
							Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar											
							Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar											
1	02	16	36	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Manggis II	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar											
							Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar											
1	02	16	37	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Rendang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar									
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing kesehatan sesuai standar									
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar									
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar									
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar											
1	02	16	38	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Sidemen	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan			1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	39	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Selat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar										
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar										
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	40	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Bebandem	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar									
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar									
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar									
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar									
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	41	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Karangasem I	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	42	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Karangasem II	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar										
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar										
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	02	16	43	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Abang I	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar												
					Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar												
					Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar												
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	02	16	44	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Abang II	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33	
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin												
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir												
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar												
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar										
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar										
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	16	45	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Kubu I	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar										
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar										
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	16	46	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Upaya Puskesmas Kubu II	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	33
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin											
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir											
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
							Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar										
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar										
						Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
						Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		Persentase sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)											
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar											
1	02	19	09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja	Terbentuknya Pos UKK di daerah PPI/TP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Terbentuknya Pos UKK di daerah PPI/TP	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	16
							Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar											
1	02	19	10	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Upaya Peningkatan Kesehatan Olah raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pendataan atau pembinaan kelompok olah raga		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pendataan atau pembinaan kelompok olah raga											
1	02	20		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)													
							Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil													
							Prevalensi BBLR													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
							Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah lima tahun)														
							Persentase balita gizi buruk (Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)														
1	02	20	03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	15	
							Persentase bayi usia kurang dari 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif		Persentase bayi usia kurang dari 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif		Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil										
											Prevalensi BBLR										
											Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah lima tahun)										
											Persentase balita gizi buruk (Prevalensi Kurang Gizi pada Balita (Bawah lima tahun)										
1	02	21		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat Umum Sehat														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Persentase Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi Layak													
							Tatanan Kota Sehat (satuan indikator : tatanan)													
1	02	21	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tempat Umum Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	15
							Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat		Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara yang Memenuhi Syarat		Persentase Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi Layak									
							Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (satuan indikator : Desa)		Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (satuan indikator : Desa)											
							Persentase TPM yang Memenuhi Syarat		Persentase TPM yang Memenuhi Syarat											
							Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis											
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase capaian tatanan kabupaten/kota sehat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tatanan Kota Sehat (satuan indikator : tatanan)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	29

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	02	22	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani kurang dari 18 jam												
						Angka bebas jentik												
						Persentase pemeriksaan HIV sesuai standar bagi orang beresiko terinfeksi HIV												
						Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi												
						Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir												
						Prōporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS												
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD												
						Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS													
							Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS													
							Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD													
							Penderita diare yang ditangani													
							Tingkat kematian akibat malaria													
							Cakupan balita pneumonia yang ditangani													
							Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk dibawah 15 tahun													
1	02	22	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Persentase fogging yang dilaksanakan pada lokasi resiko tinggi	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fogging yang dilaksanakan pada lokasi resiko tinggi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KLB yang tertangani kurang dari 18 jam	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	25

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
											Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS									
											Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS									
											Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD									
											Penderita diare yang ditangani									
											Angka Kesakitan Malaria									
											Tingkat kematian akibat malaria									
											Cakupan balita pneumonia yang ditangani									
											Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk dibawah 15 tahun									
											Angka Kesakitan DBD									
1	02	22	04	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase bayi (anak usia 0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Persentase penanganan KIPI sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	36

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
							Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	12	
							Persentase pasien TB mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar														
1	02	22	09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan penduduk pada kondisi KLB sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BI DANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	13	
				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN		Persentase terpenuhinya pemeriksaan kesehatan jemaah haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana sesuai standar			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	14	
								Pengelolaan Suveilans Kesehatan	Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BI DANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	20	
									Persentase terpenuhinya pemeriksaan kesehatan jemaah haji												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase spesimen yang ditangani sesuai standar			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	28	
1	02	23		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan program SIK Puskesmas												
1	02	23	03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaksanakan program SIK Puskesmas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.03	01	
1	02	23	08	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan standar perijinan pelayanan kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan izin praktek tenaga kesehatan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	03	2.01	01	
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional melaksanakannya sesuai ijin yang diterbitkan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	04	2.01	01
							Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Persentase produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 yang memiliki sertifikat	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	04	2.02	01
							Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	04	2.03	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	04	2.06	01
							Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Industri RT yang mempunyai izin PIRT	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	04	2.06	02
1	02	23	09	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pengelolaan Standar Kompetensi SDM Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang lulus uji kompetensi (Ukom)	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan izin praktek	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	03	2.02	01
							Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang lulus uji kompetensi (Ukom)	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	03	2.02	02
							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatanyang memenuhi kompetensi kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	03	2.04	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	02	25	02	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	08
1	02	25	20	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang di rehabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas pembantu yang di rehabilitasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	09
									Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara											
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.01	10
1	02	30		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia	Persentase meningkatnya kesehatan Lansia													
1	02	30	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kesehatan Lansia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	07
1	02	32		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Angka Kematian Bayi (AKB)													
							Angka Kematian Balita (AKBA)													
							Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup													
							Cakupan kunjungan bayi													
							Cakupan kunjungan Ibu hamil K4													
							Cakupan pelayanan nifas													
							Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin													
							Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat													
1	02	32	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Persentase terpenuhinya pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase kunjungan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	01
									Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		Angka Kematian Bayi (AKB)									
											Angka Kematian Balita (AKBA)									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	04	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar														
1	02	34		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
1	02	34	01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	07
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	08	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	09
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	idem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	02	2.02	10
1	05	17		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan											
1	05	17	04	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	Perayaan hari-hari besar nasional	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase canang dan banten piodalan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	02	01	2.03	16

3. RSUD

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	1.02.02	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
1	1.02.02	16	20			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Karangasem	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani baik rawat jalan maupun rawat inap	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani baik rawat jalan maupun rawat inap	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani baik rawat jalan maupun rawat inap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RSUD Karangasem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		02	02	2.02	32
1	1.02.02	26		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata														
1	1.02.02	26	04			Pembangunan Gedung Rumah sakit	Jumlah gedung yang dibangun	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.	Jumlah gedung yang dibangun	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang diadakan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		02	02	2.01	01
1	1.02.02	26	18			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang diadakan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		02	02	2.01	14
1	1.02.02	26	22			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang diadakan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		02	02	2.01	13

1	1.02.02	26	23			Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Tersedianya makanan penunggu untuk pasien rawat inap kelas III	pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya makanan penunggu untuk pasien rawat inap kelas III	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang diadakan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		02	02	2.01	17
---	---------	----	----	--	--	--	--	-----------------------------	--	---	---	---	--	--------------------------------------	---	--	----	----	------	----

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.03	1.03	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1				
1.03	1.03	01										Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	03			
1.03	1.03	01	01							Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1	03	01		
								Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					1	03	01	2.03	
1.03	1.03	01	01	01										1	03	01	2.03	01
1.03	1.03	01	01	02										1	03	01	2.03	02
1.03	1.03	01	01	08										1	03	01	2.03	08
1.03	1.03	01	01	10										1	03	01	2.03	10
1.03	1.03	01	01	11										1	03	01	2.03	11
1.03	1.03	01	01	12										1	03	01	2.03	12
1.03	1.03	01	01	15										1	03	01	2.03	15
1.03	1.03	01	01	17										1	03	01	2.03	17
1.03	1.03	01	01	18										1	03	01	2.03	18

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.03	1.03	01	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran mobilitas pimpinan/pegawai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran mobilitas pimpinan/pegawai							1	03	01	2.03	30
1.03	1.03	01	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase peningkatan kualitas peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase peningkatan kualitas peralatan kantor							1	03	01	2.03	34
1.03	1.03	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya pelaporan Dinas PUPR Kab. Karangasem									1	03	01	2.02	
										Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Administrasi dan Keuangan						1	03	01	2.02	
1.03	1.03	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Buku Lakip dan Laporan Dinas PUPR Kab. Karangasem	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Buku Lakip dan Laporan Dinas PUPR Kab. Karangasem							1	03	01	2.02	06
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan keuangan bulanan yang disusun							1	03	01	2.02	07
									Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun							1	03	01	2.02	09
1.03	1.03	01	15				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Terbangunnya Jalan Dan Jembatan				Program Penyelenggaraan Jalan	Terselenggaranya jalan kabupaten berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.				1	03	10		
											Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya keterlibatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan					1	03	10	2.01	
												Terwujudnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan									
												Terwujudnya peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat									
												Terwujudnya pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat									
												Terwujudnya sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu									
1.03	1.03	01	15	03			Pembangunan Jalan	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jalan	Prosentase terbangunnya jalan baru dan/ atau terbangunnya bangunan pelengkap dan perkerasan jalan pada jalan kabupaten yang belum terdapat perkerasan							1	03	10	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1.03	1.03	01	15	05			Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan/box culvert	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan/box culvert							1	03	10	2.01	12	
									Penggantian Jembatan	Tergantinya jembatan/box culvert yang kondisinya rusak berat							1	03	10	2.01	16	
1.03	1.03	01	18				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Kabupaten														
1.03	1.03	01	18	06			Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan jembatan kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan jembatan kabupaten							1	03	10	2.01	19	
1.03	1.03	01	18	06			Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan rutin jalan - jalan kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang kondisinya baik dan sedang							1	03	10	2.01	11	
1.03	1.03	01	18	08			Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan berkala jalan kabupaten	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan berkala jalan kabupaten yang kondisinya rusak ringan							1	03	10	2.01	10	
1.03	1.03	01	18	09			Peningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase peningkatan jalan kabupaten	Rekonstruksi Jalan	Prosentase rekonstruksi/peningkatan jalan kabupaten yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat							1	03	10	2.01	08	
1.03	1.03	01	22				Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Data dan Informasi Infrastruktur Ke PUan (Bidang Bina Marga)														
1.03	1.03	01	22	01			Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Tersedianya database jalan di Kabupaten Karangasem	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya database jalan dan Jembatan di Kabupaten Karangasem							1	03	10	2.01	04	
1.03	1.03	01	23				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase jumlah dan jenis alat berat yang tersedia														
1.03	1.03	01	22	10			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat	Prosentase alat - alat berat siap pakai	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Prosentase pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang kondisinya baik dan sedang							1	03	10	2.01	11	
1.03	1.03	01	24				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, bantaran dan bangunan sungai yang tertata dan tersusunnya data dan informasi infrastruktur ke PU an Bidang Sumber Daya Air					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik, bangunan sungai yang tertata, tersedianya dan terpeliharanya prasarana air baku, tersedianya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tersedianya dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai			1	03	02			
										Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik						1	03	02	2.02		
1.03	1.03	01	24	10			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Prosentase jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi							1	03	02	2.02	14	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan kewenangan Kabupaten Karangasem								1	03	02	2.02	21	
1.03	1.03	01	24	14			Pembangunan Irigasi Subak di 7 Kecamatan	Prosentase jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Prosentase jaringan irigasi permukaan yang dibangun							1	03	02	2.02	02	
										Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan sungai yang tertata, prosentase prasarana air baku dalam kondisi baik, rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang tersusun, prosentase bangunan pengaman pantai dalam kondisi baik						1	03	02	2.01		
1.03	1.03	01	24	18			Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Prosentase bantaran tanggul yang ditangani	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun							1	03	02	2.01	09	
									Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Prosentase sungai yang dinormalisasi dan dipelihara							1	03	02	2.01	46	
1.03	1.03	01	24	20			Penyusunan Sistem Informasi / Database Sumber Daya Air	Prosentase data dan informasi infrastruktur ke-PU-an Bidang Sumber Daya Air yang terupdate	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai							1	03	02	2.01	04	
									Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola sumber daya air yang dibina dan diberdayakan							1	03	02	2.01	61	
									Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomtek pemanfaatan SDA yang dihasilkan dan dievaluasi							1	03	02	2.01	62	
1.03	1.03	01	26				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase terpeliharanya prasarana/bangunan penyediaan air baku														
1.03	1.03	01	26	02			Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan penyedia air baku	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun							1	03	02	2.01	06	
									Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang direhabilitasi							1	03	02	2.01	21	
									Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah operasi dan pemeliharaan embung							1	03	02	2.01	49	
1.03	1.03	01	26	08			Perlindungan Mata Air	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan penyedia air baku	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Prosentase pemeliharaan prasarana/bangunan perlindungan mata air							1	03	02	2.01	47	
1.03	1.03	01	27				Program Pengendalian Banjir	Prosentase panjang pantai yang tertangani														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.03	1.03	01	28	12			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Persentase panjang garis pantai yang ditangani	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall atau pengaman pantai yang dibangun							1	03	02	2.01	18
									Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan pengaman pantai							1	03	02	2.01	59
1.03	1.03	01	27				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang berakses air minum dan air limbah					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah			1	03	05		
											Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak					1	03	05	2.01	
1.03	1.03	01	27	02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Persentase penduduk yang terakses saluran air limbah yang layak	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Air Limbah Domestik (Master Plan Air Limbah Domestik) dan Kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Karangasem							1	03	05	2.01	01
									Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Pembangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-T dan SPALD-S) di Kabupaten Karangasem							1	03	05	2.01	03
									Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-T dan SPALD-S) di Kabupaten Karangasem							1	03	05	2.01	05
									Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Karangasem							1	03	05	2.01	06
									Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya Program Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Karangasem							1	03	05	2.01	08
													PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terakses air minum			1	03	03		
																	1	03	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.03	1.03	01	27	06			Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Persentase penduduk yang terakses air minum	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya capaian akses layanan air minum di kawasan Kota							1	03	03	2.01	03
									Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya capaian akses layanan air minum di kawasan Perdesaan							1	03	03	2.01	04
									Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya capaian pelayanan air minum yang layak di kawasan Perdesaan							1	03	03	2.01	06
									Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya capaian pelayanan air minum yang layak di kawasan Perdesaan							1	03	03	2.01	08
									Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri	Terinventarisasinya data penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut							1	03	03	2.01	10
									Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat	Terinventarisasinya data penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut							1	03	03	2.01	11
									Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terjaganya layanan SPAM bagi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan							1	03	03	2.01	16
													PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang berakses air limbah			1	03	03		
1.03	1.03	01	43				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan Limbah Dan Persampahan Di Kabupaten Karangasem			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air limbah					1	03	03	2.01	
1.03	1.03	01	43	02			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Limbah	Persentase pengelolaan limbah di Kab. Karangasem	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya sistem operasi dan pemeliharaan akhir dari Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karangasem							1	03	03	2.01	10
													PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem			1	3	12		
							Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Prosentase terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota					1	3	12	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan							1	3	12	2.01	02
														PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Berkembangnya Jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem			1	3	11		
1.03	1.03	01	31					Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Meningkatnya ketaatan BUIK dan Pengguna BUIK terhadap peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi					1	3	11	2.01	
1.03	1.03	01	31	01				Sosialisai dan Diserminasi Peraturan Perundang – Undangan Jasa Konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang mengetahui dan memahami peraturan perundang - undangan jasa konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang lulus sertifikasi							1	3	11	2.01	06
										Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang memahami peraturan perundang-undangan jasa konstruksi							1	3	11	2.01	07
												Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem				1	3	11	2.02		
1.03	1.03	01	31	02				Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 jenis informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada SIPJAKI	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 jenis informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada SIPJAKI							1	3	11	2.02	01
										Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Persentase Tersedianya Informasi ke-PU-an							1	3	11	2.02	04
												Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terselenggaranya penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil/kecil)				1	3	11	2.03		
										Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase Penerbitan Rekomendasi IUJK sesuai dengan SOP yang ada							1	3	11	2.03	02
1.03	1.03	01	32					Program Pengembangan Informasi Bidang ke-PU-an	Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang ke-PU-an			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertibnya usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem					1	3	11	2.04	
1.03	1.03	01	32	01				Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan ke-PU-an	Prosentase jumlah kegiatan ke-PU-an yang dimonev	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kelembagaan Konstruksi	Persentase Peserta Bimbingan Teknis yang Mengetahui dan Memahami tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							1	3	11	2.04	02
										Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertibnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ada							1	3	11	2.04	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.03	1.03	01	41				Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang terencana dan tertata dengan baik					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase terlaksananya Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem			1	3	08		
										Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						1	3	08	2.01	
							Fasilitasi Perencanaan Gedung Negara	Persentase Fasilitas Perencanaan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang dapat dilaksanakan							1	3	08	2.01	01
1.03	1.03	01	41	01			Fasilitasi Perencanaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase fasilitasi perencanaan bangunan dan lingkungan yang dapat tertangani tepat waktu	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang dapat dilaksanakan							1	3	08	2.01	01
									Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Negara Kabupaten Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Regulasi Bangunan Gedung yang dapat diselesaikan tepat waktu							1	3	08	2.01	03
									Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung yang dapat diselesaikan tepat waktu							1	3	08	2.01	04
									Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase Pendaftaran HDNo Bangunan Gedung yang dapat diselesaikan tepat waktu							1	3	08	2.01	10
1.03	1.03	01	35				Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase perencanaan tata ruang dan bangunan yang dapat diselesaikan dengan baik					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem			1	3	12		
										Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota						1	3	12	2.01	
							Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	-	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan											
1.03	1.03	01	35	02			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK	Jumlah perencanaan dokumen RDTRK dan RTRK yang dapat di selesaikan tepat waktu	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan							1	3	12	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan							1	3	12	2.01	02	
										Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Prosentase Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan tepat waktu							1	3	12	2.01	04	
												Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					1	3	12	2.02		
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan dengan baik							1	3	12	2.02	01	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan dengan baik							1	3	12	2.02	02	
										Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang							1	3	12	2.02	03	
														PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem			1	3	09			
												Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					1	3	09	2.01		
1.03	1.03	01	35	16				Penetapan Kebijakan Tentang RTBL	Jumlah perencanaan dokumen RTBL yang dapat diselesaikan tepat waktu	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dapat diselesaikan tepat waktu							1	3	09	2.01	01	
														PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem			1	3	12			
1.03	1.03	01	37					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang														
								Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase Pengawasan Ruang dan Bangunan dari Rekomendasi Teknis IMB yang diterbitkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan baik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan baik					1	3	12	2.03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1.03	1.03	01	37	12			Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Prosentase Pengawasan Ruang dan Bangunan dari Rekomendasi Teknis IMB yang diterbitkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan baik							1	3	12	2.03	01	
1.03	1.03	01	37	11			Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang	Persentase informasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan tepat waktu	Sistem Informasi Penataan Ruang	Prosentase Pemberian Informasi Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan							1	3	12	2.03	02	
																	1	3	12	2.04		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang dengan baik							1	3	12	2.04	01	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan baik							1	3	12	2.04	02	
									Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang							1	3	12	2.04	03	
1.03	1.03	01	42				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan tata ruang yang dapat diselesaikan dengan baik														
1.03	1.03	01	42	01			Peningkatan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pelaporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang dapat diselesaikan tepat waktu	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Prosentase terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan baik							1	3	12	2.04	04	
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1	03	01			
1.03	1.03	01	39				Program Penataan halaman dan taman kantor	Terpeliharanya halaman dan taman kantor			Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					1	03	01	2.03		
1.03	1.03	01	39	01			Penataan Halaman dan Taman Kantor	Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai Dinas PUPR Kab. Karangasem	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya kondisi gedung kantor Dinas PUPR							1	03	01	2.03	28	
1.03	1.03	01	40				Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Hak atas tanah milik Pemerintah Kab. Karangasem tertata secara administrasi dan memenuhi aspek legalitas	Dikeluarkan dari Renja 2021													
1.03	1.03	01	40	01			Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah dan legalitas hak atas tanah milik Dinas PUPR Kabupaten Karangasem	Dikeluarkan dari Renja 2021													

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.05	04.01	1		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1		
1.05	04.01	1	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	1
1.05	04.01	1	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	2
1.05	04.01	1	8	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	8
1.05	04.01	1	10	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	10
1.05	04.01	1	11	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	11
1.05	04.01	1	12	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	04.01	1	13	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	13
1.05	04.01	1	15	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	15
1.05	04.01	1	17	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Makanan dan Minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Penyediaan Makanan dan Minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	17
1.05	04.01	1	18	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	18
1.05	04.01	1	19	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	masuk ke masing-masing kegiatan, sopir masuk ke pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ satpam masuk ke Pemeliharaan berkala Gedung kantor				
1.05	04.01	1	20	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyediaan Biaya Canang, Bebanter Piodalan	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan sad kahyangan	jumlah canang dan piodalan yang dapat disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Administrasi Umum	jumlah urusan penunjang yang dapat dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	16
04	01	01	24	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-Hari Nasional	Terlaksananya Penataan Dekorasi dan Kegiatan Hari-Hari Nasional	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	16

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	04.01	1	26	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Masuk kepada sub kegiatan sesuai item belanja				
1.05	04.01	2		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1		
1.05	04.01	2	22	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung/kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	28
1.05	04.01	2	24	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	30
1.05	04.01	2	28	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung/kantor yang dipeliharakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	2.03	34
1.05	04.01	6		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan yang tepat waktu					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	
1.05	04.01	6	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
04	01	27	01	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Penataan Halaman dan taman kantor	Persentase Penataan Halaman dan taman kantor		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	28
1.05	04.01	22		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan dan Penanganan Perumahan						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.05	04.01	22	3	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangasem	Terlaksananya Monev Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Perumahan		Program pengembangan perumahan	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	4	2	2.06	03
1.05	04.01	22	6	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pendataan dan Pemetaan Rumah	Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Rumah 1 Tahun						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.05	04.01	22	8	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.05	04.01	22	20	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Lingkungan Sehat Perumahan							Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	04.01	22	18	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		Program kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	4	3	2.02	04
1.05	04.01	22	19	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Perbaikan Lingkungan Permukiman	Terlaksananya Perencanaan dan Kontruksi Perbaikan Lingkungan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)				1	4	4	2.01	02
1.05	04.01	22	17	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)				1	4	4	2.01	02
	04.01			Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	04.01			Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Tercapainya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan sehat perumahan	Pembentukan/pe mbinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh		Penataan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	4	3	2.02	03
1.05	04.01	25		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Peningkatan Sistem Saluran Drainase di Kawasan Permukiman Perkotaan						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	04.01	25	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pembangunan Saluran Drainase	Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan/Drainase	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	4	4	2.01	02
1.05	04.01	25	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pengembangan Perumahan						Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	04.01			Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	PERKIM	Pemantauan Pengembangan Perumahan	Jumlah Pemantauan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Perumahan		Program pengembangan perumahan	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Urusan Pemerintahan Bidang Perkim	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	4	2	2.06	03

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	05	04	01	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi yang tertangani				Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01		
1	05	04	01	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan terlaksananya surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	01
1	05	04	01	02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening air listrik dan telepon yang dibayar	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening air listrik dan telepon yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	02
1	05	04	01	08	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	08
1	05	04	01	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang dibeli	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang dibeli	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	10
1	05	04	01	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	11
1	05	04	01	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya alat listrik dan elektronik	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya alat listrik dan elektronik	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	12
1	05	04	01	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya koran bacaan lain	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	15
1	05	04	01	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	17

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	05	04	01	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	18
1	05	04	01	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Masuk ke Sub Kegiatan yang sesuai												
1	05	04	01	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Terlaksananya piodalan di Disdamkar	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	16
1	05	04	01	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Masuk ke Sub Kegiatan yang sesuai												
1	05	04	01	33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah bulan terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Masuk ke Sub Kegiatan yang sesuai												
1	05	04	02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur					Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01		
1	05	04	02	05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	20
1	05	04	02	07	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	22
1	05	04	02	09	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	24
1	05	04	02	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	25

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	05	04	02	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	28
1	05	04	02	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional terpelihara	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	30
1	05	04	02	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	34
1	05	04	06		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan yang tepat waktu					Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01		
1	05	04	06	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.02	06
1	05	04	06	02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.02	09
1	05	04	06	07	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.02	07
1	05	04	01	33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan					Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01		
1	05	04	01	33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.03	16

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	05	04	05		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih					Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01		
1	05	04	05	06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi Aparatur / Petugas Operasional di Daerah	jumlah aparatur / petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur / petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.04	09
1	05	04	05	07	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan ketrampilan Fisik, Mental dan Disiplin aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur/petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur / petugas operasional di daerah yang mengikuti pelatihan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	01	2.04	09
1	05	04	26		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Response time 15 menit pemadam kebakaran sampai tujuan					Penanggulangan kebakaran	Response time 15 menit pemadam kebakaran sampai tujuan	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04		
								Persentase kasus kebakaran yang ditangani						Persentase kasus kebakaran yang ditangani							
								Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban							
								Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan						Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan							

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atau dibawah Dinas Pemadaman Kebakaran dan						Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atai dibawah Dinas Pemadaman Kebakaran dan								
1	05	04	26	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.01	02	
1	05	04	26	03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Jumlah lokasi pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan bencana kebakaran yang dilaksanakan	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan bencana kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.04	01	
1	05	04	26	04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah bulan penyusunan laporan	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.04	02	
1	05	04	26	05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kesiapsiagaan Penggunaan Instalasi Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung	Jumlah lokasi pembinaan yang dilaksanakan	pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah lokasi pendataan yang dilaksanakan	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi syarat	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.02	01	
1	05	04	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik					Penanggulan n kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	05	04	27	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.04	02
1	05	04	27	02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	Penanggulangan kebakaran	idem	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	05	04	2.04	02

7. BPBD

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.05	03.01	1		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yg tertangani			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1		
1.05	03.01	1	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	1
1.05	03.01	1	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	2
1.05	03.01	1	8	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	8
1.05	03.01	1	10	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	10
1.05	03.01	1	11	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	11
1.05	03.01	1	12	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	03.01	1	13	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	13
1.05	03.01	1	15	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	15
1.05	03.01	1	17	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Penyediaan Makanan dan Minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	17
1.05	03.01	1	18	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang terselenggarakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.03	18
1.05	03.01	1	19	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	masuk ke masing-masing kegiatan, sopir masuk ke pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas				
1.05	03.01	1	20	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan sad kahyangan	jumlah canang dan piodalan yang dapat disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Administrasi Umum	jumlah urusan penunjang yang dapat dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	01	1.03	16
1.05	03.01	1	26	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Masuk kepada sub kegiatan sesuai item belanja				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	03.01	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1		
1.05	03.01	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	20
1.05	03.01	2	22	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung/kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	28
1.05	03.01	2	24	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	30
1.05	03.01	2	28	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung/kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	34
1.05	03.01	2		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penataan Halaman dan Taman Kantor	persentase halaman dan taman kantor yang dipelihara				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	28
1.05	03.01	2		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	volume gedung kantor yang direhab	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.04	38
1.05	03.01	6		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan yang tepat waktu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	03.01	6	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun dan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	1
1.05	03.01	6	4	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang tersusun dan tepat waktu	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	4
1.05	03.01	17		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	1	1.01	
1.05	03.01	17	22	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Frekuensi perayaan hari-hari besar nasional dan daerah dapat diselenggarakan	jumlah perayaan hari besar nasional yang dapat diselenggarakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Administrasi Umum	jumlah urusan penunjang yang dapat dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah yang dapat tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	01	1.03	16
1.05	03.01	22		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	
1.05	03.01	22	3	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang tersedia	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang tersedia	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	4
1.05	03.01	22	6	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pos Emergency Service Respond di Kabupaten Karangasem	Persentase penanganan kejadian bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Persentase penanganan kejadian bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	2
1.05	03.01	22	8	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	7

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	03.01	22	20	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB)	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	06
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan	persentase logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersalurkan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase buffer stock yang tersedia	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	4
1.05	03.01	22	18	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	Jumlah dokumen evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihasilkan	Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihasilkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	7
1.05	03.01	22	19	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Mitigasi Bencana	jumlah sekolah / desa yang mendapat sosialisasi kebencanaan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	jumlah sekolah / desa yang mendapat sosialisasi kebencanaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah sekolah / desa / kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.01	2
1.05	03.01	22	17	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Operasional Tim Siaga Bencana	jumlah operasional tim siaga bencana yang terbayarkan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah operasional tim siaga bencana yang terbayarkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	6
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersumber dari rupiah murni	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalurkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	07
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Logistik di Pos Komando	persentase logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersalurkan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang tersedia	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	04
1.05	03.01	25		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Jumlah aparat penyelenggara penanggulangan bencana yang terdidik dan terlatih					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	03.01	25	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah aparat penanggulangan bencana yang terlatih	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparat penanggulangan bencana yang terlatih	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penguatan sistem penanggulangan bencana yang terlaksanakan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.04	1
1.05	03.01	25	2	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terlatih	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang terlatih	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	2
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah anggota TRC yang terlatih	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC yang terlatih	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	8
1.05	03.01	27		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat Terdidik dan terlatih Siaga Bencana					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	
1.05	03.01	27	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah masyarakat tangguh bencana yang terbentuk	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	06
1.05	03.01	28		Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Peringatan Dini	Jumlah rambu / alat peringatan dini yang tersedia					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	
1.05	03.01	28	1	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Pembangunan Sistem Peringatan Dini	Jumlah rambu / alat peringatan yang tersedia	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rambu / alat peringatan yang tersedia	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.02	5
1.05	03.01			Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Program Pengembangan Kemitraan	jumlah program kemitraan yang terselenggarakan					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kepemanduan Wisata Tirta	keterlibatan BPBD dalam Kemitraan pengurangan Bencana di objek wisata	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kepemanduan Wisata Tirta	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penguatan sistem penanggulangan bencana yang terlaksanakan	Program Penanggulangan-an Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	3	2.04	3
1.05	03.01	32	01	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Penerbitan Media Informasi Pemerintah Daerah	jumlah media informasi yang dapat dikelola	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten	jumlah kajian resiko bencana yang tersusun	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	persentase informasi rawan bencana kabupaten / kota yang terselenggarakan	Program Penanggulangan-an Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	01
1.05	03.01	32	02	Urusan Wajib Pemerintahan Dasar	Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat	Publikasi Interaksi Media	jumlah publikasi kegiatan yang dapat disampaikan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Belanja)	persentase humas, media, dan kemitraan komunitas yang terselenggara	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	persentase informasi rawan bencana kabupaten / kota yang terselenggarakan	Program Penanggulangan-an Bencana	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban secara cepat dan profesional	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	02

8. DINAS SOSIAL

PERMENDAGRI 13/RPJM/D/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	06	1.06.01	01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
				01			Penyediaan jasa surat-menyerurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan jasa surat-menyerurat	Jumlah materai yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	01
				02			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	02
				06			Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berizin/bersamsat	Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berizin/ bersamsat	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	06
				08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya selama 12 bulan 3 orang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya selama 12 bulan 3 orang	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	08
				10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	10
				11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	11
				12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dapat terpenuhi selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
			13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan perlengkapan Kantor yang dapat terpenuhi selama 12 bulan sebanyak 1 paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan perlengkapan Kantor yang dapat terpenuhi selama 12 bulan sebanyak 1 paket	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	13			
			15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang mampu tersedia selama 12 bulan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang mampu tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	15			
			17			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam rapat rutin selama 12 bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam rapat rutin selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	17			
			18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat diikuti selama 12 bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat diikuti selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	18			
			19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga kontrak administrasi/teknis/keamanan yang terbayar gajinya selama 12 bulan	Masuk pada sub. Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial kabupaten Karangasem										-	-	-	-	-	-
			20			Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Jumlah canang, bebanten piodalan, tilem, sehari dll yang mampu disediakan selama 12 bulan	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Persentase Canang dan banten Piodalan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen serta akuntabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	16			
			26			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dapat diikuti selama 12 bulan	Masuk pada sub. Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial kabupaten Karangasem yang sesuai dengan item belanja										-	-	-	-	-	-
1	06	1.06.01	02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PNINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
			22			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 2 unit	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan sebanyak 2 unit	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	28			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
				24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	30	
				28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dapat dipelihara selama 12 bulan sebanyak 10 AC, 14 komputer dan 11 laptop	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dapat dipelihara selama 12 bulan sebanyak 10 AC, 14 komputer dan 11 laptop	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	34	
				42			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor direhab sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Jumlah administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai Tujuan Organisasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	38	
1	06	1.06.01	06		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan														
				01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan (LAKIP, LPPD, LKPJ dan sejenisnya) selama 12 bulan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan (LAKIP, LPPD, LKPJ dan sejenisnya) selama 12 bulan	Administrasi Keuangan	Jumlah Terlaksananya administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.02	06	
				04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan dan sejenisnya selama 12 bulan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan dan sejenisnya selama 12 bulan	Administrasi Keuangan	Jumlah Terlaksananya administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.02	09	
				06			Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan sejenisnya selama 12 bulan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan sejenisnya selama 12 bulan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Renja (Rencana Kerja Perangkat Daerah) OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.01	02	
1	06	1.06.01	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUDITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Jumlah Fakir Miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi yang menerima pemberdayaan sosial														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			02			Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Peserta Pelatihan bagi Keluarga Miskin	-	-							-	-	-	-	-
			06			Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	11
			09			Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	Persentase penyaluran Rastra/raskin dikelurahan/desa	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi PKH	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	11
1	06	1.06.01	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok, keluarga dan masyarakat													
			02			Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Persentase korban trafficking, korban bencana dan perindungan hukum fakir miskin yang ditangani	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	05
			10			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase bantuan bagi korban bencana ala/sosial pada saat tanggap cepat darurat pasca bencana serta TAGANA yang mendapatkan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase bantuan bagi korban bencana ala/sosial pada saat tanggap cepat darurat pasca bencana serta TAGANA yang mendapatkan bimbingan sosial	Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV Aids dan Napza di luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.02	02
			21			Kajian identifikasi dan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase tersedianya data PBI JKN, PMKS, dan PSKS yang akurat dan Valid	Pendataan Fakir Miskin	Persentase tersedianya data PBI JKN, PMKS, dan PSKS yang akurat dan Valid	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Persentase ter-update nya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Bantuan Bagi Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	05	2.02	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				22			Pelayanan orang terlantar dan orang gangguan jiwa	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asalnya	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asalnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	06
				23			Keserasian sosial	Desa Yang mendapatkan bantuan kegiatan keserasian sosial	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang orang rentan yang difasilitasi untuk mendapat bantuan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Presentase bantuan sosial pasca bencana alam dan sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase pasilitasi bantuan sosial pasca konflik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	06	2.01	04
1	06	1.06.01	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan kebutuhan dasarnya, perlindungan dan jaminan sosial													
				07			Pembinaan dan penyantunan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang masih sekolah diluar panti yang mendapatkan pakaian dan perlatan sekolah serta jaminan sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah orang terlantar yang mendapat Pembinaan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	06
1	06	1.06.01	18		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan mendapatkan jaminan sosial													
				03			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental ,Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			04			Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental ,Spiritual dan Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Msalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	05
			06			Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PenyandangDisabilitas Terlantar ,Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti lomba olahraga NPC dan Utsawa Dharma Gita	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Msalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	06
1	06	1.06.01	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Jumlah anak yang terpenuhi kebutuhan dasar berupa Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi anak yang berda dalam panti asuhan													
			03			Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapat bantuan permakanan dan bantuan operasional kepada panti asuhan/LKSA	Penyediaan Permakanan	tersedianya bantuan sosial untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyediaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Msalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	01
1	06	1.06.01	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial													
			06			Pembinaan dan rehabilitasi eks narapidana	Jumlah Eks. Narapidana yang ditangani	Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental ,Spiritual dan Sosial	Jumlah Eks. Narapidana yang ditangani	Rehabilitasi PMKS Lainnya bukan Korban HIV Aids dan Napza di uar panti Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Msalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
			07			Penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng)	Jumlah gepeng yang terjaring razia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diberikan pembinaan dan dipulangkan ketempat asalnya	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah gepeng yang terjaring razia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diberikan pembinaan dan dipulangkan ketempat asalnya	Rehabilitasi PMKS Lainnya bukan Korban HIV Aids dan Napza di uar panti Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	06	
1	06	1.06.01	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANJUT USIA	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dan jaminan sosial														
			01			Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan diberikan jaminan sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar ,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan diberikan jaminan sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar ,Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.01	06	
1	06	1.06.01	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TSKS,PSM dan masyarakat yang mendapat pembinaan														
			01			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Perusahaan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Perusahaan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	
			02			Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraaan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial	Rehabilitasi PMKS Lainnya bukan Korban HIV Aids dan Napza di uar panti Sosial	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.02	14	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																				
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE								
				03			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM kesos yang mendapatkan bimbingan teknis	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Klrg	Jumlah SDM kesos yang mendapatkan bimbingan teknis	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK (Tenaga Kerja Sukarela) yang Mendapat Pelatihan/ Bimbingan Teknis	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Memiliki kemandirian.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.03	05				
				04			Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah orsos yang dibina	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orsos yang dibina	Pemberdayaan Sosial Adat Terpencil	Jumlah Organisasi Sosial Adat Yang dibina	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Memiliki kemandirian.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.02	14				
				06			Operasional LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	Persentase Kasus KDRT, Pelecehan Seksual dan Pencurian yang tertangani	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Persentase SDM dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah	Jumlah TKSK (Tenaga Kerja Sukarela) yang Mendapat Pelatihan/ Bimbingan Teknis	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Memiliki kemandirian.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	04	2.03	05				
1	06	1.06.01	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SOSIAL	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan																	
				21			Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Persentase orang yang tertanam nilai -nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Persentase Sesajen /banten dan sarana penunjang lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen serta akuntabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	16				
				22			Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Persentase Canang dan banten Piodalan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase terpenuhnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen serta akuntabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	04	01	2.03	16				
				24			Pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	Terselenggaranya Pelacakan Rute Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	Dalam mapping kegiatan ini tidak ditemukan pada urusan Dinas Sosial sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Disdikpora dengan Badan Kesbang Pol Linmas												-	-	-	-	-
				26			Pemeliharaan monumen perjuangan/tonggak sejarah	Terpeliharanya monumen monumen/Tonggak sejarah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Terpeliharanya monumen perjuangan/Tonggak sejarah	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional Kabupaten	Terpeliharanya Taman Makam Nasional	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	06	07	2.02	02				

9. DINAS KOPERASI UKM

RANCANGAN AWAL RENJA 2021										NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2	11	01			Usulan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.	Usulan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Usulan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01				
										Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia						1	17	01	2.03			
2	11	01	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	01		
2	11	01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	02		
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang terbayar	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah program penunjang urusan pemerintahan daerah			2	17	01	2.03	07		
2	11	01	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpakai	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	10		
2	11	01	01	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	11		
2	11	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	12		
2	11	01	01	03			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	13		
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan kantor yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	08		
2	11	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	15		
2	11	01	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang ada	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	17		
2	11	01	01	18			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi luar daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi luar daerah yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	18		
2	11	01	01	19			Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan															
2	11	01	01	20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	Terselenggaranya piodalan-piodalan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	16		
2	11	01	01	26			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi dalam daerah															

RANCANGAN AWAL RENJA 2021					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terpenuhinya Pengembangan Wawasan Kebangsaan													
2	11	01	17	07			Penyelenggaraan Hari Koperasi	Terlaksananya Hari Koperasi	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	16
2	11	01	17	13			Perayaan Hari Ulang Tahun LPD	Terlaksananya HUT LPD	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	16
2	11	01	22				Perayaan Hari-hari Besar Nasional Dan Daerah	Terlaksananya Hari besar Nasional dan Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	16
2	11	01					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah													
2	11	01	01	22			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan /berkala gedung kantor yang ada	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	28
2	11	01	01	24			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan /berkala kendaraan dinas/operasional terbayar	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	30
2	11	01	01	28			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan /berkala peralatan gedung kantor yang terbayar	Administrasi umum	Persentase Administrasi umum yang tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.03	34
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang telah tersedia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.02	
2	11	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan kinerja terbuat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terselesaikan	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang telah tersedia	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada.			2	17	01	2.02	06
							Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah					Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yang ada.			2	17	07		
										Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Persentase terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				2	17	07	2.01		

RANCANGAN AWAL RENJA 2021					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	01	16	05			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah Sarana Promosi Hasil Produksi yang dihasilkan	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Banyaknya Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro yang terdata	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yang ada.			2	17	07	2.01	01	
2	11	01	16	06			Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang terlatih	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Banyaknya Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yang ada.			2	17	07	2.01	04	
2	11	01					Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Terberdayanya Koperasi dan UKM														
2	11	01	19	03			Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Banyaknya Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro yang telah ada.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yang ada.			2	17	07	2.01	02	
							Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03			
											Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota					2	17	03	2.01		
2	11	01	16	07			Pelatihan Menejemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Pengelola Koperasi/KUD yang telah mengikuti Pelatihan	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.02	02	
2	11	01	16	11			Peningkatan Menejemen Usaha Bagi Koperasi/Kelompok	Jumlah pengurus pengawas dan pengelola koperasi yang dibentuk	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.02	02	

RANCANGAN AWAL RENJA 2021					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	01	16	13			Bimbingan Teknis Bagi Pengelola KSP/USP	Jumlah pengelola yang mengikuti bintek	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	02	
2	11	01	16	12			Peningkatan Manajemen Usaha Bagi LPD/LKM	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	02	
2	11	01					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah							Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi								
2	11	01	17	11			Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SP	Jumlah KSP/USP yang dimonev	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota yang terlaksana	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	01	
2	11	01	17	16			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang dimonev	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	01	
	11						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terpenuhinya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi														
2	11	01	18	09			Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan LPD	Jumlah LPD yang Dimonev	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	01	
2	11	01	18	13			Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Di Monev	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	01	
							Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah														

RANCANGAN AWAL RENJA 2021					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	01	16	15			Pembinaan Bagi Pengurus dan Pengawas LPD	Jumlah pengurus dan pengawas yang dibina	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi			2	17	03	2.01	01	
2	11						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terpenuhinya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi					Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi			2	17	04			
											Penilaian kesehatan koperasi Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Penilaian terhadap kesehatan koperasi Simpan pinjam dan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					2	17	04	2.01		
2	11	01	18	05			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pengawas KSP/USP yang dilatih	Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Banyaknya Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian kesehatan koperasi Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Penilaian terhadap kesehatan koperasi Simpan pinjam dan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi			2	17	04	2.01	02	
2	11	01	18	11			Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah KSP/USP yang sehat	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Penilaian kesehatan koperasi Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Penilaian terhadap kesehatan koperasi Simpan pinjam dan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi			2	17	04	2.01	01	
2	11	01					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah															
2	11	01	17	13			Sosialisasi Sumber-sumber Permodalan	Jumlah peserta KSP/USP yang disosialisasi	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Banyaknya Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Penilaian kesehatan koperasi Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Penilaian terhadap kesehatan koperasi Simpan pinjam dan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi			2	17	04	2.01	01	
2	11						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terpenuhinya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian yang terlaksana			2	17	05			
											Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota					2	17	05	2.01		

RANCANGAN AWAL RENJA 2021					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA PERMENDAGRI 90/2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	01	18	04			Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi	Jumlah Kelompok masyarakat yang memahami tentang koperasi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Banyaknya Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian yang terlaksana			2	17	05	2.01	01
2	11	01	18	10			Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Banyaknya Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian yang terlaksana			2	17	05	2.01	01
2	11	01	18	14			Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi	Jumlah usaha yang ditangani koperasi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Banyaknya Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian yang terlaksana			2	17	05	2.01	01

10. DINAS PERHUBUNGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	09			Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan	perhubungan							Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	perhubungan	2	2,2			
2	09	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	2,2	01		
2	09	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	01
2	09	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	02
2	09	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	08
2	09	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	10
2	09	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	11
2	09	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani				2	15	01	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	09	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	15	
2	09	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	17	
2	09	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	18	
2	09	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Masuk pada sub kegiatan yang sesuai													
2	09	01	20			Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor Perhubungan	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor Perhubungan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	16	
2	09	01	26			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Masuk pada sub kegiatan yang sesuai													
2	09	01	28			Penyediaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan														
2	09	01	33			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Terbayarnya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	2,2	01		
2	09	02	03		Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Yang dibangun	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	28
2	09	02	05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda 2, roda 4, dan mobil derek yang diadakan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda 2, roda 4, dan mobil derek yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	20
2	09	02	09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	24
2	09	02	10		Pengadaan meubelair	Jumlah meubuleur yang diadakan	Pengadaan Mebuleur	Jumlah meubuleur yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	25
2	09	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	28
2	09	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulanKendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulanKendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	30
2	09	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	JUmlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	JUmlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	34

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Prosentase Pelaporan yang tepat waktu					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	2,2	01		
2	09	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase layanan administrasi keuangan yg tertangani					2	15	01	2.02	06
2	09	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase layanan administrasi keuangan yg tertangani					2	15	01	2.02	09
2	09	06	07		Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase layanan administrasi keuangan yg tertangani					2	15	01	2.02	07
2	09	22			Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan													
2	09	22	17		Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar dan daerah yang dilaksanakan	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Piodalan di Beberapa Kantor Perhubungan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani					2	15	01	2.03	16
2	09	15			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipasang dalam kondisi					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2	15	02		
2	09	15	11		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan/Dermaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan/Dermaga yang dibangun													
2	09	15	15		Monitoring fasilitas Perlengkapan jalan	Jumlah Laporan yang disusun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpasangnya perlengkapan jalan Kabupaten					2	15	02	2.02	02

Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kewenangan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	09	15	13			Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpasangnya perlengkapan jalan Kabupaten						2	15	02	2.02	02
2	09	15	14			Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Meterisasi LPJU yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Meterisasi LPJU yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpasangnya perlengkapan jalan Kabupaten						2	15	02	2.02	02
2	09	16				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					2	15	02		
2	09	16	02			Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Prasarana Balai pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan						2	15	02	2.05	07
2	09	16	04			Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah Terminal yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah Terminal yang dipelihara	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penumpang yang keluar dan masuk Terminal						2	15	02	2.05	07
2	09	16	05			Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan yang dipelihara dalam kondisi mantap	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap						2	15	02	2.02	04
2	09	16	11			Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan yang dipelihara dalam kondisi mantap	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap						2	15	02	2.02	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	16	12			Rehabilitasi/pemeliharaan Tempat Parkir	Jumlah Tempat Parkir yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase perengkapan jalan yang dipelihara dalam kondisi mantap	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	04
2	09	16	13			Pemeliharaan Halte	jumlah Halte yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase perengkapan jalan yang dipelihara dalam kondisi mantap	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	04
2	09	17	10			Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan darat					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2	15	02		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal														
2	09	17	10			Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah sekolah yang dilayani angkutan gratis siswa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dilayani angkutan gratis siswa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianyan angkutan umum					2	15	02	2.09	01
2	09	17	15			Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	jumlah awak angkutan umum yang meningkat kemampuannya tentang tertib berlalu lintas	Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	jumlah awak angkutan umum yang meningkat kemampuannya tentang tertib berlalu lintas	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Angka kecelakaan lalu lintas					2	15	02	2.08	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	17	17		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan yang disusun	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun					2	15	02	2.06	01
2	09	17	23		Monitoring dan fasilitasi Sarana dan Prasarana kepelabuhan	Jumlah Laporan yang disusun													
Masuk pada sub kegiatan yang sesuai																			
2	09	17	24		Peningkatan pemungutan retribusi parkir bidang perhubungan	Jumlah tempat parkir yang tertata	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan	Jumlah tempat parkir yang tertata	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tertatanya tempat parkir					2	15	02	2.04	01
2	09	18			Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2	15	02		
2	09	18	02		Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal	jumlah halte yang dibangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah halte yang dibangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	02
2	09	18	05		Pembangunan Terminal dan Tempat Parkir	Jumlah terminal dan tempat parkir yang dibangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah terminal dan tempat parkir yang dibangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	02
2	09	19			Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pemasangan rambu-rambu Jumlah Pelanggaran Angkutan umum di jalan					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2	15	02		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	09	19	01			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan (rambu-rambu) yang dipasang dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	02	
2	09	19	02			Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan (marka jalan) yang dipasang dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	02	
2	09	19	03			Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan (pagar pengaman) yang dipasang dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi mantap					2	15	02	2.02	02	
2	09	19	04			Peningkatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah pengawasan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya angkutan umum					2	15	02	2.09	01	
2	09	19	07			Pengadaan Zebra Cross dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	jumlah Zebra Cross dan zona selamat sekolah yang dipasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan (ZoSS) yang dipasang dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang dalam kondisi					2	15	02	2.02	02	
2	09	19	08			Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas	jumlah pelajar yang memahami tentang keselamatan berlalu lintas														

Kegiatan yang belum terakomodir (Kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan berdasarkan Juklak dan Juknis dari Kementerian Perhubungan)

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	19	09			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan yang dihasilkan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianyan angkutan umum					2	15	02	2.09	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	09	20			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2	15	02		
2	09	20	02		Pengadaan alat penguji kendaraan bermotor	Jumlah Alat pengujian Kendaraan bermotor yang diadakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat pengujian Kendaraan bermotor yang diadakan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan					2	15	02	2.05	01
2	09	20	06		Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang laik jalan	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji berkala dalam keadaan laik jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan					2	15	02	2.05	03

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
															URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	2				
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		2	11			
2	05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			2	11	01		
										Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	
2	05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	01
2	05	01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telpun	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	02
2	05	01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terurusnya surat perijinan kendaraan dinas /operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	06
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase tersedianya jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	07
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	08
2	05	01	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase tersedianya alat tulis kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	10
2	05	01	06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Prosentase tersedianya barang cetak dan pengadaan	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2	05	01	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	12
2	05	01	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	13
2	05	01	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	15
2	05	01	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Jumlah Upacara keagamaan yang dilaksanakan / Persentase upacara keagamaan yang dilaksanakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	16
2	05	01	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	16
2	05	01	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat Kordinasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	18
2	05	01	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis /Keamanan	Terbayarnya jasa /upah tenaga pendukung administrasi/teknis /keamanan/sopir /keamanan/sopir									Menjadi item belanja pada sub.bagian				
2	05	01	26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah yang terlaksanakan / Persentase pelaksanaan rapat koordinasi									Menjadi item belanja pada sub.bagian				
2	05	01	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan									
2	05	01	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	22
2	05	02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	28

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	05	02	07	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	30
2	05	02	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan					2	11	01	2.03	34
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	11	01	2.04	
								Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi elektronik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	11	01	2.04	01
2	05	02	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan pelaporan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					2	11	01	2.01	
2	05	02	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan laporan yang tersusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					2	11	01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					2	11	01	2.01	02
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan DLH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					2	11	01	2.01	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (LAKIP, LPPD, LKPJ, RFK)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					2	11	01	2.01	05
									Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	01
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	02
							Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Prosentase bahan yang dipersiapkan	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	03
							Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Prosentase tersusunnya laporan akhir tahun keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	04
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase bahan tanggapan pemeriksaan yang dipersiapkan	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	05
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Prosentase tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	07
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan					2	11	01	2.02	09
2	05	06		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola				Program Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya pengelolaan persampahan			2	11	11		
									Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola					2	11	11	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	05	06	06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang diadakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tersedia	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola				2	11	11	2.01	05
2	05	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya operasional kebersihan	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengurangan sampah ke Tempat Pemrosesan Sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola				2	11	11	2.01	02
2	05	15	04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan angkutan persampahan	Terlayannya angkutan persampahan/kebersihan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase sampah tertangani	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola				2	11	11	2.01	03
2	05	15	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Sampah	Terkelolanya sampah di Kabupaten Karangasem	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase sampah tertangani	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola				2	11	11	2.01	03
										Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta				2	11	11	2.03	
2	05	15	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemungutan retribusi persampahan	obyek pemungutan retribusi persampahan	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta				2	11	11	2.03	03
2	05	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan					Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2	11	03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
										Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem					2	11	03	2.01		
2	05	16	03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya titik kualitas lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran media Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem					2	11	03	2.01	01	
2	05	16	23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Parameter pengujian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran media Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem					2	11	03	2.01	01	
										Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan					2	11	03	2.02		
2	06	16	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pemantauan Kerusakan dan Pemulihan lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Terlaksananya pemberian informasi peringatan kepada masyarakat yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan					2	11	03	2.02	01	
2	05	16	03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar nasional dan hari besar lainnya					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				2	11	01		
2	05	16	23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Frekwensi pelaksanaan hari besar nasional dan hari besar lainnya	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Persentase administrasi umum terselesaikan						2	11	01	2.03	16
2	05	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penataan dan pemeliharaan RTH					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Terwujudnya pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati				2	11	04		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
										Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01		
2	05	24	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penataan dan pemeliharaan RTH	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pengelolaan RTH	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01	04	
2	05	24	08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan dan pengendalian RTH	Tercapainya pengawasan dan pengendalian RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pengelolaan RTH	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01	04	
2	05	24	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan angkutan perlindungan dan pertamanan	Terlaksananya pelayanan angkutan dan pertamanan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pengelolaan RTH	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01	04	
2	05	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi program kampung iklim			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem					2	11	03	2.01		
2	05	17	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi program kampung iklim	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH di Kabupaten Karangasem					2	11	03	2.01	02	
2	05	17	08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Jumlah titik SDA yang direhabilitasi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pengelolaan RTH	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01	04	
2	05	17	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Terlaksananya perayaan Hari Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pengelolaan RTH	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keaneekaragaman Hayati					2	11	04	2.01	04	
2	05	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang tersusun					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup			2	11	02			
2	05	17	05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan hidup														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
										Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Karangasem					2	11	02	2.01		
2	05	27		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang tersusun 1 dok.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen IKPLHD, IKLH,UKL/UPL	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Karangasem					2	11	02	2.01	01	
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Tersusunnya buku laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)														
2	05	27	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	Persentase penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan terselesaikan	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen IKPLHD, IKLH,UKL/UPL	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Karangasem					2	11	02	2.01	01	
										Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Kab. Karangasem					2	11	02	2.02		
								Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusun dan terlaksananya KLHS rencana tata ruang	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Kab. Karangasem					2	11	02	2.02	01	
												Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terwujudnya penanganan pengaduan lingkungan hidup			2	11	10			

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
										Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Karangasem					2	11	10	2.01	
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian dugaan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kab. Karangasem	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Karangasem					2	11	10	2.01	01
												Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)	Tertwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			2	11	06		
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH dikeluarkan oleh Kabupaten Karangasem terbina					2	11	06	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	05	27	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan Penaatan Dokumen Lingkungan	Persentase unit usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan dokumen lingkungan	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH dikeluarkan oleh Kabupaten Karangasem terawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH dikeluarkan oleh Kabupaten Karangasem terbina					2	11	06	2.01	03
2	05	27	03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terawasi dan memiliki tempat penyimpanan					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)			2	11	05		
										Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3					2	11	05	2.01	
2	05	27	04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah unit usaha dan atau kegiatan yang mengelola B3 dan berpotensi menghasilkan limbah B3 yang terawasi dan terbina	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah unit usaha/kegiatan yang memenuhi komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3					2	11	05	2.01	01
2	05	28		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terwujudnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			2	11	08		

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
										Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga masyarakat					2	11	08	2.01	
2	05	28	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata TK. Kabupaten, Propinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan							2	11	08	2.01	01
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Desa yang berperan aktif dalam pengendalian													
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			Organisasi yang mengikuti lomba kebersihan													
												PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terwujudnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			2	11	09		
										Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau perorangan yang diberikan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota					2	11	09	2.01	
								Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau perorangan yang diberikan penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota					2	11	09	2.01	01

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2.06		Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	12			
	01			Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara				01			
		01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani							2.03	01	
		02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								02	
		08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								08	
		10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								10	
		11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								11	
		12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								12	
		15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani									
		17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								17	
		18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani								18	
		20		Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Terlaksananya Piodalan dan Sesajen	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Sesajen yang diperlukan dan tersedianya materi pameran	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tertangani							01	2.03	16
		22		Perayaan hari-hari besar Nasional dan Daerah	Persentase penyediaan materi pameran dan Jasa dekorasi dalam rangka HUT RI dan Hari-hari besar Daerah													
2.2.06	01																	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara			2	12	01			
		22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani										28
		24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Persentase terpeliharanya kendaraan Dinas/Oprasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase terpeliharanya kendaraan Dinas/Oprasional										30
		26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor										32
2.06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara			2	12	01	2.01		
		07		Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja	Persentase tersusunnya buku perencanaan dan laporan kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase layanan adminstrasi keuangan yg tertangani										06
		08		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah tersusunnya buku laporan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/semesteran	Jumlah Laporan keuangan Bulanan dan Semesteran	Administrasi Keuangan	Persentase layanan adminstrasi keuangan yang tertangani										09
2.06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Kependudukan			2	12	04			
		20		Penyusunan Profil kependudukan	Persentase tersusunnya Buku Profil	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah data Kependudukan yang disajikan	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data Kependudukan yang disajikan										
		23		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	kegiatan milik bagian organisasi Pemda						DIHILANGKAN							
		24		Fasilitasi pemanfaatan data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan kepada Masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan kepada masyarakat	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Data yang di sajikan		Persentase Data yang di sajikan					2	12	04	2.03	07	
		25		Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah Inovasi yang dilaksanakan		Persentase inovasi yang dilaksanakan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2	12	04	2.03	04	
										Program Pendaftaran Penduduk	Persentase terdatanya penduduk			2	12	02	2.01		

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
		27			Pendataan Penduduk	Persentase Tersusunnya Laporan Penduduk (LAMPID)	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang terdata		Persentase Valid Laporan Data Penduduk								01				
		29			Pelayanan Administrasi Perpindahan Penduduk	Persentase penertiban administrasi Surat Pindah Datang penduduk	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang tertangani		Persentase Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang ditangani							2	12	02	2.01	02	
		17			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan		Persentase Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang di terbitkan											04	
		32			Kerjasama tentang Pemanfaatan data dengan Instansi terkait	Persentase pelaksanaan Kerjasama tentang Pemanfaatan data dengan Instansi terkait	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang dilaksanakan		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang dilaksanakan								2	12	04	2.01	5
		34			Peningkatan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi kependudukan	Jumlah SDM yang dibina dalam upaya penguasaan teknologi informasi kependudukan	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah SDM Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang di awasi		Persentase SDM Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang di awasi	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2	12	04	2.04	05
											Program Pencatatan Sipil	Persentase Program Pencatatan Sipil yang di laksanakan					2	12	04			
		40			Pelayanan Goes To Banjar Akta Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dok. Akta-akta Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dilaksanakan	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dilaksanakan											2.01	01
		41			Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil																
		16			Penataan Warkah Capil	Persentase Penataan Dokumen Warkah Capil																
		43			Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Nonfisik)	Persentase meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan										2	12	04	2.03	06
		44			Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Nonfisik)	Persentase tersedianya bahan penerbitan dokumen kependudukan		Persentase tersedianya bahan penerbitan dokumen kependudukan														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
		45			Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) dan/atau pendayagunaan Data Kependudukan (DAK Nonfisik)	Persentase meningkatnya pengelolaan SIAK dan pendayagunaan data kependudukan		Persentase meningkatnya pengelolaan SIAK dan pendayagunaan data kependudukan										
		46			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Nonfisik)	Persentase meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN disdukcapil		Persentase meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN disdukcapil										

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	05	2.08.01.	17	Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan														
						Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan yang terfasilitasi : 4 perayaan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan					
2.	08.	2.08.01.	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim tepat waktu : 330 surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim tepat waktu : 330 surat	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	01
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar : 36 rekening bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar : 36 rekening bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	02
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar : 2 orang, 72 unit	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan yang terbayar : 2 orang, 72 unit	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	08
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar : 572 unit	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar : 572 unit	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	10
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah foto copy dan cetak yang terbayar : 10.000 lembar, 12 buku	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah foto copy dan cetak yang terbayar : 10.000 lembar, 12 buku	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	11
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang terbayar : 56 komponen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang terbayar : 56 komponen	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	12
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar : 36 rekening bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar : 36 rekening bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	15
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terbayar : 800 kotak	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang terbayar : 800 kotak	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	17
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi : 10 kali	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi : 10 kali	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	18
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya : 43 orang		Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya : 43 orang			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	
						Penyediaan Biaya Canang Berbanten Piodalan	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar : 25 paket bulan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi : 30 kali					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	
2.	08.	2.08.01.	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar : 3 unit	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	03
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	13
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	14
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	22

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 24
					Pengadaan Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 25
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 32
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 34
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 35
					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.04 01
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bahan baku bangunan yang terbakar : 4 unit	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 28
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 38
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 58 unit	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 06
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 30
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 40
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara : 10 unit	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.03 09
2.	08.	2.08.01.	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu : 10 laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.01 01
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.01 02
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.01 04
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.01 03
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.02 06
					Kegiatan Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah monitoring kinerja SKPD yang terlaksana tepat waktu : 8 monitoring	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2 14 01 2.01 06

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.	08.	2.08.01.	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
						Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah orang untuk penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional yang dinilai : 30 PKB	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	01	2.03	
2.	08.	2.08.01.	15			Program Keluarga Berencana														
						Pengadaan sarana dan prasarana keluarga berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Penyediaan materi dan pengembangan materi pendidikan dan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	07
								Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	08
								Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		Program Pembinaan Keluarga Bercana (KB)				2	14	03	2.01	03
								Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Program Pembinaan Keluarga Bercana (KB)				2	14	03	2.02	02
								Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota		Program Pembinaan Keluarga Bercana (KB)				2	14	03	2.03	06
								Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)				2	14	04	2.01	02
								Penyediaan dan pengembangan materi IPK	Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang mampu tersedia seperti BKB KIT, KIE KIT dan GenRe KIT : 8 Upt	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)				2	14	04	2.01	10
						Belanja Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokarya (Minilok)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		Program Pembinaan keluarga berencana (KB)				2	14	03	2.01	07
								Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan							2	14	03	2.01	08
								Pengendalian program KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan							2	14	03	2.01	09

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
								Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan(kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLPKKS, PIK-R dan UPPKS)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan keluarga				2	14	04	2.01	05	
								Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLPKKS, PIK-R dan UPPKS)	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan								2	14	04	2.01	06
								Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	Terpenuhinya belanja Operasional Keluarga Berencana : 8 balai penyuluhan								2	14	02	2.01	15
2.	08.	2.08.01.	17			Program Pelayanan Kontrasepsi															
						Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB	Terlayannya pemasangan kontrasepsi terhadap 150 akseptor	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Terpenuhinya alokasi di faskes dan jejaringnya	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota		Pembinaan Keluarga Berencana					2	14	03	2.01	01
								Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Terlaksananya follow up post pelayanan								2	14	03	2.01	06
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro d faskes dan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terbinanya faskes dan jejaringnya sebanyak 1 kali /faskes/tahun							2	14	03	2.01	08	
								Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta KB Pria								2	14	03	2.01	13
						Pelayanan Kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK	Terlayannya pelayanan kontrasepsi KB terhadap 150 akseptor	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah peserta metode MKJP meningkat								2	14	03	2.01	03
								Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan dana kalau terjadi kegagalan dalam pemakaian alkon dengan metode MKJP							2	14	03	2.01	04	
								Dukungan Operasional pelayanan KB bergerak	Tersedianya anggaran untuk pelayanan KB keliling di setiap kecamatan min 2 kali setahun							2	14	03	2.01	11	
2.	08.	2.08.01.	18			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri															
						Pelatihan dan Pembinaan Administrasi kader Kelompok UPPKS	Terbinanya Kader dan Kelompok UPPKS sebanyak 100 orang	Orientasi pelatihan teknis Pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan		2	14	04	2.01	05	
						Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)	Meningkatnya Pemahaman Sub PPKBD para kelian banjar (tentang program KB) : 72 orang	Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holder dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi kepada pemangku stake holder di kabupaten, kecamatan dan Desa 1 kali dalam setahun	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Pembinaan Keluarga Berencana				2	14	03	2.01	01	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
			Orientasi Bina Keluarga Balita di Kecamatan	Terlatihnya Keluarga Balita di 8 (delapan) Kecamatan	Orientasi pelatihan teknis Pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	05	
			Sosialisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Kesertaan KB dalam mensukseskan Program Nasional : 125 peserta														
					Promosi dan sosialisasi klp kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi sebanyak 33 kali pada 11 kampung KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera					2	14	04	2.01	07
					Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Terlaksananya promosi dan sosialisasi sebanyak 1 kali	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera					2	14	04	2.02	04
			Penggarapan Calon Akseptor KB melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	Meningkatnya Calon Akseptor KB dalam Rangka TKBK Melalui Mobil Penerangan KB : 726 banjar dinas	KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terlaksananya KIE dengan kearifan baya lokal setiap kecamatan sebanyak 2 kali dalam setahun	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					2	14	03	2.01	01
					Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa, cetak, dan elektronik serta media luar ruang	Tersosialisanya program KKBPK di media cetak, elektronik maupun di Medsos sebanyak 4 kali setahun								2	14	03	2.01	02
					Penggunaan media masa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Tersosialisanya program KKBPK di media cetak, elektronik maupun di Medsos sebanyak 4 kali setahun								2	14	03	2.01	04
														2	14	03	2.01	06
2.	08.	2.08.01.	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR													
			Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi Keluarga Remaja dan Keluarga Sebaya	Meningkatnya pemahaman kelompok remaja dan keluarga sebaya tentang PIK-Remaja dari 90% menjadi 100% : 200 orang	Orientasi pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	04	
			Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	meningkatnya kategori PIK Remaja dari kategori tumbuh menjadi kategori tegak : 25 kelompok	Orientasi pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	04	
					Orientasi pelatihan teknis Pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	05	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
2.	08.	2.08.01.	23			Program Penyiapan Tenaga Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga																			
						Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	Terbinanya Kelompok Bina Keluarga Lansia sebanyak 42 kelompok	Orientasi pelatihan teknis Pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pelatihan bagi kader poktan di 8 kecamatan sebanyak 1 kali	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	05					
2.	08.	2.08.01.	24			Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - Padu																			
						Pemutakhiran Data Keluarga	Terdatanya 8 K/O Potensi Wilayah di 8 Kecamatan, Terdatanya 70 K/O PKB/PLKB di 8 Kecamatan, Terdatanya 78 K/O PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Sub PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Kelompok BKB, Terdatanya 53 K/O Kelompok BKR, Terdatanya 43 K/O Kelompok BKL, Terdatanya 130 K/O Kelompok UPPKS, Terdatanya 23 K/O Kelompok PIK-R, Terkirimnya Semua Data K/O ke BKKBN. : 726 banjar dinas	Penyediaan data dan Informasi keluarga	Terdatanya 8 K/O Potensi Wilayah di 8 Kecamatan, Terdatanya 70 K/O PKB/PLKB di 8 Kecamatan, Terdatanya 78 K/O PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Sub PPKBD di 8 Kecamatan, Terdatanya 161 K/O Kelompok BKB, Terdatanya 53 K/O Kelompok BKR, Terdatanya 43 K/O Kelompok BKL, Terdatanya 130 K/O Kelompok UPPKS, Terdatanya 23 K/O Kelompok PIK-R, Terkirimnya Semua Data K/O ke BKKBN. : 726 banjar dinas											2	14	02	2.02	11	
								Pencatatan dan pengumpulan data keluarga		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabupaten/kota		Pengendalian Penduduk								2	14	02	2.02	12	
								Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Terlaksananya laporan pengendalian lapangan melalui website BKKBN										2	14	02	2.02	13	
								Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain		Terlaksananya pembentukan rumah dataku di 11 kampung KB										2	14	02	2.02	08	
								Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga		Tersusunnya laporan kegiatan program mKKBPK sebanyak 2 dokumen										2	14	02	2.02	10	
						Pengembangan Kampung KB	Terlaksananya Kegiatan dan Program-program Kampung KB : 8 kampung KB	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terbentuknya pokja di kampung KB sebanyak 11 pokja				Pembinaan Keluarga Brencana (KB)								2	14	03	2.04	03
								Pembinaan terpadu kampung KB	Terbinanya kampung KB 2 kali setahun pada 11 kampung KB											2	14	03	2.04	04	
								Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Keterlibatan lintas sektor sdalam penyediaan anggaran di kampung KB											2	14	03	2.04	02	
								Penyerasian kebijakan pembangunan darah Kabupaten/kotatempat terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	01					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	02
					Dukungan Pelaksanaan survei kegiatan/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	03
					Dukungan Pelaksanaan survei kegiatan/Pendataan indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	04
					Penguatan Kerjasama Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	05
					Penguatan Kerjasama Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	06
					Penyediaan dan Pengembangan Materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kab/Kota		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	07
					Penyediaan dan Pengembangan Materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal Kab/Kota		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	08
					Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS, jalur formal dan informal		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	09
					Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	10

kegiatan belum terakomodir

kegiatan belum terakomodir

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	11
					Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	12
					Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	13
					Pelaksanaan sarasehan hasil pemutahiran data keluarga		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan pemerintah Daerah/Kabupaten / kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.01	14
					Perumusan parameter kependudukan		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	01
					Penyediaan dan Pengolahan data kependudukan		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	02
					Penyusunan profil kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	03
					Pemetaan kependudukan		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	04
					Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	05
					Pengembangan Model solusi strategis Pengendalian dampak kependudukan		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	06
					Pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (early warning system/peringatan dini)		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	07

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Dasar dan Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga		Pemetaan perkiraan pendudukan penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	09
					Pembinaan dan Pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		Pemetaan perkiraan pendudukan penduduk cakupan daerah kab/kota		Program Pengendalian Penduduk		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	02	2.02	14
					Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)		Pelaksanaan Advokasi, komunikasi dan Informasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.01	05
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.02	01
					Penguatan Pelaksanaan penyuluhan pergerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.02	03
					Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.02	04
					Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	03
					Penyusunan Rencana Kebutuhan alokasi dan sarana penunjang KB		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	05
					Pembinaan pelayanan KB dan Kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	08
					Promosi konseling dan kespro serta hak-hak reproduksi di faskes dan poktan		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	09
					Peningkatan kompetensi dan tenaga pelayanan KB dan kespro		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	10
					Promosi dan konseling KB pasca persalin dan pasca keguguran		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.03	12

kegiatan belum terak

modir

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		Programn Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	03	2.04	01
					Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKL,BKR, PIK-R, UPPKS		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	01
					Promosi dan sosialisasi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi ortu hebat, genre, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	08
					Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	09
					Penyediaan dan Pengembangan materi IPK		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	10
					Advokasi dan promosi IPK		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	11
					sosialisasi IPK		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.01	12
					Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, PPKS dan UPPKS)		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kotadalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.02	01
					Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kotadalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.02	02

kegiatan belum terakoi

lum

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS)		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kotadalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.02	03
					Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kotadalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program penberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	2	14	04	2.02	04

kegiatan berakomodir

14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARANGASEM

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								Urusan Pemerintah wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan dasar	2				
2	02			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2	08			
2	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya program penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	08	01		
							Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran					2	08	01	2.03	
2	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim						2	08	01	2.03	01
2	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air, dan listrik yang terbayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air, dan listrik yang terbayar						2	08	01	2.03	02
2	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang bulan tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang bulan tenaga kontrak kebersihan yang terbayar gajinya						2	08	01	2.03	08
2	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar						2	08	01	2.03	10
2	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbayar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbayar						2	08	01	2.03	11
2	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang terbayar	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang terbayar						2	08	01	2.03	12
2	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rekening bulan surat kabar yang terbayar						2	08	01	2.03	15
2	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat rutin yang terbayar	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat rutin yang terbayar						2	08	01	2.03	17
2	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi						2	08	01	2.03	18

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	02	01	19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keselamatan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar gajinya							2	08	01	2.03	07
2	02	01	20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar dan Jumlah perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang terfasilitasi							2	08	01	2.03	16
2	02	01	26			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi									2	08	01	2.03	
2	02	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
2	02	02	05			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terbayar	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							2	08	01	2.03	20
2	02	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar							2	08	01	2.03	22
2	02	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara							2	08	01	2.03	28
2	02	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara							2	08	01	2.03	30
2	02	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara							2	08	01	2.03	34
2	02	02	42			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi							2	08	01	2.03	38
2	02	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Tepat Waktu			Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya program penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	08	01	2.02	
2	02	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan tepat waktu							2	08	01	2.02	06
2	02	06	05			Monitoring / Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Evaluasi kinerja SKPD yang terlaksana tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi kinerja SKPD yang terlaksana tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2	08	01	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
2	02	15			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase desa/kelurahan layak anak					Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten Layak Anak			2	08	06				
									Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten /kota	Persentase lembaga yang berperan dalam pembentukan desa layak anak					2	08	06	2.02			
2	02	15	10		Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah desa layak anak yang terbentuk	Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah desa layak anak yang terbentuk							2	08	06	2.02	04		
2	02	15	08		Peningkatan Peran Anak sebagai Generasi Penerus Pembangunan	Jumlah kegiatan berorientasi anak yang terfasilitasi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Partisipasi anak/lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak							2	08	06	2.02	01		
2	02	15	12		Pengembangan Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak	Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / kota	Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif							2	08	06	2.02	03		
2	02	15	11		Forum Anak Daerah dan Mimbar Anak	Jumlah anak sekolah yang berpartisipasi aktif dalam FAD (Forum Anak Daerah) dan MAB (Mimbar Anak Bali)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Anak Sekolah/lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anak Sekolah/lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak					2	08	06	2.01	01		
2	02	15	13		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak	Jumlah APSAI yang terfasilitasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anak Sekolah/lembaga yang berpartisipasi dalam pemenuhan Hak anak					2	08	06	2.01	01		
2	02	16			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender					Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender			2	08	02				
									Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang responsif gender					2	08	02	2.01			
2	02	16	01		Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Jumlah perangkat desa yang teradvokasi PUG	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat desa yang teradvokasi PUG							2	08	02	2.01	03		
2	02	16	13		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah perangkat desa yang mampu menerapkan anggaran responsif gender	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG								2	08	02	2.01	03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	02	16	07			Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Ksbupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender								2	08	02	2.01	02
2	02	16	03			Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah lembaga berbasis gender yang mampu diberdayakan	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat desa yang berbasis gender yang mampu diberdayakan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga yang berbasis gender yang mampu diberdayakan						2	08	02	2.03	01
2	02	16	14			Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan dan perangkat desa yang mampu memahami kesetaraan dan keadilan gender	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota									2	08	02	2.03	01
2	02	16	12			Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah peserta workshop yang mampu memahami peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang terfasilitasi di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah perempuan yang terfasilitasi di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						2	08	02	2.02	01
2	02	18	04			Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah pengusaha perempuan yang memahami pengelolaan manajemen usaha										2	08	02	2.02	01
2	02	18	11			Peningkatan Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pembangunan	Jumlah organisasi Wanita (GOW) yang terfasilitasi										2	08	02	2.02	01
2	02	18	12			Peningkatan Peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam Pembangunan	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang terfasilitasi														
2	02	18	14			Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah anggota organisasi wanita yang berpartisipasi aktif	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota organisasi wanita yang berpartisipasi aktif								2	08	02	2.02	02
1	05	17				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya program penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	17	22			Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang terfasilitasi	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bulan upakara persembahyangan yang terbayar dan Jumlah perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang terfasilitasi												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	02	17			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase cakupan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu					Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase cakupan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu			2	08	05		
2	02	17	01		Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah produk hukum tentang perlindungan perempuan dan anak yang tersusun	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan buku statistik gender dan Profil Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak Dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan buku statistik gender dan Profil Anak					2	08	05	2.01	02
2	02	17	02		Pelatihan Bagi Pelatih(TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah peserta TOT yang terlatih dalam pelayanan dan pendampingan Korban KDRT	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten / kota	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani	Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan terfasilitasi yang			2	08	03	2.01	01
2	02	17	05		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta yang teradvokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten / kota	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani					2	08	03	2.01	01
2	02	17	06		Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Jumlah peserta sosialisasi KDRT yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten / kota	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani					2	08	03	2.01	01
2	02	17	08		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten / kota	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani					2	08	03	2.01	01
2	02	17	10		Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani sesuai SOP yang ditindaklanjuti	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus tindak Kekerasan terhadap anak yang tertangani	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kasus tindak Kekerasan terhadap anak yang tertangani	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi			2	08	07	2.02	01
2	02	17	13		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah P2TP2A yang dapat dikembangkan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah P2TP2A yang dapat dikembangkan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah P2TP2A yang dapat dikembangkan	Perlindungan Perempuan	Presentase Jumlah Kasus yang tertangani oleh POKJA			2	08	03	2.03	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	02	18				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan					Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan			2	08	02		
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan					2	08	02	2.02	
2	02	18	15			Pembinaan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sehat Sejahtera (Pembinaan P2WKSS)	Jumlah ibu rumah tangga anggota kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun keluarga sehat sejahtera	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Anggota kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun Keluarga Sehat Sejahtera	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang mampu mewujudkan Kesetaraan gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sehat Sejahtera			2	08	04	2.01	03

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)															
KODE		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2.12	2.12.01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaita	2	18				
2.12	2.12.01	.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03		
2.12	2.12.01	.01	.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	01
2.12	2.12.01	.01	.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	02
2.12	2.12.01	.01	.10		Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	10
2.12	2.12.01	.01	.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia dan banyaknya fotocopy yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia dan banyaknya fotocopy yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.01	.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	12
2.12.	2.12.01	.01	.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	13
2.12.	2.12.01	.01	.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	15
2.12.	2.12.01	.01	.17			Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	17
2.12.	2.12.01	.01	.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	18
2.12.	2.12.01	.01	.19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Banyaknya Upah tenaga administrasi, teknis dan pengemudi yang terbavarkan									Menjadi item belanja pada sub kegiatan				
2.12.	2.12.01	.01	.20			Penyediaan canang, bebanten dan piodalan	Penyelenggaraan persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyelenggaraan persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	16

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.01	.26			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terfasilitasi									Menjadi item belanja pada sub kegiatan				
2.12.	2.12.02	.02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan													
2.12.	2.12.02	.02	.05			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	20
2.12.	2.12.02	.02	.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	28
2.12.	2.12.02	.02	.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	30
2.12.	2.12.02	.02	.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	34
2.12.	2.12.02	.02	.42			Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor	Banyaknya bangunan yang siap pakai	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banyaknya bangunan yang siap pakai	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	38
2.12.	2.12.06	.06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu			Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.0	.06	.01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.02	06
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.01	
2.12.	2.12.0	.06	.06			Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun sebayak	Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun sebayak	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.01	02
2.12.	2.12.0	.15				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase tersebarnya informasi peluang investasi			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase LKPM yang dimonitoring			2	18	05	2.01	
2.12.	2.12.0	.15	.06			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha	Frekuensi pertemuan dengan dunia usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Frekuensi pertemuan dengan dunia usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah perusahaan yang dimonitoring			2	18	05	2.01	02
										Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelenggaraan promosi penanaman modal	Promosi Penanaman Modal	Persentase tersebarnya peluang investasi			2	18	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.15	.10			Penyelenggaraan pameran investasi	Banyaknya pameran investasi yang diselenggarakan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya pameran investasi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi penyelenggaraan promosi penanaman modal	Promosi Penanaman Modal	Persentase tersebarnya peluang investasi			2	18	03	2.01	02
										Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase realisasi investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang dimonitoring			2	18	05	2.01	
2.12.	2.12.01	.15	.12			Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem	Banyaknya buku monev investasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku monev investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal			2	18	05	2.01	01
2.12.	2.12.01	.16				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/bidang usaha unggulan	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal			2	18	02	2.02	
2.12.	2.12.01	.16	.12			Penyusunan Profil Investasi Unggulan Daerah Kabupaten Karangasem	Banyaknya buku profil investasi unggulan daerah yang tersusun	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Karangasem	Banyaknya buku profil investasi unggulan daerah yang tersusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/bidang usaha unggulan	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal			2	18	02	2.02	02
2.12.	2.12.01	.16	.13			Penyusunan pemetaan potensi unggulan daerah	Banyaknya buku pemetaan potensi unggulan daerah	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Karangasem	Banyaknya buku pemetaan potensi unggulan daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/bidang usaha unggulan	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal			2	18	02	2.02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
										Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penetapan kemudahan berusaha	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pemberiam fasilitas/inseentif dan kemudahan penanaman modal			2	18	02	2.01	
2.12.	2.12.01	.16	02			Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Frekuensi pertemuan dengan calon investor	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Frekuensi pertemuan dengan calon investor	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kemudahan berusaha	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pemberiam fasilitas/inseentif dan kemudahan penanaman modal			2	18	02	2.01	01
1.05	.2.12.01	.17				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase keikutsertaan dalam perayaan hari-			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan			2	18	01	2.03	
1.05	.2.12.01	.17	.22			Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan			2	18	01	2.03	16
2.12.	2.12.01	.18				Program pelayanan bidang perijinan	Persentase layanan ijin tepat waktu			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan			2	18	04	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.18	.01			Standar Pelayanan Minimal Perizinan	Banyaknya permohonan yang teregistrasi	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya permohonan yang teregistrasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu			2	18	04	2.01	01
2.12.	2.12.01	.18	.02			Pelayanan Izin Penunjang Usaha	Jumlah Izin Penunjang Usaha yang terbit	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin Penunjang Usaha yang terbit	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu			2	18	04	2.01	02
2.12.	2.12.01	.18	.03			Pelayanan Izin Usaha	Pelayanan Izin Usaha	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Izin Usaha	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu			2	18	04	2.01	01
2.12.	2.12.01	.18	.04			Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan	Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu			2	18	04	2.01	01
										Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			2	18	05	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.18	05			Monitoring dan evaluasi	Banyaknya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Banyaknya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			2	18	05	2.01	03
										Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan			2	18	04	2.01	
2.12.	2.12.01	.18	.07			Peningkatan koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu Goes To Banjar	Frekuensi layanan goes to banjar	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Frekuensi layanan goes to banjar	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Persentase layanan ijin tepat waktu	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu			2	18	04	2.01	04
										Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penetapan kemudahan berusaha	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pemberiam fasilitas/inse ntif dan kemudahan penanaman modal			2	18	02	2.01	
2.12.	2.12.01	.18	.08			Koordinasi dan fasilitasi mall pelayanan publik	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penetapan kemudahan berusaha	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pemberiam fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			2	18	02	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
2.12.	2.12.01	.18	.09			Koordinasi dan fasilitasi satgas percepatan berusaha	Terfasilitasinya kegiatan satgas percepatan berusaha	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Terfasilitasinya kegiatan satgas percepatan berusaha	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi evaluasi kemudahan berusaha	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			2	18	02	2.01	02
2.12.	2.12.01	.19				Program pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditangani			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pengaduan yang ditangani	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan			2	18	04	2.01	
2.12.	2.12.01	.19	.01			Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Banyaknya buku IKM yang disusun	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non	Banyaknya buku IKM yang disusun	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase pengaduan yang ditangani	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan			2	18	04	2.01	03
										Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota	Banyaknya pelaporan perizinan dan non perizinan	Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Banyaknya sistem informasi yang dikelola			2	18	06	2.01	
2.12.	2.12.01	.19	.02			Penyampaian informasi kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yang menerima informasi	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota	Banyaknya pelaporan perizinan dan non perizinan	Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Banyaknya sistem informasi yang dikelola			2	18	06	2.01	01

16. DINAS KETAHANAN PANGAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)									Kode				
KODE		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.03	2.12.01		wajib non pelayanan dasar	Dinas Ketahanan pangan								Dinas Ketahanan Pangan	wajib non pelayanan dasar	2	09			
2.03	2.12.01	.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	09	01	2.03	
2.03	2.12.01	.01	.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	09	01	2.03	01
2.03	2.12.01	.01	.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	09	01	2.03	02
2.03	2.12.02	.01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	09	01	2.03	08
2.03	2.12.01	.01	.10		Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	09	01	2.03	10
2.03	2.12.01	.01	.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia dan banyaknya fotocopy yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia dan banyaknya fotocopy yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	09	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodifikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)										Kode						
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.03	2.12.01	.01	.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	12	
2.03	2.12.01	.01	.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	15	
2.03	2.12.01	.01	.17			Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	17	
2.03	2.12.01	.01	.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	18	
2.03	2.12.01	.01	.19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Banyaknya Upah tenaga administrasi, teknis dan pengemudi yang terbayarkan								Menjadi item belanja pada sub kegiatan					
2.03	2.12.01	.01	.20			Penyediaan canang, bebanten dan piodalan	Penyelenggaraan persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyelenggaraan persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	16	
2.03	2.12.01	.01	.26			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terfasilitasi								Menjadi item belanja pada sub kegiatan					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)									Kode							
KODE					Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.03	2.12.01	.02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur													
2.03	2.12.01	.02	.05				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	24	
2.03	2.12.01	.02	.22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	28	
2.03	2.12.01	.02	.24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	30	
2.03	2.12.01	.02	.28				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03	32	
2.03	2.12.01	.06					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu			Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.02		
2.03	2.12.01	.06	.01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.02	06	
2.03	2.12.01	.15					Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase keikutsertaan dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		2	09	01	2.03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodifikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)										Kode						
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.03	2.12.01	.15	.06			Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	09	01	2.03	16
2	3	21	16			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya peningkatan ketahanan Pangan dan mandiri pangan					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat			2	09	03		
2	3	21	32			Ketersediaan Pangan Daerah	Terlaksanakannya ketersediaan pangan daerah	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase kelembagaan dan jaringan pangan yang dikembangkan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat			2	09	03	2.01	04
								Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat			2	09	03	2.02	03
2	3	16	09			Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya Pembinaan kelompok Ketahanan Pangan	Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat			2	09	03	2.04	02
												Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan			2	09	04		
2	3	16	01			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan			2	09	04	2.02	01
												Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya pengawasan Keamanan Pangan			2	09	05		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)										Kode						
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	2	16	22			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya pengawasan Keamanan Pangan			2	09	05	2.01	01

17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
7	2.07.01	01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi Pelayanannya	Pelayanan Administrasi Perkantoran				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
			01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	01	
			02			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpn, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpn, Air dan Listrik	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	02	
			06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	06	
			08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	08	
			10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	10	
			11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	11	
			12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	12	
			15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	15	
			17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	17	
			18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	13	01	2.03	18	
			19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	-	-														
			20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Plodalan	Terlaksananya Upacara Keagamaan	-	-														
			26			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	-														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
7	2.07.01	01	06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
			01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perkantoran						2	13	01	2.02	06
			02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perkantoran						2	13	01	2.02	09
7	2.07.01	01	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran														
			05			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran						2	13	01	2.03	20
			09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran						2	13	01	2.03	24
			10			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang Tersedia	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelair yang Tersedia	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran						2	13	01	2.03	25
			22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran						2	13	01	2.03	28
			28			Pemeliharaan rutin/berkala Peralalatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perkantoran						2	13	01	2.03	34
7	2.07.01	01	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan														
			04			Pembinaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Kelompok Perajin yang Dibina TTG	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pembinaan Pengembangan TTG	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota						2	13	05	2.01	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
			09		Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelompok LPM yang Dibina	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM, BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02	
			12		Pembinaan Desa Siaga Aktif	Jumlah Kader Desa siaga Aktif yang Dibina	-	-	-	-	-									
05	2.07.01	01	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah													
			22			Perayaan hari - hari besar nasional dan daerah	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah													
7	2.07.01	01	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Penumbuhan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa													
			02			Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES	Jumlah Orang yang Dilatih Manajemen BUMDES	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kelompok Bumdes yang Dibina dan Tertatanya Manajemen BUM Desa dengan Baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	08
			11			Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Kelompok Pasar Desa yang Dibina	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
7	2.07.01	01	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Membangun Desa														
			05			Penilaian lomba desa	Jumlah Desa yang Dibina dan Dinilai dalam Lomba Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Dinilai dari aspek Profil, Tingkat Perkembangan Desa dan Partisipasi Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2	13	04	2.01	11	
			11			Penyusunan profil desa	Jumlah Web Profil Desa yang Tersusun														
			08			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)	Jumlah Kelompok yang Dimonitoring Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2	13	05	2.01	05
			10			Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD)	Jumlah Desa yang Melaksanakan TMMMD	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Lancarnya Perekonomian Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa					2	13	02	2.01	05	
			12			Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bumdes	Jumlah Kelompok Bumdes yang Dibina	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kelompok Bumdes yang Dibina dan Tertatanya Manajemen BUM Desa dengan Baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2	13	04	2.01	08	
			13			Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan BBGRM	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM, BBGRM penguatan LKd dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2	13	05	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
			14			Pembinaan kepada Kelompok Pengelola air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Perdesaan/Pamsimas	Jumlah Kelompok yang Dibina Pamsimas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbinanya Kelompok Pamsimas, Posyandu dan SDM KPMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	03	
			16			Peningkatan Keswadayaan Masyarakat	Jumlah Buku yang Dicitak Mengenai Data Swadaya Masyarakat	Facilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Dinilai dari aspek Profil, Tingkat Perkembangan Desa dan Partisipasi Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	11	
			17			Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dibina	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbinanya Kelompok Pamsimas, Posyandu dan SDM KPMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	03	
7	2.07.01	01	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Dibintek dan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa														
			03			Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Orang yang Dibintek dan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD yang Diberikan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	4	2.01	05	
7	2.07.01	01	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase Meningkatnya Peran Perempuan dalam Membangun Desa														
			02			Peningkatan kualitas kader Posyandu	Jumlah Pembinaan Administrasi Kelompok Posyandu	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbinanya Kelompok Pamsimas, Posyandu dan SDM KPMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	03	
			04			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan TP PKK	Terbinanya TP PKK Kab. Karangasem	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM, BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			05		Fasilitasi Kegiatan Pokjnal Posyandu	Terbinanya Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbinanya Kelompok Pamsimas, Posyandu dan SDM KPMD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	03
			06		Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	Jumlah Desa dan Kecamatan yang Dibina dan Diawasi	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02
			07		Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kecamatan yang Dibina	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02
			08		Jambore Kader PKK	Jumlah Kelompok PKK yang ikut Berpartisipasi	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02
			09		Penataan Tertib Administrasi PKK	Jumlah Kelompok PKK yang Dibina	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02
			10		Pelatihan Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang Dilatih	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya LPM,BBGRM penguatan LKD dan Inventarisasi LAD	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2	13	05	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
7	2.07.01	01	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			01			Fasilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan ADD	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang Dimonitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	04	
			02			Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Dibina Administrasi Keuangan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	01	
7	2.07.01	01	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Perbekel yang Dipilih dan Dilantik														
			01			Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	Jumlah Perbekel yang Dipilih dan Dilantik	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan dan Dilantik Kepala Desa/Perbekelnya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	09	
7	2.07.01	01	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Desa yang Dibentuk/Dibina														
			01			Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Desa yang Dibentuk/Dibina	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terbentuknya 1 Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Kerjasama Antar Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terwujudnya Kerja Sama Desa			2	13	03	2.01	02	
7	2.07.01	01	23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tertatanya Peraturan Perundang-undangan														
			01			Fasilitasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sosialisasi Penyusunan Produk Hukum Mengenai Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	02	
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Klarifikasi Peraturan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			2	13	04	2.01	07	
			02			Penyusunan Perda Tentang Kerjasama Desa	Jumlah Perda Tentang Kerjasama Desa yang Tersusun	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Kerjasama Antar Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terwujudnya Kerja Sama Desa			2	13	03	2.01	01	
7	2.07.01	01	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Desa/Br. Dinas/Lingkungan yang di Mekarkan														
			01			Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Desa/Br. Dinas/Lingkungan yang di Mekarkan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Usulan Desa yang Difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Terlaksananya Penataan Desa			2	13	02	2.01	01	
								Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Terlaksananya Penataan Desa			2	13	02	2.01	03	
								Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Usulan dari Desa yang Difasilitasi untuk Penataan Kewilayahan Desa dalam hal Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Banjar Dinas	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Terlaksananya Penataan Desa			2	13	02	2.01	02	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	10	01	01		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	16	01	2.03
				01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat										
				02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik										
				08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor										
				10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor										
				11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor										
				12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai										
				13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor										
				15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan										
				17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu										
				18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah										
				19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	Terpenuhinya kelancaran administrasi/teknis/keamanan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga penjaga kantor dan cleaning service kantor										
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga sopir														
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga administrasi														
				20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Terlaksananya upacara agama	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya upacara agama										
				26			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja melalui konsultasi dalam daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik										
2	10	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana perkantoran			Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan							
				22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman										
				24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik										
				28			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik										
				29			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik										
				30			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman	Terpenuhinya pemeliharaan taman kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan taman kantor										
2	10	01	06			Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu			Administrasi Keuangan	Persentase tersusunnya Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase tersusunnya kinerja yang	Urusan Pemerintahan Bidang		2	16	01	2.02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
				01			Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu										
2	10	01	15		Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Terpenuhinya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi		2	16	02	2.01	
				02		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi											
				07		Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah kunjungan layanan internet lokasi di kecamatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan diseminasi informasi publik											
				09		Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Dengan Lembaga komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah	Jumlah KIM terbina	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya kerjasama dengan mass media											
				10		Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Terpenuhinya pemeliharaan website OPD													
2	10	01	16		Komunikasi dan Informatika	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Informasi Data Elektronik			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Informasi Data Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Layanan Informasi Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		2	16	03	2.01	
				02		Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Terpenuhinya fasilitasi RUP dan pengadaan secara elektronik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tata laksana dan pengawasan nama domain dan sub domain											
				04		Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data informasi statistik daerah													
2	10	01	17		Komunikasi dan Informatika	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		2	16	03	2.02	
				01		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM terlatih IT	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah											
								Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terpenuhinya aplikasi dan koneksi dalam menunjang proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik											
								Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terhubungnya sistem layanan pemerintah											
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana TIK dalam rangka pengembangan SDM menuju peningkatan kompetensi TIK											
								Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah pejabat PPID yang diberikan layanan informasi publik											
2	10	02	17			PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN												
				22		Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah							2	16	01	2.03	
2	10	01	18		Komunikasi dan Informatika	Kerjasama Informasi Dengan Mass media	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Daerah			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang		2	20	02	2.01	
				02		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya tindak lanjut terhadap pengaduan layanan informasi publik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta deseminasi data statistik sektoral											
				04		Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran dan Dialog Publik.	Terpenuhinya penyebarluasan informasi publik secara akuntabel	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			06			Peningkatan layanan informasi pembangunan daerah	Jumlah majalah informasi tercetak dan disebarikan kepada publik													
2	10	01	19		Persandian	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya SDM Aparatur Pemerintah Dibiidang Keamanan	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		2	21	02	2.01	
			01			Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi (bulan)	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya aparatur pemerintah daerah dibiidang informasi yang terlatih											
			02			Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitasi penanganan persandian pemerintah daerah (bulan)													
			03			Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah (unit)													

8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA													PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	10	01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	16	01	2.03	
			01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat											01
			02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik											02
			08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor											08
			10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor											10
			11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor											11
			12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai											12
			13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor											13
			15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan											15
			17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu											17
			18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah											18
			19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	Terpenuhinya kelancaran administrasi/teknis/keamanan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga penjaga kantor dan cleaning service kantor											28
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga sopir											30
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kelancaran jasa tenaga administrasi											32
			20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	Terlaksananya upacara agama	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya upacara agama											16
			26			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja melalui konsultasi dalam daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik											30
2	10	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana perkantoran			Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan								
			22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman											28
			24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik											30
			28			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik											34
			29			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik											35
			30			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman	Terpenuhinya pemeliharaan taman kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan taman kantor											28
2	10	01	06		Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu			Administrasi Keuangan	Persentase tersusunnya Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase tersusunnya kinerja yang	Urusan Pemerintahan Bidang		2	16	01	2.02	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
			01			Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu										06			
2	10	01	15		Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Terpenuhiya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terpenuhiya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi			2	16	02	2.01		
			02			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpenuhiya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi											03		
			07			Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah kunjungan layanan internet lokasi di kecamatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan diseminasi informasi publik												05	
			09			Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Dengan Lembaga komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah	Jumlah KIM terbina	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya kerjasama dengan mass media												12	
			10			Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Terpenuhiya pemeliharaan website OPD															
2	10	01	16		Komunikasi dan Informatika	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhiya Informasi Data Elektronik			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Informasi Data Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Terpenuhiya Layanan Informasi Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			2	16	03	2.01		
			02			Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Terpenuhiya fasilitasi RUP dan pengadaan secara elektronik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tata laksana dan pengawasan nama domain dan sub domain												02	
			04			Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data informasi statistik daerah															
2	10	01	17		Komunikasi dan Informatika	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhiya Sarana dan prasarana aparatur daerah			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Aplikasi Informatika		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			2	16	03	2.02		
			01			Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM terlatih IT	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpenuhiya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah												04	
								Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terpenuhiya aplikasi dan koneksi dalam menunjang proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik												07	
								Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terhubungnya sistem layanan pemerintah												08	
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana TIK dalam rangka pengembangan SDM menuju peningkatan kompetensi TIK												10	
								Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah pejabat PPID yang diberikan layanan informasi publik												11	
2	10	02	17			PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN														
			22			Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah								2	16	01	2.03	16	
2	10	01	18		Komunikasi dan Informatika	Kerjasama Informasi Dengan Mass media	Terpenuhiya Penyebarluasan Informasi Daerah			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Terpenuhiya Penyebarluasan Informasi Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhiya Data Statistik Sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang			2	20	02	2.01		
			02			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya tindak lanjut terhadap pengadaan layanan informasi publik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta deseminasi data statistik sektoral													01
			04			Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran dan Dialog Publik.	Terpenuhiya penyebarluasan informasi publik secara akuntabel	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia													03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				06			Peningkatan layanan informasi pembangunan daerah	Jumlah majalah informasi tercetak dan disebarakan kepada publiik													
2	10	01	19		Persandian	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya SDM Aparatur Pemerintah Dibiidang Keamanan	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			2	21	02	2.01	
				01		Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi (bulan)	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya aparatur pemerintah daerah dibidang informasi yang terlatih												02
				02		Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitasi penanganan persandian pemerintah daerah (bulan)														
				03		Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah (unit)														

19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE		BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE		
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
											PERPUSTAKAAN	2				
											URUSAN KABUPATEN / KOTA	2	23			
2	17	1.17.01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase program pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2	23	01		
								Administrasi Keuangan	Persentase realisasi anggaran yang dilaporkan			2	23	01	2.02	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat				2	23	01	2.02	06
2	17	2.17.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		Administrasi Umum	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran			2	23	01	2.03	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ				2	23	01	2.03	01
				02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kenyamanan dan kelancaran administrasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2	23	01	2.03	02
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor menjadi bersih dan nyaman	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman				2	23	01	2.03	08
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi kantor menjadi lancar	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor				2	23	01	2.03	10
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak dan digandakan	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak				2	23	01	2.03	11
								Jumlah digandakan								
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor				2	23	01	2.03	12
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat				2	23	01	2.03	15
				16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah isi ulang tabung gas 12 kg	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah isi ulang tabung gas 12 kg				2	23	01	2.03	16
				17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makanan, minuman rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan, minuman rapat dan tamu				2	23	01	2.03	17
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				2	23	01	2.03	18
				19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga operasional Mobil Pintar , Perpustakaan Keliling, Penataan Arsip dan keamanan kantor yang terpenuhi gaji/upah										
				20	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	Jumlah kegiatan persembahyangan yang terlaksana										
				26	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi antara kabupaten dan provinsi										
2	17	2.17.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran										
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan: 2 Unit mobil dan 2 unit sepeda motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan: 2 Unit mobil dan 2 unit sepeda motor				2	23	01	2.03	20
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				2	23	01	2.03	22
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				2	23	01	2.03	28
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				2	23	01	2.03	30
				28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Adminstrasi kantor menjadi lancar	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara				2	23	01	2.03	34
				31	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolah dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan rak arsip, almari arsip, rool opack dan lain-lain										
				32	Pemeliharaan rutin/berkala buku pustaka	Terpeliharanya rak buku perpustakaan dan mebeulair perpustakaan										
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlaksananya rehabilitasi gedung kantor				2	23	01	2.03	38

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
				47		Penataan halaman dan taman kantor	Terpeliharanya halaman dan taman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
1	05	2.17.01	17			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari - Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan											
				04		Perayaan hari - hari besar nasional dan daerah	Jumlah perayaan hari besar nasional dan daerah yang terlaksana dengan baik											
													URUSAN PEMERINTAHAN	2	23			
2	17	2.17.01	19			Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Pengembangan budaya baca dan pembinaan pada perpustakaan sekolah dan Desa				PROGRAM PEMBI NAAN BERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan	2	23	02			
									Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Persenatse pengelolaan perpustakaan kabupaten karangasem			2	23	02	2.01		
				12		Operasional Mobil dan Motor pintar	Jumlah kecamatan yang meningkat minat baca anak-anak dari umur 7-15 tahun	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat				2	23	02	2.01	02	
				13		Operasional perpustakaan keliling	Jumlah kecamatan yang meningkat minat baca masyarakat di kabupaten karangasem											
				14		Pelayanan Perpustakaan Umum	Jumlah jam buka pelayanan perpustakaan umum untuk melayani masyarakat											
				05		Pembinaan perpustakaan dan peningkatan minat dan budaya baca	Jumlah perpustakaan sekolah/desa yang sudah dibina	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina				2	23	02	2.01	04	
								Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina				2	23	02	2.01	05	
				15		Pemantapan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/SKPD	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/OPD yang terselenggara dengan baik	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/OPD yang terselenggara dengan baik				2	23	02	2.01	06	
				09		Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya				2	23	02	2.01	08	
2	17	2.17.01	02	32		Pemeliharaan rutin/berkala buku pustaka	Terpeliharanya rak buku perpustakaan dan mebeulair perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya				2	23	02	2.01	09	
										Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Persentase kunjungan ke perpustakaan		2	23	02	2.02		
				18		Hari kunjung perpustakaan	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba perpustakaan yang sudah dilaksanakan				2	23	02	2.02	03	
				16		Layanan story telling	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita				2	23	02	2.02	04	
				17		Promosi dan Lomba perpustakaan	Jumlah lomba perpustakaan yang sudah dilaksanakan	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana				2	23	02	2.02	05	
2	16	2.17.01	15			Program Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pelaksanaan pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya											
												PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	2	23	03		
				02		Penatagunaan naskah kuno nusantara	Terlaksananya penatagunaan lontar/naskah kuno yang tersebar di seluruh masyarakat sehingga dapat dikumpulkan	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pendataan, penatagunaan lontar/naskah kuno secara kuantitatif baik fisik maupun kandungan (konten) disimpan, dirawat dan dilesterikan oleh masyarakat									
2	16	2.17.01	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai tradisi dan warisan budaya			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan warisan budaya kabuapten karangasem		2	23	03	2.01		
				01		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah pendataan secara kuantitatif baik fisik maupun kandungan (konten) naskah kuno disimpan, dirawat dan dilesterikan oleh masyarakat						2	23	03	2.01	01	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE		
				02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat					2	23	03	2.01	02
									Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				2	23	03	2.02	
				04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana					2	23	03	2.02	01
													2	24			
2	18	2.17.01	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Persentase tercapainya Penyelamatan Arsip daerah					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik	2	24	02		
									Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem			2	24	02	2.02	
				03	Penduplikasian dokumen arsip Daerah dalam bentuk informatika	Tercapainya arsip - arsip dalam bentuk informatika	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip - arsip dalam bentuk informatika					2	24	02	2.02	02
								Jumlah lembaga yang dilaksanakan akuisisi									
				05	Penelusuran Dokumen Arsip Daerah	Jumlah penelusuran dokumen arsip daerah kabupaten karangasem yang terlaksana		Jumlah lembaga yang dilaksanakan penelusuran									
				02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah OPD yang sudah tertata arsipnya	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya									
2	18	2.17.01	18		Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase terpenuhinya pelayanan informasi yang berkualitas											
									Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem			2	24	02	2.01	
				04	Inventarisasi arsip daerah	Jumlah inventarisasi arsip yang sudah terlaksana dengan baik							2	24	02	2.01	01
2	17	2.17.01	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan rak arsip, almari arsip, rool opack dan lain-lain	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						2	24	02	2.01	02
									Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Indek kepuasan pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem			2	24	02	2.03	
				02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN					2	24	02	2.03	01
				03	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah penyuluhan kearsipan dapat terlaksana dengan baik	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah sosialisasi kearsipan					2	24	02	2.03	02
				05	Pembinaan dan Pemantauan kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang sistem kearsipan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku		Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina									
				06	Pemantapan pengelola kearsipan	Jumlah pemantapan pengelolaan kearsipan sekretaris desa / perangkat daerah yang terlaksana dengan baik		Jumlah pengelola arsip yang dibintek									
											PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart	2	24	03		
									Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem			2	24	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
			07		Penyusutan arsip	Jumlah OPD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi					2	24	03	2.01	01	

20. DINAS KEBUDAYAAN

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.16	2.16.01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
		01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	01
		02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telepon, listrik dan air yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telepon, listrik dan air yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	02
		06			Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajak	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	06
		08			Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	08
		09			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	09
		10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	10
		11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan blanko administrasi kantor yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan blanko administrasi kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	11
		12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	12
		13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	15
			17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	17
			18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	18
			19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi yang terbayar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pendukung administrasi yang terbayar	Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.02	02
			20			Penyediaan Blaya Canang, Bebanten Piodalan	Jumlah penyelenggaraan piodalan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyelenggaraan piodalan	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	16
			26			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan koordinasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.01	04
2.16	2.16.01	02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur														
			05			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	20
			07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	22
			10			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	25
			24			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	30

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Musik Tradisional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala alat musik tradisional	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala alat musik tradisional	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	01
			48			Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	Persentase arsip dan dokumen kepegawaian yang terkelola dengan baik	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase arsip dan dokumen yang terkelola dengan baik	Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.02	02
2.16	2.16.01	06		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan														
			01			Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia	Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan transparansi laporan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.02	06
			04			Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan transparansi laporan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.02	09
2.16	2.16.01	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya														
			01			Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah kelompok seni/ budaya hampir punah yang dilestarikan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	01
			07			Peningkatan Pemahaman Sastra Agama	Jumlah jenis lomba utsawa dharmagita yang diikuti Terlaksananya bulan bahasa bali	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah jenis lomba utsawa dharmagita yang diikuti Terlaksananya bulan bahasa bali	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	02
			18			Pengembangan Bentuk Karya Sastra dan Teater	Jumlah kelompok teater SMA/SMK se Kabupaten Karangasem yang dibina	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah kelompok teater SMA/SMK se Kabupaten Karangasem yang dibina	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			20			Inventarisasi Tradisi Budaya	Jumlah Karya Budaya/Tradisi Budaya yang terinventarisasi dalam bentuk kajian Jumlah generasi muda yang mendapat pengenalan dan pemahaman tentang tradisi budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya/Tradisi Budaya yang terinventarisasi dalam bentuk kajian Jumlah generasi muda yang mendapat pengenalan dan pemahaman tentang tradisi budaya	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan warisan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.01	01
			21			Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dicatatkan, direkam dalam format video Terlaksananya pemetaan bentuk dan jenis data objek pemajuan kebudayaan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang direkonstruksi/terpelihara	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dicatatkan, direkam dalam format video Terlaksananya pemetaan bentuk dan jenis data objek pemajuan kebudayaan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang direkonstruksi/terpelihara	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan warisan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.01	01
2.16	2.16.01	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya														
			17			Inventarisasi dan Pemetaan Asset Pusaka	Jumlah lokasi asset pusaka yang di inventarisir Tertatanya kota pusaka	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah lokasi asset pusaka yang di inventarisir Tertatanya kota pusaka	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	05	2.01	03
			18			Sosialisasi dan Pendataan Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	Register Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	05	2.01	01
			19			Perlindungan, Pengembangan, Pelestarian dan Penataan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	Pencegahan dan Penganggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	05	2.01	02
2.16	2.16.01	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya														
			01			Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali (PKB)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	01

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.05	2.16.01	17				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan														
			22			Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase partisipasi pegawai dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	01	2.03	16
2.16	2.16.01	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya														
			05			Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/tradisional	Jumlah Lembaga adat/ tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga adat/ tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pembinaan lembaga adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.03	01
			06			Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase lembaga adat dan tradisional yang terpantau pemanfaatan dana bantuan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	persentase lembaga adat dan tradisional yang terpantau pemanfaatan dana bantuan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pembinaan lembaga adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.03	02
			07			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan	Jumlah media informasi yang dikelola	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah media informasi yang dikelola	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan warisan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.01	01
2.16	2.16.01	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya														
			01			Pelaksanaan Event Seni Budaya	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	03	2.01	03
2.16	2.16.01	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			01			Pemberian Dukungan/Penghargaan kepada Seniman dan Budayawan	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kesenian tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	03
2.16	2.16.01	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengembangan Lembaga adat dan Tradisional														
			01			Pemberdayaan Desa Adat	Jumlah penghargaan kepada Desa Adat Jumlah pembinaan kepada pecalang	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah penghargaan kepada Desa Adat Jumlah pembinaan kepada pecalang	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pembinaan lembaga adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.03	02
			02			Pemberdayaan Subak dan Subak Abian	Jumlah penghargaan kepada Subak Jumlah subak/subak abian di 3 kelurahan yang terfasilitasi BKK Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah penghargaan kepada Subak Jumlah subak/subak abian di 3 kelurahan yang terfasilitasi BKK Provinsi	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pembinaan lembaga adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.03	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			03			Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig Lembaga Adat/ Tradisional	Jumlah awig-awig lembaga adat/ tradisional yang dibahas	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah awig-awig lembaga adat/ tradisional yang dibahas	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelindungan dan pembinaan lembaga adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.03	01

21. DINAS PARIWISATA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3	2		pilihan	pariwisata								pariwisata	pilihan	3	26				
3	2	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
								Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3	26	01	2.01	
						Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah		Jumlah buku tersusun							3	26	01	2.01	01
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Jumlah DPA dan DPPA yang tersusun							3	26	01	2.01	02
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah tersusun							3	26	01	2.01	03
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		frekwensi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah							3	26	01	2.01	04
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan evaluasi tersusun							3	26	01	2.01	05
								Administrasi Umum							3	26	01	2.03	
										persentase terselenggaranya administrasi umum									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya penyediaan jasa surat menyurat untuk mendukung administrasi umum							3	26	01	2.03	01
3	2	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik yang di bayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, air dan listrik yang di bayar							3	26	01	2.03	02
3	2	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bangunan dan tanah yang disewa	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bangunan yang disewa							3	26	01	2.03	03
								Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Terbayarnya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS							3	26	01	2.03	04
3	2	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terurus perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terurus perizinannya							3	26	01	2.03	06
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan							3	26	01	2.03	07
3	2	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang terbayarkan							3	26	01	2.03	08
3	2	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan peralatan kerja yang terpelihara	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara							3	26	01	2.03	09
3	2	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Alat tulis kantor dan IT yang tersedia	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor dan IT yang tersedia							3	26	01	2.03	10
3	2	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item penyediaan barang cetakan dan penggandaan							3	26	01	2.03	11
3	2	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							3	26	01	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	01	13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia							3	26	01	2.03	13
3	2	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah eksemplar penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan							3	26	01	2.03	15
3	2	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan Rapat rapat di kantor	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia dalam penyelenggaraan rapat							3	26	01	2.03	17
3	2	01	18			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							3	26	01	2.03	18
3	2	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Pembayaran tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan													
3	2	01	20			Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Jumlah bulan pelaksanaan upacara keagamaan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah canang yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor							3	26	01	2.03	16
									Jumlah banten purnama yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor											
									Jumlah banten piodalan yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor											
									Jumlah pelaksanaan hari besar nasional dan daerah yang tersedia dalam penyediaan bahan logistik kantor											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan							3	26	01	2.03	22
3	2	01	26		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah											
3	2	02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur											
3	2	02			Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor					3	26	01	2.03	24
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang terbayarkan					3	26	01	2.03	25
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					3	26	01	2.03	28
3	2	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersediannya Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional					3	26	01	2.03	34
3	2	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional		Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara					3	26	01	2.03	30
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara					3	26	01	2.03	32
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara					3	26	01	2.03	34
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara					3	26	01	2.03	35
3	2	02	48		Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/Dokumen		Tertatanya kearsipan dinas											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah			3	26	01	2.02	
								Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan					3	26	01	2.02	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN							3	26	01	2.02	01
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang tersusun dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN							3	26	01	2.02	02
						Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah laporan yang terverifikasi							3	26	01	2.02	03
						Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersusun dalam pelaporan keuangan							3	26	01	2.02	04
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut sebagai tanggapan pemeriksaan							3	26	01	2.02	05
3	2	06	01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun							3	26	01	2.02	06
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun							3	26	01	2.02	07

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran							3	26	01	2.02	08
3	2	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun.					3	26	01	2.02	09
3	2	17				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan											
								Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah							
3	2	17	22			Perayaan Hari-hari Besar Nasional	Persentase Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional Dan Hari Besar Lainnya	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor					3	26	01	2.03	16
								Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3	26	01	2.04	
								Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang dianggarkan					3	26	01	2.04	01
3	2	15				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berkembangnya Pemasaran Pariwisata							3	26	03		
										Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	persentase pengembangan pemasaran pariwisata di Kabupaten Karangasem							

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Presentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					3	26	03	2.01		
3	2	15	01		Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	jumlah jenis wisata yang dianalisa minat pasarnya	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan Luar negeri	tersedianya data dengan metode wawancara dan pengamatan yang teranalisa minat pasar pariwisatanya						3	26	03	2.01	03	
3	2	15	05		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	frekwensi promosi yang dilaksanakan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar Negeri	tercapainya kerjasama dan kemitraan dengan badan promosi guna melakukan promosi pariwisata						3	26	03	2.01	04	
3	2	15	09		Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata	jumlah bahan promosi yang dicetak	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	tertatanya bahan promosi yang menarik dan gampang memberikan informasi						3	26	03	2.01	01	
3	2	15	10		Event event Promosi Pariwisata	frekwensi festival pariwisata yang diselenggarakan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	terfasilitasinya kegiatan event yang menarik dan juga dapat mendatangkan wisatawan						3	26	03	2.01	02	
3	2	16			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya Destinasi Pariwisata				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3	26	02			
								Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Persentase terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten/kota					3	26	02	2.03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	16	02			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang tertata fasilitas sarana dan prasarananya	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah DTW yang tertata fasilitas sarana dan prasarananya							3	26	02	2.03	04
3	2	16	04			Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	Jumlah kerjasama yang terbangun dalam pengelolaan obyek wisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang terbangun dalam pengelolaan obyek wisata							3	26	02	2.03	07
3	2	16				Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang terfasilitasi pengembangannya	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten	Jumlah DTW yang terfasilitasi pengembangannya							3	26	02	2.03	03
3	2	16				Sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi standarisasi usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang terfasilitasi peningkatan standar mutu produk usahanya	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah usaha pariwisata yang tersusun							3	26	02	2.04	03
3	2	16	11			Pengembangan dan penguatan pembangunan litbang bidang pariwisata	Jumlah regulasi pariwisata yang tersusun	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Pariwisata yang terawasi							3	26	02	2.03	01
										Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan					3	26	02	2.04	
3	2	16	12			Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi pada DTW	Jumlah destinasi pariwisata yang terawasi dalam pemungutan retribusi	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah bulan terkelolanya investasi pariwisata							3	26	02	2.02	05
										Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Persentase terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					3	26	02	2.02	
3	2	16	13			Pembinaan, sosialisasi serta penerapan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina dalam penerapan TDUP	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dalam Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten yang termonev							3	26	02	2.03	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	17		Program Pengembangan Kemitaaan	Terlaksananya Program Pengembangan Kemitaaan					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif			3	26	05		
								Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar					3	26	05	2.01	
3	2	17	07	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Terlatih dan terbinanya masyarakat pariwisata (pokdarwis, pengelola desa wisata, pelaku pariwisata)							3	26	05	2.01	01
3	2	17	22	Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis pariwisata	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan berbasis masyarakat	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif							3	26	05	2.01	05
3	2	17	24	Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda pariwisata	Jumlah generasi muda Karangasem yang diberdayakan sebagai duta pariwisata Karangasem	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terpilih dan terbinanya generasi muda sebagai duta-duta wisata Kabupaten Karangasem dalam partisipasi sebagai mitra pemerintah mengembangkan kepariwisataan daerah							3	26	05	2.01	02
3	2	17		Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata	Jumlah sktor produk ekonomi berbasis masyarakat yang dikembangkan	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata yang terfasilitasi pengembangan kompetensinya							3	26	05	2.01	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	17			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata	Memfasilitasi legalisasi kompetensi sumber daya manusia/tenaga kerja bidang pariwisata	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi kompetensinya							3	26	05	2.01	04

22. DINAS PERTANIAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodifikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)														
KODE		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
3.03	3.03.01		Pilihan	Pertanian								Pertanian	Pilihan	2	18				
3.03	3.03.01	.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	18	01	2.03		
3.03	3.03.01	.01	.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya dokumen yang sah	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	01
3.03	3.03.01	.01	.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya rekening telepon, air, listrik yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	02
3.03	3.03.01	.01	.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Penyediaan alat tulis kantor	Banyaknya ATK dan ATK IT yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	10
3.03	3.03.01	.01	.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia dan banyaknya fotocopy yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	11
3.03	3.03.01	.01	.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Banyaknya alat elektronika yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	12
3.03	3.03.01	.01	.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE					Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.01	.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya surat kabar yang tersedia per tahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	15	
3.03	3.03.01	.01	.17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	17	
2.12.	2.12.01	.01	.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Banyaknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	18	
3.03	3.03.01	.01	.19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah jasa tenaga harian dan tenaga kontrak yang dibayar										Menjadi item belanja pada sub kegiatan				
3.03	3.03.01	.01	.20			Penyediaan canang, bebanten dan piodalan	Jumlah biaya canang, bebanten piodalan yang tersedia	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyelenggaraan persembahyangan sehari-hari, purnama tilem, piodalan dan bakti penganyar	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	16	
3.03	3.03.01	.01	.26			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah										Menjadi item belanja pada sub kegiatan				
3.03	3.03.01	.02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
3.03	3.03.01	.02	.07			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	20	
3.03	3.03.01	.02	.10			Pengadaan mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	25	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.02	.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	28
3.03	3.03.01	.02	.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	30
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat/berizin	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	06
3.03	3.03.01	.02	.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya peralatan yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.03	34
3.03	3.03.01	.06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu			Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.02	
3.03	3.03.01	.06	.01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya Buku Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya laporan keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja yang tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.02	06
3.03	3.03.01	.06	.05			Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	27	1	2.01	03
3.03	3.03.01	.06	.06			Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaporan yang tersusun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Banyaknya dokumen perencanaan yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			2	18	01	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)														
KODE			Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				Administrasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	18	05	2.01	
3.03	3.03.01	.17	.01		Perayaan hari-hari besar nasional	Jumlah hari-hari besar nasional	Perayaan hari-hari besar nasional	Banyaknya partisipasi terhadap perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	18	05	2.03	16
3.03	3.03.01	.21			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase jumlah serangan penyakit ternak; Jumlah pemotongan ternak dalam pengawasan kesmavet (ekor)					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04		
3.03	3.03.01	.21	.02		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah terpeliharanya kesehatan ternak dan tercegahnya penyakit menular ternak			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjaminan kesehatan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04	2.01	
							Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjaminan kesehatan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04	2.01	01
3.03	3.03.01	.21	.07		Kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04	2.02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)															
KODE			Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
							Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Jumlah pemotongan hewan dalam pengawasan kesmavet	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04	2.02	01	
							Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase bahan pangan asal hewan yang ASUH	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3	27	04	2.02	02	
3.03	3.03.01	.22				Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah kelahiran ternak hasil IB (ekor sapi)				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	3			
3.03	3.03.01	.22	02			Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah Pelaksanaan Pembibitan dan perawatan ternak		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah					3	27	3	2.03		
							Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pelaksanaan IB	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	3	2.03	01	
3.03	3.03.01	.27				Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah aparatur pembina teknis dengan evaluasi kinerja baik (org); Jumlah kelas kelompok petani madya (klp)		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian			3	27	07	2.01		
3.03	3.03.01	.27	01			Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah Kemampuan Lembaga Petani yang meningkat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan			3	27	07	2.01	02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)															
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
										Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	03	2.02	
						Jumlah pembangunan gedung BPP Kecamatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah unit balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang terbangun/ terehab/ terpelihara	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				3	27	03	2.02	08
										Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian pelaksanaan penyuluhan pertanian			3	27	07	2.01	
3.03	3.03.01	27	04			Pengembangan metode dan materi penyuluhan	Jumlah pelaksanaan metode penyuluh	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan metode penyuluhan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian pelaksanaan penyuluhan pertanian			3	27	07	2.01	03
3.03	3.03.01	27	05			Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha	Jumlah aparatur pembina teknis yang memenuhi standar kompetensi	Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah aparatur pembina teknis yang memenuhi standar kompetensi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian pelaksanaan penyuluhan pertanian			3	27	07	2.01	02
3.03	3.03.01	27	06			Pelatihan dan Pembinaan KTNA	Jumlah terselenggaranya pelatihan dan pembinaan KTNA	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah terselenggaranya pelatihan dan pembinaan KTNA	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian pelaksanaan penyuluhan pertanian			3	27	07	2.01	02
3.03	3.03.01	28				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	Pertanian	Urusan Pilihan	3	27	03		
3.03	3.03.01	28	01			Pengolahan lahan dan air	Jumlah terlaksananya pengelolaan lahan dan air			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian					3	27	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)															
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
								Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah pembinaan pengelolaan lahan dan air	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	03	2.01	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi terkait prasarana pendukung pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	03	2.01	03
										Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian			3	27	03	2.01	
3.03	3.03.01	.28	02			Pemantauan pupuk dan pestisida	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalur sesuai dengan ketentuan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan pengawasan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian			3	27	03	2.01	01
3.03	3.03.01	.28	03			Pembinaan Alsintan	Jumlah Pembinaan dan Pendataan Alsintan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan pengawasan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian			3	27	03	2.01	01
3.03	3.03.01	.29				Program Peningkatan Sistem Perlindungan Tanaman	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/ dampak perubahan iklim					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.29	01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura	Jumlah Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03
3.03	3.03.01	.29	03			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	Jumlah terlaksananya bimtek Organisme Pengganggu tanaman (OPT) pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah terlaksananya bimtek Organisme Pengganggu tanaman (OPT) pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi Jalar	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang tanaman pangan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.29	04			Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan	Jumlah SLPHT Tanaman Pangan di Kelompok Tani/Subak	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah SLPHT Tanaman Pangan di Kelompok Tani/Subak	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang tanaman pangan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03
3.03	3.03.01	.29	05			Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Jumlah Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03
3.03	3.03.01	.29	06			Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Hortikultura	Jumlah SLPHT tanaman Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah SLPHT tanaman Hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang hortikultura	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03
3.03	3.03.01	.29	08			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Jumlah terlaksananya bimtek pengendalian OPT tanaman perkebunan bagi petani	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah terlaksananya bimtek pengendalian OPT tanaman perkebunan bagi petani	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	01
								Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	02
								Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Persentase tertanggulangnya bencana alam bidang tanaman perkebunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			3	27	05	2.01	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																	
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode					
3.03	3.03.01	32				Program Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah produk tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah) (Ton); Jumlah produksi tanaman hortikultura/ buah-buahan (salak, mangga, pisang, durian, nangka) (ton); Jumlah produksi tanaman hortikultura/ sayuran (sawi/petsai, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang) (ton); Jumlah produksi tanaman perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapuk, vanili, tembakau)					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02			
3.03	3.03.01	30	01			Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Data Base dan Catatan Analisa Usaha Tani pada Tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi kayu.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02	
3.03	3.03.01	30	02			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah Intensifikasi tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi kayu.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02	
3.03	3.03.01	30	07			Penyusunan Data Base Potensi Perkebunan	Jumlah Data Potensi Perkebunan yang tersedia	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02	
3.03	3.03.01	30	08			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah bimtek budidaya tanaman perkebunan yang terlaksana	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.30	09			Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)	Jumlah Bimtek Budidaya dan Manajemen Agribisnis Tembakau	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.30	10			Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Perkebunan	Jumlah bimtek perbenihan/perbibitan tanaman perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.30	12			Pengembangan Perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan	Jumlah Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.30	16			Bimbingan Peningkatan Mutu dan Produksi Hortikultura	Jumlah SL-GAP/SOP Tanaman Hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.30	19			Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pertanian Hortikultura	Jumlah Data Potensi Hortikultura, Ubinan, Statisyik Pertanian Hortikultura dan analisa Usaha Tani Hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.30	20			Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	Jumlah tersedianya benih/Bibit Tanaman hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31				Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase produk tanaman pangan yang laku dipasarkan (kacang tanah); Persentase produk tanaman hortikultura/ buah-buahan (salak) yang laku dipasarkan; Persentase produk; Jenis produk					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02		
3.03	3.03.01	.31	02			Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Gapoktan yang dibina	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.31	03			Pendampingan Simantri	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Simantri	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	04			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah pembinaan dan Monev Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan pada Kelompok Tani dan Pelaku Pengolahan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	05			Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggulan Daerah	Jumlah pelaksanaan promosi produk agribisnis	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	06			Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Pangan	Jumlah Data dan Pemantauan Informasi pasar tanaman Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi kayu.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	08			Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen (SL-GHP) pada Tanaman Pangan di Kelompok tani dan Subak	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	10			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah pembinaan lomba kelompok dalam hal Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	09			Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	11			Sekolah Lapang Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah SLGHP Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				Klasifikasi dan Kodefikasi Baru (Permendagri 90 th 2019)																
KODE				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
3.03	3.03.01	.31	12			Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	13			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah pembinaan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	14			Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Hortikultura	Jumlah Publikasi Harga Pasar, Data PIP, dan Data SIGAPURA (TPID) yang dilaksanakan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	16			Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah Pembinaan kelembagaan Pemasaran Hasil dan Temu Kemitraan yang terlaksana	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	17			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Bimtek Pengolahan Hasil Perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	19			Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Perkebunan	Jumlah Pengolahan Informasi Pasar Tanaman Perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02
3.03	3.03.01	.31	20			Festival Subak Karangasem	Jumlah demplot gelar teknologi pertanian yang dilaksanakan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			3	27	02	2.01	02

23. DINAS PERIKANAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
3.01	3.01.01		pilihan	KELAUTAN DAN PERIKANAN								KELAUTAN DAN PERIKANAN	pilihan	3	25				
3.01	3.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03		
3.01	3.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya administrasi surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya administrasi surat Menyurat	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	01	
3.01	3.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	02	
3.01	3.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	08	
3.01	3.01.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	09	
3.01	3.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	10	
3.01	3.01.01	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	11	
3.01	3.01.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	12	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3.01	3.01.01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	15	
								Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	16	
3.01	3.01.01	01	17			Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	17	
3.01	3.01.01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	18	
3.01	3.01.01	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Meningkatnya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan									Menjadi item belanja pada sub kegiatan					
3.01	3.01.01	01	20			Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Tersedianya canang sehari-hari dan banten piodalan	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya canang sehari-hari dan banten piodalan	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	16	
3.01	3.01.01	01	24			Penataan dekorsi dan kegiatan hari-hari nasional	Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional (paket)	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah (paket)	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusam pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	16	
3.01	3.01.01	01	26			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya tugas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah									Menjadi item belanja pada sub kegiatan					
3.01	3.01.01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.01	3.01.01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	22
3.01	3.01.01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	28
3.01	3.01.01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala (Unit)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala (Unit)	Administrasi Umum	terselenggaranya administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.03	30
3.01	3.01.01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Laporan Keuangan			Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.02	
3.01	3.01.01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan data informasi perikanan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan data informasi perikanan	Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.02	06
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun OPD	Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			3	25	01	2.02	09
3.01	3.01.01	21				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			3	25	02	2.02	
3.01	3.01.01	21	09			Pengadadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengembangan usaha nelayan skala kecil									MERUPAKAN KEWENANGAN PI				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.01	3.01.01	21	07			Pendampingan pada kelompok nelayan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan dengan peningkatan kelas kelompok	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan dengan peningkatan kelas kelompok	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			3	25	02	2.02	02
3.01	3.01.01	21	08			Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan/ Pelayanan tempat pelelangan ikan (TPI)	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Terselenggaranya Pengembangan/ pengelolaan/ penyelenggaraan TPI	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			3	25	02	2.03	02
3.01	3.01.01	20				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Terselenggaranya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			3	25	03	2.02	
3.01	3.01.01	20	03			Pembangunan pengembangan pembenihan ikan	Jumlah produksi benih ikan (ekor)	Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	Jumlah produksi benih ikan (ekor)	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Terselenggaranya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			3	25	03	2.02	01
3.01	3.01.01	20	06			Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dengan peningkatan kelas kelompok	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan dengan peningkatan kelas kelompok	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Terselenggaranya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			3	25	03	2.02	04
3.01	3.01.01	20	05			Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan	Terlaksananya Rehabilitasi Kolam , Saluran Air Pasok/ Buang, Bangunan dan Pagar UPT PPBAT	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Kolam , Saluran Air Pasok/ Buang, Bangunan dan Pagar UPT PPBAT	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Terselenggaranya pengelolaan pembudidaya ikan	Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			3	25	03	2.04	03
3.01	3.01.01	20	07			Pembangunan pengembangan kawasan produksi perikanan budidaya air tawar	Tersedianya Pakan Ikan, Peralatan, Obat-obatan dan Bibit Unggul di UPT PPBAT	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pakan Ikan, Peralatan, Obat-obatan dan Bibit Unggul di UPT PPBAT	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Terselenggaranya pengelolaan pembudidaya ikan	Program pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			3	25	03	2.04	02

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3.07	3.07	01		Urusan pilihan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31			
3.07	3.07	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01		
									Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	
3.07	3.07	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung Administrasi Umum.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	01
3.07	3.07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tiga Rekening (listrik,Air, Telfon)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (listrik,Air, Telfon) terbayar.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	02
3.07	3.07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terurus perizinannya.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	06
3.07	3.07	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya jasa kebersihan kantor.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	08
3.07	3.07	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor Yang Memadai	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	10

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.07	3.07	01	01	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	11
3.07	3.07	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Pasar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Pasar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Pasar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Pasar tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	12
3.07	3.07	01	01	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	13
3.07	3.07	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Majalah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran dan Majalah tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	15
3.07	3.07	01	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	17
3.07	3.07	01	01	18			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	18
3.07	3.07	01	01	19			Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Terbayarnya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Perkantoran	untuk tenaga administrasi masuk pada sub kegiatan yang sesuai, sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan srutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.	Jumlah Terbayarnya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Perkantoran											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3.07	3.07	01	01	20			Penyediaan Biaya Canang, Bebanen Piodalan	Tersedianya Biaya Canang, Bebanen Piodalan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan persebanyangan sehari-hari, purnama titem, piodalan dan bakti penganyar	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	16	
3.07	3.07	01	01	26			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja.													
3.07	3.07	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Aparatur														
3.07	3.07	01	02	03			Pembangunan Gedung Kantor	meningkatnya kenyamanan dan keamnan kantor	dikeluarkan dari Renja 2021 karena pembangunan gedung kewenangan PUPR.													
3.07	3.07	01	02	22			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Banyaknya Gedung Kantor terpelihara.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	28	
3.07	3.07	01	02	24			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Banyaknya Kendaraan dinas/operasional terpelihara.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	30	
3.07	3.07	01	02	28			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah bulan Peralatan Kantor terpelihara.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	34	
3.07	3.07	01	02	30			Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	Meningkatkan Keindahan dan Kenyamanan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah taman terpelihara.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	28	
3.07	3.07	01	02	42			Rehab sedang/berat tembok penyengker	Meningkatkan Keindahan dan Kenyamanan Kantor	rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	jumlah tembok penyengker direhab	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	38	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3.07	3.07	01	02	48			Penataan halaman dan taman kantor	tertatanya halaman dan taman kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah halaman dan taman kantor tertata	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	28	
3.07	3.07	01	02	5			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	pengadaan kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas tersedia.	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	20	
3.07	3.07	01	01				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan.														
3.07	3.07	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan dan Dokumen SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	06	
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	01	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang dilaporkan perbulan	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	02	
									Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Terverifikasi laporan	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	03	
									Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	04	
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan tindak lanjut pemeriksaan	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	05	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	07
						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	08
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun.	Administrasi Keuangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.02	09
						Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah	Jumlah buku tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	01
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah tersusun RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPPA Perubahan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	02
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Lakip, LPPD, LKPJ tersusun.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	03
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	04
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	05
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Terbayarnya Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan/Administrasi / Teknis / Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.01	07

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3.07	3.07	01	17				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi pengembangan wawasan kebangsaan														
3.07	3.07	01	17	22			Perayaan Hari-hari Besar Nasional Dan Daerah	Meningkatnya Partisipasi dan Nasionalis Pegawai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya keikutsertaan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	31	01	2.03	16	
4.04	3.07	01	17				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terpenuhinya Retribusi dan Lain-lain PAD														
4.04	3.07	01	17	28			Penagihan Retribusi dan Lain - lain PAD	Terlaksananya Penagihan Retribusi dan Lain - lain PAD	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase penagihan retribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan pilihan	3	30	03	2.01	02	
3.06	3.07	01	21				PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan memiliki legalitas serta mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten karangasem.														
3.06	3.07	01	21				Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah terwasinya peredaran barang dan jasa	merupakan kewenangan provinsi sementara dikeluarkan dari renja 2021 disperindag seanjutnya untuk berkoordinasi lebih lanjut ke provinsi.													
3.06	3.07	01	21	04			Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian	Meningkatkan Pelayanan Kemetrolagian	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang.	Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	06	2.01	01	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.06	3.07	01	21	09			Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah Terteranya Alat UTTP	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang.	Jumlah Terlayannya Metrologi Legal Berupa Tera Ulang Alat UTTP	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.	Persentase Jumlah Terlayannya Metrologi Legal Berupa Tera Ulang Alat UTTP dan Pengawasan Alat UTTP	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	06	2.01	01
3.06	3.07	01	21	08			Pengawasan Alat UTTP	Jumlah Terawasinya Alat UTTP	Pengawasan/Penyuluhan Terhadap Metrologi Legal	Jumlah Terawasinya/Penyuluhan Terhadap Pemilik Alat UTTP	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.	Persentase Jumlah Terlayannya Metrologi Legal Berupa Tera Ulang Alat UTTP dan Pengawasan Alat UTTP	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	06	2.01	02
3.06	3.07	01	21				Pembinaan HAKI	Jumlah Pengerajin Terbina	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah Pembinaan Industri di 8 Kecamatan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Presentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	PRESENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintah Pilihan	3	31	03	2.01	03
3.06	3.07	01	21	06			Monitoring Sembako dan Barang Strategis Lainnya	Jumlah Pemantauan Ketersediaan Bahan Pokok, Barang Strategis Lainnya dan Tingkat Harga	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat di Tingkat Pasar Kabupaten	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Frekuensi Pemantauan Harga guna Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	04	2.02	02
3.06	3.07	01	21	05			Pendaftaran HAKI	Jumlah Terdaftar Merk / Hak Cipta	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah Terdaftar Merk / Hak Cipta Industri di 8 Kecamatan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Presentase fasilitas Penerbitan ijin usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	PRESENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintah Pilihan	3	31	03	2.01	03
3.06	3.07	01	21	11			Sosialisasi Peraturan Minuman Beralkohol	Terciptanya kesadaran masyarakat tentang aturan mikol	Jadi aktivitas pada Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten /kota		Program perijinan dan pendaftaran perusahaan.				3	30	2	2.06	3

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.06	3.07	01	21	12			Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terciptanya Harkat dan Martabat Konsumen	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Frekuensi Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Jumlah/Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi, Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah/Kabupaten.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	07	2.01	01
3.06	3.07	01	21	13			Pengawasan / Monitoring Perdagangan Minuman Beralkohol	Jumlah Pemantauan Perdagangan Minuman Beralkohol	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan/Monitoring Perdagangan Minuman Beralkohol di 8 Kecamatan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PRESENTASE JUMLAH PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	02	2.06	03
							Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Terawasinya Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PRESENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	04	2.03	02
3.06	3.07	01	21	04			Pengawasan Retribusi Pasar	Terlaksananya monitoring pemungutan retribusi pasar	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Frekuensi pelaksanaan pengawasan retribusi	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.02	01
3.06	3.07	01	21	03			Monitoring Peredaran Gas LPG	Terpantaunya Peredaran Gas LPG	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Frekuensi Pemantauan Peredaran Gas LPG di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat di tingkat Daerah/Kabupaten	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Frekuensi Pemantauan Peredaran Gas LPG guna Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	04	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.06	3.07	01	21	01			Pembinaan Indikasi Geografis	Jumlah Industri Yang Dibina	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pembinaan Indikasi Geografis Industri di Kecamatan Sidemen	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Pembinaan Indikasi Geografis Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PRESENTASE JUMLAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	03
3.06	3.07	01	21	02			Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan	Jumlah Terawasinya Bahan Berbahaya Dalam pendistribusian Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) /Konsumen	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) /Konsumen	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan, Pelabelan dan Penggunaan Bahan Berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)/ Konsumen	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan, Pelabelan dan Penggunaan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PRESENTASE JUMLAH PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	02	2.06	03
3.06	3.07	01	21	18			Pembangunan Gedung serta Sarana Prasarana UPT Kemetrollogian Daerah	Terbangunnya gedung serta sarana dan prasarana UPT Kemetrollogian Daerah	Dikeluarkan dari renja Disperindag 2021 kewenangan PUPR.												
3.06	3.07	01	21				Pasar Murah	Terlaksananya pasar murah	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Terlaksananya Operasi Pasar Murah di Kabupaten	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Frekuensi Pemantauan Harga guna Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	04	2.02	03
3.07	3.07	01	17				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Terpenuhinya pengenalan produk - produk unggulan kepada masyarakat luas													
3.07	3.07	01	17	15			Pameran Produk Export Luar Daerah	Terlaksananya Pameran Produk Export Luar Daerah	Pameran dagang Nasional	Frekuensi Berpartisipasi/Mengikuti Pameran produk ekspor! Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	05	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA																PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE														
3.07	3.07	01	17	16			Pameran Industri dan Dagang	Terlaksananya Pameran Industri dan Dagang	Pameran Dagang Lokal	Frekuensi Terselenggaranya Pameran Dagang Lokal Bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Frekuensi Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pengembangan Ekspor	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	05	2.01	03										
3.07	3.07	01	17	17			Identifikasi Produk Oreintasi Ekspor	Jumlah Produk IKM Unggulan yang Teridentifikasi	Pembinaan pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Produk IKM Unggulan yang Teridentifikasi	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu (satu) daerah kabupaten/kota.	Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pengembangan Ekspor	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	05	2.01	.06										
3.07	3.07	01	17	18			Pemasaran Produk IKM Berbasis Website (e-commers)	Terpromosinya Produk2 IKM berbasis website	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk IKM yang dipromosikan Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Jumlah/Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi, Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	07	2.01	01										
3.06	3.07	01	18				PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Pasar terbangun																							
3.06	3.07	01	18	08			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan bangunan pasar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dilaksanakan pemeliharaan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.01	01										
3.06	3.07	01	18	09			Pameran Pesta Kesenian Bali (PKB)	Adanya transaksi langsung antara perajin dan pembeli(meningkatkan promosi produk ikm)	Pameran Dagang Lokal	Frekuensi Terselenggaranya Pameran Dagang Lokal Bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	05	2.01	03										
3.06	3.07	01	18	10			Pelaksanaan Aci Pura Melanting	Tersedianya bebanten piodalan di pura Melanting	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Frekwensi pelaksanaan ACI di Pasar Rakyat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.01	01										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3.06	3.07	01	18	14			Pembangunan Pasar Di Kabupaten Karangasem	Terlaksananya revitalisasi pasar rakyat	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.01	01	
3.06	3.07	01	18	15			Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar	Jumlah Perencanaan Untuk Pembangunan Pasar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana pasar rakyat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.01	01	
3.06	3.07	01	18	21			Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pengusaha yang mengikuti pelatihan	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemeberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	Jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	Persentase Terlaksanya perencanaan dan pembangunan industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05	
3.06	3.07	01	19				PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Persentase Terfasilitasinya Permodalan bagi IKM dan UKM														
3.06	3.07	01	19	04			Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang difasilitasi.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	03	2.02	02	
3.07	3.07	01	16				PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM														

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.07	3.07	01	16	02			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah Terbinanya Pengerajin IKM	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	Jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kreatifitas Industri Kecil Menengah	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	Persentase Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05
3.07	3.07	01	16	07			Penerapan Jaringan Mutu Melalui GKM	Jumlah Terbinanya Pengerajin IKM Tentang Gugus Kendali Mutu	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	jumlah Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Usaha	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor melalui pembinaan gugus kendali mutu	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	05	2.01	06
3.07	3.07	01	16	08			Pembinaan Pengerajin Oleh Dekranasda Kab. Karangasem	Terbinanya Kelompok Pengerajin dan Tersedianya Sarana dan Prasarana	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui Pembinaan Kelompok IKM oleh Dekranasda Kabupaten	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui pembinaan pengerajin oleh Dekranasda Kabupaten Karangasem	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	Persentase Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05
3.07	3.07	01	16	09			Monitoring / Pengawasan Terhadap Industri Kecil Menengah yang Berdampak pada Lingkungan	Tertersedianya Monitoring / Pengawasan Pencegahan Pencemaran Limbah IKM	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	Tertersedianya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui monitoring /pengawasan thd IKM di Kabupaten Karangasem	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui monitoring /pengawasan thd IKM di Kabupaten Karangasem	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.07	3.07	01	16	10			Pembinaan Industri Kecil Menengah yang Berdampak pada Lingkungan	Jumlah Perajin Terdata	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemeberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui Pembinaan Kelompok IKM.	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui pembinaan Pembinaan Kelompok IKM.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05
3.07	3.07	01	16	11			Monev Kegiatan Dana Bergulir	Terlaksananya Monev Kegiatan Dana Bergulir	DIKELUARKAN DARI RENJA DISPERINDAG 2021 BUKAN KEWENANGAN DISPERINDAG..												
3.07	3.07	01	16	14			Temu Usaha Pengerajin / Pedagang	Jumlah Peserta temu Usaha	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengusaha	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	03	2.02	01
3.07	3.07	01	16	15			Pendataan Potensi Indag	Jumlah Tempat yang Di data	Desiminasi dan Publikasi data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Indag di 8 Kecamatan	Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI,IKUI,IUKI dan IFKI kewenangan Kabupaten/kota.	Presentase informasi industri untuk IUI,IKUI,IUKI dan IFKI kewenangan Kabupaten/kota.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI NASIONAL	PRESENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI NASIONAL	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	04	2.01	02
3.07	3.07	01	16	17			Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Tersusunnya Ranperda	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Tersusunnya perencanaan dan pengembangan Industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	01
3.07	3.07	01	18				PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Persentase terwujudnya perajin yang mandiri dan berdaya saing													
3.07	3.07	01	18	04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi IKM	Tersedianya Sarana Maupun Prasarana Bagi IKM	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri.	Jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi monitoring penyediaan sarana dan prasarana IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Tersusun dan terevaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/Kota melalui monitoring penyediaan sarana dan prasana IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PersentaseTersusunnya Perencanaan dan pengembangan Industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	04

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3.07	3.07	01	18	06			Pameran Industri Kecil / Kerajinan Dalam Daerah	Terlaksananya Pameran Industri Kecil / Kerajinan Dalam Daerah	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Frekuensi Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kecil / Kerajinan Di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah/Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi, Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah/Kabupaten.	Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan	3	30	07	2.01	02
3.07	3.07	01	18	07			Pameran Produk Industri dan Kerajinan Luar Daerah	Terlaksananya Pameran Produk Industri dan Kerajinan Luar Daerah	Pameran Dagang Nasional	Frekuensi Berpartisipasi/Mengikuti Pameran Dagang Nasional Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan Daerah/ Kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor.	urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintah Pilihan	3	30	05	2.01	02
3.07	3.07	01	18	08			Pembangunan Sentra IKM Di Kabupaten Karangasem	Terbangunnya Sentra IKM	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri.	Jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasaran industri melalui pembangunan sentra IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan pengembangan Industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	04
3.07	3.07	01	18	09			Pelatihan Manajemen Sederhana	Meningkatnya Keterampilan Pengerajin	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemeberdayaan Industri dan peran serta masyarakat.	jumlah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat melalui pelatihan manajemen sederhana	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Persentase Tersusun dan Terevaluasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota melalui Pelatihan manajemen sederhana.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.	Persentase Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri	urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
BAGIAN ADPEM					BAGIAN PEMERINTAHAN												
4.01	4.01.03	01	Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran		ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	01			
					Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia					4	01	01		
					Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor					4	01	01	2.03	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					4	01	01	2.03	
					Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	Tersedianya bebantenan untuk persembahyangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya biaya canang, bebanten untuk bakti penganyar					4	01	01	2.03	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu					4	01	01	2.03	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultansi Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah					4	01	01	2.03	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya tenaga administrasi/teknis	Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait										
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultansi dalam daerah											
4.01	4.01.03	02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
					pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung Kantor (lemari arsip, ac dan meja kantor)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					4	01	01	2.03	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai					4	01	01	2.03	
					pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (ac, komputer)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal					4	01	01	2.03	
4.02	04	07			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penguatan regulasi dan pemerintahan umum			4	01	02		
					Pembinaan Dalam rangka penyusunan SPM	Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal	Penataan Administrasi pemerintahan	- Tersusunnya administrasi Pemerintahan					4	01	02	2.01	
4.01	4.01.03	25			Peningkatan Kinerja Pemerintahan			- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah									
					Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya LPPD Kab. Karangasem		- Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karangasem									
					Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	tersusunnya LKPJ Bupati											
4.01	4.01.03	45			Program Penataan Administrasi Kewilayahan	Terselenggaranya fasilitasi administrasi kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Terfasilitasinya tapal batas antar kabupaten					4	01	02	2.01	
4.01	4.01.03	45	01		Fasilitasi Tapal Batas Administrasi Antar Daerah	Terselenggaranya Fasilitasi Tapal Batas Administrasi Antar Daerah selama		- Terselenggaranya fasilitasi penamaan unsur-unsur rupabumi/toponimi									
4.01	4.01.03	45			Fasilitasi Tapal Batas Administrasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Fasilitasi Tapal Batas Administrasi Dalam Daerah		- Terselenggaranya fasilitasi penataan pemanfaatan Tanah									

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
4.01	4.01.03	45	03	Fasilitasi Penerimaan Unsur-Unsur Rupabumi/toponimi	terselenggaranya Fasilitasi Penerimaan Unsur-Unsur Rupabumi/toponimi																
4.01	4.01.03	45	04	Fasilitasi Penataan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya Fasilitasi Penataan pemanfaatan tanah																
				Pembangunan/ pemeliharaan Monumen Tapal Batas Antar Kabupaten	Terselenggaranya Pembangunan/pemeliharaan Monumen Tapal Batas Antar Kabupaten																
4.01	4.01.03	44		Peningkatan Kinerja Pemerintahan		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah		- Terlaksananya Fasilitasi administrasi pelantikan, pemberhentian Bupati dan Wabup serta PAW Anggota DPRD								4	01	02	2.01	03	
4.01	4.01.03	44		Evaluasi Kewenangan Kabupaten dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kewenangan Kabupaten dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah																
4.01	4.01.03	44	04	Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati			- Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati													
				Fasilitasi administrasi, pelantikan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta PAW Anggota DPRD	terlaksananya Fasilitasi administrasi, pelantikan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta PAW Anggota DPRD			- Terselenggaranya Peringatan hari Otonomi daerah													
4.01	4.01.03	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah	terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak dalam negeri	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama/kemitraan yang bermanfaat						4	01	02	2.04		
4.01	4.01.03	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik	terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri			Terselenggaranya kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia									4	01	02	2.04	01
Pergeseran Kegiatan dari BAGIAN PORGANISASI				Forum Pertemuan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia Wilayah Bali	Terlaksananya forum pertemuan Sekretaris daerah seluruh Indonesia wilayah Bali			Terselenggaranya Forum Pertemuan Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Bali													
						Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri		terselenggaranya Fasilitasi/pembentukan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri									4	01	02	2.04	02
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerja sama									4	01	02	2.04	03
1.05	4.01.03	17		Urusan Wajib	Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
					Perayaan hari-hari besar nasional	terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional															
					Perayaan hari-hari besar daerah	terselenggaranya perayaan hari-hari besar daerah															
					perayaan menyambut tahun baru	terselenggaranya perayaan menyambut tahun baru															
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	03	06	Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran				ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	01	01			
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam Pengadministrasian	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor								4	01	01	2.03	10
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam Pengadministrasian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								4	01	01	2.03	11
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (meja, kursi, lemari, laptop, AC, printer, dll)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor								4	01	01	2.03	13
						Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat-rapat dan jamuan tamu	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu								4	01	01	2.04	17
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan														
Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait																					

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
4	01	03	06	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi dalam daerah																		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													4	01	01	2.03	20		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua 3 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional										4	01	01	2.03	30		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin atau berkala	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai										4	01	01	2.03	34		
				Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya alat Gedung Kantor (Komputer, Kamera, AC, Printer, dan lainnya) secara rutin atau berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal										4	01	02				
1	06	4	01	Urusan Wajib	Pelayanan Dasar Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				PROGRAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pertumbuhan multikultural melalui jalur formal, informal dan non formal					4	01	02					
						Pembinaan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural Kabupaten Karangasem	Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan Kultural di Kabupaten Karangasem	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan Kultural di Kabupaten Karangasem								4	01	02	2.02			
1	06	4	01	Urusan Wajib	Pelayanan Dasar Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											4	01	02	2.02	02		
						Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah	Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Karangasem		Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pertanggungjawaban terhadap Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Karangasem								4	01	02	2.02	03		
2	13	4	01	Urusan Wajib	Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Peringkat Pola Kemitraan										4	01	02	2.02	03		
						Peningkatan Pola Kemitraan	Peringkat Pola Kemitraan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peringkat Pola Kemitraan														
4	01	4	01	Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan											4	01	02	2.02	01		
						Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kegiatan pembinaan maupun lomba sekaa teruna di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi		Meningkatnya kegiatan pembinaan maupun lomba sekaa teruna di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi														
1	06	4	01	Urusan Wajib	Pelayanan Dasar Sosial	Pengembangan Nilai Budaya											4	01	02	2.02	01		
						Peningkatan Pembinaan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui Darma Santi di Tingkat Kabupaten Karangasem, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui Darma Santi di Tingkat Kabupaten Karangasem, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional														
						Peningkatan pemahaman sastra agama	Terlaksananya Pemahaman Umat melalui Pelatihan Kepemangkuhan/Serati Banten		Terlaksananya Pemahaman Umat melalui Pelatihan Kepemangkuhan/Serati Banten														
						Pelaksanaan Upacara Keagamaan	Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan (Panca Yadnya) pada Pura Kahyangan jagat , Pura Sad Kahyangan di Kabupaten se-Bali dan Pura yang ada di Indonesia		Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Keagamaan (Panca Yadnya) pada Pura Kahyangan jagat , Pura Sad Kahyangan di Kabupaten se-Bali dan Pura yang ada di Indonesia														
						Paruman Sulinggih Kabupaten Karangasem	-Meningkatnya pemahaman umat melalui hasil paruman sulinggih - Terlaksananya pemberian Puniia kepada Pemuka Agama/Para Sulinggih lanang istri di Kab. Karangasem		-Meningkatnya pemahaman umat melalui hasil paruman sulinggih - Terlaksananya pemberian Puniia kepada Pemuka Agama/Para Sulinggih lanang istri di Kab. Karangasem														
						Peningkatan pemahaman sarana dan prasarana penunjang upacara keagamaan	Terlaksananya kegiatan Wewalen (Sekaa Gong, Pesantian, Rejang, Topeng) sebagai sarana penunjang pelaksanaan Upacara Agama		Terlaksananya kegiatan Wewalen (Sekaa Gong, Pesantian, Rejang, Topeng) sebagai sarana penunjang pelaksanaan Upacara Agama														
						Pelaksanaan Darmaduta dan Darmasrama	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan Sastra Agama terhadap masyarakat di Kabupaten Karangasem		Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan Sastra Agama terhadap masyarakat di Kabupaten Karangasem														

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
				Peningkatan Pembinaan Lembaga Umat	Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Lembaga Umat di Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan dalam rangka Buka Puasa, Natal, Waisak dan Imlek di Kabupaten Karangasem		Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan Lembaga Umat di Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan dalam rangka Buka Puasa, Natal, Waisak dan Imlek di Kabupaten Karangasem													
BAGIAN HUKUM						BAGIAN HUKUM														
4.01	4.01.03	03	06	Pemerintah	Administrasi	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	01	01				
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan alat tulis kantor berbasis IT yang dapat dibeli.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor						4	01	01	2.03	10	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						4	01	01	2.03	11	
						Penyedia Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ teknis/keamanan	Tersedianya Tenaga administrasi / teknis / keamanan	Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait												
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultansi dalam daerah													
4.01	4.01.03	03	06			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai						4	01	01	2.03	30	
						Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	terpeliharyanya peralatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal						4	01	01	2.03	34	
4.01	4.01.03	4	01			Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan		Disisipkan ke Kegiatan Penyusunan Laporan RANHAM												
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								4	01	02			
4.01	4.01.03	4	01			Program penataan Peraturan Perundang Undangan		KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH	Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan yang berlaku	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penguatan regulasi dan pemerintahan umum			4	01	02	2.03			
						Pembahasan penelitian penyusunan, koordinasi dan konsultasi Rancangan Perda dan Peraturan Bupati (Produk Hukum Daerah)	Tertelitinya rancangan Perda dan Peraturan Bupati	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Tertelitinya rancangan Perda dan Peraturan Bupati						4	01	02	2.03	01	
4.01	4.01.03	4	01			Program penataan Peraturan Perundang Undangan		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Hukum dan Perlindungan HAM					4	01	02	2.03	03		
						Pengembangan dan pengelolaan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Tercapainya pengelolaan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang akurat, cepat dan mudah diakses													
						Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat													
						Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya sosialisasi rancangan produk Hukum Daerah													
4.01	4.01.03	4	01			Program Pembinaan sarana dan prasarana Hukum														
						Penyusunan laporan pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya program RANHAM dengan baik, berupa laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi.													
						Penyuluhan Hukum	Mewujudkan kesadaran Hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan dan kewajibannya													

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.01	4.01.03	4	01	Program Pembinaan sarana dan prasarana Hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum	- Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin / Kurang mampu							4	01	02	2.03	02
				Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin / Kurang mampu													
				Penanganan masalah masalah kasus Pemerintah Kabupaten Karangasem	Tertanganinya masalah masalah / kasus kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Karangasem		- Tertanganinya masalah masalah / kasus kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Karangasem											
							- terselesaikannya permohonan Rekomendasi Tanah Pelaba Pura											
BAGIAN EKONOMI					BAGIAN EKONOMI													
4.01	4.01.03	01	Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintah	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	
		01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang tersedia					4	01	01	2.03	01
		10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase Terpenuhiya Penyediaan ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor					4	01	01	2.03	10
		11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					4	01	01	2.03	11
		17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Jumlah Nasi Kotak Snack Kotak	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu					4	01	01	2.03	17
		19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi / Teknis / Keamanan	Presentase jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang terbayar												
		26			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam	Frekuensi terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait									
4.01	4.01.03	01			Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran									4	01	01	2.03	30
4.01	4.01.03	01	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase Terpenuhiya pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai									
4.01	4.01.03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Peralatan kantor yang laik pakai dan Presentase terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur					4	01	01	2.03	34
		28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Presentase terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur												
4.01	4.01.03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Disisipkan ke kegiatan ATK dan penggandaan									
		01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tersusunnya laporan kinerja												
4.01	4.01.03	63			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase pertumbuhan iklim investasi berbasis pengembangan sektor ekonomi mikro	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah			4	01	03	2.01	
		63	01		Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terfasilitasinya perusahaan daerah yang belum mampu beroperasi/yang akan dibentuk serta fasilitasi terkait dengan investasi pmda pada BUMD Kabupaten Karangasem	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		- Terfasilitasinya perusahaan daerah yang belum mampu beroperasi/yang akan dibentuk serta fasilitasi terkait dengan investasi pmda pada BUMD Kabupaten Karangasem					4	01	03	2.01	01
4.01	4.01.03	68			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
		68	02		Pembinaan Terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir	Terbinanya cakupan Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir yang Terbina			- Terbinanya cakupan Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir yang Terbina									
4.01	4.01.03	67			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Presentase terkendalnya Inflasi Daerah - Terfasilitasinya dukungan penyaluran kredit usaha rakyat dan ekonomi kreatif					4	01	03	2.01	02
		67	02		Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Perberdayaan Lembaga Perekonomian serta Pengendalian Inflasi Daerah	Presentase terkendalnya Inflasi Daerah												
		67	05		Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Periwisata	Terfasilitasinya dukungan penyaluran kredit usaha rakyat dan ekonomi kreatif												

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																			
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE										
		67	04			Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring sarana perekonomian pasar rakyat yang dikelola pemda dan toko modern di Kabupaten Karangasem	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring sarana perekonomian pasar rakyat yang dikelola pemda dan toko modern di Kabupaten Karangasem							4	01	03	2.01	03				
																4	01	03	2.04					
																4	01	03	2.04	01				
4.01	4.01.03	64				Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Jumlah pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina							4	01	03	2.04	02				
		64	03			Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Mineral	Terbinanya 20 Pengusaha Bidang Pertambangan Bahan Galian C di Kabupaten Karangasem																	
4.01	4.01.03	61				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Jumlah PLTS menjadi berkualitas dan dapat dipergunakan dengan baik							4	01	03	2.04	03				
		61	03			Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Energi	Terbinanya 5 PLTS di Kabupaten Karangasem																	
4.01	4.01.03	17				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										Kegiatan digeser ke BPKAD								
		17	02			Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya 150 Buku Tantang Standar Satuan Harga																	
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																			
4.01	4.01.03	01		Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4	01	01		
																				4	01	01	2.03	
4.01	4.01.03	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia											4	01	01	2.03	01
4.01	4.01.03	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dalam setahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor											4	01	01	2.03	10
4.01	4.01.03	01	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan											4	01	01	2.03	11
4.01	4.01.03	01	19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/ Keamanan	Tersedianya Jasa tenaga Non Pegawai / Kontrak	Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait																
4.01	4.01.03	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
4.01	4.01.03	02	24			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai											4	01	01	2.03	30
4.01	4.01.03	02	28			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor di Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal											4	01	01	2.03	35
																				4	01	03		
4.02	4.01.04	03	06			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian kebijakan pemerintah			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah					4	01	03	2.02	
								Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Jumlah dokumen perencanaan tersusun											4	01	03	2.02	01
						Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Termonitornya 166 paket pekerjaan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan											4	01	03	2.02	02
						Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya 15 kali kunjungan																	
						Pergeseran Kegiatan dari BAGIAN ORGANISASI	Rapat Rutin/ rapat kerja	Jumlah pelaksanaan rapat rutin/ rapat kerja dalam 1 tahun																
								Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah dokumen evaluasi tersusun											4	01	03	2.02	03

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
4.03	4.01.05	03	06	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																
				Pengumpulan dan pengolahan serta penyusunan program	Tersusunnya 50 buku RENSTRA, RENJA, RKA, DPA/DPPA SETDA															
				Penyusunan pelaporan realisasi anggaran	Tercetaknya 49 laporan realisasi anggaran															
4.01	4.01.03	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
4.02	4.01.04	03	06	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Tersusunnya Lakip, LPPD, LKPJ OPD															
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA														
4.02	4.01.04	03	06	Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Disisipkan ke kegiatan rutin (ATK dan fotocopy)	ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	01	01			
						Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Tersusunnya LRA,RFK, Renstra, Renja,Lakip SKPD:Jumlah laporan: 5 laporan													
4.01	4.01.03	03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									4	01	01	2.03		
						Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai dan terkirimnya surat-surat ; 80 lembar, 12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia							4	01	01	2.03	01
						Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK: Jenis ATK yang tersedia: 35 jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor							4	01	01	2.03	10
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan: Jumlah barang cetakan yang tersedia: 6 jenis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							4	01	01	2.03	11
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia: 20 jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor							4	01	01	2.03	13
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi Luar Daerah							4	01	01	2.03	18
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi dalam daerah													
						Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Terbayarnya jasa tenaga kontrak: Jumlah tenaga kontrak x 12 bulan: 36 OB		Disisipkan menjadi rincian belanja kegiatan terkait											
4.01	4.01.03	03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ; Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara: 3 unit; 12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai							4	01	01	2.03	30
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dan jaringan Internet: Jumlah peralatan kantor yg dipelihara 35 unit; 12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal							4	01	01	2.03	34
4.01	4.01.03	03	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									4	01	03			
						Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai penandatanganan kontrak untuk 50 OPD	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai penandatanganan kontrak untuk 50 OPD	PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase percepatan pengadaan Barang/Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah		4	01	03	2.03		
															4	01	03	2.03	01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4.01	4.01.03	03	21	Program Inventaris Paket Pengadaan Barang/Jasa															
				Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan data paket pada SIRUP	Membantu pemetaan OPD yang belum menyelesaikan pengumuman RUP di SIRUP dan Memperoleh data statistik pengadaan barang/jasa berdasarkan cara pengadaan, jenis pengadaan, besaran anggaran, alokasi waktu, lokasi pekerjaan dan metode dalam pemilihan penyedia; 50 OPD														
4.01	4.01.03	03	22	Program Pelaksanaan Riset dan Analisa Pasar Barang/Jasa															
				Penyusunan karakteristik Barang/Jasa pada Jenis Pengadaan Tertentu	Ketersediaan barang/jasa pada suatu wilayah sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan strategis pembangunan dan pengadaan pada tahun rencana dan Memperoleh informasi untuk menjadi rekomendasi dalam identifikasi barang/jasa, pemakatan, dan merencanakan kebutuhan barang/jasa; 50 OPD														
4.01	4.01.03	03	28	Program Pelaksanaan Analisis Beban Kerja UKPBJ															
				Meysun Analisis Jabatan di UKPBJ															
				Pengelolaan personil UKPBJ															
				Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi															
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 12 kali	Pengelolaan Layanan Pengadaan Elektronik			Efektif dan baiknya sistem pengadaan barang/jasa						4	01	03	2.03	02
4.01	4.01.03	03	23	Program Penyusunan dan Pemantauan Strategis Pengadaan Barang/Jasa															
				Pembuatan SOP Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia	SOP dan Dokumen Pendukung proses perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia; 10 SOP														
				Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia	Melakukan perbaikan atas kekurangan dan kelemahan dokumen perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia; 200 paket														
				Pendampingan pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan Kontrak berjalan tertib yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Implementasi mitigasi resiko dalam pelaksanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 200 paket														
4.01	4.01.03	03	24	Program Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal															
				Pengelolaan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik lokal															
4.01	4.01.03	03	25	Program Pelaksanaan Pengelolaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastrukturnya															
				Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem pengadaan terintegrasi dengan sistem lainnya															
				Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sistem informasi pengadaan barang/jasa															
4.01	4.01.03	03	26	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik															
				Melaksanakan layanan dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik															
				Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa															
				Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas															

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
			Penanganan Sanggah dalam pengadaan barang/jasa	Terpeenuhnya penanganan sanggah dari penyedia barang/jasa; jumlah kasus sanggah; 5 kasus sanggah																		
			Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SimPeL)	Tersedianya Software untuk pengadaan langsung barang/jasa																		
4.01	4.01	03	05													4	01	03	2.03	03		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek pengadaan barang/jasa, dan study komparatif																
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek pengadaan barang/jasa, dan study komparatif; 2 kali kegiatan																		
4.01	4.01.03	03	27																			
			Program Pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																			
			Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pendampingan, advisory dan coaching clinic																			
			Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan																			
			Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ																			
BAGIAN UMUM					BAGIAN UMUM																	
4.01	4.01.03	01					ADMINISTRASI UMUM	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4	01	01				
			Pemerintah Fungsi Penunjang	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpeenuhnya pelayanan administrasi perkantoran											4	01	01	2.03		
4.01	4.01.03	01	01														4	01	01	2.03	01	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia														
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang dibayar														
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang dan Gedung di Lingkungan Setda menjadi bersih dan rapi														
4.01	4.01.03	01	10																			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dalam setahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor														
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan														
4.01	4.01.03	01	11																			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Elektronik Penerangan Bangunan	Persentase pemeliharaan jaringan instalasi listrik di lingkungan setda dalam 1 tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Elektronik Penerangan Bangunan	Persentase pemeliharaan jaringan instalasi listrik di lingkungan setda dalam 1 tahun														
PERGESERAN KEGIATAN DARI BAGIAN PERLENGKAPAN																						
					Penyediaan Peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga rumah Jabatan														
					Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodal	Tersedianya bebanten untuk persembahwangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya biaya canang, bebanten untuk bakli pengantar														
					Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu														
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah														
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan																	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi dalam daerah																
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpeenuhnya pelayanan administrasi perkantoran																
					Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan wakil Bupati	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan wakil Bupati														
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas untuk kegiatan operasional yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemda	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas / operasional														
PERGESERAN KEGIATAN DARI BAGIAN PERLENGKAPAN																						
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan untuk keperluan kelengkapan sarana dan prasana kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair								4	01	01	2.03	25
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah materai yang tersedia	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah Jabatan dan rumah dinas yang terpelihara dan laik guna								4	01	01	2.03	26
					Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas yang dipelihara								4	01	01	2.03	27
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor, halaman, taman dan lainnya yang dipelihara								4	01	01	2.03	28
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua								4	01	01	2.03	29
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan Dinas /Operasional bagian Umum dan Setda kondisinya menjadi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai								4	01	01	2.03	30
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor pada Bag Umum dan Setda Kab.karangasem Kondisinya menjadi baik	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan								4	01	01	2.03	34
			Pemeliharaan rutin/berkala taman	Jumlah Taman kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, wakil berhasil diperbaiki dan kondisinya menjadi baik										4	01	01	2.03	35
					Pemeliharaan Rutin/berkala Mebulair	Terpeliharanya Meubelair								4	01	01	2.03	35
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase penguatan manajemen SDM Aparatur				4	01	01	2.04	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya								4	01	01	2.04	02
														4	01	04	2.01	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				4	01	04	2.01	
			Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Terfasilitasinya kegiatan administrasi dan tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM	Persentase efisiensi proses pelayanan birokrasi						4	01	04	2.01	01
			Penerimaan Tamu Tamu Bupati dan Wakil Bupati															
			Pemeliharaan Kesehatan															
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
			Penataan Arsip															
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengelolaan Perlengkapan	- Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah - Terbayarnya asuransi gedung dan kendaraan dinas milik Pemda								4	01	04	2.01	02
			Penyediaan sarana mobilitasi darat Tamu-Tamu Pemerintah	Jumlah sewa mobilitas darat														
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemkab yang dilaksanakan														
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah														
			Perayaan hari-hari besar nasional	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar Nasional														

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE								
			Perayaan hari-hari besar daerah	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar daerah																	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu																	
			Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Jumlah laporan aset																	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Pengelolaan Rumah Tangga			- Tersedianya peralatan dan kebutuhan RT Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati									4	01	04	2.01	03
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					- Jumlah SPPT PBB													
			Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah SPPT PBB																	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
			Verifikasi SPP																		
4.01	4.01.03	4	01	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan																	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																	
BAGIAN PERLENGKAPAN					(dilebur ke BAGIAN UMUM & BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN)																
4.01	4.01.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
				Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran																	
4.01	4.01.03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
				Jumlah materai yang tersedia																	
4.01	4.01.03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor																	
				Jumlah ATK dalam setahun																	
4.01	4.01.03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia																	
4.01	4.01.03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman																	
				Jumlah rapat dalam setahun																	
4.01	4.01.03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Elektronik Penerangan Bangunan																	
				Persentase pemeliharaan jaringan instalasi listrik di lingkungan setda dalam 1 tahun																	
4.01	4.01.03	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/ Keamanan																	
				Tersedianya Jasa tenaga Non Pegawai / Kontrak																	
4.01	4.01.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
				Persentase terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
4.01	4.01.03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor																	
				Jumlah Gedung yang dibangun untuk kepentingan kantor Setda																	
4.01	4.01.03	02	04	Pengadaan mobil jabatan																	
				Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan Bupati dan wakil Bupati																	
4.01	4.01.03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional																	
				Jumlah Kendaraan dinas untuk kegiatan operasional yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemda																	
4.01	4.01.03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																	
				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan untuk keperluan kelengkapan sarana dan prasana kantor																	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.01	4.01.03	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas yang dipelihara													
4.01	4.01.03	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor, halaman, taman dan lainnya yang dipelihara													
4.01	4.01.03	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua													
4.01	4.01.03	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan kantor di Sekretariat Daerah													
4.01	4.01.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
4.01	4.01.03	02	47	Penyediaan sarana mobilitasi darat Tamu-Tamu Pemerintah	Jumlah sewa mobilitas darat													
4.01	4.01.03	02	49	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemkab yang dilaksanakan													
4.01	4.01.03	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah													
4.01	4.01.03	17	04	Perayaan hari-hari besar nasional	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar Nasional													
4.01	4.01.03	17	20	Perayaan hari-hari besar daerah	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Besar daerah													
4.01	4.01.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
4.01	4.01.03	01	28	Penyediaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah SPPT PBB													
4.01	4.01.03	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan capaian kinerja yang tepat waktu													
4.01	4.01.03	17	16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Jumlah laporan aset													
BAGIAN ORGANISASI						BAGIAN ORGANISASI												
4.01	4.01.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran			ADMINISTRASI UMUM	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	01	01	2.03	
4.01	4.01.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materi	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang tersedia							4	01	01	2.03	01
4.01	4.01.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor							4	01	01	2.03	10
4.01	4.01.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							4	01	01	2.03	11
4.01	4.01.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu							4	01	01	2.03	17
4.01	4.01.03	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah							4	01	01	2.03	18
4.01	4.01.03	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Terbayarnya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Keamanan													
4.01	4.01.03	01	26	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah													
4.01	4.01.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terselenggaranya pelayanan Sarana dan prasarana aparatur													
				Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor							4	01	01	2.03	24
4.01	4.01.03	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional kondisinya menjadi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai							4	01	01	2.03	30
4.01	4.01.03	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor kondisinya menjadi baik	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase Jasa servis dan penggantian komponen							4	01	01	2.03	32
														4	01	04		

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.01	4.01.03	42		Program Penataan Kelembagaan Daerah	Persentase terpenuhinya Penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku			PENATAAN ORGANISASI	Persentase tertatanya Organisasi Perangkat Daerah di Bidang kelembagaan, Pelayanan Publik dan tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	ADMINISTRASI UMUM				4	01	04	2.02	
4.01	4.01.03	42	01	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya kelembagaan perangkat Daerah	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase tertatanya kelembagaan perangkat Daerah							4	01	04	2.02	01
4.01	4.01.03	42	02	Analisis jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan yang tersusun dengan baik dan disampaikan tepat waktu													
4.01	4.01.03	42	03	Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Roadmap reformasi Birokrasi yang tersusun													
4.01	4.01.03	42	04	Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan standar kompetensi jabatan													
4.01	4.01.03	42	05	Analisis beban kerja	Jumlah Dokumen ABK yang tersusun tepat waktu													
4.01	4.01.03	42	06	Evaluasi Jabatan	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Evaluasi Jabatan													
4.01	4.01.03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui pembinaan Gerakan Disiplin Nasional dan rapat Rutin/Rapat kerja	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- indeks kualitas pelayanan publik							4	01	04	2.02	02
				Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Persentase meningkatnya disiplin ASN		- Jumlah OPD yang Nilai IKM-nya Baik											
4.01	4.01.03	20	12	Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah buku laporan pembinaan pelayanan publik		- Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan SOP											
4.01	4.01.03	20	24				- Terbentuknya produk hukum daerah terkait tata laksana											
4.01	4.01.03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya Laporan Kinerja	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Nilai LAKIP dan Nilai RB							4	01	04	2.02	03
4.01	4.01.03	06	07	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan IKM tepat waktu		- Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi											
4.01	4.01.03	06	08	Pembinaan dalam rangka Penyusunan SOP	Jumlah PD yang dibina dalam penyusunan SOP													
4.01	4.01.03	06	10	Pendampingan ISO 2001-2008	Jumlah perangkat daerah yang bersertifikat ISO 9001-2015													
4.01	4.01.03	06	11	Penyusunan dan penulisan LAKIP Kabupaten Karangasem	Nilai LAKIP Kabupaten Karangasem													
4.01	4.01.03	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah														
4.02	4.01.04	25	02	Forum Pertemuan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia Wilayah Bali	Terlaksananya forum pertemuan Sekretaris daerah seluruh Indonesia wilayah Bali													
4.01	4.01.03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH														
4.01	4.01.03	20	13	Rapat Rutin/ rapat kerja	Jumlah pelaksanaan rapat rutin/ rapat kerja dalam 1 tahun													
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNI KASI PIMPINAN												
4.01	4.01.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			ADMINISTRASI UMUM	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efisiennya proses pelayanan birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	01	01	2.03	
4.01	4.01.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor							4	01	01	2.03	10
4.01	4.01.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jumlah makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan rapat	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu							4	01	01	2.03	17
4.01	4.01.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rakor/Raker dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah							4	01	01	2.03	18

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
4.01	4.01.03	01	19		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan																
4.02	4.01.03	01	26		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah																
4.01	4.01.03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
4.01	4.01.03	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional								4	01	01	2.03	30	
4.01	4.01.03	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor								4	01	01	2.03	34	
4.01	4.01.03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						4	01	04			
4.01	4.01.03	05	10		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprotokolan											4	1	04	2.03		
4.01	4.01.03	16			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah											4	1	4	2.03	01	
4.01	4.01.03	16	11		Fasilitasi Acara Resmi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan																
4.01	4.01.03	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
4.01	4.01.03	17	06		Pembinaan regu penyanyi																
4.01	4.01.03	17	22		Perayaan har-hari besar nasional dan daerah																
Pergesaran Kegiatan dari Kesbangpolinmas					Pembinaan dan pelatihan Korsik																
4.01	4.01.03	32			Program Peningkatan Peran Kehumasan											4	1	4	2.03	02	
4.01	4.01.03	32	01		Penerbitan media informasi pemerintah daerah																
4.02	4.01.04	32	02		Publikasi interaksi media																
4.03	4.01.05	32	03		Pelaksanaan kegiatan temu media, arahan media, konferensi media dan peninjauan media																
4.04	4.01.06	32	04		Orientasi jurnalistik rekayasa penyampaian informasi publik																
4.05	4.01.07	32	05		Press Room																
4.01	4.01.03	31			Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi											4	1	4	2.03	03	
4.01	4.01.03	31	01		Peningkatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah																
4.01	4.01.03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
4.01	4.01.03	05	11		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jurnalistik																
BAGIAN KEUANGAN																					
4.01	4.01.03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											4	01	01	2.03		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat											4	01	01	2.03	01	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor											4	01	01	2.03	10	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											4	01	01	2.03	11	
					Penyediaan Makanan dan Minuman											4	01	01	2.03	17	
Pindahan Kegiatan dari Bagian Perencanaan																					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah							4	01	01	2.03	18
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara dan laik pakai							4	01	01	2.03	30
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang laik pakai dan berfungsi optimal							4	01	01	2.03	34
													4	01	04		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Pengelolaan Perencanaan	- Jumlah dokumen perencanaan Selda tersusun	PERENCANAAN DAN KEUANGAN		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				4	01	04	2.04	01
			Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyusunan Program										4	01	04	2.04	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Pengelolaan Keuangan	- Jumlah dokumen administrasi keuangan yang terverifikasi							4	01	04	2.04	02
			Verifikasi SPP														
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Penatausahaan Pelaporan	- Jumlah laporan keuangan yang dapat disusun							4	01	04	2.04	03
			Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran			- Jumlah laporan kinerja tersusun											
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			- Jumlah laporan aset yang tersusun											
			Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
			Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah														

eroleh penegasan kembali :

- Masih ada 3 Bagian (Bagian Hukum, Ekonomi dan Pengadaan) yang menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja yang notabene bukan Tusi bagian bersangkutan.
- Program dan Kegiatan terkait Wawasan Kebangsaan di Bagian Adpem dan Humas apakah akan diambil alih oleh Kesbangpol?
- Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang apakah akan diambil oleh BPKAD?

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	.05	.01	.01	Urusan Pemerintahan	Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran	ADMINISTRASI UMUM	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.01
					Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.02
					Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.06
					penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja (komputer)	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.09
					Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.10
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetaakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.01
					penyediaan komponen instalansi, listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.12
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.14
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.15
					Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.17
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.18
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.07
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.01	.1.03.30

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pendukung kebersihan kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	08
			Penyediaan biaya canang bebanten piodalan	Terlaksananya upacara keagamaan	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	16
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah													
			Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
			Pengadaan kendaraan dinas bermotor / operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	20
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	24
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer FC dan Laptop	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Komputer FC dan Laptop	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor komputer PC dan Laptop	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Komputer FC dan Laptop	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	24
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	22
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	28
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	30
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	34
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya pelayanan administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.03	32
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			ADMINISTRASI KEUANGAN	Terselenggaranya pelayanan administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.02	
			Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	01	1.02	06
			Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	06	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1). terwujudnya mediasi penanganan konflik sosial 2). Meningkatkan pemahaman tentang konflik sosial 3). Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1). terwujudnya mediasi penanganan konflik sosial 2). Meningkatkan pemahaman tentang konflik sosial 3). Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusny Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	.03
			Operasional Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Karangasem	1). persentase cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat 2). meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1). persentase cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat 2). meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusny Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	.04
			Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya Pemeliharaan Kanrantibmas dan Kenyamanan Lingkungan		Terselenggaranya Pemeliharaan Kanrantibmas dan Kenyamanan Lingkungan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusny Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	
			Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegah kejahatan	1). Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegah kejahatan 2). Terlaksananya penyuluhan teknik pencegahan tindak kriminal	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	1). Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegah kejahatan 2). Terlaksananya penyuluhan teknik pencegahan tindak kriminal	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusny Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	.04
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan		Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusny Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	
			Perayaan Hari-hari besar nasional dan daerah	Terlaksananya kegiatan pawai dan pameran pembangunan dalam rangka HUT RI	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya kegiatan pawai dan pameran pembangunan dalam rangka HUT RI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusny Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.02	.2.01	.03
		Pindahan dari bagian adpem			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusny Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.02	.2.01	.03
		Pindahan dari Dinas Sosiaal			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusny Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.02	.2.01	.03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial	Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	05	2.01	05
			Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1). Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan 2). Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1). Terselenggaranya program pengembangan wawasan kebangsaan 2). Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	03
			Pendidikan Bela Negara	Terlaksananya Pelatihan kader Bela Negara	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pelatihan kader Bela Negara	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	02
			Operasional Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	05	2.01	05
			Bulan Bakti Bung Karno	Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	04
			Gerakan Revolusi Mental	Tersusunnya rencana aksi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya rencana aksi	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	02
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	02
			Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	1). Terpenuhinya pelaksanaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. 2). Terlaksananya sosialisasi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1). Terpenuhinya pelaksanaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. 2). Terlaksananya sosialisasi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumusnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERCAPAINYA Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	02	2.01	02
			Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terumusnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	06	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Operasional Kominda Kabupaten Karangasem	Terjalinnnya hubungan kerjasama dengan para anggota Kominda guna memperlancar pelaksanaan Tugas komunitas Intelijen daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terjalinnnya hubungan kerjasama dengan para anggota Kominda guna memperlancar pelaksanaan Tugas komunitas Intelijen daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	.04
			Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem (FORKOPIMDA)	Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan terjalinnya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan terjalinnya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.06	.2.01	.04
			Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Pekat		Meningkatnya Pemberantasan Pekat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.05	.2.01	.05
			Pengawasan Peredaran Gelap narkoba	Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Karangasem	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Karangasem	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.05	.2.01	.03
			Penyuluh pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Micol	Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan micol	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan micol	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.05	.2.01	.03
			Penyuluh Pencegahan Praktek Prostitusi	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.05	.2.01	.03
			Pelatih Kader Penyuluh Pekat	Terlaksananya kegiatan pelatihan kader penyuluh pekat bagi guru-guru di Kabupaten Karangasem	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya kegiatan pelatihan kader penyuluh pekat bagi guru-guru di Kabupaten Karangasem	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSELENGGAARANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.05	.2.01	.03
			Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat		Terlaksananya pendidikan politik masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	.01	.03	.2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	1). Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol. 2). Terpenuhihinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Keuangan Parpol 3). Termonitornya Penggunaan Bantuan keuangan parpol	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol. 2). Terpenuhihinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Keuangan Parpol 3). Termonitornya Penggunaan Bantuan keuangan parpol	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	03	2.01	05
			Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan	1). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengajuan Dana Hibah 2). Terpenuhihinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Dana Hibah 3). Termonitornya Penggunaan bantuan dana hibah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengajuan Dana Hibah 2). Terpenuhihinya Kelengkapan Administrasi Pengajuan Dana Hibah 3). Termonitornya Penggunaan bantuan dana hibah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TERLAKSANYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	04	2.01	04
			Fasilitas organisasi Kemasyarakatan	1). Terfasilitasinya pendataan organisasi kemasyarakatan di daerah 2). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan politik	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1). Terfasilitasinya pendataan organisasi kemasyarakatan di daerah 2). Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TERLAKSANYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	04	2.01	03
			Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	1). Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat 2). Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat 2). Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	03	2.01	03
			Forkomkon Parpol	1). Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi antara pemerintah dengan Partai Politik 2). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan partai politik	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi antara pemerintah dengan Partai Politik 2). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan partai politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	03	2.01	04
			Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah	Terbentuknya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 2). Terlaksananya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 3). Termonitornya/ Terpantaunya Organisasi Kemasyarakatan di daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbentuknya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 2). Terlaksananya Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah 3). Termonitornya /Terpantaunya Organisasi Kemasyarakatan di daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terrumusnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TERLAKSANYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	04	2.01	04
			Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	1). Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa 2). Meningkatnya Pemahaman Wawasan Politik Masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1). Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa 2). Meningkatnya Pemahaman Wawasan Politik Masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terrumusnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	01	03	2.01	03

27. SEKRETARIAT DPRD

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
4	01	4	01	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	01			
								Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum					4	02	01	2.03		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat					4	02	01	2.03	01	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air dan listrik					4	02	01	2.03	02	
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor					4	02	01	2.03	08	
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					4	02	01	2.03	10	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					4	02	01	2.03	11	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					4	02	01	2.03	12	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					4	02	01	2.03	14	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar					4	02	01	2.03	15	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bakar gas	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bakar gas					4	02	01	2.03	16	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman							4	02	01	2.03	17	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya raker dan konsultasi luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya raker dan konsultasi luar daerah							4	02	01	2.03	18	
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Terbayarnya upah tenaga keamanan, sopir dan tenaga teknis														
						Penyediaan Biaya Canang, bebanten dan Piodalan	Terselenggaranya banten piodalan dan persembahyangan sehari-hari														
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya raker dan konsultasi dalam daerah														
4	01	4	02	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur					Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan dan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	02			
										Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD					4	02	02	2.01		
						Pembangunan Rumah Jabatan	Terbangunnya Rumah Jabatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Terbangunnya Rumah Jabatan								4	02	02	2.01	04
						Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung dan bangunan pelengkap Kantor	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Terbangunnya Gedung dan bangunan pelengkap Kantor								4	02	02	2.01	05
												Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	01			
										Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum					4	02	01	2.03		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil Jabatan							4	02	01	2.03	19
							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional							4	02	01	2.03	20
							Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan							4	02	01	2.03	21
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor							4	02	01	2.03	22
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							4	02	01	2.03	24
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan							4	02	01	2.03	26
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor							4	02	01	2.03	28
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan							4	02	01	2.03	29
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional							4	02	01	2.03	30
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan							4	02	01	2.03	33
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor							4	02	01	2.03	34
							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan							4	02	01	2.03	36
													Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan dan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	02		
										Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD						4	02	02	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Penataan Halaman dan Taman Kantor	Tertatanya Halaman dan Taman Kantor	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Tertatanya Halaman dan Taman Kantor							4	02	02	2.01	05
							Pegelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	Tertatnya Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	Tertatnya Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen							4	02	02	2.01	01
4	01	4	03	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur						Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan dan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	02		
											Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD				4	02	02	2.02	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas sesuai jumlah yang dibutuhkan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian dinas sesuai jumlah yang dibutuhkan							4	02	02	2.02	02
4	01	4	06	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	01		
											Administrasi Keuangan		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan				4	02	01	2.02	
							Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu							4	02	01	2.02	06
4	01	4	15	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03		
											Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase terbentuknya perda dan peraturan DPRD				4	02	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah yang direncanakan dalam PROLEGDA, jumlah Perda Inisiatif DPRD dan Rata-rata jumlah bulan penyelesaian pembahasan perda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah yang direncanakan dalam PROLEGDA, jumlah Perda Inisiatif DPRD dan Rata-rata jumlah bulan penyelesaian pembahasan perda							4	02	03	2.01	01
										Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03		
								Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan					4	02	03	2.03	
				Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	01
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	02
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	03
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	04
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	06
								Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rekomendasi, Persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan							4	02	03	2.03	07
												Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan dan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	02		
										Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD					4	02	02	2.01	
						Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Keputusan dewan yang dihasilkan	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Keputusan dewan yang dihasilkan							4	02	02	2.01	02
						Rapat-Rapat Paripurna	Terselenggaranya rapat paripurna pelantikan	Fasilitasi Rapat DPRD	Terselenggaranya rapat paripurna pelantikan							4	02	02	2.01	02
												Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03		
										Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terpenuhinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat					4	02	03	2.05	
						Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses dan menyerap aspirasi	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses dan menyerap aspirasi							4	02	03	2.05	03
						Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan							4	02	03	2.05	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
										Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03					
								Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD					4	02	03	2.04				
					Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek dan mendapatkan tambahan wawasan	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti orientasi dan mendapatkan						4	02	03	2.04	01			
							Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek dan mendapatkan						4	02	03	2.04	02			
					Peliputan dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah kegiatan DPRD yang diliput dan diinformasikan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan DPRD yang diliput dan diinformasikan						4	02	03	2.04	06			
										Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03					
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas pimpinan DPRD					4	02	03	2.07				
					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja luar daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja luar daerah dan memperoleh hasil yang tertuang dalam laporan						4	02	03	2.07	01			
										Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan dan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	02					
								Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD					4	02	02	2.02				
					Peningkatan Penataan Administrasi Keuangan DPRD	Tertatanya Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tertatanya Administrasi Keuangan						4	02	02	2.02	01			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Perawatan dan Pengobatan serta Cek Up	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas medical check up							4	02	02	2.02	03
												Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur pendukung urusan pemerintahan	4	02	03		
										Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD					4	02	03	2.04	
						Publikasi dan Interaksi Media	Terhimpunnya Dokumentasi Kegiatan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terhimpunnya Dokumentasi Kegiatan							4	02	03	2.04	03
1	05	4	17	Pilihan	Administrasi Pemerintahan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan													
						Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan													

28. KECAMATAN KARANGASEM

PERMENDAGRI NO. 90TAHUN 2019

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja								
				Volume	Satuan					Volume	Satuan							
01	4.01.06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Karangasem	100	%	7	01	01	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Karangasem	100	%
							7	01	01	2.0	3			Administrasi Umum				
			01	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kec. Karangasem	850	Lembar	7	01	01	2.0	3	01	#REF!	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kec. Karangasem	850	Lembar
			02	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Karangasem	36	Rekening bulan	7	01	01	2.0	3	02	#REF!	Jumlah rekening bulan telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Karangasem	36	Rekening bulan
			06	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Karangasem	12	Unit	7	01	01	2.0	3	06	#REF!	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Karangasem	12	Unit
			08	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	230	Unit	7	01	01	2.0	3	08	#REF!	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	230	Unit
			10	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	1.560	Unit	7	01	01	2.0	3	10	#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	1.560	Unit
				Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar		50	Unit										50	Unit
			11	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kec. Karangasem	27.000	Lembar	7	01	01	2.0	3	11	#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	27.000	Lembar
				Jumlah barang cetakan yang terbayar		150	Buku										150	Buku

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja	
																			Volume	Satuan
			12		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	205	Unit	7	01	01	2.0	12		#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	205	Unit	
			15		Jumlah surat kabar yang terbayar	Kec. Karangasem	1.460	Buah	7	01	01	2.0	15		#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	1.460	Buah	
			16		Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kec. Karangasem	10	Unit	7	01	01	2.0	16		#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	10	Unit	
			17		Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kec. Karangasem	650	Kotak	7	01	01	2.0	17		#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	650	Kotak	
			18		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Karangasem	9	orang kali	7	01	01	2.0	18		#REF!	#REF!	Kec. Karangasem	9	orang kali	
			19		Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	Kec. Karangasem	216	Orang bulan	7	01	01	2.0	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan	Kec. Karangasem	216	Orang bulan		
			20		Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kec. Karangasem	12	Paket bulan	7	01	01	2.0	07		Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kec. Karangasem	12	Paket bulan		
			26		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kec. Karangasem	50	Orang kali									Kec. Karangasem	50	Orang kali	
01	4.01.06	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	%	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100	%		

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja		
																							Volume	Satuan	
																								2	Unit
																								3	Buah
																								5	Unit
																								0	Paket
																								1	Unit
																								144	Unit bulan
																								16	Unit
																								0	Unit
01	4.01.06	06																						100	%
																								7	Dokumen

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja		
																						Volume	Satuan	
06	4.01.06	15	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata		98	%	7	01	03			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata		98	%						
			18		Jumlah desa/kelurahan dengan penduduk pendatang yang terdata untuk pengurusan SKTSnya	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan	7	01	02	2.0	02	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan dengan penduduk pendatang yang terdata untuk pengurusan SKTSnya	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan					
16	4.01.06	15	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan		61	%	7	01	02			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan		61	%						
			01		Jumlah lembaga tradisional yang terbina	Kec. Karangasem		Lembaga tradisional	7	01	02	2.0	02	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga tradisional yang terbina	Kec. Karangasem		Lembaga tradisional					
			04		Jumlah pelaku seni yang terbina	Kec. Karangasem	15	Orang/Kelompok	7	01	02	2.0	02	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaku seni yang terbina	Kec. Karangasem	15	Orang/Kelompok					
07	4.01.06	15	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana		75	%	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana		75	%						
			11		Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya		11	Desa/Kelurahan	7	01	03	2.0	03	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya		11	Desa/Kelurahan					
05	4.01.06	15	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ kelurahan yang terfasilitasi		3	Kasus	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali		3	Kasus						

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja		
																			Volume	Satuan	
				08																40	Orang
05	4.01.06	16	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase desa pakraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			44	%	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa pakraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				44	%
				19				1	Desa	7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang terbina kesadaran lingkungannya			1	Desa
05	4.01.06	17	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah			100	%	7	01	06			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah				100	%
				22				2	Perayaan	7	01	06	2.0	3		Penyediaan bahan logistik kantor	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Kec. Karangasem		2	Perayaan
07	4.01.06	17	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang			100	%	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang				100	%
										7	01	06	2.0	1		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang				

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja	
																				Volume	Satuan
			04		Jumlah desa/kelurahan yang terawasi kegiatan pembangunannya	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan	7	01	06	2.0	1	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	#REF!	Kec. Karangasem	11	Desa/Kelurahan		
			09		Jumlah desa/kelurahan yang terbina tata kelola administrasinya	Kec. Karangasem	4	Desa/Kelurahan	7	01	06	2.0	1	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	#REF!	Kec. Karangasem	4	Desa/Kelurahan		
07	4.01.06	18	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan		100	%	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan			100	%		
			06		Jumlah desa yang terbina administrasi pemerintahnya	Kec. Karangasem	8	Desa	7	01	06	2.0	1		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang terbina administrasi pemerintahnya	Kec. Karangasem	8	Desa		
									7	01	06	2.0	1	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi					
02	4.01.06	18	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa/kelurahan yang mendapat pembinaan		100	%	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi perempuan desa/kelurahan yang mendapat pembinaan			100	%		
			01		Jumlah anggota organisasi perempuan desa/kelurahan dan kecamatan yang terbina	Kec. Karangasem	15	Orang	7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah anggota organisasi perempuan desa/kelurahan dan kecamatan yang terbina	Kec. Karangasem	15	Orang		
			08		Jumlah PKK desa/kelurahan yang terbina	Kec. Karangasem	4	Desa/Kelurahan	7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah PKK desa/kelurahan yang terbina	Kec. Karangasem	4	Desa/Kelurahan		
01	4.01.06	19	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa tepat waktu		100	%	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa tepat waktu			100	%		

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja			
																		Volume	Satuan		
			01			Jumlah desa yang terevaluasi APBdesanya	Kec. Karangasem	8	Desa	7	01	06	2.0	1		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang terevaluasi APBdesanya	Kec. Karangasem	8	Desa	
										7	01	06	2.0	1	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu				
																Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah bulan upah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan				
02	4.01.06	19	19			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100	%	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan promosi kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan pemberdayaan pola hidup sehat di masyarakat			100	%	
			08			Jumlah sekolah yang terbina pola hidup sehatnya		3	Sekolah	7	01	03	2.0	1	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang terbina pola hidup sehatnya			3	Sekolah
13	4.01.06	20	20			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		60	%	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi			60	%	
			06			Jumlah atlet yang terbina		0	Orang	7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah atlet yang terbina			0	Orang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja						
																		Volume	Satuan					
03	4.01.06	21	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa/kelurahan yang terverifikasi dan diusulkan dalam musrenbang kabupaten			97	%	7	01	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan desa/kelurahan yang terverifikasi dan diusulkan dalam musrenbang kabupaten			97	%
			09		Jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	Kec. Karangasem		925	Usulan	7	01	02	2.01	02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	Kec. Karangasem		925	Usulan
										7	01	03	2.0	01	1				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten				
01	4.01.06	37	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu			98	%	7	01	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu			98	%
					Indeks kepuasan masyarakat			80,55															80,55	
			03		Jumlah rekomendasi perijinan dan ijin yang dikeluarkan	Kec. Karangasem		663	Buah	7	01	02	2.0	4					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah rekomendasi perijinan dan ijin yang dikeluarkan	Kec. Karangasem		663	Buah
					Jumlah banjar dinas/lingkungan yang melaksanakan pelayanan perijinan goes to banjar			32	Banjar/Lingk	7	01	02	2.0	01	4				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan			32	Banjar/Lingk
										7	01	02	2.0	02	4				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan				

HASIL PEMETAAN (MAPING) NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KARANGASEM DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM , KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

PERMENDAGRI NO. 90TAHUN 2019

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	KODE	KODE	KODE	KODE	KODE	KODE	KODE	KODE	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.
						Volume	Satuan										Volume	Satuan		
01	4.01.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Karangasem	100	%	978.650.000	7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Karangasem	100	%	966.650.000	
									7	01	01	2.03	01	Administrasi Umum						
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kel. Karangasem	330	Lembar	3.000.000	7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kel. Karangasem	330	Lembar	3.000.000	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Karangasem	48	Rekening bulan	25.000.000	7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Karangasem	48	Rekening bulan	25.000.000	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Karangasem	5	Unit	2.250.000	7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Karangasem	5	Unit	2.250.000	
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	49	Unit	1.600.000	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar dan jumlah tenaga kebersihan yang terbayar	Kel. Karangasem	1	tahun	13.600.000	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	360	Unit	9.000.000	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	360	Unit	9.000.000	
				Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	Kel. Karangasem	30	Unit	6.500.000							Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar	Kel. Karangasem	30	Unit	6.500.000	
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Karangasem	14.000	Lembar	4.200.000	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Karangasem	14.000	Lembar	3.300.000	
				Jumlah barang cetak yang terbayar	Kel. Karangasem	54	Buku	3.500.000							Jumlah barang cetak yang terbayar	Kel. Karangasem	54	Buku	3.500.000	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	70	Unit	4.800.000	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	70	Unit	4.800.000	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Karangasem	1.460	Buah	4.800.000	7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Karangasem	1.460	Buah	4.800.000	
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	10	Unit	1.800.000	7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	10	Unit	1.800.000	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Karangasem	450	Kotak/Bungkus	12.000.000	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Karangasem	450	Kotak/Bungkus	12.000.000	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	2	Orang kali	15.000.000	7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	2	Orang kali	15.000.000	
		19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	Kel. Karangasem	168	Orang bulan	852.200.000	7	01	01	2.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	Kel. Karangasem	168	Orang bulan	135.100.000	
									7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Karangasem	348	Orang bulan		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Karangasem	348	Orang bulan	696.000.000	
		20	Penyediaan Biaya Canang, Berbantu Piodaan	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kel. Karangasem	12	Paket bulan	27.000.000	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kel. Karangasem	12	Paket bulan	25.000.000	
		26	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	20	orang kali	6.000.000							Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	20	orang kali	6.000.000	
01	4.01.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kel. Karangasem	100	%	99.000.000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kel. Karangasem	100	%	111.000.000	
									7	01	01	2.03		Administrasi Umum						
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	50	Set	29.000.000	7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	50	Set	29.000.000	
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	2	Unit	24.000.000	7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Karangasem	2	Unit	24.000.000	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kel. Karangasem	2	Unit	10.000.000	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kel. Karangasem	2	Unit	10.000.000	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Kel. Karangasem	60	Unit bulan	23.000.000	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan jumlah jasa tenaga sopir yg terbayar	Kel. Karangasem	60	Unit bulan	35.000.000	
		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Karangasem	10	Unit	13.000.000	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Karangasem	10	Unit	13.000.000	
06	4.01.06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	Kel. Karangasem	98	%	24.000.000	7	1	3			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata	Kel. Karangasem	98	%	24.000.000	
		09	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Dokumen	24.000.000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Dokumen	24.000.000	
									7	1	3	2.02	3	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Dokumen		
03	4.01.06	15	Program Pengembangan Data/informasi	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT	Kel. Karangasem	3	Dokumen	15.000.000	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT	Kel. Karangasem	3	Dokumen	15.000.000	
									7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
		05	Penyusunan profile daerah	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Profile	15.000.000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Karangasem	1	Profile	15.000.000	
														Penyusunan profile daerah	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Karangasem				
07	4.01.06	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat	Kel. Karangasem	75	%	34.000.000	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat	Kel. Karangasem	75	%	34.000.000	
									7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
		01	Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Karangasem	1	Kegiatan	9.000.000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Karangasem	1	Kegiatan	9.000.000	
														Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan LPM kelurahan yang terselenggara	Kel. Karangasem	1	Kegiatan		

				05	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Karangasem	758	Orang	25.000.000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Karangasem	758	Orang	25.000.000
																	Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah penduduk miskin di lingkungan yang tervalidasi	Kel. Karangasem		
05	4.01.06	15	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ Kelurahan yang terfasilitasi	3	Kasus	65.000.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah penanganan konflik sosial di desa/ Kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	3	Kasus	65.000.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Jumlah poskamling yang terbangun	Kel. Karangasem	1	Unit	25.000.000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah poskamling yang terbangun	Kel. Karangasem	1	Unit	25.000.000
																Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Jumlah poskamling yang terbangun	Kel. Karangasem			
				27	Pelatihan Bagi Anggota Hansip/Linmas	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Karangasem	58	Orang	40.000.000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Karangasem	58	Orang	40.000.000
																Pelatihan Bagi Anggota Hansip/Linmas	Jumlah anggota hansip/linmas lingkungan yang terbina	Kel. Karangasem	58	Orang	
09	4.01.06	16	16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ lingkungan yang terhab/terpelihara	40	%	21.941.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ lingkungan yang terhab/terpelihara	Kel. Karangasem	40	%	21.941.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				09	Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Karangasem	4	Titik	21.941.000	7	1	3	2.02	2	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Karangasem	4	Titik	21.941.000
																Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Yang Terpasang	Kel. Karangasem	4	Titik	
05	4.01.06	17	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100	%	6.000.000			7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah		100	%	6.000.000
				22	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	Kel. Karangasem	2	Perayaan	6.000.000	7	01	01	2.03	16	Persediaan bahan logistik kantor	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara	Kel. Karangasem	2	Perayaan	6.000.000
01	4.01.06	17	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SPPT yang tersebar di kelurahan	90	%	27.000.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Persentase SPPT yang tersebar di kelurahan		90	%	27.000.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				34	Penyebaran SPPT pertanahan	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Karangasem	6.165	Lembar	27.000.000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Karangasem	6.165	Lembar	27.000.000
																Penyebaran SPPT pertanahan	Jumlah SPPT Pertanahan yang tersebar	Kel. Karangasem			
07	4.01.06	17	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang	100	%	14.000.000			7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan kategori berkembang		100	%	14.000.000
				02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah usulan kelurahan yang terakomodir dalam Murenbangkel	Kel. Karangasem	108	Usulan	14.000.000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kel. Karangasem	108	Usulan	14.000.000
07	4.01.06	19	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase program kerja organisasi perempuan di kelurahan yang terlaksana	75	%	42.500.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program kerja organisasi perempuan di kelurahan yang terlaksana		75	%	42.500.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				03	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	30	Orang	42.500.000	7	1	3	2.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	30	Orang	42.500.000
																Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah anggota PKK kelurahan yang terfasilitasi	Kel. Karangasem	30	Orang	
13	4.01.06	20	20	Program Pembinaan dan Pemasaran Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	60	%	12.000.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi		60	%	12.000.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlet yang terbina		40	Orang	12.000.000	7	01	03	2.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah atlet yang terbina	Kel. Karangasem	40	Orang	12.000.000
																Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlet yang terbina	Kel. Karangasem	20	Orang	
02	4.01.06	20	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	95	%	310.967.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Kel. Karangasem	95	%	310.967.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya		5.655	Orang Bulan	310.967.000	7	01	03	2.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya	Kel. Karangasem	5.655	Orang Bulan	310.967.000
																Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah orang bulan balita yang terfasilitasi perbaikan gizinya		5.655	Orang Bulan	
05	4.01.06	21	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan	78	%	10.000.000			7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala lingkungan di kelurahan		78	%	10.000.000
											7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				09	Pemilihan kepala lingkungan	Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	Kel. Karangasem	8	Orang	10.000.000	7	01	03	2.02	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kepala lingkungan yang pemilihannya terfasilitasi	Kel. Karangasem	8	Orang	10.000.000

HASIL PEMETAAN (MAPING) NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PADANGKERTA DENGAN NOMENKLATUR PROGRAM , KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI NO. 90TAHUN 2019									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ket.			
				Volume	Satuan								Volume	Satuan					
01	4.01.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran		100 %	508.150.000	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran		100 %	758.950.000				
											Administrasi Umum								
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kel. Padangkerta	800	3.000.000	7	01	01	2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kel. Padangkerta	800	Lembar	3.000.000		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Padangkerta	36	22.000.000	7	01	01	2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulan telepon, air dan listrik yang terbayar	Kel. Padangkerta	36	Rekening bulan	22.000.000		
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Padangkerta	3	2.250.000	7	01	01	2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kel. Padangkerta	3	Unit	2.250.000		
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	20	1.200.000	7	01	01	2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbayar dan jumlah jasa tenaga kebersihan	Kel. Padangkerta	1	tahun	12.000.000		
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	300	8.500.000	7	01	01	2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	300	Unit	8.500.000		
				Jumlah alat tulis kantor berbasis IT yang terbayar		23	6.000.000								23	Unit	6.000.000		
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Padangkerta	9.300	2.800.000	7	01	01	2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil foto copy yang terbayar	Kel. Padangkerta	9.300	Lembar	2.800.000		
				Jumlah barang cetakan yang terbayar		40	4.700.000						Jumlah barang cetakan yang terbayar		40	Buku	4.700.000		
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	60	4.500.000	7	01	01	2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	60	Unit	4.500.000		
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Padangkerta	1.905	4.800.000	7	01	01	2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayar	Kel. Padangkerta	1.905	Buah	4.800.000		
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	11	1.800.000	7	01	01	2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	11	Unit	1.800.000		
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Padangkerta	350	11.000.000	7	01	01	2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang terbayar	Kel. Padangkerta	350	Kotak	11.000.000		
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Padangkerta	2	15.000.000	7	01	01	2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kel. Padangkerta	2	Orang kali	15.000.000		
		19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	Kel. Padangkerta	84	387.600.000					Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah orang bulan tenaga kontrak yang terbayar	Kel. Padangkerta	96	Orang bulan	387.600.000		
				Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar				7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
								7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah orang bulan kepala lingkungan yang terbayar	Kel. Padangkerta	120	ob	240.000.000		
		20	Penyediaan Biaya Canang, Bebanteran, Podalan	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kel. Padangkerta	12	27.000.000	7	01	01	2.03 20	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kel. Padangkerta	12	Paket bulan	27.000.000		
		26	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kel. Padangkerta	25	6.000.000					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Kel. Padangkerta	25	Orang kali	6.000.000		
01	4.01.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100 %	87.000.000							100 %	99.000.000				
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	22.000.000	7	01	01	2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	Unit	22.000.000		
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	20.000.000	7	01	01	2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Kel. Padangkerta	3	Unit	20.000.000		
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Karangasem	1	12.000.000	7	01	01	2.03 28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Karangasem	1	Unit	12.000.000		
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Kel. Padangkerta	72	23.000.000	7	01	01	2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan jumlah tenaga sopir yang terbayar	Kel. Padangkerta	1	tahun	23.000.000		
		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Padangkerta	13	10.000.000	7	01	01	2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan jumlah jasa tenaga penjaga kantor yang terbayar	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kel. Padangkerta	13	Unit	22.000.000		
06	4.01.06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata		98 %	20.000.000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi kependudukan yang tertata		98 %	20.000.000			
		09	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	20.000.000	7	01	03	2.02 01	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah dokumen data base kependudukan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	Dokumen	20.000.000		
03	4.01.06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT		3	11.000.000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah dokumen profil kelurahan yang berbasis IT		3	Dokumen	11.000.000		
		05	Penyusunan profile daerah	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	11.000.000	7	01	03	2.02 01	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah profile kelurahan yang tersusun	Kel. Padangkerta	1	Profile	11.000.000		
07	4.01.06	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana		75 %	36.105.000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa/kelurahan yang terlaksana		75 %	36.105.000			

29. KECAMATAN ABANG

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
4.01	4.01.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	510.000.000		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	510.000.000		
									7	01	01	2.03		Administrasi Umum					
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan tersedianya surat menyurat	Kec. Abang	12 bulan	2.500.000	APBD	7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan tersedianya surat menyurat	12 bulan	2.500.000		
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Abang	12 bulan	33.500.000	APBD	7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	33.500.000		
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Kec. Abang	9 buah	3.500.000	APBD	7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	9 buah	3.500.000		
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor	Kec. Abang	12 bulan	26.900.000	APBD	7	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	26.900.000		
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	Kec. Abang	12 bulan	15.000.000	APBD	7	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	15.000.000		
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Abang	12 bulan	8.000.000	APBD	7	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.000.000		
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. Abang	12 bulan	3.000.000	APBD	7	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	3.000.000		
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Abang	12 bulan	6.000.000	APBD	7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	6.000.000		
		16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Abang	12 bulan	1.500.000	APBD	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	1.500.000		
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman dalam rapat rapat	Kec. Abang	12 bulan	25.000.000	APBD	7	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman dalam rapat rapat	12 bulan	25.000.000		
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Kec. Abang	12 bulan	35.000.000	APBD	7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	35.000.000		
		19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang	Kec. Abang	12 bulan	296.400.000	APBD	7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayarkan	12 bulan		Sub kegiatan ini khusus utk tenaga administrasi keuangan	
		20	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	Jumlah bulan tersedianya biaya canang ,bebanten dan piodalan	Kec. Abang	12 bulan	35.000.000	APBD											Kegiatan ini dimasukkan ke Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
		26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Kec. Abang	12 bulan	18.700.000	APBD											Kegiatan ini dimasukkan ke Sub Kegiatan yang sesuai dengan item belanja

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
4.01	4.01.	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	#REF!		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	#REF!		
									7	01	01	2.03	Administrasi Umum					
		03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor (aula rapat) yang dibangun	Kec. Abang	1 buah	150.000.000	APBD									Kegiatan ini menjadi kewenangan Dinas PUPR	
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kec. Abang	1 buah	22.000.000	APBD	7	01	01	2.03	20	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 buah	22.000.000	
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kec. Abang	1 buah	5.000.000	APBD	7	01	01	2.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 buah	5.000.000	
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Abang	2 buah	12.000.000	APBD	7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 buah	12.000.000	
		10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kec. Abang	0	-	APBD	7	01	01	2.03	25	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	
		16	Pengadaan pembangunan pelinggih dan penyengker	Jumlah paket terbangunnya pelinggih dan penyengker	Kec. Abang	0	#REF!	#REF!									Kegiatan ini menjadi kewenangan Dinas PUPR	
		21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Abang	0	#REF!	#REF!	7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	-	#REF!	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kec. Abang	1 unit	5.000.000	APBD	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	5.000.000	
														Jumlah bulan upah jasa tenaga keamanan (waker) yang terbayarkan	12 bulan	11.400.000	khusus utk tenaga keamanan (waker)	
														Tertatanya halaman dan taman kantor	1 paket	5.000.000		
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kec. Abang	9 buah	100.000.000	APBD	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	9 buah	100.000.000	
														Jumlah bulan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	12 bulan		khusus utk tenaga sopir	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Abang	10 buah	5.000.000	APBD	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 buah	5.000.000	
		42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	Kec. Abang	1 unit	#REF!	#REF!	7	01	01	2.03	37	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 unit	#REF!	
		46	Penataan halaman dan taman kantor	Tertatanya halaman dan taman kantor	Kec. Abang	1 paket	5.000.000	APBD									Kegiatan ini masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
4.01	4.01.	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu		100%	10.000.000		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu	100%	10.000.000		
									7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
			04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Abang	1 buku	3.500.000	APBD	7	01	01	2.02	09	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 buku	3.500.000		
			06	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Kec. Abang	12 bulan	6.500.000	APBD	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan					
										7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan	12 bulan	-		
										7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
										7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	12 bulan	-		
2.06	4.01.	15	07	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Tertata		90%	10.500.000		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Tertata	90%	10.500.000		
			18	Penertiban penduduk pendatang	Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS	Kec. Abang	50 orang	10.500.000	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS	50 orang	10.500.000		
2.16	4.01.	15	07	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang Mendapat Pembinaan		45%	94.500.000		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang Mendapat Pembinaan	45%	94.500.000		
			01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah lembaga adat yang dapat dibina	Kec. Abang	4 lembaga adat	44.500.000	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga adat yang dapat dibina	4 lembaga adat	44.500.000		
			04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina untuk ikut dalam kegiatan Pra PKB	Kec. Abang	3 kelompok seni	50.000.000	APBD											Kegiatan ini digabung menjadi satu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.13	4.01.	20	07	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase Duta Olahraga Kecamatan yang Berprestasi		45%	-		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Duta Olahraga Kecamatan yang Berprestasi	45%	-		
			06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dapat berpartisipasi dalam Porkab	Kec. Abang	10 cabang olahraga	-	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang Olahraga yang dapat berpartisipasi dalam Porkab	10 cabang olahraga	-	
1,05	4.01.	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Desa yang Terfasilitasi		14 Desa	15.000.000		7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	14 Desa	15.000.000	
			08	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Abang	14 Desa	15.000.000	APBD	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				
										7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	14 Desa	15.000.000	
2,07	4.01.	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		70%	10.500.000		7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	70%	10.500.000	
			11	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Abang	14 Desa	10.500.000	APBD	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
										7	01	01	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	14 Desa	10.500.000	
2,05	4.01.	16		Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		30%	15.750.000		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	30%	15.750.000	
			19	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan	Kec. Abang	1 Desa pakraman	15.750.000	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan Pengendalian pencemaran	1 Desa pakraman	15.750.000	
1,05	4.01.	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah		100%	115.500.000		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	100%	-	
			22	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kec. Abang	2 perayaan	115.500.000	APBD	7	01	01	2.03		Administrasi Umum				
										7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	1 perayaan	70.500.000	Khusus yang output menghias kantor, pameran dan upacara
										7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	1,00	45.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.
										7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	1 perayaan	45.000.000	Khusus yang outputnya berupa parade budaya atau festival
2.07	4.01.	17		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa dengan Kategori Berkembang		90%	36.750.000		7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Kategori Berkembang			
										7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
			04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kec. Abang	14 Desa	20.000.000	APBD	7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi			
			09	Pembinaan lomba desa	Jumlah desa yang terbina	Kec. Abang	2 Desa	16.750.000	APBD	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang terbina			
2.07	4.01.	18		Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pembinaan		65%	15.750.000		7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pembinaan	65%	15.750.000	
			06	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Abang	14 Desa	15.750.000	APBD	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				Kegiatan ini digabung jadi 1 sub kegiatan dgn kegiatan pembinaan lomba desa
										7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	14 Desa	15.750.000	
2.02	4.01.	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Perempuan Desa yang Mendapat Pembinaan		90%	30.000.000		7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Organisasi Perempuan Desa yang Mendapat Pembinaan	90%	30.000.000	
			01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan terbina	Kec. Abang	2 organisasi	10.000.000	APBD	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
										7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi perempuan terbina	2 organisasi	10.000.000	
			08	Pembinaan 10 program pokok PKK	Jumlah PKK desa yang terbina	Kec. Abang	2 Desa	20.000.000	APBD							Jumlah PKK desa yang terbina	2 Desa	20.000.000	Kegiatan ini digabung menjadi satu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.
1.02	4.01.	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat di Masyarakat		3 sekolah	30.000.000		7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat di Masyarakat	3 sekolah	30.000.000	
		08	Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang dibina	Kec. Abang	3 sekolah	30.000.000	APBD	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
									7	01	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina	3 sekolah	30.000.000	
2.07	4.01.	###	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tepat Waktu		80%	20.000.000		7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tepat Waktu	80%	20.000.000	
		03	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kec. Abang	14 Desa	20.000.000	APBD	7	01	06	2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
									7	01	06	2.01	03 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	14 Desa	20.000.000	
4.03	4.01.	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Desa yang Terverifikasi dan Diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten		70%	45.000.000		7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Desa yang Terverifikasi dan Diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten	70%	45.000.000	
		09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kec. Abang	3 bidang usulan	45.000.000	APBD	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
									7	01	03	2.01	01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	3 bidang	45.000.000	
4.01	4.01.	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Tepat Waktu		93%	Kec. Abang		7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Tepat Waktu	93%		
		03	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah rekomendasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	Kec. Abang	700 rekomendasi	40.000.000	APBD	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.
										7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	100 rekomendasi	20.000.000	
										7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	600 rekomendasi	20.000.000	

30. KECAMATAN KUBU

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan	
4,01	4:01:08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Kecamatan Kubu	100 %	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani	Kecamatan Kubu	100 %		
							7	01	01	2.03		Administrasi Umum					
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terkirimnya surat menyurat	Kecamatan Kubu	100 %	7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terkirimnya surat menyurat	Kecamatan Kubu	100 %	
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telpun, air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Kubu	36 Rekening	7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpun, air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Kubu	36 rekening	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Kec. Kubu	10 unit	7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Kec. Kubu	10 unit	
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantoor	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantoor	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terlaksananya kebersihan kantoor	Kecamatan Kubu	12 bulan	sub kegiatan ini untuk Tenaga Kebersihan Kantor dengan Jumlah 2 orang
			10	Penyediaan alat tulis kantoor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantoor	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantoor yang tersedia	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoor	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoor	Kecamatan Kubu	12 bulan	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	umlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Kecamatan Kubu	12 bulan	7	01	02	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kecamatan Kubu	12 bulan	
			19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang terbayarkan	Kecamatan Kubu	96 OB						Sub kegiatan ini khusus utk tenaga administrasi umum, kepegawaian dan keuangan (4 orang) dan dimasing-masing kasi 1 (sisanya 4 orang)				
			20	Penyediaan Biaya Canang Beban dan Piodalan	Jumlah bulan tersedianya biaya biaya canang, bebanten dan piodalan	Kecamatan Kubu	12 bulan						Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	umlah bulan tersedianya biaya untuk konsultasi dan koordinasi di dalam daerah	Kecamatan Kubu	12 bulan						Masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja				
JUMLAH																	
4,01	4:01:08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Kubu	100 %											

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Kubu	2 paket	7	01	01	2.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Kubu	2 paket	
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Kubu	6 unit	7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Kubu	6 unit	
			10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kecamatan Kubu	4 buah	7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kecamatan Kubu	4 buah	
			16	Pengadaan pembangunan Pelinggih dan Penvenaker	Prosentase terpenuhinya pelinggih dan penvenaker	Kecamatan Kubu	1 paket						Pengadaan pembangunan Pelinggih dan Penvenaker				di pemelihar gedung
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kecamatan Kubu	10 unit	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kecamatan Kubu	10 unit	
			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Kubu	10 buah	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Kubu	10 buah	
JUMLAH																	
4,01	4:01:08	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja yang tepatwaktu	Kecamatan Kubu	100 %	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Kubu		
								7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan				
			04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kecamatan Kubu	1 buku	7	01	01	2.02	09	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kecamatan Kubu		
			06	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Kecamatan Kubu	12 bulan						Administrasi Keuangan		Kecamatan Kubu		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
									7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan	Kecamatan Kubu		
									7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
									7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	Kecamatan Kubu		
JUMLAH																		
2,06	4:01:08	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Jumlah Desa yang tertib administrasi kependudukannya	Kecamatan Kubu		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
			18	Penertiban penduduk pendatang	Jumlah penduduk pendatang yang mengurus SKTS	Kecamatan Kubu	9 desa		7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
JUMLAH																		
2,16	4:01:08	15	Program Pengembangan Nilai Budaya			Jumlah pelaksanaan pengembangan nilai budaya dan pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	Kecamatan Kubu											
			01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah lembaga adat yang dapat dibina	Kecamatan Kubu	3 lembaga adat		7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan	
			04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah Desa yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Kecamatan Kubu	9	Desa	7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
JUMLAH																	
1,05	4:01:08	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Desa yang terkendali keamanan dan Kenyamanan lingkungannya	Kecamatan Kubu			7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Desa yang terkendali keamanan dan Kenyamanan lingkungannya	Kecamatan Kubu		
			08	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah Desa yang terkendali keamanan dan Kenyamanan lingkungannya	Kecamatan Kubu	9	desa	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Desa yang terkendali keamanan dan Kenyamanan lingkungannya		
								7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Oprasional Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Kecamatan Kubu		
JUMLAH																	
2,07	4:01:08	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Tim penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Kubu												
			11	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah desa yang masyarakatnya tedata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kecamatan Kubu	9	desa	7	01	02	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
JUMLAH																	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
2,05	4:01:08	16	Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa yang mampu mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kecamatan Kubu											
			19 Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan	Kecamatan Kubu	9 desa	7	01	02	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
JUMLAH																
1,05	4:01:08	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah terlaksananya perayaan hari-hari besarnasional dan daerah	Kecamatan Kubu							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
			22 Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kecamatan Kubu	2 Perayaan	7	01	01	2,03	16	Penyediaan bahan logistik kantor				
JUMLAH																
2,07	4:01:08	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik	Kecamatan Kubu		7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik			
			04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan Kubu	9 desa	7	01	06	2,01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan Kubu		
			09 Pembinaan lomba desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	Kecamatan Kubu	1 desa	7	01	06	2,01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
									7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	Kecamatan Kubu		
JUMLAH																		
2.07	4:01:08	18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Desa dengan kapasitas aparatur pemerintahan desanya yang memadai	Kecamatan Kubu			7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Kecamatan Kubu			
			06	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Kubu	9 desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
								7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Kubu	9 desa		
JUMLAH																		
2.02	4:01:08	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah organisasi perempuan di Desayang terfasilitasi dalam pembangunan	Kecamatan Kubu													
			01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan terbina	Kecamatan Kubu	6 desa	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
			08	Pembinaan 10 program pokok PKK	Jumlah PKK desa yang terbina	Kecamatan Kubu	6 desa	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
JUMLAH																		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan		
1,02	4:01:08	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah sekolah yangtelah melaksanakan promosi kesehatan	Kecamatan Kubu												
			08 Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang dibina	Kecamatan Kubu	2	sekolah						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
JUMLAH																	
2,07	4:01:08	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangan Desanya Baik	Kecamatan Kubu			7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Kubu		
			03 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Kubu	9	desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
								7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kecamatan Kubu	9	desa
JUMLAH																	
JUMLAH																	
4,03	4:01:08	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah usulan Desa dan kecamatan yang terakomodir dalam musrenbang	Kecamatan Kubu			7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kelurahan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kubu		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
			09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kecamatan Kubu	9 Desa + 1 Kec	7	01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
								7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kecamatan Kubu		
JUMLAH																	
4,01	4:01:08	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non tepatwaktu di kecamatan	Kecamatan Kubu		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		
			03	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Kubu	600 ijin/non ijin	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
								7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Kubu		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keterangan
									7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Kubu		

31. KECAMATAN BEBANDEM

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN				
KODE	1	INDIKATOR	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana					
			Volume	Satuan		Unsu	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan				Volume	Satuan							
		3	4		5	7	01	01	1	2	3	4	5		6	7	8				
													100	%	577.500.000						
4.01	4.01.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran	100	%	420.000.000,00	7	01	01	2.03										
4.01	4.01.09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	800	Lembar	3.000.000,00	7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bebandem	800	Lembar	3.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	12	Bulan	35.000.000,00	7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	35.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	100	%	20.000.000,00	7	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Kecamatan Bebandem	100	%	20.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	12	Bulan	15.000.000,00	7	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	15.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	12	Bulan	10.000.000,00	7	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	10.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100	%	5.000.000,00	7	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	100	%	5.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia	12	Bulan	10.000.000,00	7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	10.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	12	Bulan	5.000.000,00	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	5.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	1	Tahun	22.000.000,00	7	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	Kecamatan Bebandem	1	Tahun	22.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	40.000.000,00	7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	40.000.000	APBD	
4.01	4.01.09	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Volume tenaga kontrak yang terbayar	15	Orang	215.000.000,00								Kecamatan Bebandem	15	Orang	215.000.000	APBD	Masuk pada sub kegiatan yang sesuai, Sopir masuk ke sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, satpam masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebagai item belanja.
4.01	4.01.09	01	20	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura	12	Bulan	30.000.000,00								Kecamatan Bebandem	12	Bulan	30.000.000	APBD	masuk ke sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
4.01	4.01.09	01	26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	12	Bulan	10.000.000,00								Kecamatan Bebandem	12	Bulan	10.000.000	APBD	masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja
4.01	4.01.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	%	157.500.000,00														
4.01	4.01.09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	1	Paket	10.000.000,00	7	01	01	2.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	Kecamatan Bebandem	1	Paket	10.000.000,00	APBD	
4.01	4.01.09	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase Rumah Dinas yang representatif	100	%	20.000.000,00	7	01	01	2.03	23	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase Rumah Dinas yang representatif	Kecamatan Bebandem	100	%	20.000.000,00	APBD	
4.01	4.01.09	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2	Unit	20.000.000,00	7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bebandem	2	Unit	20.000.000,00	APBD	
4.01	4.01.09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	Unit	20.000.000,00	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kecamatan Bebandem	1	Unit	20.000.000,00	APBD	
4.01	4.01.09	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	8	Unit	52.500.000,00	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Kecamatan Bebandem	8	Unit	52.500.000,00	APBD	
4.01	4.01.09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	15	Unit	15.000.000,00	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kecamatan Bebandem	15	Unit	15.000.000,00	APBD	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							KETERANGAN				
KODE			INDIKATOR	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana			
1	2	3		Volume	Satuan		Unsu	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan				Volume	Satuan						
4.01	4.01.09	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Taman/Lapangan/Tempat Parkir	Jumlah lapangan upacara yang dapat dipelihara	1	Lapangan	20.000.000,00	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kecamatan Bebandem	1	Lapangan	20.000.000,00	APBD	masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor
									7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100	%	10.500.000,00		
4.01	4.01.09	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelaporan keuangan	100	%	10.500.000,00	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan							
4.01	4.01.09	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	5	Laporan	5.000.000,00	7	01	01	2.02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	Kecamatan Bebandem	5	Laporan	5.000.000	APBD	
									7	01	01	2.01		Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4.01	4.01.09	06	06	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	12	Bulan	5.500.000,00	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	Kecamatan Bebandem	12	Bulan	5.500.000	APBD	
									7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTATA		3	Desa	21.000.000		
4.01	4.01.07	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase penduduk pendatang yang terdaftar dengan tertib	22	%	21.000.000,00	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
4.01	4.01.07	15	18	Penertiban penduduk pendatang	Jumlah Desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	3	Desa	21.000.000,00	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	Kecamatan Bebandem	3	Desa	21.000.000	APBD	
									7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE LEMBAGA ADAT, SENI DAN BUDAYA YANG MENDAPAT PEMBINAAN		100	%	78.750.000		
2.16	4.01.07	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Presentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	21	%	78.750.000,00	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
2.16	4.01.07	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Lembaga Adat yang dibina dan ditata administrasinya	3	Lembaga adat	40.750.000,00	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat yang dibina dan ditata administrasinya	Kecamatan Bebandem	3	Lembaga adat	40.750.000	APBD	Gabung ke sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.16	4.01.07	15	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah Peserta yang dikirim dalam Pra PKB	35	Orang	38.000.000,00	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang dikirim dalam Pra PKB	Kecamatan Bebandem	35	Orang	38.000.000	APBD	Gabung ke sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
									7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH DESA/KEKELINGKUNGAN YANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN TERKENDALI		8	Desa	15.750.000		
1.05	4.01.09	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah desa/kel yang keamanan dan kenyamanan terkendali	8	Desa	15.750.000,00	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
1.05	4.01.09	15	08	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	8	Desa	15.750.000,00	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	Kecamatan Bebandem	8	Desa	15.750.000	APBD	
									7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PROGRAM KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DIBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA YANG TERLAKSANA		29	%	26.250.000		
2.07	4.01.07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Presentase program kerja lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat miskin di desa yang terlaksana	29	%	26.250.000,00	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
2.07	4.01.07	15	11	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	8	Desa	26.250.000,00	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	Kecamatan Bebandem	8	Desa	26.250.000	APBD	Gabung ke sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
									7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE LEMBAGA ADAT, SENI DAN BUDAYA YANG MENDAPAT PEMBINAAN		1	Desa	10.500.000		

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											KETERANGAN						
KODE			INDIKATOR	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana					
1	2	3		Volume	Satuan		Unsu	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan				Volume	Satuan								
2.05	4.01.07	16	Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Presentase desa pekraman yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	7	%	10.500.000,00	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4		5		6	7	8		
2.05	4.01.07	16	19	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	1	Desa	10.500.000,00	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Kecamatan Bebandem	1	Desa	10.500.000	APBD			
									7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dengan output menghias kantor, pameran dan upacara masuk pada	
1.05	4.01.09	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100	%	126.000.000,00	7	01	01	2.03		Administrasi Umum									Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sedangkan yang	
1.05	4.01.09	17	22	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	7	Perayaan	126.000.000,00	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kecamatan Bebandem			126.000.000				outputnya berupa parade budaya atau vestifal masuk pada sub kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
									7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN KATEGORI BERKEMBANG		100	%	47.250.000				
2.07	4.01.09	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa dengan kategori berkembang	22	%	47.250.000,00	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.07	4.01.09	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kecamatan Bebandem	8	Desa	22.250.000,00	7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kecamatan Bebandem	Kecamatan Bebandem	8	Desa	22.250.000	APBD			
				09	Pembinaan lomba desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	2	Desa	25.000.000,00	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Bebandem	2	Desa	25.000.000	APBD		
									7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN DESA YANG MENDAPAT PEMBINAAN		8	Desa	15.750.000				
2.07	4.01.09	18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapat pembinaan	100	%	15.750.000,00	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.07	4.01.09	18	06	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	8	Desa	15.750.000,00	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Bebandem	8	Desa	15.750.000	APBD			
									7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE ORGANISASI PEREMPUAN DESA YANG MENDAPAT PEMBINAAN		20	%	26.250.000				
2.02	4.01.09	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa yang mendapat pembinaan	20	%	26.250.000,00	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
2.02	4.01.09	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	2	Organisasi	10.000.000,00	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	Kecamatan Bebandem	2	Organisasi	10.000.000	APBD			
				08	Pembinaan 10 program pokok PKK	Jumlah PKK Desa yang dibina	2	Desa	16.250.000,00	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang dibina	Kecamatan Bebandem	2	Desa	16.250.000	APBD		
									7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN POLA HIDUP SEHAT DI MASYARAKAT		2	Sekolah	10.500.000				
1.02	4.01.09	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan promosi kesehatan di lembaga pendidikan dan kegiatan pemberdayaan pola hidup sehat di masyarakat	29	%	10.500.000,00	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
1.02	4.01.09	19	08	Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	2	Sekolah	10.500.000,00	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Kecamatan Bebandem	2	Sekolah	10.500.000	APBD			
									7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TEREVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA		8	Desa	15.750.000				

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN					
KODE			INDIKATOR	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
				Volume	Satuan		Unsu	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan				Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2,07	4.01.09	0	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase terevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	100	%	15.750.000,00	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
2,07	4.01.09	0	03	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa	8	Desa	15.750.000	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kecamatan Bebandem	8	Desa	15.750.000	APBD	
									7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE USULAN DESA YANG TERVERIFIKASI DAN DIUSULKAN DALAM MUSRENBANG KABUPATEN		100	%	21.000.000		
4,03	4.01.09	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa yang terverifikasi dan diusulkan dalam musrenbang kabupaten	100	%	21.000.000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
4,03	4.01.09	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Jumlah Usulan Indikatif	21	Dokumen/Buku	21.000.000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrenbang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kecamatan Bebandem	21	Dokumen/Buku	21.000.000	APBD	
									7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PERIJINAN, NON PERIJINAN DAN PELAYANAN GOES TO BANJAR		400	Ijin/Non Perijinan	36.750.000		
4,01	4.01.09	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan goes to banjar	100	%	36.750.000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
4,01	4.01.09	37	03	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah ijin yang dikeluarkan	400	Ijin/Non Perijinan	36.750.000	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Bebandem	200	Ijin/Non Perijinan	18.375.000	APBD	
									7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Bebandem	200	Ijin/Non Perijinan	18.375.000	APBD	
									7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE DUTA OLAHRAGA KECAMATAN YANG BERPRESTASI		50	Atlet	63.000.000		
4,01	4.01.09	20	Program Pembinaan dan pemsayarakatan Olahraga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	22	%	63.000.000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
4,01	4.01.09	20	01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti event Porkab	50	Atlet	63.000.000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Atlet yang mengikuti event Porkab	Kecamatan Bebandem	50	Atlet	63.000.000	APBD	Gabung ke sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
JUMLAH										JUMLAH				1.102.500.000,00							

32. KECAMATAN SELAT

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019									
4,01	4:01:10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Selat	100%	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan adminstrasi yg tertangani	Kecamatan Selat	100%	KET.
							7	01	01	2.03		Administrasi Umum				
				Jumlah surat-surat dinas yang terkirim	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat dinas yang terkirim	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Jumlah rekening telpun,air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpun,air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat.	Kecamatan Selat	8 unit	7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat.	Kecamatan Selat	8 unit	
				Persentase alat-alat kebersihan kantor yang tersedia dan Jumlah tenaga kebersihan	Kecamatan Selat	100%	7	01	01	2.03	10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase alat-alat kebersihan kantor yang tersedia dan Jumlah tenaga kebersihan	Kecamatan Selat	100%	sub kegiatan ini untuk Tenaga Kebersihan Kantor dengan Jumlah 3 orang
				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kecamatan Selat	100%	7	01	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kecamatan Selat	100%	
				Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
				Jumlah bahan logistik yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	Kecamatan Selat	12 bulan	7	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Makanan dan Minuman Rapat yang terpenuhi	Kecamatan Selat	12 bulan	
				Persentase koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Selat	12 Bulan	
				Volume tenaga kontrak yang terbayar	Kecamatan Selat	12 Orang	7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Volume tenaga kontrak yang terbayar	Kecamatan Selat	12 bulan	Sub kegiatan ini khusus utk tenaga administrasi keuangan (5 orang)
				Persentase sarana upakara yang tersedia	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase sarana upakara yang tersedia	Kecamatan Selat	12 bulan	
				Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kecamatan Selat	12 Bulan										Kegiatan ini bisa dimasukkan ke Sub Kegiatan yang sesuai dengan item belanja
4.01	4.01:10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Selat	100%										
				Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	3 Unit	7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	3 Unit	
				Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	2 Unit	7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kecamatan Selat	2 Unit	
				Jumlah Gedung yang terpelihara	Kecamatan Selat	1 Unit	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Kecamatan Selat	1 Unit	
													Jumlah bulan upah jasa tenaga keamanan (waker) yang terbayarkan	Kecamatan Selat	12 bulan	khusus utk tenaga keamanan (waker) 2 orang

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Selat	7 Unit	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Selat	7 Unit	
													Jumlah bulan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	Kecamatan Selat	12 bulan	khusus utk tenaga sopir (1 orang)
				Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Selat	15 Unit	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Selat	15 Unit	
				Jumlah tempat parkir kantor yang tertata	Kecamatan Selat	1 Paket	7	01	01	2.03	50	Pengadaan Tempat Parkir Kantor	Jumlah tempat parkir kantor yang tertata	Kecamatan Selat	1 Paket	
				Jumlah Halaman yang tertata	Kecamatan Selat	1 Paket	7	01	01	2.03	46	Penataan Halaman Padmasana	Jumlah Halaman yang tertata	Kecamatan Selat	1 Paket	
				Jumlah Pengadaan pembangunan penyengker yang ditata	Kecamatan Selat	1 Paket	7	01	01	2.03	16	Pengadaan Pembangunan Penyengker	Jumlah Pengadaan pembangunan penyengker yang ditata	Kecamatan Selat	1 Paket	
				Jumlah Lapangan umum yang tertata	Kecamatan Selat	2 Paket										Kegiatan Penataan dan Penyederan Lapangan Umum Selat sementara dikeluarkan dari Renja Kecamatan Selat , untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dirapatkan dengan Perangkat Daerah pengampu untuk menjadi Renja Perangkat Daerah Pengampu
4,01	4:01:10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelaporan keuangan	Kecamatan Selat	100%	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan				
				Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	Kecamatan Selat	5 Laporan	7	01	01	2.02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dihasilkan	Kecamatan Selat	5 Laporan	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	Kecamatan Selat	12 Bulan	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan				

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
						7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	Kecamatan Selat	12 Bulan		
						7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	Kecamatan Selat	12 Bulan		
2,06	4:01:10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk pendatang yang terdata dengan tertib	Kecamatan Selat	93%	7	01	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Selat			
				Jumlah Desa yang mendapat monitoring penduduk	Kecamatan Selat	3 Desa	7	01	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penduduk pendatang yang terdata dengan tertib	Kecamatan Selat	93%		
							7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	Kecamatan Selat	3 Desa	
2,16	4:01:10	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	Kecamatan Selat	60%	7	01	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Selat	60%		
				Jumlah Lembaga Adat yang dibina dan ditata administrasinya	Kecamatan Selat	3 Lembaga adat	7	01	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang mendapat pembinaan	Kecamatan Selat	3 lembaga adat		
							7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga adat yang dibina dan ditata administrasinya	Kecamatan Selat	3 lembaga adat	
				Jumlah Peserta yang dikirim dalam Pra PKB	Kecamatan Selat	35 Orang	7	01	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang dikirim dalam pra PKB	Kecamatan Selat	35 Orang		
							7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapat monitoring penduduk pendatang	Kecamatan Selat	35 Orang	
1,05	4:01:10	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kecamatan Selat	100%	7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kecamatan Selat	100%		

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019								
			Jumlah Desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	Kecamatan Selat	3 kasus	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
						7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat	Kecamatan Selat	3 kasus
2,07	4:01:10	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase keberdayaan masyarakat perdesaan	Kecamatan Selat	80%	7	01	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Selat	
			Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	Kecamatan Selat	8 Desa	7	01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keberdayaan masyarakat perdesaan	Kecamatan Selat	8 desa
						7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	Kecamatan Selat	8 desa
2,05	4:01:10	16	Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan	Persentase desa dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkendali	Kecamatan Selat	60%	7	01	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Selat	60%
			Jumlah Desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Kecamatan Selat	4 Desa	7	01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkendali	Kecamatan Selat	4 desa
						7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Kecamatan Selat	4 desa
1,05	4:01:10	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kecamatan Selat	100%	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kecamatan Selat	100%
			Jumlah Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	Kecamatan Selat	7 Perayaan	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kecamatan Selat	7 perayaan
						7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Kecamatan Selat	7 perayaan

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019											
2,07	4:01:10	17	Program Peningkatan partisipasi	Persentase desa dengan kategori berkembang	Kecamatan Selat	90%	7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Selat	90%	
				Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Selat	8 Desa	7	01	06	2.01			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
				Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi	Kecamatan Selat	2 Desa	7	01	06	2.01	18		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Selat	8 Desa	
							7	01	06	2.01	02		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Selat	2 Desa	
2,07	4:01:10	18	Program Peningkatan kapasitas aparatur	Persentase aparatur pemerintahan desa dengan kualitas baik	Kecamatan Selat	75%	7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa dengan kualitas baik	Kecamatan Selat	75%	
				Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Selat	8 Desa	7	01	06	2.01			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
							7	01	06	2.01	02		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kecamatan Selat	8 Desa	
2,02	4:01:10	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam	Persentase organisasi perempuan desa yang terfasilitasi dalam pembangunan	Kecamatan Selat	60%	7	01	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Selat		
				Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	Kecamatan Selat	2 Organisasi	7	01	3	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase organisasi perempuan desa yang terfasilitasi dalam pembangunan	Kecamatan Selat	2 organisasi	
							7	01	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan	Kecamatan Selat	2 organisasi	
				Jumlah PKK Desa yang dibina	Kecamatan Selat	2 Desa	7	01	3	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase organisasi perempuan desa yang terfasilitasi dalam pembangunan	Kecamatan Selat	2 Desa	
							7	01	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa yang dibina	Kecamatan Selat	2 Desa	

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
1,02	4:01:10	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	Kecamatan Selat	100%	7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Kecamatan Selat	3 Sekolah	7	01	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	Kecamatan Selat	3 sekolah	
							7	01	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Kecamatan Selat	3 sekolah	
2,07	4:01:10	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik	Kecamatan Selat	90%	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik	Kecamatan Selat	90%	
				Jumlah Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa	Kecamatan Selat	8 Desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
							7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa	Kecamatan Selat	8 desa	
4,01	4:01:10	20	Program Pembinaan dan pemasyarakatan	persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	Kecamatan Selat	80%	7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Selat	80%	
				Jumlah Atlet yang mengikuti event Porkab	Kecamatan Selat	50 Atlet	7	01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase desa dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkendali	Kecamatan Selat	50 Atlet	
							7	01	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Atlet yang mengikuti event porkab	Kecamatan Selat	50 Atlet	
4,01	4:01:10	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan goes to banjar.	Kecamatan Selat	96%	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan goes to banjar	Kecamatan Selat		
				Jumlah ijin yang dikeluarkan	Kecamatan Selat	400 Ijin/Non Perijinan	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Selat	200 rekomendasi	

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019										
						7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kecamatan Selat	200 rekomendasi		
4,03	4:01:10	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan desa yang terakomodir dalam musrembang kecamatan	Kecamatan Selat	96%	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan desa yang terakomodir dalam musrembang kecamatan	Kecamatan Selat	96%		
				Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrembang kecamatan	Kecamatan Selat	96%	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
							7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrembang kecamatan	Kecamatan Selat	96%	

33. KECAMATAN RENDANG

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Kode				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
									Volume	Satuan
4	4:01:10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		100	%
						Administrasi Umum				
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	Kecamatan Rendang	375	lembar
			02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kecamatan Rendang	36	rekening
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan jasa tenaga Clening service	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan jasa tenaga Clening service	Kecamatan Rendang	12	bulan
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Rendang	12	bulan
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Kecamatan Rendang	12	bulan
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Rendang	12	bulan
			15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kecamatan Rendang	12	bulan
			16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Kecamatan Rendang	12	bulan
			17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kecamatan Rendang	12	bulan
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kecamatan Rendang	12	bulan

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		
						Volum e	Satuan	
	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayarkan	Kecamatan Rendang	12	bulan
	20	Penyediaan Biaya Canang Beban dan Piodalan	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Masuk pada sub kegiatan yang sesuai sebagai item belanja				
JUMLAH								
4	4:01:10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			
	4		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terbangun	Menjadi Kewenangan Dinas PUPR			
	6		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kec. Rendang	2 unit
	7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kec. Rendang	1 unit
	8		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kec. Rendang	1 unit
	9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Kec. Rendang	2 unit
	10		Pengadaan Pembangunan Pelinggih dan Penyengker	Jumlah pembangunan pelinggih dan penyengker yg terbangun	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembangunan pelinggih dan penyengker yg terbangun	Kec. Rendang	1 paket
	21		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Rendang	1 unit
	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Rendang	2 unit
						Jumlah bulan upah jasa tenaga keamanan/waker yang terbayarkan	Kec. Rendang	12 bln
						Jumlah halaman dan taman kantor yg tertata	Kec. Rendang	5 are
	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kec. Rendang	13 unit

Kode				Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja	
														Volum e	Satuan
												Kec. Rendang		12	bln
			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara					Kec. Rendang		25	unit
			46	Penataan halaman dan taman kantor	Jumlah halaman dan taman kantor yg tertata	Kegiatan ini masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luas taman yang tertata					Kec. Rendang		5	are
JUMLAH															
4	4:01:10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan laporan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Kec. Rendang				
							Administrasi Keuangan								
			04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun dan disampaikan tepat waktu	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun dan disampaikan tepat waktu					Kec. Rendang			
			06	Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan									
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan			Kec. Rendang				
							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan			Kec. Rendang				
JUMLAH															
2,1	4:01:10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase desa yang administrasi penduduk pendatangnya terdata	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang administrasi penduduk pendatangnya terdata								
			18	Penertiban penduduk pendatang	Jumlah desa yang data penduduk pendatangnya benar	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
						Volum e	Satuan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang data penduduk pendatangnya benar	Kec. Rendang	6 desa
JUMLAH							
2,2	4:01:10	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase lembaga adat, seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang	
			01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah lembaga adat yang administrasinya baik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah peserta yang ikut dalam pra PKB	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga adat yang administrasinya baik	Kec. Rendang 3 lembaga adat
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang ikut dalam pra PKB	Kec. Rendang 70 org
JUMLAH							
1,1	4:01:10	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungannya terkendali	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa dengan keamanan dan kenyamanan lingkungannya terkendali	Kec. Rendang
			08 Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah desa dengan terciptanya suasana tenang dan tertib masyarakat.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah anggota tim terpadu penanganan konflik sosial kecamatan yang terfasilitasi	
					Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Oprasional Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Kec. Rendang 6 desa
JUMLAH							
2,1	4:01:10	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase jumlah PMKS (penyangang masalah kesejahteraan sosial) di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah PMKS (penyangang masalah kesejahteraan sosial) di kecamatan	
			11 Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah data rumah tangga sasaran yang valid yang dapat dihasilkan setiap desa	Kec. Rendang 6 desa

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	
						Volum e	Satuan
JUMLAH							
2,1	4:01:10	16	Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Persentase desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
			19 Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapat pembinaan sadar lingkungan	Kec. Rendang 1 desa
JUMLAH							
1,1	4:01:10	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan bangsa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	
			22 Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara dengan baik	Administrasi Umum		
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terselenggara dengan baik	Kec. Rendang 1 perayaan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah (Parade Budaya)	Kec. Rendang 1 perayaan
JUMLAH							
2,1	4:01:10	17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang kegiatan dan administrasinya baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang kegiatan dan administrasinya baik	

Kode			Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja	
													Volum	Satuan
			04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang pelaksanaan kegiatannya dimonitoring dievaluasi dan dilaporkan	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang pelaksanaan kegiatannya dimonitoring dievaluasi dan dilaporkan	Kec. Rendang	6	desa				
			09	Pembinaan lomba desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaaan di wilayah kecamatan								
						Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan	Kec. Rendang	6	desa				
JUMLAH														
2,1	4:01:10	18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa		Persentase meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Kec. Rendang	70	%				
			06	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang memiliki tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
						Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Rendang	6	desa				
JUMLAH														
2	4:01:10	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Persentase organisasi perempuan desa yang meningkat pemahamannya terhadap partisipasi pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi perempuan desa yang meningkat pemahamannya terhadap partisipasi pembangunan							
			01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kader organisasi kewanitaan yang meningkat pemahamannya tentang agama dan sosial budaya	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
			08	Pembinaan 10 program pokok PKK	Jumlah PKK desa yang meningkat pemahamannya tentang PKK	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader organisasi kewanitaan yang meningkat pemahamannya tentang agama dan sosial budaya	Kec. Rendang	6	desa				
							Jumlah PKK desa yang meningkat pemahamannya tentang PKK	Kec. Rendang	6	desa				
JUMLAH														
1	4:01:10	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase jumlah sekolah yang mengerti berperilaku hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		
						Volum e	Satuan	
	08 Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	Kec. Rendang	3	sekolah	
JUMLAH								
2,1	4:01:10	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang pengelolaan keuangan desanya baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Rendang	100 %
			03 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan APBDesa yang ditetapkan tepat waktu	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
					Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kec. Rendang	6 desa
JUMLAH								
4	4:01:10	20	Program Pembinaan dan pemyarakatan Olahraga	Persentase atlet yang berprestasi duta Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase atlet yang berprestasi duta Kecamatan		
			06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlit yang mengikuti event Porkab	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah atlit yang mengikuti event Porkab	Kec. Rendang	60 atlet
JUMLAH								
4	4:01:10	37	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SDM, SAPRAS, DATA perijinan dan non perijinan yang diterbitkan tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase SDM, SAPRAS, DATA perijinan dan non perijinan yang diterbitkan tepat waktu	Kec. Rendang	98 %
			03 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah ijin dan non perijinan yang terbit dan dilayani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

Kode	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		
						Volum e	Satuan	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kec. Rendang	50 ijin	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	Kec. Rendang	50 ijin	
JUMLAH								
4	4:01:10	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang pelaksanaan musrembangnya tepat waktu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang pelaksanaan musrembangnya tepat waktu	Kec. Rendang	80 %
			09 Penyelenggaraan Musrembang RKPD	Jumlah usulan indikatif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah bidang dokumen hasil musrembang kecamatan yang diusulkan dalam musrenbang kabupaten	Kec. Rendang	3 bidang
JUMLAH								
TOTAL JUMLAH								

34. KECAMATAN SIDEMEN

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH					RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021/ RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021				
KODE					NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN	%	95
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Dokumen	6
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100
7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat	Lembar	650
7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Rekening	36
7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya samsat kendaraan Dinas	Unit	8
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	Bulan	12
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Bulan	12
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Paket	1
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan digandakan	Paket	1
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Paket	1
7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Eksemplar	60
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Paket	1
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kotak	800
7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH					RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021/ RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021				
KODE					NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional	Unit	5
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	1
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	8
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Paket	1
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE REKOMENDASI CAMAT YANG DIKELUARKAN (PERIJINAN DAN NON PERIJINAN)	%	98
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Persentase rekomendasi Camat yang dikeluarkan (perijinan dan non perijinan)	%	98
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KEHADIRAN UTUSAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	%	91
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase kehadiran utusan Desa dalam perencanaan pembangunan Kecamatan	%	91
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	CAKUPAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	DESA	10
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial di Desa yang terfasilitasi	Desa	10
7	01	05	2.01	01	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	DESA	2
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan lomba desa	Jumlah Desa Binaan dan sasaran yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	Desa	2

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH					RPJMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021/ RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021					
KODE					NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB	NOMENKLATUR URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2021
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH	DESA DENGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESANYA YANG MEMADAI	DESA	10
							Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang dapat dibina	Desa	10
							PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	DESA YANG DAPAT MENGELOLA APBDES TEPAT WAKTU	DESA	10
							Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan	Desa	10

35. MANGGIS

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
1			2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	
4.01	4.01.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi		100%	379.500.000		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	379.500.000		
									7	01	01	2.03						
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	Kec. Manggis	900 Lembar	1.000.000	APBD	7	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat -surat dinas yang terkirim	900 Lembar	1.000.000	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Manggis	48 rekening	40.000.000	APBD	7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	48 rekening	40.000.000	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	Kec. Manggis	8 Unit	4.500.000	APBD	7	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	8 Unit	4.500.000	
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	Kec. Manggis	25 paket	14.800.000	APBD	7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	25 paket	14.800.000	sub kegiatan ini untuk Tenaga Kebersihan Kantor dengan Jumlah 3 orang
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	Kec. Manggis	26 paket	15.000.000	APBD	7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayar	26 paket	15.000.000	
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terbayar	Kec. Manggis	9 paket	8.000.000	APBD	7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terbayar	9 paket	8.000.000	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. Manggis	20 paket	3.500.000	APBD	7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	20 paket	3.500.000	
		15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang terbayar	Kec. Manggis	730 exemplar	5.000.000	APBD	7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang terbayar	730 exemplar	5.000.000	
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terbayar	-	-	
		17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbayar	Kec. Manggis	1000 kotak	20.000.000	APBD	7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbayar	1000 kotak	20.000.000	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Manggis	7 orang/kali	55.000.000	APBD	7	01	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terfasilitasi	7 orang/kali	55.000.000	
		19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar	Kec. Manggis	168 orang / tahun	173.000.000	APBD	7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan upah jasa tenaga pendukung administrasi keuangan yang terbayarkan	168 orang / tahun	173.000.000	Sub kegiatan ini khusus utk tenaga administrasi keuangan
		20	Penyediaan Biaya Canang Beban dan Piodalan	Jumlah sarana upakara yang terbayar	Kec. Manggis	3 paket	30.000.000	APBD	7	01	01	2.03	20	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah sarana upakara yang terbayar	1 Tahun	30.000.000	Kegiatan ini dimasukkan ke Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	Kec. Manggis	440 orang/kali	25.000.000	APBD									Kegiatan ini dimasukkan ke Sub Kegiatan yang sesuai dengan item belanja	
4.01	4.01.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	475.000.000		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	475.000.000		
		03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor (aula rapat) yang dibangun	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	01	2.03	Administrasi Umum				Kegiatan ini menjadi kewenangan Dinas PUPR	
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar	Kec. Manggis	2 unit	60.000.000	APBD	7	01	01	2.03	20	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar	2 unit	60.000.000	
		06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terbayar	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	01	2.03	21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terbayar	-	-	
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	Kec. Manggis	16 buah	50.000.000	APBD	7	01	01	2.03	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbayar	16 buah	50.000.000	
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	Kec. Manggis	10 unit	75.000.000	APBD	7	01	01	2.03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terbayar	10 unit	75.000.000	
		10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	01	2.03	25	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	
		16	Pengadaan Pembangunan Pelinggih dan Penyengker	Jumlah pelinggih dan penyengker yang terbangun	Kec. Manggis	-	-	APBD									Kegiatan ini menjadi kewenangan Dinas PUPR	
		21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Kec. Manggis	1 unit	25.000.000	APBD	7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 unit	25.000.000	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Manggis	3 unit	35.000.000	APBD	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	35.000.000	
														Jumlah bulan upah jasa tenaga keamanan (waker) yang terbayarkan	12 bulan	11.400.000	khusus utk tenaga keamanan (waker)	
														Jumlah halaman dan taman kantor yang terbangun	-	-		
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kec. Manggis	8 unit	100.000.000	APBD	7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit	100.000.000	
														Jumlah bulan upah jasa tenaga sopir yang terbayarkan	12 bulan		khusus utk tenaga sopir	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kec. Manggis	5 Paket	20.000.000	APBD	7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 Paket	20.000.000	
		30	Pemeliharaan rutin/berkala taman	Jumlah taman yang terpelihara	Kec. Manggis	2 Taman	10.000.000	APBD	7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala taman	Jumlah taman yang terpelihara			masuk ke sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
1			2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	
			42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah penyengker gedung kantor yang direhab	Kec. Manggis	1 unit	100000000	APBD	7	01	01	2.03	37	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah penyengker gedung kantor yang direhab	1 unit	100.000.000	
			46	Penataan halaman dan taman kantor	Jumlah halaman dan taman kantor yang terbangun	Kec. Manggis	-	-	APBD										Kegiatan ini masuk pada Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01	4.01.13	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persentase laporan Capaian Kinerja yang tepat waktu	Kec. Manggis	100%	10.000.000	APBD	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan Capaian Kinerja yang tepat waktu	100%	10.000.000	
										7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan				
			04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Manggis	5 Dokumen	3.000.000	APBD	7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 Dokumen	3.000.000	
			06.	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kec. Manggis	6 Dokumen	7.000.000	APBD	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan				
										7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan tersusunnya pelaporan	12 bulan	-	
										7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
										7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah bulan tersusunnya dokumen perencanaan	12 bulan	-	
4.01	4.01.13	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tepat waktu	Kec. Manggis	70%	20.000.000	APBD	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tepat waktu	70%	20.000.000	
			01	Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa yang rancangan APB desanya dievaluasi	Kec. Manggis	12 desa	20.000.000	APBD	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
										7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang rancangan APB desanya dievaluasi	12 desa	20.000.000	
2.06	4.01.13	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukannya terdata	Kec. Manggis	95%	15.000.000	APBD	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukannya terdata	95%	15.000.000	
			18	Penertiban Penduduk Pendetang	Jumlah Desa yang terdata penduduk pendatangnya	Kec. Manggis	6 desa	15.000.000	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
1				2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang terdata penduduk pendatangnya	6 desa	15.000.000	
2.16	4.01.13	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang mendapat pembinaan	Kec. Manggis	95%	45.000.000	APBD	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Adat, Seni dan Budaya yang mendapat pembinaan	95%	45.000.000	
			01	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah lembaga tradisional yang mendapat pembinaan	Kec. Manggis	4 lembaga tradisional	25.000.000	APBD	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga tradisional yang mendapat pembinaan	4 lembaga adat	45.000.000	
			04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah peserta lomba nyastra dan kewanitaan yang terfasilitasi mengikuti pra PKB	Kec. Manggis	30 orang	20.000.000	APBD										Kegiatan ini digabung menjadi satu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.07	4.01.13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya	Kec. Manggis	90%	10.000.000	APBD	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang terfasilitasi tim penanggulangan kemiskinannya	90%	10.000.000	
			11	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Manggis	1 Kegiatan	10.000.000	APBD	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
										7	01	01	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang masyarakatnya terdata oleh tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	12 Desa	10.000.000	
2.07	4.01.13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik	Kec. Manggis	90%	33.000.000	APBD	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik	90%	33.000.000	
										7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
			04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa yang termonitor dan terevaluasi pembangunannya	Kec. Manggis	12 desa	13.000.000	APBD	7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang termonitor dan terevaluasi pembangunannya	12 desa	13.000.000	
			05	Penilaian Lomba Desa	Jumlah desa yang terbina	Kec. Manggis	2 desa	20.000.000	APBD	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang terbina	2 desa	20.000.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
2.07	4.01.13	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Persentase desa dengan kapasitas aparatur pemerintahan desanya baik	Kec. Manggis	60%	5.000.000	APBD	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kapasitas aparatur pemerintahan desanya baik	60%	5.000.000	
			06	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahannya	Kec. Manggis	12 desa	5.000.000	APBD	7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan				Kegiatan ini digabung jadi 1 sub kegiatan dgn kegiatan
										7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	12 desa	5.000.000	
1.05	4.01.13	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan	Kec. Manggis	100%	100.000.000	APBD	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	-	
			22	Perayaan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah yang terlaksana	Kec. Manggis	2 Perayaan	100.000.000	APBD	7	01	01	2.03		Administrasi Umum				
										7	01	01	2.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	1 perayaan	70.500.000	Khusus yang output menghias kantor, pameran dan upacara
										7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terlaksananya Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	100%	45.000.000	
										7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	1 perayaan	45.000.000	Khusus yang outputnya berupa parade budaya atau festival
2.02	4.01.13	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan desa yang terfasilitasi dalam pembangunan	Kec. Manggis	90%	25.000.000	APBD	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase organisasi perempuan desa yang terfasilitasi dalam pembangunan	90%	25.000.000	
			01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kader WHDI desa dan kecamatan yang terbina	Kec. Manggis	20 orang	10.000.000	APBD	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
										7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader WHDI desa dan kecamatan yang terbina	20 orang	10.000.000	
			08	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah PKK desa yang terbina	Kec. Manggis	2 desa	15.000.000	APBD							Jumlah PKK desa yang terbina	2 desa	15.000.000	Kegiatan ini digabung menjadi satu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13				
1.02	4.01.13	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	Kec. Manggis	75%	10.000.000	APBD	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	75%	10.000.000		
			08	Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Jumlah sekolah yang terbina tentang penyakit kanker dan penangulangannya	Kec. Manggis	3 sekolah	10.000.000	APBD	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
										7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang terbina tentang penyakit kanker dan penangulangannya	3 sekolah	10.000.000	
2.13	4.01.13	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase duta olahraga kecamatan yang berprestasi	-	-		
			06	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlit duta kecamatan yang terpasilitasi dalam kompetisi olah raga	Kec. Manggis	-	-	APBD	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang Olahraga yang dapat berpartisipasi dalam Porkab	10 cabang olahraga	-	
4.03	4.01.13	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Desa yang Terakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	Kec. Manggis	90%	20.000.000	APBD	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Desa yang Terakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	90%	20.000.000		
			09	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	Kec. Manggis	150 usulan	20.000.000	APBD	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
										7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan desa yang terakomodir pada musrenbang kecamatan	150 usulan	20.000.000	
2.05	4.01.13	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan	Kec. Manggis	20%	5.000.000	APBD	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Desa yang mendapat pembinaan pencemaran dan perusakan lingkungan	20%	5.000.000		
			19	Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Jumlah desa yang terbina kesadaran lingkungannya	Kec. Manggis	1 Desa	5.000.000	APBD	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ket.	
1				2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	
										7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Pakraman yang Mendapat Pembinaan	1 Desa pakraman	5.000.000	
1.05	4.01.13	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Desa dengan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Manggis	70%	2.500.000	APBD	7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	0,70	2.500.000	
			08	Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah desa yang dibina dalam penanganan komplik sosialnya.	Kec. Manggis	12 desa	2.500.000	APBD	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				
										7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah desa yang dibina dalam penanganan komplik sosialnya.	12 desa	2.500.000	
4.01	4.01.13	37		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan perijinan goes to banjar	Kec. Manggis	95%	15.000.000	APBD	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan, non perijinan dan pelayanan perijinan goes to banjar	95%		
			03	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Jumlah ijin dan non perijinan yang diterbitkan	Kec. Manggis	100 buah	15.000.000	APBD	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
										7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	100 rekomendasi	20.000.000	
										7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan non perijinan yang dikeluarkan	500 rekomendasi	20.000.000	

36. INSPEKTORAT DAERAH

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
				Terselenggaranya surat menyurat 12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat selama 12 bulan	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum surat menyurat selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	01
				Terselenggaranya komunikasi serta terpenuhinya kebutuhan air dan listrik 12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum melalui Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	02
				Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan (5 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum melalui Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	06
				Terselenggaranya penyediaan ATK 12 bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum melalui Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	10
				Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum melalui Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	11
				Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum melalui Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	12
				Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga kantor	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan administrasi umum melalui penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	14

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Terselenggaranya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan Administrasi umum melalui penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	15
				Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan administrasi umum melalui penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	17
				Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Administrasi Umum	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah melalui perjalanan dinas luar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	18
				Terselenggaranya pembayaran upah non PNS	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Terselenggaranya pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Keuangan selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	07
				Tersedianya bebanten piodalan dan canang 12 bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk upacara keagamaan selama 12 bulan	Administrasi Umum	Terselenggaranya upacara keagamaan dikantor selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	16
				Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah													
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur												
				Tersedianya peralatan gedung kantor (6 Laptop, 3 Kendaraan roda dua, Printer, AC Ruangan dan peralatan lainnya)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor berupa Laptop/Komputer, Kendaraan roda dua, Printer, AC Ruangan dan peralatan lainnya	Administrasi Umum	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Laptop/Komputer, Kendaraan roda dua, Printer, AC Ruangan dan peralatan lainnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	24
				Tersedianya meblair kantor (3 Kursi eselon IV, 5 Buah Kursi Eselon III, 30 kursi kerja)	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor, berupa Kursi Eselon III dan IV dan kursi kerja lainnya	Administrasi Umum	Terselenggaranya pengadaan mebeleur kantor, berupa Kursi Eselon III dan IV dan kursi kerja lainnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	25

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Terpeliharanya bangunan/gedung/pagar halaman/taman 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	28
				Terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala	Administrasi Umum	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	34
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Terpenuhi Laporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu													
				Terselenggaranya LAKIP dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan melalui Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.02	06
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Nasionalisme/Kebangsaan													
				Terselenggaranya perayaan hari -hari besar nasional	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan-bahan logistik kantor untuk Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.03	16
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah													
				Terselenggaran administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 12 bulan	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pemantauan Kinerja dan Keuangan melalui upaya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui upaya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui upaya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Terselenggaranya pengawasan fungsional (reguler)	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Audit Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan melalui pengawasan fungsional (Reguler)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui pengawasan Fungsional (Reguler)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui Pengawasan Fungsional (Reguler)	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	01
				Terlaksananya Sidak pada SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pemantauan Kinerja dan Keuangan melalui Pelaksanaan Inspeksi Mendadak / sidak	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan cara Inspeksi Mendadak / sidak	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan cara Inspeksi Mendadak/Sidak	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	03
				Terlaksananya koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Kabupaten Karangasem	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Evaluasi Kinerja dan Keuangan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi melalui Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	04
				Terlaksananya Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Karangasem	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Evaluasi Kinerja dan Keuangan melalui Kerjasama Survei Penilaian Integritas (SPI)	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas (SPI) melalui Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui Kerjasama Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.02	04
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan												
				Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2020	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Karangasem	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terhadap Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	04
				Terselenggaranya Reviu RKPD, RKA, LKPD, Probity audit, Laporan DAK, LPPD dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan terhadap RKPD, RKA, LKPD, Laporan DAK, Probity Audit, LPPD dan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Review Kinerja dan Keuangan terhadap RKPD, RKA, LKPD, Probity audit, Laporan DAK, LPPD dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terhadap Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
				Peningkatan Kompetensi APIP dari Level 2 ke Level 3, terselenggaranya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan BinteK APIP	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Sendiri serta Bimtek yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kompetensi APIP	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi APIP dari Level 2 ke Level 3, terselenggaranya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan BinteK APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	01	2.04	09	
			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Prosentase Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan														
				Terselenggaranya Laporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHKPN dan LHKASN yang dilaporkan	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya laporan Pemantauan LHKPN dan LHKASN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.02	03	
				Prosentase peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada SKPD melalui penerapan SPIP	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Audit Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan Internal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	04	
				Terbentuknya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang terbentuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Asistensi dan Pendampingan	Terbentuknya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	02	
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan praktek pungli														
				Terselenggaranya pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat dan Pengendalian Gartifikasi	Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Asistensi dan Pendampingan	Terselenggaranya pemeriksaan tertentu sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	01	
				Terlaksananya fasilitasi kegiatan satgas saber pungli Kab. Karangasem	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Saber Pungli yang ditindaklanjuti	Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli Kab. Karangasem	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	01	

37. BAPPELITBANGDA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4.03	4.03.01	01	01	Penunjang urusan pemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		Penunjang urusan pemerintahan	5	01			
										Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					5	01	01	2.03	
4.03	4.03.01	01	01			Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat							5	01	01	2.03	01
4.03	4.03.01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase air, listrik, telepon yang terbayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan air, listrik, telepon yang terbayar							5	01	01	2.03	02
4.03	4.03.01	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat/berijin							5	01	01	2.03	06
4.03	4.03.01	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase alat kebersihan yang diadakan dan jasa cleaning service yang terbayar							5	01	01	2.03	08
4.03	4.03.01	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang diadakan							5	01	01	2.03	10
4.03	4.03.01	01	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan							5	01	01	2.03	11
4.03	4.03.01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan							5	01	01	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4.03	4.03.01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia							5	01	01	2.03	15	
4.03	4.03.01	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yang tersedia								5	01	01	2.03	17
4.03	4.03.01	01	18			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah								5	01	01	2.03	18
4.03	4.03.01	01	19			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan	Volume tenaga kontrak yang terbayar	masuk pada sub kegiatan yang sesuai , sopir masuk di sub kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional, satpam masuk di sub kegiatan pemeliharaan rutin gedung/ kantor													
4.03	4.03.01	01	20			Penyediaan biaya banteng, bebanten piodalan	Persentase canang dan banteng yang tersedia untuk persembahyangan sehari-hari, piodalan dan persembahyangan ke pura sad kahyangan	Penyediaan bahan logistik kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor								5	01	01	2.03	16
4.03	4.03.01	01	26			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	kegiatan rapat koordinasi dalam daerah masuk pada sub kegiatan sesuai sebagai item belanja													
4.03	4.03.01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur														
4.03	4.03.01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda dua yang diadakan	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda dua yang diadakan								5	01	01	2.03	20
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat yang diadakan		Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat yang diadakan								5	01			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.03	4.03.01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan							5	01	01	2.03	24
4.03	4.03.01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang dipelihara							5	01	01	2.03	28
4.03	4.03.01	02	49			Pengadaan Garase	Jumlah garase/ tempat parkir yang diadakan													
4.03	4.03.01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara							5	01	01	2.03	30
4.03	4.03.01	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara							5	01	01	2.03	34
4.03	4.03.01	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Bappelitbangda Kabupaten Karangasem													
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan Bappelitbangda					5	01	01	2.01	
4.03	4.03.01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD dan laporan Keuangan) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA,DPA,RKAP dan DPPA yang tersusun							5	01	01	2.01	01
										Administrasi keuangan	Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan keuangan akhir tahun					5	01	01	2.02	
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu							5	01	01	2.02	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	jumlah laporan keuangan yang tersusun dan disampaikan tepat waktu							5	01	01	2.02	04
4.03	4.03.01	15				Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase dokumen data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditindaklanjuti					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, peningkatan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	02		
										Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah					5	01	02	2.01	
4.03	4.03.01	15	05			Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku Profil Daerah Kabupaten Karangasem	Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	jumlah buku profil daerah yang tersusun untuk informasi pembangunan							5	01	02	2.01	07
							Jumlah buku SIPD yang tersusun		Jumlah Buku SIPD yang tersusun untuk perencanaan pembangunan											
4.03	4.03.01	15	08			Pengembangan Program Sistem Perencanaan	Integrasi sistem perencanaan		Integrasi sistem perencanaan											
							Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi E Planning		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi E Planning											
4.03	4.03.01	16		Penunjang urusan pemerintahan	Kelitbangan	Program kerjasama pembangunan	Persentase inovasi masyarakat yang ditindaklanjuti					Program Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Kelitbangan	Penunjang urusan pemerintahan	5	05	02		
										Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah					5	05	02	2.04	
4.03	4.03.01	16	08			Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristik	proposal inovasi kabupaten Karangasem yang diusulkan	Penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	jumlah proposal inovasi kabupaten Karangasem yang diusulkan							5	05	02	2.04	01
							Sosialisasi HAKI		Sosialisasi HAKI											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.03	4.03.01	21		Penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dan ditindaklanjuti					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, peningkatan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	02		
										Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah					5	01	02	2.01	
4.03	4.03.01	21	09			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun							5	01	02	2.01	03
4.03	4.03.01	21	10			Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang tersusun	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang tersusun							5	01	02	2.01	01
							Jumlah dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang tersusun		Jumlah dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang tersusun											
4.03	4.03.01	21	26			Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem	Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem yang tersusun		Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem yang tersusun											
4.03	4.03.01	21	17	Penunjang urusan pemerintahan	Kelitbangan	Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangasem	Jumlah hasil kajian peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan					Program Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Kelitbangan	Penunjang urusan pemerintahan	5	05	02		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Jumlah hasil kajian bidang sosial dan kependudukan			Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase hasil Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti					5	05	02	2.01	
							Jumlah hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah hasil kajian peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan umum							5	05	02	2.01	02
										Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase hasil penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti					5	05	02	2.02	
								Penelitian dan pengembangan bidang aspek- aspek Sosial	Jumlah hasil kajian bidang sosial dan kependudukan							5	05	02	2.02	01
										Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti					5	05	02	2.03	
								Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan							5	05	02	2.03	04
												Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, peningkatan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	02		
										Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Persentase Tersusunnya dokumen evaluasi pembangunan daerah					5	01	02	2.03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.03	4.03.01	21	13			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersusun	Evaluasi Capaian Program/ kegiatan perangkat daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tersusun							5	01	02	2.03	03
						Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	KUA/PPAS; KUPA/PPASP; DPA dan DPPA	pindah ke BPKAD												
										Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil perencanaan pendanaan pembangunan daerah yang berkualitas					5	01	02	2.02	
4.03	4.03.01	21	16			Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah buku Laporan Akhir DAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah buku Laporan Akhir DAK							5	01	02	2.02	02
							Jumlah bukulaporan DAK per Triwulan		Jumlah bukulaporan DAK per Triwulan											
4.03	4.03.01	22		Penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi yang tersusun dan ditindaklanjuti					Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04		
										Fasilitasi dan monev Penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian yang tersusun					5	01	04	2.01	
4.03	4.03.01	22	19			Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian							5	01	04	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif yang tersusun					5	01	04	2.02	
4.03	4.03.01	22	16			Koordinasi dan Evaluasi perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, pariwisata	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Evaluasi perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, pariwisata	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi kreatif							5	01	04	2.02	01
									Jumlah Dokumen RoadMap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah di Kabupaten Karangasem yang											
										Fasilitasi dan monev Penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Persentase dokumen hasil fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam yang tersusun					5	01	04	2.03	
4.03	4.03.01	22	18			Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam							5	01	04	2.03	01
												Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, peningkatan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah			5	01	02		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah					5	01	02	2.01	
4.03	4.03.01	22	02			Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang tersusun	Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang tersusun							5	01	02	2.01	09
4.03	4.03.01	23		Unsur penunjang urusan pemerintahan	perencanaan	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang ditindaklanjuti					Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase terlaksananya perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	Perencanaan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	01	03		
										Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Persentase terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring evaluasi Dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia					5	01	03	2.02	
4.03	4.03.01	23	06			Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip							5	01	03	2.02	01
										Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring evaluasi Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan					5	01	03	2.01	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.03	4.03.01	23	07			Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	Jumlah laporan Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan	jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							5	01	03	2.01	01
										Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring evaluasi Dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat					5	01	03	2.03	
4.03	4.03.01	23	09			Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan, jumlah laporan LP2KD	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa							5	01	03	2.03	01
									Jumlah laporan LP2KD											
4.03	4.03.01	24		Unsur penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase dokumen hasil perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersusun dan ditindaklanjuti					PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase terlaksananya perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan	5	01	05		
										Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan					5	01	05	2.03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4.03	4.03.01	24	04			Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata Ruang dan pertanahan	Jumlah laporan koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata Ruang dan pertanahan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah buku laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan							5	01	05	2.03	01	
4.03	4.03.01	24	05			Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran	Jumlah laporan koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan pemukiman dan pemadam kebakaran										5	01	05	2.03	01
										Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase terlaksananya fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan					5	01	05	2.02		
4.03	4.03.01	24	06			Koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	Jumlah laporan koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah buku laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan							5	01	05	2.02	03	
										Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup					5	01	05	2.01		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah buku laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup							5	01	05	2.01	01	
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya hari-hari besar nasional dan daerah														
						Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Frekuensi Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah				5	01	01	2.03	16

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																		
4.04		Keuangan																	
4.04.01			Program Pelayanan administrasi perkantoran																
4.04.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya pelayanan surat menyurat	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	01		
4.04.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan komunikasi, sumber daya listrik dan air	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	02		
4.04.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya sarana administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	07		
4.04.01.10			Penyediaan alat tulis kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	10		
4.04.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	11		
4.04.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya fasilitas penerangan gedung kantor	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	12		
4.04.01.14			Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	14		

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
4.	04	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	15
4.	04	01	17			Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta tamu	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	17
4.	04	01	18			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	18
4.	04	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan										Dimasukan sbg item belanja pada sub kegiatan yang bersesuaian				
4.	04	01	20			Pengadaan biaya canang, bebanten piodalan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya biaya canang, bebanten dan piodalan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	16
4.	04	01	26			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah										Dimasukan sbg item belanja pada sub kegiatan yang bersesuaian				
4.	04	02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
4.	04	02	03			Pembangunan gedung kantor										Menjadi kewenangan Dinas PUPR				
4.	04	02	05			Pengadaan Kendaraan dinas / operasional		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya tambahan sarana operasional kendaraan roda dua	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	20
4.	04	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	22

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang diadakan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	24
								Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah unit mesin absensi yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.04	01
4.	04	02	10			Pengadaan mebeleur		Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	25
4.	04	02	22			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	28
4.	04	02	24			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/ operasional kondisi baik dan rusak ringan yang terpelihara	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	30
4.	04	02	28			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	34
4.	04	02	29			Pemeliharaan mebeleur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase mebeleur yang terpelihara	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	35
4.	04	02	42			Rehab sedang /berat gedung kantor		Rahabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Penataan halaman kantor	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	38
4.	04	06				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4.	04	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja PD yang tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	06	
						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan perundang - undangan	Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.01	01	
4.	04	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase pelaporan keuangan akhir tahun Perangkat daerah yang tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	09	
4.	04	16				Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah													
4.	04	16	03			Persertifikatan tanah		koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disertifikatkan ; Jumlah bidang aset yang difasilitasi	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	07	
4.	04	17				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
4.	04	17	05			Penyusunan rancangan peraturan daerah / peraturan kepala daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah		Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah/rancang-an perkara tentang pajak daerah yang tersusun	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase tersusunnya regulasi dalam rangka pemungutan pendapatan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	04	2.02	02	
						Penyusunan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase jenis pajak yang tersedia standar operasional prosedurnya	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase tersusunnya regulasi dalam rangka pemungutan pendapatan daerah	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi penerimaan Pajak Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	04	2.02	03	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	17	06			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku rancangan peraturan APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan daerah tentang APBD yang tercetak Jumlah rancangan keuangan Jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tercetak	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	05
4.	04	17	07			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD		Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku rancangan peraturan APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan daerah tentang APBD yang tercetak Jumlah rancangan keuangan Jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tercetak	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	05
								Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah verifikasi RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan dan Review DPA SKPD /Perubahan DPA SKPD	Jumlah review/ verifikasi DPA/ Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	04
4.	04	17	08			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang tercetak Jumlah rancangan perubahan nota keuangan Jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah buku peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	06
4.	04	17	09			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang tercetak Jumlah buku peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang tercetak Jumlah rancangan perubahan nota keuangan Jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																			
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE										
							Jumlah buku peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
						Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	<p>Jumlah regulasi yang tersusun</p> <p>Persentase penataan dokumentasi bidang anggaran</p> <p>Jumlah Dokumen SIKD APBD dan Perubahan APBD</p> <p>Jumlah Dokumen perhitungan kemampuan keuangan daerah</p> <p>Jumlah Dokumen sumber pendanaan anggaran</p>	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	08						
4.	04	17	10			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang tersusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	5	02	02	2.03	04						
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	<p>Laporan Keuangan Pemda Semesteran yang tersusun</p> <p>Laporan Keuangan Pemda Tahunan yang tersusun</p> <p>Laporan Ikhtisar Kekayaan Desa yang tersusun</p> <p>Laporan Ikhtisar Realisasi APBD Desa yang tersusun</p>	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	05						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan analisis aas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	08
4.	04	17	11			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah buku peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang tersusun Jumlah laporan realisasi anggaran (Bulanan & Triwulan) yang tersusun Laporan Prognosis dan LO Triwulanan yang tersusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	02
								Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (Bank, SKPKD dan PD, pendapatan pajak daerah) yang terselesaikan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	07
								Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan realisasi PAD Persentase posting data dan penginputan jurnal penerimaan dan pengeluarankas daerah dan buku rekening	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	01
								Verifikasi dan Pengajuan Bukti Memorial	Jurnal Koreksi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terpenuhi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	06
4.	04	17	16			Peningkatan manajemen aset / barang daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah/ pengguna barang yang terdata asetnya	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	05
4.	04	17	21			Pendataan dan penghapusan aset – aset daerah (inventaris barang yang rusak)		Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah/ yang terfasilitasi data asetnya untuk digunakan, dimanfaatkan, dimusnahkan dan dihapuskan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	09
4.	04	17	26			Penentuan dan penetapan pajak daerah		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pajak terutang yang diterbitkan ketetapannya	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah yang terlaksana	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09
4.	04	17	37			Penanganan Keberatan pajak		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Persentase permohonan keringanan, pengajuan keberatan dan banding yang tertangani	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah yang terlaksana	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	07
4.	04	17	38			Intensifikasi pengelolaan BPHTB		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pengajuan validasi BPHTB yang terlayani Tercapainya target penerimaan BPHTB	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah yang terlaksana	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09
4.	04	17	39			Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase objek pajak reklame yang lunas pajak	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah yang terlaksana	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	17	40			Penyusunan database wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah		Pemeliharaan dan Pemuktahiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pajak daerah yang terdata dalam database wajib pajak daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengambangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09
4.	04	17	46			Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dokumen kebijakan petunjuk teknis perbendaharaan keuangan daerah Dokumen SK Pengelola Keuangan dan peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	09
								Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah Persentase SKPD dengna penyerapan keuangan sesuai target Jumlah dokumen anggaran kas Jumlah dokumen SPD SKPD Persentase terselenggaranya penatausahaan pembiayaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alisan Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Laporan aliran kas Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Kas Perangkat daerah/unit kerja yang terkoneksi dengan Simda Keuangan dengan baik	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	06
4.	04	17	47			Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.04	11
4.	04	17	48			Intensifikasi pengelolaan PBB-P2		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09
									Persentase terlaksananya kerjasama updating data subjek dan objek pajak PBB-P2 dengan pihak ketiga											
									Persentase tercapainya target penerimaan PBB-P2											
4.	04	17	49			Monitoring dan penyuluhan pajak daerah		Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak yang dimonitoring	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat	jumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (media elektronik, billboard, tax gathering)	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	05
4.	04	17	50			Pendataan pajak daerah		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase wajib pajak official assesment yang didata objek pajaknya	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	09
4.	04	17	52			Pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah		Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada	Jumlah jenis pajak yang diadakan penilaian wajib pajak teladan	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	05
4.	04	17	53			Pemeriksaan pajak daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	02	2.02	10
4.	04	17	54			Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah		Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	a. Persentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi komputer pengelolaan pajak daerah ; b. Persentase masa waktu pemeliharaan dan pengembangan website dalam setahun	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	08
						Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi			Persentase jenis pajak yang pelayanannya diterapkan pada tempat pelayanan terpadu	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	17	56			Penyusunan RKBM, RKPBM, DKBMD, dan DKPBMD		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	03	2.01	03
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	03	2.01	04
4.	04	17	57			Penagihan pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Persentase jenis pajak yang terlaksana tindak penagihannya	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	07
4.	04	17	58			Penagihan PBB-P2 dan BPHTB		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Persentase jenis pajak yang terlaksana tindak penagihannya	Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pajak daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	07
4.	04	17	59			Penanganan keberatan PBB-P2 dan BPHTB		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Persentase permohonan keringanan, pengajuan keberatan dan banding yang tertangani	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Keuangan	Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan	5	02	04	2.02	07
4.	04	17	60			Pembukuan PAD dan Pendapatan lainnya		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	a. tersusunnya Laporan Realisasi PAD; b. Terpostingnya data dan input jurnal penerimaan dan pengeluaran kas; c. Buku Besar Rekening	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	01
4.	04	17	61			Penyampaian dan fasilitasi dana perimbangan dan bagi hasil		Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pelaporan dana perimbangan dan dana transfer yang tersusun Persentase terlaksananya pelaporan SIKD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.02	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
									Persentase persyaratan dan pelaporan dana DAK Fisik dan DAK non fisik yang terpenuhi												
4.	04	17	62			Analisa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan		Penyusunan KUA dan PPAS	a. Jumlah buku rancangan KUA yang tersedia; b. Jumlah Buku rancangan PPAS yang tersedia; c. Jumlah buku KUA yang tersedia; d. Jumlah buku PPAS yang tersedia	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	02	
								Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	a. Jumlah buku rancangan Perubahan KUA yang tersedia; b. Jumlah Buku rancangan Perubahan PPAS yang tersedia; c. Jumlah buku Perubahan KUA yang tersedia; d. Jumlah buku perubahan PPAS yang tersedia	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen anggaran daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	02	
4.	04	17	63			Penyusunan laporan persediaan		Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	a. Persentase jumlah laporan BMD yang terfasilitasi ; b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan rekonsiliasi laporan persediaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesersentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	11	
4.	04	17	64			Optimalisasi pemanfaatan aset		Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	a. persentase BMD kondisi baik yang dimanfaatkan secara normal; b. Persentase BMD kondisi rusak berat yang dipindah tangankan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesersentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	10	
								Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase terfasilitasinya perangkat daerah atas penilaian BMD dalam rangka pemindah tanganan dan pemanfaatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesersentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	08	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	17	66			Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan daerah										Dimasukan sebagai item belanja pada sub kegiatan yang sesuai				
4.	04	17	67			Pengamanan Barang Milik Daerah		Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Darah	a. Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kab. Karangasem bersertifikat ; b. Jumlah bidang aset yang difasilitasi pengamanan fisik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesertentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	07
4.	04	17	70			Penatausahaan belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan		Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM tepat waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara-an Daerah	Terselenggara-nya koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara-an Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	04
4.	04	17	71			Pengelolaan administrasi gaji PNS Daerah		Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gajim serta Penerbitan SKPP	Persentase terkelolanya daftar gaji PNSD dan penerbitan SKPP	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara-an Daerah	Terselenggara-nya koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara-an Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	05
4.	04	18				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota														
4.	04	18	06			Pembinaan sistem penyusunan laporan pertanggung jawaban daerah		Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi penyusunan LKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang tepat Waktu	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.03	12
4.	04	21				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4.	04	21	01			Perayaan hari – hari besar nasional dan daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan dalam rangka perayaan hari - hari besar nasional dan daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.03	16
								Koordinasi dan Penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Jumlah dokumen informasi tentang standar satuan harga yang tersedia	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pesersentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan	Keuangan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	03	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah			X	XX	01		
			PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN			Administrasi Keuangan	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan					X	XX	01	2.02	
				Persentase pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Persentase pelaporan kinerja OPD yang terselesaikan							X	XX	01	2.02	06
				Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase pelaporan keuangan yang terselesaikan							X	XX	01	2.02	09
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Persentase penyelenggaraann administrasi Umum					X	XX	01	2.03	
				Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terkirimnya surat menyurat tepat waktu							X	XX	01	2.03	01
				Persentase terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Persentase rekening telepon, air, dan listrik yang terbayar							X	XX	01	2.03	02
				Persentase terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional yang terselamatkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	persentase perizinan kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan							X	XX	01	2.03	06
				Persentase terbayarnya jasa dan bahan alat kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terbayarnya jasa dan pemenuhan bahan, alat kebersihan							X	XX	01	2.03	08
				Persentase terpenuhinya alat tulis kantor pada BKPSDM	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia							X	XX	01	2.03	10
				Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							X	XX	01	2.03	11
				Persentase tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi /penerangan bangunan kantor yang tersedia							X	XX	01	2.03	12
				Persentase tersedianya bahan bacaan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia							X	XX	01	2.03	15
				Persentase terbayarnya pelaksanaan upacara/upakara keagamaan yang terlaksana	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor dan perayaan hari-hari besar kebangsaan/daerah							X	XX	01	2.03	16
				Persentase penataan halaman dan taman kantor													
			PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH													
				Persentase perayaan HUT RI dan HUT Kota Amlapura													
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran													
				Persentase tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan makanan & minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia							X	XX	01	2.03	17
				Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang terbayar							X	XX	01	2.03	18
				Persentase terbayarnya jasa tenaga pendukung, administrasi, teknis/keamanan													
				Persentase perjalanan dinas dalam daerah yang terbayar													
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia							X	XX	01	2,03	20
				Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase kelengkapan gedung kantor yang tersedia							X	XX	01	2,03	22
				Persentase tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase tersedianya peralatan gedung kantor							X	XX	01	2,03	24
				Persentase tersedianya mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Persentase pengadaan mebeleur yang tersedia							X	XX	01	2,03	25
				Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terselesaikan							X	XX	01	2,03	28
				Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional yang ada	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							X	XX	01	2,03	30
				Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							X	XX	01	2,03	34
				Persentase terseleskannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Persentase rehabilitasi sedang/berat gedung yang terselesaikan							X	XX	01	2,03	38
			PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur					X	XX	01	2,04	
				Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	Persentase pengadaan bahan pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia							X	XX	01	2,04	05
									PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	KEPEGAWAIAN		5	03	02		
							Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase terpenuhinya Data dan Informasi ASN yang Akurat					5	03	02	2	
				Persentase Jumlah Dokumen/Arsip Kepegawaian yang disimpan dan dikelola	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Sistem Informasi Kepegawaian							5	03	02	2,01	03
				Persentase Usul Konversi NIP dan KPE yang diproses dan didistribusikan													
				Persentase Jumlah Karpis, Karis dan Karsu yang terselesaikan													
				Jumlah buku laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase terpenuhinya laporan data kepegawaian							5	03	02	2,01	04
				Persentase terpenuhinya buku data informasi kepegawaian													
							Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian terselesaikan					5	03	02	2,02	
				Jumlah peserta yang lulus tes CPNS	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase terpenuhinya analisis kebutuhan, formasi, serta pengadaan ASN							5	03	02	2,02	01
				Jumlah aparatur yang diambil sumpah janji dan penyerahan SK yang terselesaikan													
				Persentase pelaksanaan Penyelesaian Penyusunan Kebutuhan ASN													
				Persentase Terpenuhinya Buku Laporan Data Kepegawaian Semesteran													
				Persentase penyelesaian SK pensiun PNS/Aparatur tepat waktu	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Persentase pemberian pensiun yang terselesaikan							5	03	02	2,02	04
				Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS/Aparatur yang SK kenaikan pangkatnya terselesaikan							5	03	02	2,02	10
							Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase peningkatan kapasitas ASN					5	03	02	2,03	
				Jumlah PNS/aparatur yang mengikuti penyesuaian ijazah / Ujian Dinas	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase peningkatan kapasitas ASN sesuai kompetensi							5	03	02	2,03	01
				Jumlah PNS/Aparatur yang mengikuti pembinaan teknis kepegawaian													
				Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase Penyelesaian Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan ketentuan berlaku							5	03	02	2,03	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				Persentase pelaksanaan kegiatan KORPRI	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN lainnya)	Persentase terselenggaranya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN							5	03	02	2.03	04
			Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dalam Rangka meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah													
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Dasar Bagi CPNS dan/atau Diklat Penjurangan							5	03	02	2.03	08
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	JUMLAH PEGAWAI ASN YANG DI IKUTKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													
				Jumlah CPNS yang lulus Diklat Dasar/Prajabatan													
				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat teknis, Fungsional dan kepemimpinan													
							Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi					5	03	02	2.04	
				Persentase jumlah penempatan PNS/aparatur yang dapat terselesaikan	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karir dan Promosi ASN sesuai Pola Karir dan kompetensi							5	03	02	2.04	01
							Pembinaan ASN	Persentase ASN yang terbina					5	03	02	2.05	
				Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur							5	03	02	2.05	02
				Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan SLKS sesuai usulan							5	03	02	2.05	03

40. DINAS KETENAGAKERJAAN

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
2.01			Wajib Bukan Pelayanan Dasar										Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan dasar	2	
2.01	01.01		Tenaga Kerja									Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		2	07
2.01	01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah			2	07 01
							Administrasi Umum	Terselenggaranya administrasi kegiatan						2	07 01 2.03
2.01	01.01	01 01		Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat							2	07 01 2.03 01
2.01	01.01	01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa telepon, air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa telepon, air dan listrik							2	07 01 2.03 02
2.01	01.01	01 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							2	07 01 2.03 06
2.01	01.01	01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor							2	07 01 2.03 10
2.01	01.01	01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							2	07 01 2.03 11
2.01	01.01	01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat elektronik dan listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat elektronik dan listrik							2	07 01 2.03 12
2.01	01.01	01 14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga							2	07 01 2.03 14
2.01	01.01	01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, bacaan lain di kantor	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, bacaan lain di kantor							2	07 01 2.03 15
2.01	01.01	01 20		Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Terlaksananya piodalan dan banten sehari-hari	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor							2	07 01 2.03 16
2.01	01.01	01 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman							2	07 01 2.03 17
2.01	01.01	01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							2	07 01 2.03 18
2.01	01.01	01 19		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan										
2.01	01.01	01 26		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah										
2.01	01.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
2.01	01.01	02 09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor							2	07 01 2.03 24
2.01	01.01	02 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor , penataan halaman kantor dan pemeliharaan jalan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor , penataan halaman kantor dan pemeliharaan jalan							2	07 01 2.03 28
2.01	01.01	02 28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebeulair	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor, komputer dan mebeulair							2	07 01 2.03 34
2.01	01.01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										2	07 01 2.01
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
2.01	01.01	06 06		Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan	Tersusunnya laporan tepat waktu									2	07 01 2.01 01
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah							2	07 01 2.01 02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
							Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi Perangkat Daerah								2	07	01	2.01	03
2.01	01.01	15			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi				2	07	03		
									Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi						2	07	03	2.01	
2.01	01.01	15	06		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi								2	07	03	2.01	01
2.01	01.01	15	07		Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana BLK														
2.01	01.01	15	10		Penyajian calon magang ke dalam negeri dan luar negeri	Jumlah calon magang yang mendapat pelatihan														
									Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan						2	07	03	2.02	
2.01	01.01	15	11		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Lembaga Kursus	Jumlah lembaga pelatihan/kursus mendapat pembinaan ()	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan/kursus mendapat pembinaan ()								2	07	03	2.02	01
									Konsultasi produktivitas Pada Perusahaan kecil	terselenggaranya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil						2	07	03	2.04	
2.01	01	15	12		Pembinaan Tenaga Kerja Kelompok-Kelompok Usaha di Pedesaan/Perkotaan	Jumlah tenaga kerja produktif di pedesaan/perkotaan yang mendapat pelatihan	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah usaha kecil yang mendapat pelatihan peningkatan produktivitas								2	07	03	2.04	01
												Tingkat produktivitas kabupaten/kota				2	07	03	2.05	
2.01	01.01	15	xx		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	tingkat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja								2	07	03	2.05	01
2.01	01.01	16			Peningkatan Kesempatan Kerja						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan				2	07	04		
																2	07	04	2.01	
2.01	01.01	16	05		Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah penganggur yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Sumberdaya pelayanan antar kerja yang disediakan								2	07	04	2.01	01
									Pelayanan Antarkerja	Jumlah pelayanan antar kerja yang diberikan						2	07	04	2.01	02
									Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan					2	07	04	2.01	03	
																2	07	04	2.02	
2.01	01.01	16	01		Penyusunan informasi bursa kerja	Informasi lowongan kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya sumber daya perizinan LPTKS								2	07	04	2.02	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
							Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian LPTKS								2	07	04	2.02	02
									Pengelolaan Informasi Pasar kerja	Tersedianya informasi pasar kerja						2	07	04	2.03	
							Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja online								2	07	04	2.03	01
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah informasi pasar kerja online yang disediakan								2	07	04	2.03	02
																2	07	04	2.03	03
									Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan						2	07	04	2.05	
2.01	01.01		16	09		Pendaftaran tenaga kerja asing	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ()	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan ()							2	07	04	2.05	01
																2	07	04	2.04	
2.01	01.01		16	10		Kegiatan Padat Karya	Terserapnya tenaga kerja di daerah pedesaan													
																2	07	04	2.04	02
																2	07	04	2.04	03
2.01	01.01		17			Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial				2	07	05		
																2	07	05	2.02	
2.01	01.01		17	02		Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Prosentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan							2	07	05	2.02	01
																2	07	05	2.02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2.01	01.01	17	15		Pembinaan dalam rangka pembentukan LKS bipartit pada perusahaan	Jumlah LKS Bipartit yang dibina pada Perusahaan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah LKS Bipartit yang dibina pada Perusahaan						2	07	05	2.02	03
							Pelaksanaan Operasional Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional tripartit						2	07	05	2.02	04
2.01	01.01	17	09		Penetapan besaran upah minimum kabupaten	Penetapan besaran UMK												
								Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan					2	07	05	2.01	
2.01	01.01	17	16		Pembinaan dalam rangka pembentukan SP/SB pada perusahaan	Jumlah SP/SB yang dibina pada Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan						2	07	05	2.01	01
							Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan						2	07	05	2.01	02
2.01	01.01	17	03		Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Prosentase pekerja dan pengusaha secara umum yang mendapat perlindungan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ikut program jaminan sosial tenaga kerja						2	07	05	2.01	03
1.05																		
1.05	2.01	17			Pengembangan Wawasan Kebanosaan													
1.05	2.01	17	22		Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya hari-hari besar nasional dan daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor										
3.08				Pilihan									Urusan Pemerintah Pilihan	3				
	2.01												Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	32			
3.08				Transmigrasi														
3.08	2.01	17			Transmigrasi Lokal	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang dibina				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan			3	32	03		
								Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan					3	32	03	2.01	
3.08	2.01	17	03		Transmigrasi Lokal	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang dibina	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan						3	32	03	2.01	05

41. SAT POL PP

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.05	02	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Satuan Polisi Pamong Praja									Urusan Wajib Pelayanan Dasa	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	02					
		01			Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara					01				
		01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani									2.03	01	
		02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											02
		08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											08
		10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											10
		11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku yang tercetak dan tergandakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											11
		13			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpakai	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpakai	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											13
		14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dapat disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dapat disediakan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											14
		15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran bacaan lain yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yg tertangani											15

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
		16			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dapat terpakai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dapat terpakai									16	
		17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani							17	
		18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase layanan adminstrasi umum yg tertangani							18	
		19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Tersedianya Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan												
		20			Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	Terlaksananya Piodalan dan Sesajen			Kegiatan yang belum terakomodir									
		26			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah												
1	05	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara				2	12	01
		24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Persentase terpeliharanya kendaraan Dinas/Oprasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase terpeliharanya kendaraan Dinas/Oprasional								30
		28			Pemeliharaan Rutin/Bekala Peralatan Gedung Kantro	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor								32
1	05	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
		09			Tes Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Lulus Tes Kesamaptaan Satpol.PP	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Kegiatan Belum Terakomodir									
		12			Pembinaan dan Latihan Korsik	Jumlah Pembinaan dan Latihan Korsik yang dapat dilakukan												
1	05	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tersusunnya Laporan Profil			2	12	05	2.01
		01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Kinerja SKPD yang dapat tersusun tepat waktu			Kegiatan yang belum terakomodir									
1	05	15			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan												
		10			Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara	Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara yang dapat dilakukan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kegiatan yang belum terakomodir									
		12			Pelatihan bagi Anggota Hansip /Linmas	Jumlah Anggota Hansip/Linmas yang akan dilatih	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											
		14			HUT Linmas	Jumlah Anggota Hansip/Linmas yang terlibat dalam HUT Linmas												
1	05	16			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
		06			Peningkatan Tindakan Deteksi Dini Terhadap Pelanggaran perda dan Perkada	Jumlah Tindakan Deteksi Dini terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang dapat dilakukan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kegiatan yang belum terakomodir									
1	05	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan												
		22			Perayaan hari-hari besar Nasional dan Daerah	Jumlah Perayaan Hai-Hari Besar Nasional dan daerah yang dilaksanakan		Kegiatan yang belum terakomodir										
1	05	23			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum												
		01			Patroli Wilayah	Jumlah Patroli Wilayah yang dapat dilakukan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
		02			Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda yg terlaksana	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kegiatan yang belum terakomodir										
		06			gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah keikutsertaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam gelar Pasukan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan yang belum terakomodir										
		08			Penertiban KTP di Pelabuhan Padang bai	Jumlah penertiban KTP di Pelabuhan Padangbai yang dapat dilakukan	Pindah ke Cakil											
1	05	26			Program penataan peraturan perundang-Undangan	Persentase meningkatnya penataan peraturan perundang-Undangan												
		15			Operasi Yustisi Produk Hukum	Jumlah Operasi Yustisi yang dapat dilaksanakan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kegiatan yang belum terakomodir										